SALINAN

BUPATI TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah yang dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik;

b. bahwa semakin kompleksnya kehidupan bermasyarakat saat ini, mengakibatkan pengaturan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan akibat berbagai keterbatasan di daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan bagi masyarakat yang berada di dalamnya;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024, maka Rencana Jangka Menengah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023.

Pasal I...

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RPJMD tahun 2019-2023 berpedomanpada:

a. rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024;
b. RPJPD Provinsi Banten 2005-2025;
c. RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025;
d. rencana tata ruang wilayah kabupaten 2011-2031;
e. RPJMD kabupaten/kota sekitar; dan
f. kajian lingkungan hidup strategis.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sistematika RPJMD tahun 2019-2023 sebagai berikut:
   a. bab I, pendahuluan;
   b. bab II, gambaran umum kondisi Daerah;
   c. bab III, gambaran keuangan Daerah;
   d. bab IV, permasalahan dan isu strategis Daerah;
   e. bab V, visi, misi, tujuan, dan sasaran;
   f. bab VI, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah;

g. bab VII...

g. bab VII, kerangka pendanaan pembangunan dan program PD;

h. bab VIII, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

i. bab IX, penutup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian sistematika RPJMD tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2021-2022 berpedoman pada RPJMD tahun 2019-2023 dan perubahan RPJMD tahun 2019-2023.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lemparan Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A.ZAKIISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 1
NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN:
(1,13/2022)

Salinan Sesuai Dengan Asli
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BENI RACHMAT, SH.
19701207 199803 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023

I. UMUM

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

PasalI

Pasal 10 A

Dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tahun 2021 dan 2022 yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, merupakan bagian yang saling mengisi dan melengkapi dengan perubahan RPJMD.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 012022

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
TANGERANG TAHUN 2019-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan di setiap daerah. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah provinsi, kabupaten dan kota.

RPJMD Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, yang bersifat makro, memuat visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang telah memasuki tahun ke-3 di tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Bab VII tentang Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, dalam pasal 342 ayat (1) menyatakan :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan ketentuan di atas, Pemerintah Kabupaten Tangerang memutuskan untuk melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 karena ada perubahan yang mendasar, antara lain :

1. Dikeluarkannya Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga membutuhkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah,
2. Dikeluarkannya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
3. Dikeluarkannya Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
4. Terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan target pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023 harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan penganggaran daerah.

Di samping itu, penyusunan perubahan RPJMD ini juga memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah pusat setelah adanya pandemi Covid-19 dan juga memperhatikan kebijakan

pemerintah provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Tangerang. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program dan kegiatan secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

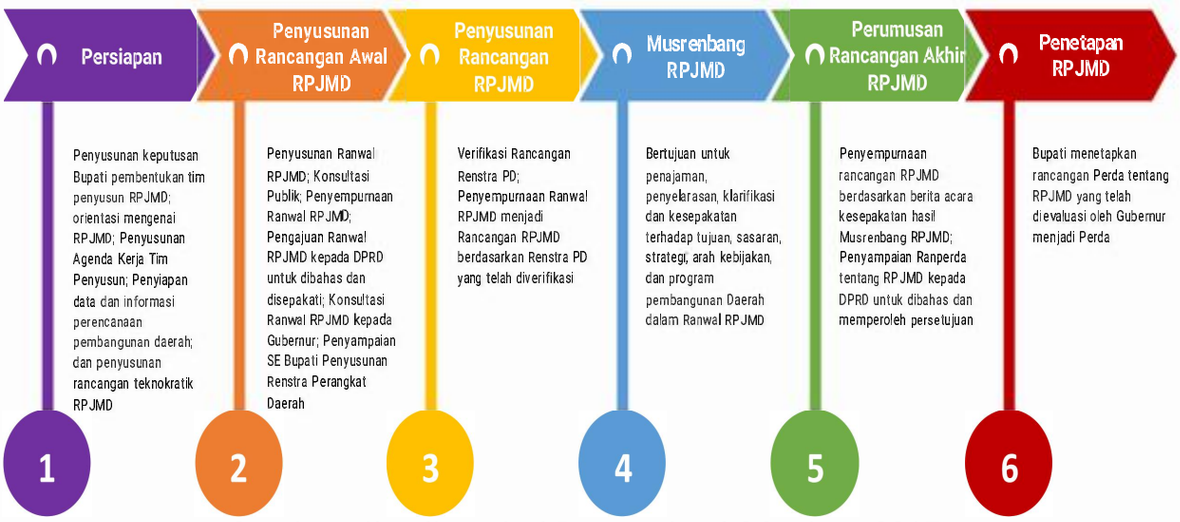
Oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang. Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan perubahan RPJMD berlaku *mutatis mutandis* atau berlaku sama persis sesuai tahapan penyusunan RPJMD. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang. Hal ini sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 344.

Dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD ini, ada 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa proses perencanaan dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (akademisi). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan *(stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan

menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, di mana rencana hasil proses atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat desa/kelurahan/kecamatan sampai kabupaten.

Gambar 1. Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan 6 (enam) tahapan



Sumber: disarikan dari Permendagri 86 tahun 2017

Perubahan RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam sisa masa perencanaan mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks penyusunan rancangan perubahan RPJMD ini adalah sangat penting untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan pada periode RPJMD 2 tahun sebelumnya, agar pijakan data dan informasi lebih akurat dan telah dianalisis secara akademis. Selain evaluasi hasil-hasil pembangunan, juga diperlukan evaluasi capaian kinerja keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah menjadi kunci penting dalam keberhasilan capaian dari target pembangunan yang telah ditetapkan dalam masa 2 tahun sebelumnya di periode RPJMD tersebut. Selain mengukur evaluasi kinerja keuangan daerah, analisis juga mencakup pengukuran kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Langkah selanjutnya adalah menentukan isu strategis apa saja yang perlu dihadapi, dibenahi, diperbaiki, dan diselesaikan dalam masa waktu perubahan RPJMD.

1.2 Dasar Penyusunan Perubahan RPJMD

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang atas dasar:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

8) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)

14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

18) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

27) Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

28) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

29) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

30) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022;

31) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12);

32) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;

33) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9).

1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi,

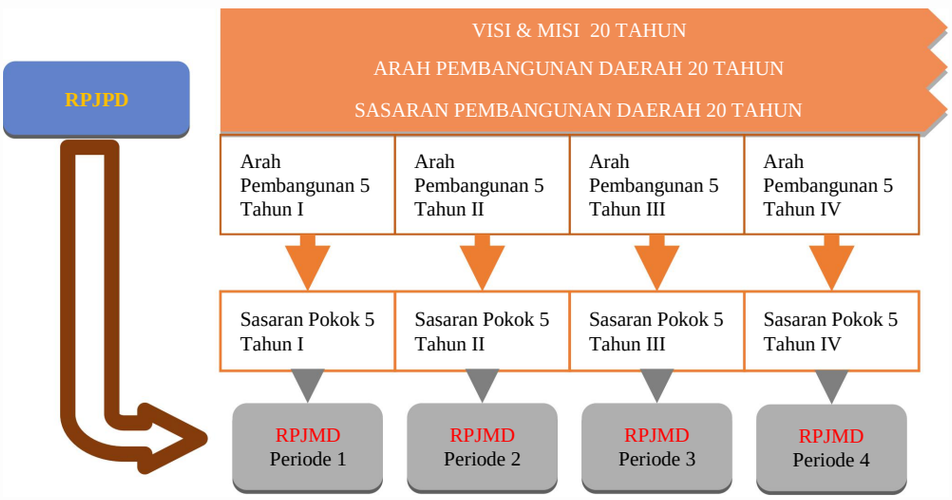
lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang, perlu memperhatikan dokumen perencanaan secara vertikal dan horizontal. Memperhatikan hal tersebut, maka hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan RPJMD bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

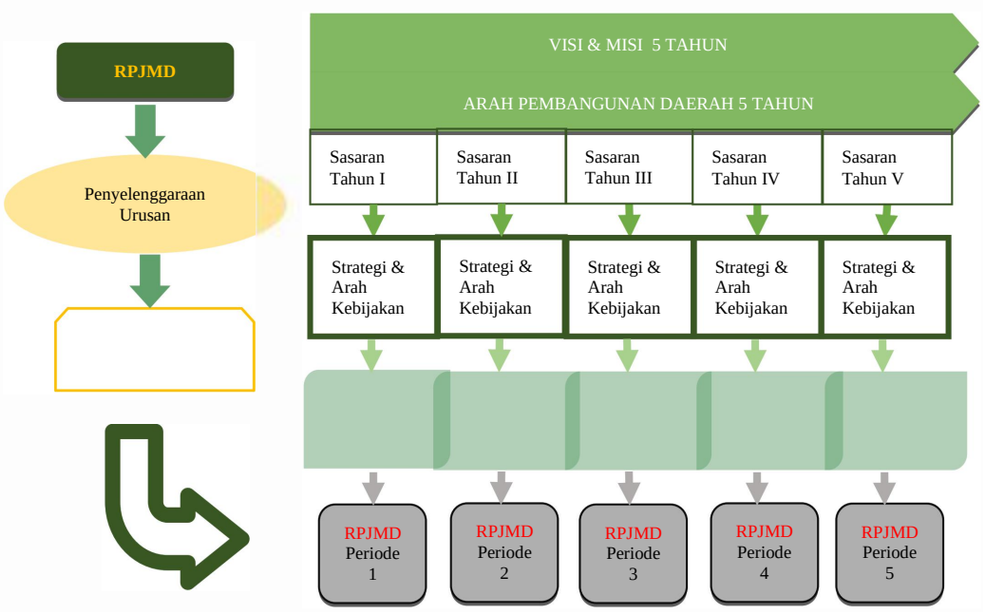
Selain itu, Dokumen RPJMD dalam perumusannya memperhatikan pula kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun sebelumnya sehingga dapat sinergis dan konsisten dalam perencanaan lima tahun ke depan. Selain dokumen RTRW, perlu juga memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tangerang. Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang dalam implementasinya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian masing-masing OPD sebagai perwujudan kinerja yang berlandaskan kepada anggaran dan *money follow programme*.

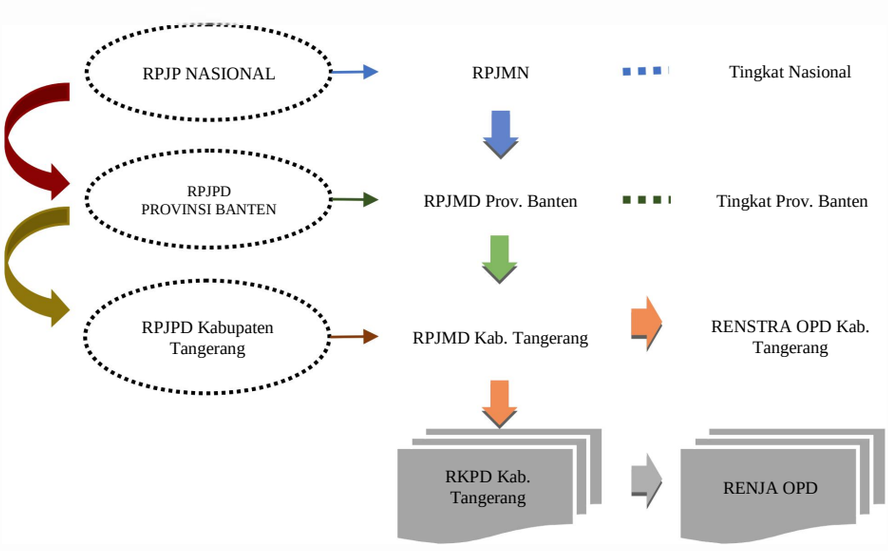
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun RPJPD untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dan RPJMD untuk lima tahunan yang diarahkan untuk ikut mencapai tujuan nasional. Dalam rangka ikut mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, perlu dianalisis keterkaitannya dengan dokumen perencanaan nasional. Keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tangerang dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025 disajikan dalam gambar 2.

Gambar 2. Hubungan RPJPD, RPJMD, dan RKPD



Gambar 3. Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyediakan data *performance* (kinerja) pembangunan daerah terhadap perubahan-perubahan mendasar, yang seperti disampaikan sebelumnya, yaitu perubahan perencanaan di tingkat nasional, perubahan dalam kebijakan SIPD, dan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kemampuan anggaran.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui kinerja pembangunan daerah pasca pandemi covid-19;
2. Menganalisis permasalahan-permasalahan (*gap analysis*);
3. Menghasilkan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan pada gambaran kinerja pembangunan, kondisi *existing* kebutuhan saat ini, prioritas nasional, dan tetap memperhatikan agenda pembangunan internasional.

1.5 Sistematika Penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang

Alur Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

Gambar 4. Sistematika Penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang



Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Penyusunan Perubahan RPJMD

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan tujuan

1.5. Sistematika Penulisan Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

6.2 Arah Kebijakan Tahunan

6.3 Arah Pengembangan Wilayah

6.4 Program Pembangunan Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah bagian Timur Provinsi Banten. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Tangerang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat yang strategis bagi perkembangan wilayah. Dengan posisinya yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Jakarta. Sementara itu, ditinjau dari segi transportasi, Kabupaten Tangerang dilalui oleh Jalan Raya Serang – Jakarta dan Jalan Tol Merak – Jakarta*, Double Track* Kereta Api Jakarta – Rangkas Bitung, serta akses alternatif ke Bandara Internasional Soekarno – Hatta. Kebutuhan akses yang sangat cepat bagi industri dan perdagangan membutuhkan kawasan pergudangan dan industri untuk mendistribusikan produk industri dan perdagangan, sehingga kemudahan akses terhadap pelabuhan dan bandara menjadi kebutuhan utama. Selain itu, perkembangan sektor properti semakin meningkat terutama di daerah sekitar Bandara Soekarno-Hatta, seperti daerah Cisauk, dan Pagedangan sehingga membutuhkan lahan yang sangat luas bagi Kawasan pemukiman warga *commuter* Jakarta – Tangerang.

Gambar 5. Peta Orientasi Kabupaten Tangerang



Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, 2019

Ditinjau dari keadaan penduduk Kabupaten Tangerang, data BPS pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahunnya mencapai 2,93% dengan jumlah penduduk 3.800.787 jiwa (menurut data proyeksi) atau 2.794.969 jiwa (menurut data registrasi). Penduduk usia produktif di atas 18 tahun sebanyak 1.709.498 jiwa atau 61,1% dari jumlah penduduk. Besarnya penduduk usia produktif tersebut, berdampak pada melimpahnya tenaga kerja. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan investasi di sektor Industri dan perdagangan yang terus meningkat.

Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Tangerang terutama untuk mengatasi dampak dari beban wilayah yang sangat besar ke depannya. Perluasan *Run Way* Bandara Soekarno – Hatta, pembangunan Tol Serpong – Balaraja, Tol Bandara – Balaraja, penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran.

Secara geografis Kabupaten Tangerang berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang merupakan pintu gerbang di perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan saling ketergantungan yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah melalui proses *trickle down effect* dan *backwash effect*. Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan

wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung.

Dalam rangka pengembangan wilayah kabupaten ini, terdapat beberapa faktor dan kondisi yang harus dipahami dan diperhatikan. Potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Tangerang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu: 1. Letak, Luas dan Batas Wilayah; 2. Kondisi Topografi; 3. Kondisi klimatologi; 4. Kondisi geologi; 5. Kondisi Hidrologi; 6. Penggunaan Tanah dan 7. Kondisi geografi lainnya. Faktor-faktor alam ini saling terkait, di mana sebagiannya bisa dikontrol dan sebagian lagi hanya bisa diterima dan disikapi dengan optimal guna pelaksanaan pengembangan dan pembangunan wilayah. Faktor – faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian 2.1.1 berikut ini.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebesar 95.961 Ha atau 959,61 km^2. Secara administratif, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 28 kelurahan dan 246 desa dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa. Kecamatan yang memiliki area dengan luasan terbesar adalah Kecamatan Rajeg dengan luas wilayah sebesar 5.370 Ha atau 5,60% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Sedangkan Kecamatan yang memiliki wilayah dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Sepatan dengan luas wilayah 1.732 Ha atau 1,80% dari total wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1.

Sementara itu, jarak antara Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta – Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Gambaran peta administrasi Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar 6 dan gambar 7.

Gambar 6. Peta Administrasi Batas Desa dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang



Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Tangerang, Tahun 2020

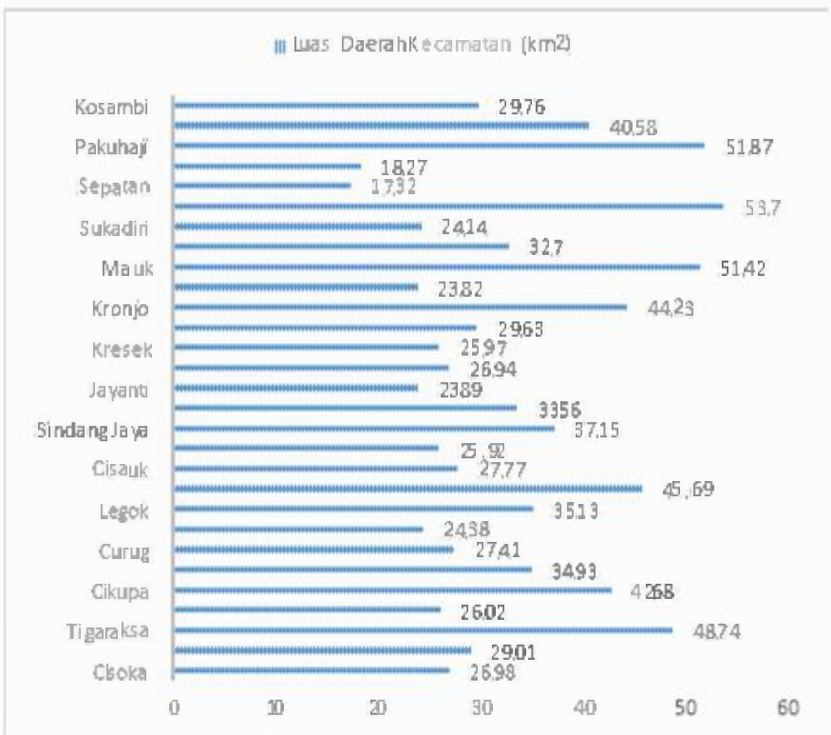
Tabel 2.1. Luas Wilayah, dan Sub Wilayah Administratif di Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Persentase (%)	Kelurahan (unit)	Desa (unit)
1	Cisoka	26,98	2,81	-	10
2	Solear	29,01	3,02	-	7
3	Tigaraksa	48,74	5,08	2	12
4	Jambe	26,02	2,71	-	10
5	Cikupa	42,68	4,45	2	12
6	Panongan	34,93	3,64	1	7
7	Curug	27,41	2,86	3	4
8	Kelapa Dua	24,38	2,54	5	1
9	Legok	35,13	3,66	1	10
10	Pagedangan	45,69	4,76	1	10
11	Cisauk	27,77	2,89	1	5
12	Pasar Kemis	25,92	2,70	4	5
13	Sindang Jaya	37,15	3,87	-	7
14	Balaraja	33,56	3,50	1	8
15	Jayanti	23,89	2,49	-	8
16	Sukamulya	26,94	2,81	-	8
17	Kresek	25,97	2,71	-	9
18	Gunung Kaler	29,63	3,09	-	9
19	Kronjo	44,23	4,61	-	10
20	Mekar Baru	23,82	2,48	-	8
21	Mauk	51,42	5,36	1	11

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Persentase (%)	Kelurahan (unit)	Desa (unit)
22	Kemiri	32,7	3,41	-	7
23	Sukadiri	24,14	2,52	-	8
24	Rajeg	53,7	5,60	1	12
25	Sepatan	17,32	1,81	1	7
26	Sepatan Timur	18,27	1,90	-	8
27	Pakuhaji	51,87	5,41	1	13
28	Teluknaga	40,58	4,23	-	13
29	Kosambi	29,76	3,10	3	7
TOTAL		959,61	100	28	246

Sumber: Dokumen KLHS 2019 – 2023 Perubahan, 2021

Gambar 7 Luas Daerah menurut Kecamatan (Km2), 2021



Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2021

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Tangerang ditinjau secara geografis berada di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°43' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan dan mempunyai garis pantai sepanjang 51 km. Sedangkan secara geografis, batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (dengan panjang garis pantai ±51 km), sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Provinsi DKI Jakarta, sebelah

selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.

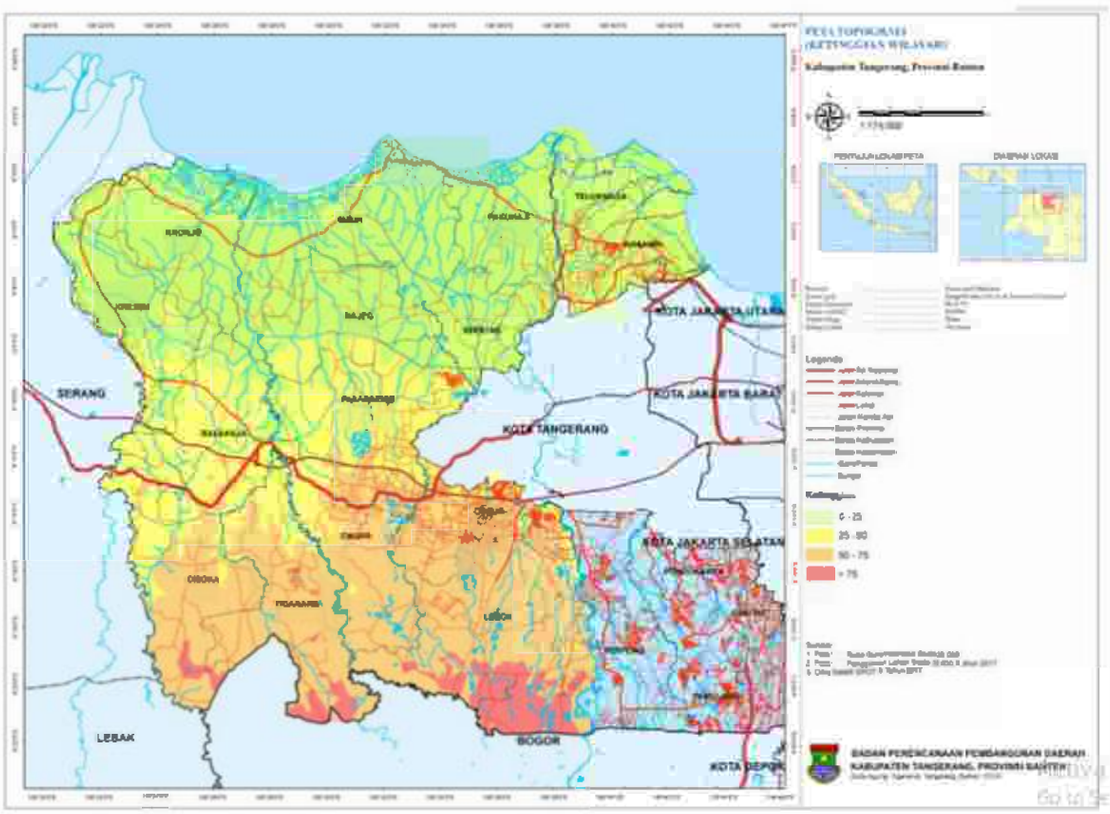
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Jakarta Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

2.1.1.3. Topografis

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah, yang memiliki topografi relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 3% menurun ke utara sedangkan daerah pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 50 km. Ketinggian wilayah antara 0 - 85 m di atas permukaan laut, gambaran secara visual bisa dilihat pada gambar 8 Peta Topografi Kabupaten Tangerang. Secara garis besar terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Dataran rendah di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut, yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji, Sepatan, dan Sepatan Timur.
2. Dataran tinggi di bagian tengah ke arah selatan dengan ketinggian antara 25 - 85 meter di atas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0 - 8% menurun ke utara.

Gambar 8 Peta Topografi Kabupaten Tangerang



Sumber : Dokumen KLHS 2019 – 2023 Perubahan, 2021

2.1.1.4. Geologi /Jenis Tanah

Struktur batuan yang terbentuk di Kabupaten Tangerang adalah:

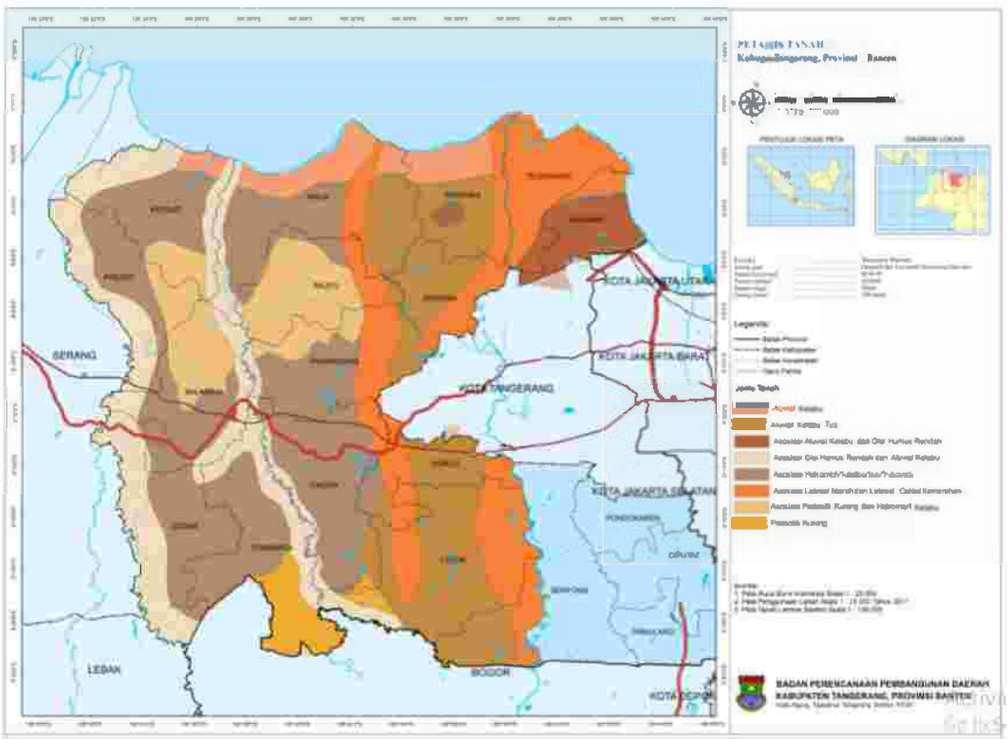
a. Alluvium, terdiri dari lempung, kerikil, kerakal.

b. Tuff Banten (Banten Tuff), terdiri dari batu apung dan batu pasir tuffan.

Kabupaten Tangerang bagian utara merupakan daerah yang sedikit bergelombang lemah. Daerah ini termasuk dalam ketegori bentuk lahan bentukan asal pengendapan (alluvial). Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus, dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecoklatan, padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budi daya. Proses terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di daerah dataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit padsolic yaitu

asosiasinya, gambaran secara visual bisa dilihat pada gambar 9 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tangerang.

Gambar 9 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tangerang



Sumber: Dokumen KLHS 2019 – 2023 Perubahan, 2021

Jika dilihat dari teksturnya, tekstur tanah adalah komposisi fraksi pasir, debu, dan tanah liat pada agregat (massa) tanah, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam kelas tekstur tanah yaitu: halus, sedang, dan kasar. Luas wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan pengelompokan tersebut terdiri dari:

1. Tekstur halus : 60.549 Ha (54,53%)
2. Tekstur sedang : 46.936 Ha (42,27%)
3. Tekstur kasar : 3.553 Ha (3,20 %)

Tekstur tanah seperti ini sangat cocok untuk pengembangan budi daya pertanian dan tanaman keras. Sementara itu, berdasarkan kedalaman efektif tanah yang merupakan tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah atau suatu lapisan di mana perakaran tanaman dapat menerobosnya. Kedalaman efektif tanah berpengaruh terhadap erosi dan pemilihan jenis tanaman yang cocok di suatu wilayah. Kabupaten Tangerang terbagi atas tiga kelas kedalaman efektif tanah, meliputi:

1. Kedalaman 30 - 60 cm seluas 33 Ha (0,03 %)
2. Kedalaman > 60 - 90 cm seluas 2.598Ha (2,34%)

3. Kedalaman > 90 cm seluas 101.777 Ha (91,66 %)

2.1.1.5. Hidrologi

Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah.

Mengantisipasi kebutuhan air yang terus meningkat, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh sumber daya air yang ada, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi di bidang pemurnian air (daur ulang dan desalinasi air laut).

Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi enam kecamatan yaitu: Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug, dan Legok) terdapat tiga lapisan akifer meliputi:

1. Akuifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan pasir;
2. Akuifer menengah dengan kedalaman 20 – 70 m yang merupakan lapisan lempung formasi Bantam Atas;
3. Akuifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari formasi Genteng dan formasi Bojong.

Recharge akuifer dangkal dan menengah berasal dari air hujan dan sungai/danau, sedang *recharge* akuifer dalam melalui batuan formasi Bojongmanik di sebelah selatan yang tersingkap (*outcrop*) dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, pasal (1) menyebutkan bahwa Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. Sedang pada pasal 1 ayat (6), disebutkan: Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Berdasarkan Laporan Studi Potensi dan Pengembangan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Dinas PU Kabupaten Tangerang, November tahun 2002[1], diketahui bahwa potensi air sungai dan situ/rawa yang merupakan potensi air permukaan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) menunjukan potensi sebagai berikut:

1. Debit terkecil rata-rata bulanan SWS Cisadane – Ciliwung, sebesar 2,551 m^3/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cidurian, stasiun Parigi dalam tahun 1995, sedang debit terbesar rata-rata bulanan sebesar 115,315 m^3/dt, diukur di Sungai Cisadane, stasiun Batu Beulah dalam periode 1991 sampai 1998.
2. Di SWS Cisadane-Cikuningan, belum ada data pengukuran jangka panjang, pengukuran dilakukan sesaat menggunakan *current meter* dan didapat debit aliran terkecil sebesar 0,078 m^3/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cikoncang, stasiun Cikeusik pada tanggal 5 September 2002, sedang debit terbesar adalah 2,454 m^3/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cimadur, stasiun Sukajaya pada tanggal 6 September tahun 2002.
3. Air hujan yang setelah dianalisis dengan perhitungan neraca air menunjukan bahwa Kabupaten Tangerang mengalami defisit air pada bulan Maret sampai bulan November (8 bulan) sementara surplus air hanya terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari (3 bulan).

[1] Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang 2019 - 2023

4. Air tanah, debit air tanah di KabupatenTangerang berkisar antara 3 – 10 liter/detik/km^2. Air tanah ini cenderung diambil secara berlebihan di sepanjang jalan Jakarta – Tangerang oleh industri – industri, sehingga terjadi penurunan muka air tanah yang cukup drastis. Di bagian utara kabupaten, air tanah umumnya tidak dapat digunakan karena asin/payau.

Potensi sumber daya air tanah-dalam (seperti dinyatakan dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2003 lampiran I Perda Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Agustus 2003) tersimpan dalam cekungan air bawah tanah (CABT). Terdapat 5 buah CABT di Kabupaten Tangerang dengan potensi air tanah secara total cukup besar. Potensi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m^3/tahun dan potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m^3/tahun. Gambaran visual bisa lihat Gambar 10 Peta Geohidrologi Kabupaten Tangerang 2011 – 2031.

Perkembangan kegiatan industri meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air dalam hal penurunan kualitas air (terjadi pencemaran air), demikian juga buangan limbah domestik (rumah tangga) ikut memberi andil terhadap penurunan kualitas air. Pencemaran cukup bervariasi yang ditunjukkan oleh beberapa paramater dan lokasi pengambilan contoh yang berbeda-beda.

2.1.1.6. Klimatologi

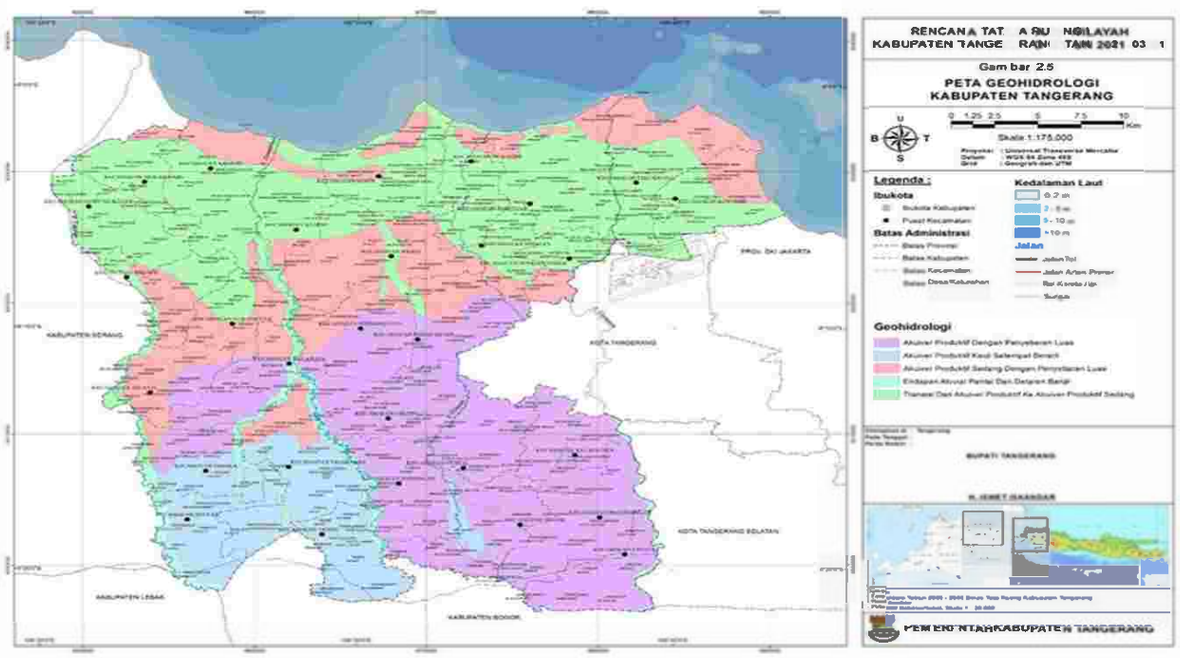
Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Temperatur udara berdasarkan penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang rata-rata berkisar antara 22,8 - 33,9 0C, suhu maksimum tertinggi pada bulan Oktober yaitu 33,9 0C dan suhu minimum terendah pada bulan Agustus dan September yaitu 22,8 0C. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 78,3% dan 59,3%. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 177,3 mm. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.2.

Tabel 2.2 Data Geografis dan Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Uraian Data	Nilai	Satuan
Data geografis		
a. Luas Wilayah	959,61	km^2
b. Ketinggian	85	mdpl
c. Wilayah Terluas (Rajeg)	53,7	Ha
d. Wilayah Terkecil (Sepatan)	17,32	Ha
Iklim		
a. Rata-rata Temperatur Udara	22,8-33,90^{0}C	^{0}C
b. Rata-rata Kelembaban Udara	78,3	%
c. Rata-rata intensitas matahari	59,3	%
d. Rata-rata Curah Hujan	177,3	mm

Sumber : Dokumen KLHS 2019 – 2023 Perubahan, 2021

Gambar 10 Peta Geohidrologi Kabupaten Tangerang 2011 - 2031



Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, 2021

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta aspek kesesuaian lahan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi

sempadan pantai, danau/situ, dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan, dan lain-lain.

Penggunaan tanah eksisting di Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2016 menurut hasil Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang saat ini merupakan data dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1: 5.000 dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Perubahan RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031, terdiri dari:

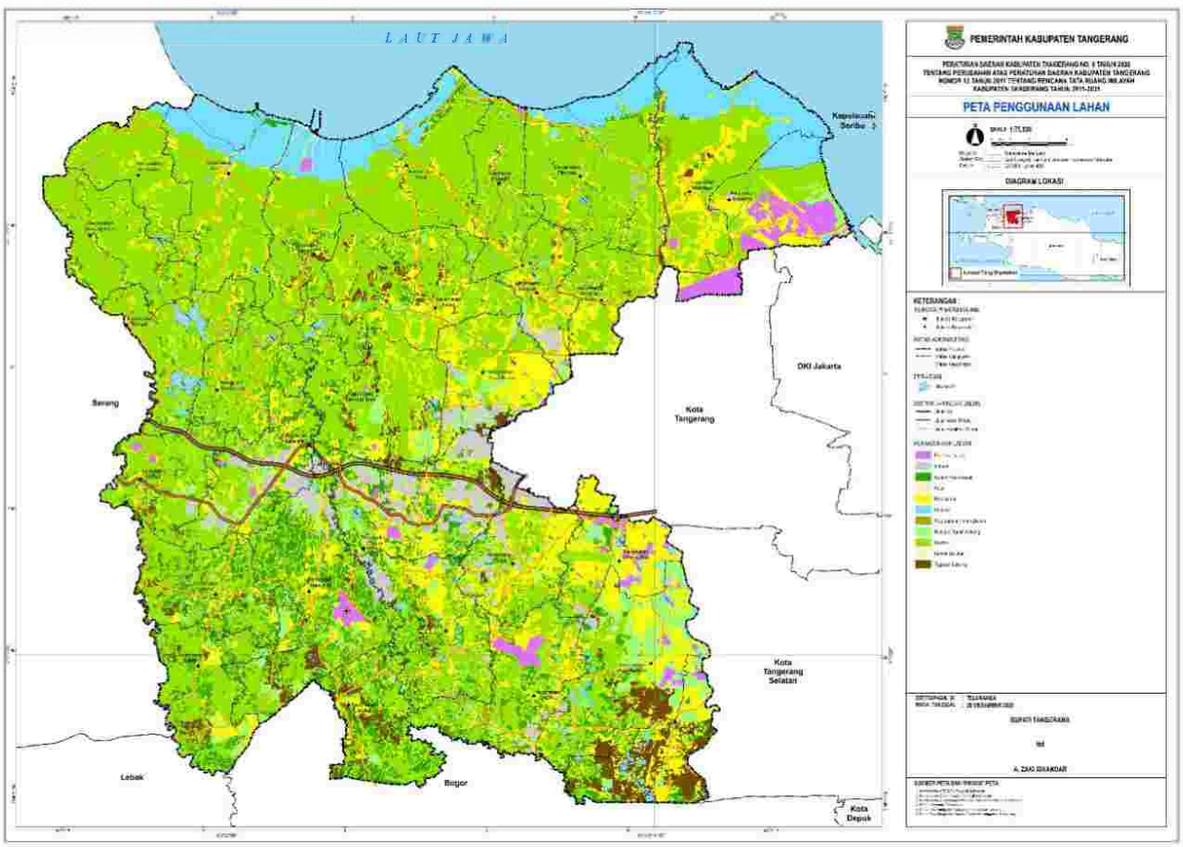
Tabel 2.3 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang

NO.	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
1	Fasilitas Umum	Hotel/Motel/Hostel/Losmen	9,336
		Kantor Pos Besar	0,382
		Pusat Perdagangan Tradisional	3,614
		Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas	0,926
		Tempat Hiburan	1,470
		Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya	0,697
		Pelabuhan Udara Non Reguler	559,005
		Pariwisata/Seni/Budaya/Olah Raga Lainnya	18,401
		Pusat Pergudangan/Terminal Peti Kemas/Cargo	271,120
		Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal/Toserba)	251,919
		Stasiun Kereta Api	0,464
2	Industri	Industri Bahan Dasar Kimia	1,001
		Industri Maritim	2,743
		Industri Bahan Dasar Bangunan	5,609
		Industri Elektronik	60,456
		Industri Manufaktur Lainnya	3.744,921
		Pengolahan Air Minum	4,931
		Industri	38,733
3	Kebun/ Perkebunan	Kebun/ Perkebunan	12.752,221
4	Kesehatan	Rumah Sakit Umum	13,991
5	Pasir	Pasir/Bukit Pasir Darat	17,939
		Pasir/Bukit Pasir Laut	2,488
6	Pemukiman	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	19.071,920
		Rumah Komplek/Properti Real Estate	2.245,332
7	Pendidikan	Pendidikan Agama Islam	42,630
		Pendidikan Dasar	10,731

NO.	TUTUPAN LAHAN	GUNA LAHAN	LUAS (HA)
		Pendidikan Menengah Pertama	13,869
		Pendidikan Menengah Umum	52,198
		Pendidikan Tinggi	51,612
8	Perairan	Air Danau/Situ	708,909
		Air Empang	217,529
		Air Laut	452,451
		Air Rawa	101,991
		Air Tawar Sungai	5.835,362
9	Perkantoran/ Pemerintahan	Lembaga Pemasyarakatan	2,039
		Kantor Camat	1,229
		Kantor Lembaga Negara	174,868
		Pusat Bisnis Lainnya	574,267
		Pusat Perkantoran Bisnis/Komersial Terpadu	49,252
10	Peternakan/ Penangkaran	Peternakan/ Penangkaran	285,480
11	Pusat Listrik	Instalasi TNI (AD/AL/AU)	14,928
		Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi	13,835
		Pembangkit Listrik Tenaga Uap	41,298
12	Rumput/ Tanah Kosong	Tanah Kosong/ Gundul	5.437,083
13	Sawah	Sawah	46.386,978
14	Semak Belukar	Semak Belukar	45,983
		Semak Belukar/Alang-alang	269,826
15	Tegalan/ Ladang	Tegalan/ Ladang	3.589,746
		TOTAL	103.453,711

Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, 2021

Gambar 11 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang



Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2019-2023

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Potensi bencana geologi berupa gempa bumi merupakan potensi kebencanaan yang relatif sama tingginya dengan daerah lain di sepanjang pantai utara yang membentang di seluruh wilayah Pantura. Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di pesisir pantai barat. Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang meliputi:

a) Potensi bencana geologi; berupa bencana gempa bumi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.
b) Potensi bencana tsunami; umumnya tersebar di sepanjang pesisir pantai utara yang berjarak 1 km dari bibir pantai. Daerah yang memiliki risiko dampak parah yaitu pada Kecamatan Kronjo, Kemiri, dan Mauk.
c) Potensi bencana banjir; berupa banjir rob (pasang surut)
d) Potensi kekeringan; terjadi akibat curah hujan di suatu kawasan jauh di bawah curah hujan normal dalam waktu lama. Bencana ini

dipicu oleh perubahan siklus iklim global yang ditandai dengan meningkatnya temperatur rata-rata atmosfir, laut, dan daratan.

Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di pesisir pantai barat. Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang meliputi:

1. Kawasan rawan banjir (Gambar 13 Peta Lokasi Rawan Banjir Kabupaten Tangerang, 2017) meliputi :
   a. Kecamatan Tigaraksa
   b. Kecamatan Teluknaga
   c. Kecamatan Pasar kemis
   d. Kecamatan Mauk
   e. Kecamatan Curug
   f. Kecamatan Cikupa
   g. Kecamatan Kosambi
   h. Kecamatan Pakuhaji
   i. Kecamatan Kelapa Dua
   j. Kecamatan Kronjo
2. Kawasan rawan cuaca ekstrim meliputi:
   a. Kecamatan Pagedangan;
   b. Kecamatan Kelapa Dua;
   c. Kecamatan Tigaraksa;
   d. Kecamatan Panongan;
   e. Kecamatan Solear;
   f. Kecamatan Cisoka.
3. Kawasan rawan kebakaran meliputi:
   a. Kecamatan Pasar Kemis
   b. Kecamatan Kosambi
   c. Kecamatan Teluknaga
   d. Kecamatan Balaraja
   e. Kecamatan Cikupa
   f. Kecamatan Sepatan
   g. Kecamatan Curug
4. Kawasan rawan gempa bumi meliputi:
   a. Kecamatan Pagedangan;
   b. Kecamatan Cisauk;
   c. Kecamatan Legok;
   d. Kecamatan Kelapa Dua;
   e. Kecamatan Curug;
   f. Kecamatan Cikupa;
   g. Kecamatan Pasar Kemis;
   h. Kecamatan Balaraja;
   i. Kecamatan Sukamulya;
   j. Kecamatan Tigaraksa;
   k. Kecamatan Panongan;
   l. Kecamatan Jambe;
   m. Kecamatan Cisoka;
   p. Kecamatan Teluknaga;
   q. Kecamatan Sepatan;
   r. Kecamatan Sepatan Timur;
   s. Kecamatan Kosambi;
   t. Kecamatan Sindang Jaya;
   u. Kecamatan Rajeg;
   v. Kecamatan Pakuhaji;
   w. Kecamatan Kronjo;
   x. Kecamatan Mekar Baru;
   y. Kecamatan Gunung Kaler;
   z. Kecamatan Kresek;
   aa. Kecamatan Mauk;
   bb. Kecamatan Kemiri; dan

n. Kecamatan Solear;
o. Kecamatan Jayanti;
cc. Kecamatan Sukadiri

5. Kawasan rawan kegagalan teknologi meliputi:
   a. Kecamatan Jayanti;
   b. Kecamatan Balaraja;
   c. Kecamatan Kosambi;
   d. Kecamatan Sepatan Timur;
   e. Kecamatan Cikupa;
   f. Kecamatan Curug;
   g. Kecamatan Kelapa Dua;
   h. Kecamatan Legok;
   i. Kecamatan Panongan;
   j. Kecamatan Sindangjaya;
   k. Kecamatan Tigaraksa;
   l. Kecamatan Kemiri;
   m. Kecamatan Pasar Kemis;
   n. Kecamatan Cisauk; dan
   o. Kecamatan Pagedangan

6. Kawasan rawan kekeringan meliputi:
   a. Kecamatan Pagedangan;
   b. Kecamatan Cisauk;
   c. Kecamatan Legok;
   d. Kecamatan Kelapa Dua;
   e. Kecamatan Curug;
   f. Kecamatan Cikupa;
   g. Kecamatan Pasar Kemis;
   h. Kecamatan Balaraja;
   i. Kecamatan Sukamulya;
   j. Kecamatan Tigaraksa;
   k. Kecamatan Panongan;
   l. Kecamatan Jambe
   m. Kecamatan Cisoka;
   n. Kecamatan Solear;
   o. Kecamatan Jayanti;
   p. Kecamatan Teluknaga;
   q. Kecamatan Sepatan;
   r. Kecamatan Sepatan Timur;
   s. Kecamatan Kosambi;
   t. Kecamatan Sindang Jaya.
   u. Kecamatan Rajeg;
   v. Kecamatan Pakuhaji;
   w. Kecamatan Kronjo;
   x. Kecamatan Mekar Baru;
   y. Kecamatan Gunung Kaler;
   z. Kecamatan Kresek
   aa. Kecamatan Mauk;
   bb. Kecamatan Kemiri; dan
   cc. Kecamatan Sukadiri.

7. Kawasan rawan tsunami meliputi:
   a. Kecamatan Mekar Baru:
   b. Kecamatan Kronjo;
   c. Kecamatan Kemiri;
   d. Kecamatan Mauk;
   e. Kecamatan Sukadiri;
   f. Kecamatan Pakuhaji;
   g. Kecamatan Teluknaga;
   h. Kecamatan Kosambi.

Gambar 12 Peta Lokasi Banjir Kabupaten Tangerang



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Tangerang, 2021

2.1.3. Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 berjumlah 3.245.619 jiwa yang terdiri dari 1.660.705 jiwa penduduk laki-laki dan 1.584.914 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 di Kabupaten Tangerang sebesar 1,26% dengan kapadatan penduduknya sebesar 3.382,23 per km2.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan
Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No.	Kabupaten	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kabupaten Tangerang	1.660.705	1.584.914	3.245.619

Sumber : Dokumen KLHS 2019 – 2023 Perubahan, 2021

Tabel 2.5 Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan, 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
1	Cisoka	96.433	110,5	3.574,24
2	Solear	95.521	106,7	3.292,69

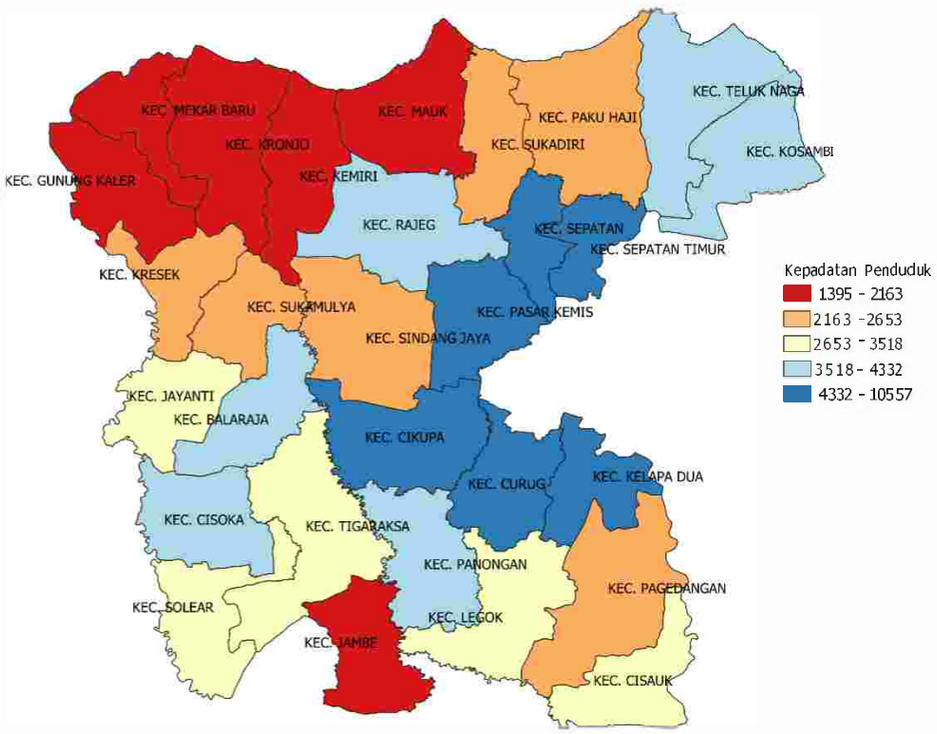
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
3	Tigaraksa	155.557	104,4	3.191,57
4	Jambe	51.136	105,7	1.965,26
5	Cikupa	208.302	105,2	4.880,55
6	Panongan	130.489	105,4	3.735,73
7	Curug	174.867	103,4	6.379,68
8	Kelapa Dua	169.340	100,2	6.945,86
9	Legok	118.391	105,1	3.370,08
10	Pagedangan	107.897	104,4	2.361,50
11	Cisauk	90.846	104,7	3.271,37
12	Pasar Kemis	273.659	103,7	10.557,83
13	Sindang Jaya	91.170	102,8	2.454,10
14	Balaraja	119.409	105,1	3.558,08
15	Jayanti	65.545	104,4	2.743,62
16	Sukamulya	69.275	103,7	2.571,46
17	Kresek	68.039	104,1	2.619,91
18	Gunung Kaler	51.102	102,8	1.724,67
19	Kronjo	61.719	100,8	1.395,41
20	Mekar Baru	41.329	103,4	1.735,05
21	Mauk	85.573	104,7	1.664,20
22	Kemiri	48.061	104,6	1.469,76
23	Sukadiri	63.489	105,3	2.630,03
24	Rajeg	190.946	106,1	3.555,79
25	Sepatan	116.690	106,8	6.737,30
26	Sepatan Timur	105.578	106,9	5.778,76
27	Pakuhaji	119.050	106,7	2.295,16
28	Teluknaga	160.946	105,6	3.966,14
29	Kosambi	115.260	105,6	3.872,98
Jumlah/Total		3.245.619	104,8	3.382,23

Sumber : BPS 2021 (SP2020)

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang adalah 104,8 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki. *Sex Ratio* terbesar terdapat di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 110,5 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kelapa Dua yakni sebesar 100,2.

Apabila ditinjau dari kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, berikut adalah peta kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang:

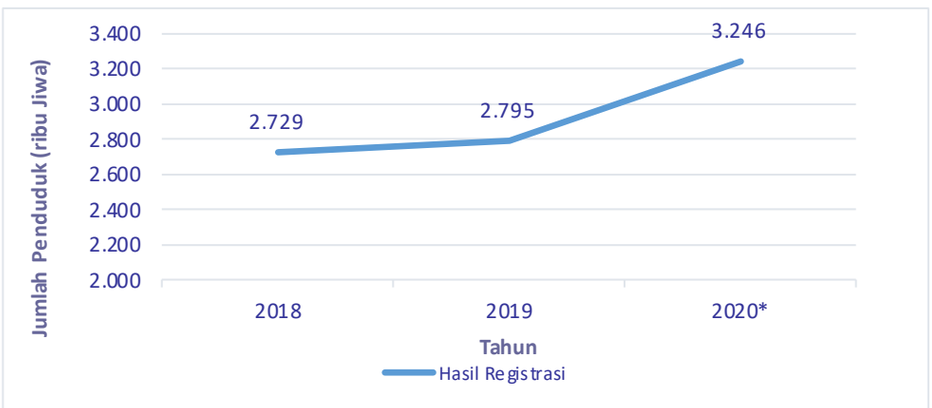
Gambar 13 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang, 2020



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2021. diolah

Dari gambar di atas terlihat bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi atau berwarna merah ada di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk sedang adalah Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Balaraja.

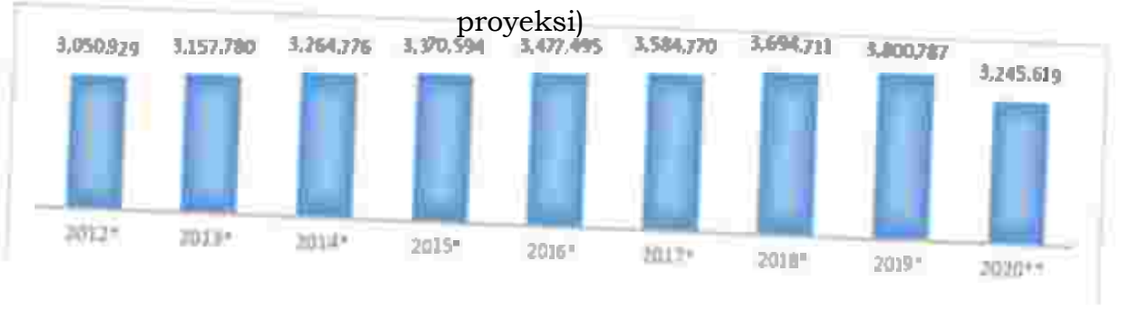
Gambar 14 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang menurut Hasil Registrasi Kependudukan, 2018-2020



Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka/ BPS Tahun 2021
**Hasil Sensus Penduduk per September 2020*

Berdasarkan gambar 14 jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang baik berdasarkan hasil registrasi dan Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2020. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2013-2020 dapat dilihat pada gambar 15. Terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang memiliki tren yang terus meningkat setiap tahunnya dengan kenaikan rata-rata 2,71% setiap tahunnya.

Gambar 15 Jumlah Penduduk dari tahun 2012-2020 (Berdasarkan data proyeksi)

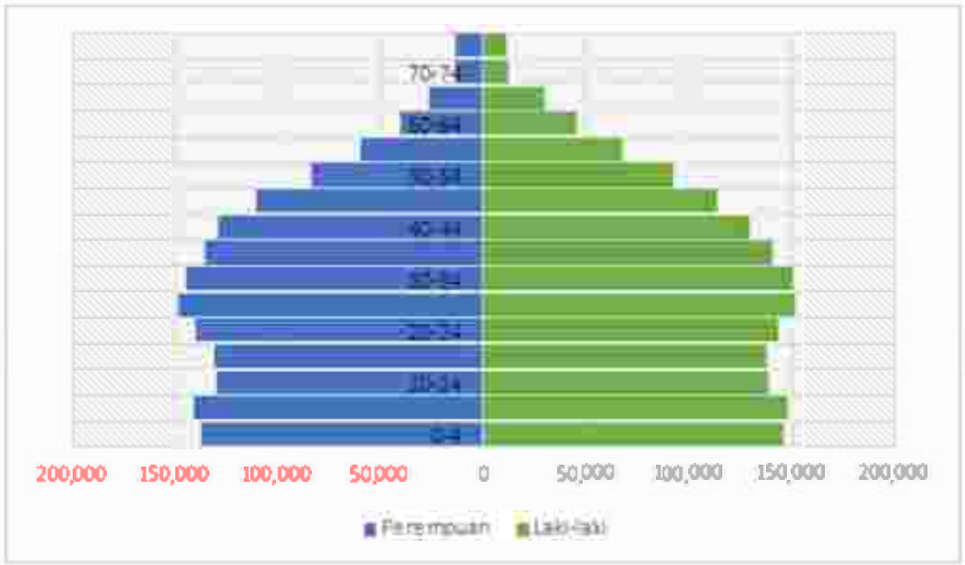


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2020
**Proyeksi BPS*
*** Hasil SP2020 (September)*

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 25-29 tahun yaitu sebesar 300.666 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 152.900 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 148.576 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 24.348 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 11.150 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 13.914 jiwa.

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 16.

Gambar 16 Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 (dalam jiwa)



Sumber: BPS 2021 (Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020)

Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut data tahun 2020 berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Kondisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti, angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di usia produktif, yaitu golongan usia remaja hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang. Komposisi seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihan, kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangerang karena memiliki SDM usia produktif yang melimpah sebagai bonus demografi. Di sisi lain, kondisi ini rentan terhadap masalah pengangguran dan gejala malthus[2].

[2] Teori Malthus menyatakan pertambahan penduduk akan mengikuti deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Artinya, pertambahan penduduk jauh lebih cepat dari pertambahan bahan makanan. Akibatnya suatu saat nanti akan terjadi perbedaan yang besar antara jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan makanan, sehingga bahaya kelaparan dan terjadi persaingan tenaga kerja sehingga upah menjadi semakin murah.

2.1.4. Potensi Sumber Daya

Potensi sumber daya Kabupaten Tangerang sesuai arahan pemanfaatan ruang diarahkan untuk berbagai Kawasan dengan pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan wilayahnya. Berikut adalah gambaran pembagian Kawasan di wilayah Kabupaten Tangerang beserta peruntukannya:

2.1.4.1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pangan merupakan salah satu bagian strategis dari perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan BPS Provinsi Banten tren perkembangan luas lahan sawah di Kabupaten Tangerang baik irigasi maupun tadah hujan dari tahun ke tahun kecenderungan jumlahnya semakin menurun. Luas lahan sawah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 teridentifikasi sebesar 37.127 ha dan peningkatan luas tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 39.196 ha hingga tahun 2018 luas lahan sawah di Kabupaten Tangerang menurun menjadi 36.231 ha, dengan rata-rata penyusutan luas lahan sawah sebesar 0,0052 ha/tahun. Berikut ini tren penyusutan luas lahan sawah di Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun.

Gambar 17 Tren Luas Lahan Sawah di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020



Sumber : Luas Lahan Menurut Penggunaannya Provinsi Banten Tahun 2015-2020

(Malthus, Thomas Robert. An Essay on the Principle of Population. Oxfordshire, England: Oxford World's Classics. p. 13. ISBN 978-1450535540)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2019 mengalami percepatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang ADHK 2010 menurut lapangan usaha, pada tahun 2019 laju pertumbuhannya mencapai 5,58%, sedangkan tahun 2017 dan 2018 sebesar 5,82% dan 5,80%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 dicapai oleh lapangan usaha *Real Estate* sebesar 9,49%. Begitu juga seluruh lapangan usaha ekonomi yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Migas. Adapun lapangan usaha lainnya yang mencatat pertumbuhan positif, berturut-turut adalah Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,95%, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,22%, Informasi dan Komunikasi sebesar 9,19%, Konstruksi sebesar 8,89%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,86%, Jasa Lainnya sebesar 8,85%, Jasa Pendidikan sebesar 8,49%, Jasa Perusahaan sebesar 8,30%, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,05%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,55%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,90%, Industri Pengolahan sebesar 3,54%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,39%, Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,87%, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,01%. Sedangkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami penyusutan sebesar 0,71%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Namun sayangnya, peningkatan–peningkatan di atas harus mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebagai dampak terjadinya pandemic Covid – 19 yang mempengaruhi hampir seluruh sektor, tak terkecuali sektor ekonomi. Secara umum, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 menurun hingga mencapai -3,7%. Sebagian besar lapangan usaha mengalami penurunan laju pertumbuhan yang drastis, kecuali lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, informasi dan komunikasi, dan jasa keuangan dan asuransi. Lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan dan usaha di bidang jasa keuangan dan asuransi mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahu 2019. Sedangkan untuk informasi dan komunikasi mengalami penurunan, namun tidak signifikan (lihat tabel 2.6).

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), Tahun 2015-2020

Lapangan Usaha	Tahun (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,50	5,99	5,28	2,98	2,25	3,69
Pertambangan dan Penggalian	2,30	2,27	2,28	5,72	2,30	-5,90
Industri Pengolahan	3,16	2,92	3,51	2,66	3,24	-8,17
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,22	-11,24	-7,07	5,82	-4,23	-12,35
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,05	7,38	8,13	5,19	6,71	-8,60
Konstruksi	9,59	7,58	9,92	8,18	9,44	-3,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,71	4,01	6,25	8,69	6,22	-5,44
Transportasi dan Pergudangan	8,62	8,71	8,56	9,60	9,55	-5,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,24	7,66	8,39	8,62	7,86	-5,63
Informasi dan Komunikasi	10,07	8,62	8,11	8,35	9,69	9,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,86	17,32	5,31	7,16	0,68	1,54

Lapangan Usaha	Tahun (%)					
	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Real Estate	8,88	8,89	9,93	9,44	9,49	1,96
Jasa Perusahaan	6,51	6,93	7,72	6,02	9,20	-6,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,13	9,10	6,43	6,48	8,75	-0,38
Jasa Pendidikan	9,25	8,19	7,48	8,25	8,34	0,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,65	8,58	9,71	9,68	11,13	4,41
Jasa lainnya	7,12	8,65	9,87	8,69	9,36	-6,11
PDRB	5,60	5,41	5,82	5,80	5,58	-3,70

**Angka Sementara*

***Angka Sangat Sementara*

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2021

Di tahun 2019, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 141,09 triliun rupiah atau meningkat sebesar 8,50 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 130,04 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 97,54 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 5,58 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 92,12 triliun rupiah.

Kondisi tidak terduga terjadi pada tahun 2020 menyebabkan PDRB Kabupaten Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Di tahun 2020 PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 136,01 triliun rupiah atau berkurang sebesar 3,11% persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 140,37 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 93,54 triliun rupiah atau menurun sebesar 3,70 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 97,14 triliun rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%, tahun 2017 meningkat menjadi 5,82% yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,58%. Memasuki tahun 2020 gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka -3,7%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi

Banten dan nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional.

Gambar 18 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang, 2021

2.2.1.2. Kontribusi Ekonomi

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usahanya, pada tahun 2019, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi sebesar 35,21 persen, kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,82 persen, lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,57 persen. Selanjutnya lapangan usaha *Real Estate* menyumbang 7,81 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangan sebesar 6,46 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya secara keseluruhan menyumbang sebesar 24,2 persen. Sedangkan pada tahun 2020, lapangan usaha Industri Pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi yaitu sebesar 33,6 persen, meskipun persentasenya menurun dibandingkan tahun 2019, kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,83 persen, lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,50 persen. Selanjutnya lapangan usaha *real estate* menyumbang 8,34 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan

dan Perikanan memberikan sumbangan sebesar 7,01 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya secara keseluruhan menyumbang sebesar 24,72 persen.

Tabel 2.7 PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020

(Juta Rupiah)

KATEGORI	URAIAN	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.565.350,51	8.151.591,26	8.678.387,03	9.062.674,76	9.536.671,28
B	Pertambangan dan Penggalian	50.219,54	51.556,88	56.533,55	58.539,40	55.542,78
C	Industri Pengolahan	40.987.910,96	43.841.074,76	46.552.103,77	49.424.641,49	45.692.687,59
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	5.384.238,78	4.769.266,92	4.947.791,14	4.690.725,31	4.104.532,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	66.283,02	74.495,39	79.670,34	85.483,81	93.494,55
F	Konstruksi	14.312.257,55	16.202.510,88	18.448.089,77	20.797.296,09	20.163.347,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.766.171,36	13.138.608,85	14.742.544,81	16.234.312,48	15.643.483,80
	Transportasi dan Pergudangan	3.113.075,09	3.449.704,88	3.865.867,01	4.320.452,60	4.145.531,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.628.645,39	1.786.707,32	1.960.200,10	2.133.603,31	2.024.108,97
J	Informasi dan Komunikasi	3.497.818,22	3.907.538,37	4.136.440,01	4.505.500,22	4.898.702,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.773.260,98	6.344.537,19	7.081.154,95	7.287.415,85	7.407.736,74
L	*Real Estate*	7.573.751,43	8.687.998,33	9.698.308,28	10.957.413,56	11.347.582,07
M,N	Jasa Perusahaan	1.107.726,69	1.240.183,70	1.357.312,18	1.540.731,20	1.473.487,53
O	Administasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.839.993,52	2.027.463,51	2.200.724,70	2.469.155,35	2.571.446,23
P	Jasa Pendidikan	2.696.125,60	3.011.679,17	3.444.992,79	3.901.005,39	3.985.269,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	439.210,53	496.313,61	570.594,76	656.866,22	695.572,86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.595.742,76	1.812.852,82	2.005.265,63	2.240.326,39	2.166.125,04
Total PDRB		109.397.781,93	118.994.083,84	129.825.980,84	140.366.143,43	136.005.323,27

**Angka Sementara*

***) Angka Sangat Sementara*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021

Tabel 2. 8 PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

KATEGORI	URAIAN	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	5.071.579,73	5.339.404,46	5.498.454,72	5.622.035,28	5.829.393,69
B	Pertambangan dan Penggalian	35.069,81	35.868,78	37.920,47	38.792,65	36.503,88
C	Industri Pengolahan	32.739.478,87	33.877.146,62	34.778.075,13	35.904 811,20	32.973.154,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.527.340,07	1.408.405,56	1.490.372,60	1.427.297,46	1.251.072,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	65.225,95	70.530,82	74.191,37	79.169,61	85.978,20
F	Konstruksi	9.942.933,26	10.909.629 ,65	11.802.037,36	12.916.149,68	12.491.208,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.487.54502	10.113.11869	10.991.866,13	11.675.61485	11.040.28272
H	Transportasi dan Pergudangan	2.267.12283	2.461.272,33	2.697.432,41	2.955.030,58	2.797.591,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.201.754,52	1.302.576,10	1.414.834,55	1.525.987,05	1.440.147,63
J	Informasi dan Komunikasi	4.103.605,97	4.436.548,55	4.807.000,35	5.272.798,69	5.753.677,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.128.680,18	4.347.706,98	4.659.192,11	4.690.877,58	4.763.093,24
L	Real Estate	6.384.996 ,42	7.019.026,57	7.681.622,68	8.410.608,67	8.575.456,60
M,N	Jasa Perusahaan	764.550,33	823.604,19	873.185,16	953.518,20	896.307,11
O	Administasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.175.561,18	1.251.111,03	1.332.183,02	1.448.749,04	1.443.243,79
P	Jasa Pendidikan	1.844.483,74	1.982.451,13	2.146.003,35	2.324.980,03	2.341.022,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	333.065,32	365.405,96	400.777,26	445.383,77	465.025,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1.110.602,95	1.220.219,46	1.326.256,53	1.450.394,14	1.361.775,06
Total PDRB		82 183 596,15	86.964.026,88	92.011.405,21	97.142.198,47	93.544.933,63

*Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021

Tabel 2.9 Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun (%)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,92	6,85	6,68	6,46	7,01
Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Industri Pengolahan	37,47	36,85	35,86	35,21	33,60
Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	4,02	3,81	3,34	3,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Konstruksi	13,08	13,63	14,21	14,82	14,83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,76	11,00	11,36	11,57	11,50
Transportasi dan Pergudangan	2,85	2,90	2,98	3,08	3,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,49	1,50	1,51	1,52	1,49
Informasi dan Komunikasi	3,20	3,28	3,19	3,21	3,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	5,33	5,45	5,19	5,45
Real Estate	6,92	7,30	7,47	7,81	8,34
Jasa Perusahaan	1,01	1,05	1,05	1,10	1,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,68	1,70	1,70	1,76	1,89
Jasa Pendidikan	2,46	2,53	2,65	2,78	2,93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,40	0,42	0,44	0,47	0,51
Jasa Lainnya	1,46	1,52	1,54	1,60	1,59

Catatan / Note: Angka sementara / Preliminary figures*

*** Angka sangat sementara / Very preliminary figures*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2021

Sementara itu, berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha, Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2020 sekitar 6,23%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang sekitar 5,79%, sementara pada tahun 2017-2018 kontribusi sektor pertanian sebesar 6,14% dan 5,98%. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terkecil yang mana berkontribusi sebesar 0,04% pertahun terhadap PDRB Kabupaten Tangerang, sedangkan sektor Industri pengolahan mempunyai kontribusi sebesar yaitu 35,25% pada tahun 2020, yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar yaitu sebesar 36,96%. Sedangkan sektor Perdagangan pada tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Kontribusi sektor Perdagangan pada tahun 2020 sebesar 11,80% lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 12,02%.

Tabel 2.10 Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga konstan Tahun 2015 – 2020 (dalam persen)

KATEGORI	URAIAN	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,17	6,14	5,98	5,79	6,23
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
C	Industri Pengolahan	39,84	38,96	37,80	36,96	35,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,86	1,62	1,62	1,47	1,34
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
F	Konstruksi	12,10	12,54	12,83	13,30	13,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,54	11,63	11,95	12,02	11,80
H	Transportasi dan Pergudangan	2,76	2,83	2,93	3,04	2,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,46	1,50	1,54	1,57	1,54
J	Informasi dan Komunikasi	4,99	5,10	5,22	5,43	6,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,02	5,00	5,06	4,83	5,09
L	Real Estate	7,77	8,07	8,35	8,66	9,17
M,N	Jasa Perusahaan	0,93	0,95	0,95	0,98	0,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,43	1,44	1,45	1,49	1,54
P	Jasa Pendidikan	2,24	2,28	2,33	2,39	2,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,41	0,42	0,44	0,46	0,50
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,35	1,40	1,44	1,49	1,46

Catatan / Note: Angka sementara / Preliminary figures*

*** Angka sangat sementara / Very preliminary figures*

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2021

2.2.1.3. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat[3]. Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 415 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 untuk mengukur inflasi tahun 2014 - 2019 di Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui selama tahun 2019 sebanyak 361 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 306 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 55 komoditas mengalami

[3] Mankiw, N. G. (2012). Principles of macroeconomics. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.

penurunan. Kenaikan harga tertinggi selama tahun 2019 dibandingkan harga tahun 2018 terjadi pada komoditas cabe rawit yang mengalami perubahan harga selama setahun sebesar 38,56 persen, kemudian komoditas cabe merah 34,69 persen, bawang merah 33,13 persen, bawang putih 32,23 persen, dan pir 28,94 persen. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga selama tahun 2019 dibadingkan dengan harga yang tercatat pada tahun 2018 adalah komoditas telepon seluler sebesar -48,87 persen, kamera -26,06 persen, VCD/DVD Player -25,60 persen dan komputer tablet buah -23,73 persen. Angka inflasi disajikan dalam tabel 2.11.

Pada Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,60. Ketiga kota IHK di Provinsi Banten mengalami inflasi. Inflasi tertinggi

terjadi di Kota Cilegon sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 107,08. Diikuti oleh kota Serang sebesar 0,26 persen dengan IHK sebesar 107,42 dan kota Tangerang sebesar 0,17 persen dengan IHK sebesar 105,04. Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2018 di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui pada bulan Desember 2020 sebanyak 226 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 146 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 80 komoditas mengalami penurunan harga, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dibulan Desember 2020 antara lain: cabai merah, cabai rawit, tomat, telur ayam ras, kol putih/kubis, cabai hijau, ketimun, ikan kerapu, kembang gula dan telur asin. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Desember 2020, antara lain: petai, bawang merah, buncis, buah naga, melon, emas perhiasan, anggur, kemiri, ayam hidup, dan gula merah.

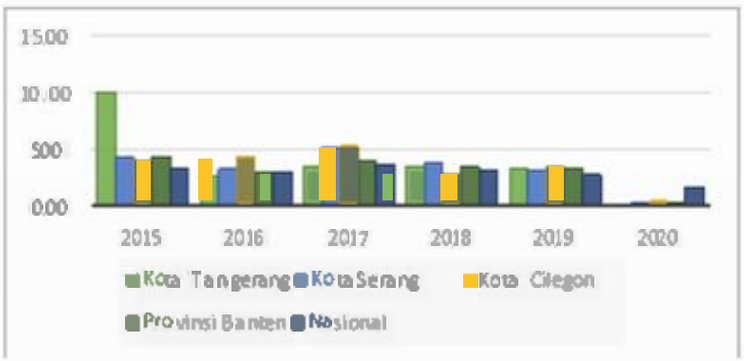
Tabel 2.11 Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2020

inflasi YoY (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Tangerang	10,03	2,65	3,50	3,46	3,30	0,17
Kota Serang	4,29	3,26	5,17	3,78	3,06	0,26
Kota Cilegon	3,94	4,22	5,24	2,73	3,54	0,38

inflasi YoY (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Banten	4,29	2,94	3,98	3,42	3,30	0,21
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 19 Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Perkembangan tingkat inflasi Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dari tahun 2015-2020 relatif berfluktuasi. Inflasi Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2020, laju inflasi di Kota Tangerang memiliki tren yang cenderung menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Tangerang adalah pada tahun 2015, yaitu sebesar 10,03%, sementara nilai inflasi pada tahun 2020 adalah yang terendah, yaitu sebesar 0,17%.

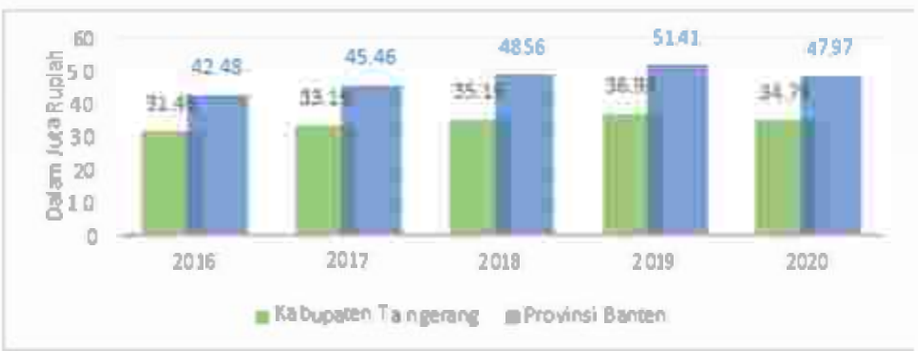
Sedangkan apabila dibandingkan dengan dengan nilai inflasi Provinsi Banten, nilai inflasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 3,30% sama jika dibandingkan Provinsi Banten yang juga sebesar 3,30%, memasuki tahun 2020 inflasi kota Tangerang menurun mencapai nilai 0,17% yang nilainya sedikit lebih rendah dari inflasi Provinsi Banten sebesar 0,21%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2019-2020, inflasi Kota Tangerang pada tahun 2019 mencatat nilai yang lebih tinggi yaitu 3,30% dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,72 dan tahun 2020 inflasi Kota Tangerang sebesar 0,17% tercatat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun 2020 sebesar 1,68%.

2.2.1.4. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.[4]

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 PDRB per kapita mengalami titik terendah dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 31,45 juta rupiah. PDRB per kapita mencapai titik tertinggi di tahun 2019 yaitu sebesar 36,93 juta rupiah. Sementara itu, pandemi Covid - 19 tahun 2020 juga memberikan dampak terhadap PDRB perkapita Kabupaten Tangerang yang terlihat menurun hingga mencapai 34,79 juta rupiah.

Gambar 20 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2016-2020 (juta rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

2.2.1.5. *Gini Ratio*

Ada berbagai tolok ukur yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan, antara lain Kurva *Conrad Lorenz,*

[4] Mankiw, N. G. (2012). Principles of macroeconomics. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.

Corrado Gini Coeffisient, Kuznets Index, Oshima Index dan *Theil Decomposition Index*. Namun yang paling banyak dan juga digunakan di Indonesia adalah *Gini Coeffisient* atau lebih dikenal dengan nama *Gini Ratio* (GR).

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Suatu metode mengukur ketimpangan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut:

- $0 < G \leq 0{,}35$ menunjukkan ketimpangan rendah
- $0{,}35 < G < 0{,}50$ menunjukkan ketimpangan sedang
- $G \geq 0{,}50$ menunjukkan ketimpangan tinggi

Level indeks gini tertinggi dalam periode 2010-2019 yaitu sebesar 0,37 pada tahun 2011 dan 2014. Pada tahun 2016 dan 2017 indeks gini sebesar 0,30 dan 0,32 secara berurutan yang menunjukkan ketimpangan yang rendah. Hal ini menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan Kabupaten Tangerang semakin baik. Meskipun masalah ketimpangan dapat diatasi, namun perlu tetap mewaspadai terjadinya ketimpangan yang lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini terjadi pada tahun 2017 – 2019 yang justru menunjukkan tren peningkatan ketimpangan dengan semakin meningkatnya indeks Gini (lihat gambar 2.29 untuk detail pertumbuhan rasio Gini Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang). Indeks gini dapat Kembali ditekan pada tahun 2020 yang menunjukkan angka 0,285.

Tabel 2.12 Pendapatan Penduduk 40% terendah dan Gini Rasio di Kabupaten Tangerang, Tahun 2010-2020

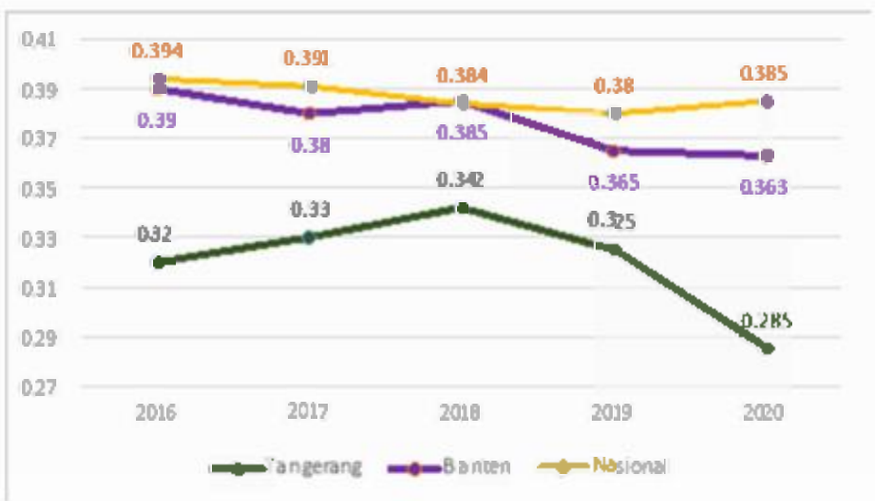
Tahun	*Gini Ratio*	Distribusi Pendapatan Penduduk 40% terendah (dalam %)
2010	0,33	20,87
2011	0,37	19,05
2012	0,32	22,42
2013	0,34	20,93
2014	0,37	19,60
2015	0,34	19,49
2016	0,30	21,14

Tahun	*Gini Ratio*	Distribusi Pendapatan Penduduk 40% terendah (dalam %)
2017	0,32	21,43
2018	0,34	N/A
2019	0,34	N/A
2020	0,285	N/A

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan BPS Provinsi Banten tahun 2021

Grafik di bawah ini menyajikan data ketimpangan pendapatan di Tangerang dibandingkan Provinsi Banten dan angka nasional. Dari grafik tersebut terlihat bahwa dalam beberapa tahun belakangan ketimpangan Kabupaten Tangerang bergerak sangat cepat dan cenderung meningkat dibandingkan dengan angka ketimpangan Provinsi Banten maupun angka nasional yang justru memiliki tren menurun hingga tahun 2019. Namun di tahun 2020, angka indeks gini Kabupaten Tangerang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan hingga angka 0,285.

Gambar 21 Rasio Gini Kabupaten Tangerang, Banten, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: Data BPS diolah, 2021

Ketimpangan yang tinggi bersumber dari beberapa aspek, salah satunya tidak berkembangnya sektor pertanian. Dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian memang tidak banyak, tetapi nilai tambah sektor ini kecil. Nilai tambah yang kecil bersumber dari tidak berkembangnya sektor yang bersangkutan. Sebagai daerah yang berkembang ke arah industri, permintaan lahan untuk industri cukup tinggi, akibatnya lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan industri,

sedangkan lahan pertanian bergeser ke tanah yang lebih marginal. Sementara kebijakan yang diambil daerah lebih banyak mendukung sektor industri yang menciptakan pertumbuhan dengan cepat.

Penyebab lain dari ketimpangan adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah dari sektor rumah makan, hotel, dan restoran. Sektor ini adalah sektor yang memiliki pendapatan per kapita paling rendah. Sektor ini adalah sektor yang sangat padat tenaga kerja. Sektor ini melayani hotel, rumah makan, dan restoran dari segala segmen. Sebagai daerah industri yang berkembang, maka dapat diduga kelompok masyarakat dengan pendapatan perkapita rendah adalah yang terbanyak dari sektor ini. Kebutuhan pekerja pabrik atas akomodasi dan konsumsi mendominasi sektor ini sehingga menyebabkan produktivitas sektor ini jauh lebih rendah dari rata-rata kabupaten.

Pada sisi lain, sektor industri pengolahan yang menjadi penopang utama pertumbuhan bersifat padat modal. Industri padat modal hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah yang sangat tinggi. Dengan demikian maka terjadilah ketimpangan antar sektor yang sangat mencolok. Dari kondisi ini sangat mudah diduga bahwa mereka yang masih terkategorikan penduduk miskin adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian dan akomodasi konsumsi itu.

Ketimpangan yang tinggi akan bermuara pada penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya alias miskin. Dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin Kabupaten Tangerang memang hanya 5% penduduk, jauh lebih rendah dari angka nasional yang masih mencapai angka lebih dari 9%.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Kemiskinan

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 22 Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

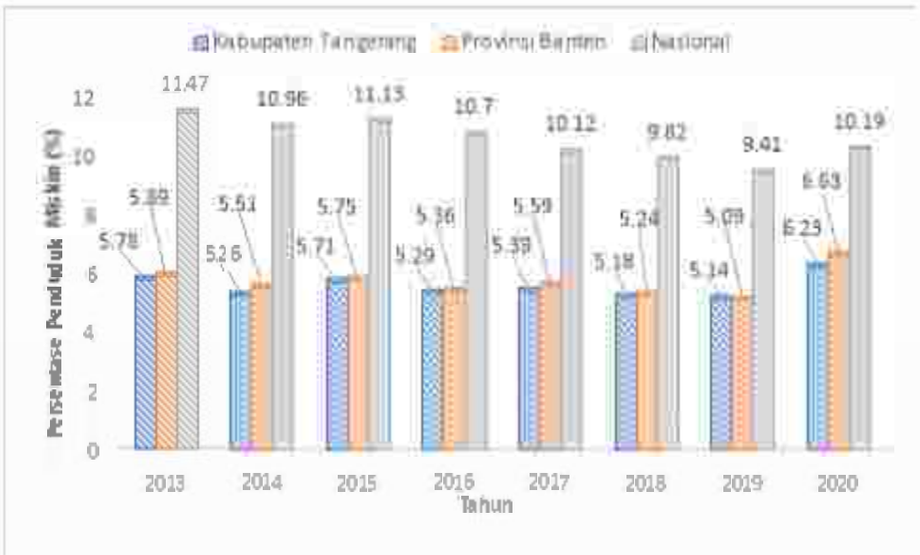


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2019 sekitar 0,69 dan tahun 2020 meningkat hingga 0,95. Sedangkan pada tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,14 dan tahun 2020 mencapai 0,22. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 6,23% atau sebanyak 242.160 orang, mengalami peningkatan secara persentase dari tahun 2019 yang sebesar 5,14%, dan mengalami peningkatan dari segi jumlah yang semula 193.970 orang. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 senilai Rp520.742,-/kapita/bulan.

Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya, pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai nilai sebesar 5,18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5,14%, tetapi kembali meningkat di tahun 2020 hingga mencapai 6,25%. Sementara itu, Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional pada Tahun 2013-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2013-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data yang telah dirilis BPS, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 menurun, kemudian persentase penduduk miskin tahun 2015 mengalami kenaikan dan tahun 2016 kembali menurun, memasuki tahun 2017 persentase penduduk miskin kembali naik mencapai 5,39%, namun memasuki tahun 2018 dan 2019 persentase penduduk miskin mengalami penurunan mencapai angka 5,18% dan 5,14%. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan dengan menjalankan beberapa program yang berasal dari pemerintah pusat, antara lain seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non tunai. Selain itu, juga pembentukan tim reaksi cepat (TRC) untuk menanggulangi angka kemiskinan dengan memberikan pendampingan usaha bagi warga miskin[5]. Sedangkan jika dilihat pada tiga tahun ke belakang, pada tahun 2017, 2018, dan 2019 persentase penduduk miskin di tingkat Provinsi Banten dan Nasional trennya juga cenderung mengalami penurunan.

Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak meningkatnya persentase penduduk miskin baik di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maupun di tingkat

[5] https://indopos.co.id/read/2019/05/21/175893/tiap-tahun-warga-miskin-di-kabupaten-tangerang-bertambah/

Nasional. Di Kabupaten Tangerang, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 6,23%, sedangkan di level Provinsi Banten, persentase penduduk miskin juga meningkat menjadi 6,63%. Di level nasional, persentase penduduk miskin meningkat hingga menjadi 10,19%.

Dengan melihat jumlah penduduk di bawah kemiskinan sesuai grafik di atas, berikut adalah perkembangan persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang berada di atas Garis Kemiskinan tahun 2017-2020:

Tabel 2.13 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

No	Tahun	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%)
1	2017	94,61
2	2018	94,82
3	2019	94,86
4	2020	93,77

Sumber: BPS dan BPS Kabupaten Tangerang, 2021

Sementara itu, apabila dilihat dari gambar 2.31, tampak bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang jauh lebih rendah dari angka nasional, kondisi yang senada juga dapat dilihat dari tingkat keparahannya, penduduk miskin yang berada di Kabupaten Tangerang kondisinya sedikit lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan Nasional. Indeks kedalaman kemiskinan yang mengukur *gap* antara data observasi dan rata-rata penduduk miskin menunjukkan angka yang dicapai Kabupaten Tangerang lebih rendah dari Provinsi Banten maupun angka nasional (lihat tabel 2.14).

Tabel 2.14 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan tahun 2013-2020

Tahun	Kedalaman Kemiskinan (P1)			Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Kabupaten Tangerang	Provinsi Banten	Nasional	Kabupaten Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2013	0,78	0,95	1,88	0,21	0,28	0,48
2014	0,63	0,79	1,75	0,12	0,18	0,44
2015	0,82	0,94	1,84	0,18	0,23	0,51
2016	0,79	0,80	1,74	0,18	0,17	0,44

Tahun	Kedalaman Kemiskinan (P1)			Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Kabupaten Tangerang	Provinsi Banten	Nasional	Kabupaten Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2017	0,68	0,86	1,79	0,13	0,19	0,46
2018	0,82	0,91	1,63	0,20	0,25	0,41
2019	0,69	0,80	1,50	0,14	0,23	0,36
2020	0,95	1,14	1,75	0,22	0,34	0,47

Sumber: diolah dari Website BPS Pusat, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/kota

2.2.2.2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut Undang-undang Nomor 52 tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. BKKKBN membagi indikator keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan menjadi 3, yaitu indikator keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*), indikator keluarga sejahtera II (KS II) atau indikator kebutuhan psikologis (*psychological needs*), indikator keluarga sejahtera III (KS III) atau indikator kebutuhan pengembangan (*developmental needs*), dan indikator keluarga sejahtera III plus (KS 1) atau indikator kebutuhan aktualisasi diri (*self esteem*).

2.2.2.3. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola pangan harapan (PPH) merupakan susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, skor maksimalnya yaitu 100.

Tabel 2.15 Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Tangerang

Tahun	Skor Pola Pangan Harapan
2016	86.4
2017	85.1
2018	87.4
2019	84.3
2020	85.5

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2020

2.2.2.4. Penguatan cadangan pangan

Menurut UU Nomor 18 tahun 2012, cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah NKRI untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari 4 yaitu, cadangan pangan pemerintah pusat, cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, dan cadangan pangan pemerintah desa.

Tabel 2.16 Penguatan Cadangan Pangan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2017-2021

Tahun	Pengadaan Cadangan Pangan (Ton)
2017	17.080
2018	25.700
2019	12.800
2020	25.000
2021	18.725

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2020

2.2.2.5. Penanganan daerah rawan pangan

Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan meskipun tidak identik. Tingkat kedalaman kerawanan pangan

ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari nilai AKG 2.000 kkl/kap/hr. Jika konsumsi per kapita kurang atau lebih kecil dari 70% dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan; sekitar 70%-90% dari AKG dikategorikan rawan pangan; dan lebih dari 90% dari AKG termasuk kategori rawan pangan.

Tabel 2.17 Penanganan Desa dengan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Tahun	Desa Prioritas I dan II
2018	3
2019	10
2020	14
2021	14

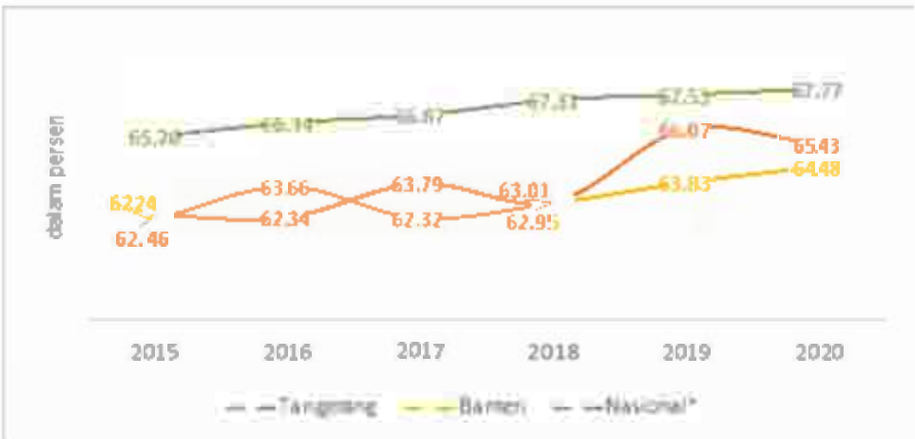
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021

2.2.2.6. Tenaga Kerja

Penduduk merupakan faktor penting sebagai daya dukung di dalam sebuah perekonomian. Penduduk yang telah memasuki usia antara 15 sampai 64 tahun adalah penduduk usia produktif untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Penduduk usia produktif yang sudah memiliki pekerjaan dan sedang mencari atau tidak memiliki pekerjaan disebut angkatan kerja. Penduduk bekerja atau tenaga kerja adalah angkatan kerja yang memiliki pekerjaan sedangkan pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari atau tidak memiliki pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan rasio antara angkatan kerja dan jumlah penduduk dikalikan dengan 100.

Pada tahun 2015 – 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari angka 62,46 di tahun 2015 menjadi 67,30 di tahun 2019. Rinciannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional tahun 2015 - 2020



Catatan: data Kabupaten Tangerang tahun 2016 merupakan estimasi Bappeda Kabupaten Tangerang

**Data Sakernas BPS Nasional*

Sumber: BPS Banten, 2021

Sementara itu, apabila dilihat jumlah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan, data tahun 2020 menunjukkan sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Tangerang adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Dasar (SD).

Tabel 2.18 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan tahun 2019 - 2020

Angkatan Kerja						
Pendidikan yang ditamatkan	Bekerja		Jumlah Angkatan Kerja		Persentase bekerja terhadap angkatan kerja	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
SD	518.316	527.139	543.142	577.307	95,43%	91,31%
SMP	362.602	319.195	391.901	366.752	92,52%	87,03%
SMA	606.132	589.168	699.728	718.684	86,62%	81,98%
Perguruan Tinggi	189.790	161.436	206.026	173.983	92,12%	92,79%
TOTAL	1.676.840	1.596.938	1.840.797	1.836.726	91,09%	86,94%

Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2020

Apabila ditinjau dari data tahun 2020 terkait status pekerjaan utama penduduk yang bekerja, sebagian besar penduduk bekerja

sebagai buruh dengan jumlah mencapai 919.277 penduduk yang kemudian disusul oleh 343.794 penduduk yang bekerja dengan berusaha sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut rincian jumlah tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya untuk tahun 2017 - 2020:

Tabel 2.19 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang Berdasarkan Status Pekerjaannya Tahun 2017 - 2020

Status Pekerjaan Utama	2017		2018		2019		2020	
	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah	%
Berusaha sendiri	270.923	18%	305.519	20%	326.445	19%	343.794	22%
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	64.429	4%	92.246	6%	82.898	5%	29.176	2%
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	34.502	2%	40.298	3%	27.943	2%	103.368	6%
Buruh/Karyawan/ Pegawai	907.790	61%	914.578	60%	1.091.787	65%	919.277	58%
Pekerja bebas	121.609	8%	100.137	7%	95.543	6%	109.083	7%
Pekerja keluarga/ tak dibayar	77.954	5%	77.373	5%	52.224	3%	92.240	6%
Jumlah	1.477.207	100%	1.530.151	100%	1.676.840	100%	1.596.938	100%

Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2021

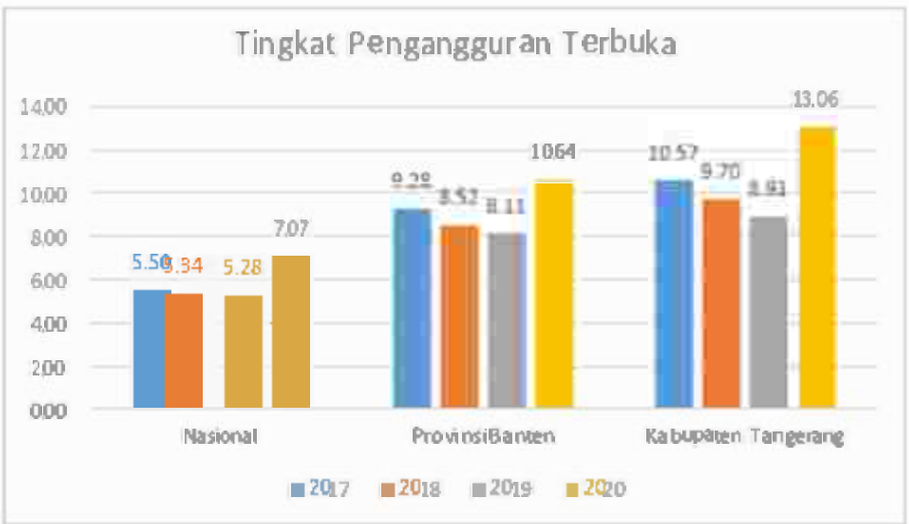
2.2.2.7. Pengangguran

Tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat, secara makro dapat dilihat dari tingkat pemekerjaan, IPM, dan penduduk miskin. Angka pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan pada indikator sosial lainnya. Seseorang yang menganggur tentu memiliki daya beli yang rendah. Rendahnya daya beli itu kemudian berpengaruh pada capaian angka IPM. Grafik di bawah ini menyajikan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tangerang dibandingkan Provinsi Banten dan Nasional. Dari diagram dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tangerang hampir selalu dalam keadaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten maupun angka Nasional.

Dari gambar 35, dapat diketahui bahwa tingkat tenaga kerja yang dipekerjakan (*hiring*) di Tangerang dibandingkan dengan Provinsi Banten

maupun Nasional ternyata masih belum cukup baik. Salah satu hal yang dapat menjelaskan kondisi ini adalah sifat dan karakter investasi yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Karakter investasi yang padat modal mampu menciptakan nilai tambah dengan cepat sehingga menciptakan pertumbuhan yang tinggi, namun sifat investasi yang demikian kurang memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja.

Gambar 25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2017 -2020



Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Banten per Agustus 2020 dan BPS Tangerang 2020

Faktor lain yang mungkin menyebabkan tingginya angka pengangguran terbuka adalah ketidakmampuan penduduk Kabupaten Tangerang untuk mengakses pekerjaan yang ada. Mereka para penganggur sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penyebab utamanya yaitu soal minimnya keahlian. Banyak perusahaan - perusahaan yang tidak menerima karena memang tak sesuai dengan kualifikasinya.[6] Selain itu, Kabupaten Tangerang sebagai kota industri menjadi daya tarik luar biasa bagi penduduk luar Kabupaten Tangerang untuk bermigrasi dalam rangka mencari pekerjaan. Hal ini berdampak pada munculnya persaingan tenaga kerja antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja migran yang datang ke Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, kemampuan untuk bersaing atau daya saing tenaga kerja lokal perlu untuk diperhatikan agar dapat bersaing dengan tenaga migran.

[6] Statistik Kesejahteraan Daerah Kabupaten Tangerang 2019

Menurut Kabupaten Tangerang Dalam angka tahun 2020, terdapat jumlah pengangguran sebanyak 163.957 orang di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri dari 104.777 orang laki – laki dan 59.180 orang perempuan. Apabila dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT), maka TPT laki – laki berada pada kisaran 8,7% dan TPT perempuan sedikit lebih tinggi, yaitu 9,1%. Angka total pengangguran Kabupaten Tangerang meningkat tajam pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid – 19 hingga mencapai 239.788 orang yang terdiri dari 140.467 orang laki – laki dan 99.321 orang perempuan.[7] Berdasarkan jenisnya, berikut adalah jenis – jenis pengangguran yang ada di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019-2020:

Tabel 2.20 Jenis dan Jumlah Pengangguran di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019-2020 (dalam jiwa)

No.	Jenis Pengangguran	2019	2020
1	Mencari pekerjaan	24.826	50.168
2	Mempersiapkan usaha	29.299	47.557
3	Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan	93.596	129.516
4	Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja	16.236	12.547
	TOTAL	163.957	239.788

Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2021

Pada tahun 2020, masih terdapat pencari kerja sebanyak 50.168 orang di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang menjadi Kabupaten dengan persentase pengangguran tertinggi di Provinsi Banten. Padahal, Kabupaten Tangerang merupakan Kabupaten dengan julukan kota 1000 industri. Menurut data tahun 2018, Kabupaten Tangerang memiliki 1.131 industri besar[8], 41.115 UMKM[9], dan 1548 Koperasi[10]. Hal tersebut perlu untuk diperhatikan bahwa dengan banyaknya industri besar dan UMKM di Kabupaten Tangerang, masih banyak tenaga kerja yang belum terserap.

Peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2020 (per Agustus 2020) setelah Kabupaten Tangerang berhasil untuk menurunkan TPT dari

[7] Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2021
[8] Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Provinsi Banten Tahun 2018, hlm. Xii.
[9] Diakses melalui https://statistik.bantenprov.go.id/ekonomi/koperasi pada tanggal 10 Desember 2020
[10] Ibid.,

tahun 2017 – 2019 salah satunya disebabkan oleh dampak Pandemi Covid – 19 yang membuat banyak dari industri yang ada di Kabupaten Tangerang perlu melakukan efisiensi anggaran perusahaan dengan melakukan putus hubungan kerja atau kemungkinan terburuknya adalah gulung tikar. Berdasarkan data per Agustus 2020, BPS Provinsi Banten menyatakan Kabupaten Tangerang sebagai Kabupaten dengan TPT Tertinggi di Provinsi Banten dengan TPT sebesar 13,06%. Hingga akhir Oktober 2020, tercatat sudah ada 23 perusahaan besar yang harus gulung tikar lantaran tersumbatnya proses distribusi barang selama pandemi Covid 19 dengan total jumlah karyawan PHK dan yang dirumahkan sudah mencapai sekitar 37 ribu orang dan masih ada kemungkinan pertambahan.[11]

2.2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia

Dari tahun 2017 sampai 2020, tercatat capaian IPM Kabupaten Tangerang selalu lebih rendah daripada capaian Provinsi Banten dan sedikit lebih rendah dari angka nasional. Nilai IPM Provinsi Banten pada tahun 2020 adalah 72,45 sedangkan Kabupaten Tangerang adalah 71,92 berarti lebih rendah 0,53 bila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan hanya terpaut tipis 0,02 dari angka Nasional yang mencapai 71,94.

Tabel 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Komponen IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2017 - 2020

No	Provinsi / Kab/Kota	IPM				Peringkat IPM			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Provinsi Banten	71,42	71,95	72,44	72,45				
2	Pandeglang	63,82	64,34	64,91	65,00	7	7	7	7
3	Lebak	62,95	63,37	63,88	63,91	8	8	8	8
4	Tangerang	70,97	71,59	71,93	71,92	5	5	5	5
5	Serang	65,60	65,93	66,38	66,70	6	6	6	6
6	Kota Tangerang	77,01	77,92	78,43	78,25	2	2	2	2
7	Kota Cilegon	72,29	72,65	73,01	73,05	3	3	3	3
8	Kota Serang	71,31	71,68	72,10	72,16	4	4	4	4
9	Kota Tangsel	80,84	81,17	81,48	81,36	1	1	1	1

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

[11] Diakses melalui https://www.ayojakarta.com/read/2020/11/09/26950/kabupaten-tangerang-menyandang-status-pengangguran-tertinggi-di-banten

Gambar 26. IPM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2017 -2020



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Banten

Capaian angka IPM yang relatif lambat dibandingkan Provinsi Banten itu tampaknya bersumber dari indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Berdasarkan data tahun 2015 – 2020, pertumbuhan daya beli Kabupaten menunjukkan angka yang cukup rendah bahkan mengindikasikan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020. Hal ini terkait dengan perkembangan sektor yang terjadi. Sebagaimana diuraikan di atas sektor-sektor penyerap tenaga terbanyak memiliki nilai produktivitas yang relatif rendah, dengan demikian penduduk yang bekerja pada sektor bersangkutan (pertanian dan akomodasi, konsumsi) juga memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah. Inilah alasan mengapa pertumbuhan daya beli yang dicapai Tangerang juga rendah. Selain itu, pandemi Covid – 19 yang terjadi semakin memperburuk kemampuan daya beli rata-rata penduduk Kabupaten Tangerang hingga pertumbuhan pengeluaran perkapita mencapai angka minus di tahun 2020 (lihat gambar 2.34). Berikut adalah data angka pendapatan per kapita yang disesuaikan untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Tabel 2.22 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (ribu rupiah/tahun), 2015 - 2020

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (ribu rupiah/tahun)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab Pandeglang	7.730	8.138	8.358	8.613	8.719	8.572
Kab Lebak	8.111	8.308	8.372	8.634	8.850	8.690
Kab Tangerang	11.727	11.863	11.914	12.179	12.476	12.203
Kab Serang	10.004	10.317	10.466	10.693	10.802	10.665
Kota Tangerang	13.766	13.911	14.104	14.443	14.860	14.484
Kota Cilegon	12.127	12.326	12.562	12.900	13.230	13.010
Kota Serang	12.289	12.660	12.914	13.261	13.418	13.212
Kota Tangerang Selatan	14.588	14.972	15.291	15.672	15.988	15.667
Provinsi Banten	11.261	11.469	11.659	11.994	12.267	11.986

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2020

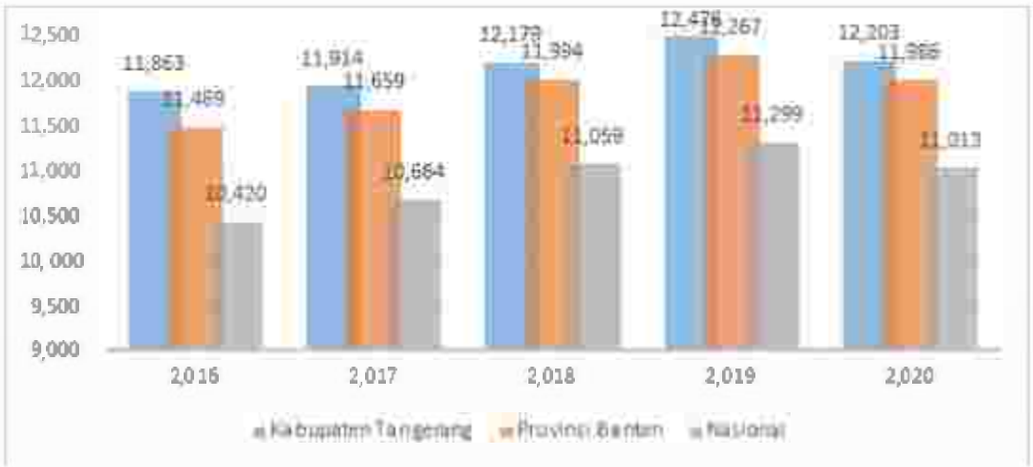
Jika dilihat secara lebih dekat, berikut adalah grafik pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Tangerang tahun 2015 – 2020 dan perbandingan pengeluaran per kapita yang disesuaikan di level Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan nasional.

Gambar 27. Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Tangerang tahun 2015 - 2020



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2020

Gambar 28 Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional tahun 2015 – 2020 (ribu rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Banten, 2021

2.2.2.9. Angka Melek Huruf

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Di mana hal ini merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk dalam proses bermasyarakat, sehingga penduduk dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Kabupaten Tangerang. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Secara matematis, angka ini memperlihatkan rasio antara jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia lima belas tahun ke atas dalam satuan ratusan. Indikator tersebut penting mengingat melek huruf merupakan pintu dari segala ilmu pengetahuan. Pada tahun 2020 terdapat 97,62 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tangerang yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin, sedangkan sisanya sebanyak 2,38 persen masih belum/tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Angka melek huruf sebelumnya pernah menjadi salah satu indikator pencapaian program Pendidikan, namun saat ini angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Tabel 2.23 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Tangerang
Tahun 2013-2020

No.	Tahun	Angka Melek Huruf (dalam %)
1	2013	96,37
2	2014	97,25
3	2015	96,90
4	2016	96,07
5	2017	95,92
6	2018	98,90
7	2019	99,24
8	2020	97,62

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2020

2.2.2.10. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 mencapai 8,39 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tangerang baru dapat bersekolah hingga jenjang SMP kelas tiga / kelas sembilan.

Tabel 2.24 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang
Tahun 2014-2020

No	Tahun	Angka rata-rata lama sekolah (RLS) (dalam tahun)
1	2014	8,20
2	2015	8,22
3	2016	8,23
4	2017	8,24
5	2018	8,27
6	2019	8,28
7	2020	8,40

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2020

Peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) tiap tahun yang dicapai oleh Kabupaten Tangerang selama 2014 - 2020 belum menunjukkan peningkatan secara signifikan tiap tahunnya. Hal ini diduga terkait dengan relatif tingginya penduduk usia kerja yang telah memiliki pendidikan yang relatif rendah. Sementara itu kinerja pendidikan penduduk usia muda belum mampu mengimbangi kondisi pendidikan yang masih relatif rendah. Berikut adalah perbandingan angka rata – rata lama sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional.

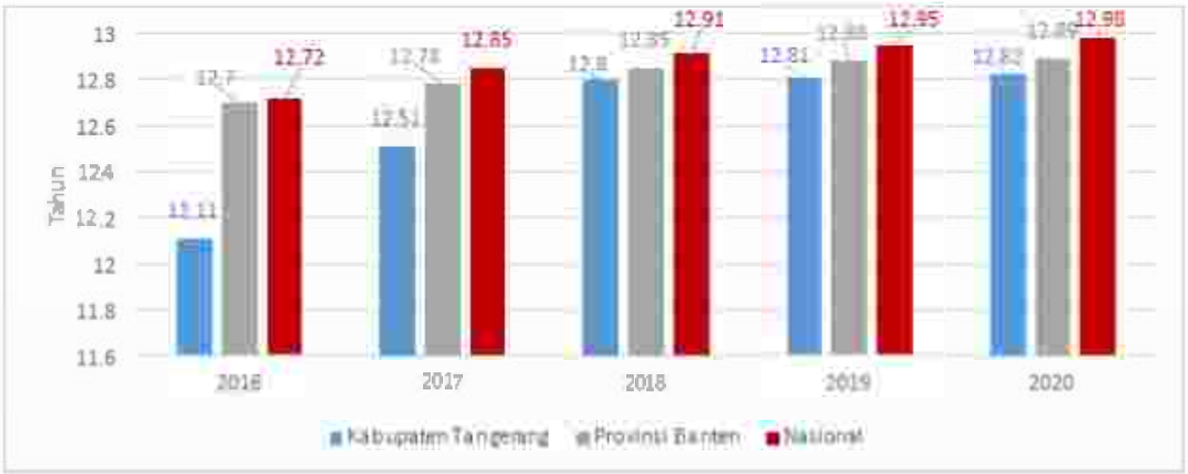
Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan di suatu daerah antara lain adalah dengan melihat persentase harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kualitas sumber daya manusia sangat bergantung dari pembangunan di bidang pendidikan. Tercatat pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dengan penghitungan metode baru IPM tercatat Harapan Lama Sekolah (HLS) berturut-turut mencapai 12,51, 12,80, 12,81, dan 12,82. Terdapat peningkatan walaupun tidak besar. Berikut adalah perbandingan harapan lama sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional.

Gambar 29 Perbandingan Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional tahun 2015 – 2020 (dalam tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Banten, 2021

Gambar 30 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional tahun 2015 – 2020 (dalam tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Banten, 2021

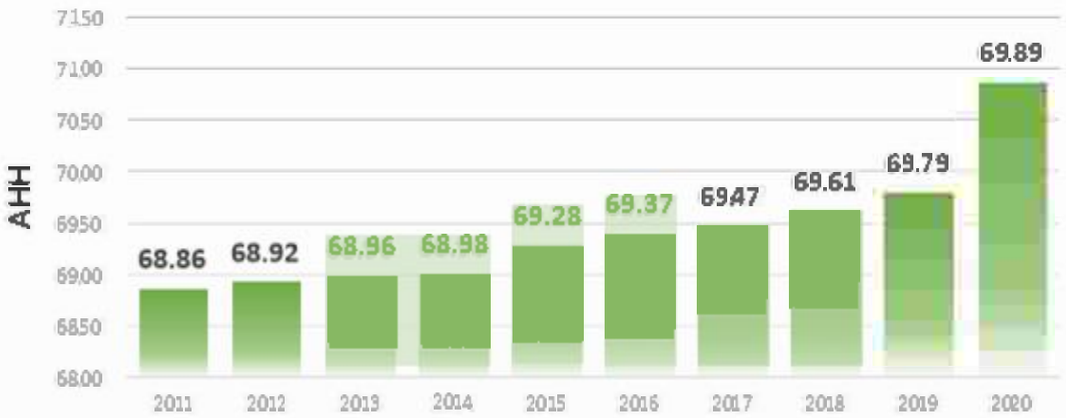
2.2.2.11. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup dipakai untuk mengukur dimensi kesehatan, sementara dimensi kesehatan dipakai sebagai salah satu dimensi dasar untuk pengukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Banten pada tahun 2020 adalah 69,96 tahun.

Pada tahun 2020, Kabupaten Tangerang memiliki AHH sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Banten yaitu 69,89 tahun, tetapi lebih tinggi dari Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang serta lebih tinggi dari Kota Cilegon dan Kota Serang.

Sejak tahun 2011 – 2020, angka harapan hidup di Kabupaten Tangerang secara stabil cenderung mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2011 AHH Kabupaten Tangerang adalah sebesar 68,86 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai angka 69,89 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Gambar berikut ini memberikan gambaran kondisi angka harapan hidup tingkat Kabupaten Tangerang.

Gambar 31 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang
(Tahun 2011-2020)



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, tahun 2020, diolah.

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Tangerang masih cukup lambat, hanya mencapai angka 0,93 tahun dalam waktu 9 tahun tersebut. Rendahnya capaian kinerja angka harapan hidup terkait dengan kinerja kesehatan secara keseluruhan. Apabila dibandingkan dengan provinsi Banten dan Nasional, berikut grafik perbandingannya.

Gambar 32 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional tahun 2016 – 2020 (dalam tahun)



Sumber: BPS dan BPS Banten, 2021

2.2.2.12. Presentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi buruk merupakan balita yang memiliki *Z-score* kurang dari -3,0 standar deviasi. *Z-score* adalah nilai simpangan berat badan

(BB) atau tinggi badan (TB) dari nilai BB atau TB normal menurut baku pertumbuhan WHO. Sedangkan Balita gizi kurang adalah balita yang memiliki *Z-score* di antara -3,0 standar deviasi sampai kurang dari -2,0 standar deviasi. Balita kategori ini berada satu level di atas balita gizi buruk.

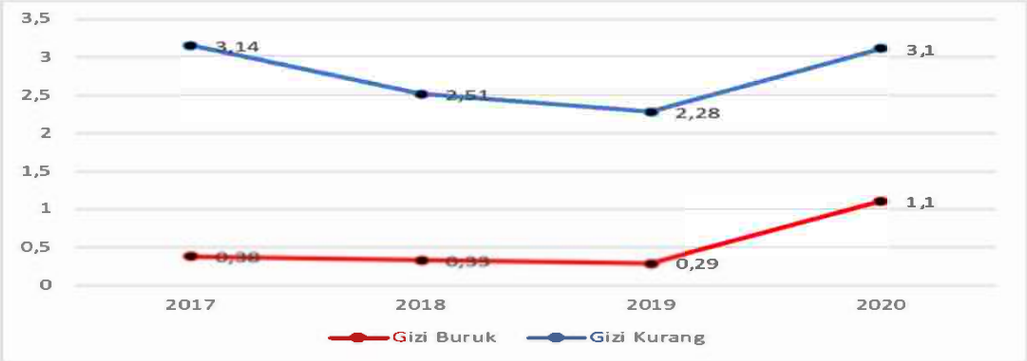
Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tahun 2018 – 2019 secara konsisten mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Keadaan ini menunjukkan adanya komitmen menyeluruh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi di Kabupaten Tangerang melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumberdaya masyarakat melalui Pos Gizi, KP ASI, dan KERAMAS, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal menurunkan angka gizi buruk. Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah dalam penanggulangan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Sayangnya, pada tahun 2020 angka prevalensi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk kembali meningkat cukup tajam sebagai salah satu dampak adanya pandemic Covid – 19. Gambaran status gizi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25 Gambaran Status Gizi Pada Balita Di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

Tahun	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)
2016	0,41	3,17
2017	0,38	3,14
2018	0,33	2,51
2019	0,29	2,28
2020	1,10	3,90

Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2020

Gambar 33 Tren Gizi Buruk dan Gizi Kurang Berdasarkan Metode (BB/U) Di Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020



Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2020

Meskipun terjadi penurunan di tahun 2017 dan 2018, data dari dari status gizi nasional (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau yang disebut e-PPGBM) per Agustus 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat 20.425 balita dengan kasus *stunting* di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten dengan kasus *stunting* tertinggi di provinsi Banten[12]. Kondisi yang sama juga terjadi dengan kasus *wasting*, jumlah balita dengan kasus wasting yang ada di Kabupaten Tangerang mencapai 13.716 balita dan jumlah ini menjadi yang tertinggi dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Banten[13]. Sementara itu, kasus *underweight* di Kabupaten Tangerang juga tidak jauh berbeda kondisinya. Per Agustus 2020, masih terdapat 13.388 balita dengan kasus *underweight*, dan jumlah ini juga menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Banten[14]. Berikut adalah rincian status gizi balita Kabupaten Tangerang per Agustus 2020:

Tabel 2.26 Data Status Gizi Balita di Kabupaten Tangerang per Agustus 2020

No.	Kategori Status Gizi	Jumlah balita (jiwa)
1.	Balita Berat Badan Sangat Kurang	3.590
	Balita Berat Badan Kurang	9.798
	Balita Berat Badan Normal	173.366

[12] Diakses melalui https://sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id/ppgbm/index.php/Dashboard/ pada tanggal 1 Desember 2020
[13] *Ibid*.
[14] *Ibid*.

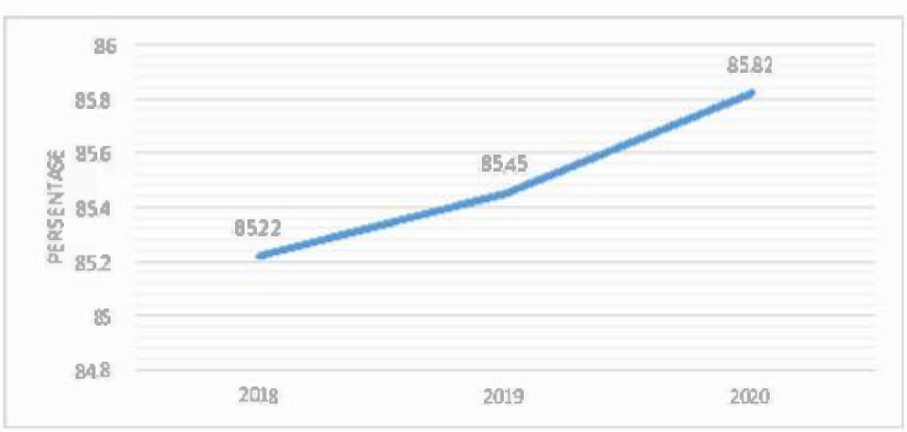
No.	Kategori Status Gizi	Jumlah balita (jiwa)
	Balita Berat Badan Risiko Lebih	18.635
2	Balita Sangat Pendek	8.290
	Balita Pendek	12.135
	Balita Normal	175.486
	Balita Tinggi	9.272
3	Balita Gizi Buruk	4.835
	Balita Gizi Kurang	8.881
	Balita Gizi Normal	168.268
	Balita Gizi Lebih	23.236

Sumber: sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id

2.2.2.13. Cakupan Desa Siaga Aktif

Di dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota terdapat indikator Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Desa dan Kelurahan Siaga aktif adalah bentuk pengembangan dari Desa Siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau kelurahan ini memiliki komponen sebagai berikut, (1) pelayanan kesehatan dasar, (2) pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM dan mendorong *surveillance* berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan, sehingga (3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat terwujud. Banyaknya desa dan kelurahan siaga aktif ini dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan di bidang kesehatan. Bentuk pemerintahan kabupaten akan terdiri dari desa-desa. Maka dari itu, Kabupaten Tangerang memiliki desa siaga aktif. Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2020 dengan angka seperti yang Nampak pada gambar sebagai berikut:

Gambar 34 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Tangerang, 2018 – 2020



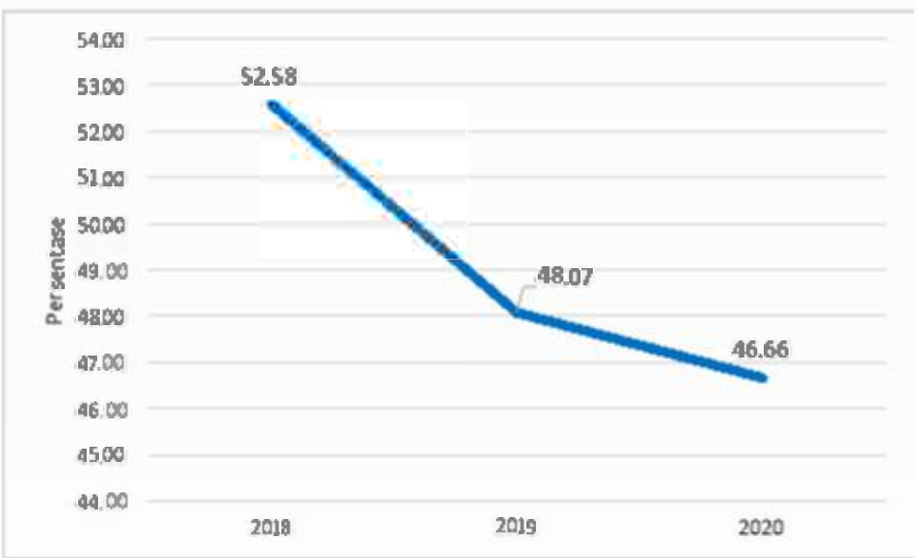
(dalam %)

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

2.2.2.14. Presentase PAD terhadap Pendapatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD dapat menjadi sebuah indikator kemandirian pemerintah dalam mendapatkan pendapatan untuk membiayai dirinya sendiri.

Gambar 35 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2018 – 2020 (dalam %)



Sumber: Bapenda Kabupaten Tangerang (diolah)

Dengan melihat gambar di atas, dapat diketahui bahwa Persentase PAD terhadap pendapatan daerah cukup dominan dengan persentase yang melebihi 50% pada tahun 2018. Namun demikian kondisi ini kemudian menurun berturut – turut pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 48,07% dan 46,66%.

2.2.2.15. Opini BPK

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dimuat di dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinioni*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*), dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2020, pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten menunjukkan hasil opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini merupakan hasil dari strategi dan program yang disusun oleh pemerintah pada RPJMD Kabupaten Tangerang sejak tahun 2013. Opini WTP harus dipertahankan mengingat komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Implikasinya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.27 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data: BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2020

2.2.2.16. Indeks Kepuasan Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang diperoleh dengan mengukur secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas

layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.[15] Berikut di bawah ini adalah indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Tangerang terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang:

Tabel 2.28 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

No.	Tahun	IKM
1	2015	71,25
2	2016	76,39
3	2017	75,05
4	2018	81,45
5	2019	83,66
6	2020	86,36

Sumber : Bagian Ortala Kabupaten Tangerang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki tren yang cenderung meningkat meskipun pernah menurun tipis di tahun 2017 dan kemudian secara konsisten meningkat dari tahun 2018 - 2020. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tangerang tahun 2015-2020 atau selama 5 tahun terakhir adalah mencapai 79,02.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Di bidang Olahraga, Prasarana Olahraga di

[15] Diakses melalui https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--layanan-publik-dan-kepuasan-masyarakat- pada tanggal 8 Desember 2020

Lingkungan Kabupaten Tangerang menurut Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2019, meliputi :

a. Prasarana olahraga di area *Sport Center;* dan

b. Prasarana olahraga di luar area *Sport Center* meliputi :

1. Stadion mini Sepak Bola kecamatan; dan
2. Gedung Olahraga Kecamatan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

A. Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini pada dasarnya adalah Pendidikan untuk anak berusia di antara tiga hingga enam tahun. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan anak sebelum sekolah dasar. Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Tangerang tahun ajaran 2018/2019 untuk siswa TK terdiri dari 18.396 siswa, tingkat RA sebanyak 12.437 siswa, penitipan anak sebanyak 101 anak, dan PAUD sebanyak 10.706 siswa, sehingga jumlah usia siswa PAUD Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 41.640 siswa, dengan jumlah usia penduduk 4-6 tahun sebanyak 266.021 siswa. Persentase partisipasi siswa PAUD yang ikut pendidikan dibandingkan dengan jumlah anak usia 4-6 tahun adalah sekitar 0,16%. Berikut adalah tabel berisi data jumlah siswa PAUD tahun 2020.

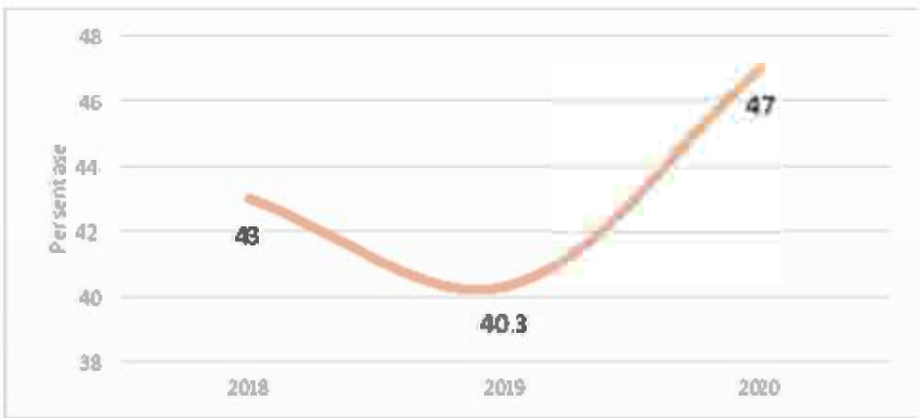
Tabel 2.29 Jumlah Usia Siswa TK/RA/PAUD Tahun 2020/2021 di Kabupaten Tangerang

URAIAN	2020 (dalam jiwa)
Siswa TK	19.806
Siswa RA	25.031
Penitipan Anak	23
SPS	3.021
PKBM	9.899
SKB	98

Sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id

Sejak tahun 2018 – 2020, cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara fluktuatif menunjukkan angka sebagai berikut:

Gambar 36 Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tangerang tahun 2018 - 2020 (dalam persen)



Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka, Dinas Pendidikan, 2021

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur porsi penduduk pada usia tertentu yang bersekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut. APM dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun dan SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang sejak tahun 2015 – 2020 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

Jenjang Pendidikan	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
SD/Sederajat	94,12	96,60	96,30	95,84	98,98	98,87
SMP/Sederajat	84,31	78,40	78,95	79,06	81,62	81,56

Sumber : Dinas Pendidikan 2021

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok

usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2020 APK di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar 109,49% menurun 1,07 poin dari tahun 2019, kondisi serupa terjadi pada pada APK tingkat SMP/MTs tahun 2020 sebesar 90,64% yang menurun sebesar 1,93 poin dari tahun 2018. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.33.

Tabel 2.31 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Tangerang

No	Uraian	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	SD/MI	109,64	110,92	111,02	86,81	110,56	109,49
2	SMP/MTs	104,60	105,09	105,29	96,27	92,57	90,64

Sumber : Dinas Pendidikan 2020

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Pada tahun 2019, APS Kabupaten Tangerang untuk anak usia 7-12 tahun sebesar 100 persen. Angka ini menunjukkan bahwa persentase anak usia 7-12 tahun yang bersekolah mencapai 100 persen sehingga tidak terdapat data adanya anak yang tidak sekolah pada tahun 2020. Anak yang tidak bersekolah terdiri dari anak yang sudah memasuki usia sekolah tetapi belum bersekolah dan anak yang putus sekolah. Sementara itu, APS anak usia 13-15 tahun lebih rendah dibanding APS anak usia 7-12 tahun. APS anak usia 13-15 tahun sebesar 97,69 persen. Angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 97 anak usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah dari 100 anak usia 13-15 tahun. Semakin tinggi usia anak, partisipasi sekolahnya semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan, lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.32.

Tabel 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015-2020 Kabupaten Tangerang

Uraian	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)

Usia SD (7 - 12)	98,84	99,26	99,66	99,76	100,00	100,00
Usia SMP (13 -15)	94,56	93,41	95,69	95,81	96,19	97,69

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2020

E. Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) tahun 2020 di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar 100%, angka kelulusan SMP/MTS sebesar 100%, dan angka kelulusan tingkat SMA/sederajat masih belum tersedia.

Tabel 2.33 Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

No.	Lulusan Sekolah	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	SD/MI	100,00	100,00	100,70	100,00	100,00	100,00
2	SMP/MTS	100,00	100,00	102,61	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

F. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah Perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Tangerang sebesar 97,19%. Sedangkan, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 84,08%.

Tabel 2. 34 Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

No.	Melanjutkan Sekolah	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	SD/MI ke SMP/MTS	67,59	98,05	98,06	96,69	97,19
2	SMP/MTS ke SMA/MA	90,09	83,93	83,98	84,03	84,08

Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021, Dinas Pendidikan 2021

G. Rasio guru dan murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2. 35 Rasio Guru/Murid Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

No	Tahun	Rasio Guru/Murid Pendidikan	Rasio Guru/Murid Pendidikan

		Dasar	Menengah
1	2018	0,003	0,003
2	2019	0,004	0,004
3	2020	0,004	0,004

Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021, Dinas Pendidikan, 2021

H. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.36 Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Rasio Ketersediaan sekolah
1	2017	0,029
2	2018	0,034
3	2019	0,036
4	2020	0,038

Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021, Dinas Pendidikan 2021

I. Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Pada tahun 2017, lulusan SD yang ada di Kabupaten Tangerang sebanyak 55.621 siswa atau 15,36% dari usia/umur Sekolah Dasar yang berjumlah 362.205 jiwa. Sementara itu pada tahun 2018 hingga 2019, jumlah murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar per jumlah penduduk mengalami peningkatan, yaitu sebesar 16,36%.

Tabel 2.37 Banyaknya Lulusan Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015-2019 Kabupaten Tangerang

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Lulusan SD (jiwa)	58.306	51.305	55.621	N/A	N/A
Penduduk Usia 12th (jiwa)	348.364	348.364	362.205	N/A	N/A
Proporsi (%)	16,74	14,73	15,36	16,36	16,36

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (2015-2017), dan RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021

J. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang ada di Kabupaten Tangerang berjumlah sebanyak 17.148 jiwa pada tahun 2017 dengan kualifikasi S1 sebanyak 15.366 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 guru yang ada di Kabupaten

Tangerang sebanyak 17.775 jiwa dengan kualifikasi guru lulusan S1 sebanyak 16.479. Guru tingkat SMA/SMK merupakan kewenangan Provinsi Banten sehingga tidak dimasukkan kedalam perhitungan.

Tabel 2.38 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

Guru Lulusan	2017	2018	2019	2020
Jumlah guru SD/SMP	17.148	17.202	17.559	17.775
Guru berijazah S1	15.366	15.634	16.246	16.479
Persentase (%)	89	90	92,5	92,7

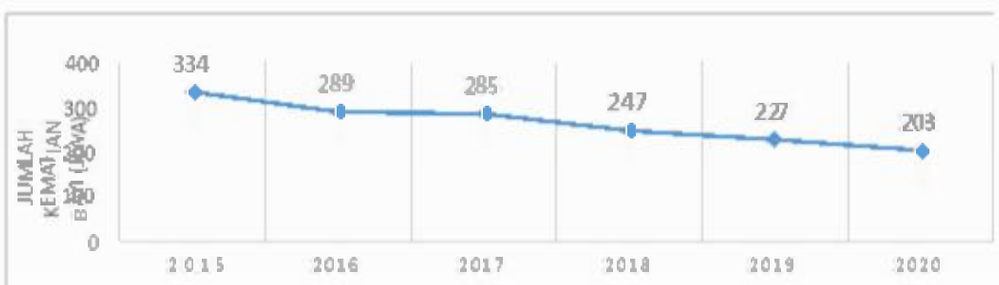
Sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id

2.3.1.2. Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia sebesar 24/1000 kelahiran hidup (SDKI 2017), sedangkan target RPJMN tahun 2024 untuk AKB adalah 16/1000. Menurut data dari BPS, angka kematian bayi di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan. Secara lebih spesifik, hal ini dapat dilihat melalui grafik di bawah ini yang menunjukkan jumlah kematian bayi tahun 2015 s/d tahun 2020.

Gambar 37 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2015-2020 (dalam jiwa)



Sumber Data: Kesga–Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2020, Profil Dinas Kesehatan tahun 2020

Pada gambar 37 terlihat jumlah kematian bayi terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Hal ini salah satunya disebabkan oleh karena meningkatnya jumlah puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) sejak tahun 2016 menjadi 36 unit, kemudian bertambah lagi menjadi 40 unit di tahun 2017, dan semakin bertambah hingga terdapat 42 unit di tahun 2019. Peningkatan jumlah puskesmas mampu PONED ini juga didukung oleh meningkatnya

keterampilan tenaga kesehatan terutama petugas puskesmas dalam tata laksana kasus kegawatdaruratan pada bayi. Penyebab kematian bayi pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39 Penyebab Kematian Bayi Tahun 2013-2020

No	Penyebab Kematian Bayi	Jumlah (dalam jiwa)						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	BBLR	127	195	138	120	122	42	84
2	Asfiksia	81	68	65	70	42	67	50
3	Tetanus	2	3	2	3	2	1	1
4	Sepsis	13	22	23	22	16	39	24
5	Kelainan konginetal	22	21	26	49	37	20	34
6	Ikterus	1			1	1	2	1
7	Perdarahan intrakranial				1			
8	Pneumonia	4			2	4	2	
9	Diare	1			4	2	0	
10	Lain-lain	17	25	35	13	21	54	9
	Jumlah	268	334	289	285	247	227	203

Sumber :Kesga –Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2020

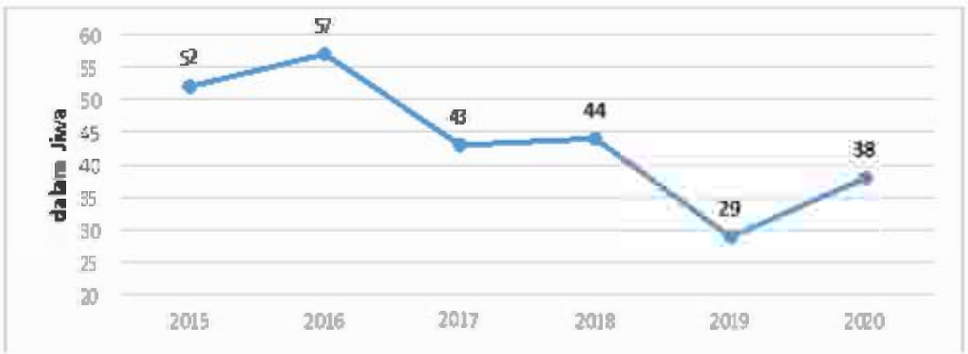
B. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, tingkat pelayanan kesehatan terutama pada ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu pada masa nifas.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup (Hasil SDKI Tahun 2012) dan menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan SUPAS tahun 2015. Upaya menurunkan angka kematian ibu adalah salah satu prioritas dalam target SDGs yaitu pada tahun 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan target RPJMN tahun 2024 untuk AKI adalah menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 adalah sebanyak 38 kasus dan terjadi kenaikan 9 kasus dibandingkan pada tahun 2019. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah kematian ibu tahun 2015 s/d tahun 2020.

Gambar 38 Jumlah Kematian Ibu Tahun 2015-2020 (dalam jiwa)



Sumber Data:Kesga –Kesmas Dinas Kesehatan KabupatenTangerang 2019 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021

Pada tahun 2019, penyebab kematian ibu terbanyak adalah Preklamsia dan Eklamsia. Hal ini sama dengan tahun 2018. Kondisi ini terjadi karena kejadian PEB/Eklamsia sulit untuk didiagnosa (eklamsia atipikal), sehingga kejadian yang tidak diinginkan sering terjadi. Seluruh kasus kematian ibu (29 kasus) sudah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat kabupaten oleh tim AMP Kabupaten Tangerang sebagai pembelajaran untuk mencegah kematian serupa di masa yang akan datang.

C. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu adalah kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana atau suatu wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas kesehatan. Maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas). Membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan

Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga, dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumlah posyandu untuk setiap 1000 orang balita. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita tahun 2020 sebesar 0,60 menurun 0,01 dari tahun 2016 sebesar 0,61.

Tabel 2.40 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita
1	2016	0,61
2	2017	N/A
3	2018	0,63
4	2019	0,65
5	2020	0,60

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2018 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021

D. Rasio Puskesmas, Poliklinik Dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Polindes, dan Puskesmas Pembantu/Pustu). Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang sudah memiliki puskesmas, bahkan di beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit. Jumlah ini terdiri dari puskesmas rawat inap 7 unit dan non rawat inap 37 unit, sedangkan jumlah Kecamatan di Kabupaten Tangerang sebanyak 29 Kecamatan. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk menunjukkan angka 48 pada tahun 2018 dan 49 pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, angka rasio menunjukkan 1 : 6.351.

E. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rasio Rumah sakit per satuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebanyak 3.245.619 jiwa jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang sebanyak 23 unit yang terdiri dari Rumah sakit Umum pemerintah (3 unit), rumah sakit swasta dan rumah sakit ibu dan anak (21 unit), artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Tangerang belum memenuhi dari sisi jumlah serta kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama untuk RSU Tangerang dan RSUD Balaraja yang menjadi rumah sakit rujukan regional provinsi.

Tabel 2.41 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2015-2020 Kabupaten Tangerang

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah RSU (Pemerintah) (dalam unit)	2	2	2	2	3	3
2	Jumlah Seluruh Rumah Sakit (dalam unit)	19	19	20	23	24	23
3	Jumlah Penduduk (dalam jiwa)	3.157.780	3.264.776	3.362.720	3.477.495	3.584.770	3.245.619
4	Rasio	1 : 150370	1 : 155466	1 : 152851	1:151.195	1:149.365	1:162.281

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2020

Bed Occupation Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011). Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Semakin tinggi nilai BOR berarti semakin tinggi pula penggunaan tempat tidur yang ada untuk perawatan pasien. Namun perlu diperhatikan bahwa semakin banyak pasien yang dilayani berarti semakin sibuk dan semakin berat pula beban kerja petugas di unit tersebut. Akibatnya, pasien bisa kurang mendapat perhatian yang dibutuhkan (kepuasan pasien menurun) dan kemungkinan infeksi nosokomial juga meningkat.

Tahun 2018 pemanfaatan tempat tidur atau BOR di 7 Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan) belum sesuai dengan BOR yang Ideal (60%-80%) yaitu 58,25 %, hal ini disebabkan karena masih kurangnya

jumlah Puskesmas DTP dibandingkan dengan jumlah penduduk, dari 44 Puskesmas di Kabupaten Tangerang baru 7 Puskesmas DTP.

Tabel 2.42 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kabupaten Tahun 2020

NO	KEC	NO	Puskesmas	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jml Penduduk dng Klinik (1:25000)	Rasio Jml Penduduk dng Klinik (1:25000)	Jumlah Rumah sakit (unit)	Rumah sakit bersalin (unit)	Poliklinik (unit)	Total RS, RSB dan poliklinik (unit)
1	Cisoka	1	Cisoka	79.765	9,3	9	-	-	4	4
2	Solear	2	Cikuya	79.600	3,1	3	-	-	6	6
3	Tigaraksa	3	Tigaraksa	138.130	5,5	6	1	-	9	10
		4	Pasir Nangka					-		
4	Cikupa	5	Cikupa	189.643	7,5	8	4	2	13	19
		6	Pasir Jaya					-		
5	Panongan	7	Panongan	108.371	4,3	4	1	-	5	6
6	Curug	8	Curug	152.411	6,09	6	2	-	7	9
		9	Binong							
7	Kelapa Dua	10	Jl. Kutai	151.513	6,06	6	3	2	5	10
		11	Jl. Emas					-		
		12	Kelapa Dua					-		
		13	Bj Nangka					-		
8	Legok	14	Legok	106.060	4,2	4	-	1	6	7
		15	Bj Kamal					-		
		16	Caringin					-		
9	Pagedangan	17	Pagedangan	88.649	3,5	4	2	-	9	11
10	Sindang Jaya	18	Sindang Jaya	80.991	3,2	3	-	-	6	6
11	Pasar Kemis	19	Pasar Kemis	233.810	9,3	9	1	-	8	9
		20	Kutabumi					-		
12	Balaraja	21	Balaraja	109.842	4,3	4	3	-	8	11
		22	Gembong				-	-		
13	Kresek	23	Kresek	61.594	2,4	2	-	-	6	6
14	Gunung Kaler	24	Gunung Kaler	45.659	1,8	2	-	-	2	2
15	Kronjo	25	Kronjo	51.811	2	2	-	-	3	3

NO	KEC	NO	Puskesmas	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jml Penduduk dng Klinik (1:25000)	Rasio Jml Penduduk dng Klinik (1:25000)	Jumlah Rumah sakit (unit)	Rumah sakit bersalin (unit)	Poliklinik (unit)	Total RS, RSB dan poliklinik (unit)
16	Mekar Baru	26	Mekar Baru	34.908	1,3	1	-	-	-	-
17	Mauk	27	Mauk	79.511	3,1	3	-	-	7	7
18	Rajeg	28	Rajeg	141.480	5,6	6	-	-	6	6
		29	Sukatani				-			
19	Sepatan	30	Sepatan	93.337	3,7	4	-	2	5	7
20	Sepatan Timur	31	Kedaung Barat	86.987	3,4	3	-	-	8	8
21	Pakuhaji	32	Paku Haji	104.860	4,1	4	1	-	9	10
		33	Sukawali							
22	Teluknaga	34	Teluknaga	135.682	5,4	5	1	-	5	6
		35	TEGAL ANGUS							
23	Kosambi	36	Kosambi	99.301	3,9	4	1	4	8	13
		37	Salembaran Jaya							
24	Jambe	38	Jambe	44.965	1,7	2	-	-	7	7
25	Kemeri	39	Kemeri	42.809	1,7	2	-	-	-	-
26	Jayanti	40	Jayanti	60.135	2,4	2	1	-	2	3
27	Cisauk	41	Cisauk	74.250	2,9	3	1	-	3	4
		42	Suradita							
28	Sukadiri	43	Sukadiri	57.055	2,2	2	-	-	6	6
29	Sukamulya	44	Sukamulya	61.840			-	-	7	7
JUMLAH				**2.794.969**			**22**	**11**	**170**	**203**

Sumber : Kabupaten Tangerang dalam Angka 2020

Tabel 2.43 BOR Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP)
Tahun 2019 – 2020

NAMA PUSKESMAS	BOR 2019 (%)	BOR 2020 (%)
MAUK	35.68	24.43
KRONJO	41.67	61.25
CISOKA	65.57	14
KRESEK	36.43	15
SEPATAN	24.76	7.04
BALARAJA	63.08	46.38
CURUG	10	16.83
BOR RATA-RATA	39.59	26.42

Sumber Data: Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Tradisional dan Komplementer, 2020

F. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan dokter baik dokter umum ataupun spesialis dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk.

Tabel 2.44 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

No	Tahun	Rasio Dokter (spesialis+umum)/ 100.000 penduduk	Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis)/100.000 penduduk
1	2016	1 : 4.687	1 : 29.470
2	2017	1 : 8.515	1 : 18.671
3	2018	n.a	n.a
4	2019	1 : 3.455	1 : 44.715
5	2020	1 : 2.855	1 : 38.184

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2021

G. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan penduduk.

Tabel 2.45 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2019

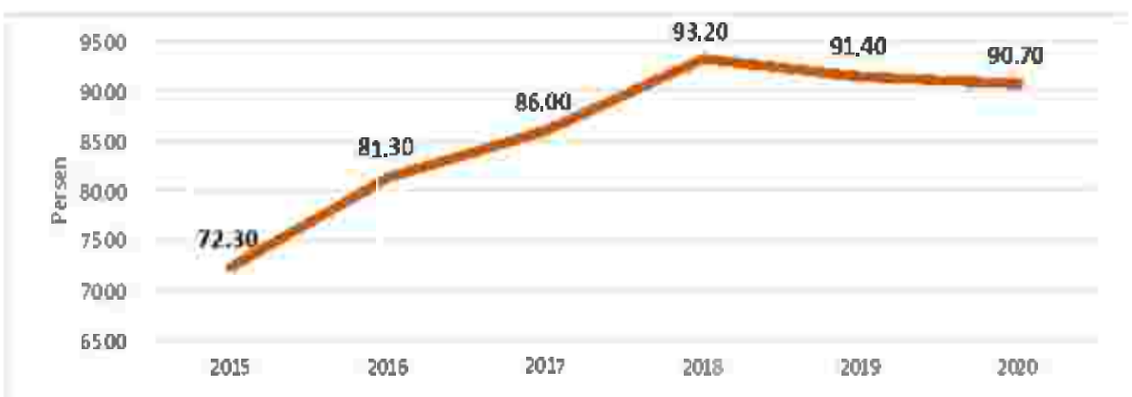
No	Tahun	Rasio Tenaga medis bidan/ 100.000 penduduk	Rasio tenaga medis perawat/ 100.000 penduduk
1	2016	44,98	47,62
2	2017	N/A	N/A
3	2018	73,95	61,57
4	2019	46,33	60,46
5	2020	35,65	91,32

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020 dan Profil Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019 (Diolah)

H. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa cakupan penanganan komplikasi kebidanan pada tahun 2015 sebesar 72,30%, meningkat pada tahun 2016 menjadi 81,3%, tahun 2017 menjadi 86,0% dan 2018 menjadi 93,2%. Pada tahun 2020, cakupan penanganan komplikasi kebidanan mencapai 90,70%. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun 2015-2020 digambarkan pada grafik di bawah ini:

Gambar 39 Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Tahun 2015-2020 (dalam persen)

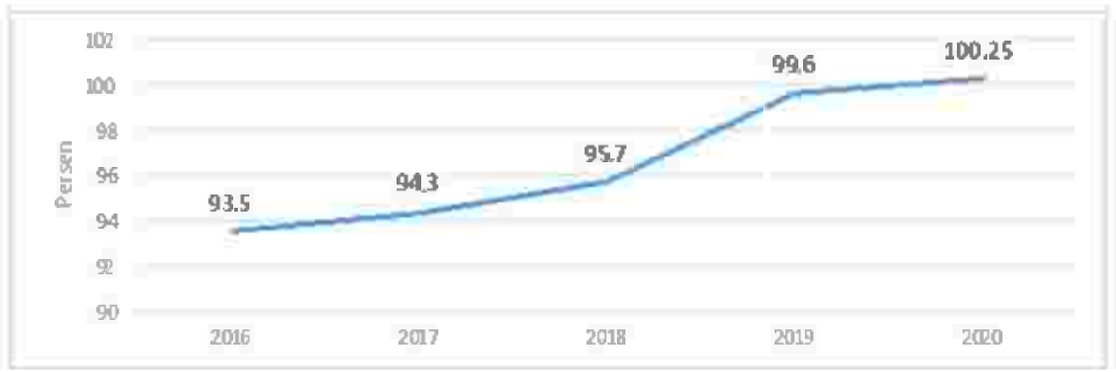


Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2018 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021

I. Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Dengan Kompetensi Kebidanan

Dari grafik di bawah terlihat bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2020 sebesar 100,25% meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 94,3%. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya jumlah puskesmas mampu PONED dan meningkatnya kemitraan bidan dengan dukun. Dari data laporan puskesmas juga didapatkan penurunan jumlah dukun paraji pada tahun 2017 sejumlah 646 orang menjadi 578 orang pada tahun 2018.

Gambar 40 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2016-2020 (dalam persen)

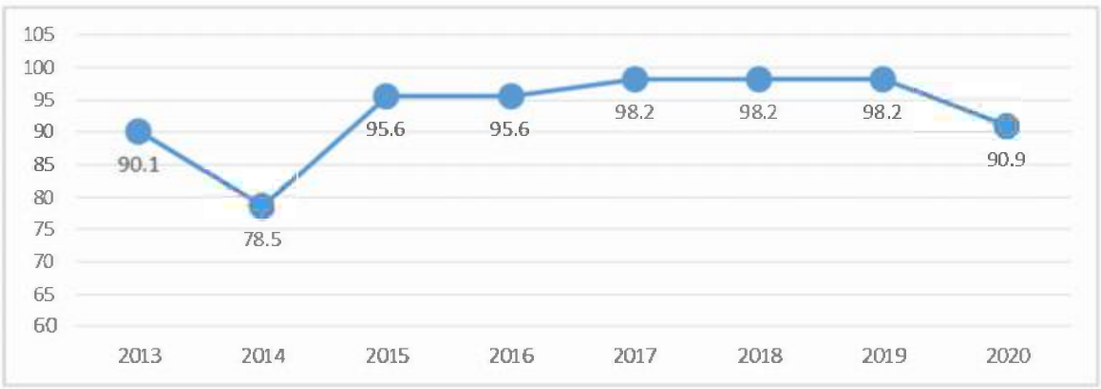


Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang 2021, Dinas Kesehatan 2021

J. *Universal Child Immunization* (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah indikator lain, selain dari imunisasi dasar lengkap, untuk mengukur keberhasilan pemberian imunisasi. UCI desa/kelurahan adalah gambaran suatu desa/kelurahan di mana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Upaya imunisasi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi (*herd immunity*) sehingga penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat dibasmi, dieliminasi atau dikendalikan, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan upaya imunisasi dapat semakin efektif bermutu dan efisien.

Gambar 41 *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2013-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2019 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021

Cakupan Jumlah Desa UCI pada tahun 2019 yaitu 98,2%. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 90,9. Berbagai Upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan cakupan Desa/ Kelurahan UCI antara lain meliputi kegiatan:

1. *Workshop* imunisasi pada Petugas Imunisasi Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan swasta (SPKS);
2. Supervisi *Supportive* dan OJT (*On the Job Training*) bagi Puskesmas, Klinik swasta, dan rumah sakit;
3. Kampanye *Measles* Rubella;
4. Bedah kasus (KIPI);
5. Mengaktifkan Pertemuan koordinasi lintas program dan sektoral dalam penanganan kelompok masyarakat yang menolak imunisasi;
6. Peningkatan cakupan imunisasi di sarana pelayanan kesehatan swasta, termasuk pencatatan dan pelaporan.

K. Imunisasi Dasar Pada Bayi

Program Imunisasi merupakan salah satu upaya intervensi bidang kesehatan untuk melindungi penduduk dari penyakit tertentu, yang terbukti paling *cost effective*. Hal ini dikarenakan imunisasi dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) sebanyak 2 sampai 3 juta setiap tahunnya.

Indikator keberhasilan program imunisasi pada bayi, mengharapkan agar setiap bayi mendapatkan ke lima jenis imunisasi dasar lengkap, keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan 5 jenis

imunisasi dasar tersebut, diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap.

Dalam pengembangan program imunisasi dasar, setiap bayi usia (0-11 bulan) wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap meliputi; 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-Hib, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak, sedangkan untuk program imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia bawah dua tahun, yaitu ; 1 dosis DPT-HB-Hib, 1 dosis campak (MR), pada anak usia sekolah meliputi; 1 dosis campak (MR), 1 dosis tetanus, difteri (Td dan Dt) dan wanita usia subur meliputi; 5 dosis tetanus difteri (Td). Pemberian imunisasi lanjutan dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar.

Tabel 2.46 Cakupan Imunisasi Dasar pada bayi 0-11 bulan Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013 –2020

No.	Jenis Imunisasi	Cakupan (%)							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	BCG	97,7	91,3	97,2	104,7	101,8	107,5	99,66	96,6
2	Hepatitis BO	93,6	92,1	94,9	97,0	99,7	106,7	100,52	102,3
3	DPT-HB III	96,7	98,8	96,4	102,6	99,8	100,9	108	95,6
4	Polio IV	96,6	92,4	96,1	103,3	101,1	100,9	100,52	95,6
5	Campak	95,5	86,1	95,5	101,9	89,9	100	N/A	96,5

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2020 dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tangerang (2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa cakupan dari semua antigen cukup tinggi dan beberapa mengalami kenaikan. Akan tetapi hal tersebut belum mampu membentuk kekebalan populasi yang tinggi di mana terdapat kejadian luar biasa (KLB) penyakit difteri.

Tabel 2.47 Cakupan Imunisasi dasar pada Bayi Tahun 2015 – 2020

No.	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Cakupan (%)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	5 Antigen	93,5	92,2	93,4	94,3	98,5	94,7

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020

Keberhasilan program imunisasi dapat dilihat melalui indikator imunisasi dasar lengkap. Cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten

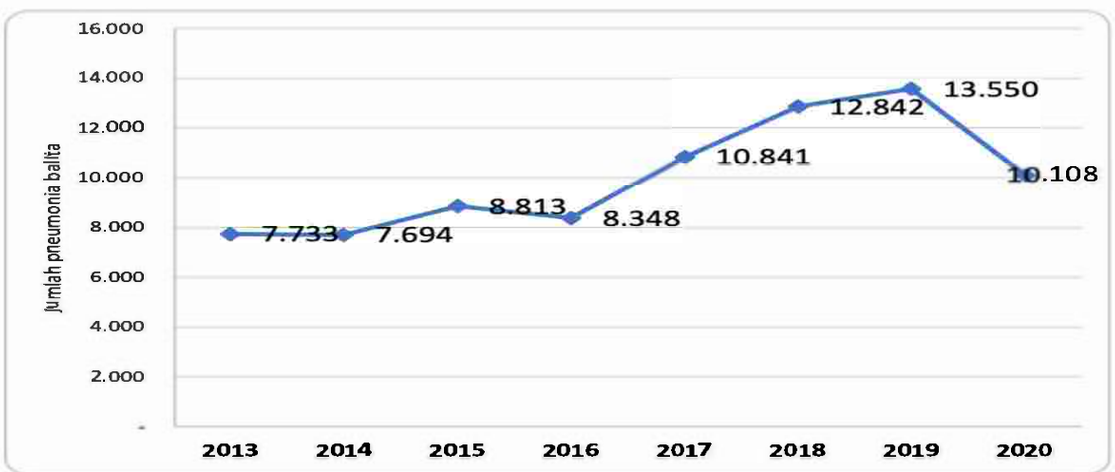
Tangerang pada tahun 2020 sebesar 94,7%, cakupan ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 98,5% dikarenakan pandemi covid.

L. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Kegiatan pokok pengelolaan program P2 ISPA di Kabupaten Tangerang adalah penjaringan dan penatalaksanaan kasus Pneumonia Balita. Berdasarkan ketentuan WHO, perkiraan kasus pneumonia balita di negara berkembang termasuk Indonesia adalah 10% - 20% dari jumlah total balita, sedangkan kebijakan Kemenkes menetapkan angka 10% jumlah balita sebagai angka perkiraan kasus pneumonia balita di Indonesia.

Angka ini ditetapkan tidak berdasarkan survei epidemiologis sehingga belum secara spesifik menggambarkan kondisi pneumonia balita di wilayah tertentu. Untuk menilai efektivitas penemuan kasus maka ditetapkan sasaran Pneumonia Balita sebesar 4,12% dari jumlah total balita.

Gambar 42 Cakupan Kasus ISPA Pada Balita di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020



Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020

Dari grafik di atas terlihat adanya kecenderungan peningkatan kasus ISPA yang ditemukan. Berdasarkan hasil audit mutu pelayanan ISPA yang telah dilaksanakan, maka ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan tata laksana kasus pneumonia balita yang sesuai standar baku belum konsisten dilaksanakan
2. Pencatatan dan pelaporan kasus pneumonia belum melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta
3. Tingginya angka perkiraan kasus pneumonia balita yang ditetapkan WHO karena belum adanya data hasil survei insidensi baik secara nasional maupun regional yang dapat dijadikan acuan yang lebih valid.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah di atas adalah:

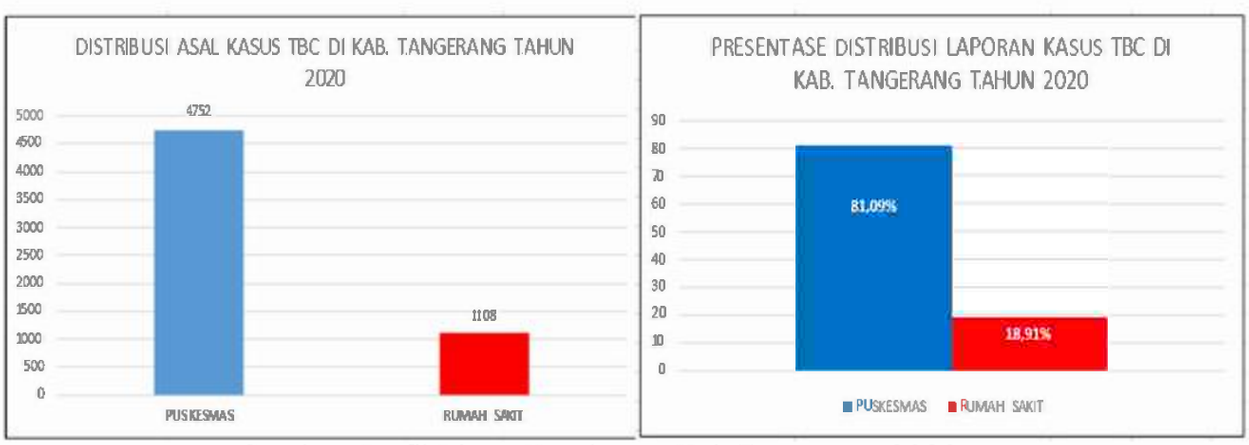
1. Memperluas cakupan kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola program serta petugas BP anak mengenai prosedur baru tata laksana kasus ISPA/Pneumonia pada balita
2. Melaksanakan sosialisasi pencatatan dan pelaporan serta tata laksana kasus pneumonia untuk bidan praktek swasta

M. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (P2TBC)

Dalam pelaksanaan notifikasi, digunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas pasien TBC. Notifikasi wajib pasien TBC untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) disampaikan kepada Puskesmas setempat. Puskesmas akan mengkompilasi laporan kasus TBC dari semua FKTP di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan. Berikut adalah hasil kegiatan notifikasi wajib (*Mandatory Notification*) di Kabupaten Tangerang.

Gambar 43 Distribusi Asal Kasus TBC di Kabupaten Tangerang 2020

Prosentase & Distribusi Asal Kasus TBC di Kabupaten Tangerang Tahun 2020

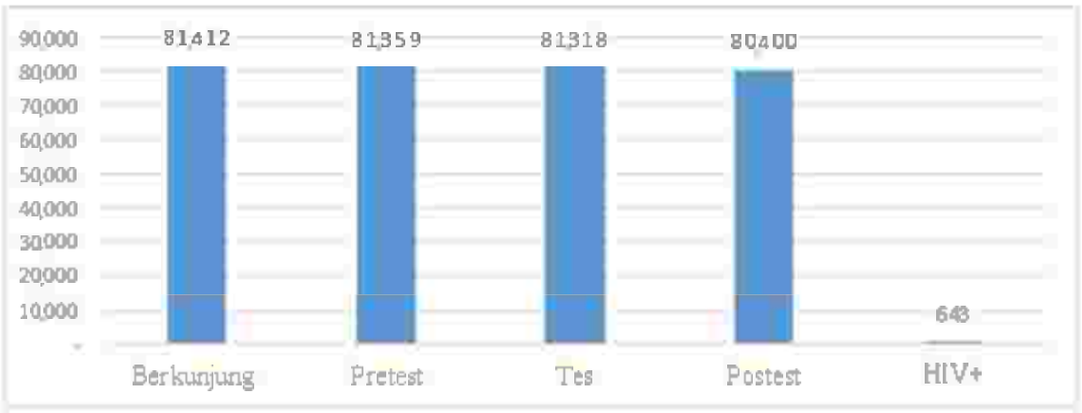


Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020

N. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV / AIDS

Pada tahun 2018 kasus HIV/AIDS ditemukan sebanyak 499 kasus. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2017 sebanyak 445 kasus. Pada tahun 2017, pasien yang dilakukan tes HIV/AIDS sebanyak 15.001 orang, sedangkan pada tahun 2018 pasien yang dilakukan tes HIV/AIDS sebanyak 42.967 orang, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan layanan kesehatan di Kabupaten Tangerang (44 Puskesmas dan 4 Rumah Sakit) mengalami peningkatan dalam melakukan *screening* kasus HIV/AIDS. Peningkatan pasien yang dilakukan tes tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan keinginan masyarakat untuk melakukan tes HIV/AIDS yang berarti pemahaman masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS juga meningkat. Adanya peningkatan angka tes tersebut juga dapat diasumsikan meningkatnya jumlah populasi kunci. Jika kita bandingkan kedua data tersebut maka kemampuan Dinas Kesehatan dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Penyakit HIV/AIDS sudah sangat baik. Berikut data kasus akumulatif HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang tahun 2019.

Gambar 44 Jumlah Pemeriksaan Kasus HIV Kabupaten Tangerang pada Tahun 2020



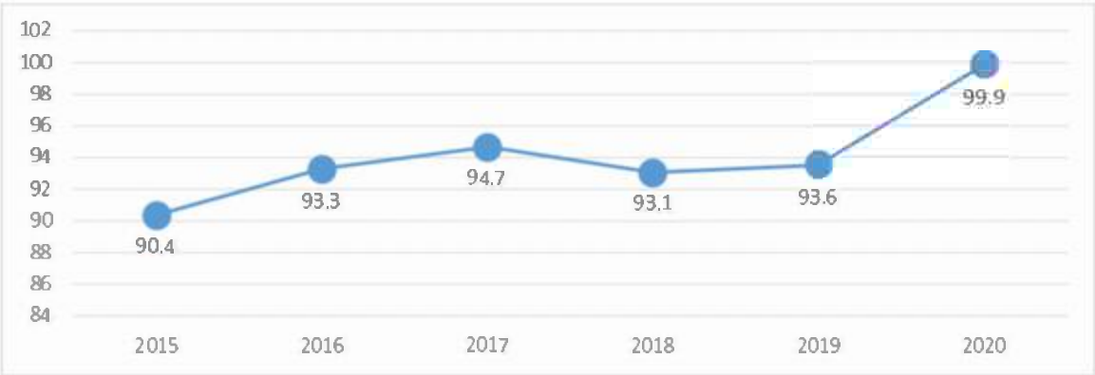
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020

O. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari-11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2018 sebesar

93,1% menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 94,7%, namun cakupan tersebut sudah mencapai target Renstra tahun 2018 sebesar 90%. Kemudian pada tahun 2020 cakupan kunjungan Bayi mulai meningkat, yaitu 99,9%. Secara lebih rinci, hal ini tertulis di bawah ini:

Gambar 45 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2015-2020



Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2018 dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tangerang (2020)

P. Cakupan puskesmas

Jumlah puskesmas di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 sekitar 44 puskesmas yang tersebar di 29 kecamatan. Kecamatan Kelapa Dua mempunyai unit puskesmas yang paling banyak sekitar 4 unit puskesmas dan Kecamatan Legok dengan sebanyak 3 unit puskesmas. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 sekitar 151,72%.

Tabel 2.48 Jumlah Puskesmas Per Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No.	Kecamatan		Puskesmas
1	Cisoka	1	Cisoka
2	Solear	2	Cikuya
3	Tigaraksa	3	Tiga raksa
		4	Pasir nangka
4	Jambe	5	Jambe
5	Cikupa	6	Cikupa
		7	Pasir jaya
6	Panongan	8	Panongan
7	Curug	9	Curug
		10	Binong
8	Kelapa dua	11	Kelapa dua

No.	Kecamatan		Puskesmas
		12	Jalan emas
		13	Bojong nangka
		14	Jalan kutai
9	Legok	15	Legok
		16	Bojong kamal
		17	Caringin
10	Pagedangan	18	Pagedangan
11	Cisauk	19	Cisauk
		20	Suradita
12	Sindang jaya	21	Sindang jaya
13	Pasar kemis	22	Kuta bumi
		23	Pasar kemis
14	Balaraja	24	Balaraja
		25	Gembong
15	Jayanti	26	Jayanti
16	Sukamulya	27	Suka mulya
17	Kresek	28	Kresek
18	Gunung kaler	29	Gunung kaler
19	Kronjo	30	Kronjo
20	Mekar baru	31	Mekar baru
21	Mauk	32	Mauk
22	Kemiri	33	Kemeri
23	Sukadiri	34	Sukadiri
24	Rajeg	35	Rajeg
		36	Sukatani
25	Sepatan	37	Sepatan
26	Sepatan timur	38	Kedaung barat
27	Paku haji	39	Paku haji
No.	Kecamatan		Puskesmas
		40	Sukawali
28	Teluknaga	41	Teluk naga
		42	Tegal angus
29	Kosambi	43	Kosambi
		44	Salembaran jaya

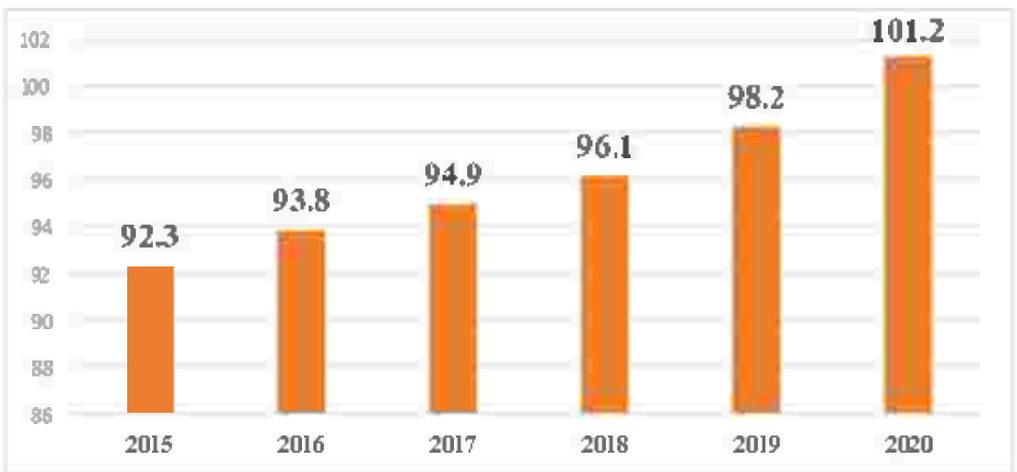
Sumber : Komdat Kemenkes 2019

Jumlah Puskesmas Pembantu sampai dengan tahun 2017 mencapai 46 unit Pustu, dengan jumlah desa sebanyak 28 kelurahan dan 246 desa, total 274 desa/kelurahan. Cakupan Puskesmas Pembantu per desa adalah 16,78%.

Q. Pemeriksaan Ibu Hamil

Indikator pelayanan ibu hamil antara lain cakupan K1 dan K4, K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. K4 adalah cakupan ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar, paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada triwulan ke-1, 1 kali pada triwulan ke-2 dan 2 kali pada triwulan ke-3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator K4 ini, dapat diketahui cakupan pelayanan antenatal secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menempati waktu yang ditetapkan), yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, di samping menggambarkan manajemen program KIA.

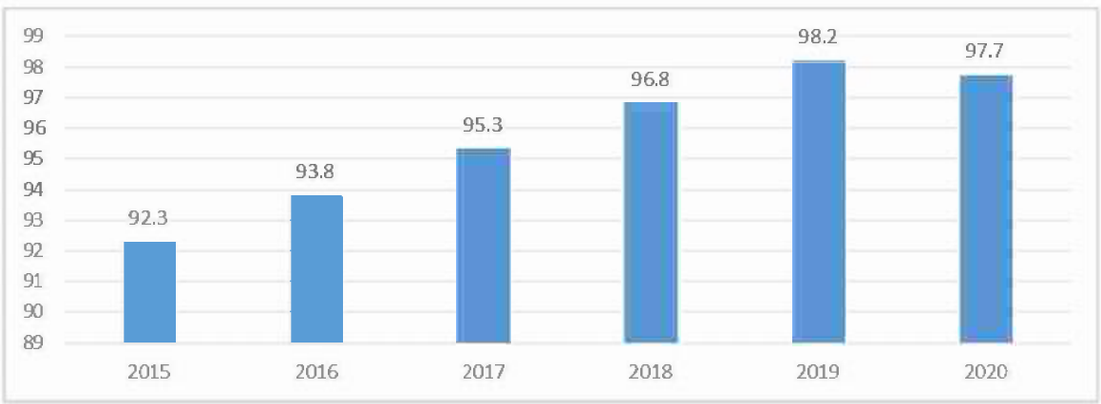
Gambar 46 Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil (K1) Tahun 2015-2020 dalam persen



Sumber Data : Bid.Kesmas- Kesga Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2019

Dari grafik di atas diperoleh cakupan K1 pada tahun 2019 adalah 100,7 % meningkat dibandingkan cakupan K1 tahun 2017. Hasil cakupan K1 pada tahun 2020 menunjukkan telah mencapai target SPM tahun 2008 sebesar 100%.

Gambar 47 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Tahun 2015-2020 dalam persen



Sumber Data : Bid.Kesmas-Kesga Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2017 dan dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021

Dari grafik di atas diperoleh persentase kunjungan ibu hamil K4 mengalami peningkatan dari 94,9 % pada tahun 2017 menjadi 96,1% pada tahun 2018. Pencapaian ini sudah sesuai dengan target Renstra tahun 2018 sebesar 92%. Hal ini antara lain disebabkan karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemeriksaan kehamilan sesuai standar. Selanjutnya, pada tahun 2020 cakupan kunjungan ibu hamil (K4) menurun dari tahun sebelumnya menjadi 97,7%.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan K1 dan K4 antara lain: pendataan ibu hamil, kunjungan rumah bagi ibu hamil yang tidak mematuhi jadwal ANC, optimalisasi Kelas ibu hamil, Penyuluhan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) dan peningkatan kualitas pelayanan ANC serta peran aktif dari MKIA (Motivator Kesehatan Ibu dan Anak).

R. Pelayanan Nifas

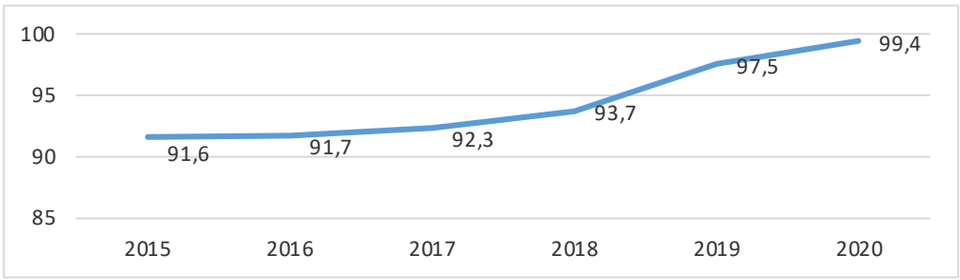
Pelayanan kesehatan ibu nifas lengkap adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal 3 kali dengan ketentuan waktu:

1. Kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan.

2. Kunjungan nifas ke-2 dalam waktu 2 minggu setelah persalinan (8 – 14 hari)
3. Kunjungan nifas ke-3 dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36 – 42 hari).

Cakupan pelayanan ibu nifas dari Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 48 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2013-2020



Sumber Data : Bid.Kesmas - Kesga Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2018 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021

Dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa cakupan pelayanan ibu nifas di tahun 2020 sebesar 99,4% meningkat dibanding cakupan tahun 2019 sebesar 97,5% dan sudah mencapai target SPM (90%). Hal ini karena hampir seluruh desa memiliki bidan desa (dari 274 desa hanya terdapat 4 desa yang tidak memiliki bidan desa) sehingga jangkauan pelayanan kunjungan nifas meningkat.

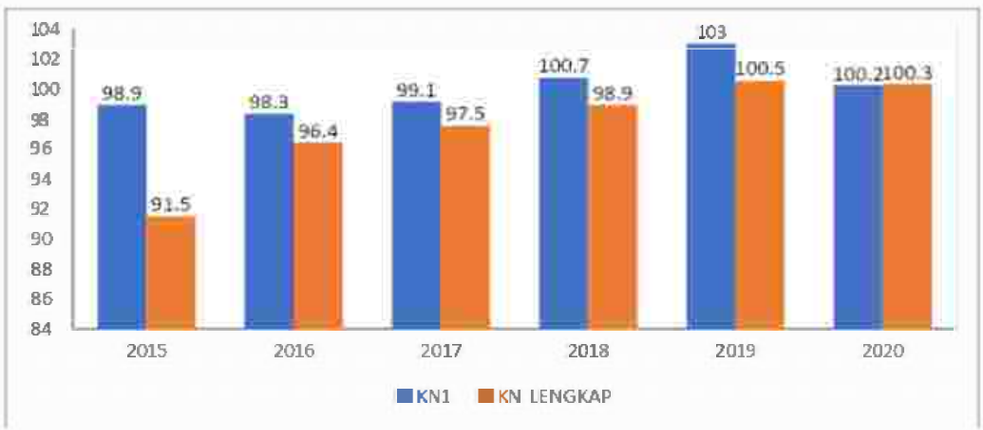
S. Pelayanan Neonatus

Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir. Risiko terbesar kematian neonatus terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, sehingga untuk bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama.

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6 – 48 jam setelah lahir yang meliputi antara lain kunjungan menggunakan

pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi bila belum diberikan.

Gambar 49 Cakupan Kunjungan Neonatus KN1 dan KN Lengkap Tahun 2015-2020



Sumber : Profil Dinas Kesehatan, Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dan Profil Kesehatan Provinsi Banten, diolah.

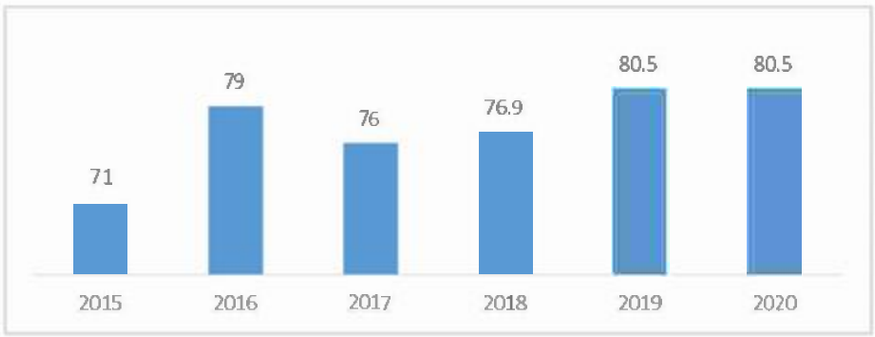
Dari grafik di atas didapatkan cakupan pelayanan kesehatan neonatus Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat peningkatan, pada tahun 2017 peningkatan KN1 dan KN lengkap ini oleh karena adanya penerimaan bidan PTT pada tahun 2016 yang ditempatkan di awal tahun 2017 sehingga hampir seluruh desa memiliki bidan desa (dari 274 desa hanya terdapat 4 desa yang tidak memiliki bidan desa). Sedangkan peningkatan kunjungan KN 1 dan KN lengkap pada tahun 2018 dikarenakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan dan keaktifan tenaga kesehatan dalam melakukan kunjungan terhadap Neonatus.

T. Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus

Cakupan penanganan komplikasi neonatus adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan komplikasi neonatus maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi secara berjenjang mulai dari puskesmas mampu PONED sampai rumah sakit mampu PONEK 24 jam. Cakupan

Penanganan Komplikasi Neonatus pada tahun 2017 sebesar 76% dan tahun 2020 meningkat menjadi 80,5%.

Gambar 50 Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus Tahun 2015-2020

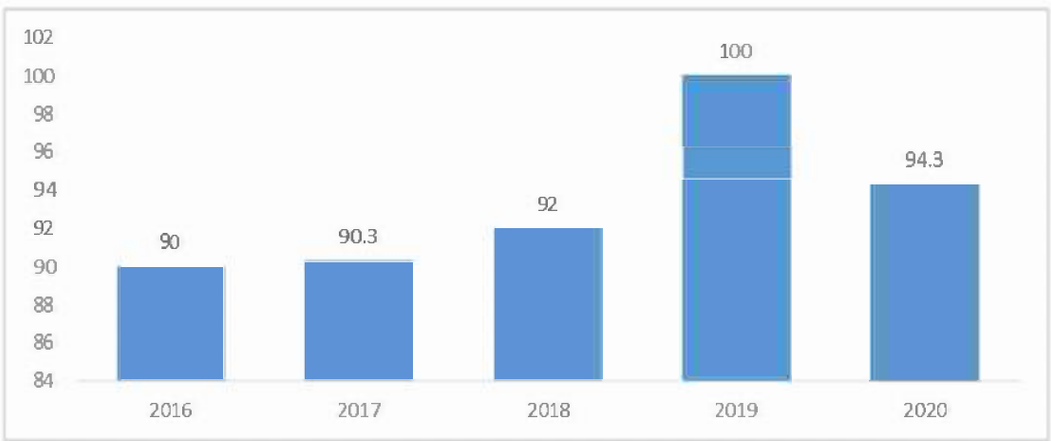


Sumber Data : Bid.Kesmas-Kesga Dinas Kesehatan KabupatenTangerang 2018 dan Profil Kesehatan Provinsi Banten, diolah.

U. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah cakupan anak Balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standar meliputi pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian vitamin A, 2x setahun. Cakupan pelayanan anak Balita mengalami peningkatan tahun 2020 menjadi 94,3% dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 90%.

Gambar 51 Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2015 – 2020



Sumber : Profil Dinas Kesehatan, Kabupaten Tangerang Tahun 2018 dan RKPD Kabupaten Tangerang, diolah.

V. Cakupan Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Pasal 1 angka 1) dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 angka 1 menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Di Kabupaten Tangerang, terdapat beberapa jenis jaminan Kesehatan yang berlaku dan dimiliki oleh penduduk Kabupaten Tangerang dengan rincian cakupan sebagai berikut:

Tabel 2. 50 Jumlah Peserta JKN Kabupaten Tangerang Tahun 2021

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)		JUMLAH	%
1	PBI APBN	787.336	30,47
2	PBI APBD	236.533	9,15
SUB JUMLAH		1.023.869	39,63
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	990.928	38,35
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	543.690	21,04
3	Bukan Pekerja (BP)	25.268	0,98
SUB JUMLAH NON PBI		1.559.886	60,37
JUMLAH PESERTA JKN KABUPATEN TANGERANG		2.583.755	
JUMLAH PENDUDUK (DUKCAPIL SM 2 TH 2021)		3.105.042	
PERSENTASE		83,21	

Sumber : BPJS Kesehatan tahun 2021

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa berdasarkan data dari BPJS Kesehatan sampai dengan bulan Desember 2021 dari jumlah penduduk Kabupaten tangerang 3.105.042 sebanyak 83,21% atau 2.583.755 jiwa telah menjadi peserta JKN KIS/BPJS Kesehatan.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Jaringan Jalan

Aksesibilitas Daerah pada tahun 2020 untuk panjang jalan *existing* adalah sebesar 992.61 km dengan klasifikasi beton 947.81 km. Kondisi jalan dengan kategori baik pada tahun 2020 adalah 61,7%, dengan kondisi sedang 30,2% dan kondisi rusak dan rusak berat 8,1%.

Tabel 2. 50 Kondisi Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020 (km)

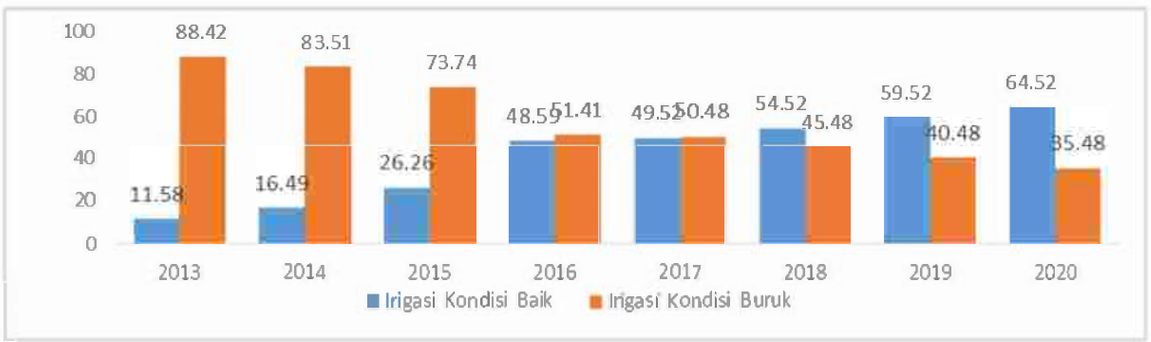
Kondisi Jalan	2017	2018	2019	2020
Baik	819,35	725,01	566,25	569,28
Sedang	90,49	217,52	312,75	299,79
Rusak	33,53	42,22	92,04	98,96
Rusak Berat	49,23	7,64	21,57	24,58

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, BPS 2020

B. Jaringan Irigasi

Jumlah saluran irigasi yang memiliki kondisi baik meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, jaringan irigasi dengan kondisi baik hanya sebesar 11,58%. Kemudian pada tahun 2020, jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi 64,52%. Akan tetapi, masih terdapat 35,48% jaringan irigasi dengan kondisi buruk.

Gambar 52 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA, Tahun 2013-2016 dan RKPD Kabupaten Tangerang (2021), diolah.

Selain infrastruktur irigasi yang banyak mengalami kerusakan, Kabupaten Tangerang masih banyak potensi air baku yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, dan Sungai Cimanceuri tercatat sebanyak 24 danau/rawa/ waduk yang ada di Kabupaten Tangerang yang dimanfaatkan untuk irigasi dan konservasi. Potensi Embung Cigarukgak di Desa Kemuning, Kecamatan Kresek dengan luas 177 Ha atau 1.770.000 m2 memiliki debit total sekitar 180 lps, dan ini merupakan potensi air baku bagi PDAM.

Tabel 2. 51 Danau/Waduk/Rawa di Kabupaten Tangerang 2018

No.	Danau/Waduk/Rawa	Kecamatan	Luas Area (Ha)	Fungsi
1	Rawa Ranca Ilat		67,98	Reservoir dan resapan
2	Rawa Waluh	Kronjo	70	Reservoir dan resapan
3	Rawa Cigarugak	Kresek	177	Reservoir dan resapan
4	Rawa Patrasana	Kresek	245	Reservoir dan resapan
5	Rawa Gabus	Kresek	9,72	Reservoir dan resapan
6	Rawa Genggong	Kresek	8,4	Reservoir dan resapan
7	Rawa Setingin	Kemiri	26,4	Reservoir dan resapan
8	Rawa Gede	Sukadiri	2,8	Reservoir dan resapan
9	Rawa sulang		8	Reservoir dan resapan
10	Rawa Koja		-	Reservoir dan resapan
11	Rawa Kepuh	Pakuhaji	45	Reservoir dan resapan
12	Rawa Gelam/Panggang	Pasar Kemis	11,7	Reservoir dan resapan
13	Rawa Panggodokan		-	Reservoir dan resapan
14	Rawa Dadap		-	Reservoir dan resapan
15	Rawa Warung Rebo	Sindang Jaya	7,9	Reservoir dan resapan
16	Situ Pondok	Sindang Jaya	22,7	Reservoir dan resapan
17	Situ Cilongok	Pasar Kemis	23	Reservoir dan resapan
18	Situ Pasir gadung	Cikupa	7,3	Reservoir dan resapan
19	Rawa Bojong		7,6	Reservoir dan resapan
20	Rawa Jambu	Rajeg	-	Reservoir dan resapan
21	Situ Kelapa Dua	Kelapa Dua	37,5	Reservoir dan resapan
22	Situ Cihuni	Pagedangan	32,34	Reservoir dan resapan
23	Situ Jengkol	Solear	4,1	Reservoir dan resapan
24	Waduk Kronjo	Kronjo	5,7	Reservoir dan resapan

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2018

C. Sarana Air Bersih

Penyediaan sarana air bersih pada tahun 2020 disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.275.677 jiwa (42,72%) yang belum terlayani sebanyak 1,781,922 jiwa atau sekitar 58.28%. Penyediaan sarana air bersih kepada masyarakat dilayani secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan melalui dinas terkait, dan juga melalui Perumdam Tirta Kerta Raharja, selain itu beberapa masyarakat mendapat layanan air bersih melalui Perusahaan air minum Aetra, Pengembang Citra Raya, dan Pengembang BSD.

Pelayanan air bersih terhadap masyarakat melalui dua jenis yaitu perpipaan dan non perpipaan, untuk sambungan pipa air bersih telah melayani sekitar 1,220,488 jiwa atau sekitar 39.92%, dengan jenis non perpipaan yang terlayani mencapai 55,189 jiwa atau sekitar 1.80%.

Tabel 2.52 Data Layanan Air Bersih Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No.	Kecamatan / Mitra	Jumlah Penduduk (Jiwa)*)	Jumlah Penduduk (KK/Rmh Tangga) *)	SPAM Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan (Rumah Tangga)				Rekapitulasi Akses Pelayanan Air Bersih		Belum Ada Akses Pelayanan Air Bersih	
				Jaringan Perpipaan (PDAM + MITRA)		Non Perpipaan					
				Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%
1	BALARAJA	117,380	37,906	14,980	39.52	549	1.45	15,529	40.97	22,377	59.03
2	JAYANTI	65,170	21,414	-	-	691	3.23	691	3.23	20,723	96.77
3	TIGARAKSA	150,766	46,937	6,538	13.93	2,092	4.46	8,630	18.39	38,307	81.61
4	JAMBE	49,584	15,568	-	-	550	3.54	550	3.54	15,018	96.46
5	CISOKA	87,138	27,588	1,748	6.33	570	2.07	2,318	8.40	25,270	91.60
6	KRESEK	66,584	22,523	2,421	10.75	1,011	4.49	3,433	15.24	19,090	84.76
7	KRONJO	59,306	21,594	-	-	1,053	4.87	1,053	4.87	20,541	95.13
8	MAUK	85,056	27,616	2,957	10.71	195	0.71	3,152	11.41	24,464	88.59
9	KEMIRI	47,029	15,058	-	-	625	4.15	625	4.15	14,433	95.85
10	SUKADIRI	61,271	20,696	677	3.27	284	1.37	961	4.64	19,735	95.36
11	RAJEG	160,779	50,231	7,911	15.75	1,098	2.19	9,009	17.94	41,222	82.06
12	PASAR KEMIS	249,216	77,994	35,792	45.89	150	0.19	35,942	46.08	42,052	53.92
13	TELUKNAGA	154,533	50,426	7,929	15.72	649	1.29	8,579	17.01	41,847	82.99
14	KOSAMBI	107,258	35,189	11,872	33.74	79	0.22	11,951	33.96	23,238	66.04
15	PAKUHAJI	116,025	38,246	1,547	4.04	1,107	2.90	2,654	6.94	35,592	93.06
16	SEPATAN	103,716	33,724	60	0.18	418	1.24	479	1.42	33,245	98.58
17	CURUG	165,667	54,285	584	1.08	118	0.22	702	1.29	53,583	98.71
18	CIKUPA	202,372	66,707	4	0.01	752	1.13	756	1.13	65,951	98.87
19	PANONGAN	118,687	37,143	-	-	150	0.40	150	0.40	36,993	99.60
20	LEGOK	115,935	35,843	-	-	302	0.84	302	0.84	35,541	99.16
21	PAGEDANGAN	98,591	30,956	-	-	435	1.41	435	1.41	30,521	98.59
22	CISUAK	82,497	25,392	9,148	36.03	259	1.02	9,407	37.05	15,985	62.95
23	SUKAMULYA	67,943	21,921	2,435	11.11	780	3.56	3,215	14.67	18,706	85.33
24	KEPALA DUA	160,803	50,758	17,801	35.07	-	-	17,801	35.07	32,957	64.93
25	SINDANG JAYA	87,738	27,650	32	0.12	605	2.19	637	2.30	27,013	97.70
26	SEPATAN TIMUR	97,347	31,112	-	-	355	1.14	355	1.14	30,757	98.86
27	SOLEAR	88,267	27,540	84	0.31	599	2.18	683	2.48	26,857	97.52
28	GUNUNG KALER	50,692	17,258	12	0.07	984	5.70	996	5.77	16,262	94.23
29	MEKAR BARU	40,249	13,455	-	-	1,467	10.90	1,467	10.90	11,988	89.10
30	MITRA PDAM (AETRA, PENGEMBANG CITRA, BSD, DLL)			266,251	27.09			266,251			
	JUMLAH TOTAL	**3,057,599**	**982,730**	**390,783**	**39.77**	**17,927**	**1.82**	**408,711**	**41.59**	**574,019**	**58.41**

Sumber : Dinas Perkim, 2020

D. Peribadatan

Sarana peribadatan semua agama ada di Kabupaten Tangerang dikarenakan heterogennya penduduk Kabupaten Tangerang. Jumlah penduduk menurut agama dan ketersediaan tempat ibadah di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2. 53 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Jenis Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah (unit)	Jumlah Pemeluk (jiwa)	Rasio
Masjid&Musholah	5.119	2.869.058	1:560
Gereja Protestan	30	94.506	1:3.150
Gerja Katolik	3	39.756	1:13.252
Pura	6	1.974	1:329
Vihara	21	51.482	1:2.452
Kelenteng	4	1.243	1:310

Sumber : BPS Kab Tangerang, 2021,dan DKB 2020 data diolah.

E. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses sanitasi (sanitasi layak) apabila rumah tangga menggunakan fasilitas buang air besar (BAB) sendiri dan bersama, kloset leher angsa, dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja (TPAT). Kondisi sanitasi merupakan salah satu komponen yang ikut mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan yang secara tidak langsung juga turut berkontribusi terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Sanitasi yang layak merupakan syarat mutlak dalam kehidupan sehari-hari untuk tercapainya kesejahteraan, terutama sanitasi yang layak di lingkungan rumah. Sanitasi termasuk sektor yang sulit sekali merangkak mencapai target. Indonesia sendiri termasuk yang masih bekerja keras untuk memastikan target sanitasi bisa tercapai.

Tabel 2.54 Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2015-2020 (Dalam Persen)

No.	Fasilitas Tempat Buang Air Besar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sendiri	27,28	81,97	85,35	84,31	79,13	80,30
2	Lainnya	13,09	7,26	14,64	15,69	20,87	14,8
3	Tidak Ada	4,62	10,76	0,00	0,00	0,00	5,62

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang 2018-2020

Tabel 2.55 Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang digunakan Rumah tangga, Tahun 2015-2020 (Dalam Persen)

No.	Jenis Kloset	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Leher Angsa	91,58	96,52	96.82	97,96	96,97	97,54
2	Lainnya	7,42	3,48	3,18	2,04	3,03	2,46
3	Tidak Pakai	1	0	0	0	0	0

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang 2018-2019

Tabel 2.56 Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2015-2020 (Dalam Persen)

No.	Tempat Pembuangan Akhir Tinja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanki Septik/IPAL/SPAL	67,95	77,64	95,73	90,37	80,2	88,63
2	Lainnya	32,06	22,35	4,27	9,63	19,8	10,95

Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang 2018-2020

F. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Tabel 2.57 Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2013-2020

Tahun	Persentase
2015	73,98
2016	69,82
2017	73,2
2018	80,95
2019	72,89
2020	98,48

Sumber : BPS Provinsi Banten 2020

G. Areal Kawasan Kumuh

Kondisi wilayah Kabupaten Tangerang dengan berbagai karakteristik yang berbeda antara perdesaan dan perkotaan, antara Pantai Utara dengan wilayah lainnya menyebabkan perbedaan dalam tingkat sanitasi sehingga menimbulkan kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang. Data tahun 2020 terdapat 27 kecamatan yang masih memiliki kawasan kumuh. Luas permukiman kumuh sekitar 688,82 Ha yang ada di Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang 95.960 Ha, maka persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten sekitar 0,71 persen.

Penanganan masalah kawasan kumuh dilaksanakan sejak tahun 2013 – 2018 dengan Program Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin). Hingga tahun 2018, 4.716 unit rumah telah direnovasi melalui program ini.

Tabel 2.58 Jumlah Kawasan Kumuh di Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No.	Kecamatan	Kumuh Ringan	Kumuh Sedang	Luas Kumuh (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luas Kumuh
1	Balaraja	2		13,72	335.600	0,0041
2	Cikupa	3	1	18,38	426.800	0,0043
3	Cisauk	1		2,61	277.700	0,0009
4	Cisoka	5		7,15	269.800	0,0027
5	Gunung Kaler	3		10,08	296.300	0,0034
6	Jambe	1		1,34	260.200	0,0005
7	Jayanti	1		8,51	238.900	0,0036
8	Kelapa Dua	1		0,67	243.800	0,0003
9	Kemiri	3		16,29	327.000	0,0050
10	Kosambi	6	1	61,88	297.600	0,0208
11	Kresek	9		29,72	259.700	0,0114
12	Kronjo	8		58,793	442.300	0,0133
13	Mauk	5	2	76	351.300	0,0216
14	Mekar Baru	6		21,01	238.200	0,0088
15	Pagedangan	2		13,23	456.900	0,0029
16	Pakuhaji	10		39,14	518.700	0,0075
17	Panongan	3		64,86	349.300	0,0186
18	Pasar Kemis	1		10,99	259.200	0,0042
19	Rajeg	7		20,28	537.000	0,0038
20	Sepatan	4	2	64,74	173.200	0,0374
21	Sepatan Timur	8		58,33	182.700	0,0319
22	Sindang Jaya	4		5,51	371.500	0,0015
23	Solear	2		4,97	290.100	0,0017
24	Sukadiri	2		6,89	241.400	0,0029
25	Sukamulya	7		25,23	269.400	0,0094

No.	Kecamatan	Kumuh Ringan	Kumuh Sedang	Luas Kumuh (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luas Kumuh
26	Teluk Naga	9	1	46,1	405.800	0,0114
27	Tigaraksa	1		2,4	487.400	0,0005
Total		114	7	688,823	8.807.800	0,2343

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman, Kab, Tangerang, 2020

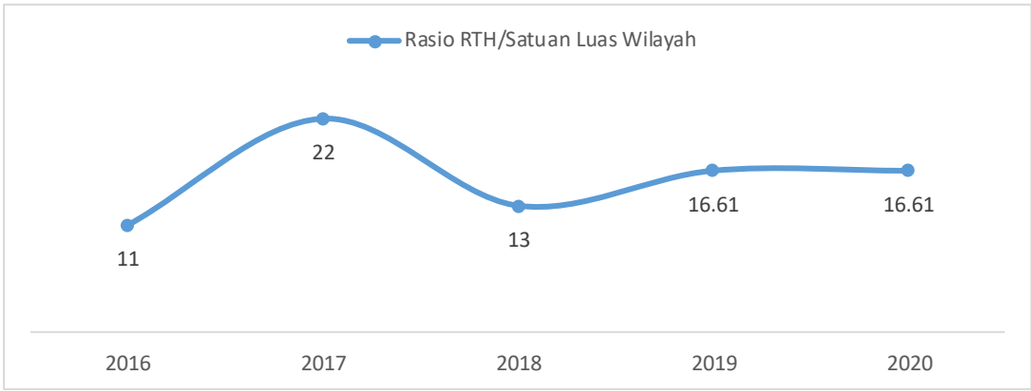
H. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

1) Lahan dengan luas paling sedikit 2,500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
2) Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur;
3) Didominasi komunitas tumbuhan,
4) Agar kegiatan budi daya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen),

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Gambar 53 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tangerang Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kab, Tangerang, 2016 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

I. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus,

Data ijin mendirikan bangunan (imb) rumah tingal industri , perumahan, perkantoran, menara telekomunikasi pada pemerintah kabupaten tangerang tahun 2020, bisa dilihat pada table dibawah.

Tabel 2.59 Data Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Tangerang Tahun 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Pelayanan Perijinan IMB	1,002	874	842	885	923
Jumlah	1,002	874	842	885	923

Sumber : Data dari DPTMPTSP Tahun 2020

J. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Berdasarkan statistik sektoral Kabupaten Tangerang 2020, terdapat 22,992 unit rumah yang dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni di Tahun 2017, Sementara itu pemerintah terus berusaha untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni, Secara total hingga tahun 2020, terdapat 6,681 unit rumah yang berhasil direhabilitasi,

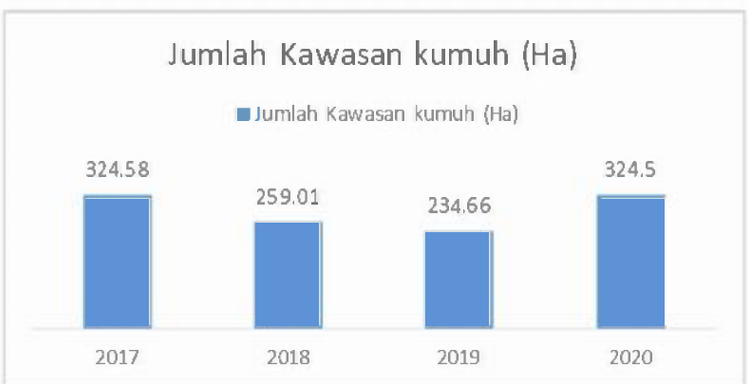
Gambar 54 Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi 2017-2020 (dalam unit)



Sumber : Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020

Dari luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,5 Ha, gambar di bawah menunjukkan jumlah Kawasan kumuh, Terdapat penurunan jumlah Kawasan kumuh setiap tahunnya di Kabupaten Tangerang, yaitu dari 324,58 ha di tahun 2017 menjadi 324,5 ha di tahun 2020.

Gambar 55 Luas Kawasan Kumuh (Ha) 2017-2020



Sumber: Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020

2.3.1.4. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tangerang pada saat ini Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 67 orang PNS, yang terdiri dari kualifikasi pendidikan SD sebanyak 1 orang, SMP sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 39 orang, dan Sarjana sebanyak 25 orang, Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan adalah Golongan I sebanyak 2 orang, Golongan II sebanyak 36 orang, Golongan III sebanyak 24 orang dan Golongan IV sebanyak 5 orang, Cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama 20 menit,

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk menaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum), Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan, Adapun kondisi pelanggaran Perda dapat dilihat di bawah ini, Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 pelanggaran yang ditegakkan terhadap terjadinya pelanggaran lebih banyak daripada jumlah pelanggarannya, Dimulai 2019 jumlah pelanggaran yang ditegakkan masih jauh dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan atau yang dipantau yaitu sebanyak 103 pelanggaran. Sedangkan tahun 2020 jumlah pelanggaran yang dilaporkan sebanyak 26 kasus, dari kasus yang ada sudah diselesaikan sebanyak 29 kasus.

Keberadaan Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, LSM, dan Partai Politik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan.

Tabel 2.60 Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang diselesaikan	176	124	136	107	132	114	88	29
2	Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilaporkan dan/atau dipantau	170	121	135	105	146	123	103	26

Sumber : Satpol PP Kab, Tangerang, Tahun 2013-2020

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas, Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan, Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan, Untuk Kabupaten Tangerang menurut Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk, Rasio jumlah linmas per 10,000 penduduk.

2.3.1.5. Sosial

Berdasarkan hasil data PMKS dan PSKS di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 masih tinggi, terutama fakir miskin/kemiskinan,

Tabel 2.61 Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Tangerang Tahun 2020 (dalam jiwa)

NO	JENIS PMKS	Jumlah
1	Fakir Miskin	88.135
2	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	4.367
3	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	2.308
4	Anak Balita Terlantar	8.261
5	Anak Terlantar	61.853
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	691
7	Anak Berhadapan Dengan Hukum	-
8	Anak Jalanan	163
9	Anak Dengan Kedisabilitasan	611
10	Anak Yang Menjadi KTK/ Diperlakukan Salah	27
11	Lanjut Usia Terlantar	16.301
12	Gelandangan	167
13	Pengemis	261
14	Pemulung	2.480
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	571
16	Korban Penyalahgunaan Napza	-
17	Tuna Susila	80
18	Kelompok Minoritas	101
19	Penyandang Disabilitas	3.378
20	Penyandang HIV/AIDS	-
21	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	65
22	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	110
23	Korban Traficking	-
24	Korban Bencana Alam	6.594
25	Korban Bencana Sosial	-
JUMLAH		196.524

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2021

Tabel 2.62 Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

No,	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan social	7,015	154	15	5,939
2	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social	7,015	154	15	5,939
	Persentase	100	100	100	100

Sumber : Data Statistik Sektoral Kab Tangerang, 2020

Tabel 2.63 Jumlah PMKS yang Tertangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang tertangani	41,079	122,858	127,343	124,841
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial	42,700	129,470	131,555	172,370
Persentase	96	95	97	72

Sumber : Data Statistik Sektoral Kab Tangerang, 2020

2.3.2. Fokus Layanan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

A. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Pada tahun 2020, pencari kerja yang terdaftar sebanyak 38.550 orang, sedangkan lowongan yang tersedia sebanyak 18.920 orang atau 49,08 persen, namun dari lowongan yang ada tersebut hanya 17.877 orang yang dapat ditempatkan atau 94,49 persen dari jumlah lowongan.

Gambar 56 Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Tangerang yang Ditempatkan tahun 2018 - 2020 (dalam jiwa)



Sumber : Analisis Statistik Sektoral Periode Data 2018-2020, 2021

B. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 sebanyak 210.867 orang.

Tabel 2,64 Jumlah Tenaga Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan

No,	Uraian	2020
1	Peserta BPJS Ketenagakerjaan	210.867

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2020

C. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi oleh UPTD Latihan Kerja Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 sebanyak 400 orang akan tetapi pada tahun 2020 karena pandemi covid-19 maka pelaksanaan latihan kerja di BLK tidak dapat dilaksanakan

Tabel 2,65 Pendaftar Tenaga Kerja yang Dilatih Tahun 2013-2017

No,	Tahun	Tenaga kerja yang dilatih (orang)
1	2013	380
2	2014	360
3	2015	620
4	2016	240
5	2017	140
6	2018	752
7	2019	400
8	2020	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2020

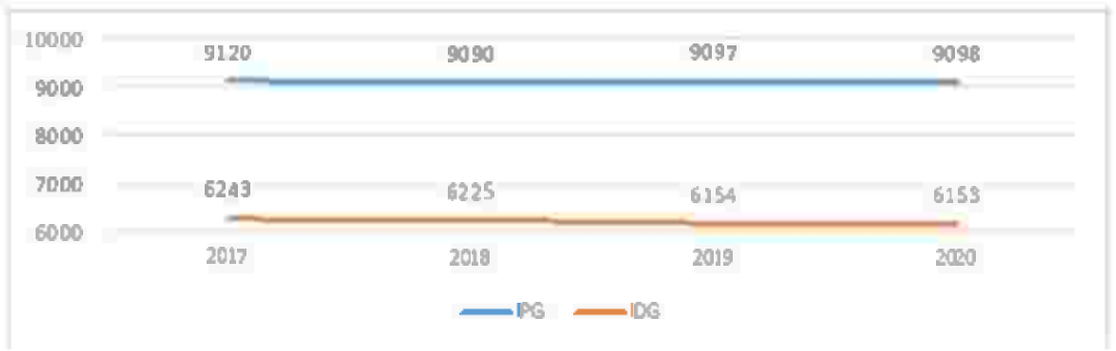
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki *dan* perempuan, Capaian IPG Kabupaten Tangerang di tahun 2020 berada pada angka 90,98,

Sementara itu, kondis Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, pada tahun 2020 menunjukkan angka 61,53, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka IDG Provinsi Banten yang mencapai 66,91.

Gambar 57 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tangerang Tahun 2017 - 2020



Sumber : BPS, 2021

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon II – IV, Jumlah perempuan di lembaga pemerintaha Kabupaten Tangerang sebanyak 5, 651 dari 10,326 orang pegawai atau Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2020 adalah 54,7%,

C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Data RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021 juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi perempuan di lembaga swasta, Pada tahun 2019, jumlah perempuan di lembaga swasta mencapai 23,18%, Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 22,47%,

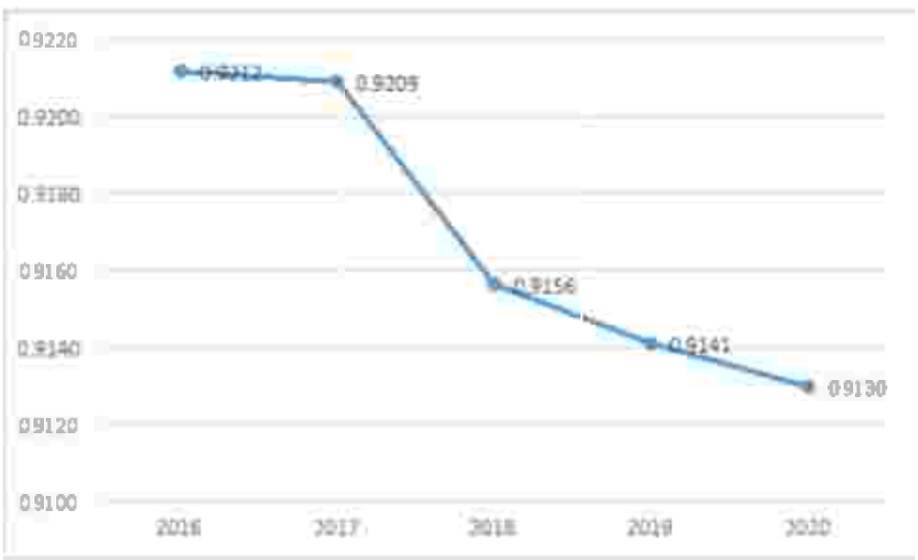
D. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif daerah (DPRD) berada pada angka 14 persen atau 7 anggota legislatif perempuan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Tangerang, persentase proporsi perempuan di DPRD masih belum mencapai target keterwakilan 30 persen perempuan.

E. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan, Pada tahun 2020, APM SD perempuan masih kecil dibandingkan dengan APM SD laki-laki sehingga rasio APM sebesar 0,91 Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan perempuan masih jauh dan lebih banyak laki-laki yang menempuh pendidikan SD.

Gambar 58 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD 2016-2020



Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021, Dinas Pendidikan 2021

F. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Pada tahun 2020, APM SMP laki-laki lebih besar dibandingkan APM SMP perempuan, sehingga rasionya sebesar 0,94, artinya kesempatan memperoleh pendidikan perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki, Kondisi tahun 2020 lebih bagus disbandingkan tahun 2019 yang masih 0,93,

Gambar 59 Rasio Perempuan/Laki-Laki di SMP

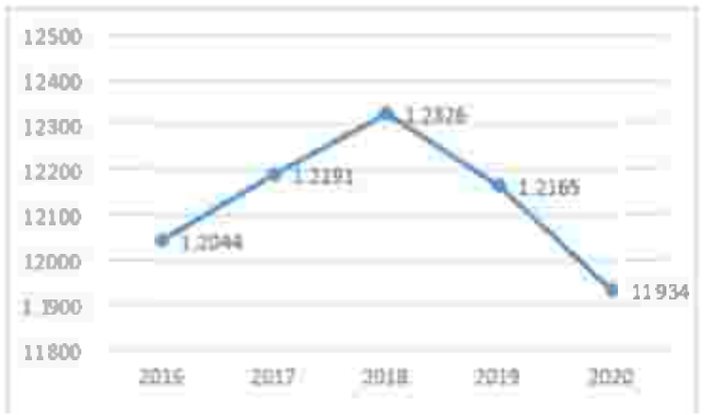


Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021, Dinas Pendidikan 2021

G. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Pada tahun 2018 APM SMA perempuan mencapai angka rasio 1,19, sehingga rasionya artinya kesempatan memperoleh pendidikan perempuan lebih besar berada di bangku kelas SMA dibandingkan laki-laki, Namun pada tahun 2019 dan 2020, tren rasio APM cenderung menurun,

Gambar 60 Rasio Perempuan/Laki-laki di SMA



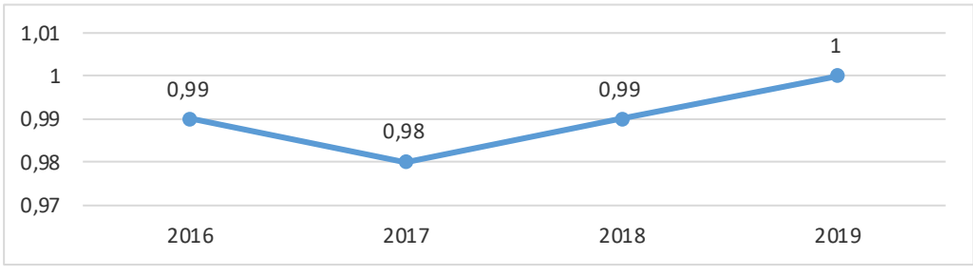
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021, Dinas Pendidikan 2021

H. Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap lelaki pada usia 15-24 tahun pada 2017 sebesar 0,98, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 0,99 artinya perempuan lebih sedikit yang telah melek huruf dibandingkan laki-laki, Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2019 di mana rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki adalah 1, Hal

ini menunjukkan bahwa perempuan yang melek huruf dibandingkan laki-laki sudah seimbang,

Gambar 61 Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun



Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

2.3.2.3. Pangan

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Tidak hanya sekedar memenuhi kuantitas pangan tetapi juga kualitasnya, Pangan sangat berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia, Kurangnya ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat dalam suatu negara akan mengakibatkan menurunnya kesejahteraan hidup, penyakit, kelaparan, bahkan bencana, Selain itu, peringatan akan perubahan kondisi iklim global telah mengganggu pertumbuhan harga pangan sehingga terjadi potensi kenaikan harga pada beberapa komoditas, Bahkan beberapa lembaga internasional telah memberikan peringatan dini tentang adanya fluktuasi harga pangan, sehingga, ketahanan pangan (*food security*), kemandirian pangan (*food self-help*), dan kedaulatan pangan (*food souverenity*) nasional penting untuk digalakkan,

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, Subsistem

utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan, Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut,

A. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan utama di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 adalah 25,700 ton, cadangan pangan ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 17,080 ton, Akan tetapi pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama mengalami kenaikan menjadi 25,000 ton,

Tabel 2.66 Penguatan Cadangan Pangan, Tahun 2017-2020 (dalam ton)

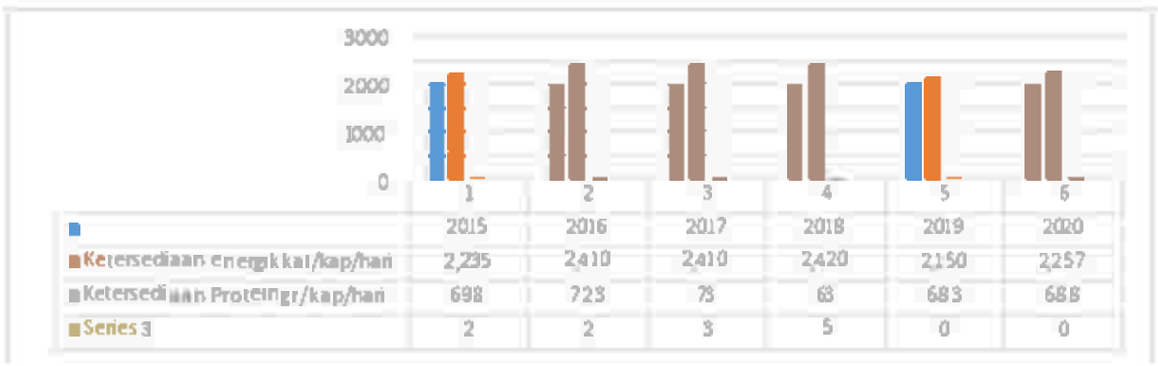
Tahun	Penguatan cadangan pangan
2017	17,080
2018	25,700
2019	12,800
2020	25,000

Sumber : DPKP Kabupaten Tangerang Tahun 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021

Cadangan pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan penting bagi pemantapan ketahanan pangan, Pengelolaan cadangan yang baik akan dapat menanggulangi masalah pangan seperti adanya gejolak harga yang tidak wajar, atau keadaan darurat karena adanya bencana atau paceklik yang berkepanjangan, sehingga membatasi aksesibilitas pangan masyarakat,

Untuk mengukur ketersediaan pangan di suatu daerah, ditunjukkan dengan tingkat ketersediaan energi dan protein yang merupakan indikator dari standar pelayanan minimal untuk ketersediaan pangan, Berikut grafik perkembangan ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Tangerang tahun 2015-2020,

Gambar 62 Ketersediaan Energi dan Protein Perhari Tahun 2015-2020



Sumber : Renstra DPKP Kabupaten Tangerang 2019 - 2023

Catatan:

Ketersediaan Energi/kap/hari ideal = 2200 kkal/kap/hari

Ketersediaan Protein/kap/hari ideal = 57 g/kap/hari

Sumber : Renstra DPKP Kabupaten Tangerang 2019 - 2023

Berdasarkan grafik di atas, terlihat tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita perhari di Kabupaten Tangerang sudah melebihi angka ideal yang ditetapkan pemerintah, Hal tersebut menunjukkan di Kabupaten Tangerang sudah cukup terpenuhi dalam dalam hal aspek ketersediaan baik energi maupun protein.

B. Subsistem distribusi pangan,

Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata, Sistem distribusi bukan semata-mata menyangkut aspek fisik dalam arti pangan tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga masyarakat, Surplus pangan di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan pangan bagi individu masyarakatnya, Sistem distribusi ini perlu dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar terbuka agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk,

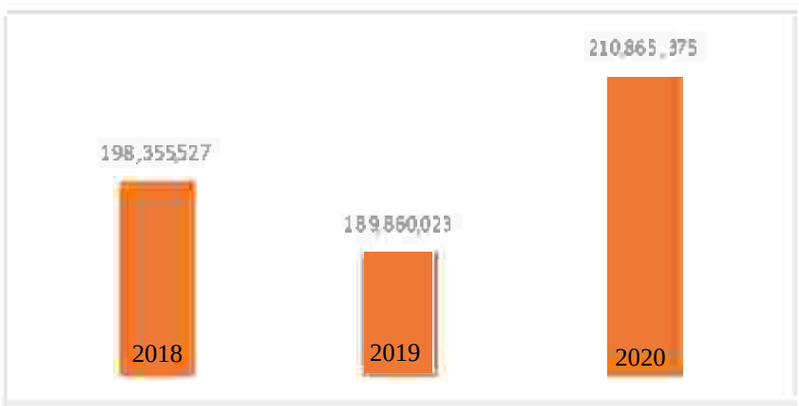
Aspek Akses Pangan (*Food Acces*): yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan, Akses rumah tangga dari individu terdiri dari akses ekonomi, fisik, dan sosial, Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja, dan harga, Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial

menyangkut tentang referensi pangan, Atau dapat dikatakan keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan yang dapat diukur dari pemilikan lahan, Cara memperoleh pangan juga dapat dengan produksi sendiri dan membeli,

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Akses pangan dapat dikategorikan dalam faktor-faktor yang bersifat fisik antara lain kelancaran sistem distribusi, terpenuhinya sarana dan prasana transportasi sehingga tidak menimbulkan terjadinya isolasi daerah, Faktor yang bersifat ekonomi antara lain kemampuan atau peningkatan daya beli masyarakat atau individu dikarenakan adanya kesempatan kerja menyebabkan pendapatan tinggi sehingga harga pangan terjangkau, Faktor yang bersifat sosial antara lain tidak adanya konflik sosial yang disebabkan oleh buruknya adat atau kebiasaan, tinggi-rendahnya pengetahuan sehingga berpengaruh pada preferensi atau pemilihan jenis pangan, Suatu contoh adanya pengetahuan tentang asupan gizi pada komoditas pangan yang seharusnya dikonsumsi maka rumah tangga atau individu dengan pendapatan yang tinggi maka tidak mustahil rumah tangga/individu akan memilih komoditas pangan yang memiliki mutu dan kualitas,

Standar Pelayanan Minimal untuk subsistem distribusi pangan mengukur aspek ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan. Berikut gambaran yang menunjukkan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tangerang :

Gambar 63 Ketersediaan Informasi Pangan Utama, 2018 - 2020 (kg)



Sumber : Analisis Statistik Sektoral Periode Data 2018-2020, 2021

Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan cara mengambil data langsung dari pedagang di beberapa pasar besar yang mewakili setiap daerah di Kabupaten Tangerang, Data tersebut berupa informasi pasokan dan harga beberapa bahan makanan utama yang banyak dibutuhkan masyarakat, Data tersebut yang kemudian seharusnya disebarluaskan kepada masyarakat terutama yang berlokasi cukup jauh dari pasar, sehingga akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi tersebut dapat terpenuhi,

Selain itu, data yang diperoleh juga diolah sehingga didapati informasi kestabilan harga dan pasokan barang kebutuhan pangan pokok, Dengan kestabilan tersebut, diharapkan tidak ada gejolak yang membuat masyarakat harus membayar lebih untuk mencukupi kebutuhan pangan pokok mereka.

Adapun dalam rangka meningkatkan produksi pertanian Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Kelompok Tani. Pada tahun 2020 terdapat 278 yang mendapat bantuan dari keseluruhan 1.234 kelompok tani (22,52%)

Gambar 64 Cakupan Binaan Kelompok Tani yang Mendapat Bantuan Tahunn 2018-2020



Sumber : Analisis Statistik Sektoral Periode Data 2018-2020, 2021

C. Subsistem konsumsi pangan

Subsistem konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi, dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola

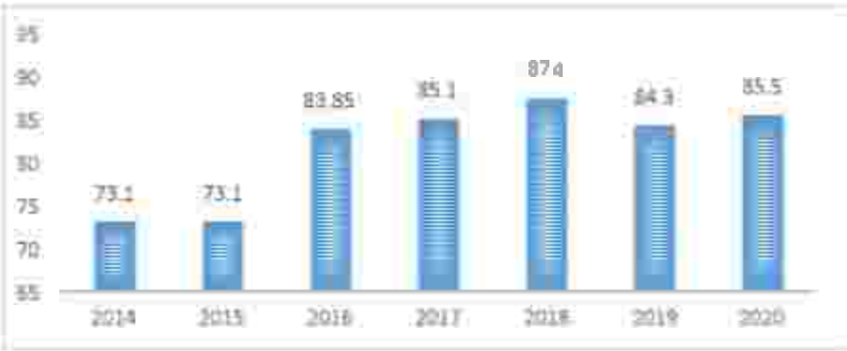
konsumsinya secara optimal, Konsumsi pangan hendaknya memperhatikan asupan pangan dan gizi yang cukup dan berimbang, sesuai dengan kebutuhan bagi pembentukan manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif, Dalam subsistem konsumsi terdapat aspek penting lain yaitu aspek diversifikasi, Diversifikasi pangan merupakan suatu cara untuk memperoleh keragaman konsumsi zat gizi sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat atas satu jenis pangan pokok tertentu, yaitu beras, Ketergantungan yang tinggi dapat memicu instabilitas apabila pasokan pangan tersebut terganggu, Sebaliknya agar masyarakat menyukai pangan alternatif perlu peningkatan cita rasa, penampilan, dan kepraktisan pengolahan pangan agar dapat bersaing dengan produk-produk yang telah ada, Dalam kaitan ini peranan teknologi pengolahan pangan sangat penting,

Efektifitas dari konsumsi pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas kesehatan, serta penyuluhan gizi, dan pemeliharaan balita, Konsumsi pangan terkait dengan kualitas dan keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi, Ukuran kualitas pangan seperti ini sulit dilakukan karena melibatkan berbagai jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda, sehingga ukuran keamanan hanya dilihat dari ada atau tidaknya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga, Oleh karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk-pauk) sehari-hari yang mengandung protein hewani dan/atau nabati,

Adalah Pola Pangan Harapan (PPH) yang dijadikan model pendekatan untuk mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor pangan dari 9 bahan pangan, PPH berguna sebagai instrumen sederhana menilai situasi ketersediaan dan konsumsi pangan berupa jumlah dan komposisi menurut jenis pangan secara agregat, Di samping itu juga berguna sebagai basis untuk penghitungan PPH yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman konsumsi pangan baik pada tingkat ketersediaan maupun tingkat konsumsi, Selain itu digunakan untuk perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan, Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*),

Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya, Berikut data skor PPH di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu empat tahun ke belakang,

Gambar 65 Skor Pola Pangan Harapan (%) Tahun 2014-2020



Sumber : DPKP Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Keragaman konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Tangerang dengan indikator skor PPH menunjukkan bahwa skor mutu konsumsi pangan penduduk Indonesia periode 2014 – 2020 mengalami kenaikan, Peningkatan mutu konsumsi pangan penduduk menunjukkan sudah baiknya kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman, Baiknya kesadaran masyarakat tersebut kemungkinan lebih disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Tangerang yang semakin tinggi serta banyaknya akses pangan selain beras yang semakin mudah di peroleh, sehingga konsumsi pangan lain selain beras sudah hampir memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan.

Konsumsi pangan juga erat kaitannya dengan mutu dan keamanan pangan, Mutu dan keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, tetapi juga terhadap produktivitas ekonomi dan perkembangan sosial baik individu, masyarakat, maupun negara, Selain itu, mutu dan keamanan pangan terkait erat juga dengan kualitas pangan yang dikonsumsi, yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kesehatan serta pertumbuhan fisik dan intelegensi manusia,

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan antara lain fasilitas dan layanan kesehatan dengan cara peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai dan mempermudah layanan kesehatan,

sanitasi, dan ketersediaan air dengan kecukupan air bersih hal ini dikarenakan air yang kurang bersih rentan penyakit, Faktor lain yang berpengaruh terhadap konsumsi pangan yaitu pengetahuan ibu rumah tangga tentang pola makan dan pola asuh kesehatan berdampak pada seberapa besar jumlah asupan gizi yang dikonsumsi, Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi tidaklah mustahil bahwasanya hasil yang diharapkan seperti peluang harapan hidup dari terpenuhinya gizi balita akan meminimalkan angka kematian bayi sebagi penerus generasi,

Berkaitan dengan keamanan pangan, dari instansi atau badan pengawasan pangan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1. penyuluhan kepada produsen makanan jajanan dan pedagang;
2. pengawasan bahan pangan melalui pengujian bahan pangan segar;
3. penyebaran dan publikasi informasi keamanan dan mutu pangan melalui media cetak maupun elektronik;
4. penetapan dan pengusulan peraturan daerah tentang pengendalian keamanan, mutu, dan gizi pangan;
5. inventarisasi institusi yang memiliki kompetensi dalam menangani keamanan, mutu, gizi pangan segar, olahan, siap saji, dan pangan jajanan,

Bentuk dari ketahanan pangan menitikberatkan pada pola konsumsi yang diharapkan mampu memenuhi gizi maupun energi, diversifikasi pangan, dan adanya jaminan keamanan pangan, Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia, Berdasarkan data dari RKPD Kabupaten Tangerang 2013-2021, Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mencapai 100% hingga tahun 2019,

Pembangunan ketahanan pangan memerlukan keharmonisan dari ketiga subsistem tersebut, Pembangunan subsistem ketersediaan pangan diarahkan untuk mengatur kestabilan dan kesinambungan ketersediaan pangan, yang berasal dari produksi, cadangan, dan impor,

Pembangunan subsistem distribusi pangan bertujuan menjamin aksesibilitas pangan dan stabilitas harga pangan, Pembangunan subsistem konsumsi bertujuan menjamin setiap rumah tangga mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, bergizi, dan aman, Keberhasilan pembangunan masing-masing subsistem tersebut perlu didukung oleh faktor ekonomi, teknologi, dan sosial budaya yang pada akhirnya akan berdampak pada status gizi,

2.3.2.4. Pertanahan

Produksi sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 seluas 219,444,366 Ha dengan rincian sertifikat berupa Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan Hak Sarusun, Sertifikat yang paling banyak diterbitkan adalah sertifikat Hak Milik dengan sebanyak 388,437 bidang.

Tabel 2.67 Rekapitulasi Produksi Sertifikat Tanah di Kabupaten Tangerang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018

No,	Sertifikat	Bidang (unit)	Luas (m2)
1	Hak Milik	307,185	78,089,181
2	Hak Guna Usaha	N/A	N/A
3	Hak Guna Bangunan	62,307	83,476,890
4	Hak Pakai	953	8,116,606
5	Hak Pengelolaan	38	49,502,604
6	Hak Sarusun	17,584	66,578
7	Tanah Wakaf	370	192,507
	Total	388,437	219,444,366

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020

Berdasarkan data dari RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021, pada tahun 2020 jumlah lahan yang bersertifikat mencapai 11,35%, Sementara penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Tangerang tahun 2019 mencapai 100% atau terlaksana sepenuhnya dari izin yang diajukan,

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

A. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Untuk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 sebesar 2,289% dibandingkan jumlah penduduk yang ada, Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2,65 berikut:

Tabel 2.68 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1,	Jumlah TPS (unit)	29
2,	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	87,000
3,	Jumlah Penduduk (jiwa)	3,800,787
4,	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah	2,289%

Sumber : DLHK Kabupaten Tangerang, 2020

B. Persentase jumlah sampah yang tertangani

Untuk melihat persentase penanganan sampah, ditunjukkan pada tabel 2,66 sebagai berikut:

Tabel 2.69 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Timbulan sampah yang ditangani (%)	32,34%	23,63%	24,13%	24,63%

Sumber : DLHK Kabupaten Tangerang, 2020

Meningkatnya jumlah penduduk kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya timbulan sampah yang ada, Berdasarkan tabel di atas, jumlah volume produksi sampah tahun 2019 meningkat menjadi 906,425 ton, Di mana sebelumnya pada tahun 2018 jumlah volume produksi sampah adalah 831,967 ton, Di sisi lain, jumlah sampah yang ditangani pada kabupaten Tangerang meningkat namun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan meningkatnya jumlah sampah, Sehingga, timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2019 hanya mencapai 36,75%, Angka ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 40,23%

Jika dilihat dari jumlah areal pengelolaan sampah, belum ada peningkatan dari 3 tahun terakhir (2017-2019), Berdasarkan data dari Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah stagnan pada angka 941 Km^2, Satu-satunya tempat pembuangan akhir yang dimiliki adalah TPA Jatiwaringin dengan luas

lahan 18 Ha dan yang sudah terpakai sekitar 7 Ha, Kondisi ini tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah atau menampung volume sampah yang ada karena disebabkan oleh beberapa faktor, Di antaranya adalah infrastruktur yang kurang memadai seperti akses masuk ke TPA, teknologi pengelolaan sampah yang masih *open dumping* (yang menyebabkan rendahnya penilaian TPA pada P1 adipura yaitu 36,27), Berikutnya disebabkan oleh kurangnya armada sampah, Adapun data armada pengangkut sampah dibandingkan dengan volume sampah dapat dilihat dari tabel 2.70,

Tabel 2.70 Sampah yang terangkut Tahun 2019

Armada	Jumlah (unit)	Sampah yang terangkut (m3/hari)
Dinas	190	2,280
Kecamatan	46	552
Roda 3 (Germo)	60	120
Total	296	2,952

Catatan : Volume bak : 6 m3, Ritase : 2

Sumber: DLHK Kabupaten Tangerang, 2019

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang terangkut adalah 2,952 ton/hari atau sekitar 51% dari total sampah yang ada, Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya kawasan kumuh dan titik-titik sampah liar, Hal lain yang juga menyumbang permasalahan sampah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku budaya 3R, Kabupaten Tangerang telah membangun dan memfasilitasi masyarakat dengan pembangunan TPST, dalam kurun waktu tahun 2014 s/d 2019 telah dibangun 42 TPST di beberapa kecamatan namun yang aktif hanya sekitar 29 TPST, diantaranya TPST 3R Gemah Ripah yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa, Adapun Bank Sampah juga sudah mulai dikembangkan dan terdapat 2 (dua) Bank sampah yang sudah berjalan dengan baik, yaitu Bank Sampah Kemuning (Binong) dan bank Sampah Puri Permai (Tigaraksa), TPST dan Bank Sampah inilah yang masih perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah,

2.3.2.6 Kondisi Lingkungan Hidup

Kabupaten Tangerang memiliki beberapa sungai besar yang melintasi wilayah administrasi Kabupaten Tangerang, diantaranya Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, Sungai Cimanceuri dan Sungai Cirarab. Sungai-sungai tersebut mengalir memalui daerah perkotaan, pedesaan, industri, pertanian, dan lain sebagainya, sehingga kualitasnya sangat terpengaruh oleh aktivitas beberapa sektor tersebut pada daerah aliran sungai (DAS). Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi memenuhi baku mutu pada suatu sumber air dalam waktu tertentu atau periode tertentu dengan membandingkan terhadap baku mutu air yang ditetapkan. Pada periode pemantauan tahun 2018, Sungai Cimanceuri mempunyai status 2 titik cemar ringan, 7 titik cemar sedang dan 2 titik cemar berat. Pada periode pemantauan tahun 2018, Sungai Cidurian mempunyai status 3 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat. Pada periode pemantauan tahun 2018, Sungai Cisadane mempunyai status 4 titik cemar ringan, 6 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat.

Pada tahun anggaran 2018, Kabupaten Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, telah melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas air beberapa sungai yang berada di Kabupaten Tangerang. Pemantauan tersebut meliputi pengambilan sampel air sungai, analiisis sampel air sungai di lapangan dan laboratorium pada 54 (lima puluh empat) titik pantau yang tersebar di Sungai Cimanceuri, Sungai Cidurian, Sungai Cisadane dan Sungai Cirarab, antara lain:

1. Sungai Cisadane : 12 titik pantau di 4 kecamatan (Kec. Sepatam Timur, Kec. Pakuhaji, Kec. Teluk Naga dan Kec. Pagedangan
2. Sungai Cirarab : 15 titik pantau di 6 kecamatan (Kec. Panongan, Kec. Curug, Kec, Cikupa, Kec. Pasar Kemis, Kec. Rajeg dan Kec. Sukadiri
3. Sungai Cimanceuri : 14 titik pantau di 5 kecamatan (Kec. Jambe, Kec. Tigaraksa, Kec. Balaraja, Kec. Kemiri dan Kec. Kronjo
4. Sungai Cidurian : 13 titik pantau di 5 kecamatan (Kec. Solear, Kec. Cisoka Kec. Jayanti, Kec. Kresek dan Kec. Kronjo

Selain dari sungai di DAS tersebut, dilakukan juga pemantauan di sungai-sungai kecil di Kabupaten Tangerang secara rutin, seperti sungai Cikolear, sungai Cibiuk, sungai Cimasuk, sungai Ranca Buaya, sungai Kadu Agung, sungai Pekong, sungai Cinangka, sungai Cimaneuh, sungai Cigaga, sungai Cikidrun, sungai Cilongok, sungai Cirewed, sungai

Cibunder, sungai Pangodokan, sungai Kongsi Baru, sungai Cioja, sungai Lembang, sungai Apur Leading, sungai Cibende, sungai Cipabuaran, sungai Cicamurang, sungai Cianjing, sungai Rawa Lindung, sungai Cirawa Bule, sungai Cihuni, sungai Cigaten, sungai Kelapa dua, sungai Cigung, sungai Cisodong, sungai Cisabi, sungai Cisauk, sungai Apur Bojong Renged, sungai Utan Pari, sungai Deker dan sungai Kali Pintu Air.

Tabel 2.71 Kualitas Air Sungai di Kabupaten Tangerang Tahun 2018

No	Parameter	Satuan	Sungai Cisadane		Sungai Cirarab		Sungai Cimanceuri		Sungai Cidurian	
			Maret	April	Maret	April	Maret	April	Maret	April
1	Suhu	˚C	27,4	28,2	30,4	29,8	32	30,2	31,4	30,1
2	pH	-	7,53	7,76	7,36	6,91	6,21	7,4	7,67	7,69
3	TSS	Mg/l	79,7	59,5	136	143	87,9	86,2	50,8	64,8
4	TDS	Mg/l	38	35	24	7	28	6	41	14
5	DO	Mg/l	6	6	4	3	5,44	5,81	6,41	6,85
6	BOD	Mg/l	1	7	2	1	2	2	67	1
7	COD	Mg/l	6	45	14	7	11	11	104	6
8	T-P	Mg/l	0,15	0,09	0,27	0,1	0,06	0,11	0,11	0,07
9	Sianida	Mg/l	0	0	14	13	2	0	2	16
10	H2S	Mg/l	0	0	0,01	0	0,001	0,028	0,001	0
11	Fenol	(µg/L)	0,001	0,073	0,005	0,002	0,014	0,095	0,08	0,023

Sumber : RPPLH Kabupaten Tangerang, 2019

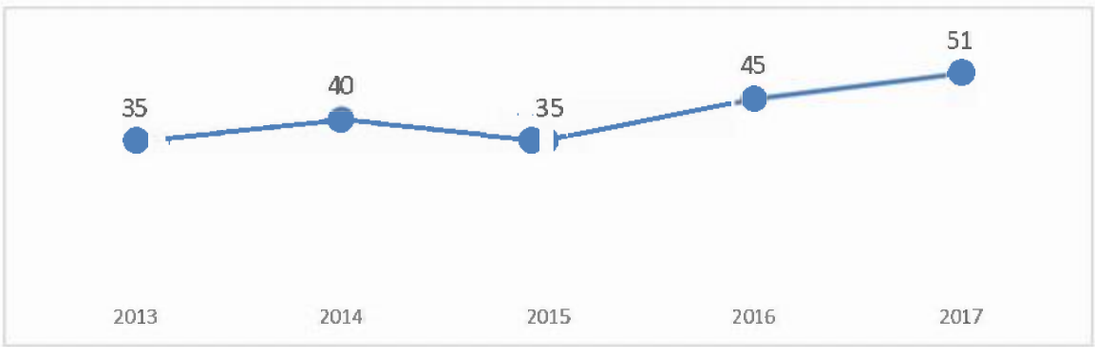
Tidak memenuhi baku mutu air

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan DLHK Kabupaten Tangerang Tahun 2018 diketahui bahwa nilai zat padat terlarut (TDS) dilokasi Kec. Balaraja 2, lebih dari 500 mg/Lt, dimana berdasarkan baku mutu air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 maka nilai TDS tertinggi adalah 500 mg/Lt. TDS merupakan zat padat organik maupun anorganik. TDS secara umum tidak dianggap sebagai suatu zat cemar yang utama, TDS merupakan lebih memperlihatkan karakteristik air minum tersebut. Jika TDS tinggi akan diikuti dengan tingkat kekeruhan dari air tersebut. Kemudian terdapat parameter lain yang tidak memenuhi baku mutu yaitu mangan di Kec. Cikupa dan parameter Sulfat di Kec. Cikuda dan Kec. Balaraja 1.

Kondisi air sungai ini juga mempengaruhi kuantitas air baku bagi penyediaan air minum untuk masyarakat, di mana saat ini baru 32%

masyarakat yang dapat mengakses air minum dari target minimum 40%, Meskipun begitu, pemerintah daerah tidak hanya berpangku tangan, Pembinaan bahkan pelaksanaan penegakan hukum sudah dilakukan terhadap 1,203 industri dan 753 industri sudah ditindaklanjuti mulai dari pemberian sanksi administrasi s/d paksaan pemerintah, Masih rendahnya capaian pengawasan industri ini dikarenakan terbatasnya SDM yang ada di mana jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang dimiliki di DLHK hanya 2 (dua) orang,

Gambar 66 Kasus Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup



Sumber data : Bidang PPKLH DLHK 2017

Dari grafik tersebut menyatakan bahwa seluruh pengaduan terkait masalah lingkungan hidup tertangani oleh DLHK, baik yang masih dalam tahap pembinaan maupun sudah selesai kasusnya,

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, terjadi penurunan persentase cakupan kepemilikan KTP elektronik menjadi 96,23% di tahun 2019, dan Kembali menurun di tahun 2020 menjadi 95,44%,

Tabel 2.72 Capaian Indikator Adiministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator	2017	2018	2019	2020
Cakupan Kepemilikan KTP-el (%)	90,5	96,89	96,23	95,44
Cakupan Kepemilikan KIA (%)	0,18	0,79	9,22	15,75
Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun (%)	23,95	30,74	54,48	73,26

Sumber : Renstra Disdukcapil Kabupaten Tangerang 2019 -2023

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

A. Jumlah PKK aktif

Di Kabupaten Tangerang, terdapat 274 jumlah PKK secara total, Belum ada peningkatan jumlah PKK setiap tahunnya, akan tetapi 4 tahun terakhir jumlah PKK aktif tetap konsisten yaitu 100% dari seluruh PKK,

Tabel 2.73 Jumlah PKK Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Tangerang 2017 - 2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Jumlah PKK	274	274	274	274
Jumlah PKK Aktif	100%	100%	100%	100%

Sumber : Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020

B. Jumlah Posyandu Aktif

Target pembinaan Posyandu adalah tercapainya Posyandu Aktif atau Posyandu yang berada pada strata Purnama mandiri, Pada tahun 2020 target Posyandu Purnama Mandiri adalah 1500 Posyandu dan capaiannya adalah 1223 Posyandu, Pencapaian Posyandu Purnama Mandiri tahun 2020 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Tangerang sehingga pada awal periode tersebut kegiatan lima pelayanan posyandu tidak berjalan sebagaimana mestinya

Tabel 2.74 Persentase Posyandu aktif di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020

No,	Tahun	Posyandu (Unit)	Posyandu Aktif (Unit)	Persentase Posyandu Aktif (%)
1	2013	2,181	677	31,04
2	2014	2,207	1,191	53,96
3	2015	2,241	969	43,23
4	2016	2,173	1,084	49,88
5	2017	2,279	1,167	51,21
6	2018	2,233	2,093	93,73
7	2019	2,233	2,093	93,73
8	2020	2,319	1,223	52,7

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Data Statistik Sektoral Kab, Tangerang 2020)

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. *Total Fertility Rate* (TFR)/Angka Fertilitas Total

TFR merupakan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas, Angka Fertilitas Total (TFR) membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran, TFR merupakan indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Tabel 2. 75 Angka Fertilitas Total Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	TFR	2,2	2,2	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,21
2	Persentase	-	0	5.45	0	0	0	0	-4.74

Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021

TFR sebesar 2,32 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi).

B. Persentase Sektor yang Tersosialisasi Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)

Organisasi Perangkat Daerah yang tersosialisasikan konsep pembangunan berwawasan kependudukan pada tahun 2017 sebanyak 13 perangkat daerah dari total perangkat daerah yang ada sebanyak 33 perangkat daerah dengan persentase sebanyak 39,39%. Jumlah perangkat daerah yang tersosialisasikan sebelumnya sebanyak 10

perangkat daerah. Hingga tahun 2019, persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tersosialisasikan terus meningkat hingga mencapai 57,57 % dari total OPD yang ada saat ini.

Tabel 2.76 Sektor yang Tersosialisasi Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang terpapar (unit)	0	0	3	10	13	16	19
2	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ada (unit)	0	0	33	33	33	33	33
	Persentase (%)	0	0	9,09	30,30	39,39	48,48	57,57

Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2020

C. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah. Kampung KB, nantinya akan menjadi ikon program kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Tabel 2.77 Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB (unit)	15	15	15	15
2	Jumlah semua perangkat daerah (unit)	33	33	33	33
3	Persentase (%)	45,45	45,45	45,45	45,45

Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021

D. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan setiap tahunnya. Yaitu dari 1,84 anak per keluarga menjadi 1,52 anak per keluarga. Hal ini dapat berimplikasi bahwa sudah banyak keluarga yang memiliki anak kurang dari 2 per keluarga di Kabupaten Tangerang.

Gambar 67 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga tahun 2013-2020



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang

E. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Capaian program pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana mengalami kenaikan ditandai dengan peningkatan pengguna aktif kontrasepsi/CPR. Meskipun peningkatannya perlahan, angka pemakaian kontrasepsi secara konsisten naik dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Peningkatan selama tujuh tahun tersebut sebesar 5,97%, dari tahun 2013 sebanyak 65,72% menjadi 71,69% di tahun 2020.

Tabel 2.79 Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2013 - 2020

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta KB aktif	407.565	418.025	452.811	464.204	468.341	475.293	483.571	522,078
2	Jumlah pasangan usia subur	620.188	627.163	661.295	674.810	676.723	681.265	687.862	728,266
	Persentase	65,72	66,65	68,47	68,79	69,21	69,77	70,30	71.69

Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19). ASFR 15-19 diperoleh dari jumlah remaja perempuan melahirkan di usia 15-19 tahun dibandingkan dengan 1.000 perempuan yang berusia 15-19 tahun di Kabupaten Tangerang. Angka kelahiran remaja dengan usia perempuan antara 15-19 tahun di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 mencapai 29,00 orang per 1000 perempuan berusia 15-19 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.80 Angka Kelahiran Remaja di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	ASFR 15-19 tahun	23	23	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	29,00

Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021

F. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun

Pasangan usia subur dengan istri di umur kurang dari 20 tahun di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 mencapai 46.814 jiwa dengan jumlah pasangan usia subur di tahun yang sama sebanyak 676.723 pasangan atau sekitar 6,92%. Angka ini mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 6%.

Tabel 2.81 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang dari 20 Tahun	47.138	47.138	46.814	46.511	46.208	43.696
2	Jumlah pasangan usia subur	661.295	661.295	676.723	681.265	687.862	728.266
	Persentase	7,13	7,13	6,92	6,83	6,72	6,00

Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021

G. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*unmet need*)

Pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani di Kabupaten Tangerang tahun 2017 sebanyak 102.432 pasangan, dengan jumlah PUS sebanyak 676.723 pasangan. Pada tahun 2020, persentase jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi turun menjadi 83.658 dengan jumlah PUS sebanyak 728.266 pasangan.

Tabel 2.82 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	99.802	104.194	102.432	105.240	102.847	83.658
Jumlah Pasangan Usia Subur	661.295	661.295	676.723	681.265	687.862	728.266

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang

H. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Akseptor KB yang menggunakan pola Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau MKJP di Kabupaten Tangerang tahun 2017 sebanyak 115.320 akseptor dengan jumlah akseptor KB yang ada sebanyak 468.341 dengan persentase 24,62%. Pada tahun 2020, persentase tersebut mengalami penurunan yaitu menjadi 22,92%.

Tabel 2.83 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	111.187	115.747	111.534	115.320	116.056	119.643
2	Jumlah akseptor KB	452.811	464.204	468.341	475,293	483,571	522,078
	Persentase	24,55	24,93	24.62	24.26	24.00	22.92

Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

I. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah akseptor KB sebanyak 468.341 pasangan, jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi sebanyak 22.721 pasangan, artinya 4,85% pasangan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 9,7% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 14,55%. Kondisi ini masih terus meningkat hingga tahun 2020 yang mencapai 15,22%.

Tabel 2.84 Persentase Pasangan yang Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Persentase pasangan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi	4,85	9,70	14,55	15,22

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

J. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB sebanyak 5.996 kelompok, dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 7.080 atau sekitar 84.69%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan cakupan menjadi 87,38%.

Tabel 2.85 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	84,69	86,17	87,35	87,38

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

K. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB sebanyak 4.491 kelompok dengan jumlah anggota kelompok BKR

sebanyak 4.987 kelompok, sehingga cakupan anggota Bina Keluarga Remaja mencapai 90.05%. Pada tahun 2018, angka tersebut sempat mengalami penurunan menjadi 84,5% namun kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 97,96%.

Tabel 2.86 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	90,05	84,5	97,96	97,98

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

L. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB sebanyak 5.569 anggota dengan jumlah anggota kelompok BKL mencapai 6.565 anggota dan cakupan anggota Bina Keluarga Lansia adalah 84.83%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan cakupan menjadi 96,07%.

Tabel 2.87 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	83,48	91,05	96,07	96,17

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

M. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sebanyak 2 unit dengan jumlah kecamatan 29 kecamatan dan rasio sekitar 6,90%. Pada tahun 2018 hingga 2020 terjadi peningkatan jumlah PPKS sehingga rasio PPKS per Kecamatan

meningkat menjadi 13,8% pada tahun 2018, 20,7% pada tahun 2019 dan 21,37% pada tahun 2020.

Tabel 2.88 Rasio Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Per Kecamatan Tahun 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Rasio Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Per Kecamatan	6,9	13,8	20,7	21,37

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

N. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/ Mahasiswa

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah PIK R/M sebanyak 8 PIK, dengan jumlah kecamatan yang ada sebanyak 29 kecamatan, sehingga cakupannya mencapai 27,59%. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan jumlah PIK R/M secara signifikan sehingga rasio PIK R/M per Kecamatan mengalami peningkatan menjadi 55,18% pada tahun 2018 dan 82,77% pada tahun 2019.

Tabel 2.89 Rasio Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Rasio Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Per Kecamatan	27,59	55,18	82,77	83,44

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

O. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Pada tahun 2019, data yang bersumber dari RKPD Kabupaten Tangerang menunjukkan jumlah petugas KB dan Penyuluh KB yang

didayagunakan pada tahun 2019 sebanyak 7 orang, dengan jumlah PLKB/PKB sebanyak 7 dan cakupan hingga 100%. Hingga tahun 2020 cakupannya masih stabil di angka 100%.

Tabel 2.90 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2013 - 2020

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan (jiwa)	12	10	9	8	7	7	7	7
2	Jumlah PKB/PLKB (jiwa)	12	10	9	8	7	7	7	7
	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

P. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri sebanyak 1.476 anggota, dengan jumlah anggota kelompok UPPKS sebanyak 1.594. Sementara itu cakupan pasangan usia subur peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri sekitar 92.60%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan cakupan menjadi 98,28%.

Tabel 2.91 Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB Mandiri Tahun 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri	92,6	95,44	98,28	98,34

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2020

Q. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan

Pada tahun 2019, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah petugas pembantu Pembina KB desa di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 sebanyak 274 petugas, dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 274 desa/kelurahan, dengan rasio 1:1 artinya 1 desa/kelurahan ada 1 orang petugas Pembina KB di desa tersebut.

Tabel 2.92 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa (jiwa)	274	274	274	274	274	274	274
2	Jumlah Desa/ Kelurahan (unit)	274	274	274	274	274	274	274
3	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

R. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tangerang menyatakan persediaan alat dan obat kontrasepsi cakupannya sebanyak 150,32%. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 450,96% di tahun 2019.

S. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan persediaan alat dan obat kontrasepsi tersedia sebanyak 16.681 unit dengan rata-rata pemakaian alat dan obat kontrasepsi per bulan sebanyak 11.097 unit cakupan ketersediaan sekitar 150,32%. Cakupan ketersediaan di atas 100% memiliki arti bahwa ketersediaan alat dan obat kontrasepsi lebih besar daripada penggunaannya. Untuk lebih jelas mengenai cakupan tiap tahunnya dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 2.93 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi tahun 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi	216,24	300,64	450,96	451,63

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

T. Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja sama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan jumlah Faskes dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS sebanyak 68 unit dengan jumlah Faskes dan jejaring sebanyak 93 unit, persentase Faskes dan jejaringnya sekitar 73,12%. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan persentase yang sangat drastis yaitu menjadi 219,36%. Pada tahun 2020, angka tersebut Kembali meningkat menjadi 220,03%.

U. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa

Pada tahun 2019, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia sebanyak 274 data dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga sebanyak 274, sehingga cakupannya mencapai sekitar 100,00%.

V. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Pada tahun 2019, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga berjumlah 626 kelompok kegiatan dari total 658 keluarga, sehingga cakupannya mencapai sekitar 93,8%. Pada tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 93,9%.

W. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang adalah sebanyak 7.992 keluarga dari total jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak sebanyak 24.706 keluarga. Dari data tersebut, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sekitar 32,35%. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan cakupan menjadi 64,70% pada tahun 2018 dan 97,05% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, angka ini seditkit meningkat menjadi 97,72%.

Tabel 2.94 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Tahun 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	32,35	64,7	97,05	97,72

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

X. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan bahwa rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang tahun 2015-2017 adalah pada usia 18 tahun.

Tabel 2.95 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	18	18	18	20,12	19,6	18

Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2021

Y. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes

Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan bahwa pengganggaran untuk program kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di APBD Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 15.421.805.584, dengan APBD sebesar Rp. 5.590.682.471.500. Secara persentase, anggaran tersebut adalah sebesar 0,28% dari total APBD. Angka ini kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu menjadi 0,86 %. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan cukup signifikan hingga mencapai presentase anggaran sebesar 2,74%.

Tabel 2.96 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	15.665.642.137	15.421.805.584	0	7.215.962.000	7.650.514.000
Jumlah APBD dan APBDes	4.957.841.202.274	5.590.682.471.500	14.365.552.700	5.102.530.000	6.313.266.042
Persentase	0.32	0.28	0	0,86	2,74

Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2021

2.3.2.9. Perhubungan

A. Izin Trayek di Kabupaten Tangerang

Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif, Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, banyak orang yang mampu membeli kendaraan pribadi, Banyak alasan untuk memiliki kendaraan pribadi, antara lain karena masalah privasi dan kenyamanan,

Namun dibalik kebaikannya, kepemilikan kendaraan pribadi terlalu banyak juga menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah kemacetan, Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan umum, semakin efektif pula penggunaan jalan

raya, Dengan kata lain, kendaraan umum merupakan salah satu pemecahan masalah kemacetan di jalan raya, Tabel di bawah menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017-2020,

Tabel 2.97 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020 (dalam unit)

Jenis Kendaraan	2017	2018	2019	2020
Mobil Penumpang	150,003	168,626	192,302	189,087
Bus	210	245	400	55,246
Truk	46,980	50,043	55,246	53,669
Motor	1,224,583	1,216,558	1,339,870	1,496,366

Sumber : BPS Provinsi Banten

Ijin trayek di Kabupaten Tangerang tahun 2018 sejumlah 1,917 buah dengan jumlah penduduk 3.692.693. Sehingga dapat dihitung bahwa rasio ijin trayek tahun 2018 sebesar 1: 1,926, Sementara ijin trayek di Kabupaten Tangerang tahun 2019 sejumlah 1.419 buah dengan jumlah penduduk 3.800.787 Sehingga dapat dihitung bahwa rasio ijin trayek tahun 2019 sebesar 1: 2,678.

Tabel 2.98 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2019

No	Uraian	2018	2019
1	Jumlah Ijin Trayek	1,917	1,419
2	Jumlah Penduduk	3,692,693	3,800,787
3	Rasio Ijin Trayek	1 : 1,926	1 : 2,678

Sumber: Dinas Perhubungan, Kab, Tangerang Tahun 2019

B. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB/KIR)

Unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji KIR di Kabupaten Tangerang hanya 1 unit yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yaitu yang berlokasi di Kecamatan Balaraja, Selama tahun 2015 sampai dengan 2019 telah dilaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB sebanyak 269,091 unit kendaraan dengan rincian

mobil barang sebanyak 246,729 unit, mobil bis sekitar 19,434 unit, mobil penumpang sebanyak 3,574 unit kendaraan, dan tempelan sebanyak 746 unit, Selama tahun 2015 telah di uji sebanyak 51,735, tahun 2016 telah dilakukan uji KIR sebanyak 51,192 unit kendaraan, tahun 2017 telah dilakukan pengujian terhadap kendaraan sebanyak 51,461 unit, dan pada tahun 2018 telah dilakukan pengujian terhadap kendaraan sebanyak 55,053 unit, serta tahun 2019 sebanyak 59,650 unit.

Tabel 2.99 Perkembangan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PKB Dinas Perhubungan, Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2019 (dalam unit)

Jenis Kendaraan	2015	2016	2017	2018	2019
Mobil Barang	45,832	45,639	47,482	51,505	56,271
Mobil Bis	4,850	4,812	3,520	3,199	3,053
Mobil Penumpang	1,053	741	241	147	
Tempelan	-	-	218	202	326
Jumlah	51,735	51,192	51,461	55053	59,650

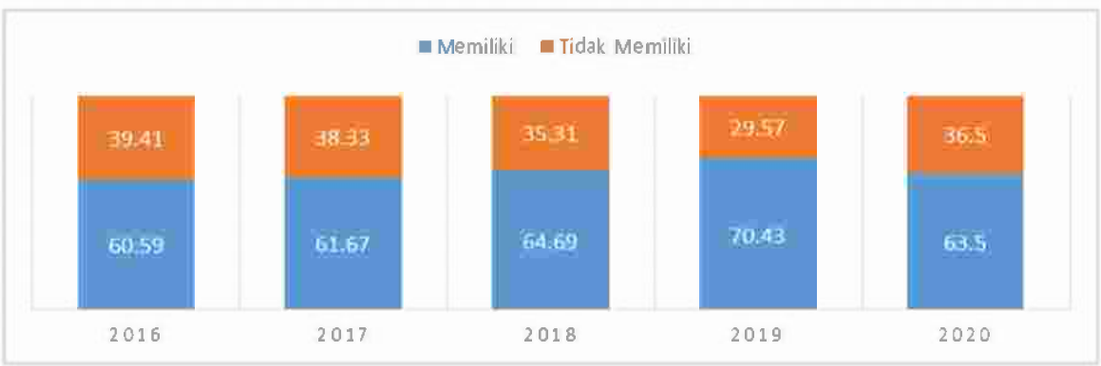
Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan, tahun 2017, Dinas Perhubungan 2020

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

A. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Selular (HP)

Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki Telepon Seluler di Kabupaten Tangerang tahun 2019 adalah sekitar 36,5 persen, sedangkan yang tidak memiliki telepon seluler sekitar 36,5 persen.

Gambar 68 Persentase penduduk 5 tahun keatas yang memiliki HP Tahun 2015-2020 di Kabupaten Tangerang

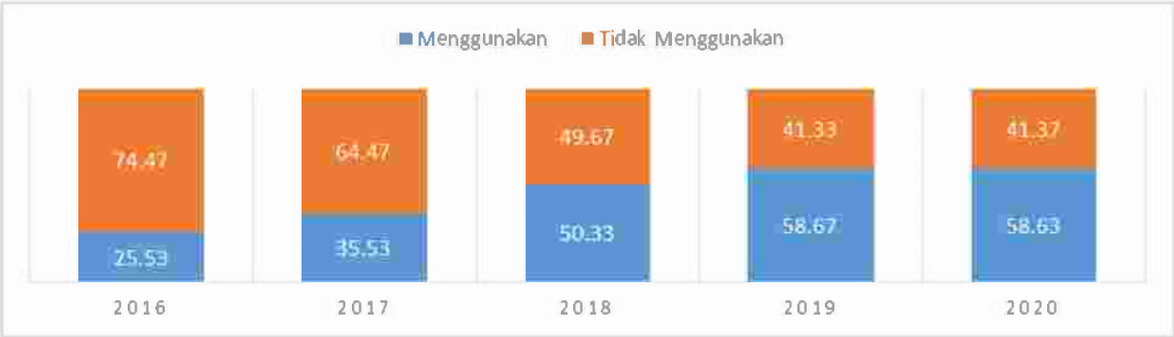


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2015-2020

B. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer dan Akses terhadap Internet

Sementara itu, aktivitas penduduk yang mengakses internet pada tahun 2018 sekitar 50,33 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 58,63 persen,

Gambar 69 Persentase penduduk 5 tahun keatas yang menggunakan Akses internet Tahun 2015-2020 di Kabupaten Tangerang



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2012-2020

2.3.2.11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Terdapat 641 koperasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020, Dari jumlah tersebut 355 koperasi merupakan koperasi aktif dan mampu menyerap 1.367 karyawan. Berdasarkan modalnya, koperasi di Kabupaten Tangerang lebih banyak menggunakan modal dari luar dibandingkan modal sendiri,

Tabel 2.100 Jumlah Koperasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020

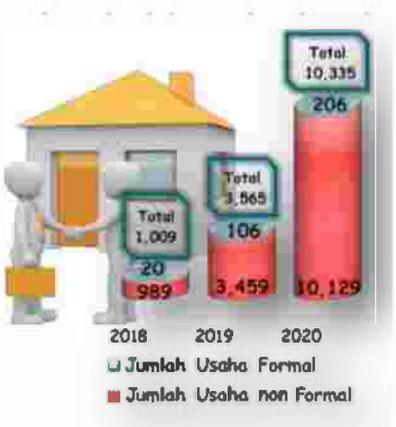
No,	Kecamatan	Koperasi Aktif				Tenaga Kerja			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Balaraja	30	30	32	33	90	90	96	99
2	Cikupa	30	32	35	36	90	96	105	108
3	Cisauk	5	5	6	6	15	15	18	18
4	Cisoka	3	5	5	5	9	15	15	15
5	Curug	10	12	15	15	30	36	45	45
6	Gunung Kaler	2	2	2	2	6	6	6	6
7	Jambe	3	3	3	3	9	9	9	9
8	Jayanti	7	10	11	11	21	30	33	33
9	Kelapa Dua	16	22	33	33	48	66	99	108
10	Kemiri	4	4	4	4	12	12	12	12
11	Kosambi	5	5	5	5	15	15	15	15

No,	Kecamatan	Koperasi Aktif				Tenaga Kerja			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
12	Kresek	3	2	2	2	9	9	12	12
13	Kronjo	2	2	5	5	6	6	15	6
14	Legok	6	7	8	9	18	21	26	27
15	Mauk	5	9	11	11	15	27	33	33
16	Mekar Baru	1	1	2	2	3	3	6	6
17	Pagedangan	8	11	15	19	206	215	227	242
18	Pakuhaji	3	3	3	3	9	9	9	9
19	Panongan	8	9	13	13	24	27	39	39
20	Pasarkemis	18	26	29	30	54	78	87	90
21	Rajeg	7	23	17	17	21	39	51	51
22	Sepatan	7	7	9	10	21	21	27	30
23	Sepatan Timur	1	3	3	3	3	9	9	9
24	Sindang Jaya	3	3	4	5	9	9	12	15
25	Solear	6	7	9	10	18	21	27	30
26	Sukadiri	3	6	6	6	9	18	18	18
27	Sukamulya	5	5	5	5	15	15	15	15
28	Teluknaga	9	11	14	15	27	33	42	45
29	Tigaraksa	26	35	35	35	195	207	222	222
	Jumlah	236	286	340	355	1,007	1,175	1,182	1,367

Sumber : https://statistik,tangerangkab,go,id/

Berdasarkan tabel di bawah, jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang tahun 2020 mencapai 10.335 Usaha Mikro yang terdiri dari 206 Usaha Formal dan 10.129 Usaha Non Formal. Jumlah Usaha Mikro terus bertambah dari tahun 2019 sebesar 189,90%.

Gambar 70 Jumlah Usaha Mikro Formal dan Non Formal di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020



Sumber : Analisis Statistik Sektoral Periode Data 2018-2020

2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah pengeluaran atau perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian, Penanaman modal di Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu:

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor Penanaman Modal Asing/PMA dan Investor dalam negeri yang berinvestasi di Kabupaten Tangerang tahun 2019 sebanyak 2,776 investor, dengan 1.140 investor dalam negeri, 1.636 investor asing. Tahun 2020 jumlah total investor baik dalam maupun luar negeri meingkat, menjadi 3.951 investor.

Tabel 2.101 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

No	Penanaman Modal	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PMDN	53	115	181	326	1,140	2173
2	PMA	62	110	132	833	1,636	1778
	Jumlah	115	225	313	1,716	2,776	3,951

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tangerang, 2020

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi PMA di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 senilai 149,732 (ribu US$), Untuk PMDN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp2,082,947, Sedangkan perluasan proyek PMA sebesar 470, dan PMDN sebesar 781,

Tabel 2.102 Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020
PMA				
Nilai Investasi (ribu US$)	412.661,5	984.945,4	516.450	444.376,4
Jumlah Proyek	132	1.228	1.636	1.778

URAIAN	2017	2018	2019	2020
(proyek)				
PMDN				
Nilai Investasi (juta Rp)	6.413.641,5	8.135.633	7.656.675	12.101.112,1
Jumlah Proyek (proyek)	181	488	1,140	2.173

Sumber :DPMPTSPKab Tangerang 2021

Rekapitulasi penerbitan izin menujukkan kemudahan birokrasi dalam melakukan investasi atau usaha di berbagai bidang, Tabel dibawah menunjukkan penerbitan izin pada tahun 2020.

Tabel 2.103 Rekapitulasi Penerbitan Izin Januari sd Desember 2020

No	Jenis Izin	Izin Masuk	Izin Terbit	Dalam Proses
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	333	282	51
2	Perpanjangan IMTA	582	470	112
3	Izin Reklame	482	268	214
4	Izin Usaha Toko Modern	49	27	22
5	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	90	89	1
6	Sertifikat Laik Fungsi	17	11	6
7	Izin Usaha Jasa konstruksi	148	124	24
8	Tanda Daftar Gudang	21	13	8
9	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	3	2	1
10	Izin Usaha Perdagangan	1,367	1,298	69
11	Tanda Daftar Perusahaan	1,660	1,571	89
12	Izin Prinsip Penanaman Modal	382	362	20
13	Izin Usaha Industri	90	46	44
14	Izin Apotek	38	36	2
15	Izin Lingkungan	143	139	4
16	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	35	31	4
17	Izin Klinik dan Kecantikan	36	31	5
18	Izin Laboratorium	1	1	-
19	Sertifikat Laik Higiene	16	14	2
20	Izin Mendirikan Klinik dan Kecantikan	21	17	4

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2020

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pada tahun 2019, persentase organisasi pemuda yang aktif terdapat sejumlah 45% dari total yang ada. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 40%, Sementara persentase wirausaha muda juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 42% di tahun 2017 menjadi 62% di tahun 2019. Untuk cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda, belum ada peningkatan/penurunan setiap tahunnya, Jumlah atlet yang berprestasi mengalami penurunan di tahun 2019 dari tahun sebelumnya, yaitu 41 orang menjadi 18 orang, Penurunan signifikan terjadi di tahun 2020 seperti yang tertera pada table berikut.

Tabel 2.104 Data Kepemudaan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020

Indikator	2017	2018	2019	2020
Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	20	40	55	70
Persentase wirausaha muda (%)	42	57	62	67
Cakupan pembinaan olahraga (%)	33	35	41	41
Cakupan pembinaan atlet muda (%)	20	42	60	79
Jumlah atlet berprestasi (Orang)	22	145	22	21

Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

2.3.2.14. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Berdasarkan tabel di bawah, beberapa sanggar seni mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, Seni modern dan sanggar seniman merupakan sanggar yang mengalami kenaikan jumlah unit di tahun 2019.

Tabel 2.105 Jumlah Sanggar Seni dan Budaya Tahun 2015-2019 di Kabupaten Tangerang (unit)

No,	Uraian	2015	2017	2018	2019
1	Sanggar Seni	12	12	33	33
2	Seni Tradisional	20	21	23	23
3	Seni Tradisi	23	23	23	23
4	Seni Modern	4	4	4	4
5	Seniman	255	258	261	264
6	Lembaga Seni	2	2	2	2
7	Galeri	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2019

Tabel 2.106 Rekapitulasi Ragam Kesenian Tradisional Kabupaten Tangerang Tahun 2020

NO	JENIS KESENIAN	Jumlah	
1	Sanggar Budaya	12	Sangar
2	Parab (Paguyuban Rampak Banten)	1	Panguyuban
3	Padepokan Pencak Silat	11	Padepokan
4	Grup Kesenian Topeng/Ubrug	15	Group
5	Grup Kesenian Tradisional Lenong	13	Group
6	Grup Kesenian Tradisional Gambang Kromong	4	Group
7	Grup Kesenian Gacle Dan Sintren	2	Group
8	Grup Kesenian Tradisional Tanjidor	2	Group
9	Grup Kesenian Tradisional Bedug Lojor	2	Group
10	Grup Kesenian Tradisional Wayang Golek	7	Group
11	Grup Kesenian Tradisional Karinding	2	Group
12	Grup Kesenian Tradisional Reog Sunda	1	Group
13	Grup Kesenian Tradisional Reog Ponorogo	1	Group
14	Grup Kesenian Balenggo	1	Group
15	Grup Kesenian Rudat	2	Group
16	Grup Kesenian Angklung Gubrag	1	Group
17	Grup Kesenian Kliningan/Jaipongan	2	Group
18	Grup Kesenian Barongsay Dan Liong	1	Group
19	Grup Paranormal Debus Extrem Banten	1	Group
Jumlah		81	

Sumber : Disporabudpar, Tahun 2020

Tabel 2.107 Ragam Kesenian Non Tradisional Kabupaten Tangerang Tahun 2020

NO	KELOMPOK	JUMLAH	
1	Organ Tunggal	56	Grup
2	Band	17	Grup
3	Orkes Gambus	1	Grup
4	Marawis	1	Grup
5	Hadroh	2	Grup
6	Musik Keroncong	1	Grup
7	Musik Akustik	2	Grup
8	Musik Angklung	1	Grup
9	Kolintang		Grup

Sumber : Disporabudpar, Tahun 2020

2.3.2.15. Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 72.256 orang dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 111.363 eks, Sementara kunjungan ke perpustakaan sebanyak 72.256 orang mengalami penurunan dikarenakan pembatasan di pandemic Covid-19, Kapasitas perpustakaan yang ada di Kabupaten Tangerang baru 1.491 unit dengan 1 perpustakaan daerah, 29 perpustakaan kecamatan.

Tabel 2.108 Kondisi Perpustakaan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	84,344	161,221	249,793	304,358	335,707	72,256
Koleksi Judul Buku	16,888	18,000	55,000	60,000	68,000	111,363
Jumlah Perpustakaan	6	6	6	6	6	6

Sumber: RKPD Kab Tangerang Tahun 2019-2021 dan Statistik Sektoral KabTangerang 2020

2.3.2.16. Kearsipan

Indikator Urusan kearsipan meliputi indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, Data tahun 2019 menunjukkan jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku sebanyak 63 Perangkat Daerah, dari total 63 perangkat daerah di Kabupaten Tangerang atau 100%.

Tabel 2.109 Penerapan Arsip Secara Baku Tahun 2015-2020

No,	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penerapan Arsip Baku	25	35	45	45	14	15
2	Perangkat Daerah	66	66	66	66	63	63
	Persentase	37,87	53,03	68,18	68,18	22	23

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab, Tangerang Tahun 2019

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Pariwisata

Pada aspek industri pendukung pengembangan pariwisata, Kabupaten Tangerang didukung oleh keberadaan rumah makan dan restoran, hotel juga biro perjalanan, dan jasa pendukung lainnya seperti bank, Tahun 2017, tercatat ada 22 usaha perjalanan wisata dengan 23 hotel yang beroperasi di Kabupaten Tangerang dengan 5 hotel berbintang (BPS, 2017), Untuk rumah makan belum memiliki data terbaru, Berdasarkan catatan statistik Banten, setidaknya Kabupaten Tangerang tahun 2018 telah memiliki 153 rumah makan, Berdasarkan data BPS Provinsi Banten tahun 2017, setidaknya Kabupaten Tangerang memiliki 72 obyek wisata yang meliputi 8 situ/danau, dan kolam renang sebanyak 9 unit, 7 wisata pantai marina, 14 wisata sejarah, serta 34 obyek wisata lainnya, Kunjungan wisata Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019 dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,5%, Pada tahun 2017, data kunjungan wisata ke Kabupaten Tangerang mencapai 45 ribu kunjungan kemudian dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 55 ribu kunjungan,

Gambar 71 Kunjungan Wisata Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020



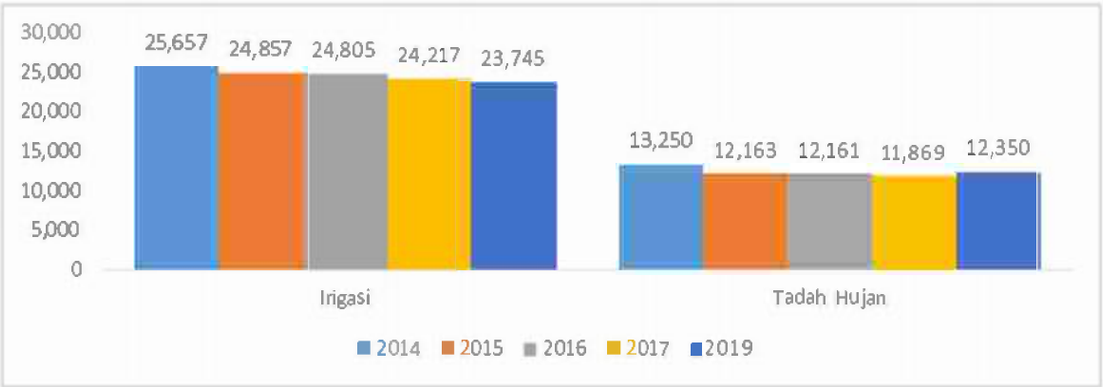
Sumber : Disporabudpar, 2021

2.3.3.2. Pertanian

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam, Oleh karena itu, selain upaya untuk mencapai peningkatan produksi berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan kebutuhan pangan yang semakin tinggi, Potensi usaha di Bidang Pertanian di Kabupaten Tangerang sangat ditentukan oleh penggunaan lahan sawah dan lahan kering, di mana jumlah lahan pertanian terus menyusut seiring dengan kebutuhan masyarakat akan perumahan dan pertumbuhan industri, Rinciannya dapat terlihat sebagaimana pada Gambar 2,77.

Terlihat dari grafik, luas lahan sawah terus menyusut dari tahun ke tahun, Mayoritas lahan yang telah berkurang beralih fungsi menjadi pergudangan dan perumahan, Lahan produktif dijual warga kepada pengembang, Penjualan lahan produktif oleh warga ke pengembang tidak dapat dibendung karena sudah merupakan hak warga, Pemerintah hanya dapat menyarankan kepada pemilik tanah supaya tidak menjual bila memang tidak untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Gambar 72 Luas Lahan Sawah Berdasarkan Jenisnya (Ha)



Sumber: diolah dari website BPS dan Luas Lahan Menurut Penggunaannya Provinsi Banten 2020

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2019 adalah sekitar 6,49%, Kondisi ini mengalami penurunan sejak tahun 2016 secara terus menerus hingga tahun 2019 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.110 Peranan PDRB Per Sektor terhadap PDRB (persen), Tahun 2015-2020

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,64	6,92	6,86	6,73	6,49	7,01

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2017 dan 2021, diolah

**angka sementara*

*** angka sangat sementara*

Gambar 83 menunjukkan produksi padi atau bahan pangan utama di Kabupaten Tangerang, Dari gambar tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan produksi dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 302,614 ton menjadi 357,704 ton.

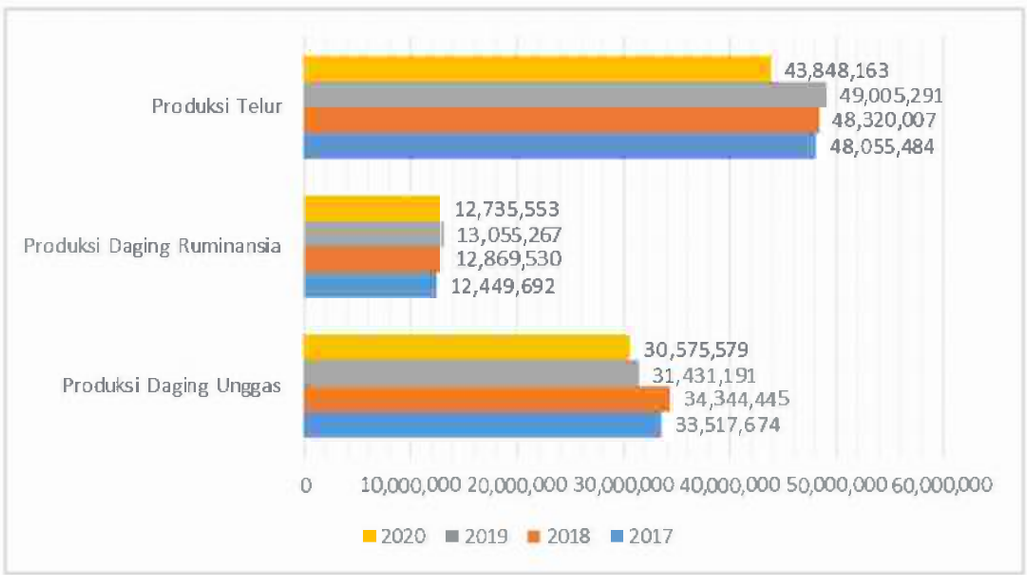
Gambar 73 Produksi Padi/Bahan Pangan Utama 2017-2020 (Dalam Ton)



Sumber : Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang 2020

Produksi hasil peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging, telur, dan susu, Protein hewani bermanfaat sebagai sumber energi dalam beraktivitas, pertumbuhan sel, dan jaringan serta cadangan energi tubuh, Hingga kini pemenuhan protein hewani tidak dapat digantikan dengan zat yang lain, Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, yaitu mencakup perunggasan (misalnya ayam dan itik), ruminansia kecil (misalnya kambing dan domba), dan ruminansia besar (misalnya sapi dan kerbau), Di samping itu, juga termasuk produk turunannya seperti susu dan telur, Berikut data produksi hasil peternakan yang berupa daging dan telur,

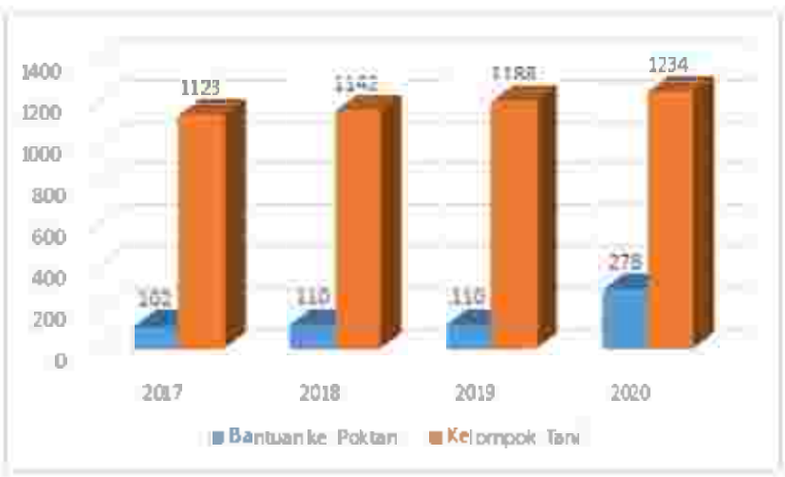
Gambar 74 Produksi Daging (Ton) dan Telur (Kg) Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020



Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang 2020

Untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya, Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani, Gambar di bawah menunjukkan jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Pemda, Dari gambar tersebut, terlihat bahwa terdapat tren penurunan jumlah penerima bantuan dari tahun 2017-2019 meskipun jumlah kelompok tani secara total sama setiap tahunnya.

Gambar 75 Jumlah Kelompok Tani Mendapatkan Bantuan Pemda



Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang 2020

2.3.3.3. Perdagangan

Pengelolaan pasar di Kabupaten Tangerang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Desa, dan Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja, Tabel 2,105 menunjukkan jumlah pasar menurut pengelolanya di tahun 2020.

Tabel 2,111 Pengelola Pasar di Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Pengelola	Jumlah
PD, Pasar Niaga KR	18
Swasta	4
Desa	20
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

Sektor perdagangan di Kabupaten Tangerang memberikan kontribusi terbesar ke-3 terhadap PDRB Kabupaten Tangerang sebesar Rp, 11,040,282,72, kontribusi sektor perdagangan mengalami penurunan dibadingkan tahun 2019 yang sebesar Rp, 11,675,614,85, penurunan sector perdagangan merupkan dampak global pandemic covid-19, Data ekspor bersih (selisih antara total nilai ekspor suatu negara dan nilai total impor) kabupaten Tangerang termasuk mengalami penurunan, sehingga Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong para pelaku eksportir untuk meningkatkan ekspor keluar negeri di masa pandemic Covid-19,

Tabel 2,112 Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020 (Rupiah)

Kategori	2018	2019	2020
Ekspor Bersih	92,087,041,966	80,430,762,971	78,410,616,950

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang 2020

Tabel 2.113 Kinerja Sektor Perdagangan, Tahun 2016-2020 Kabupaten Tangerang

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
A	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Juta Rp)					
1	Atas harga berlaku	11,766,171,36	13,138,608,85	14 742 544,81	16 234 312,48	15 643 483,80
2	Atas Harga Konstan	9,487,545,02	10,113,118,69	10,991,866,13	11,675,614,85	11,040,282,72

Sumber: BPS, Kabupaten Tangerang dalam Angka, beberapa penerbitan, diolah

2.3.3.4. Perindustrian

Perindustrian dan perdagangan merupakan sektor riil yang sangat besar perannya terhadap perekonomian Kabupaten Tangerang, Pada sisi industri, Kabupaten Tangerang memiliki semua basis baik industri besar, menengah maupun kecil, Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar pertama di Kabupaten Tangerang, Nilai tambah dari sektor Industri Pengolahan jumlahnya terus meningkat dari Rp38,79 triliun di tahun 2016 menjadi Rp49,79 triliun pada tahun 2019 (data sementara BPS), Walaupun demikian, persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB terus mengalami penurunan dalam jangka

waktu 2016 – 2020, gambar berikut menyajikan informasi perkembangan kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB,

Gambar 76 Persentasi Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Tangerang (Dalam Persen)



Sumber: BPS, Kabupaten Tangerang dalam angka

Dalam sebuah perekonomian yang sehat, kontribusi sektor pertanian akan terus mengalami kemunduran digantikan oleh sektor industri, dengan demikian maka sektor industri haruslah sektor yang terus tumbuh dan membesar pangsanya pada perekonomian, Tabel 2,115 berikut menyajikan detail kinerja sektor industri,

Tabel 2.114 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Golongan Pokok Industri di Kabupaten Tangerang Tahun 2017

No	Sektoral	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1	Industri Makanan	74	10,021
2	Industri Minuman	5	4,126
3	Industri Tekstil	57	11,101
4	Industri Pakaian Jadi	34	15,132
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	52	39,172
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	33	7,151
7	Industry Kertas dan Barang dari Kertas	34	4,672
8	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	10	659

No	Sektoral	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
9	Industry Produk dari Batu Bara dan Penggilingan Minyak Bumi	4	481
10	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	66	8,613
11	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	7	862
12	Industri Barang Karet, Barang dari Karet dan Plastik	109	21,556
13	Industri Barang Galian Bukan Logam	44	15,646
14	Logam Dasar	15	3,430
15	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	66	9,759
16	Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	8	1,103
17	Industri Peralatan Listrik	20	7,779
18	Industri Mesin dan perlengkapannya ytdl	25	4,696
16	Industri Kendaraan bermotor, Trailer, dan semi trailer	16	3,084
17	Industri Alat Angkutan Lainnya	21	4,706
18	Industri Furnitur	36	4,784
19	Industri Pengolahan Lainnya	21	3,775
	Jumlah	757	182,308

Sumber: BPS, Kabupaten Tangerang dalam Angka 2018

2.3.3.5. Perikanan

Produksi tangkapan ikan di Kabupaten Tangerang dari laut sebanyak 20,814,30 ton, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019, sedangkan nilai produksi sekitar 659,222,090, walaupun produksi mengalami kenaikan tetapi dari sisi nilai produksi menurun, Untuk lebih jelasnya lihat table berikut,

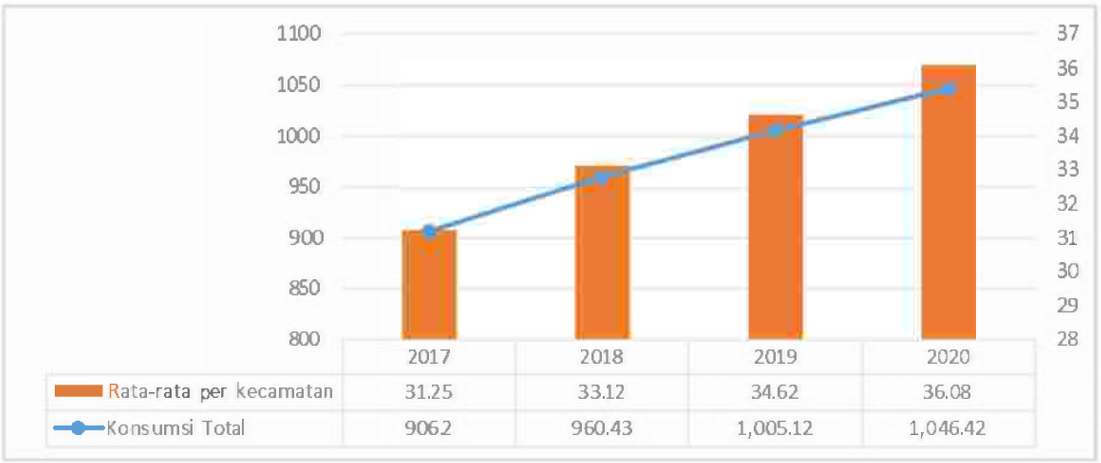
Tabel 2.115 Produksi Perikanan Total Tahun 2018-2020

Jenis	2018	2019	2020
Perikanan tangkap Laut			
Produksi (Ton)	20,625	20,590	20,814
Nilai (Rp 000)	507,905,691	718,390,817	659,222,090
Perikanan tangkap darat			
Produksi (Ton)	69,71	207,98	97,91
Nilai (Rp 000)	2,042,695	4,634,276	2,109,818

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020

Selain itu jumlah konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Tangerang sudah menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2017-2020 dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya.

Gambar 77 Jumlah Konsumsi Ikan Kabupaten Tangerang



Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020

Untuk indikator cakupan bina kelompok nelayan masih perlu ditingkatkan cakupannya, Pada tahun 2013, terdapat 20,93% nelayan yang dibina, kemudian cakupan mengalami penurunan tahun 2014 sampai dengan 0%, artinya tidak ada nelayan yang dibina, Namun kemudian pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, Pembinaan kelompok nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 dilakukan dengan pemberian bantuan kepada 28,80% dari total nelayan,

Tabel 2.116 Cakupan Bina Kelompok

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n (orang)	9	0	22	13	14	12	13	19
Jumlah Nelayan (orang)	43	0	41	42	41	32	54	67
Persentase	20,93	0	53,66	30,95	34,47	37,50	24,07	28,35

Sumber : Dinas Perikanan Kab, Tangerang, 2020

Produksi ikan hasil kontribusi kelompok nelayan pada tahun 2017 sebanyak 4,306,42 ton dengan jumlah produksi ikan 20,506,74 ton sehingga persentase produksi ikan mencapai 21%, Kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan tidak mengalami peningkatan yang

signifikan dalam 3 tahun terakhir, Hingga tahun 2019, kontribusi produksi kelompok nelayan masih mencapai 21%.

Tabel 2,117 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Uraian	2017	2018	2019
Jumlah Produksi Ikan (ton)	20,506,74	20,625,30	20,590,52
Jumlah Produksi Ikan kontribusi kelompok nelayan (ton)	4,306,42	4,336,92	4,324,01
Persentase	0,21	0,21	0,21

Sumber : Dinas Perikanan Kab, Tangerang, 2020

Tangkapan ikan pada tahun 2017 mencapai 20,506,74 ton dengan tangkapan yang berada dalam batasan biologis yang aman mencapai 26,250 ton, sehingga proporsi tangkapan ikan mencapai 97,65%, Sementara itu tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman pada tahun 2020 adalah 96,37%.

Tabel 2.118 Proporsi Tangkapan Ikan Maksimum Lestari

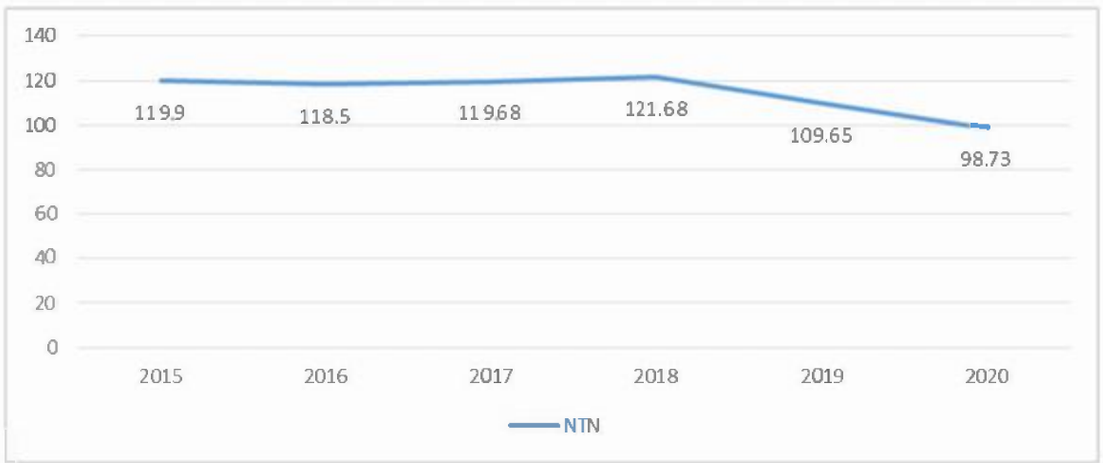
No,	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tangkapan Ikan (ton)	19,596,70	20,449,19	20,506,74	20,625,30	20,590,52	20,814,30
2	80% dari tangkapan maksimum lestari (ton)	25,000	25,625	26,250	26,500	26,500	26,500
	Persentase	97,98	99,75	97,65	77,83	77,70	78,54

Sumber : Dinas Perikanan Kab, Tangerang, 2020

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga, Secara definitif, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) yang dinyatakan dalam bentuk persentase, Nilai tukar nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 sebesar 119,68%, Terjadi penurunan drastis dari tahun 2018 ke

tahun 2020, yaitu 121,68 menjadi 98,73, Data historis ditunjukkan pada tabel di bawah,

Gambar 78 Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2020



Sumber : Dinas Perikanan Kab, Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021

2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang

2.3.4.1. Perencanaan pembangunan

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai akuntabilitas kinerja pemerintah yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas laporan kinerja yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, Hal utama yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, Komponen nilai akuntabilitas kinerja pemerintah itu sendiri terdiri dari unsur perencanaan, pengukuran pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja,

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2020 menunjukkan angka 70,75 atau setara dengan predikat BB, Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 62,3

dengan predikat B, Selengkapnya, nilai tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.119 Hasil Evaluasi dan Penilaian AKIP Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai LAKIP	58,20	61,97	62,11	62,87	70,13	70,75
2.	Predikat	C	B	B	B	BB	BB

Sumber: Bagian Ortala Kabupaten Tangerang Tahun 2017 & RKPD Kabupaten Tangerang 2020

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa, nilai kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang dari tahun 2015-2020 mengalami peningkatan, Tata pemerintahan yang baik dapat dinilai dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Secara rinci hasil penilaian terhadap AKIP Kabupaten Tangerang tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja bobot 30 dengan nilai pada tahun 2019 21,74 dan tahun 2020 sebesar 22,05.
2. Pengukuran Kinerja bobot 25 dengan nilai pada tahun 2019 sebesar 17,78 dan tahun 2020 17,80.
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 dengan nilai 11,02 di tahun 2019, dan 11,10 di tahun 2020.
4. Evaluasi Internal dengan bobot 10 pada tahun 2019 mendapatkan nilai 8,17 dan 8,33 di tahun 2020.
5. Capaian Kinerja bobot 20, dengan nilai 11,42 tahun 2019, dan nilai 11,47 ditahun 2020.

Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan diperolehnya nilai IRB (Indeks Reformasi Birokrasi) yang “Baik”, yaitu dalam kategori nilai B ke atas, Selain itu, didukung pula dengan tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat

proses, Kualitas ketatalaksanaan lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mengefisienkan operasionalisasi pemerintahan, Capaian IRB Kabupaten Tangerang Tahun 2020 berada pada nilai 58,39 atau dengan kategori “CC”,

Tabel 2.120 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Tangerang 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2020
A	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20	9,37
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10	7,26
	III. Reform	30	11,11
Total Komponen Pengungkit		60	27,74
B	Komponen Hasil		
	1. Akuntabilitas	10	7,91
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10	8,45
	3. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN	10	8,90
	4. Kinerja organisasi	10	5,39
Total Komponen Hasil		40	30,65
Indeks Reformasi Birokrasi		100	58,39

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang 2020

Berdasarkan tabel di bawah, ditunjukkan bahwa Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Tangerang tahun 2018 meningkat dibandingkan pada tahun 2014, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami peningkatan pada rentang tahun 2015-2018, Dalam hal ini, Kabupaten Tangerang berada pada posisi 3 (tiga) di antara kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan nilai 3,1191 dan diurutan 123 kabupaten secara nasional,

Tabel 2.121 Nilai EKPPD Kabupaten Tangerang tahun 2013-2019

No	Uraian	EKPPD 2014	EKPPD 2015	EKPPD 2016	EKPPD 2017	EKPPD 2018	EKPPD 2019
1	Nilai EKPPD	2,5141	3,0140	3,0339	3,1191	2,8858	3,2346
2	Status	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
3	Peringkat	252	137	130	123	178	

Sumber : Dirjen Otda Tahun 2020

Terdapat 108 aplikasi di Pemerintah Kabupaten Tangerang, akan tetapi yang aktif hanya 76,85% atau 83 aplikasi. Adapun jumlah Aplikasi tersebut didominasi oleh Diskominfo sebanyak 26 aplikasi dengan persentase 24,07%.

Tabel 2.122 Persentase Aplikasi Aktif yang dimiliki OPD Tahun 2020

No	Tahun	Aplikasi Aktif	%	Aplikasi Tidak Aktif	%	Jumlah Aplikasi
1	2018	89	62, 7	53	37,3	142
2	2019	118	70,2	50	29,8	168
3	2020	136	60,2	90	39,8	226

Sumber: Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki tren yang cenderung meningkat meskipun pernah menurun tipis di tahun 2015, Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tangerang tahun 2015-2020 atau selama 5 tahun terakhir adalah mencapai 86,36,

Tabel 2.123 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020

No,	Tahun	IKM
1	2015	71,25
2	2016	76,39
3	2017	75,05
4	2018	81,45
5	2019	83,66
6	2020	86,36

Sumber : Bagian Ortala Kab, Tangerang

2.3.4.2. Keuangan dan Aset Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006), Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Tangerang untuk setiap tahun, Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah,

Tabel 2.124 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data: BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Kinerja keuangan secara rinci dari sisi pendapatan Kabupaten Tangerang memiliki tingkat kemandirian fiskal daerah yang cukup tinggi di tahun 2019, Hal ini ditunjukkan dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah yaitu 51,3%, Namun angka ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 56,3%, Pada tahun 2019 pendapatan Kabupaten Tangerang didominasi oleh Pajak Daerah, yaitu sebesar 39,3% kemudian disusul oleh Lain-lain PAD yang Sah, Secara lebih rinci, gambaran umum keuangan daerah Kabupaten Tangerang ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 2.125 Indikator Kinerja Daerah Urusan Keuangan

Keterangan	Satuan	2018	2019	2020
Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	10,73	13,23	11,51
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0,58	0,58	0,48
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Niai	1,67	1,24	0,99
Belanja Langsung	Persen	62,6	55,36	49,77
Belanja Tidak Langsung	Persen	37,4	44,64	50,23
Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang 2016-2021

2.3.4.3. Kepegawaian

Sumber daya manusia aparatur adalah faktor pendukung yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pembangunan dan pengembangan aparatur di Kabupaten Tangerang dilakukan berlandaskan pada strategi Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah, Adapun perkembangan aparatur yang mengikuti penjenjangan karir dan mengikuti izin belajar dan tugas belajar di Kabupaten Tangerang dari Tahun 2013 s,d, 2017 adalah sebagai berikut:

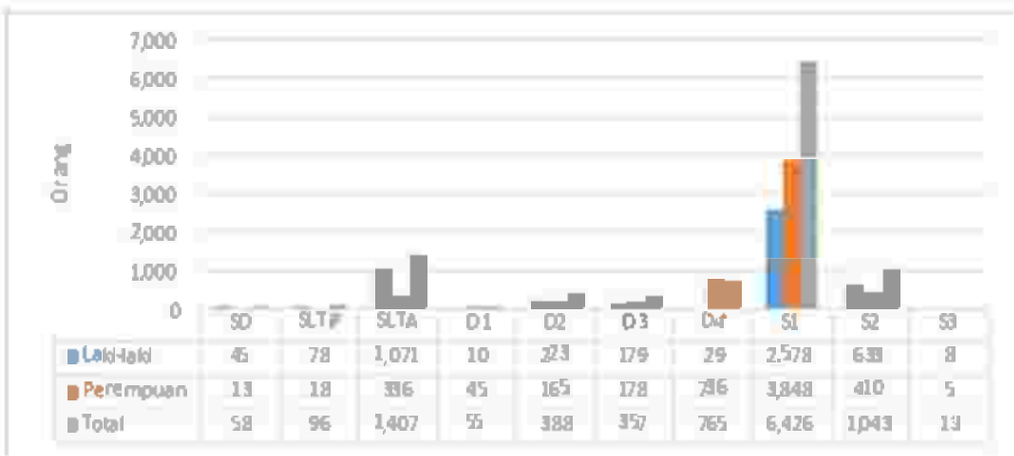
Tabel 2.126 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Penjenjangan Karir, Izin Belajar dan Tugas Belajar di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
1,	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Penjenjangan Karir					-	
	- DIKLATPIM II	5	2				7
	- DIKLATPIN III	23	15	3	3	10	54
	- DIKLATPIM	23	117	41	65	25	568
2,	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Izin Belajar Dan Tugas Belajar (D3, S1, S2) A. D I B. D III C. S1 D. S2	6 2		6 2	 1	 1	12 8

Sumber Data: BKPSDM Kabupaten Tangerang, 2018

Jika dilihat dari sisi kualifikasi pendidikan pegawai khususnya ASN, pada tahun 2020 Kabupaten Tangerang sudah cukup memadai, Pegawai yang berpendidikan di atas D4 mencapai 71% dari total pegawai dengan jumlah 7,482 orang, Sementara itu, untuk ASN yang berpendidikan D1 sampai D4 mencapai 15% dengan jumlah 1,565 orang, Akan tetapi, masih terdapat ASN yang memiliki pendidikan di bawah D1, yaitu SMA sederajat sebanyak 1,407 orang, SMP sederajat sebanyak 90 orang dan Pendidikan dasar sebanyak 58 orang,

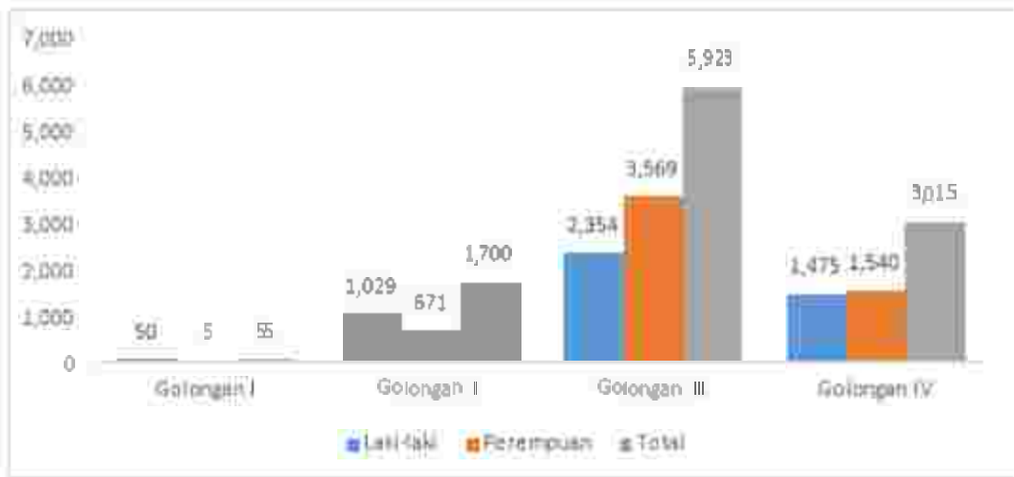
Gambar 79 Kualifikasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020



Sumber : Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020

Dari sisi golongan, komposisi pegawai Kabupaten Tangerang sudah cukup baik, Sebanyak 3,015 pegawai merupakan PNS golongan IV, 5,923 posisi diduduki oleh pegawai golongan III, 1,700 pegawai mengisi golongan II, dan hanya 55 pegawai dengan golongan I (Gambar 90).

Gambar 80 Komposisi Golongan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020



Sumber : Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020

2.3.4.4. Pengawasan

A. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tangerang

Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kebijakan yang ditempuh adalah “Meningkatkan Fungsi Pengawasan“ dengan Program Pembinaan Aparatur Pemerintah Yang Bersih, Berwibawa dan Bebas KKN, Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan adalah:

1. Pemeriksaan reguler secara komprehensif;
2. Pembangunan sarana dan prasarana Badan Pengawas;
3. Monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; dan
4. Peningkatan kualitas SDM.

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”, Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5, Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah,

Tabel 2.127 Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP

No,	Tingkat Maturitas	Interval Skor
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)

Sumber : Perka BPKP No, 4 Tahun 2016

Hasil kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum cukup memuaskan, Hal ini terlihat dari nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kabupaten Tangerang yang masih pada posisi 1,3148 dengan peringkat maturitas rintisan pada tahun 2016, begitu pula pada tahun 2017 masih pada posisi yang sama, Pada tahun 2020, nilai maturitas SPIP meningkat drastis mencapai 3, Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan,

Tabel 2.128 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020

No	Nilai Maturitas SPIP							
	2016		2017		2018		2020	
	Skor	Tingkat Maturitas	Skor	Tingkat Maturitas	Skor	Tingkat Maturitas	Skor	Tingkat Maturitas
1	1,3148	Rintisan	1,3148	Rintisan	3,0602	Terdefinisi	3	Terdefinisi

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tangerang, 2017 dan Renstra Kabupaten Tangerang 2019 – 2023

B. Peningkatan Kapabilitas APIP Kabupaten Tangerang

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas Inspektorat, APIP pada setiap instansi pemerintah memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik dari sisi tata kelola, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupi.

Hal ini mengakibatkan APIP memiliki kapabilitas yang beragam, Oleh karena itu, diperlukan sebuah pola umum pengembangan kapabilitas APIP yang dapat digunakan sebagai langkah yang logis dalam mewujudkan APIP yang efektif, sebagaimana yang diamanahkan di dalam PP 60 Tahun 2008, *Institute of Internal Auditors* (IIA) telah mengembangkan Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor public

Tabel 2.129 Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020

No	Uraian	Nilai Kapabilitas APIP						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020
		Level	Level	Level	Level	Level	Level	Level
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang	-	2	2	2	2	2	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tangerang, 2017 dan Renstra Kabupaten Tangerang 2020

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, dan indicator keterbukaan daerah.

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Secara empiris, kemampuan konsumsi rumah tangga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih terbatas karena sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau daya beli masyarakat, Dalam kurun waktu 2015–2019, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk, Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2017 s,d 2019 terus meningkat, Pada tahun 2019 porsinya adalah sebesar 51,90 persen, Angka ini menunjukkan bahwa penopang perekonomian di Kabupaten Tangerang masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga,

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah sebesar 5,05 persen pada tahun 2019, Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai pertumbuhan sebesar 5,29 persen, Ini disebabkan menurunnya laju pertumbuhan di Kabupaten Tangerang tahun 2019, Sementara itu, konsumsi perkapita cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, Ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di tingkat konsumsi masyarakat lebih cepat daripada perkembangan penduduk, Ekonomi tumbuh di atas pertumbuhan penduduk,

Dampak Covid-19 terasa pada daya beli masyarakat pada tahun 2020 ini, Daya beli masyarakat Kabupaten Tangerang diperkirakan menurun, Hal ini disebabkan karena salah satunya adalah menurunnya pendapatan masyarakat akibat pembatasan aktivitas masyarakat, Produktifitas masyarakat terhambat, yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat, Selain itu, sepinya konsumen, menyebabkan barang-barang konsumsi kelebihan stok dan pada akhirnya produksi dikurangi, bahkan ada beberapa perusahaan yang harus menutup pabriknya, Sehingga bukan hanya pendapatan yang menurun, ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai pendapatan lagi, Laju pengangguran meningkat dan laju jumlah orang miskin akan bertambah,

Tabel 2.130 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah tangga Kabupaten Tangerang, Tahun 2015 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a, ADHB (Miliar Rp)	56,994,77	61,506,15	67,159,46	73,218,41	71,919,73
b, ADHK 2010 (Miliar Rp)	47,086,34	49,408,52	52,000,18	54,629,24	53,293,77
Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	52,1	51,71	51,82	51,9	52,88
Rata - Rata Konsumsi perkapita					
a, ADHB (Miliar Rp)	16,389,60	17,172,35	18,268,19	19,264,01	22,159,01
b, ADHK 2010 (Miliar Rp)	13,540,30	13,786,41	14,091,58	14,373,14	16,420,21
Pertumbuhan					
a, Total Konsumsi RT	5,27	4,96	5,29	5,05	-2,4
b, Perkapita	2,04	1,82	2,21	2,93	14,2
Jumlah Penduduk	3,477,495,00	3,584,770,00	3,692,693,00	3,800,787,00	3,245,619**

***Angka sensus 2020*

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2020

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani, Jika NTP lebih

besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani,

Tabel 2.131 Nilai Tukar Petani Indonesia dan Provinsi Banten Tahun 2015 - 2020

Nilai Tukar Petani	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NTP Indonesia	102,83	101,86	103,06	103,16	104,46	102,86
NTP Provinsi Banten	107,45	100,49	101,54	100,52	103,10	100,82

Sumber: BPS, 2015-2020

2.4.1.3. Indikator Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi negara/daerah diukur dari kegiatan ekspor dan impor, Semakin banyak kegiatan ekspor dan impor, semakin menunjukkan semakin tingginya derajat keterbukaan ekonomi suatu negara/daerah, Dari hasil perhitungan, menunjukkan rasio keterbukaan ekonomi Kabupaten Tangerang di atas angka 1, yang berarti nilai PDRB kegiatan ekspor impor di atas dari nilai total PDRB Kabupaten Tangerang, Selain itu, neraca perdagangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan nilai surplus perdagangan, yang artinya ekspor lebih besar daripada impor, Walaupun kegiatan ekspor dan impor di dominasi oleh perusahaan nasional/multinasional, namun mempunyai *multiplier effect* yang positif bagi perekonomian Kabupaten Tangerang akibat kegiatan ekspor impor tersebut, Dengan adanya pandemi covid-19, berakibat pada menurunnya kinerja perdagangan dan berdampak pada perekonomian di Kabupaten Tangerang, Berikut adalah perhitungan keterbukaan ekonomi di Kabupaten Tangerang,

Tabel 2.132 Perkembangan Rasio Keterbukaan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Ekspor	82,071,582	87,875,150	93,110,349	98,034,996	94,767,443
Impor	58,490,877	63,354,555	66,679,023	71,670,451	71,721,983

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB	109,397,782	118,994,084	130,039,800	141,088,309	136,005,323
Derajat Keterbukaan Ekonomi	1,28	1,27	1,23	1,2	1,22

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2020

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

A. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tangerang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 27,93 Km sebanyak 1 ruas, Jalan Provinsi sepanjang 105,44 Km sebanyak 9 ruas, dan 992,61 Km merupakan jalan kabupaten yang terbagi menjadi 301 ruas dengan jalan strategis sebanyak 50 ruas sepanjang 279,55 Km, dan jalan Lintas Umum sebanyak 251 ruas sepanjang 713,06 Km, Sebagian besar jalan-jalan yang ada sudah di beton, bahkan sampai ke jalan lingkungan dengan kondisi conblock

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (*Road Density*) pada tahun 2019, kerapatan jalan di Kabupaten Tangerang sebesar 1,18 kendaraan/Km², Sementara itu, dilihat dari sisi ketersediaan panjang jalan per jumlah penduduk yang ditunjukkan melalui indikator panjang jalan per 1000 penduduk (Km/1000 orang), adalah sebesar 0,000294491Km/1000 Orang.

Tabel 2.133 Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kabupaten Tangerang

Tingkat Kewenangan Pemerintahan (dalam km)	2017	2018	2019	2020
Negara	27,93	27,93	27,93	28,08
Provinsi	105,2	114,2	102,6	108,3
Kabupaten	992,61	992,61	992,61	992,61
Jumlah	1.125,74	1.134,74	1.123,14	1.128,99

Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA Kab, Tangerang, 2020

B. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Tangerang memiliki dua Dermaga yaitu Dermaga Cituis yang berada di Kecamatan Teluknaga dan dan Dermaga Nelayan tang berada di Kecamatan Kronjo.

Tabel 2.134 Jumlah Penumpang Barang yang Terangkut di Dermaga Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018		2019		2020	
		Barang (kg)	Orang	Barang (kg)	Orang	Barang (kg)	Orang
1	Dermaga Kronjo	1.273.300	6.847	1.255.800	7.122	1.003.200	4.025
2	Dermaga Cituis	3.800	43.200	4.000	4.500	3.600	28.800

Sumber : Analisis Statistik Sektoral Periode Data 2018-2020,2021

C. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW,

Tabel 2.135 Rasio Luas Wilayah Produktif Kabupaten Tangerang

No	Uraian	Luas
1	Luas Wilayah produktif	111,222,07
2	Luas Seluruh Wil, Budi daya	167,685,13

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031

D. Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.136 Rasio Luas Wilayah Industri Kabupaten Tangerang

No	Uraian	Luas
1	Luas Wilayah Industri	133,23
2	Luas Seluruh Wil, Budidaya	167,685,13
	Rasio	0,1

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031

E. Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.137 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kabupaten Tangerang

No	Uraian	Luas
1	Luas Wilayah Kebanjiran	11,411,17
2	Luas Seluruh Wil, Budidaya	167,685,13
	Rasio	6,8

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031

F. Luas Wilayah Kekeringan

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.138 Rasio Luas Wilayah Kekeringan Kabupaten Tangerang

No	Uraian	Luas
1	Luas Wilayah Kekeringan	41,985,54
2	Luas Seluruh Wil, Budidaya	167,685,13
	Rasio (1,/2,)	25,0

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031

G. Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budi daya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.139 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Tangerang

No	Uraian	Luas
1	Luas Wilayah Perkotaan	2,761,70
2	Luas Seluruh Wil, Budidaya	167,685,13
3	Rasio (1,/2,)	1,6

Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031

H. Fasilitas Bank dan non Bank

Posisi pinjaman rupiah dan valuta asing yang diberikan Bank Umum dan BPR di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 diperuntukan untuk Modal Kerja sebesar Rp. 48.139.347 juta, investasi Rp. 26.786.929 juta dan konsumsi Rp.55.327.116.

Tabel 2.140 Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan dari Bank Umum dan BPR di Kabupaten Tangerang dan Jenis Penggunaan (juta rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Modal Kerja	44,201,333	45187413	52,185,191	51,586,062	48,139,347
Investasi	24,891,300	24,524,628	28,883,677	28,032,656	26,786,929
Konsumsi	43,715,500	47,810,622	53,305,355	55,741,884	55,327,116
	112,808,133	117,522,663	134,374,224	135,360,603	130,253,392

Sumber : Indikator Ekonomi Provinsi Banten, 2020

I. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Tabel 2.141 Jumlah Kantor Bank Menurut Status Kepemilikan di Provinsi Banten Tahun 2016–2020 (unit)

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1, Provinsi Banten	1,181	1,180	1,192	1,192	1,192
a. Bank Pemerintah	531	531	533	533	533
b. Bank Pemerintah Daerah	99	99	107	107	107
c. Bank Umum Swasta Nasional	532	531	533	533	533
d. Bank Asing dan Campuran	19	19	19	19	19

Sumber : Indikator Ekonomi Provinsi Banten, 2020

J. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi Dan Cabang-Cabangnya

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi), Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa, Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah,

Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa dengan bentuk usaha menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, Cabang perusahaan asuransi jiwa yang ada di Kabupaten Tangerang tahun 2019 ada beberapa perusahaan antara lain

Asuransi Jiwasraya, Asuransi Bumi Putera, BPJS, dan Asuransi Sinar Mas,

K. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya, Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya, Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, Kabupaten Tangerang memiliki 1 pelabuhan laut dan 1 terminal bis untuk menunjang transportasi penduduk antar daerah dan 2 pelabuhan udara,

L. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Tingkat penghunian kamar hotel dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur perkembangan pariwisata, karena besarnya tingkat penghunian kamar hotel dapat dijadikan sebagai salah satu indikator mengenai banyaknya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, Kegunaan Indeks Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel antara lain adalah :

1. Untuk memberikan gambaran berapa persen kamar yang tersedia pada akomodasi terisi oleh tamu yang menginap dalam suatu waktu tertentu,
2. Angka ini menunjukkan apakah suatu akomodasi diminati oleh pengunjung atau tidak, sehingga dapat dilihat apakah di suatu daerah masih kurang keberadaan akomodasi atau tidak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (wisatawan),
3. Apabila TPK memiliki nilai yang cukup besar berarti akomodasi hotel di suatu daerah diminati oleh pengunjung, begitu pula sebaliknya, apabila TPK memiliki nilai yang kecil, berarti akomodasi di suatu daerah kurang diminati oleh pengunjung,

Secara umum jumlah hotel selama kurun waktu 2018 – 2019 tidak berubah, Kamar hotel meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 30%, Jumlah tempat tidur juga meningkat sebesar 33%,

Tabel 2.142 Jumlah Akomodasi Hotel di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Hotel	19	19	40
2	Kamar	1,841	2,411	1,040
3	Tempat Tidur	2,605	3,474	6,180

Sumber : Banten Dalam Angka 2020, BPS

Tabel 2.143 Jumlah Tamu Asing dan Dalam Negeri pada Usaha Akomodasi Tahun 2018-2019 (ribu jiwa)

No,	Klasifikasi Hotel	2018	2019
1	Bintang	573,18	7,11
2	Non Bintang	2,24	0,61
Jumlah		575,42	7,72

Sumber : Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Banten, 2018-2019

Jumlah tamu asing dan dalam negeri yang datang dan menginap pada tahun 2018 tercatat sebanyak 575,420 orang yang terdiri dari tamu hotel berbintang sebanyak 573,180 orang dan tamu hotel non berbintang sebanyak 2,240 orang,

Tabel 2.144 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Dalam Negeri Dirinci Menurut Klasifikasi Hotel Tahun 2018 – 2019 (%)

No,	Klasifikasi Hotel	2018	2019
1	Bintang	573,18	7,11
2	Non Bintang	2,24	0,61
	Jumlah	575,42	7,72

Sumber : Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Banten, 2019

Selama rentang waktu 2018 dan 2019, Rata-Rata Lama Menginap Tamu (RLMT) asing maupun dalam negeri mengalami penurunan untuk hotel bintang dan non bintang, Rata-rata lama menginap Kabupaten Tangerang mencapai 1,5 hari dan masih di atas rata-rata lama menginap tamu asing maupun domestik di Provinsi Banten yang mencapai 1,23,

M. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses air layak apabila sumber air utama yang digunakan untuk keperluan memasak/mandi/cuci dll rumah tangga berasal dari :

- air leding,
- sumur bor/pompa dengan jarak ke tempat
- penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat >= 10 m,
- sumur terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/ kotoran/tinja terdekat >= 10 m,
- mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/ kotoran/tinja terdekat >= 10 m,
- air hujan,
- Serta dikombinasikan dengan penggunaan air mandi/cuci yang bersumber dari air terlindung (leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan) bila sumber air minum utama menggunakan air kemasan/isi ulang dan air tidak terlindungi (air terlindung dengan jarak <10 m dan air tidak terlindung),

Tabel 2.145 Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Bersih Untuk Keperluan Mandi, Cuci, dll Tahun 2017-2020

Tahun	Air Kemasan Bermerk/Isi Ulang	Ledeng	Sumur Bor/Pompa	Sumur terlindung	Sumur/Mata Air Tak Terlindungi
2017	2,49	11,86	74,48	12,19	2,06
2018	1,59	14,08	72,28	9,65	1,55
2019	0	12,18	77,21	7,64	1,61
2020	0,68	11,74	82,26	4,12	0,66

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2017-2020

N. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Berdasarkan data BPS dari persentase rumah tangga di Kabupaten Tangerang yang menggunakan listrik PLN sebanyak 99,22 %, Sementara sisanya sebanyak 0,77% menggunakan listrik non-PLN ataupun tidak/bukan menggunakan listrik sama sekali untuk penerangan tempat tinggal mereka,

Tabel 2.146 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Penerangan Tahun 2015-2020

No,	Tahun	Persentase Listrik PLN	Persentase Listrik Non PLN
1	2015	99,94	1,19
2	2016	100,00	0,99
3	2017	99,99	0,15
4	2018	99,87	0,13
5	2019	99,84	0,16
6	2020	99,22	0,77

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020

O. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Selular (HP)

Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang menggunakan Telepon Seluler di Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 70,64 persen, sedangkan yang tidak memiliki telepon seluler sekitar 29,36 persen, kecenderungan penggunaan HP di Kabupaten Tangerang per tahun cenderung fluktuatif.

Tabel 2.147 Persentase penduduk yang menggunakan HP Tahun 2015-2020 di Kabupaten Tangerang

Telepon Seluler	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Menggunakan	59,68	60,59	71,46	71,35	70,47	70,64
Tidak Menggunakan	40,32	39,41	28,54	28,65	29,53	29,36

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, Beberapa tahun

P. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer dan Akses terhadap Internet

Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki komputer di Kabupaten Tangerang cenderung naik-turun, Pada tahun 2018 penduduk yang memiliki komputer sekitar 17,33 persen, sedangkan pada tahun 2019 persentase penduduk yang memiliki/menggunakan komputer sekitar 17,65 persen, Aktivitas penduduk yang mengakses internet pada tahun 2018 sekitar 50,33 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 58,67 persen, Kebutuhan akan akses internet lebih tinggi dibandingkan kepemilikan terhadap komputer,

Tabel 2.148 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Note Book, Tablet), Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Menggunakan Komputer (Desktop/Laptop/Notebook)	19,79	14,27	17,25	17,33	17,65	8,63
Akses Internet	26,47	25,53	35,53	50,33	58,67	91,37

Sumber : Kabupaten Dalam Angka

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator:

2.4.3.1. Angka Kriminalitas

Total tindak kriminal selama 2019 berjumlah 533 kasus, Angka tersebut menurun dibanding periode 2018 yang berjumlah 574 kasus, Trennya menurun 41 kasus atau minus 7,69 persen, Persentase tingkat penyelesaian tindak pidana juga mengalami penurunan, Total *crime clereance* 2019 hanya 644, sedangkan 2018 berjumlah 659, Angka tersebut juga menunjukkan penurunan 2,33 persen, Risiko penduduk terkena tindak pidana selama 2019 juga menurun, Perbandingannya, hanya 21 orang yang menjadi korban kejahatan dari 2,494,395 jiwa penduduk di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, sementara tahun 2018 jumlahnya 23 orang.

Tabel 2.149 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian *Resort* di Provinsi Banten, 2014–2019

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana
1	2014	4,295
2	2015	3,681
3	2016	759
4	2017	1,082
5	2018	574
6	2019	533

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2020

Tabel 2.150 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Banten, 2014–2019

No	Tahun	Jumlah
1	2014	80,00
2	2015	78,00
3	2016	71,15
4	2017	74,10
5	2018	23,00
6	2019	21,00

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2020

2.4.3.2. Jumlah Demonstrasi

Jumlah aksi demo yang terjadi di Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif, dari tahun 2016-2018 telah terjadi aksi unjuk rasa sebanyak 122 unjuk rasa, paling banyak terjadi aksi unjuk rasa pada tahun 2017 sebanyak 64 aksi, menurun di tahun 2018 menjadi 18 kali unjuk rasa.

Tabel 2.151 Jumlah Demo di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2018

No	Uraian	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	Bidang Politik	6	29	2
2	Ekonomi	9	6	5
3	Kasus Pemogokan Kerja	25	29	11
	Jumlah Unjuk Rasa	40	64	18

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Tangerang Tahun 2019

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan,

1. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, Pada tahun 2018, penduduk usia di bawah 15 tahun ditambah usia di atas 64 tahun adalah sebesar 1,147,044 jiwa, penduduk usia 15-64 sebanyak 2,545,649 jiwa dengan *dependency ratio* sekitar 45% artinya setiap 100 orang yang berusia kerja

(dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.152 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2020

NO	KELOMPOK UMUR	2014	2015	2016	2017	2018	2020
1	0 - 4	346,808	353,020	356,597	359,755	362,494	284,085
2	5-9	307,305	320,048	333,806	346,097	357,075	289,237
3	10-14	282,703	288,274	295,245	304,061	314,745	268,232
4	15 - 19	308,426	312,317	315,795	318,935	321,999	268,956
5	20 - 24	318,035	321,923	326,367	331,433	336,489	283,622
6	25 - 29	318,095	324,681	330,823	336,370	341,157	300,666
7	30 - 34	318,077	325,477	333,038	339,651	345,950	295,703
8	35 - 39	290,185	301,138	310,662	320,570	330,127	276,824
9	40 - 44	237,711	248,430	259,767	270,510	281,226	258,995
10	45 - 49	175,616	186,053	196,837	207,698	218,564	223,948
11	50 - 54	128,328	137,401	146,573	156,223	166,304	175,884
12	55 - 59	88,220	95,303	103,085	110,896	118,921	127,375
13	60 - 64	59,373	64,946	71,028	77,701	84,872	86,372
14	65 - 69	37,525	40,662	43,840	47,484	51,639	55,798
15	70 - 74	25,016	26,348	27,992	29,871	32,038	25,574
16	75 +	23,353	24,573	26,040	27,515	29,053	24,348
Jumlah		3,264,776	3,370,594	3,477,495	3,584,770	3,692,693	3,245,619
Jumlah Penduduk usia < 15 Tahun		936,816	961,342	985,648	1,009,913	1,034,314	841,554
Jumlah Penduduk usia >64 Tahun		85,894	91,583	97,872	104,870	112,730	105,720
Jumlah Penduduk usia tidak produktif (1) & (2)		2,242,066	2,317,669	2,393,975	2,469,987	2,545,649	2,298,345
Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun		1,022,710	1,052,925	1,083,520	1,114,783	1,147,044	947,274
Dependency Ratio		0,456	0,454	0,453	0,451	0,451	0,412

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020, diolah

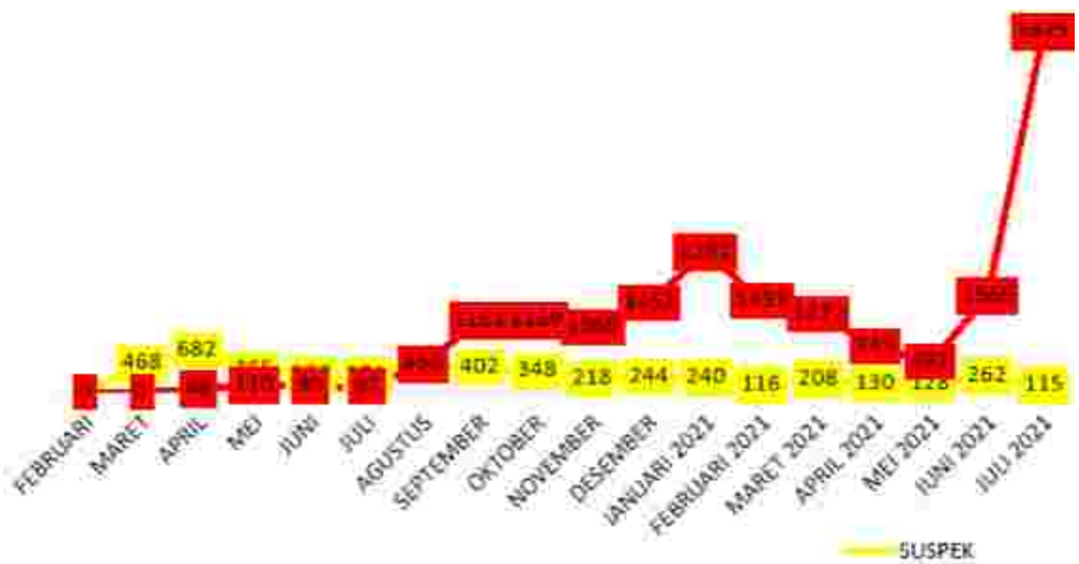
2.5 Penanganan Pandemi Covid-19

2.5.1 Penanganan Kesehatan

Kasus covid-19 terkonfirmasi di Kabupaten Tangerang sejak bulan Maret 2020. Pandemi covid-19 ini berdampak pada semua sendi kehidupan diantaranya meningkatnya kemiskinan, pengangguran, merubah pola belajar, bekerja dll. Upaya yang dilaksanakan sejak

ditemukannya kasus konfirmasi adalah membentuk SATGAS COVID-19 Kabupaten Tangerang, menggalakkan 3T (testing, tracing,teratmen), menyediakan 3 RS rujukan Covid-19 yaitu RSUD Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja dan RS Siloam Kelapa Dua, 23 RS non rujukan covid-19 yang merawat pasien covid-19 dan hotel singgah covid-19 yang merawat pasien tanpa gejala, menggalakkan protocol kesehatan.

Gambar 81. Sebaran Kasus Covid19 Tahun 2020-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2021

Dari grafik tersebut nampak bahwa sejak ditemukan kasus konfirmasi pada bulan Maret 2020, terjadi peningkatan kasus setiap bulannya, kenaikan tertinggi terjadi mulai bulan September 2020 dan kasus tertinggi tahun 2020 terjadi pada bulan Desember 2020. Total kasus tahun 2020 sebanyak 5.174 kasus. Pada awal tahun 2021 kasus mjulai melandai dan meningkat tajam di bulan Juni dan Juli 2021. Total

kasus sampai dengan Juli 2021 sebanyak 21.750 kasus. Adapun klaster kasus yang terjadi adalah klaster keluarga, klater perusahaan, klaster fasyankes dan klaster perkantoran. Total kasus kematian sebanyak 364 kematian atau CFR sebesar 364/ 21.750 x 100% = 1,67%
Positif rate tahun 2020 sebesar 6,3 % , pada tahun 2021 sebesar 6,77%. Angka tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan Kemenkes positif rate dibawah 5%.

Reproduksi efektif tahun 2020 sebesar 0,96%, tahun 2021 sebesar 1,29 %. Menunjukkan bahwa penularan covid-19 di Kabupaten Tangerang masih sangat tinggi. Oleh karena itu upaya mencegah dan memutus rantai penularan dengan penerapan protocol kesehatan ketat dan vaksinasi perlu digalakkan.

Tabel 2.153 Perkembangan Kasus Covid-19 Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Kasus	Jumlah
1	Terkonfirmasi	5.174
2	Dirawat	302
	- Dirawat	130
	- Isolasi Mandiri	172
3	Sembuh	4.765
4	Meninggal	107

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, 2021

Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tangerang tahun 2021 yang terkonfirmasi sebanyak 5.174 orang yang dirawat sebanyak 302 baik dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri, sebanyak 4.765 orang yang sembuh dan sebanyak 107 orang yang meninggal akibat Covid-19.

Klaster Covid-19 di Kabupaten Tangerang terdiri atas klaster keluarga sebanyak 489 orang atau sekitar 9,4%, klaster perusahaan sebanyak 365 orang (7%), kemudian klaster Fasyankes sebanyak 261 orang atau sekitar 5%, Klaster perkantoran sebanyak 245 orang atau sekitar 4,7%, klaster agama sebanyak 197 orang (3,8%), klaster rumah

tahanan sekitar 151 orang (2,9%), dan klaster unjuk rasa sebanyak 10 orang, dari lima klaster tersebut klaster keluarga paling banyak terjadi kasus covid-19.

Tabel 2.`154 Jumlah Peserta Vaksinasi di Kabupaten Tangerang

Keterangan	Sasaran	Vaksinasi I		Vaksinasi II	
		Sudah Divaksin	Persentase	Sudah Divaksin	Persentase
Total Sasaran	335.351	287.665	(85,7%)	111.216	(33,1%)
SDM Kesehatan	10.221	12.094	(118,3%)	10.286	(100.6%)
Petugas Publik	180.455	126.757	(70,2%)	56.299	(31,2%)
Lansia	46.636	21.719	(46,6%)	17.426	(37,4%)
Masyarakat Umum & Rentan	87.719	119.846	(136,6%)	27.205	(31,0%)
Remaja	10.320	7.249	(70,2%)	0	0
Gotong Royong		6.872		3.543	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, 2021

Kondisi ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit dan Hotel Singgah Yasmin pada data per 25 Juli 2021 kapasitas tempat tidur isolasi di rumah sakit mencapai 980 tempat tidur dengan yang terpakai sebanyak 707 tempat tidur (72,1%). ICU rumah sakit dengan kapasitas 109 terpakai 98 atau sekitar 89,9%, di Hotel Yasmin yang dijadikan tempat isolasi mandiri dengan kapaitas 240 tempat tidur yang terpakai sebanyak 140 tempat tidur (58,3%), total kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 1329 tempat tidur dengan tempat tidur yang terpakai sebanyak 945 tempat tidur (73,5%).

Tabel 2.155 Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit dan Hotel Singgah Yasmin Per Tanggal 25 Juli 2021

Tempat Tidur	Kapasitas	Terpakai	Tersisa	Persentase
Tempat Tidur Isolasi RS	980	707	273	72,1%
ICU RS	109	98	11	89,9%

Tempat Tidur Yasmin	240	140	100	58,3%
Total	1.329	945	384	73,5%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, 2021

2.5.2 Penanganan Dampak Ekonomi Daerah

Penanganan dampak pandemic Covid-19 di Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran APBD Tahun 2020 dan 2021, serta perubahan pada prioritas pembangunan daerah. Untuk penanganan dampak pandemic Covis-19 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang terdampak dari kebijakan pembatasan social berskala besar (PSPB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, dan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada januari 2021, dan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro), sampai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat pada Juli 2021, dampak dari kebijakan tersebut berakibat aktivitas usaha masyarakat baik kecil sampai besar mengalami kegoncangan, ada beberapa usaha yang menerapkan efisiensi dengan melakukan PHK, dan usaha mikro yang bangkrut. Sejak tahun 2020, dimana wabah pandemic Covid-19 terjadi Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menganggarkan penanganan dampak ekonomi sekitar Rp. 341.142.193.947, dengan realisasi sekitar Rp. 306.323.041.710 dengan rncian meliputi : Penanganan kesehatan mendapatkan anggaran dari hasil realokasi sebanyak Rp.128.555.302.656, realokasi ke jarring pengamanan social sekitar Rp.150.000.000.000, realokasi APBD tahun 2020 untuk penanganan dampak ekonomi sebanyak Rp.60.020.000.000 kemudian untuk kebutuhan mendesak lainnya sekitar Rp. 2.566.891.291, untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.156 Anggaran dan realisasi belanja penanganan covid 19
Tahun anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	Penanganan Kesehatan	Rp 128.555.302.656	Rp 95.811.694.492	Rp 32.743.608.164
2	Jaring Pengamanan Sosial	Rp 150.000.000.000	148.404.161.775	Rp 1.595.838.225
3	Penanganan Dampak Ekonomi	Rp 60.020.000.000	Rp 59.540.685.893	Rp 479.314.107
4	Kebutuhan Mendesak Lainnya	Rp 2.566.891.291	Rp 2.566.499.550	Rp 391.741
JUMLAH		**Rp 341.142.193.947**	**Rp 306.323.041.710**	**Rp 34.819.152.237**

Sumber : BPKAD Kab. Tangerang, 2021

Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten melakukan refocusing DAU APBD tahun 2021, realokasi anggaran diperuntukan untuk Perlindungan Sosial dengan rincian untuk Bantuan Sosial sekitar Rp. 351,364,800, dan Pemberian Makanan Tambahan sekitar Rp. 450,000,000. Realokasi untuk Dukungan Ekonomi dengan rincian untuk Pemberdayaan UMKM sebanyak Rp. 952,282,800, dan peruntukan Subsidi Pertanian sebesar Rp. 519,211,200 sehingga refocusing DAU APBD tahun 2021 sebesar Rp. 2,272,858,800. Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah ini.

Tabel 2.157 Refocusing Anggaran Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Akun	Anggaran			
			Sumber Pendanaan		Jumlah	%
			DAU	DBH		
I	Perlindungan Sosial					
	a. Bantuan Sosial	APBD	351,364,800		351,364,800	100
	b. Pemberian Makanan Tambahan	APBD	450,000,000		450,000,000	100
	Sub Total Perlindungan Sosial					
II	Dukungan Ekonomi					
	a. Pemberdayaan UMKM	APBD	952,282,800		952,282,800	100
	b. Subsidi Pertanian	APBD	519,211,200		519,211,200	100
	Sub Total Dukungan Ekomoni					
Jumlah			2,272,858,800	-	2,272,858,800	

Sumber : Paparan Bupati Tangerang pada Rakor dengan Mendagri, 2021

Realisasi anggaran 8% refocusing DAU tahun 2021 untuk penanganan covid-9 sekitar Rp. 367.566.830 (33,62%), realisasi anggaran untuk dukungan vaksinasi sekitar Rp. 949.129.900 (4,11%),

alokasi Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Sekitar Rp. 1.062.834.200 (37,96%), realokasi anggaran untuk Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 sekitar Rp. 18.973.943.385 (55,79%), realokasi anggaran untuk Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebanyak Rp. 313.500.000 (7,50%).

Tabel 2.158 Realisasi Anggaran 8% Refocussing DAU Tahun 2021
Kab. Tangerang

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Penanganan Covid-19	24.886.437.081	8.367.566.830	33,62
2	Dukungan vaksinasi	23.098.965.531	949.192.900	4,11
3	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	2.800.000.000	1.062.834.200	37,96
4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19	34.009.942.184	18.973.943.385	55,79
5	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat	4.178.383.924	313.500.000	7,50
Jumlah		88.973.728.720	29.667.037.315	33,34

Sumber : Paparan Bupati Tangerang pada Rakor dengan Mendagri, 2021

Alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD Tahun 2021 meliputi rincian sebagai berikut : Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan alokasi sekitar Rp. 80.302.290.036 realisasi anggaran Rp. 54.253.221.427 (67,56%), untuk operasional penanganan jenazah covid-19 sekitar Rp. 3.778.132.769, untuk dukungan pencegahan penyebaran covid-19 sebanyak Rp. 793.826.460, alokasi untuk penambahan fasilitas RSUD dukungan penanganan covid-19 sekitar Rp. 5.000.000.000, alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi (PDE) sekitar 7.849.829.472 dengan realisasi sebanyak Rp. 787.168.360 (10,03%). Untuk lebih jelasnya lihat table diabwah ini.

Tabel 2.159 Anggaran Penanganan Covis-19 Bersumber APBD Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Tidak Terduga	80.302.290.056	54.253.221.427	26.049.068.629	67,56
2	Operasional penanganan Jenazah Covid 19	3.778.132.769	-	3.778.132.769	0,00
3	Dukungan pencegahan penyebaran Covid 19	793.826.460	-	793.826.460	0,00
4	Penambahan Fasilitas RSUD untuk penanganan Covid 19	5.000.000.000	-	5.000.000.000	0,00
5	Penanganan Dampak ekonomi	7.849.829.472	787.168.560	7.062.660.912	10,03
	Jumlah	**97.724.078.757**	**55.040.389.987**	**42.683.688.770**	**56,32**

Sumber : Paparan Bupati Tangerang pada Rakor dengan Mendagri, 2021

2.5. Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023

Sampai dengan akhir tahun 2020, capaian program unggulan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.153 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Program Unggulan Tahun 2020

Capaian Kinerja di Atas 90%	60 indikator	95,24
Capaian Kinerja di Atas 70% - 89%	1 indikator	1,59
Capaian Kinerja di Bawah 70%	2 indikator	3,17
	63 indikator	100

Capaian kinerja yang di bawah 70% ada 2 indikator yaitu kegiatan Beasiswa Pendidikan Berprestasi dan MBR dengan indikator jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa sebesar 0% dan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayan Perizinan Terpadu (Sipintar) dengan indikator realisasi penyelenggaraan perijinan secara *online* dan terintegrasi dengan persentase hanya mencapai 65%.

BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pembahasan mengenai kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi, dan perkembangan kemampuan keuangan daerah untuk beberapa tahun yang telah lalu, dalam hal ini adalah 7 (tujuh) tahun yaitu Tahun Anggaran 2013-2017 dan 2018-2020. Pembahasan dan analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Tangerang mencakup kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah.

Kinerja keuangan daerah dalam hal ini APBD tidak terlepas dari pencermatan terhadap struktur keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sebagaimana dituangkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pengelolaan keuangan

daerah harus menerapkan azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Asumsi dasar sebagai bahan penyusunan APBD dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dan 2018-2020, yaitu dengan memperkirakan faktor ekonomi makro yang bepengaruh, antara lain; 1) Trend kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM); 2) Perkembangan perekonomian internasional yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional yang berimbas pada kondisi perekonomian daerah; 3) Laju tingkat inflasi; 4) Stabilitas harga bahan pokok/dasar dan sosial politik lokal; 5) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); 6) Kebijakan- kebijakan terkait dana transfer ke daerah; 7) Pertumbuhan APBD selama 5 (lima) tahun sebelumnya. Selama kurun waktu lima tahun (tahun 2013-2017) maupun tujuh tahun (2013-2019), APBD Kabupaten Tangerang menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan realisasi APBD 2013-2017 setiap tahunnya sebesar 11,15%. Sedangkan pertumbuhan rata-rata APBD selama 7 (tujuh) tahun (2013-2019) sebesar 14,95%. Namun bila tahun 2020 diperhitungkan pertumbuhan rata-rata APBD 2013-2020 sebesar 8,44%.

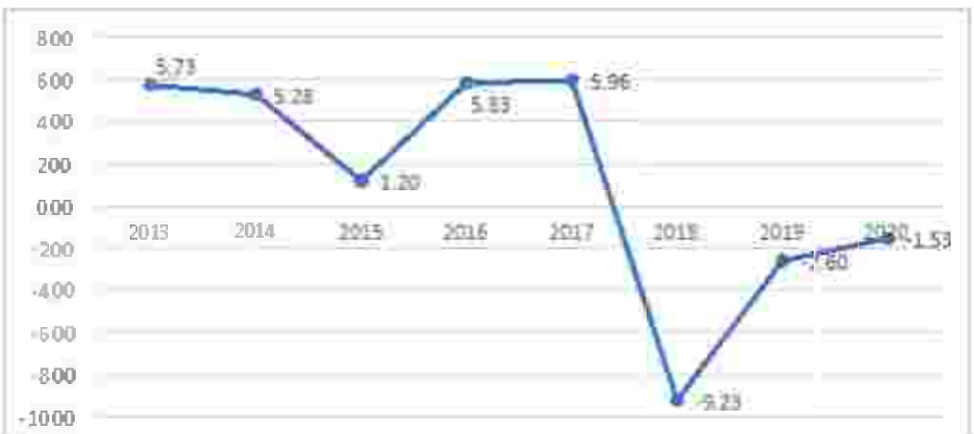
Gambar 82 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020



Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah)

Pertumbuhan realisasi surplus (defisit) terhadap belanja APBD selama kurun waktu delapan tahun (tahun 2013- 2020) rata-rata 1,02%. Defisit anggaran pada realisasinya mampu ditutup dengan net pembiayaan terutama oleh silpa tahun-tahun sebelumnya. Persentase defisit tersebut tergolong relatif kecil jika dibandingkan dengan yang disarankan oleh peraturan menteri keuangan yaitu sebesar 6%. Hal ini menunjukkan perencanaan penganggaran yang sudah baik.

Gambar 83 Tren Surplus (defisit) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020



Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah)

3.2 Kebijakan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Besar kecilnya pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan suatu daerah dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah. Penentuan kinerja pendapatan APBD dilakukan dengan mengukur dan membandingkan pertumbuhan pada masing- masing sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Kabupaten Tangerang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama kurun waktu lima tahun (2013-2017) pendapatan daerah Kabupaten Tangerang mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 11,15%, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada pos Hasil Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,55%. Sedangkan pada kurun waktu tujuh tahun (2013-2019) rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 9,17%, namun bila dimasukkan tahun 2020, rata-rata menjadi 6,49%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Tangerang selama 8 (delapan) tahun yang lalu (tahun 2013-2020) dapat dilihat pada table 3.1 di bawah ini:

Dari beberapa komponen pendapatan yang terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, maka Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPYD) mengalami pertumbuhan yang paling akseleratif yaitu sebesar 153,27%. Akselerasi peningkatan LPYD yang sah tersebut terutama didukung oleh peningkatan Pendapatan Hibah yang mencapai 82,45%. PAD menempati urutan kedua dengan rata-rata pertumbuhan 11,72%. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 19,9% dan pajak daerah sebesar 12,82%.

Gambar 84 Perkembangan Pendapatan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 (Rupiah)



Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah)

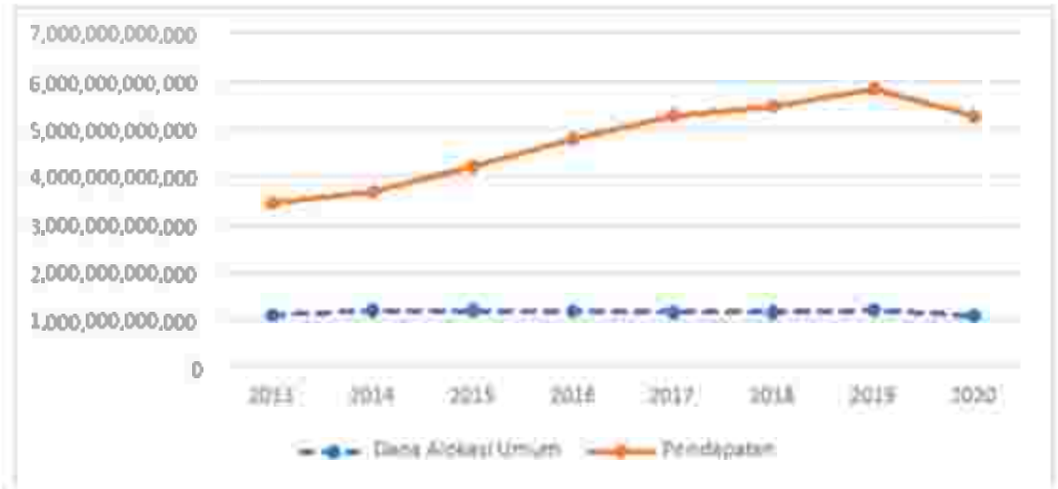
Sedangkan untuk Dana transfer pertumbuhannya relatif landai, yaitu rata-rata pertumbuhan selama 7 tahun hanya 4,77% dan bila tahun 2020 diperhitungkan pertumbuhan rat-rata 2013-2020 sebesar 2,4%. Hal ini disebabkan oleh DAU sebagai komponen utama dana perimbangan pertumbuhannya hanya berkisar 1,61% pada 2013-2019 dan 0,03% pada tahun 2013-2020. Selain itu, pertumbuhan bagi hasil pajak dan non pajak sebesar 0,65% pada 2013-2020. Komponen Dana Perimbangan yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 44,26% pada 2013-2019 dan 38,59% pada 2013-2020.

Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020

Uraian	Realisasi					Rata-Rata			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pertum buhan
PENDAPATAN	3.465.356.511.564	3.698.374.252.841	4.229.034.302.499	4.799.673.684.723	5.282.065.522.276	5.483.110.413.991	5.843.672.646.281	5.283.259.300.737	6,49
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.218.576.390.249	1.576.315.878.393	1.851.195.176.763	2.054.715.995.931	2.786.647.279.878	2.872.568.512.687	2.812.933.124.762	2.465.364.759.567	11,72
Pendapatan Pajak Daerah	803.097.821.528	1.015.714.352.255	1.162.526.854.157	1.301.030.413.072	1.836.701.036.018	1.915.261.073.035,00	2.153.661.721.883,00	1.701.900.649.848,00	12,82
Pendapatan Retribusi Daerah	107.837.109.627	130.036.896.666	116.172.380.833	161.671.267.340	97.300.746.881	122.418.520.065,00	112.593.677.767,00	136.547.373.492,00	6,91
Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	19.806.975.025	22.594.813.361	45.946.059.477	51.862.903.163	54.513.984.729	57.137.623.310	57.766.074.188	56.606.567.271,00	19,9
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	287.834.484.069	407.969.816.111	526.549.882.296	540.151.412.356	798.131.512.250	777.751.296.277	488.911.650.924	570.310.168.956,00	14,02
DANA TRANSFER	2.029.076.551.315	2.105.537.374.448	2.260.836.986.486	2.361.967.429.792	2.406.154.242.398	2.540.541.901.304	2.682.123.916.519	2.364.554.056.170	2,4
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	293.557.607.711	143.608.555.130	116.925.350.959	161.836.546.359	190.038.192.252	200.954.614.706	162.087.265.508	213.951.129.698,00	0,65
Dana Alokasi Umum	1.115.364.627.000	1.213.857.913.000	1.212.934.842.000	1.196.642.873.000	1.175.621.706.000	1.176.554.273.724	1.222.971.999.000	1.107.392.704.000,00	0,03
Dana Alokasi Khusus	90.025.343.000	103.912.330.000	91.387.270.000	316.483.250.000	316.323.761.951	381.460.784.571	363.728.692.428	380.412.924.792,00	38,59
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	226.592.480.000,00	225.371.373.000,00	379.169.779.000,00	207.549.381.000	223.171.732.000	249.640.904.216	304.820.252.828	336.615.552.000,00	10,62
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	303.536.493.604	418.787.203.318	460.419.744.527	479.455.379.433	500.998.850.195	531.931.324.087	628.515.706.755	326.181.745.680	4,68
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	217.703.570.000,00	16.521.000.000	117.002.139.250,00	382.990.259.000	89.264.000.000	70.000.000.000	348.615.605.000	453.340.485.000	153,27
Pendapatan Hibah	217.703.570.000,00	16.521.000.000,00	117.002.139.250,00	382.990.259.000,00	89.264.000.000,00	70.000.000.000,00	348.615.605.000,00	453.340.485.000,00	82,45

Sumber : LRA 2013-2020, data diolah

Gambar 85 Perkembangan DAU terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Tangerang 2013-2020



Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah)

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerah, yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Gambar 86 Perbandingan Tren Realisasi dan Anggaran PAD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020



Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah)

Pada kurun waktu 2013-2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu mampu melebihi target. Sejak tahun 2017, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah paling dominan diantara pendapatan lainnya. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagi berikut:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, PBB dan Pajak BPHTB.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atau hasil penyertaan modal daerah.

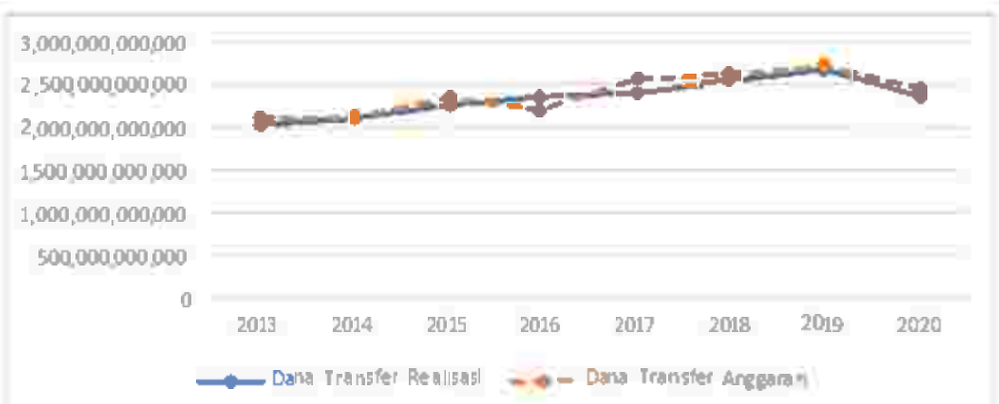
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Pendapatan Transfer

Dari Tahun 2013-2016 realisasi Dana Perimbangan di atas anggarannya, namun sejak tahun 2017-2020 realisasi dana perimbangan berada di bawah dari yang direncanakan.

Gambar 87 Perbandingan Tren Realisasi dengan Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020



Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah)

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Nomor 33 Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah

1) Transfer Pemerintah Pusat
   a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
      (1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
      (2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
      (3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
   c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
   d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
   e. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Transfer Antar-Daerah

a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

(1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan

(2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten / kota, terdiri atas:

(1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

(2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari:

1) Hibah;

2) Dana Darurat; dan/atau

3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Gambar 88 Perbandingan Tren Realisasi dengan Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020



Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah)

Tahun 2013-2020 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami fluktuasi baik dari sisi anggaran maupun realisasinya. Pada tahun 2013 realisasi LPAD yang sah jauh berada di atas anggarannya, namun sejak tahun 2014 hingga 2020 terlihat realisasinya hampir sama dengan yang direncanakan dalam penganggaran.

3.2.2 Belanja

Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah, selain dari sisi pendapatan juga perlu melihat pertumbuhan belanja. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel 3. 2 Pertumbuhan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2020

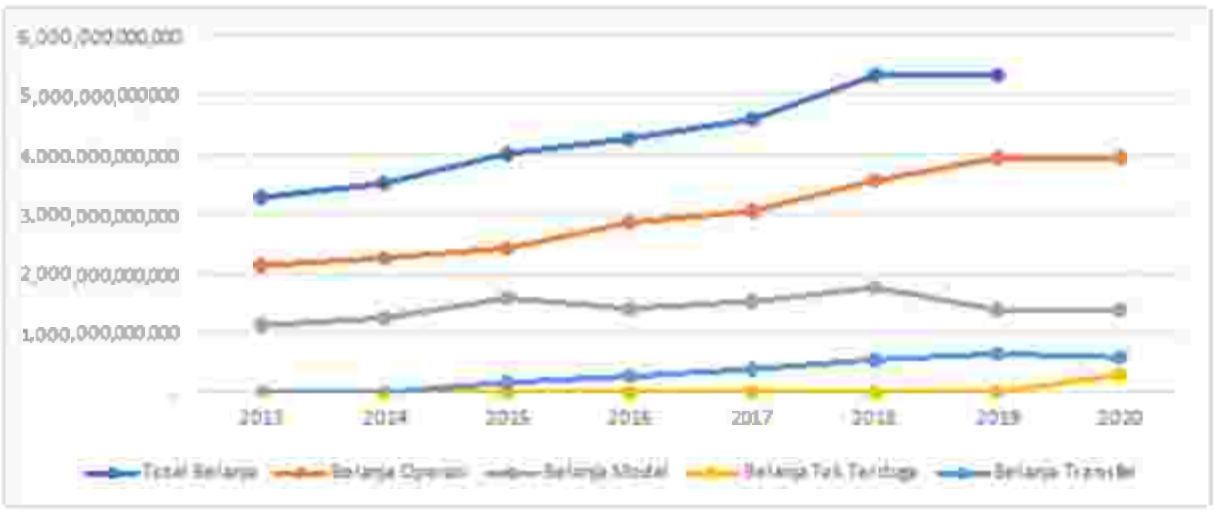
Uraian	Realisasi								Rata-Rata Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
BELANJA	3.277.526.096.684	3.512.778.491.741	4.011.233.548.871	4.264.196.848.397	4.588.971.336.345	5.327.769.894.091	5.338.015.766.404	5.637.075.735.356	8,17
Belanja Operasi	2.137.059.789.294	2.257.482.788.616	2.421.544.841.671	2.852.354.556.469	3.045.210.982.556	3.556.745.486.293	3.943.488.092.710	3.943.488.092.710	9,3
Belanja Pegawai	1.142.860.790.244	1.228.565.126.720	1.228.564.901.444	1.315.932.814.660	1.230.896.691.062	1.379.279.128.155	1.870.732.534.034	1.669.545.457.895	6,44
Belanja Barang dan Jasa	820.619.970.941	845.891.236.995	1.104.701.996.105	1.440.530.316.685	1.666.517.795.494	1.916.601.637.944	1.922.458.206.350	1.694.051.144.953	11,88
Belanja Hibah	90.334.316.000	110.164.906.835	75.703.744.122	70.339.132.724	123.827.800.000	234.202.152.594	143.208.266.826	127.631.000.549	14,15
Belanja Bantuan Sosial	83.244.712.109	72.861.518.066	12.574.200.000	25.552.292.400	23.968.696.000	26.662.567.600	7.089.085.500	8.161.676.950	-6,46
Belanja Modal	1.131.499.743.316	1.251.534.934.067	1.585.911.127.269	1.410.376.720.957	1.530.660.350.264	1.763.560.497.024	1.392.365.179.428	1.392.365.179.428	4,14
Belanja Tanah	84.067.301.600	203.629.669.100	321.160.762.515	216.838.537.859	129.092.980.108	422.438.669.296	190.663.045.773	174.879.250.388	41,58
Belanja Peralatan dan Mesin	120.448.001.288	160.430.965.576	167.473.414.767	184.662.782.265	251.558.199.821	264.414.214.369	254.524.178.235	226.101.911.006	10,61
Belanja Gedung dan Bangunan	322.652.295.545	385.788.651.285	520.320.441.369	439.880.530.769	528.972.778.717	506.810.131.538	374.198.318.620	238.548.536.514	-1,05
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	591.703.769.096	500.763.555.753	575.205.216.068	565.421.993.814	590.828.818.789	534.350.783.768	542.446.989.238	302.538.105.154	-7,14
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.628.375.787	922.092.353	1.751.292.550	3.572.876.250	30.207.572.829	35.546.698.053	30.532.647.562	34.444.461.742	123,3
BELANJA TAK TERDUGA	8.966.564.074	3.760.769.058	3.777.579.931	1.465.570.971	13.100.003.525	7.463.910.774	2.162.494.267	301.222.463.219	2.055,77
Belanja Tak Terduga	8.966.564.074	3.760.769.058	3.777.579.931	1.465.570.971	13.100.003.525	7.463.910.774	2.162.494.267	301.222.463.219	2.055,77
TRANSFER			167.836.353.151	271.132.597.876	392.847.727.288	551.065.183.269	650.148.754.100	588.395.766.747	31,04
TRANSFER BAGI HASIL			23.486.217.305	45.841.341.487	56.907.081.242	166.322.457.069	202.796.024.306	157.385.248.029	62,23

Uraian	Realisasi								Rata-Rata Pertumbuhan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN									
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah			21.127.397.956	41.254.632.419	50.078.231.494	147.287.579.218	185.326.247.348	146.365.250.829	63,11
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			2.358.819.349	4.586.709.068	6.828.849.748	19.034.877.851	17.469.776.958	11.019.997.200	55,39
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN			144.350.135.846	225.291.256.389	335.940.646.046	384.742.726.200	447.352.729.794	431.010.518.718	26,47
Transfer Bantuan Keuangan ke PemDa Lainnya						1.000.000.000	-	0	
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			143.651.260.409	224.076.286.880	334.983.723.573	381.659.440.700	445.963.872.794	428.120.352.718,00	26,45
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			698.875.437	1.214.969.509	956.922.473	2.083.285.500	1.388.857.000	2.890.166.000,00	49,02
Jumlah Belanja dan Transfer	3.277.526.096.684	3.512.778.491.741	4.179.069.902.022	4.535.329.446.273	4.981.819.063.633	5.878.835.077.360	5.988.164.520.50	6.225.471.502.103	8,44

Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang Dalam, 2013-2020.

Dari tabel 3.2 dan Gambar 3.8 dapat diketahui bahwa belanja daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan per tahunnya 8,17%. Belanja Operasi tumbuh dengan rata-rata 9,30% dan Belanja Modal tumbuh dengan rata-rata 4,14%. Sementara itu Belanja Tak terduga berfluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata yang besar yaitu 2055,7%. Hal ini diakibatkan oleh adanya refocusing APBD karena adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020.

Gambar 89 Perbandingan Total Belanja, Belanja Operasi, dan Belanja Modal 2013-2020



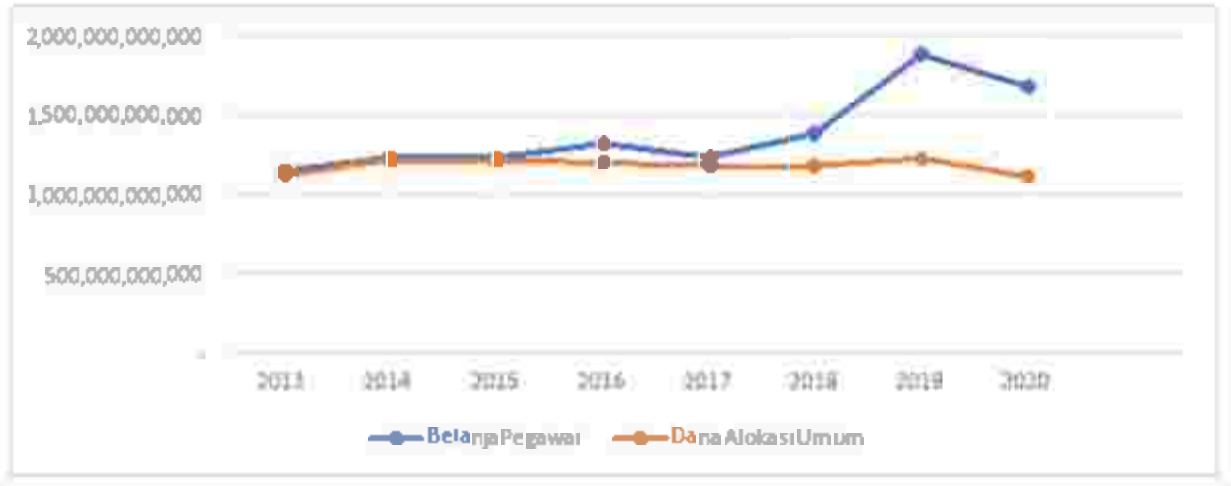
Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang, data diolah.

Pada kelompok belanja pegawai terjadi tren kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dengan kenaikan yang tajam pada tahun 2019. Pertumbuhan belanja pegawai rata-rata dari tahun 2013 hingga 2019 sebesar 9,31% dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sehingga pertumbuhan rata-rata 2013-2020 sebesar 6,44%.

Bila dibandingkan dengan DAU, gap antara total belanja pegawai dan tren DAU semakin melebar, artinya pemerintah Kabupaten Tangerang membiayai belanja pegawai selain dari DAU juga dari pendapatan lain selain DAU. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.9.

Proporsi belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Tangerang sejak tahun 2015 hingga 2020 mengalami tren menurun, sebaliknya proporsi belanja operasi terhadap total belanja mengalami tren meningkat. Pada tahun 2015 proporsi belanja modal terhadap total belanja mencapai 38% namun mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 menjadi 26%. Hal ini menunjukkan proporsi yang kurang baik, mengingat belanja modal merupakan belanja yang langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 90 Perbandingan Tren Realisasi Belanja Pegawai -BTL, Belanja Pegawai-BL Kabupaten, dan DAU Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020



Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang, data diolah.

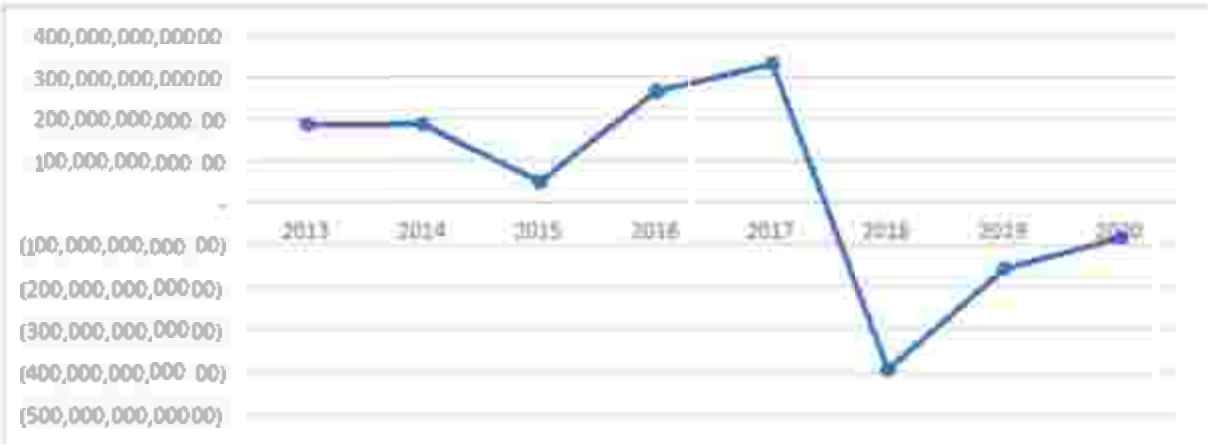
Gambar 91 Perkembangan Proporsi Realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasi terhadap Total Belanja 2013-2019



Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang, 2013-2019, data diolah.

3.2.3 Surplus (Defisit)

Realisasi anggaran Kabupaten Tangerang sejak 2013 hingga 2017 menunjukkan surplus dengan tren meningkat. Namun tahun 2018 Kabupaten Tangerang mengalami defisit yang cukup tajam hingga mencapai Rp. 395,7 Milyar. Pada tahun 2019 defisit ini berkurang menjadi sebesar Rp. 144,49 Milyar, dan pada tahun 2020 defisit sebesar Rp. 82,26 Milyar. Namun demikian defisit ini dapat ditutup oleh pembiayaan neto yang positif.



Gambar 92 Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran

Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang, 2013-2020, data diolah

3.2.4 Pembiayaan

Pos-pos pembiayaan sebagaimana disajikan pada table 3.3 menunjukkan nilai neto pembayaan yang positif yang mampu melebihi nilai defisit, sehingga memberikan SILPA yang positif sejak tahun 2013-2020.

Penerimaan pembiayaan umumnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sedangkan komponen lainnya seperti pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Aset

yang Dipisahkan hanya terjadi secara berkala. Sementara itu komponen pengeluaran pembiayaan, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan investasi non permanen hanya terjadi secara berkala dan dengan nilai yang tidak terlalu besar. Sehingga secara neto pembiayaan mengalami nilai positif. Nilai pembiayaan neto ini cukup besar sehingga mampu menutup defisit realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019, sehingga realisasi anggaran tahun 2013-2020 memberikan SILPA positif.

Tabel 3. 3 Pembiayaan 2013-2020

PEMBIAYAAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Pembiayaan	520.370.399.550	723.484.054.052	878.379.815.152	913.344.215.629	881.734.602.258	1.198.916.116.901	792.249.631.880	617.757.759.057
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	491.592.027.772	700.200.814.430	878.379.815.152	913.344.215.629	881.734.602.258	1.057.916.116.901	792.249.631.880	617.757.759.057,00
Pencairan Dana Cadangan					-	141.000.000.000	-	-
Hasil Penjualan kekayaan Daerah Yang dipisahkan	28.778.371.778	23.283.239.622						
Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000	30.700.000.000	15.000.000.000	295.953.851.821	155.000.000.000	10.941.821.652	29.999.998.600	-
Pembentukan Dana Cadangan				280.312.004.000	141.000.000.000	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000	30.700.000.000		641.847.821	9.000.000.000	10.941.821.652	24.999.998.600	-
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya			15.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	-	5.000.000.000	-
PEMBIAYAAN NETTO	512.370.399.550	692.784.054.052	863.379.815.152	617.390.363.808	726.734.602.258	1.187.974.295.249	762.249.633.280	617.757.759.057
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	700.200.814.430	863.379.815.152	913.344.215.629	881.734.602.258	1.057.916.116.901	792.249.631.880	617.757.759.057	617.757.759.057

Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang, 2013-2020, data diolah

3.2.5 Neraca Daerah

Kesehatan neraca keuangan suatu daerah dapat ditinjau melalui rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio ini merupakan perbandingan dari beberapa pos pada laporan keuangan. Adapun penjelasan lebih detil mengenai rasio likuiditas dan solvabilitas adalah sebagai berikut:

a. Rasio likuiditas: Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari
   - Rasio Lancar, menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya.
   - Rasio Cepat, menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aktiva lancar yang paling likuid (tanpa memperhatikan persediaan) dengan kewajiban lancar.

   Rasio lancar dan rasio cepat yang baik bernilai diatas 1 (satu), yang artinya pemerintah daerah masih memiliki aset lancar yang cukup untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 adalah sebesar 31,19 dengan rasio cepat sebesar 30,36. Berdasarkan angka tersebut, Kabupaten Tangerang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar maupun tanpa memperhatikan persediaan. Sepanjang tahun 2014-2020 tren rasio lancar dan rasio cepat Kabupaten Tangerang mengalami penurunan. Pada tahun 2020 rasio lancar mencapai 16,60 dan rasio cepat 14,38. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih berada diatas 1 (satu). Secara detail, rasio tersebut disajikan dalam tabel dibawah.

Tabel 3. 4 Rasio Likuiditas Keuangan Kabupaten Tangerang

Tahun 2014 – 2020

Rasio Likuiditas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Lancar	31,19	16,43	34,86	18,08	20,17	16,60	16,60
Rasio Cepat	30,36	15,86	33,03	17,20	15,48	14,38	14,38

Sumber: Neraca Keuangan Kabupaten Tangerang, diolah

b. Rasio solvabilitas: rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi semua kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dengan jaminan aktiva maupun ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah. Adapun jenis rasio yang digunakan sebagai berikut:

1. Rasio utang terhadap aset, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah seluruh aset yang dimilikinya.
2. Rasio utang terhadap ekuitas, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki.

Rasio solvabilitas Kabupaten Tangerang dalam rentang waktu 2014-2020 menunjukkan angka yang sehat. Pada tahun 2014 Kabupaten Tangerang memiliki rasio utang terhadap aset sebesar 0,329% yang artinya aset Kabupaten Tangerang hanya dibiayain 0,329% kewajiban. Begitu pula pada tahun 2020 yang menunjukkan angka 0,384%. Selanjutnya, untuk rasio utang terhadap ekuitas Kabupaten Tangerang juga masih dibawah 100% dari tahun ke tahun. Artinya, Kabupaten Tangerang akan mampu membayar utang menggunakan ekuitasnya apabila mengalami gagar bayar.

Tabel 3. 5 Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Tangerang 2014-2020

Rasio Solvabilitas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Utang terhadap Aset	0,329 %	0,954 %	0,345 %	0,637 %	0,488 %	0,384 %	0,384 %
Rasio Utang terhadap Ekuitas	0,330 %	0,963 %	0,347 %	0,641 %	0,490 %	0,385 %	0,385 %

Sumber: Neraca Keuangan Kabupaten Tangerang, diolah

3.3 Kerangka Pendanaan

Kebijakan pendanaan keuangan daerah mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah dimaksudkan sebagai sumber pendanaan dalam implementasi program- kegiatan. Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun anggaran 2019-2023 harus dikaji secara mendalam

agar dapat menjadi dasar perencanaan program kegiatan pembangunan secara lebih tepat, terukur, dan mendasarkan pada kebijakan prioritas yang telah ditetapkan, dengan tertumpu pada visi misi oleh bupati terpilih yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan baik yang berasal dari PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya belanja daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun anggaran 2013-2017 serta 2018-2019 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2018- 2023.

3.3.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besar kecilnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Unsur Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk

menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Sementara itu, untuk tahun 2020-2023 kebijakan keuangan daerah juga memperhatikan pandemi virus corona atau *covid-19* yang melanda dunia, Indonesia, dan khususnya Kabupaten Tangerang. Pandemi yang mengakibatkan penurunan realisasi PAD pada tahun 2020 berpengaruh terhadap kebijakan target anggaran PAD 2021-2023. Berbagai upaya harus dilakukan agar pada than 2021-2023 anggaran dan realisasi PAD meningkat Kembali.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

a. Menangani pandemi covid-19 dengan efektif, baik preventif, promotif, maupun kuratif termasuk pemberian vaksin vovid 19 kepada berbagai lapisan dan golongan masyarakat.

b. Mengevaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah terutama terkait adanya pandemic covid-19.

c. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

d. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.

e. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, sehingga optimalisasi PAD disesuaikan dengan perekonomian yang sedang berlangsung.

f. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.

g. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;

h. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

i. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;

j. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;

k. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan instansi terkait.

l. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daearah;

m. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah

n. Penerapan pola insentif dan disinsentif

o. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah

p. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah

3.3.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dimaksudkan untuk mempersempit *"gap"* atau ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini mencakup; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi hasil pajak/bukan pajak.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah kabupaten dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah kabupaten, bobot daerah kabupaten yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah kabupaten.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan

perpajakan.

Kondisi pandemi covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 juga menjadi pertimbangan perkiraan pendapatan dana perimbangan 2021-2023. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana perimbangan yaitu :

1) Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota.
3) Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten.

3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari kementerian/lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus yang antara lain dana untuk Dana BOS. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama kementerian lembaga.

Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi walaupun proporsinya paling besar dalam pendapatan daerah, masih perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan Lain- lain Pendapatan yang Sah, mencakup memperkirakan lebih cermat penerimaan hibah berupa

uang dalam APBD Kabupaten Tangerang yang didasarkan kepada Naskah Perjanjian Hibah (NPH).

-

Tabel 3. 6 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

URAIAN	Target				
	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH					
Pendapatan Asli Daerah	2.613.744.369.343,00	2.152.099.764.621,00	2.451.382.599.948,00	2.583.428.104.592,00	2.808.043.667.200
Pajak Daerah	1.917.121.599.924	1.498.850.000.000	1.767.560.088.743,00	1.961.053.392.906,00	2.139.668.831.362
Hasil Retribusi Daerah	114.420.360.231	97.244.966.652	79.785.396.662,00	79.785.396.662,00	143.470.734.970
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	56.888.614.371	55.413.125.191	53.789.023.713,00	53.789.023.713,00	58.321.802.865
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	525.313.794.817	500.591.672.778	550.248.090.830,00	488.800.291.311,00	466.582.298.003
Pendapatan Transfer	2.788.201.601.495,00	2.516.735.756.368,00	2.974.749.054.369,00	3.154.266.365.989,00	2.855.160.675.501
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.859.971.983.200,00	1.748.812.137.180,00	2.068.034.120.000,00	2.449.768.183.000,00	2.055.103.183.052
Pendapatan Transfer Antar Daerah	928.229.618.295,00	767.923.619.188,00	906.714.934.369,00	704.498.182.989,00	800.057.492.449
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	272.601.530.070,00	453.895.807.390,00	310.539.430.000,00		
Pendapatan Hibah	272.601.530.070,00	453.895.807.390	310.539.430.000,00		
Jumlah Pendapatan	5.674.547.500.908,00	5.122.731.328.379,00	5.736.671.084.317,00	5.737.694.470.581,00	5.663.204.342.701

Sumber : Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun secara cermat, sistematis dan terpola.

Sebagai komponen APBD, belanja daerah diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi daerah. Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan yang langsung memberikan manfaat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dalam pengelolaan belanja harus menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan.

Efektifitas dan efisiensi dimaksudkan dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud transparan dan akuntabel yaitu setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 juga menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan perundangan
2) Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit ataupun memiliki *multiplier effects* dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3) Belanja dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan OPD sesuai tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran OPD dan sasaran daerah.
4) Penghematan dan rasionalisasi terhadap belanja personil pada belanja langsung secara selektif.
5) Pada tahun 2020 belanja mengalami refocusing dan penurunan nilai akibat pandemic covid-19.
6) Pada tahun 2020-2023 belanja diarahkan untuk menangani dampak pandemi covid-19.
7) Mempedomani mandatory spending antara lain :
    a. Anggaran bidang Urusan Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesusai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 ayat (1)
    b. Anggaran bidang urusan Kesehatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)
    c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paing sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public antar daerah (UU APBN)
    d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Tabel 3. 7 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

URAIAN	Target				
	2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA DAERAH					
Belanja Operasi	4.291.283.233.054	3.848.287.238.487	4.184.910.942.776	4.163.674.254.397	3.933.832.976.382
Belanja Pegawai	1.988.659.985.466	1.785.674.042.109,00	1.944.362.929.004	2.163.930.782.176	1.859.781.815.095
Belanja Barang dan Jasa	2.139.658.060.088	1.831.397.230.716,00	1.754.169.743.968	1.713.306.992.921	1.923.722.128.930
Belanja Hibah	154.601.102.000	222.404.288.712,00	463.209.969.804	280.388.479.300	139.465.840.337
Belanja Bantuan Sosial	8.364.085.500	8.811.676.950	23.168.300.000	6.048.000.000	10.863.192.020
Belanja Modal	1.484.774.009.019	962.663.888.255	1.334.733.739.408	1.165.681.312.343	1.262.453.952.265
Belanja Tanah	283.071.875.364	161.030.873.839	484.278.698.619	134.294.460.679	236.707.809.363
Belanja Peralatan dan Mesin	254.524.178.235	226.101.911.006	176.418.336.261	168.496.102.737	314.620.809.165
Belanja Gedung dan Bangunan	374.198.318.620	238.548.536.514	223.736.594.941	392.255.955.567	302.449.725.733
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	542.446.989.238	302.538.105.154	449.787.270.327	445.267.859.292	366.903.087.026
Belanja Aset Tetap Lainnya	30.532.647.562	34.444.461.742	512.839.260	25.366.934.068	41.772.520.978
Belanja Tak Terduga	8.688.150.000	341.142.193.947	83.727.623.427	50.000.000.000	20.000.000.000
Belanja Tak Terduga	8.688.150.000	341.142.193.947	83.727.623.427	50.000.000.000	20.000.000.000
Belanja Transfer	652.051.740.715	588.395.766.747	668.796.063.383	631.138.903.841	679.450.988.684
Belanja Bagi Hasil Pendapatan	203.154.196.115	157.385.248.029	210.492.145.819	184.734.548.541	180.579.420.859
Belanja Bantuan Keuangan	448.897.544.600	431.010.518.718	458.303.917.564	446.404.355.300	498.871.567.825
Jumlah Belanja	6.436.797.132.788	5.740.489.087.436	6.272.168.368.994	6.010.494.470.581	5.895.737.917.331

Sumber : Tim Penyusunan Perubahan RPJMD, 2021

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan serta penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1) Mengupayakan penurunan SILPA secara bertahap dengan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2023, surplus (defisit) dan SILPA diasumsikan menurun dibandingkan tahun sebelumnya
2) Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program kegiatan dengan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa secara ketat, dengan tetap memperhatikan *output* dan *outcome*.
3) Mengupayakan pemanfaatanya untuk kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah.

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dengan SILPA sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal secara bertahap.

3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah seperti tersaji pada tabel 3.4 sampai dengan 3.7 diatas, selanjutnya dalam bagian ini akan menguraikan tentang penghitungan kerangka pendanaan, dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perkiraan kapasitas kemampuan riil pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp 3,28 trilyun dan pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 2,59 trilyun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8 Proyeksi Surplus (Defisit) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

URAIAN	Target				
	2019	2020	2021	2022	2023
Total Surplus/Defisit	762.249.631.880	617.757.759.057	535.497.284.677	272.800.000.000	232.533.574.630

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021

Tabel 3.9 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

URAIAN	Target				
	2019	2020	2021	2022	2023
PEMBIAYAAN DAERAH					
Penerimaan Pembiayaan Daerah	792.249.631.880	617.757.759.057	535.497.284.677	300.000.000.000	232.533.574.630
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	792.249.631.880	617.757.759.057	535.497.284.677	300.000.000.000	232.533.574.630
Pencairan Dana Cadangan					
Hasil Penjualan kekayaan Daerah Yang dipisahkan					
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	30.000.000.000			27.200.000.000	
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.000.000.000			27.200.000.000	
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya					
Jumlah Pembiayaan	762.249.631.880	617.757.759.057	535.497.284.677	272.800.000.000	232.533.574.630

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021

Tabel 3.10 Perkiraan Kapasitas Kemampuan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Target				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pendapatan	5.674.547.500.908	5.122.731.328.379	5.736.671.084.317	5.737.694.470.581	5.663.204.342.701
Jumlah Pembiayaan	762.249.631.880	617.757.759.057	535.497.284.677	272.800.000.000	232.533.574.630
Total Penerimaan	6.436.797.132.788	5.740.489.087.436	6.272.168.368.994	6.010.494.470.581	5.895.737.917.331
Belanja Pegawai	1.988.659.985.466	1.785.674.042.109	1.944.362.929.004	2.163.930.782.176	2.207.209.397.819
Belanja Bagi Hasil	203.154.196.115	157.385.248.029	210.492.145.819	184.734.548.541	204.083.878.957
Belanja Transfer	445.963.872.794	428.120.352.718,00	449.526.370.354	472.002.688.872	495.602.823.315
DAK	363.728.692.428	380.412.924.792	384.217.054.039	386.138.139.310	389.999.520.703
Total Belanja Mengikat	3.001.506.746.803	2.751.592.567.648	2.988.598.499.216	3.206.806.158.899	3.296.895.620.794
Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000			27.200.000.000	
Kapasitas Riil	3.405.290.385.985	2.988.896.519.788	3.283.569.869.778	2.776.488.311.682	2.598.842.296.537

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021

Selanjutnya dari kapasitas riil kemapuan keuangan daerah seperti yang tertera dalam tabel 3.8 di atas rencana penggunaannya untuk prioritas Ke-1 untuk belanja wajib mengikat, prioritas ke-2 belanja pelayanan wajib dasar dan prioritas ke-3 untuk belanja urusan pelayanan umum dengan cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Belanja pendidikan sebesar 20 persen dari kapasitas riil.
- Belanja kesehatan sebesar 10 persen dari kapasitas riil kecuali tahun 2020 sebesar 15%.
- Belanja Ekonomi (untuk pemulihan akibat Covid-19) 5 persen dari kapasitas riil, kecuali tahun 2020 sebesar 7%.
- Belanja Infrastruktur sebesar 25 persen dari kapasitas ril.
- Belanja Peningkatan kualitas SDM sebesar 1% dari kapasitas riil.
- Selebihnya untuk Belanja urusan pelayanan umum

  Dari kriteria tersebut atas kemudian di hitung masing-masing alokasi belanja untuk setiap prioritas, baik prioritas pertama, kedua maupun ketiga. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3. 11 Rencana Pengeluaran Kapasitas Ril Kabupaten Tangerang Sesuai Prioritas Tahun 2019-2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3.405.290.385.985	2.988.896.519.788	3.283.569.869.778	2.776.488.311.682	2.598.842.296.537
II	Belanja Prioritas	2.213.438.750.889	1.942.782.737.860	2.134.320.415.352	1.804.717.402.592	1.689.247.492.746
1	pendidikan (20%)	681.058.077.197	597.779.303.957	656.713.973.955	555.297.662.336	519.768.459.307
2	kesehatan (10%)	340.529.038.598	298.889.651.978	328.356.986.977	277.648.831.168	259.884.229.653
3	Pemulihan Ekonomi (5%)	170.264.519.299	149.444.825.989	164.178.493.488	138.824.415.584	129.942.114.826
5	Infrastruktur (25%)	851.322.596.496	747.224.129.947	820.892.467.444	694.122.077.920	649.710.574.134
6	Peningkatan SDM (0.5%)	170.264.519.299	149.444.825.989	164.178.493.488	138.824.415.584	129.942.114.826
III	Belanja Urusan Lain-lain	1.191.851.635.096	1.046.113.781.928	1.149.249.454.426	971.770.909.090	909.594.803.791

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021

Selanjutnya pengeluaran belanja dapat dibedakan berdasarkan prioritasnya, yaitu prioritas pertama hingga prioritas 4. Besaran nilai masing-masing prioritas dapat dilihat pada tabel 3.12

Tabel 3. 12 Rencana Belanja Prioritas I, II, III, IV Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (jutaan rupiah)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
I.	Prioritas I Belanja Wajib Mengikat	3.001.506.746.803	2.751.592.567.648	2.988.598.499.216	3.206.806.158.899	3.296.895.620.794
1	Belanja Pegawai	1.988.659.985.466	1.785.674.042.109	1.944.362.929.004	2.163.930.782.176	2.207.209.397.819
2	Belanja Bagi Hasil	203.154.196.115	157.385.248.029	210.492.145.819	184.734.548.541	204.083.878.957
3	Belanja Transfer	445.963.872.794	428.120.352.718,00	449.526.370.354	472.002.688.872	495.602.823.315
4	DAK	363.728.692.428	380.412.924.792	384.217.054.039	386.138.139.310	389.999.520.703
II	Prioritas II Belanja Modal Pelayanan Dasar	2.213.438.750.889	1.942.782.737.860	2.134.320.415.352	1.804.717.402.592	1.689.247.492.746
1	pendidikan (20%)	681.058.077.197	597.779.303.957	656.713.973.955	555.297.662.336	519.768.459.307
2	kesehatan (10%)	340.529.038.598	298.889.651.978	328.356.986.977	277.648.831.168	259.884.229.653
3	Pemulihan Ekonomi (5%)	170.264.519.299	149.444.825.989	164.178.493.488	138.824.415.584	129.942.114.826
4	Infrastruktur (25%)	851.322.596.496	747.224.129.947	820.892.467.444	694.122.077.920	649.710.574.134
5	Peningkatan SDM (0.5%)	170.264.519.299	149.444.825.989	164.178.493.488	138.824.415.584	129.942.114.826
III	Prioritas III Belanja Urusan Lainnya	1.191.851.635.096	1.046.113.781.928	1.149.249.454.426	971.770.909.090	909.594.803.791
IV	Pembiayaan Pengeluaran	30.000.000.000			27.200.000.000	
1	Pembentukan Dana Cadangan					
2	Pembiayaan Pokok Utang					
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.000.000.000			27.200.000.000	
4	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya					
TOTAL (I+II+III+IV)		6.436.797.132.788	5.740.489.087.436	6.272.168.368.994	6.010.494.470.581	5.895.737.917.331

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD, atau RPJPD). Adanya *gap* ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang dijabarkan berdasarkan kondisi umum yang telah disampaikan dalam bab II serta perkembangan atau evaluasi atas target-target kinerja RPJMD sebelumnya yang menjadi prioritas penanganan. Beberapa permasalahan yang disampaikan merupakan kondisi yang masih menjadi fokus pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023, serta terjadinya kondisi di luar dugaan yaitu pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pandemi ini telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan sehingga menimbulkan dampak permasalahan di berbagai sektor di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023, mengingat target pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan penganggaran. Berikut adalah 5 (lima) kelompok permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan infrastruktur, dan lingkungan hidup.

4.1.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1.1. Permasalahan Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam Bab II, permasalahan makro pembangunan ekonomi Kabupaten Tangerang adalah bahwa kondisi perekonomian mengalami guncangan akibat dari Pandemi Covid-19 ini. Pandemi Covid-19 berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat, menurunnya pendapatan masyarakat, berkurangnya produksi yang mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja dan pada akhirnya menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Analisis Perekonomian Kabupaten Tangerang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, UMKM dan Koperasi, pariwisata, dan penanaman modal. Terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan kinerja perekonomian cenderung mengalami tekanan dan menghasilkan ketimpangan. Analisis makro permasalahan pembangunan ekonomi sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Analisis Permasalahan Pengembangan Pembangunan Ekonomi

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Perekonomian cenderung mengalami tekanan dan menghasilkan ketimpangan	Kinerja sektor perdagangan mengalami penurunan	Daya saing produk di pasar dunia yang masih relatif rendah
		Kinerja sektor industri terus mengalami penurunan, akibat dari: • Kebijakan relokasi industri ke wilayah lain • Ekonomi lokal belum berkembang • Kelembagaan ekonomi lokal yang lemah • Pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang tutup
	Kinerja Sektor pertanian fluktuatif	Pertanian minim inovasi
		Terjadinya alih fungsi lahan
	Kinerja sektor pariwisata stagnan	Minimnya inovasi pengembangan pariwisata
	Dukungan kepada	kurang optimalnya pembiayaan dari

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) belum optimal	Lembaga keuangan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)
		Kurang optimalnya dukungan promosi kepada KUKM

Sumber: Analisis Tim Penyusun Perubahan RPJMD

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun ke belakang, pembangunan ekonomi Kabupaten Tangerang cenderung mengalami tekanan yang berdampak pada ketidakmerataan pendapatan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Tekanan itu bersumber dari perkembangan sektor-sektor ekonomi yang terus mengalami pergeseran sejalan dengan perkembangan ekonomi dalam lingkungan Nasional maupun global. Sektor industri pengolahan yang menjadi motor dari perkembangan ekonomi dan menjadi sumber lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Tangerang perannya semakin turun, demikian juga dengan pertumbuhannya.

Selama periode 2015-2019 berdasarkan PDRB harga berlaku, struktur ekonomi Kabupaten Tangerang didominasi dari kelompok lapangan usaha sekunder. Selama kurun waktu 2015-2019 tersebut, terlihat adanya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019, kelompok lapangan usaha sekunder memberikan sumbangan sebesar 53,41 persen yang mengalami penurunan terus menerus dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 57,02 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan tersier memberikan sumbangan pada tahun 2019 masing-masing sebesar 6,54 persen dan 40,05 persen. Kelompok lapangan usaha tersier ini mengalami kenaikan terus menerus dibandingkan pada tahun 2015. Namun untuk kelompok primer, terjadi kenaikan hanya sampai tahun 2016, dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan.

Bila dilihat dari sumbangan sektoralnya pada tahun 2019, 3 (tiga) sektor penyumbang terbesar adalah dari sektor industri pengolahan (35,22 persen), konstruksi (14,7 persen), dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (11,56 persen). Sektor industri pengolahan terus menerus mengalami penurunan dari tahun 2015, sedangkan sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terus menerus mengalami kenaikan dari tahun 2015.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 sedikit menurun dibanding tahun 2018. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2019 mencapai 5,88 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,93 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha *Real Estate* sebesar 9,98 persen. Seluruh lapangan usaha ekonomi yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas.

Sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 bertumpu pada sektor industri pengolahan (1,34 persen), sektor konstruksi (1,14 persen), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (0,89 persen) dan sektor *Real Estate* (0,84 persen).

Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan pada struktur perekonomian di Kabupaten Tangerang. Beberapa sektor terdampak langsung dan menyebabkan menurunnya kontribusi pada pembentukan PDRB tahun 2020. Diantara sektor-sektor yang diperkirakan terdampak dari pandemi adalah sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan dan sektor jasa lainnya (termasuk kegiatan hiburan). Berdasarkan data BPS pada triwulan ke-3, pertumbuhan ekonomi Indonesia (y-o-y) mencapai -3,49 persen, sedikit lebih baik dari triwulan ke-2 yang mencapai -5,32 persen. Indonesia masuk jurang resesi, sehingga berdampak pada kondisi struktur perekonomian di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi sampai akhir tahun 2020, jumlah perusahaan besar yang tutup ada sebanyak 24 perusahaan[16]. Dampak langsung tutupnya perusahaan tersebut adalah meningkatnya angka pengangguran. Diperkirakan sebanyak 31.728 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penyebab utama perusahaan tersebut tutup adalah karena kegiatan ekspor terhambat karena produk tidak dapat dikirim keluar negeri akibat dari kebijakan negara tujuan yang sedang “lockdown” atau ditutup

[16] https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591287316/sepanjang-2020-puluhan-perusahaan-di-kabupaten-tangerang-tutup-disnaker-ungkap-penyebabnya

sementara. Selain itu, untuk mengurangi biaya produksi, beberapa perusahaan memilih pindah dari Kabupaten Tangerang ke daerah lain.

Dampak covid-19 juga terasa pada nelayan di Kabupaten Tangerang. Pendapatan nelayan menurun drastis akibat dari menurunnya tingkat permintaan hasil ikan laut dari restoran dan hotel yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Menurunnya pendapatan juga di sebabkan musim dan pengaruh penyakit[17].

Tingkat ketimpangan pengeluaran/pendapatan penduduk yang diukur dengan Indeks *Gini Ratio* menunjukkan kecenderungan meningkat bila dibandingkan antara tahun 2016 dan tahun 2019. Pada tahun 2016 sebesar 0,32 dan pada tahun 2019 sebesar 0,34. Kondisi ini berhubungan lurus dengan kenaikan PDRB per kapita. Artinya kenaikan PDRB per kapita tidak serta merta menyebabkan ketimpangan menurun, bahkan sebaliknya menjadi lebih melebar.

Ketimpangan ini bersumber dari dua aspek, pertama dikarenakan tidak berkembangnya sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian yang relatif kecil dan sumbangan ke sumber pertumbuhan juga cenderung menurun. Sebagai daerah yang berkembang ke arah industri, permintaan lahan untuk industri cukup tinggi, akibatnya lahan-lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan industri, sedangkan lahan pertanian bergeser ke tanah yang lebih marginal. Selain itu posisi Kabupaten Tangerang sebagai penyangga ibukota menyebabkan Kabupaten Tangerang harus menyiapkan kebutuhan, di antaranya konstruksi dan perumahan.

Penyebab lain dari ketimpangan adalah produktivitas tenaga kerja antara sektor padat karya dan sektor padat modal. Sektor padat karya cenderung pendapatannya lebih kecil daripada sektor padat modal. Hal ini berdasarkan perkembangan tren investasi di sektor padat modal dibandingkan dengan investasi di sektor padat karya[18]. Ketimpangan pendapatan yang meningkat juga diakibatkan karena porsi pembangunan ekonomi ke sektor informal/UMKM belum maksimal.

Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai ‘sokoguru’ perekonomian dan pengembangan

---

[17] https://banten.idntimes.com/news/banten/candra-irawan-2/terdampak-covid-19-nelayan-di-tangerang-terancam-gulung-tikar/3

[18] Buku Profil Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019 hal. 53

usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan yang kemudian muncul dalam sektor usaha kecil menengah dan koperasi adalah inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah, keterbatasan jaringan pasar industri kecil dan kemitraan, serta akses modal.

Pada tahun 2020, *Gini Ratio* menunjukkan angka 0,285 yang menunjukkan penurunan cukup signifikan dibanding tahun – tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa di tengah kondisi pandemi, ketimpangan di Kabupaten Tangerang justru semakin menipis.

4.1.1.2. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam Bab II, permasalahan pokok pembangunan bidang tata kelola pemerintahan adalah kinerja pemerintahan daerah yang masih belum optimal. Beberapa indikator kinerja pemerintah berikut dapat menjelaskan hal ini. Pertama nilai peringkat capaian SAKIP Kabupaten Tangerang meningkat dari B pada tahun 2018 menjadi BB pada tahun 2019, namun nilai ini masih di bawah nilai ideal yaitu AA. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan sudah meningkat namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Kinerja pemerintahan daerah yang belum optimal.	Kinerja akuntabilitas pemerintahan daerah belum optimal	Kinerja Pengawasan belum maksimal
		Manajemen SDM aparatur belum optimal
		Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum optimal
	Kualitas Pelayanan Publik belum optimal	*E-Government* belum terintegrasi
		Kualitas Aparatur yang belum merata
		Adanya Regulasi yang belum terbarukan

Sumber: Analisis Tim Penyusun Perubahan RPJMD

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada dua (2) permasalahan mendasar yang menyebabkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tangerang belum optimal, yaitu kinerja akuntabilitas pemerintah daerah yang belum optimal dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Penilaian terhadap evaluasi kinerja dikategorikan masih kurang karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang belum secara optimal dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi terhadap unit kerja. Perencanaan kinerja dikategorikan cukup memadai karena dokumen perencanaan kinerja yang belum selaras, sehingga target kinerja yang diperjanjikan tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan. Begitu pula dalam penyusunan perencanaan masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

a. Ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan seperti tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja utama yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target
b. Ketepatan menentukan target-target jangka pendek dan jangka panjang. Ketepatan dan keselarasan penjabaran tujuan dan sasaran oleh setiap satuan kerja ke dalam perjanjian kinerja disertai dengan target-targetnya serta sistem pengukurannya

Pelaporan kinerja dikategorikan baik, namun dalam implementasinya, hasil pelaporan kinerja ini belum digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan berikutnya. Sedangkan untuk pencapaian sasaran/kinerja organisasi sudah dikategorikan sangat baik. Apabila ditinjau dari hasil penilaian Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Nilai AKIP), meskipun belum maksimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 yang semula hanya 61,87 menjadi 70,75 di tahun 2020.

Sementara itu, kinerja pengawasan yang belum maksimal juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kinerja akuntabilitas pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang. Nilai maturitas SPIP pada tahun 2019 pada level terdefinisi yaitu 3,0811 yang meningkat dibanding tahun 2018 dengan nilai 3,0602. Ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah berupaya meningkatkan pengendalian intern dengan baik, namun belum mencapai kategori terkelola dan terukur, maupun kategori optimum.

Selanjutnya pada tahun 2020, Kabupaten Tangerang memiliki hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini konsisten telah dicapai oleh Kabupaten Tangerang dalam dua belas tahun terakhir. Namun masih ada catatan dari BPK yang harus di dilengkapi untuk mengoptimalkan akuntabilitas LKPD Kabupaten Tangerang.

Selain itu, masalah kedua yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dapat diketahui salah satunya melalui penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selama lima tahun terakhir, angka Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tangerang selalu meningkat, dari 71,25 pada tahun 2015 menjadi 83,66 pada tahun 2019, pada tahun 2020, Kembali meningkat hingga 86,36. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya peningkatan pelayanan publik sudah ada, namun masih harus lebih ditingkatkan karena nilainya masih di bawah 90%.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap pelayanan publik adalah pemerataan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Tangerang pada setiap OPD. SDM pemerintah merupakan salah satu motor penggerak dalam pembangunan bidang tata kelola pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang. Apabila dilihat komposisi kualifikasi pendidikan ASN tahun 2020 di Kabupaten Tangerang yang didominasi oleh aparatur berpendidikan sarjana sebesar 60,58%, disusul S2 sebesar 9,82%, D4 sebanyak 7,2%, dan D3 sebanyak 3,4%, maka dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan aparatur sudah memadai. Secara kualitas dan kuantitas masih dapat memenuhi tuntutan beban pekerjaan di Kabupaten Tangerang. Namun permasalahannya adalah penempatan ASN nampaknya belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga belum semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai target yang ditentukan. Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan belum secara optimal digunakan sebagai dasar dalam penataan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Di samping itu, komposisi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Kabupaten Tangerang masih didominasi oleh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, sedangkan JFT lainnya masih sangat rendah. Di sisi lain kebutuhan untuk jenis JFT lainnya sangat diperlukan. Hal ini

mengindikasikan bahwa manajemen SDM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang perlu untuk ditingkatkan, yang selanjutnya diharapkan akan mempengaruhi akuntabiitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang.

Selain itu, akar masalah yang berpengaruh terhadap pelayanan publik adalah terkait teknologi yang mendukung pelayanan publik pada setiap OPD yang belum terintegrasi. Dalam hal ini adalah *e-government* yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tangerang masih terlokalisasi pada organisasi perangkat daerah belum terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam melayani masyarakat. Saat ini aplikasi sistem informasi daerah yang dikelola perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Tangerang sebanyak 35 aplikasi, namun pelaksanaannya masih secara parsial dan belum terintegrasi. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya di bidang layanan teknologi informasi dan infrastruktur. Sementara proses perizinan *offline* juga belum sepenuhnya dijalankan secara *online*, hingga saat ini baru 17 jenis perijinan yang dapat dilakukan secara *online* dari jumlah seluruh perijinan yang diselenggarakan sebanyak 62 perijinan. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan publik tidak berjalan dengan optimal sehingga kinerja pemerintah daerah menjadi terhambat. Dengan berbagai perubahan yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi, Kabupaten Tangerang secara perlahan tapi pasti menunjukkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi sejak tahun 2018 yang semula menunjukkan nilai 53 atau masuk ke dalam kategori CC awal menjadi 58,39 atau menuju CC pertengahan menuju B.

Hasil FGD dengan OPD Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik adalah regulasi yang belum *up to date* sesuai perkembangan masyarakat dan belum sinkron antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Hal ini dapat menghambat pelayanan yang diberikan pemerintah kabupaten Tangerang terhadap masyarakat.

4.1.1.3. Permasalahan Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada Bab II, masalah pembangunan pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup adalah ketimpangan wilayah. Bidang ini meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, serta

perhubungan. Adapun analisis permasalahan pembangunan ekonomi sebagaimana disajikan dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3 Analisis Permasalahan Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Ketimpangan Wilayah	Belum meratanya sistem jaringan jalan yang andal	Pertumbuhan pemukiman jauh lebih cepat dari kemampuan daerah untuk menyediakan akses jalan
	Ketimpangan aksesibilitas dan transportasi wilayah	Pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat
		Ketersediaan transportasi publik tidak merata
	Belum optimalnya penanganan perumahan dan permukiman	Adanya pemukiman baru yang dibuat oleh migran pada area yang bukan diperuntukkan pemukiman.
		Sarana dan prasarana lingkungan mengalami percepatan kerusakan akibat kelebihan beban dan bencana banjir
		Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mandiri belum merata di semua kawasan
	Penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang belum optimal	Meningkatnya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur pengelolaan sampah.
		Maraknya aktivitas industri yang mencemari lingkungan

Sumber: Analisis Tim Penyusun Perubahan RPJMD

Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang cukup luas dengan jaringan jalan yang cukup panjang. Hal ini membuat pengawasan terhadap kondisi jaringan jalan perlu diperhatikan dan ditangani dengan maksimal terutama di pusat perekonomian yang memiliki volume lalu lintas cukup padat. Kepadatan lalu lintas akan menimbulkan kemacetan di beberapa titik, baik jalan Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten. Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan SDA, kondisi jalan dengan

kategori baik pada tahun 2020 adalah 57,35%, dengan kondisi sedang 30,20% dan kondisi rusak dan rusak berat 12,42%.

Tabel 4.4 Kondisi Jalan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020

Kondisi Jalan	2017	2018	2019	2020
Baik	819,35	725,01	566,25	569,28
Sedang	90,49	217,52	312,75	299,79
Rusak	33,53	42,22	92,04	98,96
Rusak Berat	49,23	7,64	21,57	24,58

Sumber : DBMSDA Kabupaten Tangerang, 2021

Dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tangerang yang cukup tinggi, penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya semata-mata memperbaiki rumahnya saja, akan tetapi juga menata kawasan permukiman yang sehat dan pemenuhan sarana sanitasinya. Terjadi penurunan luas kawasan permukiman kumuh setiap tahunnya di Kabupaten Tangerang yang disebabkan oleh karena berjalannya program Gebrakpakumis. Pada tahun 2019, luas kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang adalah 234,66 Ha. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu 324,58 Ha. Hasil verifikasi terakhir tahun 2020 luas Kawasan kumuh yaitu 688,823 Ha, adanya peningkatan luas Kawasan kumuh karena adanya penyesuaian variable kriteria penentuan Kawasan kumuh.

Sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang berada di pesisir pantai dan daerah sekitar aliran sungai memiliki potensi bencana banjir, sehingga perlu tindakan pencegahan dan penanganan yang serius. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pencegahan bencana banjir adalah terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Setiap tahunnya, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah yang ada. Jumlah produksi sampah tahun 2019 meningkat menjadi 906.425 ton, di mana pada tahun 2018 adalah sebanyak 831.967 ton. Di sisi lain, jumlah sampah yang ditangani di kabupaten

Tangerang meningkat namun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan meningkatnya jumlah sampah, yaitu dari 334.735 ton di tahun 2018 menjadi 333.141 ton di tahun 2019. Sehingga, timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2019 hanya mencapai 36,75% dari total timbulan sampah. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 40,23%. Hingga tahun 2020 volume sampah yang tertangani adalah 24,63%

Rendahnya jumlah sampah yang ditangani disebabkan oleh minimnya infrastruktur pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tangerang. Salah satu minimnya infrastruktur pengelolaan sampah ditunjukkan dengan belum ada peningkatan jumlah areal pengelolaan sampah dari 3 tahun terakhir (2017-2019). Berdasarkan data dari Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah stagnan pada angka 941 km^2. Selain itu, Kabupaten Tangerang hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir, yaitu TPA Jatiwaringin dengan luas lahan 18 Ha. Kondisi ini tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah atau menampung volume sampah yang ada karena disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah infrastruktur yang kurang memadai seperti akses masuk ke TPA dan teknologi pengelolaan sampah yang masih *open dumping*.

Selain sampah, aktivitas industri yang pesat di Kabupaten Tangerang juga dapat mengganggu kestabilan ekosistem lingkungan hidup. Kabupaten Tangerang terkenal sebagai daerah seribu industri, di mana per tahun 2017 menurut DLHK, tercatat 4.965 industri yang tersebar baik di kawasan maupun zona industri. Mayoritas industri sekitar ± 53,5% merupakan industri pengolahan dengan jumlah 2.657 industri, dan sebanyak 613 industri berada di sepanjang DAS. Hal ini mengindikasikan adanya potensi eksternalitas negatif berupa pencemaran DAS oleh aktivitas industri pengolahan. Pada periode pemantauan tahun 2018[19] berdasarkan BAB II, status titik cemar sungai di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Sungai Cimanceuri mempunyai status 2 titik cemar ringan, 7 titik cemar sedang dan 2 titik cemar berat.
2. Sungai Cidurian mempunyai status 3 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat.

[19] Profil Daerah Kabupaten Tangerang, 2019

3. Sungai Cisadane mempunyai status 4 titik cemar ringan, 6 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat.
4. Sungai Cirarab mempunyai status 1 titik cemar sedang dan 7 titik cemar berat.

Maka dari itu, pembangunan berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan perlu dijadikan perhatian khusus bagi rencana pembangunan Kabupaten Tangerang.

4.1.1.4. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Analisis atas pengembangan SDM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial serta pemberdayaan perempuan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab II, pada aspek SDM teridentifikasi relatif tertekannya kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang jika dibandingkan dengan Provinsi Banten. Terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan kinerja pembangunan manusia Kabupaten Tangerang tertekan, mulai dari jumlah penduduk miskin, kinerja pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Secara makro, analisis permasalahan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana disajikan dalam tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 5 Analisis Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan sumber daya manusia yang belum optimal	Jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat	Penduduk lokal kalah bersaing dengan penduduk pendatang untuk memperebutkan lapangan kerja
		Relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka
		Perempuan sebagai bagian dari kelompok miskin yang rentan masih kurang berdaya
		Migrasi yang cukup tinggi dengan bekal sumber daya seperti modal dan keahlian/skill yang terbatas menjadikan mereka masyarakat pinggiran
	Peningkatan kinerja pendidikan relatif	Akses dan kualitas sarana pendidikan belum optimal
		Belum meratanya ketersediaan guru

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	rendah	Perubahan metode pembelajaran menjadi daring pada saat pandemi covid-19
	Peningkatan kinerja kesehatan yang relatif rendah	Akses dan kualitas sarana kesehatan belum optimal
		Masih relatif tingginya tingkat penyebaran penyakit menular
		Belum optimalnya layanan kesehatan
		Belum meratanya cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
		Kurangnya tenaga kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan pada saat penanganan pandemi Covid-19
		Masih relatif tingginya kasus *stunting* dan malnutrisi

Sumber: Analisis Tim Penyusun Perubahan RPJMD

Pokok permasalahan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tangerang adalah belum optimalnya tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun angka menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi IPM Kabupaten Tangerang berada pada angka 71,92 masih di bawah IPM Provinsi Banten yang menunjukkan angka 72,45 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan IPM di tingkat nasional, maka IPM Kabupaten Tangerang hanya memiliki selisih tipis lebih rendah karena IPM nasional pada tahun 2020 berada pada angka 71,94. Pertumbuhan capaian angka IPM yang relatif lambat dibandingkan Provinsi Banten itu bersumber dari kontribusi daya beli yang peningkatannya sangat kecil. Pertumbuhan daya beli yang rendah itu terkait dengan perkembangan sektor yang terjadi. Sektor penyerap tenaga terbanyak memiliki nilai produktivitas yang relatif rendah, dengan demikian penduduk yang bekerja pada sektor bersangkutan (pertanian dan akomodasi, konsumsi) juga memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah. Inilah alasan mengapa pertumbuhan daya beli yang dicapai Kabupaten Tangerang relatif rendah. Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita yang disesuaikan hanya meningkat sebesar 1,36% dan menurun pada tahun 2017 menjadi 0,5%. Pada tahun 2018 –

2019 berhasil meningkat kembali meskipun peningkatannya rendah, hanya mencapai 2,65% dan 2,97%. Rendahnya daya beli ini teridentifikasi dengan jelas pada masih stagnannya jumlah penduduk miskin. Selain itu, terjadinya pandemi Covid – 19 pada tahun 2020 semakin memperburuk kemampuan daya beli rata-rata penduduk Kabupaten Tangerang hingga mencapai angka -2,73% di tahun 2020 (lihat gambar 2.23).

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah mencerminkan tingkat pendapatan penduduk. Hal ini dikarenakan semakin banyak penduduk dengan pendapatan rendah maka semakin banyak penduduk dengan kemampuan rendah untuk mensejahterakan dirinya sehingga disebut miskin.[20] Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 mencakup 6,23 persen dari total penduduk. Bila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan tingkat Nasional, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Tangerang masih lebih rendah dari Provinsi Banten (6,63 persen), meskipun lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan di level nasional (10,19 persen). Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tangerang ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 5% dikarenakan dampak pandemic Covid – 19 yang berlangsung selama tahun 2020 dan masih terus berlangsung hingga 2021. Padahal, kondisi tahun 2015 – 2019 mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan penduduk di Kabupaten Tangerang relatif masih memerlukan perbaikan dan peningkatan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan mengenai kemiskinan juga sekaligus hendaknya dapat diarahkan untuk mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2).

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 adalah sebesar 0,95. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tangerang tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap batas kemiskinan mengalami kondisi penurunan dikarenakan pandemic Covid - 19, karena angkanya semakin membesar dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 0,69. Demikian

[20] Suryawati, Teori Ekonomi Mikro, UPP, AMP YKPN, Jarnasy, Yogyakarta, 2004

juga bila dilihat dari tingkat keparahan kemiskinan, di mana Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tangerang sebesar 0,22 di tahun 2020 yang meningkat dibandingkan tahun 2019 yang masih mencapai 0,14.

Penyebab dari penduduk miskin itu tentu sangat banyak, dari analisis yang dilakukan setidaknya teridentifikasi beberapa di antara penyebab kemiskinan itu adalah tingkat pengangguran[21], lemahnya pemberdayaan perempuan[22], dan migrasi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang selalu dalam keadaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten dan angka Nasional. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Tangerang berada pada 13,06%. sedangkan Banten sebesar 10,64% dan Nasional 7,07%. Salah satu hal yang dapat menjelaskan kondisi ini adalah sifat dan karakter investasi yang terjadi. Karakter investasi yang tumbuh pesat di Kabupaten Tangerang adalah investasi padat modal. Investasi padat modal adalah investasi yang berskala besar yang biasanya menggunakan lebih banyak mesin atau peralatan dibandingkan tenaga kerja manusia. Karakter investasi ini mampu menciptakan nilai tambah dengan cepat sehingga menciptakan pertumbuhan yang tinggi, namun demikian sifat investasi yang demikian cenderung kurang memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja.[23] Selain itu, peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan terjadi di tahun 2020 disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid – 19. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan melakukan putus hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pekerjanya, hingga bahkan ada yang gulung tikar. Peningkatan pengangguran di Kabupaten Tangerang akibat pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat pengangguran di Kabupaten Tangerang menjadi yang tertinggi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 13,06%. Berdasarkan informasi sampai akhir tahun 2020, jumlah perusahaan besar yang tutup ada sebanyak 24 perusahaan[24]. Dampak langsung tutupnya perusahaan tersebut adalah meningkatnya angka pengangguran. Diperkirakan sebanyak 31.728 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)[25].

---

[21] Ratih Probosiwi, Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan Unemployment and Its Influence on Poverty Level, Jurnal PKS Vol 15 No 2 Juni 2016; 89 - 100

[22] Ahmad, et.al,, Fenomena Kemiskinan Dari Perspektif Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin, Wacana Vol. 18, No. 4 (2015), ISSN : 1411-0199

[23] Buku Profil Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019 hal. 53

[24] https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591287316/sepanjang-2020-puluhan-perusahaan-di-kabupaten-tangerang-tutup-disnaker-ungkap-penyebabnya

[25] *Ibid*

Sedangkan jika dilihat menurut jenis kelamin, data tahun 2019 TPT laki-laki sedikit lebih rendah dibandingkan perempuan, di mana TPT laki-laki sebesar 8,57 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 9,1 persen. Kondisi ini salah satunya diakibatkan oleh relatif masih rendahnya kesempatan perempuan dibanding laki-laki, sehingga kalah bersaing dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja.[26] Selain itu, terdapat pula perempuan yang memilih untuk tidak bekerja dengan berbagai alasan.

Oleh karena itu, perempuan adalah salah satu dari kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan.[27] Fakta bahwa banyak keluarga miskin yang berkepala keluarga perempuan adalah bukti dari kerentanan itu. Pada aspek ini yang dibutuhkan tentu adalah pemberdayaan terhadap para perempuan, utamanya perempuan yang masuk kategori miskin.

Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar PDRB, yaitu sebesar 35,22% (tahun 2019) berhasil memberikan daya tarik luar biasa bagi penduduk di luar Kabupaten Tangerang untuk melakukan migrasi. Jumlah penduduk terbanyak Kabupaten Tangerang berada pada kisaran umur 25-29 tahun yaitu sebesar 300.666 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 152.900 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 148.576 jiwa. Hal ini dapat menjadi potensi pembangunan, akan tetapi bila kapasitas usia produktif tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar maka akan menjadi beban pembangunan. Jika ditelusuri lebih dalam, maka terlihat bahwa orang yang menganggur didominasi oleh penduduk lokal, artinya penduduk lokal memiliki daya saing yang relatif lemah dibandingkan penduduk migran pada saat masuk ke pasar tenaga kerja.

Dalam hal pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, rata-rata lama sekolah sebagai indikator akhir dari kinerja pendidikan menunjukkan kinerja yang belum optimal. Pada aspek teknis pendidikan terdapat dua penyebab yang teridentifikasi yakni tidak meratanya sarana dan prasarana juga tenaga pendidik. Akibat dari keterbatasan kedua aspek ini maka peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah juga menjadi relatif lambat (lihat hal. 80).

---

[26] Diakses melalui https://ekonomi.bisnis.com/read/20200928/9/1297727/ketimpangan-gender-kemiskinan-perempuan-lebih-tinggi-hampir-di-semua-daerah pada tanggal 3 Desember 2020

[27] Diakses melalui https://theconversation.com/di-indonesia-analisis-ungkap-perempuan-miskin-yang-paling-menderita-selama-pandemi-covid-19-146676 pada tanggal 3 Desember 2020

Sementara itu, hal lain yang menjadi perhatian adalah pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang turut membuat kinerja pendidikan menjadi relatif lebih rendah. Hal ini dikarenakan untuk menghindari penyebaran COVID-19, Pemerintah Pusat maupun Daerah memutuskan proses belajar mengajar yang tadinya tatap muka menjadi daring atau *online*. Perubahan metode pembelajaran menjadi daring tersebut menjadi tantangan tersendiri karena munculnya berbagai kendala, antara lain masih kurangnya pemahaman guru dan siswa dalam penggunanaan teknologi, dibutuhkan perangkat pendukung (laptop, ponsel dsb untuk mengakses aplikasi yang digunakan sekolah), serta belum meratanya akses jaringan internet, sehingga terdapat kekhawatiran proses belajar mengajar menjadi tidak optimal dan hasil yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan[28].

Pada bidang kesehatan, kinerja yang diukur dari angka harapan hidup yang peningkatannya juga relatif rendah jika dilihat pada kurun waktu tahun 2011 – 2020 (lihat gambar 2.35). Rendahnya capaian kinerja angka harapan hidup terkait dengan kinerja kesehatan secara keseluruhan. Penyebaran penyakit menular di Kabupaten Tangerang juga perlu mendapat perhatian, yakni persebaran penyakit menular seperti Tuberculosis dan HIV Aids yang sudah menjadi agenda tahunan Kabupaten Tangerang seperti yang telah dijelaskan di bab 2 dan tentunya Covid – 19 yang saat ini menjadi penyakit menular dengan persebaran yang cepat dan luas di 25 kecamatan di Kabupaten Tangerang[29].

Isu kesehatan lain yang perlu diperhatikan adalah kasus *stunting* dan malnutrisi anak di Kabupaten Tangerang. *Stunting* adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya, sedangkan malnutrisi adalah kekurangan nutrisi dalam tubuh.[30] Kondisi anak dengan gizi buruk dan malnutrisi di Kabupaten Tangerang sebenarnya telah mengalami tren penurunan dari tahun 2016 – 2018. Namun demikian, pada tahun 2018, masih terdapat 0,33% balita dengan gizi buruk dan 2,85% balita dengan kondisi malnutrisi. Kondisi ini masih perlu menjadi perhatian karena balita dengan gizi buruk berdasarkan data dari status

---

[28] Diakses melalui https://kumparan.com/ulfa-hikmah/tantangan-pembelajaran-daring-ditengah-pandemi-covid-19-1tyWr4BZkCe/full

[29] Diakses melalui https://covid19.tangerangkab.go.id/ pada tanggal 2 Desember 2020

[30] Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester I 2018, Pusdatin Kemenkes RI, ISSN 2088 – 270 X

gizi nasional (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau yang disebut e-PPGBM) per Agustus 2020 menunjukkan angka 2% dan masih terdapat 20.425 balita dengan kasus *stunting* di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten dengan kasus *stunting* tertinggi di provinsi Banten[31]. Kondisi yang sama juga terjadi dengan kasus *wasting*, jumlah balita dengan kasus *wasting* yang ada di Kabupaten Tangerang per Agustus 2020 mencapai 13.716 balita dan jumlah ini menjadi yang tertinggi dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Banten[32]. Sementara itu, kasus *underweight* di Kabupaten Tangerang juga tidak jauh berbeda kondisinya. Per Agustus 2020, masih terdapat 13.388 balita dengan kasus *underweight*, dan jumlah ini juga menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Banten[33].

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat I masih harus terus dilengkapi sarana dan prasarananya karena dari 44 Puskesmas yang tersedia, baru 7 puskesmas yang memiliki fasilitas Rawat Inap[34], sehingga pasien masih harus dirujuk ke Rumah Sakit.

Jumlah sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan klinik di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dikarenakan sebagian rumah sakit dan klinik tutup akibat habis masa berlaku dan ada pula penambahan dengan pembangunan rumah sakit dan klinik baru[35]. Sayangnya, kondisi ini belum cukup untuk mencakup kebutuhan kesehatan di Kabupaten Tangerang. Keterbatasan sarana berakibat kurang optimalnya penanganan penyakit terutama dengan kondisi pandemi Covid – 19 yang membutuhkan kapasitas ruang perawatan yang lebih banyak (ruang isolasi, icu), sarana pendukung medis seperti ketersediaan alat tes kesehatan dan Covid-19, laboratorium, dsb.

Cakupan layanan di bidang kesehatan lain yang perlu menjadi perhatian Kabupaten Tangerang adalah terkait jaminan kesehatan penduduk Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data tahun 2018 – 2019, terlihat bahwa persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

---

[31] Diakses melalui https://sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id/ppgbm/index.php/Dashboard/ pada tanggal 1 Desember 2020
[32] *Ibid*.
[33] *Ibid*.
[34] Diakses melalui https://komdat.kemkes.go.id/baru/index_rpt.php?folder=dashboard/reports&pg=rptPkmListPuskesmas&kode_kabupaten=3603 pada tanggal 2 Desember 2020
[35] Buku Profil Kabupaten Tangerang Tahun 2019

di kabupaten Tangerang masih relatif rendah walaupun menunjukkan peningkatan, yang mana peningkatan cakupan jaminan kesehatan belum mencakup sebagian besar dari total penduduk Kabupaten Tangerang. Menurut data dari Buku Profil Kabupaten Tangerang tahun 2019, 20,80% penduduk sudah terdaftar BPJS Kesehatan PBI, kemudian 34,24% penduduk terdaftar melalui BPJS Kesehatan Non-PBI. Lalu terdapat 0,52% penduduk yang masih menerima Jamkesda dan 7,53% penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan dari kantor tempatnya bekerja.

Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Tangerang masih perlu untuk meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan bagi penduduknya serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Tangerang.

4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Selanjutnya berbagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai kewenangan urusan di Kabupaten Tangerang dapat diidentifikasi sebagai berikut berikut ini:

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan utama di bidang pendidikan adalah kualitas dan kompetensi guru dan tenaga pendidikan masih rendah disebabkan banyak tenaga pendidik yang ditempatkan di sekolah-sekolah negeri sebagian besar adalah guru honorer sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Adapun penunjukan guru PTT untuk mata pelajaran yang belum memenuhi kualifikasi disebabkan perbedaan latar belakang Pendidikan dengan penugasan mengajar materi pelajaran. Ditambah dengan besaran tunjangan (insentif) yang relatif lebih rendah dibandingkan guru yang berstatus ASN. Sehingga hal tersebut membutuhkan perhatian dalam rangka peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik yang berstatus PTT, selain itu diperlukan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Permasalahan lainnya adalah kuantitas (jumlah) tenaga pendidik yang berstatus ASN masih kurang, terutama yang bertanggung jawab mengurusi manajemen sekolah seperti kepala sekolah dan khususnya SDM yang mengelola dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Minimnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan seperti kapasitas sekolah yang kurang merata, akses jaringan internet untuk mendukung pembelajaran yang masih belum merata.

Kendala lainnya adalah angka rata-rata lama sekolah belum mencapai sembilan tahun karena penduduk yang berusia tua yang dahulu tidak sempat sekolah jumlahnya relatif banyak, sehingga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Selain itu, belum terdapat data yang akurat untuk jumlah anak putus sekolah yang membuat program paket C kurang optimal. Isu lainnya yang dihadapi adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat perubahan metode pembelajaran menjadi daring, di mana tidak semua peserta didik mendapat mengakses jaringan internet dan gawai dengan mudah. Selain itu, kebijakan zonasi yang sampai dengan saat ini masih menjadi pro dan kontra.

2. Kesehatan

Permasalahan utama di bidang kesehatan adalah masih minimnya ASN administrasi di bidang kesehatan, terutama bagian pengelola BPJS dan administrator rumah sakit, sehingga dilakukan oleh ASN tenaga kesehatan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Isu kesehatan lain yang dihadapi oleh Kabupaten Tangerang adalah terkait kurangnya sarana dan prasarana pendukung sektor kesehatan yang memadai seperti peralatan yang dibutuhkan untuk penyakit khusus (jantung, ginjal), selain itu masih kurangnya RS rujukan dan jumlah ruang isolasi yang memadai jika terdapat kasus COVID-19.

Selain itu, masih ditemukan kasus *stunting* dan malnutrisi di beberapa wilayah dan belum meratanya cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat terkait pengurusan administrasi untuk jaminan kesehatan (BPJS).

Adanya perubahan Kebijakan Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan baru disosialisasikan pada bulan April 2019 juga menjadi salah satu isu di bidang kesehatan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menyusun strategi untuk melaksanakan pelayanan mengikuti peraturan SPM yang terbaru.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Permasalahan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

   1. Terdapat banyak ruas jalan yang dilewati oleh kendaraan yang tonasenya melebihi kapasitas yang ditentukan. Sehingga, hal tersebut dikhawatirkan membuat jalan menjadi lebih cepat rusak.
   2. Alokasi anggaran pemeliharaan jalan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk merehabilitasi jalan yang rusak.
   3. Rasio jalan kabupaten terhadap luas wilayah masih rendah sehingga akses jalan ke daerah pelosok masih terbatas.
   4. Masih terdapat saluran irigasi yang dalam kondisi rusak sehingga mempengaruhi produktivitas di sektor pertanian.
   5. Masih banyak potensi air baku yang belum dimanfaatkan sebagai sumber air bersih secara optimal untuk sektor pertanian, rumah tangga, dan industri.
   6. Cakupan pelayanan PDAM di Kabupaten Tangerang masih belum mencapai target, yaitu hanya 10,5% penduduk Kabupaten Tangerang yang menggunakan PDAM dari target 40%.[36]

4. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman

   Permasalahan yang dihadapi adalah :

   Pelaksanaan rehabilitasi kawasan rumah tidak layak huni atau kumuh masih belum optimal sehingga dibutuhkan keberlanjutan Program Unggulan GEBRAK PAKUMIS (Gerakan Bersama Rakyat, Atasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin).

5. Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

   Permasalahan pada Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

   1. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada.
   2. Belum optimalnya pengawasan pengedaran minuman keras di sektor usaha hiburan.
   3. Penyalahgunaan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk kegiatan usaha.
   4. Belum optimalnya koordinasi penanganan masalah gangguan trantibum dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
   5. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

[36] https://metro.tempo.co/read/1262349/60-persen-warga-kabupaten-tangerang-belum-nikmati-air-bersih

6. Sosial

Permasalahan pada bidang sosial antara lain:

1. Belum optimalnya validasi pendataan terkait pemberdayaan PMKS dan Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

B. Belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana untuk layanan penanganan dan rehabilitasi sosial.

C. Belum optimalnya fasilitas pelindung jaminan sosial perorangan, keluarga korban bencana, dan korban tindak kekerasan pekerja migran serta orang terlantar.

D. Belum optimalnya pemberdayaan PMKS melalui program kelompok usaha bersama (KUBE).

E. Terkait pandemi COVID-19, terdapat masalah pengelolaan atas dana dan barang bantuan karena keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan gudang/fasilitas, dan logistik.

B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan pada bidang Tenaga Kerja antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kualitas tenaga kerja yang ada. Hal ini disebabkan *link and match* antara kemampuan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan masih belum sesuai.
2. Belum sesuainya pelatihan kerja yang disediakan dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Masih tingginya kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang disebabkan oleh perbedaan persepsi pengusaha dan pekerja mengenai peraturan ketenagakerjaan.
4. Terbatasnya lowongan pekerjaan dari perusahaan serta sulitnya untuk mendapatkan informasi data penempatan dari perusahaan.
5. Banyaknya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)

Permasalahan utama dari urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) adalah:

1. Kurangnya SDM petugas penyuluh dan pendamping PPA dan KB untuk menjangkau 29 kecamatan.

2. Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik seperti gedung, mobil pelayanan, rumah data, komputer, dan server.
4. Belum tercapainya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target yang ditentukan oleh provinsi, sehingga perempuan belum memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

3. Pangan

   Permasalahan utama pada urusan pangan adalah belum terpenuhinya kebutuhan air di lahan-lahan pertanian karena tercemarnya sungai Cisadane, Cirarab, Cimanceuri, dan Cidurian oleh sampah dan limbah pabrik[37]. Maka dari itu, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan perlu mendapatkan perhatian untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi masyarakat yang memiliki mata pencarian utama dalam sektor pertanian.

4. Pertanahan

   Permasalahan yang dihadapi pada isu pertanahan adalah:

   1. Terbatasnya lahan yang dimiliki pemerintah daerah untuk membangun fasilitas publik.
   2. Tingginya harga tanah di lokasi strategis sehingga menghambat pemerintah daerah untuk membangun fasilitas pelayanan publik.
   3. Ketidaktepatan penilaian harga tanah oleh penilai yang dimasukkan dalam APBD.

5. Lingkungan Hidup

   Permasalahan utama yang dihadapi di urusan lingkungan hidup adalah:

   1. Belum tersedianya fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang cukup untuk menampung produksi sampah harian.
   2. Belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan sehingga terjadi penumpukkan sampah di TPA Jatiwaringin.
   3. Adanya polusi udara dan pencemaran air dari kegiatan industri, rumah tangga, rumah sakit, dan sebagainya.
   4. Tidak efisiennya pengangkutan sampah dengan metode satuan ritase.

[37] http://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/26490/Empat-Sungai-di-Tangerang-Tercemar

5. Adanya intrusi laut di daerah pesisir sehingga air tanah tidak layak untuk dikonsumsi dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

6. Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil

   Permasalahan utama di urusan kependudukan dan catatan sipil adalah:

   1. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sehingga kinerja pelayanannya masih belum optimal.
   2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kependudukan, seperti gedung arsip, anjungan dukcapil mandiri, mesin e-ktp, ruang konsultasi, ruang server, dan jaringan IT yang disebabkan oleh terbatasnya belanja modal.
   3. Pandemi COVID-19 menyebabkan pelayanan terganggu karena harus mengikuti penerapan protokol kesehatan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

   Permasalahan dari bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

   1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa dikarenakan kinerja lembaga desa masih belum optimal.
   2. Rendahnya kapasitas pelayanan aparatur desa menyebabkan kinerja lembaga masih rendah.
   3. Minimnya informasi yang diserap masyarakat, berdampak pada kurangnya kreatifitas desa memanfaatkan dana desa. Oleh karena itu desa – desa di Kabupaten Tangerang perlu untuk diberi pendampingan.[38] Sayangnya, pendampingan ekonomi desa (BUMDES) yang dilakukan masih belum optimal sehingga dana desa yang digulirkan belum mampu mendongkrak potensi ekonomi desa.
   4. Rendahnya jumlah lembaga kemasyarakatan desa mengakibatkan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan di tingkat desa, seperti perencanaan pembangunan desa dan pelayanan masyarakat desa.

8. Pengendalian penduduk dan KB

   Permasalahan dari bidang Pengendalian Penduduk dan KB adalah:

   1. Adanya kekhawatiran terhadap dampak bonus demografi di tahun 2020-2024 (jumlah pasangan usia subur lebih besar dari lansia) yang dapat mengakibatkan lonjakan jumlah penduduk. Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu untuk lebih memperhatikan laju

[38] Diakses melalui https://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/24720/Desa-di-Tangerang-Harus-Digebrak-Agar-Kreatif pada tanggal 11 Desember 2020

pertumbuhan penduduk agar bonus demografi tetap dapat terpantau dan *fertility rate* dapat terkontrol dengan baik. Salah satunya adalah dengan peningkatan sosialisasi keluarga bencana dan mengoptimalkan jejaring klinik KB terutama di lingkungan yang belum banyak terjangkau layanan masyarakat.

9. Perhubungan

Permasalahan dalam isu perhubungan adalah:

1. Belum efisiennya sistem uji KIR kendaraan sehingga Perlu perubahan sistem uji KIR kendaraan yang lebih efisien, efektif dan pelayanan yang lebih cepat menggunakan sistem informasi terkini.
2. Belum adanya penertiban trayek yang dapat dijadikan satu sistem angkutan umum terpadu agar konektivitas antar daerah menjadi lebih lancar

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang komunikasi dan informatika adalah :

1. Masih rendahnya realisasi cakupan internet di seluruh desa dan kelurahan Kabupaten Tangerang, sehingga akses informasi layanan kepada penduduk juga belum merata.
2. Belum terintegrasinya sistem Dinas Komunikasi dan Informatika dengan data administrasi dan kependudukan yang menyebabkan pencatatan data informasi penduduk belum optimal. Hal ini berimplikasi terhadap belum optimalnya layanan pemerintah untuk penduduk karena ketidaksesuaian data dari sistem yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur IT menyebabkan pelayanan belum optimal, apalagi di tengah pandemi Covid-19, infrastruktur IT sangat diperlukan sebagai salah satu sarana pelayanan masyarakat yang meminimalisir kontak langsung.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM), terutama pada aspek permodalan dan promosi. Hal ini menyebabkan perkembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah terhambat.

2. Belum optimalnya koordinasi antara dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk permodalan UKM sehingga pemanfaatan dana modal belum efisien.

12. Penanaman Modal

Permasalahan terkait urusan penanaman modal adalah:

1. Promosi investasi yang dilakukan belum optimal, dikarenakan informasi potensi dan peluang investasi yang diberikan kurang detail dan tidak memudahkan calon investor dalam mengakses dan mendapatkan informasi tersebut.
2. Regulasi target waktu pelayanan belum maksimal diterapkan. Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian pelaksanaan pelayanan perizinan belum semuanya bisa dijalankan sesuai SOP dan perlu didukung oleh Tim teknis terkait.

13. Pemuda dan Olahraga

Permasalahan utama di bidang Pemuda dan Olahraga adalah:

1. Belum optimalnya cabang olahraga berprestasi di tingkat nasional. Hal ini dikarenakan banyaknya atlet pelajar yang pindah sekolah sehingga mengurangi kekuatan atlet kabupaten dan masih kurangnya penyelenggaraan turnamen cabang olahraga secara keseluruhan. Dari segi keikutsertaan, atlet – atlet Kabupaten Tangerang juga belum secara optimal mengikuti kegiatan perlombaan di tingkat nasional. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh masih kurangnya kompetensi pelatih yang dimiliki Kabupaten Tangerang pada cabang olahraga prestasi.
2. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sarana dan prasarana kepemudaan dan belum efektifnya pembinaan kelompok/organisasi kepemudaan dan kewirausahaan pemuda. Akar masalah dari kondisi ini adalah peran serta lembaga kepemudaan yang belum menyentuh seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Tangerang.

14. Kebudayaan

Permasalahan bidang kebudayaan yang dihadapi adalah belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan SDM yang ada dalam memfasilitasi

pengelolaan seni budaya karena masih kurangnya pemahaman pelaku seni tradisional terhadap perlindungan pengembangan dan pemanfaatan seni budaya.

2. Minimnya sarana dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni menyebabkan pengelolaan sanggar seni yang ada di masyarakat belum optimal.
3. Rendahnya animo masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional ditunjukkan oleh kurangnya pelestarian event masyarakat adat.

15. Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi di bidang perpustakaan adalah:

1. Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar.
2. Masih kurangnya koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten Tangerang.

16. Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi pada bidang kearsipan adalah:

1. Belum Optimalnya Pengelola Kearsipan dan Fungsional Arsiparis di tiap OPD;
2. Sarana dan prasarana kearsipan belum merata di semua kecamatan (*record center*) sehingga pelayanan kearsipan belum optimal;
3. Belum maksimalnya penggunaan Teknologi Informasi Kearsipan;
4. Belum tersedianya Informasi Arsip Statis (Diorama);

C. Pelayanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi di bidang pariwisata adalah:

1. Belum optimalnya sosialisasi dan promosi tentang pariwisata di Kabupaten Tangerang. Apalagi di tengah terjadinya pandemi Covid-19 membuat kegiatan pariwisata terpaksa berhenti untuk sementara waktu. Promosi akan sangat diperlukan untuk upaya bangkit kembali.

2. Pertanian

Permasalahan bidang pertanian adalah:

1. Kurangnya ketersediaan air di lahan-lahan pertanian, misalnya dikarenakan terganggunya irigasi ke lahan pertanian akibat sampah yang menumpuk dan kontaminasi limbah. Salah satu pengairan yang dicemari oleh kontaminasi limbah adalah Kali Cimanceuri.

2. Masih adanya penggunaan benih padi yang tidak bermutu atau belum bersertifikat menyebabkan kualitas produksi padi tidak maksimal dan nilai ekonomis padi menjadi rendah. Hal ini antara lain diakibatkan karena keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk membeli sarana produksi terutama benih/bibit unggul, pupuk kimia, dan pestisida.[39]
3. Penerapan sistem tanam yang masih konvensional dan belum menerapkan sistem *jajar legowo* dikarenakan keterbatasan kemampuan petani dalam penerapan teknologi dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
4. Penggunaan pupuk yang tidak tepat jenis, tidak tepat dosis, dan tidak tepat waktu menyebabkan kualitas padi tidak terjaga dan dapat menurunkan nilai ekonomi padi.
5. Serangan hama dan penyakit tanaman menyebabkan petani menggunakan pestisida kimia untuk mengatasinya. Namun demikian, penggunaan pestisida secara terus menerus menyebabkan hama dan penyakit tanaman semakin kebal terhadap pestisida dan membutuhkan dosis yang terus meningkat. Selain hama dan penyakit tanaman memang mengganggu produksi tanaman dan dapat menimbulkan kerugian gagal panen, kondisi terus meningkatnya dosis pestisida juga akan semakin membebani biaya produksi pertanian.[40] Oleh karena itu, perlu dilakukan intensifikasi lahan dan pengendalian hama penyakit serta peningkatan sarana prasarana pra panen dan pasca panen untuk meningkatan produktifitas, misalnya dengan mulai menggunakan opsi teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dan sistem pengendalian hama terpadu.
6. Anomali iklim.

3. Perdagangan

   Permasalahan yang dihadapi pada sektor perdagangan adalah:

   1. Kurang optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM dan masih minimnya penggunaan Gerai Tangerang Gemilang yang ditujukan sebagai sarana promosi produk UMKM lokal Kabupaten Tangerang.[41]

---

[39] Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023
[40] *Ibid*.
[41] Diakses melalui https://tangerangkab.go.id/disnaker/detail-konten-skpd/show-berita-skpd/1701/2 pada tanggal 2 Desember 2020

2. Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar karena beberapa kendala, seperti masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran konsumen terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen menurut undang – undang dan juga regulasi yang belum mengatur mekanisme detil tentang penyidikan dan aturan pelaksana pengurusan sengketa konsumen[42]
3. Banyaknya kerugian dan menurunnya aktivitas perdagangan karena pandemic Covid-19.

4. Perindustrian

   Permasalahan yang dihadapi di bidang perindustrian adalah:

   1. Masih banyaknya IKM yang belum mempunyai kompetensi *Good Manufacturing Practice (GMP)* menyebabkan banyaknya kegiatan produksi IKM yang tidak memiliki standar yang baik dan berpengaruh pada kualitas produksi yang tidak terjaga. Sertifikasi GMP memiliki manfaat bagi produsen untuk melindungi pangsa pasar, membangun dan memelihara kepercayaan pelanggan, mencapai tujuan perusahaan, mengurangi biaya beban operasional, menjadi pendukung penerapan CPB yang baik. Tidak hanya bagi produsen, manfaat Sertifikasi GMP juga berdampak bagi konsumen, yaitu keselamatan konsumen, meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai produk.
   2. Kondisi pandemi Covid-19 juga mengganggu jalannya kegiatan perindustrian yang bahkan menyebabkan perusahaan gulung tikar dan meningkatnya fenomena putus hubungan kerja (PHK).

5. Transmigrasi

   Permasalahan yang dihadapi di bidang transmigrasi adalah:

   1. Terbatasnya jumlah kuota transmigran yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi.

6. Kelautan dan perikanan

   Permasalahan yang dihadapi di bidang Kelautan dan Perikanan adalah:

   1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan, pembudidaya, maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan. Para nelayan di Kabupaten Tangerang masih menggunakan sistem produksi nelayan dan pembudidaya yang tradisional.

[42] Pardamean Harahap, Hambatan-Hambatan Proses Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Belum Dapat Berjalan Secara Efektif (Studi Kasus Bpsk Kabupaten Tangerang), Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018

2. Rendahnya nilai tambah produk perikanan yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah dan pola pembinaan untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan belum maksimal.[43]

D. Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang

1. Perencanaan pembangunan

   Permasalahan yang dihadapi bidang penunjang fungsi Perencanaan pembangunan adalah:

   1. Koordinasi antar instansi masih kurang maksimal.
   2. Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menerapkan *e-government* dan SIPD yang terintegrasi.

2. Keuangan

   Permasalahan di bidang Keuangan adalah :

   1. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
   2. Penentuan target PAD belum sepenuhnya mencerminkan potensi basis pajak daerah.
   3. Belum optimalnya pembinaan keuangan desa.

3. Kepegawaian

   Permasalahan di bidang Kepegawaian adalah:

   1. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Padahal dari komposisi kualifikasi pendidikan terlihat secara kualitas sudah cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Tangerang
   2. Dari sisi kuantitas, ternyata kondisi di lapangan menunjukkan kurangnya SDM untuk melaksanakan fungsinya, sehingga masih dibantu oleh tenaga honorer atau PTT yang jumlahnya justru melebihi jumlah ASN.
   3. Dalam hal Sistem informasi kepegawaian, sebenarnya sudah terbangun tetapi masih kesulitan meminta setiap pegawai untuk meng-*update* data pribadinya setiap ada perubahan pada sistem

[43] Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023

tersebut sehingga sering kali data kepegawaian tidak dapat disajikan secara akurat/valid.

4. Kondisi Pandemi Covid – 19 menyebabkan perencanaan kegiatan sering terganggu pelaksanaannya atau belum sesuai dengan target realisasi karena proses pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang berlaku.

4. Pengawasan

Permasalahan di urusan Pengawasan adalah:

1. Hasil kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum cukup optimal. Hal ini terlihat dari nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kabupaten Tangerang yang masih pada posisi 1,3148 dengan peringkat maturitas rintisan pada tahun 2016 – 2017. Angka ini kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018-2019, yaitu mencapai 3,0602 dan 3,0811. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah berupaya meningkatkan pengendalian intern dengan baik, namun belum mencapai kategori terkelola dan terukur, apalagi kategori optimum. Angka tersebut menunjukkan tingkat pengawasan di Kabupaten Tangerang masih perlu ditingkatkan.
2. Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan masih belum memadai dibanding dengan jumlah objek pengawasan (Perangkat daerah, desa dan kelurahan, serta objek lainya).
3. Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan juga belum memadai. Capaian kinerja hanya mencapai 80% karena hal yang menjadi temuan tersebut adalah berkaitan dengan masalah aset dan pajak.

4. Sekretariat DPRD

Permasalahan di Sekretariat DPRD adalah :

Belum efektifnya implementasi SOP penetapan peraturan daerah.

5. Sekretariat Daerah

Belum efektif tata kelola pemerintahan

6. Kecamatan

Belum optimalnya pelayanan publik pada masyarakat.

4.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kuesioner terbuka yang telah disebarkan kepada OPD Kabupaten Tangerang, didapatkan hasil isu – isu strategis yang banyak menjadi masukan dalam kuesioner terbuka tersebut. Berikut adalah isu – isu strategis Kabupaten Tangerang yang dilihat berdasarkan keterkaitannya dengan isu internasional, isu nasional, dan isu daerah yang telah didiskusikan melalui FGD berdasarkan 6 tema, yaitu:

A. Isu Internasional

1. SDG's

Pada tahun 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) menyepakati adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang harus dilaksanakan dalam periode waktu 2016-2030. SDGs adalah agenda pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target pembangunan. 17 target tersebut adalah:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua.

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
17. Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan SDGs, melalui Perpres 59 Tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SGDs dengan rencana pembangunan nasional baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada level Pemerintah Daerah, SDGs di daerah harus disesuaikan dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB. Rencana Aksi Daerah TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk

Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB dan melaksanakannya sesuai kewenangan daerah otonom.

2. AFTA (ASEAN Free Trade Area)

Isu strategis internasional yang sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Tangerang adalah AFTA (ASEAN Free Trade Area). Isu strategis ini berkaitan langsung dengan isu perdagangan bebas di kawasan ASEAN yang dilaksanakan tahun 2015 dan telah menjadi tantangan besar bagi daerah. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya. Dengan adanya AFTA ini antara lain peningkatan perdagangan internasional, terbukanya peluang kerja lebih banyak, meningkatkan kompetisi antar pengusaha, terbukanya peluang pengusaha lokal untuk go international meningkatkan nilai ekspor, dapat meningkatkan devisa dari sektor pariwisata, tidak adanya bea cukai sehingga banyaknya produk dari negara-negara tetangga masuk dan itu merupakan keuntungan bagi konsumen, serta kompetisi antar pengusaha, tentu ini akan menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi bagi Kabupaten Tangerang.

3. Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*)

Upaya integrasi ASEAN berkembang sangat pesat selama dua dekade terakhir dari pengaturan preferensi tarif ASEAN (PTA) dari tahun 1980-an hingga keputusan di awal 1990-an untuk membuat ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan puncaknya pada keputusan awal 2000-an untuk membangun Komunitas ASEAN, termasuk Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), tahun 2020 (kemudian dipercepat sampai 2015).

Perlu dicatat bahwa beberapa tahun setelah AFTA berlaku, tahun 1997 ASEAN *Vision* 2020 diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada KTT kedua di Kuala Lumpur, hanya beberapa bulan setelah krisis 1997 Asia Timur pecah di Thailand. Dokumen, dimaksudkan untuk memetakan ASEAN di abad ke-21, memberikan banyak hal penting dari apa yang akhirnya akan menjadi cetak biru AEC. Memang hal yang luar biasa bahwa respon dari para pemimpin ASEAN pada krisis ekonomi berlangsung di wilayah pada saat itu dengan melihat ke depan dan memperdalam integrasi ekonomi dan kerja sama di antara mereka sendiri dan dengan seluruh dunia.

AEC *Blueprint* 2009-2015 telah disetujui oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 2009 dengan deklarasi Cha-am Hua Hin pada Peta Jalan untuk Komunitas ASEAN 2009-2015 yang juga mencakup cetak biru untuk Masyarakat politik dan keamanan ASEAN dan masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Kemudian berdasar pada AEC *blueprint* 2025, visi AEC kemudian adalah sebagai berikut:

1. Sebuah ekonomi yang sangat terintegrasi dan kohesif;
2. ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis;
3. Majunya konektivitas dan kerja sama sektoral;
4. Tangguh, inklusif, berorientasi pada orang dan berpusat pada rakyat;
5. Sebuah ASEAN global.

Pelaksanaan AEC *Blueprint* 2015 yang berkaitan dengan penghapusan tarif sesuai dengan ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dan fasilitasi perdagangan telah memberikan kontribusi pada arus perdagangan barang yang lebih besar. Dalam AEC 2025, ASEAN akan terus mengurangi atau menghilangkan perbatasan dan hambatan regulasi yang menghambat perdagangan. Antara 2007 dan 2014, perdagangan ASEAN meningkat dengan nilai hampir USD 1 triliun. Sebagian besar (24%) adalah perdagangan sesama negara di kawasan ini, diikuti oleh perdagangan dengan Cina (14%), Eropa (10%), Jepang (9%) dan Amerika Serikat (8%). Selain perdagangan barang, integrasi sektor jasa juga ditingkatkan di ASEAN melalui ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS). Kemudian membaiknya iklim investasi melalui implementasi ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA). Selama periode yang sama, investasi asing langsung (FDI) meningkat dari USD 85 miliar menjadi USD 136 miliar, dan proporsi kepada dunia dari 5% menjadi 11%.

Mengingat ada 6 kawasan industri[44] di kabupaten Tangerang dan tingginya penanaman modal asing di kabupaten Tangerang tentunya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini akan berpengaruh besar terhadap strategi pembangunan ekonomi kabupaten Tangerang.

4. Dampak COVID-19

Isu strategis yang saat ini terjadi adalah dampak pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Kondisi Pandemi tersebut memberikan dampak global yang cukup signifikan tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga berpengaruh hingga ke perekonomian dan industri ekspor dan impor.

Hal tersebut sejalan dengan kebijakan yang dilakukan di negara – negara di dunia, antara lain adalah:

- Karantina wilayah dan penerapan protokol kesehatan
- Pemenuhan kebutuhan dalam negeri

Kedua hal di atas menghambat kegiatan industri dan mengganggu alur distribusi ekspor dan impor antar negara. Situasi tersebut turut dirasakan dampaknya oleh Kabupaten Tangerang sebagai salah satu daerah sentra industri nasional, bahkan multinasional. Dari sisi perekonomian, pandemi COVID – 19 menyebabkan adanya kondisi karantina wilayah yang membatasi alur keluar masuk distribusi barang dan jasa yang cukup massif dengan banyaknya penghentian aktivitas yang berkaitan dengan arus keluar masuk barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Tangerang. Terganggunya akses keluar masuk ini tentunya berpengaruh pada terganggunya distribusi barang dan jasa yang berkaitan dengan sektor perdagangan dan industri yang ada di Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, muncul banyak kerugian yang diderita oleh para pelaku perdagangan dan industri yang berada di Kabupaten Tangerang dan menyebabkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tangerang melemah. Melemahnya kegiatan ekonomi tentunya berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Tangerang yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kab. Tangerang.

Kebijakan *social distancing* dan PSBB yang diterapkan oleh hampir seluruh daerah di dunia termasuk Kabupaten Tangerang mempengaruhi pola mobilitas masyarakat secara umum. Untuk melihat pola mobilitas manusia di Kabupaten Tangerang secara umum dapat menggunakan *Google Mobility Report*. *Google Mobility Report* adalah laporan yang dikeluarkan Google setiap harinya untuk melihat pergerakan manusia kepada tempat-tempat tertentu selama pandemi di tingkat provinsi. Berdasarkan laporan tersebut, pergerakan manusia selama bulan Februari sampai Desember 2020 ke tempat residensial secara rata-rata

mengalami peningkatan sebesar 12,9 persen dibandingkan dari basisnya. Sementara itu, di saat yang bersamaan pergerakan manusia ke tempat kerja secara rata-rata berkurang 21,88 persen. Pergerakan manusia ke tempat retail dan rekreasi berkurang sebesar 17,07 persen, pergerakan manusia ke tempat perbelanjaan dan apotik berkurang 5,6 persen dari basis, pergerakan manusia ke tempat-tempat seperti taman berkurang 3,1 persen dan ke stasiun transit berkurang sebesar 44,34. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pergerakan manusia ke tempat kerja dan statiun transit mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan dengan basisnya.

5. Adopsi Teknologi

   Isu selanjutnya adalah terkait dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat akan sangat mudah mengakses informasi. Sehingga, diperlukan penggunaaan teknologi yang lebih bijaksana dan bermanfaat untuk peningkatan produktivitas.

6. Tenaga Kerja Asing

   Dengan adanya Kawasan industri yang berisi perusahaan nasional dan multi nasional dan mempekerjakan orang asing maka dimungkinkan terdapat banyak orang asing yang dipekerjakan secara ilegal. Diperlukan peningkatan kinerja di bidang perizinan tenaga kerja asing agar dapat seluruhnya terekam oleh pemerintah daerah.

E. Isu Nasional

Berikut adalah isu – isu nasional yang terkait dengan Kabupaten Tangerang:

1. RPJMN 2020 - 2024

Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 harus memperhatikan dokumen RPJMN tahun 2020-2024. Di dalam Lampiran 1 Narasi RPJMN 2020-2024, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDG's). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

2. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
3. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima prioritas presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Agenda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

   Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan menyejahterakan secara adil dan merata.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan

untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas Politik Hukum dan Keamanan (Polhukhanham) dan transformasi pelayanan publik.

   Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Berdasarkan arah pembangunan wilayah di RPJMN 2020-2024, wilayah Kabupaten Tangerang adalah bagian dari lokasi prioritas RPJMN dalam Kawasan Jabodetabek. Di mana, prioritas pembangunan di wilayah ini diarahkan untuk menjadi salah satu lokasi pengembangan klaster ekonomi kreatif.

2. Kebijakan nasional menghadapi COVID

Adanya Pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 berpengaruh tidak hanya pada perekonomian nasional melainkan perekonomian daerah. Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Sebanyak 1,7 juta pekerja tervalidasi mengalami PHK dan dirumahkan pada 2020. Selain itu, adanya pandemi meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020).

Guna mengatasi dampak dari COVID-19, pemerintah menyiapkan berbagai regulasi untuk penanganan dan pemulihan ekonomi nasional di antaranya:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dukungan APBN Untuk Pemulihan Ekonomi Di Daerah di antaranya:
   - Penyiapan tambahan dukungan berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian di daerah
   - Penyediaan fasilitas pinjaman kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah
   - Penggunaan cadangan DAK fisik untuk program pembangunan fisik.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

   Inpres ini adalah instruksi dari Presiden untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 kepada beberapa pejabat termasuk pejabat daerah seperti para Gubemur seluruh Indonesia dan para Bupati/Walikota seluruh Indonesia, untuk mengutamakan alokasi anggaran dan *refocussing* untuk kegiatan penanganan Covid-19 melalui mekanisme revisi anggaran dengan mengajukan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya, mempercepat pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dengan melibatkan LKPP dan BPKP, di mana khusus alat Kesehatan dan kedokteran memperhatikan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
3. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

Undang-undang ini menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai UU yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemik Covid-19 yang diperkirakan juga akan mengancam membahayakan ekonomi nasional, termasuk ekonomi daerah tentunya dan/atau stabilitas keuangan. UU ini diundangkan pada tanggal 16 Mei 2020 dan berlaku saat diundangkan sedangkan Perpunya sendiri diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020 dan berlaku saat diundangkan. Pada lampiran Undang-undang tersebut yang merupakan Salinan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dijelaskan kebijakan yang akan mempengaruhi keuangan daerah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) huruf i dan j sebagai berikut:

a. Melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;

   Dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut:

   Yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa:

   1. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
   2. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
   3. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau
   4. Penyesuaian pagu anggaran Dana Desa. Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

b. Memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah

   Dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut:

Hibah kepada pemerintah daerah diberikan dalam rangka penanganan bencana alam, bencana non alam, bencana kemanusiaan dan/atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi atas bencana tersebut.

Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 3 menjelaskan secara khusus kebijakan di Bidang Keuangan Daerah sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*)" termasuk kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan alokasi antar program.

(2) Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27 menjelaskan ketentuan penutup sebagai berikut

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia,

Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Inmendagri ini dikeluarkan pada tanggal 2 April 2020 dan berlaku pada tanggal dikeluarkan. Inmendagri ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk:

   KESATU

   Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

   a. penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
   b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
   c. penyediaan jaring pengamanan sosial/*social safety net*, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

   KEDUA

   Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk:

   a. mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19;
   b. dalam hal masyarakat terlanjur mudik, maka kepada masyarakat pemudik yang tiba di daerah tujuan mudik untuk:

1) melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan; dan
2) mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan.

c. memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik;

KETIGA

Memastikan dan mengawasi:

a. kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan supply dan kelancaran distribusi; dan
b. aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, *hand sanitizer*, dll).

KEEMPAT

Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam kesempatan yang pertama

KELIMA

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri ini akan dilakukan rasionalisasi dana transfer.

KEENAM

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.

KETUJUH

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Inmendagri ini menegaskan dan mengingatkan para kepala daerah agar mempercepat penanganan Covid-19 di daerah dengan menggunakan APBD-nya masing-masing di mana penganggarannya dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri beserta sanksi jika rasionalisasi dana transfer jika tidak melakukan percepatan sesuai batas waktu yang ditentukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

   Permendagri ini ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020 dan berlaku pada tanggal ditetapkan. Permendagri ini sebenarnya tidak mengatur secara khusus penanganan Covid-19 seperti peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Permendagri ini mengatur secara umum pedoman penyusunan APBD pemda seluruh Indonesia untuk tahun anggaran 2021. Namun demikian terdapat pasal yang mengatur pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 untuk penanganan Covid-19 yaitu Pasal 5 yang menjelaskan sebagai berikut:

   (1) Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019, dengan prioritas sebagai berikut:
      a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
      b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
      c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.

   (2) Dalam hal pandemi *Corona Virus Disease* 2019 suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease* 2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

   (3) Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease* 2019.

(4) Penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada lampiran beberapa pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 terkait penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

- Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah.
- Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
  a. pelaksanaan skenario *the new normal* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID19.
  b. peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi antara lain sebagai berikut:
     1) pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi;
     2) pengembangan luasan cakupan pelayanan kepada masyarakat seperti perluasan tempat pariwisata, pelayanan persampahan;
     3) pembangunan infrastruktur yang menyangkut pelayanan dasar.
     4) pemulihan ekonomi, antara lain sebagai berikut:
        a) penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
        b) menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;

c) penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
d) promosi investasi domestik maupun internasional;
e) peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak COVID-19, melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, *forum group discussion*, seminar, dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19.
f) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau retribusi termasuk sanksi, antara lain sebagai berikut:
    (1) Pajak kendaraan bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk sektor perindustrian dan penjualan kendaraan bermotor;
    (2) Pajak kendaraan bermotor untuk sektor angkutan umum;
    (3) Pajak bumi bangunan untuk sektor pendidikan, pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan, serta balai konservasi;
    (4) Pajak reklame untuk pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan;
    (5) Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan;
    (6) Retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang;
    (7) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk penduduk kurang mampu;
    (8) Perpanjangan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah

Permendagri ini memiliki arahan agak berbeda dengan regulasi sebelumnya yang lebih fokus pada penanganan Kesehatan dan dampak ekonomi karena pandemi Covid-19. Permendagri ini mulai

mengarahkan semua pemerintah daerah agar mulai menyusun anggaran pemulihan ekonomi untuk melaksanakan penerapan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) yang produktif dan aman dari Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan pemulihan ekonomi tersebut dilakukan antara lain dengan memanfaatkan sistem informasi, memulihkan pariwisata dengan diizinkannya hotel untuk beroperasi seiring dengan perbaikan penanganan sampahnya, menggiatkan pembangunan infrastruktur dasar, dan adanya bantuan terhadap UMKM. Dengan adanya arahan ini diharapkan ekonomi membaik dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Selain pemulihan ekonomi, dilakukan juga beberapa arahan terkait pajak daerah termasuk untuk Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan agar dilakukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak termasuk sanksi. Pajak parkir tidak disebut dalam arahan Permendagri ini, namun apabila sektor-sektor tersebut di atas dapat pulih kembali maka kemungkinan besar juga akan berpengaruh pada peningkatan perolehan pajak parkir.

3. Arah Kebijakan Nasional Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

   Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup:

   1. Penguatan Sektor Kesehatan

      Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), kapasitas jaminan kesehatan terutama *surveillance*, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

   2. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

      Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara

bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi COVID-l9. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

3. Pembangunan lnfrastruktur

   Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.

4. Pembangunan SDM

   Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi lnvestasi

   Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

   Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor;

fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement (PTA) Free Trade Agreement (FTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

   Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olahraga, seni budaya, dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE);* penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan

   Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

4. Revolusi Industri 4.0

   Isu selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait kurangnya kesiapan SDM menghadapi revolusi industri 4.0 yang mengandalkan teknologi. Masyarakat Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya melek teknologi, hal ini menjadi pemicu utama ketidaksiapan SDM. Hampir semua sektor membutuhkan SDM yang melek teknologi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, hingga ke tingkat pemerintahan.

   Kondisi ketidaksiapan SDM ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang memaksa percepatan revolusi industri 4.0 hampir di semua sektor, seperti munculnya kurikukum *daring* bagi peserta didik, banyaknya bisnis atau industri yang menggunakan *platform* digital demi menggerakkan usahanya, serta dari sisi pemerintahan harus mendigitalisasi hampir semua kegiatan pemerintahan menjadi *contactless*.

5. Omnibus Law UU Cipta Kerja

   Pada tanggal 5 Oktober 2020, Omnibus law UU Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, telah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR. Beberapa urgensi disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

   1. Memanfaatkan potensi untuk dapat keluar dari *middle income trap*, dengan adanya Bonus Demografi yang dimiliki saat ini.

2. Menjawab tantangan terbesar untuk menyediakan lapangan kerja.
3. Penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi (*hyper*-regulasi), yang menghambat pencapaian tujuan untuk penciptaan lapangan kerja.
4. Sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi.
5. Mendorong peningkatan investasi, sehingga akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMK-M dan Koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh.
6. Jumlah UMK (Mikro dan Kecil) = 64,13 Juta dari Total UMKM= 64,19 atau sebesar 99,98%, dengan jumlah tenaga kerja di sektor informal sebesar 70,5 juta (55,7%), sehingga untuk bisa masuk ke Sektor Formal perlu dipermudah mulai Pendirian, Perijinan, dan Pembinaannya.

Secara ringkas, komponen – komponen dalam peraturan UU Cipta kerja terbagi dalam beberapa klaster isu yang coba dijawab melalui UU Cipta Kerja, yaitu:

- Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha
- Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi
- Klaster Ketenagakerjaan
- Klaster UMK-M dan Koperasi
- Klaster Riset dan Inovasi Serta Kemudahan Berusaha
- Klaster Perpajakan
- Klaster Kawasan Ekonomi dan Pengadaan Lahan
- Klaster Administrasi Pemerintahan
- Klaster Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Dengan cakupan berbagai klaster di atas, diharapkan implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja dapat mengoptimalkan manfaat UU Cipta Kerja, seperti:

a) Meningkatnya dukungan untuk UMKM: Melalui UU Cipta Kerja, pelaku usaha UMKM dapat memproses perizinan cukup hanya melalui pendaftaran.
b) Dukungan untuk Koperasi: kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang, dan koperasi

diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha Syariah, serta dapat memanfaatkan teknologi.

c) Untuk Sertifikasi Halal, Pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK, dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.

d) Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

e) Untuk Nelayan yang sebelumnya proses perizinan kapal ikan harus melalui beberapa instansi dengan UU Cipta Kerja cukup hanya diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

f) Dari sisi Perumahan, *backlog* perumahan masyarakat dalam RUU Cipta Kerja akan dipercepat dan diperbanyak pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

g) Bank Tanah akan melakukan reformasi agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat

h) Bagi Pelaku Usaha dan UMKM akan mendapat manfaat yang mencakup:
   - Kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar.
   - Pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang dapat dilakukan dengan baik, akan meningkatkan daya saing dan produktivitas.
   - Mendapatkan insentif dan kemudahan, baik insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi.
   - Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah.
   - Mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan

sanksi, di mana pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

- Mengingat posisi Kabupaten Tangerang yang dipersiapkan sebagai salah satu bagian dari klaster pengembangan ekonomi kreatif menurut RPJMN 2020 – 2024, maka Kabupaten Tangerang perlu memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Omnibus Law UU CIpta Kerja yang sebagian besar manfaatnya ditujukan kepada para pelaku KUKM dan IKM. Kebutuhan ini semakin dikuatkan mengingat Kabupaten Tangerang merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah UMKM terbesar kedua di Provinsi Banten setelah Kabupaten Lebak. Pada tahun 2018, Kabupaten Tangerang memiliki total 41.155 usaha mikro yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang.[45] Pada tahun yang sama, Kabupaten Tangerang juga memiliki total 1.548 Koperasi yang 1.178 di antaranya merupakan koperasi yang aktif. Banyaknya jumlah koperasi ini menempatkan Kab. Tangerang sebagai kabupaten dengan jumlah total koperasi tertinggi di Provinsi Banten.[46]

6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   Standar Pelayanan Minimal dibentuk untuk menjamin terpenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara yang harus disediakan oleh pemerintah. Merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM adalah salah satu alat pengendali supaya pelayanan dasar menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Di dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru tersebut, terjadi beberapa perubahan terkait pembagian urusan di dalamnya dan hal tersebut berdampak pada SPM. Pada UU tersebut mengamanatkan 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanan dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum & Tata Ruang; (4) Perumahan Rakyat; (5) Sosial; dan (6) Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan

[45] Diakses melalui https://statistik.bantenprov.go.id/ekonomi/koperasi pada tanggal 3 Desember 2020
[46] *Ibid.*

Masyarakat. Pada tahun 2018, keluar peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berikut adalah lingkup SPM di pemerintahan kabupaten :

1. SPM Pendidikan :
   a. Pendidikan anak usia dini
   b. Pendidikan dasar
   c. Pendidikan kesetaraan
2. SPM Kesehatan :
   a. pelayanan kesehatan ibu hamil
   b. pelayanan kesehatan ibu bersalin
   c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
   d. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
   b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
   b. pelayanan informasi rawan bencana
   c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
   d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
   e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
5. SPM Sosial
   a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
   b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
   c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
   d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
   e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

SPM ini harus diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. Dengan terintegrasinya SPM dengan RPJMD, SPM dapat dianggarkan

dalam APBD sehingga daerah berkomitmen dalam memberikan pelayanan dasar minimal tersebut kepada masyarakat.

7. Reformasi Birokrasi

Saat ini sudah berlaku Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2020 sebagai pengganti *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang sudah tidak berlaku lagi. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada periode ketiga atau terakhir ini Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam *Road Map* ini asas yang akan diutamakan adalah fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti bahwa setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, Kabupaten Tangerang perlu untuk menyesuaikan pengelolaan pemerintahan berdasarkan *road map* yang berlaku.

Pada tahun 2015, Kabupaten Tangerang telah memiliki *road map* terkait reformasi birokrasi yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati Tangerang Nomor 97 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2019. Bahkan, pada tahun 2019 Kabupaten Tangerang telah dijadikan *pilot project* oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).[47] Pemerintah Kabupaten Tangerang dinilai sudah menerapkan tata kelola manajemen kepegawaian yang baik, sudah mendekati dengan Sistem Merit yang diterapkan oleh KASN.[48] Dengan pencapaian yang sudah sangat baik tersebut, nyatanya pemerintah Kabupaten Tangerang masih memiliki tantangan dalam hal SDM untuk menerapkan *Road Map* yang telah ditetapkan. Salah satu yang menjadi tantangan dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Tangerang adalah masalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) di jajaran aparatur

[47] Diakses melalui https://www.tangerangkab.go.id/sindangsarikel/detail-konten-skpd/show-berita-skpd/2306/2 pada tanggal 2 Desember 2020.
[48] *Ibid*.

pemerintah daerah. Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang, khususnya untuk ASN saat ini dirasa masih belum mencukupi kebutuhan fungsi aparatur pemerintah secara keseluruhan, baik dari sisi pengelolaan pemerintahan hingga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini jumlah pegawai Non ASN yang ada di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi. Para pegawai Non ASN di Kabupaten Tangerang tersebar di berbagai sektor pelayanan masyarakat, mulai dari Pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan. Menurut penuturan pada saat FGD dengan OPD Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 25 November 2020, pada tahun 2020, jumlah Non ASN yang ada di Kabupaten Tangerang ternyata melebihi jumlah ASN yang ada di Kabupaten Tangerang.

Dengan tingginya angka Non ASN, pemerintah Kabupaten Tangerang perlu memperhatikan isu kebijakan penghapusan Non ASN yang dimulai pada tahun 2021 oleh Kemenpan-RB sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Penghapusan status Non ASN merupakan kesepakatan antara Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk menjalankan mandat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN). Sebagai mana yang diatur Pasal 6, tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK. Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya. Oleh karena itu, ketimpangan Non ASN dan ASN harus segera diatasi agar pemerintahan dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya kebijakan penghapusan status Non ASN/Pegawai honorer tersebut.

8. Lingkungan Hidup

   Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan sebuah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko lingkungan hidup. KLHS memuat kajian antara lain:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Beberapa indikator lingkungan hidup yang harus dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah RPJPD dan RPJMD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 di antaranya adalah kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan, aksi perubahan iklim, limbah B3, persampahan, dll.

9. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak

   Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki

dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Tantangan yang akan dihadapi adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya dengan mengedepankan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban secara efektif.

F. Isu Daerah

1. Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta

   1) Penyediaan Air Minum

      Sumber air di DKI Jakarta yaitu 16 persen berasal dari Air Curah Olahan dari Tangerang, dengan mensuplai air minum dengan kapasitas 2.800 liter per detik untuk jangka waktu 20 tahun.

   2) Hidrologi

      Provinsi DKI Jakarta berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 Km2. Sebarannya mencakup sebagian Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.

   3) Rencana pengembangan *Elevated Loopline/ Circular Line* sebagai layanan angkutan perkotaan (*urban services*), dilakukan dengan cara membuat *shortcut* dari stasiun Pondok Jati ke arah

Manggarai. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor Depok- Tangerang-Bekasi. Rencana pengembangan Jalur Lingkar (Circular Line) Jakarta - Bogor - Depok Tangerang - Bekasi (Jabodetabek) akan terintegrasi dengan lintas pelayanan kereta *Commuterline* Jabodetabek melalui 2 (dua) jalur melingkar.

4) Penerapan *online system* dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan, dari 36 titik menjadi 441 ruas jalan, atau sebesar 8,1% dari seluruh ruas jalan *on street parking*. Untuk pembangunan fasilitas *park and ride* di Terminal Kalideres, diharapkan dapat menjadi titik perpindahan moda para pengguna kendaraan pribadi dari wilayah barat Jakarta dan Tangerang, yang terintegrasi dengan Transjakarta Koridor 3 (Kalideres – Pasar Baru).

2. Isu Strategis Provinsi Banten

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, memuat Visi pembangunan Provinsi Banten, yaitu: “ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH” . Untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Program/kegiatan prioritas Provinsi Banten yang berhubungan dengan Kabupaten Tangerang adalah :

a) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di daerah meliputi: Serpong-Balaraja, Bojong Gede-Balaraja.

b) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di daerah meliputi : Tangerang-Merak, Semanan-Rajeg-Balaraja, Kamal-Teluknaga-Rajeg.
c) Rencana Pengembangan jalan Nasional Tangerang-Bandara Soekarno Hatta
d) Pengembangan jaringan jalan provinsi meliputi : Banten Lama-Pontang, Pontang-Kronjo, Kronjo-Mauk, Mauk-Teluknaga, Teluknaga-Dadap, Citeras-Tigaraksa, Tigaraksa-Malanengah, Sp. Bitung-Curug, Curug-Legok-Parung Panjang, Cisauk-Jaha.
e) Pengembangan jaringan Kereta Api, Serang-Cikande-Cikupa-Serpong.
f) Pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada lintas Parung Panjang-Serpong-Citayam-Nambo-Cikarang; Lintas Serang-Sepadan tol-Balaraja, Lintas Balaraja-Jakarta-Cikarang.
g) Rencana Pembangunan *Dry Port* di Kecamatan Jambe
h) Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di Provinsi Banten meliputi Cituis-Kep. Seribu, Dadap-Kep. Seribu.
i) Rencana pengembangan lokasi wilayah kerja pelabuhan pengumpan lokal di Cituis dan Kresek/Kronjo.
j) Koridor Utara (Koridor Ekonomi Banten) menghubungkan sentra-sentra pertumbuhan primer Tangerang-Balaraja-Cikupa-Serang-Cilegon-Merak

3. Isu Strategis Kabupaten Tangerang

1) Ekonomi

Isu strategis pembangunan bidang ekonomi, adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan daerah berbasis ekonomi hijau

Pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Presiden RI berkomitmen untuk membangun kembali ekonomi pasca Covid-19 yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh serta tidak mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan. Isu pembangunan hijau dan berkelanjutan harus diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Salah satunya adalah dengan mengedepankan perencanaan pembangunan rendah karbon (*low carbon development*). Fokus pembangunan sudah

selayaknya diubah mengarah mempertimbangkan kemampuan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup.

Pembangunan rendah karbon telah diamanatkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dalam salah satu dari 7 agenda pembangunan, yaitu agenda pembangunan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

b. *Link and match* pendidikan dengan dunia usaha

Dengan kondisi sumber daya manusia yang berlimpah, yang ditandai adanya angkatan kerja berusia muda dan produktif, harus diarahkan pada peningkatan kemampuan keterampilan dalam pengolahan sumber daya potensi yang di miliki daerah. Momentum ini harus ditangkap dengan baik oleh pengambil kebijakan, yang dapat dimulai dari dunia pendidikan. Penyediaan penawaran tenaga kerja yang berlimpah, tanpa ada keterkaitannya dengan kebutuhan dunia usaha, tentu akan sia-sia. Oleh karena itu, dunia pendidikan menjadi titik awal keberhasilan memanfaatkan momentum bonus demografi ini. Salah satu yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan adalah pendidikan vokasi. Perlu ada sinergi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan pendidikan vokasi berbasis sumber daya lokal.

Selain sekolah, keterkaitan tenaga kerja dengan usaha dapat juga melalui Balai Latihan Kerja (BLK). BLK yang dimiliki daerah, harus dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja di masa akan datang. Tentu dalam upaya pelayanan peningkatan ketrampilan tenaga kerja ini, perlu identifikasi kebutuhan dasar, baik peralatan maupun teknologinya. Mengoptimalkan BLK yang mempunyai keterkaitan dengan pemanfaatan potensi lokal tentunya adalah strategi yang tepat, apalagi pada saat pandemi Covid-19

c. Pemberdayaan IKM dan UMKM

Permasalahan pada isu ini adalah terdapat pada kurangnya fasilitas modal untuk UMKM dan IKM. Khusus untuk UMKM, permodalan dapat difasilitasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) milik Kementerian Koperasi. Akan tetapi, kurangnya koordinasi antara dinas koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Tangerang dengan LPDB membuat penyaluran dana modal tidak maksimal. Sementara itu untuk

permodalan IKM masih terhambat oleh promosi investasi yang belum optimal. Hal ini dikarenakan informasi potensi dan peluang investasi yang diberikan kurang detail dan tidak memudahkan calon investor dalam mengakses dan mendapatkan informasi tersebut. Permasalahan lainnya dalam isu pemberdayaan IKM dan UMKM adalah masalah legalitas yang menghambat ekspor. Beberapa IKM yang tidak memiliki legalitas memilih untuk melalui agen karena birokrasi untuk mendapatkan legalitas tersebut sangat sulit.

d. Pemulihan dan Pengembangan Sektor Unggulan

Pandemi covid-19 berdampak pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Tangerang. Wilayah kebijakan nasional dan provinsi serta kabupaten perlu disinergikan agar tidak tumpang tindih kebijakan. Untuk wilayah kebijakan kabupaten, penekanan pemulihan di sektor unggulan adalah yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk sektor industri, pemulihan dan pengembangan di sektor IKM harus diselaraskan dengan adaptasi industri pasca pandemi covid 19 dan kebijakan nasional tentang industri 4.0. Adaptasi baru berupa kemampuan IKM memenuhi kebutuhan di sektor yang sedang meningkat di era pandemi ini, seperti contoh sektor kesehatan. Sektor unggulan lainnya seperti sektor pertanian (arti luas), sektor konstruksi dan sektor jasa keuangan dan asuransi adalah sektor unggulan yang diperkirakan akan cepat pulih. Khusus untuk sektor pertanian, dalam jangka waktu perencanaan ini diharapkan tidak terjadi penurunan kontribusi terhadap PDRB Kab. Tangerang. Untuk itu, perlu upaya bersama untuk tetap mempertahankan sektor pertanian tetap unggul, dengan cara menggerakkan sumber daya yang dimiliki oleh Kab. Tangerang, baik itu SDM maupun permodalan, mempercepat legalisasi produk pertanian, mendorong mekanisasi pertanian agar lebih produktif.

Sektor lain yang perlu dikembangkan adalah sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Pengembangan pariwisata tetap mendukung kearifan dan budaya lokal, sehingga budaya lokal juga dapat terangkat. Pariwisata tidak akan berkembang bila tidak diselesaikan "*bottle neck*" yang menghambat proses pengembangan

pariwisata itu sendiri. Salah satunya adalah jaringan infrastruktur yang menghubungkan titik-titik wisata. Ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Kab. Tangerang. Ekonomi. Melalui kebijakan pemerintah daerah, diharapkan dapat mengatur dan menata pengembangan usaha dan produk-produk kreatif yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan nilai kemanfaatan yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Selain itu, menstimulus lahirnya kewirausahaan lokal yang dapat mengangkat keunggulan, budaya, dan karakteristik wilayahnya sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan memicu daya saing daerah. Untuk itu, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong keberadaan BUMDes. Pembinaan BUMDes yang terkait dengan manajerial perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang agar terjadi akselerasi peningkatan kemampuan dalam rangka mengembangkan potensi daerah.

2) Administrasi dan Aparatur Pemerintahan

Isu strategis urusan administrasi dan aparatur di Kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kabupaten Tangerang serta pemerataan kualitas aparatur pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, bersih, dan berintegritas untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam kondisi normal maupun kondisi pandemi covid-19.
b. Revitalisasi reformasi administrasi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pemerintahan yang memiliki visi ke depan, bersih, akuntabel, transparan, tertib administrasi, taat peraturan, dan partisipatif.
c. Peningkatan tata Kelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan pendapatan dan belanja daerah yang optimal, pengawasan yang efektif, serta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (wajar tanpa pengecualian).

d. Pengembangan kelembagaan dan regulasi yang mampu menciptakan peraturan-peraturan berkualitas yang menjadi dasar pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta terwujudnya penegakan peraturan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
e. Pengembangan smart city untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tata kelola pemerintahan sehari-hari sehingga terwujud efisiensi dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang yang modern.
f. Pemanfaatan teknologi untuk proses pengadaan barang dan jasa seperti *e-Purchasing* sehingga terwujud pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif.

3) Sosial Budaya

Berdasarkan analisis permasalahan utama yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan isu-isu strategis untuk tema sosial budaya, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tangerang. Antara lain adalah:

a. Belum optimalnya kualitas SDM yang memiliki *skill* dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya. Hal tersebut menjadi penting karena syarat utama sebuah daerah untuk bersaing dalam era globalisasi adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Adapun SDM yang ada saat ini dapat ditingkatkan kompetensinya dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan baik secara struktural maupun fungsional melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
b. Terdapat isu mengenai kurangnya jumlah (kuantitas) SDM di bidang sosial budaya yang dapat menghambat kinerja pelayanan publik, yang salah satunya terjadi di bidang Pendidikan. Dikarenakan kurangnya jumlah tenaga pendidik dan jumlah SDM yang mengelola manajemen sekolah, maka sering terjadi penugasan ganda bagi para pengajar yang sekaligus menjabat bagian administrasi pengelolaan dana,

seperti dana BOS yang menurut ketentuan harus dikelola oleh ASN. Fenomena semacam ini dikhawatirkan dapat mengurangi mutu dan kualitas sektor Pendidikan karena terbaginya fokus pengajar kepada dua tugas yang harus dilaksanakan sekaligus.

c. Isu pembangunan SDM perlu menjadi prioritas daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dicanangkan juga di RPJMN 2020 – 2024. Hal dikarenakan Kabupaten Tangerang telah memasuki tahun bonus demografi. Apabila bonus demografi ini dapat ditransformasikan dengan baik melalui SDM unggul dan berdaya saing, maka bonus demografi dapat memicu terjadinya bonus kesejahteraan dengan lompatan ekonomi yang signifikan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Kab. Tangerang mengingat saat ini kondisi kualitas SDM dan kuantitas SDM siap pakai yang tersedia di Kabupaten Tangerang masih membutuhkan banyak peningkatan sebagaimana dijelaskan dalam poin a dan b.
d. Terdapat isu di bidang kesehatan, yaitu kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan pengelolaan manajemen rumah sakit menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.
e. Permasalahan gizi di Kabupaten Tangerang turut menjadi isu strategis yaitu terkait dengan *stunting*. Hal ini sejalan dengan data e-PPGBM (Pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat secara elektronik) Dinas Kesehatan bahwa pada tahun 2020 angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Tangerang masih berada di sekitar 11,60%.[49] Hal ini diduga dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat terutama mengenai asupan makanan yang bergizi dan kurang terjaganya lingkungan dari sisi buruknya fasilitas sanitasi air bersih. Masih adanya kasus stunting tersebut dapat menimbulkan dampak pada penurunan kecerdasan dan kerentanan terhadap penyakit.
f. Isu kepemilikan dokumen kependudukan (cakupan kepemilikan e-KTP, KIA, akte kelahiran dan indeks kepuasan masyarakat) masih menjadi perhatian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

[49] Diakses melalui https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/3031 pada tanggal 4 Desember 2020

kelengkapan administrasi kependudukan – dan data Kependudukan.

g. Masih terdapatnya kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat tindak kekerasan, isu tersebut sejalan dengan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak anak (KLA) yang mengarahkan kabupaten/kota mempunyai sistem berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Serta untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

h. Di bidang pariwisata, belum optimalnya kinerja bidang pariwisata terkait penataan potensial destinasi pariwisata di Kabupaten Tangerang disebabkan beberapa permasalahan yang mempengaruhinya yaitu : (1) masih kurangnya promosi pariwisata; (2) Masih kurangnya sosialisasi tentang kepariwisataan di kabupaten tangerang; (3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan kepariwisataan; (4) Belum optimalnya industri pariwisata/industri kreatif/ekonomi kreatif; (5) Rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan kepariwisataan; dan (6) Kurangnya pelestarian dan promosi budaya lokal. Kabupaten Tangerang memiliki potensi budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai objek wisata.

i. Dalam kasus angka kemiskinan, sebenarnya Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan angka kemiskinan berdasarkan Data Indikator Strategis Kabupaten Tangerang tahun 2013-2019 yang didata oleh BPS secara makro. Persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 193,970. Dari jumlah tersebut pada tahun 2017 turun 5,39%, kemudian pada

tahun 2018 turun kembali menjadi 5,18%, dan terakhir ditahun 2019 turun menjadi 5,14% di tahun 2019. Akan tetapi, dengan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini, maka terdapat kemungkinan angka kemiskinan pada tahun 2020 akan meningkat. Hal ini diperkuat dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sementara (masih dalam tahap validasi per Mei 2020) terhadap 1.170 Rumah Tangga (Ruta) di wilayah Kabupaten Tangerang, yang dimulai sejak awal Maret 2020 lalu, data dan penghitungan yang mengacu pada pendapatan sebesar Rp 476 ribu perkapita perbulan. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi putus kerja besar-besaran di Kawasan yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bergantung pada kegiatan industri. Dengan mempertimbangkan kemungkinan peningkatan angka kemiskinan di tahun 2020 karena pandemi Covid-19, maka pemerintah daerah Kabupaten Tangerang perlu mempersiapkan strategi untuk pengentasan kemiskinan pasca Covid-19.

j. Isu strategis lainnya adalah belum optimalnya kapasitas lembaga kebudayaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa masalah yang antara lain adalah : (1) masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi dalam pengelolaan seni budaya, (2) Sanggar seni yang ada di masyarakat belum dikelola secara optimal, (3) Masih kurangnya pelestarian *Event* masyarakat adat, dan (4) Kurangnya pembinaan organisasi kesenian (sanggar/kelompok seni dan budaya).

k. Permasalahan dalam isu strategis ini juga terkait beberapa hal, antara lain: (1) Pandemi COVID-19 membuat banyak lapangan pekerjaan yang tutup sehingga meningkatkan pengangguran di Kabupaten Tangerang, (2) Panti Dinas sosial masih belum dilengkapi dengan fasilitas perawatan kesehatan dasar, (3) Masih terdapat keluarga pra-sejahtera yang tidak memiliki rumah layak huni (sebagai contoh di Kecamatan Pakuhaji terdapat 220 Rumah Tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni),

4) Infrastruktur (Sarana dan Prasarana)

Isu strategis pembangunan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, adalah:

a. Ketersediaan jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Tangerang yang terpadu (transportasi cerdas) dan merata ke seluruh wilayah desa. Hal ini terutama yang menghubungkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara sosial ekonomi, pusat-pusat ekonomi, serta wilayah yang memiliki titik-titik kemacetan.
b. Tersedianya infrastruktur yang mendukung kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat.
c. Terpenuhinya penyediaan sanitasi dan air bersih terutama pada wilayah kumuh dan miskin.
d. Terpenuhinya infrastruktur yang mendukung pasokan listrik pada seluruh wilayah kabupaten hingga wilayah perdesaan.
e. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang mendukung peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta kota cerdas (*smart city*).
f. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan hidup serta meminimalkan risiko bencana banjir.
g. Penanganan sampah dari hulu hingga hilir yang mampu menurunkan kuantitas sampah serta pengelolaan sampah yang modern dan efektif.

5) Tema Kewilayahan

Berdasarkan analisis permasalahan utama yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan isu strategis untuk tema kewilayahan di Kabupaten Tangerang. Antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Masih terdapat permasalahan pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah aliran sungai yang melewati Kabupaten Tangerang tercemar oleh sampah masyarakat dan pembuangan limbah industri. Beberapa sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki mata pencarian di sektor pertanian

sebagai sumber aliran irigasi, akan tetapi tidak optimal untuk saat ini karena pencemaran limbah dan sampah.

Permasalahan ini juga menyebabkan banjir yang melanda Kecamatan yang dilewati oleh aliran sungai tersebut. Isu lainnya yang masih terkait dengan DAS adalah belum diperbaharuinya pemetaan spasial rawan banjir untuk mengatasi masalah banjir. Pengelolaan sampah juga menjadi salah satu akar masalah dari pengelolaan DAS. Kurangnya TPS di daerah padat penduduk membuat masyarakat memilih untuk membuang sampah di sungai

b. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kurang optimalnya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan irigasi tersier. Beberapa wilayah yang masyarakatnya memiliki mata pencaharian pertanian harus menjual tanahnya karena sistem irigasi tersier tidak berfungsi dengan baik. Terhambatnya sistem irigasi ini disebabkan oleh pencemaran aliran sungai dan terdapat industri yang mengambil air irigasi, sehingga alirannya menjadi dangkal. Selain itu terdapat alih fungsi lahan pertanian kepada industri yang menyebabkan semakin menyempitnya lahan pertanian garapan masyarakat.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tangerang

5.1.1 Visi

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangerang tahun 2005 – 2025, visi untuk Kabupaten Tangerang dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang dimasa depan. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan Visi Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

“Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani. ”

Yang dimaksud dengan:

1. Daya Saing (Competitive Forces); Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
2. Daya Saing Daerah; kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional dan global. Daya saing daerah terkait erat dengan Perkembangan Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam serta Potensi Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Kinerja Pemerintahan dan kebijakan Pemerintah, Manajemen dan Ekonomi Makro.
3. Masyarakat Madani (Civil Society); adalah masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan mahluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari. Masyarakat Madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/persaudaran/ kekeluargaan (*egaliterianisme*), penghargaan didasarkan kepada prestasi, keterbukaan (*inclusivisme*) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka (*independent*) dari segala ”penguasaan” manusia atas manusia lainnya, juga masyarakat yang bebas (*freedom*) dari pertentangan sosial yang anarkis dan destruktif.

5.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan

5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Tabel 5. 1 Keterkaitan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Tangerang

RPJP Nasional 2005-2025	RPJPD Provinsi Banten	RPJPD Kabupaten Tangerang
VISI INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR	VISI BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA	VISI KABUPATEN TANGERANG BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT MADANI
MISI	MISI	MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan		Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan		

RPJP Nasional 2005-2025	RPJPD Provinsi Banten	RPJPD Kabupaten Tangerang
VISI INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR	VISI BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA	VISI KABUPATEN TANGERANG BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT MADANI
MISI	MISI	MISI
kepentingan nasional		
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia,internasional		
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu		

Sinkronisasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten merupakan wujud komitmen seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tangerang untuk turut mendukung perwujudan dan pencapaian misi pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Banten tahun 2005-2025.

5.1.3 Tujuan dan Sasaran

Adapun Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 adalah:

a. Tujuan

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang adil dan sejahtera yang beriman dan bertaqwa sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Sasaran

Sasaran pokok pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia ditandai oleh hal-hal berikut:
   - Terlaksananya sistem jaminan sosial dan penataan kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang terpadu, efisien dan efektif.
   - Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat KabupatenTangerang.
   - Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang.
   - Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).
   - Berkembangnya karakter masyarakat Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
   - Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan.
   - Makin kuatnya nilai-nilai keutamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan bertaqawa yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tangerang.
   - Makin mantapnya budaya dan pemberdayaan masyarakat serta organisasi masyarakat Kabupaten Tangerang.
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal ditandai oleh hal-hal berikut:
   - Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pada tahun 2025 pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang semakin meningkat, pengangguran menurun dan penduduk miskin berkurang. Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang dari pengembangan sektor industri pengolahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang dari pengembangan sektor pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang dari pengembangan sektor jasa yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdayasaing.

3. Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional ditandai oleh hal-hal berikut:
   - Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Tangerang yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah kecamatan.
   - Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien sesuai kebutuhan termasuk terpenuhinya pasokan listrik bagi hampir seluruh rumah tangga dan wilayah perdesaan dan perkotaan
   - Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
   - Terpenuhinya penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, permukiman dan fasilitas umum
   - Terwujudnya efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telekomunikasi

4. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif ditandai oleh hal-hal berikut:
   - Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Kabupaten Tangerang yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggungjawab.
   - Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik
   - Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
   - Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Tangerang yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.

5. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi ditandai oleh hal-hal berikut:
   - Terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan yang makin merata ke seluruh wilayah Kabupaten Tangerang termasuk wilayah perdesaan.
   - Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
   - Terwujudnya kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang yang didukung oleh pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara serasi, seimbang, dan lestari.
   - Terpeliharanya keragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Tangerang.
   - Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

5.2 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tangerang

5.2.1 Visi

Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu:

"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera"

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

1. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut
2. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.

3. Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup

5.2.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

Adapun penjelasan dari setiap misi adalah sebagai berikut :

1. Misi 1: Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Melalui Misi 1 ini akan terciptanya implementasi nilai-nilai keagamaan dan membangun nilai-nilai budaya melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan, kebudayaan dan kepemudaan. Disamping itu juga

membentuk karakter masyarakat dan peserta didik sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi 2: Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Melalui Misi 2 ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis dan kependidikan, meningkakan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kesempatan kerja dan jaminan sosial sehingga membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
3. Misi 3: Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan. Melalui Misi 3 ini akan diciptakan perekonomian yang berdaya saing melalui peningkatan kinerja sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian sebagai pendukung utama ketahan pangan dan penopang kesejahteraan petani dan nelayan juga menjadi fokus dalam misi ini.
4. Misi 4: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Melalui Misi 4 ini akan meningkatkan pelayanan pemerintahan yang mudah, cepat dan berkualitas, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, meningkatkan ketersediaan sistem informasi dan data-base yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan, meningkatnya kinerja perencanaan, keuangan serta pengawasan, mengintegrasikan system pemerintahan dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga terciptanya reformasi birokrasi.
5. Misi 5: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah. Melalui Misi 5 ini akan mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi, meningkatkan pengelolaan sampah, meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau, mengatasi kemacetan, menangani bencana, menyediakan air bersih dan mengendalikan tata ruang wilayah.
6. Misi 6: Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Melalui misi 6 ini akan mengembangkan inovasi masyarakat desa/kelurahan, mengembangkan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata, mengembangkan cluster ukm,

memberdayakan UKM dan merangsang tumbuhnya entrepreneur yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.

5.2.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan enam misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 5.2.

Tabel 5.2 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Visi: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera"

(sebelum perubahan)

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban			Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun lalu dibagi jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun berjalan	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,08
				Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	70	72	74	76	78	80	80
2	Meningkatkan akses, mutu	Meningkatkan Kualitas	Angka IPM			Indeks yang mengukur	71,59	71,6	71,7	71,8	71,9	72	72

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.	Sumber Daya Manusia				pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak							
				Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir	69,61	70,27	70,87	71,17	71,47	71,77	71,77
				Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun	8,27	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,7

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						yang mengulang)							
3	Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan	Menurunnya Kemiskinan	Prosentase Penduduk Miskin			Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan	5,18	5,10	5,05	5,00	4,95	4,90	4,90
				Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t	5,32*	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9
				Menurunnya Pengganggguran	Tingkat Pengganggguran Terbuka (TPT)	Jumlah Penduduk yang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja	9,70	9,65	9,61	9,32	9,05	8,80	8,80

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			Penilaian komponen terhadap : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (NAK). 2. Nilai Kapasitas Organisasi. 3. Nilai Integritas Organisasi (Nilai Persepsi Korupsi). 4. Nilai Opini BPK. 5. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik.	53	63	70	75	80	85	85
				Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	61,87	65	71	73	77	81	81

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						berdasarkan Inspektorat Provinsi dan Kemenpan							
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	75,05	77	79	81	83	89	89
				Meningkatnya Integritas Aparatur	Indeks Integritas	Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI)	-	60	65	70	75	80	80
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah	Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik			Prosentase infrastruktur Jalan dan jembatan, bangunan pemerintah, Irigasi dalam kondisi baik/mantap	85	87	89	91	93	95	95

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	Prosentase infrastruktur Jalan dan jembatan, bangunan pemerintah, Irigasi dalam kondisi baik/mantap	85	87	89	91	93	95	95
		Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup	IKLH			Total Penjumlahan Indeks Pencemaran Air,dan Indeks Pencemaran Udara	48,90	50	52	54	56	58	58
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	Total Penjumlahan Indeks Pencemaran Air,dan Indek Pencemaran Udara	48,90	50	52	54	56	58	58

NO.	MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
								2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.	Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah	Indeks Inovasi Daerah			Hasil dari Skor dimensi Input (25%), Skor dimensi Proses (25%), Skor dimensi Output (25%), Skor dimensi Outcome (25%)	-	20	25	30	35	40	40
				Meningkatkan Kinerja Inovasi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah	11	25	35	45	55	62	62

Tabel 5.3 Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” (Setelah Perubahan)

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.	Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun lalu dibagi jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun berjalan	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,08
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	70%	101,86%	148,4%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan	Meningkatkan Kualitas Sumber		Angka IPM	Indeks yang mengukur	71,59	71,93	71,92	72,29	72,82	73,26	73,26

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.	Daya Manusia			pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak							
			Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir	69,61	69,79	69,89	69,89	70,08	70,21	70,21
				Prevalensi stunting	selisih prevalensi stunting balita di suatu kabupaten/kota terhadap batas masalah kesehatan	19%	12%	8,5%	18%	16%	14%	14%

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
					masyarakat untuk stunting (20%)							
				Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	kecukupan sisi supply dan cakupan kepesertaan JKN	80%	80%	81%	86,3%	87%	88%	88%
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	62,25	61,54	61,53	61,88	62,05	62,11	62,11

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	8,27	8,28	8,39	8,61	8,45	8,49	8,7
3	Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan	Meningkatkan Daya Saing Daerah		Tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan	5,18%	5,14%	6,23%	7,12%	7%	6,5%	6,5%
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t	5,93%	5,45%	-3,7%	3,07%	5,21%	5,47%	5,47%
				Tingkat Pengangguran	Jumlah Penduduk yang	9,7%	8,91%	13,06%	12,14%	10,99%	9,98%	9,98%

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
				(TPT)	mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja							
			Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pariwisata	Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	Pertumbuhan sector Lapangan Usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pertahun	2,98%	2,25%	3,69%	4,32%	5,27%	5,56%	5,56%
				Penambahan Kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan per tahun	-	11%	-75%	2%	4%	6%	6%
			Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Peningkatan investasi pertahun dari tahun n-1	77.37	-27,8	20,1	5,12	5,12	5,12	5,12
			Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/skil	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi	63,01%	66,07	65,43	66%	68%	70%	70%

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
			1		disuatu negara/wilayah							
			Meningkatnya produk hasil UMKM dan IKM	Persentase koperasi aktif	Jumlah koperasi yang aktif per jumlah total koperasi	78,83	49,92	56,80	50,00	55,00	60,00	60,00
				Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten	Penigkatan jumlah industry kecil dan menengah	25.103	16.866	15.866	16.366	16.866	17.366	17.366
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian komponen terhadap : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (NAK). 2. Nilai Kapasitas Organisasi. 3. Nilai Integritas Organisasi (Nilai Persepsi Korupsi).	53	50,37	58,39	60	65	70	70

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
					4. Nilai Opini BPK. 5. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik.							
			Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Inspektorat Provinsi dan Kemenpan	61,87	70,13	70,75	71,37	71,99	72,61	72,61
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	75,05	83,66	86,36	81	83	89	89
			Meningkatnya Integritas Aparatur	Survey Eksternal Persepsi	Gambaran atas pemberi integritas	-	3,39	3,56	70,11	70,56	71,01	71,01

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
				Korupsi/ Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	pemberi layanan dari skala 1-4/Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dengan skala 1-100							
			Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator	-	2,98	3	3,08	3,15	3,25	3,25
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah		Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Perbandingan tingkat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan	107,61	103,78	101,41	100,57	99,74	99,11	99,11

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah											
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	Prosentase infrastruktur Jalan dan jembatan, bangunan pemerintah, Irigasi dalam kondisi baik/mantap	85	87	89	91	93	95	95
				Presentase Sumber Air Minum Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga yang mengakses sumber air minum berkualitas per jumlah rumha tangga dikali	39,53	42,35	41,59	45,00	50,00	60	60

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
					100%							
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%)	92,72	72,89	82,23	85,89	88,89	91,89	91,89
		Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Total Penjumlahan Indeks Pencemaran Air,dan Indek Pencemaran Udara	48,9	47,57	58,68	54,7	55,2	55,7	55,7
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan	IKA (Indeks Kualitas Air)	membandingkan data setiap	-	67,29	63,49	56,5	57	57,5	57,5

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
			Hidup		parameter kualitas air konvensional (fisik, kimia, bakteriologi) dengan kondisi normatif kelas air setempat (baku mutu peruntukan air).							
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang ditangani	Jumlah sampah yang ditangani per jumlah potensi sampah yang dihasilkan	23,63	24,13	24,63	25,13	25,63	26,13	26,13
			Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang	Indeks Risiko Bencana	Hasil Perhitungan dari indeks Ancaman (H) dibagi dengan indeks kerentanan (V) per indeks	175,01	163,32	146,93	135	130	125	125

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Saasaran	Definsi Operasional	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
					kapasitas (C)							
6	Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.	Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah		Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat inovasi daerah berdasar nilai indeks inovasi daerah	-	Kurang Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Terinovatif	Terinovatif
			Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah	Persentase inovasi yang diimplementasikan	Jumlah inovasi yang diimplementasikan dibagi jumlah inovasi	-	25	45	56	68	81	81

5.3 Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

5.3.1 Keselarasan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025

Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan dimasa depan dalam hal ini adalah keadaan Kabupaten Tangerang diakhir Rencana Pembangunan jangka Panjang yaitu pada tahun 2025. Visi untuk Kabupaten Tangerang dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang dimasa depan. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan sebagai berikut:

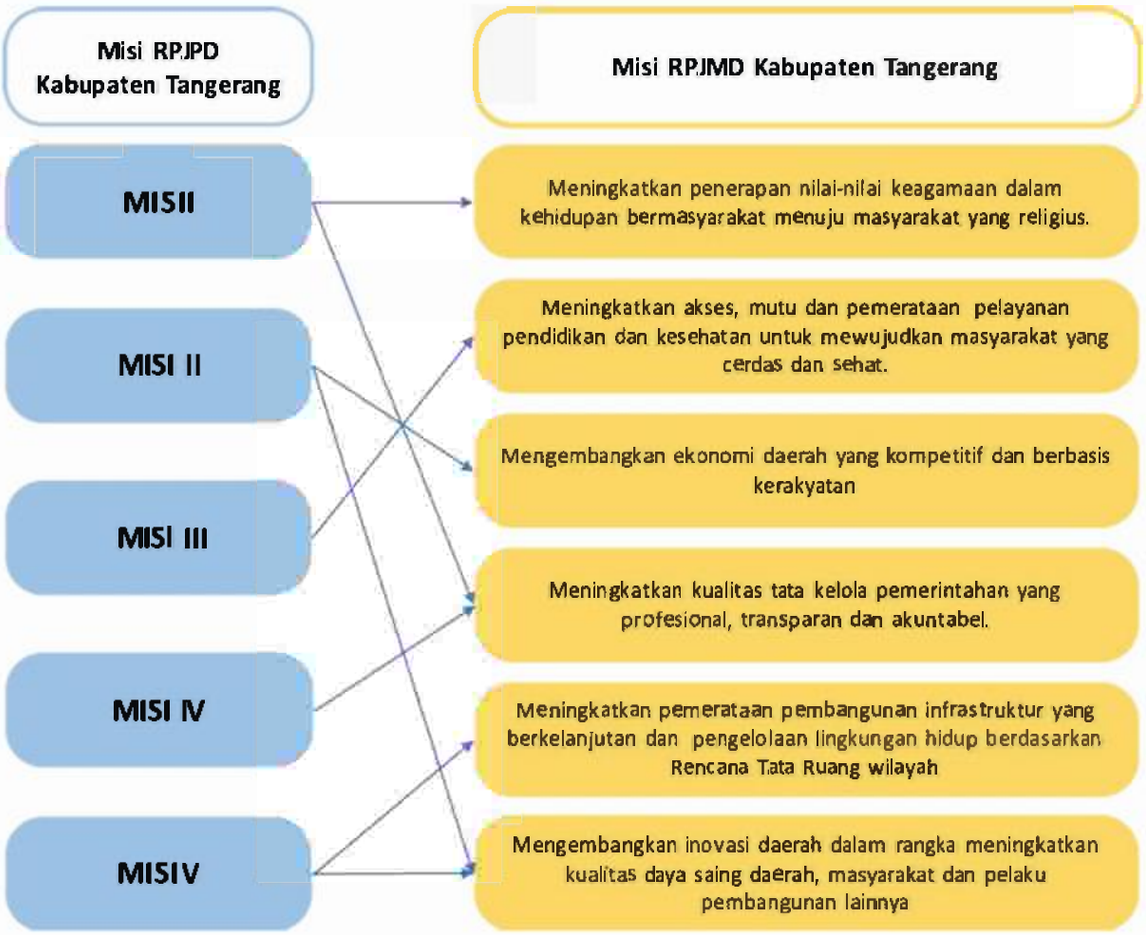
"Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani"

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang dapat digambarkan sebagaimana gambar 94.

Gambar 94. Keterkaitan RPJPD 2005-2025 Kabupaten Tangerang dengan RPJMD 2019-2023 Kabupaten Tangerang



5.3.2 Keselarasan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022

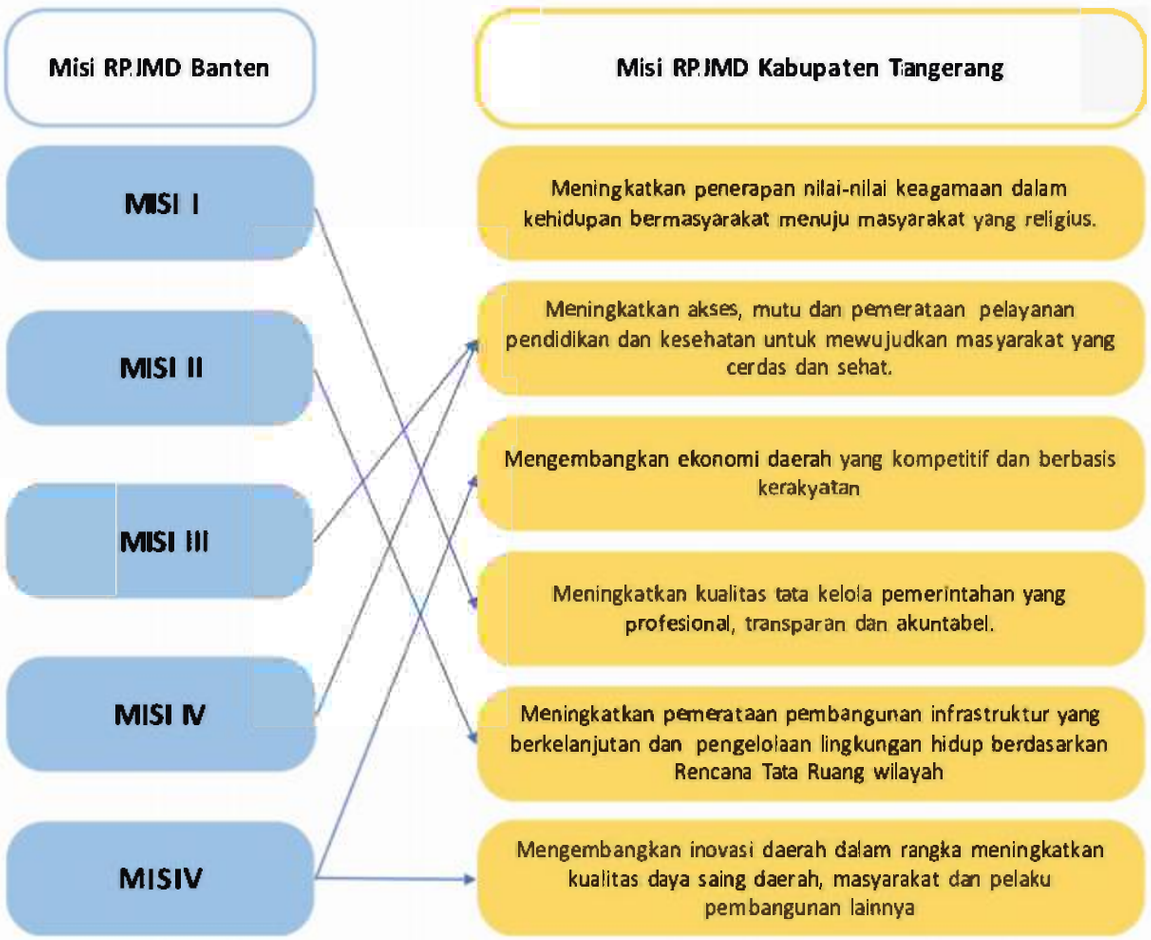
Penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023 juga mempertimbangkan RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, yaitu “Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022” sebagai berikut:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH.”

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Gambar 95 Keterkaitan RPJMD 2017-2022 Provinsi Banten dengan RPJMD 2019-2023 Kabupaten Tangerang



5.3.3 Keselarasan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Visi RPJMN 2020-2024:

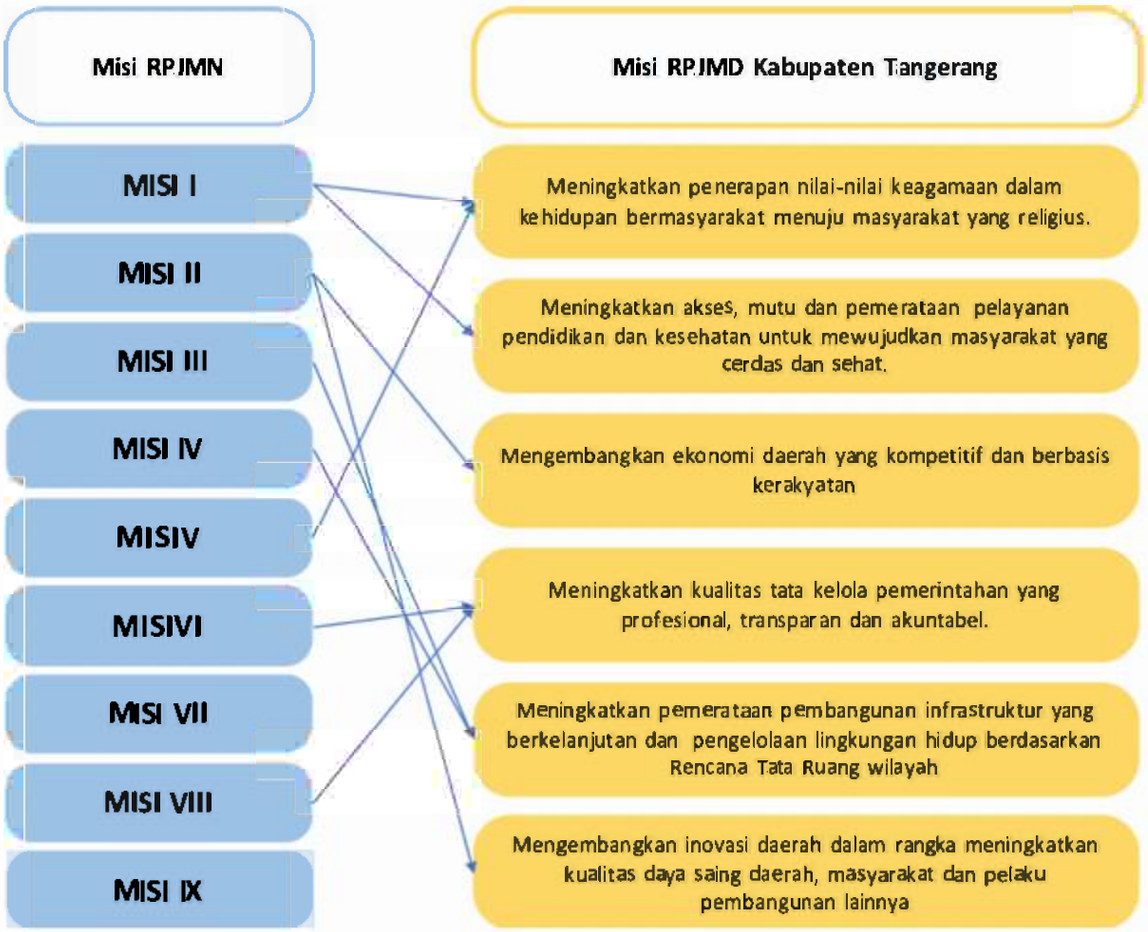
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan gotong-royong"

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 lihat Gambar 5.3.

Gambar 96 Keterkaitan RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD 2019-2023 Kabupaten Tangerang



5.3.4. Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Program Prioritas Nasional

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kabupaten Tangerang melakukan integrasi, sinkronsiasi dan sinergi penyusunan serta penyelarasan dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 (lampiran 1. Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang terhadap Program Prioritas Nasional).

BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera" dengan efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sementara itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalammencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke

waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Strategi pembangunan jangka menengah daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sebelum Perubahan)

VISI : Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera			
MISI 1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan rasa keamanan dan ketentraman dalam kehidupan beragama	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan lingkungan
			Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk mengurangi penyakit sosial masyarakat
			Peningkatan peran FKUB dan optimalisasi Gedung Bersama Keagamaan di setiap Kecamatan
		Menurunkan kasus konflik sosial	Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat
			Peningkatan perlindungan masyarakat (linmas)
		Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh agama	Peningkatan kesadaran keagamaan, kesejahteraan sosial dan inventarisasi sarana prasarana sosial
			Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas dan partisipasi lembaga dan tokoh agama
		Meningkatkan pendidikan karakter dan spiritualitas anak didik	Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pengembangan ekstrakulikuler baca tulis Al Quran

MISI 2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui PIS-PK	Peningkatan pelayanan kesehatan berbasis pendekatan keluarga
			Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
		Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit terakreditasi nasional
			Meningkatkan tata kelola manajemen dan sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rujukan
			Meningkatan kepesertaan JKN-KIS melalui jalur mandiri, PBI APBN dan PBI APBD
		Meningkatkan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Pembinaan ketahanan keluarga dan remaja
			Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri
		Menurunnya kasus kekerasan perempuan	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
			Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		Menurunnya kasus kekerasan anak	Advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan kualitas hidup anak
			Peningkatan kelembagaan dan partisipasi anak
	Meningkatnya	Meningkatkan akses dan	Peningkatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

	Kualitas Pendidikan	kualitas pelayanan pendidikan	Peningkatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
		Meningkatan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan
			Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan
		Meningkatkan minat baca masyarakat	Pengembangan koleksi bahan pustaka , sarana prasarana dan kerja sama perpustakaan
			Pengembangan layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca
		Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh budaya	Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pengembangan lembaga seni budaya

MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya Kemiskinan	Menurunnya Pengganggguran	Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu yang akurat	Peningkatan ketersediaan data PMKS dan pemanfaatan data terpadu serta sistem penanggulangan kemiskinan
			Peningkatan koordinasi dan integrase program penanggulangan kemiskinan
		Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	Meningkatkan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Menurunkan angka pengangguran	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha
			Optimalisasi pemanfaatan BLK dan bursa kerja
	Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan	Meningkatkan pendapatan per capita nelayan dan pembudidaya ikan	Meningkatkan produksi budidaya dan penangkapan ikan
		Meningkatkan pendapatan per kapita Petani	Meningkatkan kapasitas produksi pangan
			Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan;
		Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan
			Mengoptimalkan tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten;
		Meningkatkan kinerja bidang perdagangan	Meningkatkan peran BUMD dan BLUD
		Meningkatkan kinerja bidang perindustrian	Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Industri
		Meningkatkan kinerja bidang pariwisata	Mengoptimalkan pengelolaan obyek wisata dengan peningkatan infrastruktur penudukung
		Meningkatkan nilai investasi daerah	Meningkatkan investasi dan penanaman modal daerah

MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan lembaga dan kelembagaan ekonomi koperasi yang dibina	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro
		Meningkatnya lembaga dan kelembagaan ekonomi UMK yang dibina	Meningkatkan kualitas usaha mikro
			Meningkatkan fasilitasi kerjasama pemasaran
		Meningkakan kapasitas IKM	Melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar
			Melakukan revitalisasi pasar

MISI 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kinerja Perencanaan	Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran
			Meningkatkan ketersediaan satu data pembangunan yang akurat
		Meningkatkan Kinerja Keuangan	Meningkatan system pengelolaan belanja dan pendapatan daerah yang terintegrasi
			Meningkatkan system management asset daerah dan pengamanan asset daerah
		Meningkatkan tata kelola PAD	Meningkatkan integrasi sistem informasi pengelolaan Pendapatan Daerah

MISI 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan pelayanan Paten Kecamatan dan Kelurahan
			Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi
		Meningkatkan Kinerja Perijinan dan Non Perijinan	Menerapkan OSS dalam pelayanan sistem online perizinan
			Membangun Pusat Pelayanan Publik
		Meningkatkan pemanfaatan IT	Mengembangkan aplikasi terintegreasi antar sektor
		Meningkatkan kinerja kearsipan	Meningkatkan system layanan kearsipan berbasis teknologi dan digitalisasi arsip.
		Meningkatkan tertib administrasi kependudukan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Database Kependudukan yang berkualitas
		Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD
	Meningkatnya Integritas Aparatur	Meningkatkan Manajemen ASN	Mengembangkan system informasi kepegawaian yang terintegrasi
			Implementasi Kebijakan Manajemen ASN daalam pengembangan kapasitas dan karir aparatur
		Meningkatkan pengawasan daerah	Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
			Meningkatkan monitoring dan evaluasi pencapaian target Reformasi Birokrasi

MISI 5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya	Meningkatkan dan memelihara jalan dan jembatan
			Membangun akses jalan baru
		Menurunkan Luasan Kawasan Kumuh	Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman
			Menyediakan Sarana Air Bersih masyarakat
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana	Meningkatkan penanganan bencana yang terarah dan terkoordinasi
		Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi wilayah	Meningkatkan Perlengkapan Jalan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
		Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan	Membangun dan rehabilitasi gedung pemerintahan
			Membangun dan rehabilitasi bangunan sekolah
			Membangun dan rehabilitasi puskesmas rawat inap dan rumah sakit
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran Air, Tanah dan Udara	Meningkatkan pemantauan kualitas air,air limbah domestik, udara dan tanah serta penanganan pengaduan
		Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Private dan RTH	Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		Menngkatkan pengendalian	Melakukan penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang dan

MISI 5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah	Peraturan Zonasi
		Meningkatkan Pengendalian SSDEW (Situ, Sungai, Danau, Embung dan Waduk)	Menormalisasi sungai, danau, embung dan waduk

MISI 6 Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah	Meningkatnya kinerja inovasi daerah	Meningkatkan Inovasi Pemuda	Meningkatkan pembentukan Kelompok Wira Usaha Baru (WUB), memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengembangkan teknlogi tepat guna.
			Pengembangan lembaga Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan pembangunan Desa	Meningkatkan penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan desa
			Meningkatkan Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes
			Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya

MISI 6 Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan Inovasi OPD	Meningkatkan implementasi inovasi OPD
			Mengembangkan Produk Unggulan Daerah

Tabel 6.2 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 (Sesudah Perubahan)

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius	Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama	1. Meningkatkan kepatuhan *stakeholders* terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
			2. Meningkatkan pendidikan karakter dan spiritualitas peserta didik
			3. Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh agama
			4. Meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan petugas pemulasaran jenazah
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. Meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
			2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sarana / fasilitas kesehatan yang berkualitas
			3. Meningkatkan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya pengarusutamaan gender	1. Meningkatkan kualitas pembangunan yang responsif gender

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			2. Menyusun kebijakan berbasis gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
			2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
			3. Meningkatkan minat baca masyarakat
			4. Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh budaya
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor pariwisata	1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sektor pariwisata
		Meningkatnya jumlah investasi	1. Meningkatkan daya saing dan mempermudah investasi daerah
		Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/*skill*	1. Meningkatkan pelatihan ketenagakerjaan
		Meningkatnya produk hasil UMKM dan IKM	1. Meningkatkan produktivitas UMKM dan IKM
			2. Meningkatkan pertumbuhan industri daerah
			3. Meningkatkan pertumbuhan

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			perdagangan daerah
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan kinerja perencanaan dalam pembangunan daerah.
			2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan PAD.
			3. Meningkatkan implementasi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan.
			2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
			3. Meningkatkan kinerja kearsipan melalui implementasi teknologi dan digitalisasi.
			4. Meningkatkan kondusivitas regulasi untuk mendukung pembangunan daerah.
			5. Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan.
		Meningkatnya Integritas Aparatur	1. Meningkatkan kualitas manajemen ASN dengan fokus pada sistem kepegawaian dan

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			profesionalitas pegawai.
			2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan.
		Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan e-government	1. Meningkatkan cakupan pemanfaatan teknologi untuk mengakselerasi kualitas dan kapasitas pelayanan.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah	Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya
			2. Menurunkan Luasan Kawasan Kumuh
			3. Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana
			4. Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi wilayah
			5. Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan
			6. Meningkatkan ketersediaan transportasi umum
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Menurunkan tingkat pencemaran Air, Tanah dan Udara
			2. Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Privat dan RTH
			3. Meningkatkan pengendalian dan

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah
			4. Meningkatkan Pengendalian SSDEW (Situ, Sungai, Danau, Embung dan Waduk)
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan timbulan sampah
		Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang	2. Meningkatkan layanan pencegahan bencana alam dan non-alam
			3. Meningkatkan layanan penyelamatan, dan evakuasi bencana alam dan non-alam
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya	Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah	Meningkatkan Kinerja Inovasi Daerah	1. Meningkatkan inovasi pemuda
			2. Meningkatkan inovasi perangkat daerah untuk memperkuat kinerja pemerintahan
			3. Meningkatkan inovasi yang memiliki nilai tambah pada ekonomi daerah.

6.2. Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang 2019 - 2023

6.2.1. Arah Kebijakan Tahunan

1. Arah Kebijakan Tahun 2019

Pembangunan tahun 2019 diarahkan pada: Pemantapan Infrastruktur, Penguatan Daya Saing Serta Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas pembangunan tahun 2019 diarahkan pada:

a. Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama serta kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, politik, dan sosial
b. Mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular serta upaya pencegahannya melalui deteksi dini penyakit, meningkatan lingkungan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat
c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
d. Meningkatkan kompetensi tenga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha
e. Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani dan nabati dalam jumlah dan keberagaman
f. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman
g. Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan
h. Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah
i. Mengoptimalkan pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan dan transparansi

2. Arah Kebijakan Tahun 2020

Pembangunan tahun 2020 diarahkan pada: Pemulihan Ekonomi dan Sosial

Prioritas pembangunan tahun 2020 diarahkan pada:

a. Menerapkan Ekstrakulikuler Keagamaan untuk siswa SD dan SMP dan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal
b. Mengoptimakan puskesmas untuk melaksanakan Program Tangerang Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK)
c. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan
d. Mengembangkan cadangan pangan di pekarangan dan lahan tidur
e. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui Pelatihan berbasisi kompetensi, Pelatihan berbasis Masyarakat
f. Mengembangkan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak

g. Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya
h. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman berbasis kawasan
i. Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi dan teknologi informasi

3. Arah Kebijakan Tahun 2021

Pembangunan tahun 2021 diarahkan pada: Percepatan Pemulihan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada:

a. Peningkatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
b. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender
c. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
d. Percepatan pemulihan sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
e. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
f. Perumusan kebijakan dan pembangunan sistem yang mendukung berkembangnya budaya inovasi

4. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

a. Penguatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender
c. Penguatan kualitas dan daya saing daerah
d. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesionel, transparan, dan akuntabel.
e. Peningkatan Infrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah
f. Meningkatkan iklim inovasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan ekonomi.

5. Arah Kebijakan Tahun 2023 (masa peralihan)

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia, produktivitas ekonomi yang berbasis kerakyatan, serta pembangunan berkelanjutan yang berbasis inovasi

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

a. Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
b. Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
c. Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing
d. Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
e. Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
f. Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal

6.2.2. Arah Kebijakan Penanganan Covid - 19 dan Pemulihan Dampak Ekonomi

Kejadian luar biasa Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan langkah ke depan dalam hal pembangunan jangka menengahnya dengan melakukan penyesuaian pada beberapa target kinerja akibat dari *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu merumuskan kembali arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Berdasarkan hal di atas, arah kebijakan Kabupaten Tangerang dalam penanganan pandemi COVID-19 juga memiliki tiga prioritas yang sama dengan Pemerintah Provinsi Banten, yaitu berfokus kepada penangangan kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS/*Social Safety Net*), dan pemulihan dampak ekonomi.

Kebijakan penanganan kesehatan dan pencegahan meluasnya kasus Covid 19 terus dilakukan, salah satu caranya dengan memperkuat

penguatan protokol kesehatan 5 M, menggencarkan 3T yaitu pemeriksan dini (*testing*), pelacakan (*tracing*) dan perawatan (*treatment*), melakukan program vaksinasi massal, serta turut memperkuat tim penanganan Covid-19 sebagai pengendalian penyebaran dan mengurangi risiko Covid-19 yang berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Penangangan Covid-19, mengingat kondisi saat ini masih terdapat keterbatasan tenaga kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan saat penanganan pandemi Covid-19, seperti amasih kurangnya kapasitas ruang perawatan yang lebih banyak (ruang isolasi, icu), sarana pendukung medis seperti ketersediaan alat tes kesehatan dan Covid-19, laboratorium, dsb. Selain kebijakan tersebut, dalam upaya mengurangi penyebaran kasus Covid-19 ditetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga keputusan Pemberlakuan Pembatasan KegiatanMasyarakat (PPKM). Namun di sisi lain dampak dari kebijakan pembatasan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat tersebut sangat berpengaruh pada kinerja perekonomian yang melambat secara signifikan, antara lain dampaknya adalah berkurangnya daya beli masyarakat, menurunnya pendapatan masyarakat, berkurangnya produksi yang mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja dan pada akhirnya menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu perlu penanganan melalui strategi dan kebijakan yang taktis, sistematis, dan kebijakan yang bersifat humanis dengan memperhatikan dan memberdayakan potensi yang ada.

Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penangangan Covid-19 masih melanjutkan kebijakan pemulihan dampak ekonomi akibat Covid-19, yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu :

1. Mendukung program Pemerintah dalam implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemic Covid-19.
2. Merencanakan penganggaran fokus kepada program penanganan Kesehatan dan pemulihan dampak ekonomi akibat Covid-19.
3. Pengalokasian anggaran darurat untuk bantuan sosial dan memobilisasi anggaran bantuan lainnya dari CSR (*Corporate Social Responsibility*).
4. Mendorong penggunaan dana desa dan kecamatan untuk mendukung dalam fasilitasi UMKM di tingkat desa/ Kecamatan.
5. Mendukung dan menjaga kestabilan harga dan ketahanan pangan masyarakat.

6. Meringankan beban masyarakat yang menjadi wajib pajak, agar roda perekonomian daerah tetap berjalan, melalui pemberian insentif dalam bentuk pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha yang terdampak.
7. Menstimulasi dan memulihkan pelaku usaha mikro dan menengah, agar kegiatan usahanya tetap berjalan melalui fasilitasi pengembangan produk UMKM dan fasilitasi promosi berbasis digital dan wadah/ event promosi lainnya.
8. Mengurangi pengangguran dengan memberikan peluang usaha bagi korban PHK untuk menjadi Wira Usaha Baru dan kegiatan padat karya serta bantuan pemberdayaan kelompok masyarakat

Tabel 6.3 Arah Kebijakan Tahunan (Sebelum Perubahan)

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama serta kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, politik, dan sosial 2. Mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular serta upaya pencegahannya melalui deteksi dini penyakit, meningkatan lingkungan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat 3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	1. Menerapkan Ekstrakulikuler Keagamaan untuk siswa SD dan SMP dan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal 2. Mengoptimakan puskesmas untuk melaksanakan Program Tangerang Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) 3. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan	1. Meningkatkan pembinaan masyarakat akan nilai luhur kebangsaan dan Kerukunan antar umat beragama 2. Meningkatkan tata kelola manajemen dan sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan serta pembangunan Rumah Sakit 3. Menegakkan Perda dan/ atau Perkada dengan cara Preemtif,	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan serta Jaminan Kesehatan 2. Meningkatkan implementasi inovasi OPD 3. Meningkatkan Pengembangan Produk Lokal dan Unggulan Daerah 4. Meningkatkan peran BUMD dan BUMDES dalam pengelolaan hasil produksi daerah 5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan dalam peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan fungsionalisasi Puskesmas DTP dan Rumah Sakit 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dalam menciptakan sekolah yang ramah Anak dan berkarakter spiritulitas 3. Meningkatkan produk lokal yang berdaya saing dan unggulan daerah yang mendukung peningkatan usaha mikro 4. Pemantapan tatakelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang efisien, efektif dengan system yang terintegrasi 5. Meningkatkan kapasitas

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
dan kesehatan 4. Meningkatkan kompetensi tenga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha 5. Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani dan nabati dalam jumlah dan keberagaman 6. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman 7. Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan 8. Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan	4. Mengembangkan cadangan pangan dipekarangan dan lahan tidur 5. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui Pelatihan berbasisi kompetensi, Pelatihan berbasis Masyarakat 6. Mengembangkan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak 7. Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya 8. Meningkatkan sarana dan prasarana	Preventif dan Represif 4. Meningkatkan pembentukan Kelompok Wira Usaha Baru (WUB), memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengembangkan teknlogi tepat guna 5. Meningkatkan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 6. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Industri 7. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesan dalam	6. Meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur kepariwisataan yang terintegrasi 7. Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro 8. Penguatan tatakelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang efisien, efektif dan berbasis teknologi 9. Meningkatkan Kapasitas infrastruktur jalan dan Perlengkapan Jalan serta Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya 6. Berfungsinya infrastruktur pendukung kepariwisataan

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
pengendalian kebijakan Kepala Daerah 9. Mengoptimalkan pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan dan transparansi	lingkungan perumahan dan permukiman berbasis kawasan 9. Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi dan teknologi informasi	rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan 8. Meningkatkan Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes 9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dasar dan penunjang arus ekonomi.		

Tabel 6.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang 2019 -2023 (Sesudah Perubahan)

Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang				
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Pemantapan Infrastruktur, Penguatan Daya Saing Serta Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan	Pemulihan Ekonomi dan Sosial	Percepatan Pemulihan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia, produktivitas ekonomi yang berbasis kerakyatan, serta pembangunan berkelanjutan yang berbasis inovasi
a. Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama serta kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, politik, dan sosial b. Mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan penyakit menular dan tidak	a. Menerapkan Ekstrakulikuler Keagamaan untuk siswa SD dan SMP dan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal b. Mengoptimakan puskesmas untuk melaksanakan Program Tangerang Sehat dengan	a. Peningkatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama b. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana	a. Penguatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan	a. Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama b. Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender c. Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja

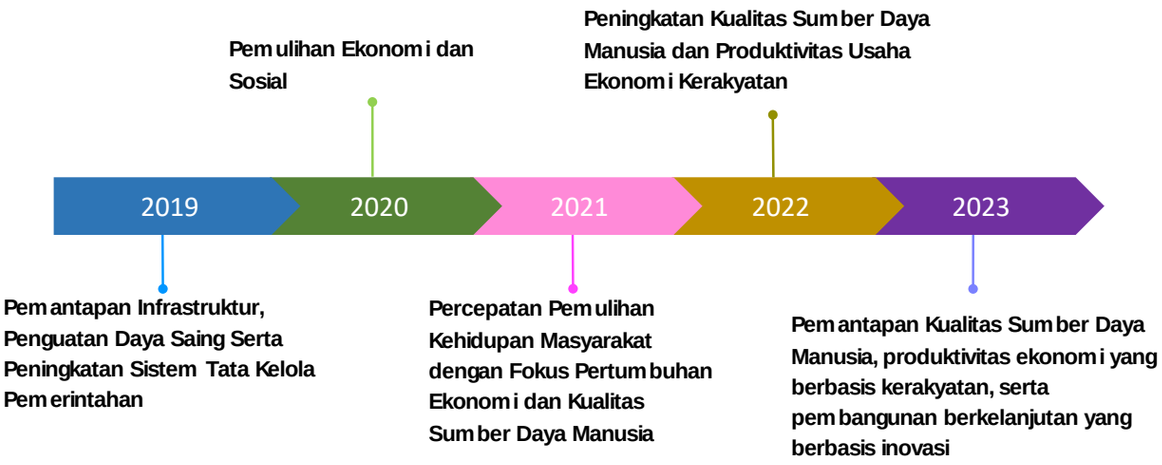
Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang				
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
menular serta upaya pencegahannya melalui deteksi dini penyakit, meningkatan lingkungan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat c. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan d. Meningkatkan kompetensi tenga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha e. Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani dan nabati dalam jumlah dan	pendekatan keluarga (PIS-PK) c. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan d. Mengembangkan cadangan pangan dipekarangan dan lahan tidur e. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui Pelatihan berbasisi kompetensi, Pelatihan berbasis Masyarakat	kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender c. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah d. Percepatan pemulihan sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. e. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang	pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender c. Penguatan kualitas dan daya saing daerah d. Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesionel, transparan, dan akuntabel. e. Peningkatan Infrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah f. Meningkatkan iklim	yang unggul dan berdaya saing d. Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. e. Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas f. Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal

Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang				
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
keberagaman f. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman g. Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan h. Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah i. Mengoptimalkan pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan dan transparansi	f. Mengembangkan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak g. Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya h. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman berbasis kawasan i. Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi dan teknologi	berkualitas f. Perumusan kebijakan dan pembangunan sistem yang mendukung berkembangnya budaya inovasi	inovasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan ekonomi.	

Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang				
Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	informasi			

Gambar 97 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sebelum Perubahan)

Gambar 98. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Setelah Perubahan)



6.3. Arah Pengembangan Wilayah

Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan visi Kabupaten Tangerang sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

Lingkup Wilayah Kabupaten Tangerang secara geografis terletak pada koordinat 106°20’–106°44’ Bujur Timur dan 5°58’–6°21’ Lintang Selatan., dengan luas daratan kurang lebih 103.012 (seratus tiga ribu dua belas) hektar, dengan sempadan pantai 325 Ha. Untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, maka disusunlah kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

6.3.1. Kebijakan Umum

Arah pengembangan wilayah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011 - 2031.

Kebijakan pengembangan wilayah sesuai Kebijakan Penataan Ruang Daerah meliputi:

a. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional;
b. Pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah Kabupaten;
c. Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan;
d. Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
e. Rencana pengembangan RTH.

Untuk melaksanakan kelima kebijakan di atas, disusunlah strategi penataan ruang. Tujuan Strategi Penataan Ruang ialah untuk mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten Tangerang. Adapun Strategi Penataan Ruang sebagai berikut :

a. Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah meliputi:
    1. Mempersiapkan Ruang Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tangerang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan;
    2. Meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung Kawasan Industri; dan
    3. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.
b. Strategi pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang meliputi:
    1. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan industri dan pertanian.
    2. Mewujudkan pusat–pusat kegiatan Wilayah baru sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tangerang.
    3. Mengembangkan fungsi pusat–pusat kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang sesuai dengan hirarkinya.
    4. Meningkatkan intensitas pembangunan permukiman di tiap kecamatan melalui pola pembangunan vertikal, pola perluasan

dan/atau pengembangan kawasan permukiman dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.

5. Menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten Tangerang dan
6. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa.

c. Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura meliputi:
   1. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di atas lahan hasil reklamasi sepanjang pantai utara wilayah Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan Daerah sekitarnya; dan
   2. Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai Utara dengan wilayah daratan Kabupaten Tangerang.

d. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara meliputi:
   1. Mendukung penetapan kawasan pertahanan nasional dengan fungsi khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara.
   2. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara.
   3. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Lindung dan/atau Kawasan Peruntukan Budi Daya tidak terbangun disekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara dengan Kawasan Peruntukan Budi Daya terbangun; dan
   4. Membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

e. Rencana pengembangan RTH pada kawasan perkotaan ditetapkan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) dari Kawasan Perkotaan yang direncanakan terdiri atas:
   1. RTH publik 20% (dua puluh perseratus); dan
   2. RTH privat 10% (sepuluh perseratus).

6.3.2. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan struktur pengembangan struktur ruang Kabupaten Tangerang mengacu kepada Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi:

6.3.2.1. Kebijakan Sistem Pusat Pelayanan

Sistem perkotaan Kabupaten Tangerang meliputi:

a. PKN meliputi Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.
b. PKN dalam RTRW Provinsi Banten meliputi Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang.
c. Kawasan perkotaan meliputi:
    1. Kawasan perkotaan Balaraja; dan
    2. Kawasan perkotaan Tigaraksa
d. PKL dalam RTRW Provinsi meliputi :
    1. PKL kawasan Kronjo;
    2. PKL kawasan Tigaraksa; dan
    3. PKL kawasan Pagedangan.
e. Pusat-pusat lain di dalam wilayah Kabupaten Tangerang, meliputi:
    1. PPK meliputi:
        a) PPK Kecamatan Balaraja;
        b) PPK Kecamatan Curug;
        c) PPK Kecamatan Pasar Kemis; dan
        d) PPK Kecamatan Teluknaga.
    2. PPL meliputi:
        a) PPK Kecamatan Sepatan Timur;
        b) PPK Kecamatan Sukadiri;
        c) PPK Kecamatan Mauk;
        d) PPL Kecamatan Sukamulya;
        e) PPL Kecamatan Kresek; dan
        f) PPK Kecamatan Gunung Kaler.

6.3.2.2 Kebijakan Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Tangerang meliputi sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi sistem jaringan sumber daya air; sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi meliputi :

a. Sistem jaringan transportasi darat;

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

1. Sistem jaringan jalan;

a) Jaringan Jalan Tol meliputi:

1) Jalan Tol Tangerang-Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti;
2) Jalan Tol Sepatan Timur-Pakuhaji melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji;
3) Jalan Tol Serpong-Balaraja melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Solear, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja;
4) Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Sindang Jaya;
5) Jalan Tol Semanan-Rajeg-Balaraja melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Sindang Jaya.
6) Jalan Tol Prospektif melewati Kecamatan Legok dan Kecamatan Curug; dan
7) Jalan Tol Bojonggede-Balaraja.

b) Jaringan jalan arteri primer, meliputi :

1) Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti; dan
2) Jalan Teluknaga-Bandar udara Soekarno Hatta.

c) Jaringan jalan kolektor primer, meliputi;

1) Jalan Kronjo-Mauk-Teluknaga-Batas DKI Jakarta melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekarbaru;

2) Jalan Tigaraksa-Cisoka-Cikuya-Cikasungka melewati Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Solear;
3) Jalan Malang Nengah-Ranca Kelapa-KutrukTigaraksa melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa;
4) Jalan Cisauk-Jaha melewati Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok;
5) Jalan Bitung-Curug-Legok-Parung melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok;
6) Jalan Simpang Gading Serpong-SerenadeKebon Nanas berada di Kecamatan Kelapa Dua;
7) Jalan Bojong-Pemda melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa;
8) Jalan Cikupa-Pasar Kemis melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Pasar Kemis
9) Jalan Jatiuwung-Pasar kemis berada di Kecamatan Pasar Kemis;
10) Jalan Sepatan-Mauk melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, dan Kecamatan Mauk;
11) Jalan Kronjo-Ceplak melewati Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kresek, dan Kecamatan Sukamulya;
12) Jalan Balaraja-Ceplak melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Sukamulya;
13) Jalan Kutruk-Jambe berada di Kecamatan Jambe;
14) Jalan Kresek-Jenggot melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru;
15) Jalan Kresek-Pejamuran melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru;
16) Jalan Ceplak-Kresek melewati Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya;
17) Jalan Cisoka-Megu-Jayanti melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Cisoka;
18) Jalan Cangkudu-Cisoka melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka;

19) Jalan Cikuya-Cikasungka (Batas Bogor) berada di Kecamatan Solear;
20) Jalan Tigaraksa-Cikuya melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear;
21) Jalan Cibadak-Tigaraksa melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Cikupa;
22) Jalan Tigaraksa-Jambe melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe;
23) Jalan Jambe-Batok berada di Kecamatan Jambe;
24) Jalan Serdang Kulon-Serdang Wetan melewati Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok;
25) Jalan Pasar Korelet-Serdang Kulon berada di Kecamatan Panongan;
26) Jalan Cikupa-Serdang Kulon melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan;
27) Jalan Curug-Peusar melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan;
28) Jalan Curug-Binong berada di Kecamatan Curug;
29) Jalan Jatake (Batas Kota Tangerang)-Binong berada di kecamatan Curug;
30) Jalan Binong-Bencongan melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua;
31) Jalan Curug-Carangpulang melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua;
32) Jalan Legok-Pagedangan melewati Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok;
33) Jalan Cisauk-Rumpin berada di Kecamatan Cisauk;
34) Jalan Jambu-Patramanggala melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri;
35) Jalan Rajeg-Mauk melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk;
36) Jalan Pasar Kemis-Rajeg melewati Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg;
37) Jalan Jati Gintung-Cituis-Sukadiri berada di Kecamatan Sukadiri;

38) Jalan Gardu-Tanah Merah melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur;
39) Jalan Sepatan - Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur;
40) Jalan Bayur Sangego-Kedaung Barat berada di Kecamatan Sepatan Timur;
41) Jalan Kedaung Barat-Kali Baru (Kohod) melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji;
42) Jalan Bojong Renged-Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga;
43) Jalan Teluknaga-Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga;
44) Jalan Pangkalan-Tanjung Burung berada di Kecamatan Teluknaga;
45) Jalan Bojongrenged-Kosambi berada di Kecamatan Kosambi;
46) Jalan Jatimulya-Dadap berada di Kecamatan Kosambi;
47) Jalan Parahu-Buniayu berada di Kecamatan Sukamulya;
48) Jalan Jambu-Buniayu-Jengkol melewati Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Rajeg;
49) Jalan Kukun-Daon-Jambu berada di Kecamatan Rajeg;
50) Jalan Cadas-Kukun melewati Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg;
51) Jalan Suradita-Kranggan berada di Kecamatan Cisauk;
52) Jalan Karawaci-Legok melewati Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok;
53) Jalan Kohod-Tanjung Burung-Tanjung PasirMuara-Lemo-Salembaran Jaya-Kosambi Barat-Kosambi Timur-Dadap melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi;
54) Jalan Jenggot-Muncung-Kronjo-Pagedangan Ilir-Lontar-Karanganyar-Patra Manggala Mauk Barat-Mauk Timur-Ketapang melewati Kecamatan mekarbaru, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, dan Kecamatan Mauk;

55) Jalan Cikupa-Sindang Jaya-Rajeg-Mauk melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk;
56) Jalan Balaraja-Kelapa Dua melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kelapa Dua;
57) Jalan Cadas-Kukun-Benda-Buniayu-Jengkol melewati kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek; dan
58) Jalan Lintas Bandar Udara melewati kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi.

d) Jaringan Jalan Lokal Primer;
   1) Jalan Peusar-Budimulya-Bojong-Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan;
   2) Jalan Margasari-Mekar Bakti melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan;
   3) Jalan Sampora-Pakulonan melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua;
   4) Jalan Kantor Pos-Pasar Gudang berada di Kecamatan Tigaraksa;
   5) Jalan Ciatuy-Al-Amjad berada di Kecamatan Tigaraksa;
   6) Jalan penghubung Wilayah perbatasan; dan
   7) Jalan yang memanfaatkan Daerah Sempadan Sungai.
e) Jaringan Jalan lain diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f) Rencana Jalan khusus meliputi:
   1) Jalan khusus tambang berada di Daerah sesuai hasil studi kelayakan dan Peraturan Perundang-Undangan; dan
   2) Jalan khusus perimeter utara bandar udara Soekarno-Hatta yang berada pada Kecamatan Kosambi.
g) Terminal penumpang;
   1) terminal penumpang tipe A;
   2) terminal penumpang tipe B; dan

3) terminal penumpang tipe C
4) peningkatan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Balaraja;
5) peningkatan terminal penumpang tipe B di Kecamatan Teluknaga
6) Terminal penumpang tipe C meliputi:
   (a) Kecamatan Cisauk;
   (b) Kecamatan Pakuhaji;
   (c) Kecamatan Tigaraksa;
   (d) Kecamatan Solear;
   (e) Kecamatan Kelapa Dua;
   (f) Kecamatan Cisoka;
   (g) Kecamatan Balaraja;
   (h) Kecamatan Kronjo;
   (i) Kecamatan Kresek; dan
   (j) Kecamatan Mauk.
7) Terminal barang

   Terminal barang meliputi:
   (a) Kecamatan Pasar Kemis;
   (b) Kecamatan Jambe;
   (c) Kecamatan Jayanti; dan
   (d) Terminal logistik tambang berada di Daerah.
8) Jembatan jembatan timbang.

   Jembatan timbang berada di Kecamatan Curug.

3. Sistem jaringan kereta api;

   Sistem jaringan perkeretaapian merupakan perkeretaapian umum yang melayani angkutan penumpang dan barang meliputi:

   a) jaringan jalur kereta api antarkota yang melintas Daerah untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang meliputi:
      1) jalur kereta api DKI Jakarta-Merak;
      2) jalur kereta api Serang-Cikande-Cikupa-Serpong;
      3) jalur kereta api Bojonegara-Pantura-Tanjung Priuk;
      4) jalur kereta api Tanah Abang-SerpongParung Panjang-Cikuya;

5) jalur angkutan massal berbasis rel Jalur Timur-Barat Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja (Cikarang-Balaraja); dan
6) jalur angkutan massal berbasis rel Cadas-Tangerang.

b) jaringan jalur kereta api perkotaan dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk mewujudkan konektivitas pusat-pusat kegiatan di dalam Kawasan Perkotaan inti, serta antara Kawasan Perkotaan inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c) Stasiun kereta api meliputi:
1) stasiun Cikuya dan stasiun Tigaraksa berada di Kecamatan Solear;
2) stasiun Daru berada di Kecamatan Jambe;
3) stasiun Cicayur dan stasiun Cisauk berada di Kecamatan Cisauk;
4) stasiun Balaraja berada di Kecamatan Balaraja;
5) stasiun Kosambi berada di Kecamatan Kosambi;
6) stasiun Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga; dan
7) stasiun kereta api lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

d) Rencana pembangunan TOD.

4. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Jaringan sungai, danau dan penyeberangan merupakan pengembangan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:

a) lintas penyeberangan antarprovinsi;

Rencana pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang melayani pulau-pulau berpenghuni Cituis-Kepulauan Seribu, Tanjungkait-Kepulauan Seribu, TanjungpasirKepulauan Seribu, Dadap-Kepulauan Seribu.

b) pelabuhan sungai dan danau

pelabuhan sungai dan danau pengumpul meliputi:
1) rencana pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan;

2) rencana pengembangan angkutan situ/danau/waduk pada situ/danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan; dan
3) rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan

c) pelabuhan sungai dan danau pengumpan meliputi:
1) Kecamatan Kronjo;
2) Kecamatan Sepatan;
3) Kecamatan Pakuhaji; dan
4) Kecamatan Teluknaga.

d) pelabuhan penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan meliputi:
1) Kecamatan Pakuhaji; dan
2) Kecamatan Teluknaga.

b. Sistem jaringan transportasi laut

Sistem jaringan transportasi laut meliputi pelabuhan laut dan alur pelayaran.

1. Rencana Pembangunan Pelabuhan laut
a) pelabuhan pengumpul yang berada di Kecamatan Kemiri;
b) pelabuhan pengumpan lokal yang berada di Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Teluknaga; dan Kecamatan Kronjo; dan
c) terminal khusus yang meliputi terminal khusus batu bara yang berada di Kecamatan Kemiri dan terminal khusus tambatan kapal di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Pakuhaji.

2. Alur Pelayaran

Alur pelayaran sebagaimana akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

c. Sistem jaringan transportasi udara.

Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas bandar udara dan ruang udara.

1. Bandar Udara

Bandar udara meliputi bandar udara yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan primer (bandar udara internasional Soekarno-Hatta yang meliputi Kecamatan Kosambi dan Teluknaga) dan bandar udara pengumpan (bandar udara Budiarto berada di Kecamatan Legok).

2. Ruang Udara

   Ruang udara merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:

   a) KKOP Bandara Soekarno–Hatta meliputi Kecamatan Teluknaga;Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sukadiri; Kecamatan Mauk; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Pasar Kemis; dan Kecamatan Sindangjaya.
   b) KKOP Bandara Budiarto meliputi : Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Solear, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Jambe, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Cikupa.
   c) KKOP lembaga penerbangan dan antariksa nasional Rumpin berada di Kecamatan Cisauk.

Sistem Jaringan Energi

Rencana sistem jaringan energi terbagi menjadi:

a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi

   Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi merupakan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan meliputi:

   1. jaringan gas melewati Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Cisoka;

2. jaringan gas Serpong–Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti;
3. jalur pipa transmisi gas melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Jayanti; dan
4. jaringan gas avtur dari pantai utara ke bandar udara Soekarno-Hatta melewati Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi.

b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

1. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, berupa: PLTU Lontar di Kecamatan Kemiri, pembangkit tenaga listrik tenaga surya berada di Kabupaten Tangerang, dan pembangkit listrik lainnya berupa instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
2. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
   a) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi :
      1) SUTET yang meliputi jalur yang menghubungkan Balaraja-Lengkong-Gandul; jalur yang menghubungkan Balaraja- Kembangan; jalur yang menghubungkan PLTU Jawa-5/Bojonegara – Lontar; jalur yang menghubungkan PLTU Lontar-Teluk Naga; jalur yang menghubungkan lontar – tx. Teluk naga; dan jalur yang menghubungkan Teluk Naga-Muara Karang.
      2) SUTT yang melintasi Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Curug, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Solear, Kecamatan Panongan, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Kelapa Dua;

3) Saluran transmisi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

b) Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi: jaringan saluran udara tegangan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, jaringan saluran udara tegangan rendah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang; dan saluran distribusi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

c) Gardu induk yang meliputi:
   1) gardu induk New Balaraja berada di Kecamatan balaraja;
   2) gardu induk cikupa berada di Kecamatan Cikupa;
   3) gardu induk Lippo Curug, gardu induk Jatake II, dan gardu induk Summarecon Gading Serpong berada di Kecamatan Kelapa Dua;
   4) gardu induk Lontar berada di Kecamatan Kemiri;
   5) gardu induk Bumi Serpong Damai dan gardu induk Legok berada di Kecamatan Pagedangan;
   6) gardu induk Millenium, gardu induk Sinar Sahabat, dan gardu induk Citra Habitat berada di Kecamatan Panongan;
   7) gardu induk Pasar Kemis II, gardu induk Pasar Kemis, dan gardu induk Gajah Tunggal berada di Kecamatan Pasar Kemis;
   8) gardu induk Sepatan dan gardu induk Sepatan II berada di Kecamatan Sepatan;
   9) gardu induk Balaraja berada di Kecamatan Sukamulya;
   10) gardu induk Teluk Naga berada di Kecamatan Teluknaga;
   11) gardu induk Lautan Steel, gardu induk Spinmill, dan gardu induk Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa;
   12) gardu induk teluk naga II berada di Kecamatan Kosambi;
   13) gardu induk Tangerang Baru II dan gardu induk Suvarna Sutera berada di Kecamatan Sindang Jaya;
   14) gardu induk Tegangan Ekstra Tinggi Lengkong, dan gardu induk Lengkong II berada di Kecamatan Cisauk;

15) gardu induk Tegangan Ekstra Tinggi Cikupa, gardu induk Cikupa New, dan gardu induk Switching Curug berada di Kecamatan Curug; dan
16) pengembangan jaringan gardu induk lainnya sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sistem Jaringan Telekomunikasi

a. Jaringan Tetap

Rencana jaringan telekomunikasi tetap merupakan jaringan kabel berjenis tembaga atau fiber optik yang dikelola oleh provider/swasta.

1. Pengembangan jaringan primer melintasi ruas jalan Tangerang-Merak dan jaringan sekunder tersebar di seluruh kecamatan.
2. Pengembangan jaringan telekomunikasi pada pusat–pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, permukiman serta kegiatan lainnya.
3. pengembangan dan pengaturan menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam zona-zona telekomunikasi tersebar di seluruh Daerah.

b. Jaringan Bergerak

Jaringan Bergerak jaringan seluler yang dikelola oleh provider/swasta.

1. Pengembangan dan Pengaturan menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam zona-zona telekomunikasi tersebar di seluruh kecamatan.
2. Pengembangan jaringan Sentral Telepon Otomat (STO) yang tersebar di wilayah kabupaten Tangerang

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

a. Jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada pada wilayah Kabupaten
   1. wilayah sungai lintas Provinsi wilayah sungai Ciliwung-Cisadane meliputi daerah aliran sungai Cimanceuri, daerah aliran sungai Cirangon, daerah aliran sungai Cileuleus, daerah aliran sungai

Cimauk, daerah aliran sungai Cirarab, daerah aliran sungai Ciasin, daerah aliran sungai Cisadane, dan daerah aliran sungai Cikapadilan; dan

2. wilayah sungai lintas Provinsi wilayah sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian meliput meliputi daerah aliran sungai Cidurian, daerah aliran sungai Cirumpak dan daerah aliran sungai Cipayeun.

b. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota, meliputi: Sungai Cicayur, Sungai Cicarab, Sungai Cisabi, dan Kali Perancis

c. Sistem jaringan sumber daya air kabupaten

1. Sumber Air

a) Air permukaan di Wilayah Sungai yang meliputi : Sungai Ciapus, Sungai Ciasin, Sungai Cibarebeg, Sungai Cibiuk/Cilaku; Sungai Cibolang; Sungai Cibugel; Sungai Cicalengka; Sungai Ciconteng; Sungai Cigarukgak; Sungai Cimauk; Sungai Cijantra; Sungai Cikakalen; Sungai Cikolear; Sungai Cileuleus; Sungai Cilongo; Sungai Cilongok, Sungai Cilowong, Sungai Cimaneuh, Sungai Cimanceuri, Sungai Cimatuk; Sungai Ciodeng; Sungai Cipasilian; Sungai Cipayaeun; Sungai Cirajeun; Sungai Cirangon; Sungai Cirumpak; Sungai Cisauk; Sungai Ciselatip; Sungai Cisoge; Sungai Cituis; Kali Ketapang; Kali Kramat; Kali Apung; Kali Asin; Sungai Tahang; kali Ketapang; kali Kramat; kali Apung; dan kali Asin.

b) Situ/waduk yang meliputi: situ Bojong di Kecamatan Cikupa; situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan; tandon air di Kecamatan Cikupa dan situ Cilongok yang di Kecamatan Pasar Kemis; situ Gabus di Kecamatan Gunung Kaler; situ Garukgak di Kecamatan Kresek; situ Gede di Kecamatan Sukadiri; situ Genggong di Kecamatan Gunung Kaler; situ Jambu di Kecamatan Rajeg; situ Jengkol di Kecamatan Solear; situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua; situ Kemuning di Kecamatan Sukamulya; situ Kepuh di Kecamatan Pakuhaji; situ Kwaron di Kecamatan Sindang Jaya; situ Panggang/Gelam di Kecamatan pasar kemis; situ dadap di Kecamatan Pasar Kemis; situ Pangodokan di Kecamatan Pasar Kemis; situ Pasir Gadung di Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Sindang Jaya; situ Patrasana di

Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya; situ Pondok di Kecamatan Sindang Jaya; situ Ranca Ilat di Kecamatan Kronjo situ Rawa Setingin di Kecamatan Kemiri; situ Sulang di kecamatan Sepatan; situ Waluh di Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekarbaru; situ Warungrebo di Kecamatan Sindang Jaya; dan situ Koja di Kecamatan Sepatan.

c) air tanah meliputi cekungan air tanah Serang Tangerang.

2. Prasarana Sumber Daya Air

a) Jaringan irigasi, meliputi:

1) Jaringan irigasi primer dan sekunder yang tersebar di seluruh wilayah
2) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi Daerah Irigasi Cisadane dan Cidurian
3) Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai Peraturan Daerah No 9 tahun 2020 terkait perubahan RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011 - 2031
4) Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukamulya 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukamulya 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukadiri 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukadiri 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Rajeg 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Rajeg 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan mekarbaru 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan mekarbaru 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Mauk 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Mauk 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kronjo 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kronjo 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kresek 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kresek 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kresek 3, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kemiri 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kemiri 2, Daerah Irigasi berada di

Kecamatan Kemiri 3, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Gunung Kaler 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Gunung Kaler 2, dan Daerah Irigasi berada di Kecamatan Gunung Kaler 3.

5) Daerah Irigasi tambak berupa Daerah Irigasi susukan yang meliputi Daerah Irigasi tambak Dadap, Daerah Irigasi tambak Jenggot, Daerah Irigasi tambak Karang Anyar, Daerah Irigasi tambak Ketapang, Daerah Irigasi tambak Kohod, Daerah Irigasi tambak Kosambi Barat, Daerah Irigasi tambak Kosambi Timur, Daerah Irigasi tambak Kramat, Daerah Irigasi tambak Kronjo, Daerah Irigasi tambak Lemo, Daerah Irigasi tambak Muara, Daerah Irigasi tambak Muncang, Daerah Irigasi tambak Pagedangan Ilir, Daerah Irigasi tambak Patra Manggala, Daerah Irigasi tambak Salembaran Jati, Daerah Irigasi tambak Salembaran Jaya, Daerah Irigasi tambak Sukawali, Daerah Irigasi tambak Tanjung Burung, dan Daerah Irigasi tambak Tanjung Pasir.

d. Sistem pengendalian banjir, meliputi:
   1. Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase pada drainase primer, sekunder, dan tersier;
   2. normalisasi Sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang
   3. normalisasi situ/waduk yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang
   4. pengembangan fungsi dan penataan bantaran sungai Cisadane, sungai Cidurian, sungai Cirarab, dan sungai Cimanceuri;
   5. operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien;
   6. memperluas Daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran drainase khususnya berada di lokasi banjir;
   7. penerapan manajemen Daerah pengaliran sungai, situ, dan pantai dengan membentuk badan pengelola;

8. pembangunan Kolam Tandon Air direncanakan berada di Daerah;
9. pemanfaatan situ/waduk serta mengendalian pemanfaatan ruang disekitarnya untuk menjaga fungsi situ/waduk sebagai kolam penyimpanan dan pengendali banjir;
10. pengembangan bendung Ranca Sumur; dan
11. Pembangunan tanggul pantai.

e. Sistem jaringan air baku

Sistem jaringan air baku untuk air minum berupa sumber–sumber air untuk keperluan domestik atau rumah tangga, industri, dan lain–lain meliputi:

1. Sungai yang ada dalam wilayah Kabupaten meliputi : Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, Sungai Cimanceuri, Sungai Cirarab, Sungai kecil lainnya.
2. Air tanah dangkal dan air tanah dalam
3. Saluran irigasi
4. Air baku yang berasal dari Waduk Karian di Kabupaten Lebak;
5. pembangunan waduk lepas pantai Cisadane
6. Sumber air baku lainnya.
7. Rencana pengembangan Jaringan air baku, meliputi :
   a) pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku untuk air minum;
   b) pengendalian penggunaan air tanah dangkal; dan
   c) pembangunan bendungan atau waduk penampung air baku di Kecamatan Pakuhaji dan hulu sungai Cimanceuri di Kecamatan Jambe.
8. cekungan air tanah berada di Daerah; dan
9. pemanfaatan air laut sebagai sumber air bersih

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi:

a. Sistem Penyediaan Air Minum yang terdiri dari:
   1. Unit Air Baku, meliputi:
      a) sungai Cisadane;
      b) sungai Cidurian;

c) sungai Cimanceuri;
d) bendung Karian; dan
e) sumber air lainnya.

2. Unit distribusi / pelayanan - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:
   a) SPAM Zona A, melayani sebagian Kecamatan Pasar Kemis, Curug, Kelapa Dua, Panongan, Legok, Pagedangan, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya;
   b) SPAM Zona B, melayani Kecamatan Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya;
   c) SPAM Zona C, melayani Kecamatan Kresek, Kronjo, Mauk, Rajeg, Sukamulya, Gunung Kaler, Mekar Baru, Kemiri danSukadiri, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane; Sungai Cidurian, dan sumber air baku lainnya;
   d) SPAM Zona D, melayani kecamatan Cisauk, Pagedangan, Panongan sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya;
   e) SPAM Zona E, melayani Kecamatan Tigaraksa, Balaraja, Solear, Cisoka, Sukamulya dan Jambe, sumbernya diambil dari Sungai Cidurian; dan Karian Dam serta sumber air baku lainnya.
   f) Sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh mitra/pengelola air bersih dan sistem komunal lainnya yang tersebar di seluruh Daerah.

3. Pengembangan unit produksi air minum meliputi:
   a) IPA Bojong Renged di Kecamatan Teluknaga
   b) IPA Cihuni di kecamatan Pagedangan
   c) IPA Rajeg di Kecamatan Rajeg
   d) IPA Cisauk di Kecamatan Cisauk
   e) instalasi pengolahan air Sepatan berada di Kecamatan Sepatan Timur;
   f) instalasi pengolahan air Kronjo berada di Kecamatan Kronjo;
   g) instalasi pengolahan air Mauk berada di Kecamatan Mauk;

h) instalasi pengolahan air Kresek berada di Kecamatan Kresek;
i) instalasi pengolahan air Pakuhaji berada di Kecamatan Pakuhaji;
j) instalasi pengolahan air Solear berada di Kecamatan Solear;
k) instalasi pengolahan air dari jaringan transmisi yang bersumber dari bendung Karian berada di Kecamatan Solear; dan
l) instalasi pengolahan air swasta dan komunal tersebar di seluruh Daerah.

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

1. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) meliputi Sistem pengolahan air limbah nondomestik; dan Sistem pengolahan air limbah rumahtanggga (domestik).
2. sistem pembuangan air limbah nondomestik meliputi:
   a) instalasi pengolahan lumpur tinja meliputi Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Cisauk, dan Kecamatan Balaraja; dan
   b) jaringan air limbah komunal berada di kawasan perumahan skala besar yang tersebar di seluruh Daerah.
3. sistem pembuangan air limbah domestik dilakukan untuk pengolahan air limbah Industri dan non-Industri/sarana komersial secara individual dan/atau komunal.
4. Lokasi instalasi pengolahan air limbah akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

1. Sistem penyimpanan sementara Limbah Berbahaya Beracun untuk dikelola lanjut berupa pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 oleh pihak lain yang memiliki izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengolah dan/atau pemanfaat Limbah B3
2. Sistem pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.

3. Sistem pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha dalam satu kawasan.
4. Lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan antara lain pada Kawasan Industri dan lokasi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Sistem jaringan persampahan wilayah;
   1. penataan dan peningkatan pengelolaan sampah dari sistem terbuka (open dumping) ke sistem teknologi ramah lingkungan berada di TPA Jatiwaringin;
   2. penyediaan TPS yang memiliki kemampuan untuk mengatasi produksi sampah; dan
   3. pembuatan *incinerator* pemusnahan sampah dengan energi terbarukan pada lokasi tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* setiap desa/kelurahan dan setiap lingkungan perumahan
   4. Tempat pengolahan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan skala regional.
   5. Lokasi TPS dan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* selanjutnya akan ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

e. Sistem jaringan evakuasi bencana

   Sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalur dan ruang evakuasi bencana yang terdiri dari:
   1. Kawasan rawan bencana banjir
   2. Kawasan rawan bencana tsunami.

   Sistem jalur dan Ruang evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana banjir dan tsunami adalah *escape way* (jalur keluar) melalui jalan arteri, kolektor, dan lokal; dan *meeting point* (titik kumpul) di kantor kecamatan, sarana ibadah, sarana Pendidikan, dan lapangan.

Tabel 6.5

Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang Kabupaten Tangerang

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan

				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Struktur Ruang							
a	Perwujudan pusat pelayanan							
	Penyusunan dokumen RDTR	Kabupaten Tangerang	23 Kecamatan					
b	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Jaringan Transportasi							
	1. jalan tol Tangerang–Merak	Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja	1 Ruas					
	2. Jalan Raya Serang	Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti	1 Ruas					
	3. jalan Kronjo-Mauk-Teluknaga-Bandara Soekarno-Hatta	Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekar Baru	1 Ruas					
	4. jalan Tigaraksa-Cisoka-	Kecamatan Tigaraksa,	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cikuya-Cikasungka	Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Solear						
	5. jalan Malangnengah-Ranca Kelapa-Kutruk-Tigaraksa,	Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa	1 Ruas					
	6. jalan Cisauk-Jaha	Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok	1 Ruas					
	7. jalan Bitung-Curug-Legok	Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok	1 Ruas					
	8. jalan Bojong-Pemda	Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa	1 Ruas					
	9. jalan Cikupa-Pasar Kemis	Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Pasar Kemis,	1 Ruas					
	10. jalan Jatiuwung – Pasar Kemis	Kecamatan Pasar kemis	1 Ruas					
	11. jalan Sepatan - Mauk	Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji,Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk	1 Ruas					
	12. jalan Kronjo - Ceplak	Kecamatan Kronjo,Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya	1 Ruas					
	13. jalan	Kecamatan Balaraja	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Balaraja-Ceplak	dan Kecamatan Sukamulya						
	14. jalan Kutruk-Jambe	Kecamatan Jambe	1 Ruas					
	15. jalan Kresek–Jenggot	Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekar Baru	1 Ruas					
	16. jalan Kresek-Pejamuran	Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekar Baru	1 Ruas					
	17. jalan Ceplak-Kresek	Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya	1 Ruas					
	18. jalan Sempur-Dangdeur–Patrasana	Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Kresek	1 Ruas					
	19. jalan Jayanti-Megu	Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Jayanti	1 Ruas					
	20. jalan Cisoka-Megu	Kecamatan Cisoka	1 Ruas					
	21. jalan Cangkudu-Cisoka	Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka	1 Ruas					
	22. jalan Cikuya-Cikasungka (Bts. Bogor)	Kecamatan Solear	1 Ruas					
	23. jalan Tigaraksa-Cikuya	Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear	1 Ruas					
	24. jalan	Kecamatan Cikupa	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cibadak-Tigaraksa	dan Kecamatan Tigaraksa						
	25. jalan Tigaraksa-Jambe	Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Jambe	1 Ruas					
	26. jalan Jambe-Batok	Kecamatan Jambe	1 Ruas					
	27. jalan Serdang Kulon-Serdang Wetan	Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok	1 Ruas					
	28. jalan Pasar Korelet-Serdang Kulon	Kecamatan Panongan	1 Ruas					
	29. jalan Cikupa-Serdang Kulon	Kecamatan Cikupa, dan kecamatan Panongan.	1 Ruas					
	30. jalan Curug-Peusar	Kecamatan Cikupa, dan kecamatan Panongan.	1 Ruas					
	31. jalan Curug-Binong	Kecamatan	1 Ruas					
		Curug						
	32. jalan Jatake (batas Kota Tangerang)-Binong	Kecamatan Curug	1 Ruas					
	33. jalan Binong-Bencongan	Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua	1 Ruas					
	34. jalan Curug-Carang Pulang	Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua.	1 Ruas					
	35. jalan Legok-pagedangan	Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok	1 Ruas					
	36. jalan Cisauk-Rumpin	Kecamatan Cisauk	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	37. jalan Jambu-Patra Manggala	Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri.	1 Ruas					
	38. jalan Rajeg-Mauk	Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk.	1 Ruas					
	39. jalan Pasar Kemis-Rajeg	Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg.	1 Ruas					
	40. jalan Gintung-Cituis-Sukadiri	Kecamatan Sukadiri	1 Ruas					
	41. jalan Gardu-Tanah merah	Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji	1 Ruas					
	42. jalan Sepatan-Kedaung Barat	Kecamatan sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur	1 Ruas					
	43. jalan Bayur Sangego-Kedaung Barat	Kecamatan Sepatan Timur	1 Ruas					
	44. jalan Kedaung Barat-Kali Baru (Kohod)	Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji	1 Ruas					
	45. jalan Bojong Renged-Teluknaga	Kecamatan Teluknaga.	1 Ruas					
	46. jalan Teluknaga-Tanjung Pasir	Kecamatan Teluknaga	1 Ruas					
	47. jalan Pangkalan-Tanjung Burung	Kecamatan Teluknaga	1 Ruas					
	48. jalan Bojongrenged-Kosambi	Kecamatan Kosambi	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	49. jalan Jatimulya-Dadap	Kecamatan Kosambi	1 Ruas					
	50. jalan Merak-Buni Ayu	Kecamatan Sukamulya	1 Ruas					
	51. jalan Jambu-Buniayu-Jengkol	Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Rajeg Ka	1 Ruas					
	52. jalan Kukun–Daon-Jambu	Kecamatan Rajeg	1 Ruas					
	53. jalan Cadas-Kukun	Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg	1 Ruas					
	54. jalan Suradita-Kranggan	Kecamatan Cisauk	1 Ruas					
	55. jalan Cisauk–Kranggan	Kecamatan Cisauk	1 Ruas					
	56. jalan Karawaci–Legok	Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok	1 Ruas					
	57. jalan Bojong-Peusar-Budimulya	Kecamatan Curug dan Kecamatan Tigaraksa	1 Ruas					
	58. jalan lokal	Tesebar di wilayah kabupaten	1 Ruas					
	59. Jembatan Kelapa Dua	Kecamatan Kelapa Dua	1 Ruas					
	60. jalan sejajar Kali Perancis	Kecamatan Kosambi	1 Ruas					
	61. Pengembangan angkutan feeder (pengumpan)		1 Ruas					
	62. jalan tol Sepatan Timur–Pakuhaji	Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	63. jalan tol Serpong–Balaraja	Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan	1 Ruas					
	64. jalan tol Kamal-Teluknaga-Rajeg	Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan Rajeg	1 Ruas					
	65. jalan tol Semanan-Rajeg-Balaraja	Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Rajeg.	1 Ruas					
	66. pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu keluar masuk kearah Cikupa di pintu tol Balaraja Timur berada di Kecamatan Balaraja.	Kecamatan Balaraja	1 Ruas					
	67. pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu	Kecamatan Cikupa	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	keluar kearah Pasar Kemis di pintu tol Cikupa berada di Kecamatan Cikupa.							
	68. jalan Balaraja – Kelapa dua	Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua.	1 Ruas					
	69. jalan teluknaga – bandara soekarno hatta		1 Ruas					
	70. Jalan Tol Prospektif		1 Ruas					
	71. Jalan Tol Bojonggede-Balaraja		1 Ruas					
	72. jalan lintas bandara		1 Ruas					
	73. simpang susun jalan tol		1 Ruas					
	74. jalan pesisir pantai dari Kohod–Tanjung Burung–Tanjung Pasir–Muara–Lemo–Salembaran Jaya–Kosambi Barat–	Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga dan kecamatan Kosambi	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kosambi Timur–Dadap Teluknaga							
	75. jalan pesisir pantai dari Jenggot–Muncung–Kronjo–Pagedangan Ilir–Lontar – Karanganyar–Patra Manggala–Mauk Barat–Mauk Timur–Ketapang	kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Mauk	1 Ruas					
	76. jalan poros tengah meliputi jalan Cikupa–Sindangjaya–Rajeg–Mauk–Kawasan Reklamasi	KecamatanCikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk	1 Ruas					
	77. jalan sejajar dengan jalan tol dari Desa Bunder, Kecamatan Cikupa–Desa Cibadak, Kecamatan Balaraja	Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya dan Kecamatan Balaraja	1 Ruas					
	78. jalan Cadas–Kukun–Benda–Buniayu–Jengkol	Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek	1 Ruas					
	79. jalan Peusar–Budimulya–Bojong–Jalan Raya Serang	Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan	1 Ruas					
	80. jalan Desa	Kecamatan	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Margasari–Desa Mekar Bakti	Tigaraksa dan Kecamatan Panongan						
	81. jalan Sampora–Pakulonan	Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua	1 Ruas					
	82. jalan yang menghubungkan wilayah daratan Kabupaten Tangerang dengan rencana pengembangan Kawasan Reklamasi di pantai utara	Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Mauk	1 Ruas					
	83. jalan Balaraja – Kelapa dua, yang merupakan bagian dari MRT (Mass Rapid Transport) Balaraja – Cikarang	Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Sindang Jaya	1 Ruas					
	84. jalan kantor pos - Pasar Gudang	Kecamatan Tigaraksa	1 Ruas					
	85. jalan ciatuy – Al-Amjad	Kecamatan Tigaraksa	1 Ruas					
	86. jalan dan jembatan penghubung wilayah perbatasan	Seluruh wilayah perbatasan	1 Ruas					
	87. jalan yang memanfaatkan	Tersebar di Seluruh wilayah perbatasan	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	daerah sempadan sungai							
	88. jalan akses diperluasan Perimeter Utara Bandara Soekarno Hatta sebagai pengganti penutupan M1	Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi	1 Ruas					
	89. pembangunan jembatan diantaran jalan yang menghubungkan desa margasari kecamatan tigaraksa dengan desa panongan kecamatan panongan	Kecamatan tigaraksa dan Kecamatan panongan	1 Ruas					
	90. jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kelapa Dua dan Kelurahan pondok Jagung, Serpong Utara (Ash-Shobirin) (Kota Tangerang Selatan)	Kecamatan Pagedangan	1 Ruas					
	91. jembatan yang menghubungkan kecamatan Tigaraksa dan kecamatan Panongan	Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92. jembatan yang menghubungkan kecamatan Sepatan Timur dan Kota Tangerang	Kecamatan Sepatan Timur.	1 Ruas					
	93. jembatan Sukadiri	Kecamatan Sukadiri	1 Ruas					
	94. Jembatan Dadap I	Kecamatan Kosambi	1 Ruas					
	95. Jembatan Dadap II	Kecamatan Kosambi	1 Ruas					
	96. Pembangunan flyover simpang bitung	Kecamatan Curug	1 Ruas					
	97. Pembangunan flyover Pasar Cikupa Jalan Raya Serang	Kecamatan Cikupa	1 Ruas					
	98. Pembangunan flyover Stasiun Kereta Api Cisauk	kecamatan Cisauk	1 Ruas					
	99. Pembangunan flyover simpang Kelapa Dua	Kecamatan Kelapa Dua	1 Ruas					
	100. Pembangunan jembatan layang/flyover balaraja timur	Kecamatan Balaraja	1 Ruas					
	101. Pembangunan	Kecamatan Balaraja	1 Ruas					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jembatan layang/flyover balaraja barat							
	102. Pembangunan jembatan layang/flyover	Kecamatan Tigaraksa	1 Ruas					
	103. Pembangunan jembatan layang/flyover gembong balaraja	Kecamatan Balaraja	1 Ruas					
	104. Pembangunan underpass simpang bugel	Kecamatan Tigaraksa	1 Ruas					
	105. underpass simpang Bitung	Kecamatan Curug	1 Ruas					
	106. Pembangunan dan pengembangan jaringan penghubung daratan dengan pulau dan/atau antar pulau	Kecamatan Kosambi	1 Beberapa Paket					
	107. Modifikasi exit tol bitung	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	108. rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan berada di wilayah	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kabupaten							
	109. Pembangunan terminal penumpang tipe A	Kecamatan	Beberapa Paket					
		Balaraja						
	110. pembangunan terminal penumpang tipe B	Kecamatan Teluknaga	Beberapa Paket					
	111. pembangunan terminal penumpang tipe C	Kecamatan Cisauk;	Beberapa Paket					
		Kecamatan Pakuhaji;						
		Kecamatan Tigaraksa;						
		Kecamatan Solear;						
		Kecamatan Kelapa Dua;						
		Kecamatan Cisoka;						
		Kecamatan Balaraja;						
		Kecamatan Kronjo;						
		Kecamatan Kresek; dan						
		Kecamatan Mauk						
	112. Rencana Pengembangan terminal khusus untuk mendukung potensi industri,		Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pariwisata, dan pertanian							
	113. pembangunan terminal barang	Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Jambe dan Kecamatan Jayanti	Beberapa Paket					
	114. pembangunan tertminal logistik tambang	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	115. Peningkatan jembatan timbang	Kecamatan Legok; Kecamatan Cisauk, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kosambi.	Beberapa Paket					
	116. Pengembangan sistem *Double track*/rel ganda	Kecamatan Legok; Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe dan Kecamatan Cisoka.	Beberapa Paket					
	117. pembangunan jaringan perkeretaapian jalur kereta api Serang – Cikande – Cikupa – Serpong	Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti	Beberapa Paket					
	118. pembangunan	Kecamatan Mekarbaru,	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jaringan perkeretaapian jalur kereta api Bojonegara – Pantura – Tanjung Priuk	Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi						
	119. jalur kereta api Tanah Abang-Serpong-Parung Panjang-Cikuya jalur kereta api Tanah Abang-Serpong-Parung Panjang-Cikuya	Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Jambe, Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear	Beberapa Paket					
	120. jalur angkutan massal berbasis rel Jalur Timur-Barat Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja (Cikarang-Balaraja)	Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Balaraja;	Beberapa Paket					
	121. jalur angkutan massal berbasis rel Cadas-Tangerang		Beberapa Paket					
	122. pembangunan TOD		Beberapa Paket					
	123. pembangunan stasiun kosambi		Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	124. pembangunan stasiun teluknaga		Beberapa Paket					
	125. pelabuhan sungai dan danau pengumpan Sepatan	Kecamatan Sepatan;	Beberapa Paket					
		Kecamatan Pakuhaji;						
		Kecamatan Kronjo; dan						
		Kecamatan Teluknaga						
	126. pelabuhan pengumpan lokal	Kecamatan Pakuhaji;	Beberapa Paket					
		Kecamatan Kosambi;						
		Kecamatan Teluknaga; dan						
		Kecamatan Kronjo						
	127. terminal khusus batu bara	Kecamatan Kemiri	Beberapa Paket					
	128. terminal khusus tambatan kapal	Kecamatan Teluknaga; dan	Beberapa Paket					
		Kecamatan Pakuhaji						
	129. Rencana Pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan		Beberapa Paket					
	130. Rencana Pengembangan		Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	angkutan danau/waduk pada danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan							
	131. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan		Beberapa Paket					
	132. rencana pembangunan terminal pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta		Beberapa Paket					
c	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Jaringan Energi							
	1. jaringan gas melintasi Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan		Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Balaraja, dan Kecamatan Cisoka;							
	2. jaringan gas Serpong–Merak melintasi Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti;		Beberapa Paket					
	3. jalur pipa transmisi gas melintasi Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Jayanti; dan		Beberapa Paket					
	4. jaringan gas Avtur dari pantai Utara melintasi Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi ke Bandara Soekarno-Hatta		Beberapa Paket					
	5. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Lontar		Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	berada di Kecamatan Kemiri;							
	6. pembangkit tenaga listrik tenaga surya (PLTS); dan		Beberapa Paket					
	7. pembangkit listrik lainnya berupa instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan		Beberapa Paket					
	8. pembangunan jaringan baru dan/atau pengembangan jaringan SUTET	a. Jalur yang menghubungkan Balaraja-Lengkong-Gandul;	Beberapa Paket					
		b. Jalur yang menghubungkan Balaraja-Cikupa-Kembangan;						
		c. Jalur yang menghubungkan PLTU Jawa-5/Bojanegara – Lontar;						
		d. Jalur yang menghubungkan PLTU Lontar-Teluk Naga;						
		e. Jalur yang menghubungkan Lontar – Tx. Teluk Naga; dan						

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		f. Jalur yang menghubungkan Teluk Naga-Muara Karang						
	9. pembangunan jaringan baru dan/atau pengembangan jaringan SUTT 150	Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Curug, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Solear, Kecamatan Panongan, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Kelapa Dua	Beberapa Paket					
	10. jaringan SUTM yang tersebar di Kabupaten;	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	11. jaringan SUTR	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12. Gardu Induk	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
d	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Jaringan Telekomunikasi							
	1. pengembangan jaringan primer	jalan Tangerang-Merak	Beberapa Paket					
	2. pengembangan jaringan sekunder	tersebar di seluruh kecamatan	Beberapa Paket					
	3. pengembangan jaringan telepon	tersebar di seluruh kecamatan	Beberapa Paket					
	4. pengembangan jaringan nirkabel	tersebar di seluruh kecamatan	Beberapa Paket					
	5. pengembangan jaringan fiber optik	tersebar di seluruh kecamatan	Beberapa Paket					
	6. pembangunan menara telekomunikasi	tersebar di seluruh kecamatan	Beberapa Paket					
	7. pengembangan jaringan Sentral Telepon Otomat (STO)	tersebar di seluruh kecamatan	Beberapa Paket					
e	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau							

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Jaringan Sumber Daya Air							
	1. Peningkatan fungsi sungai Lintas provinsi	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	2. Peningkatan fungsi sungai lintas kabupaten	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	3. Pemanfaatan Sumber Air Permukaan	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	4. Pemanfaaatan Sumber Air Cekungan Tanah	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	5. Pembangunan Daerah Irigasi	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	6. Pembangunan Daerah Irigasi Tambak	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	7. Optimalisasi penggunaan air irigasi	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	8. Perbaikan saluran irigasi	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	9. Perbaikan bangunan air	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	10. rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mengganggu sistem drainase							
	11. normalisasi sungai yang tersebar di Kabupaten	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	12. normalisasi situ/waduk yang tersebar di Kabupaten	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	13. operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	14. memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran drainase khususnya di lokasi banjir	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	15. penerapan manajemen daerah pengaliran sungai, situ dan pantai dengan membentuk badan pengelola	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	16. pembangunan kolam tandon air	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	17. pemanfaatan situ/waduk serta mengendalian pemanfaatan ruang disekitarnya untuk menjaga fungsi situ/waduk sebagai	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kolam penyimpanan dan pengendali banjir							
	18. Sistem jaringan air baku untuk air minum berupa sumber–sumber air untuk keperluan domestik atau rumah tangga, industri, dan lain–lain	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
f	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)							
	1. Pembangunan prasarana dan sarana air baku	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	2. Pengendalian dan pemanfaatan penggunaan air tanah dangkal	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	3. Pemanfaatan saluran irigasi	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	4. Pemanfaatan air baku yang berasal dari Waduk Karian	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	5. pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	untuk air minum							
	6. pembangunan bendungan atau waduk di hilir sungai cisadane sebagai kolam penampung air baku di kecamatan pakuhaji dan hulu sungai cimanceuri di kecamatan jambe	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	7. Rencana pemeliharaan CAT	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	8. Rencana pemanfaatan air laut sebagai sumber air bersih	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	9. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan sistem air	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	10. peningkatan kerja sama dengan daerah sekitarnya terkait rencana pengembangan pelayanan maupun sumber air bakunya	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	11. pembangunan kantor pusat Perusahaan Umum	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang di wilayah administratif Kabupaten Tangerang							
	12. Pengembangan sumber air minum zona A	Kecamatan Pasar Kemis, Curug, Kelapa Dua, Panongan, Legok, Pagedangan, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane	Beberapa Paket					
	13. Pengembangan sumber air minum zona B	Kecamatan Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji	Beberapa Paket					
	14. Pengembangan sumber air minum zona C	Kecamatan Kresek, Kronjo, Mauk, Rajeg, Sukamulya, Gunung Kaler, Mekar Baru, Kemiri danSukadiri, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane; Sungai Cidurian	Beberapa Paket					
	15. Pengembangan sumber air minum zona D	kecamatan Cisauk, Pagedangan, Panongan	Beberapa Paket					
	16. Pengembangan sumber air minum zona E	Kecamatan Tigaraksa, Balaraja, Solear, Cisoka, Sukamulya dan Jambe	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17. pengembangan unit produksi air minum	a. IPA Bojong Renged berada di Kecamatan Teluknaga;	Beberapa Paket					
		b. IPA Pagedangan berada di kecamatan Pagedangan;						
		c. IPA Cisauk berada di Kecamatan Cisauk;						
		d. IPA Rajeg berada di Kecamatan Rajeg;						
		e. IPA Sepatan berada di Kecamatan Sepatan;						
		f. IPA Kronjo berada di Kecamatan Kronjo;						
		g. IPA Mauk berada di Kecamatan Mauk;						
		h. IPA Kresek berada di Kecamatan Kresek;						
		i. IPA Pakuhaji berada di Kecamatan Pakuhaji;						
		j. IPA Solear berada di Kecamatan Solear; dan						
		b. k. IPA dari jaringan transmisi						

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang bersumber dari bendung karian berada di Kecamatan Solear						
	18. Pengembangan perpipaan air minum	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	19. Pengembangan zona air minum swasta	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
g	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)							
	1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja(IPLT)	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	2. pengembangan sistem air limbah setempat	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	3. Pengembangan jaringan air limbah komunal	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
h	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan							

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Beracun							
	1. Pengembangan istem penyimpanan sementara Limbah Berbahaya Beracun untuk dikelola lanjut berupa pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 oleh satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha dalam satu kawasan		Beberapa Paket					
	2. Pengembangan sistem pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten		Beberapa Paket					
i	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sistem Jaringan Persampahan Wilayah							
	1. pengadaan dan pengelolaan alat angkut sampah	Tersebar di seluruh kecamatan	Beberapa Paket					
	2. menyiapkan TPS yang memiliki kemampuan untuk	Tersebar di seluruh kecamatan	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mengatasi produksi sampah perkotaan							
	3. penataan dan peningkatan pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin	Kecamatan Rajeg	Beberapa Paket					
	4. pembangunan TPST secara parsial yang tersebar pada setiap kecamatan		Beberapa Paket					
	5. peningkatan tempat pembuangan akhir sampah dari sistem terbuka (open dumping) ke sistem teknologi ramah lingkungan		Beberapa Paket					
	6. Tempat pengolahan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan		Beberapa Paket					
j	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sistem Jaringan Evakuasi							
	1. Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					

Sumber : Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

6.3.3. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

6.3.3.1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung, meliputi:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

1. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung merupakan hutan bakau di wilayah pantai Utara Kabupaten, seluas kurang lebih 1.555,32 Ha (seribu lima ratus lima puluh lima koma tiga dua hektar) tersebar di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi.

2. Kawasan resapan air

Kawasan resapan air meliputi: bagian hulu daerah aliran sungai Cidurian; bagian hulu daerah aliran sungai Ciujung; bagian hulu daerah aliran sungai Cibareo; dan bagian hulu daerah aliran sungai Cimanceuri.

b. Kawasan perlindungan setempat

1. Sempadan pantai

Kawasan sempadan pantai terdapat di pesisir pantai Utara Kabupaten yang mencakup luas areal kurang lebih 325 Ha (tiga ratus dua puluh lima hektar) meliputi Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo.

2. Sempadan sungai

Kawasan sempadan sungai meliputi luas kurang lebih 559 Ha (lima ratus lima puluh sembilan hektar) yang tersebar di seluruh Daerah.

3. Kawasan sekitar situ/danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan sempadan situ/danau atau waduk dengan luas kurang lebih 310 Ha (tiga ratus sepuluh hektar) yang tersebar di seluruh Daerah.

c. Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya berupa situs-situs sejarah meliputi:

1 situs Makam Pangeran Suriadiwangsa II berada di Kecamatan Cisoka;

2 situs Makam Gajah Barong, situs Makam Nyi Mas Gamparan, situs Makam Syech Mubarak, situs Makam Buyut Sanadi, situs Makam Buyut Mah, situs Makam Nyi Saritinem, situs Makam Ki Mas Laeng, situs Makam Raden Mas Kuncung, situs Makam Nyi Mas Bajra, situs Langlang Buana, dan situs Makam Wali Ahmad berada di Kecamatan Tigaraksa;

3 situs Makam Buyut Siyam berada di Kecamatan Kresek;

4 sisa Fosil-Fosil Elephant Maximus, situs Makam Pangeran Mas Kalimangun Jaya Kusumah (Ki Mawuk), situs Bangunan Pekong Soekong, dan situs makam Dewi Neng berada di Kecamatan Mauk;

5 situs Sumur Tujuh, situs Makam Ki Buyut Petal dan situs Makam Nyi Mas Aulia berada di Kecamatan Cikupa;

6 situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang berada di Kecamatan Sukadiri;

7 situs Makam Panjang Syech Daud dan situs Makam Wali Riman berada di Kecamatan Pakuhaji;

8 situs Penggilingan Tebu berada di Kecamatan Teluknaga;

9 situs Makam Jaga Laut berada di Kecamatan Kronjo;

10 situs Makam Solear berada di Kecamatan Solear;

11 situs Makam Panjang Dadap berada di Kecamatan Kosambi;

12 situs Makam Buyut Mijah, situs Makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), situs Makam Kepuh, dan situs Makam Buyut Resem berada di Kecamatan Sepatan;

13 situs Makam Mede berada di Kecamatan Curug;

14 situs Makam Tubagus Taram, situs Makam Ki Buyut Golokgok berada di Kecamatan Cisauk;

15 situs Makam Nyi Mas Melati dan situs Makom Pangeran Jayakarta berada di Kecamatan Sukamulya;

16 situs Makam Syekh Waliyudin berada di Kecamatan Kelapa Dua;

17 situs Makam Raden Aria Wangsakara, situs Makam Ki Yunus, situs Makam Ki Muttaqin, dan situs Makam Raden Aria Dwipa Wira Kencana berada di Kecamatan Pagedangan;

18 situs Makam Ki Buyut Mansyur berada di Kecamatan Panongan; dan

19 situs Makam Syekh Anbiya dan situs Makam Syekh Yusuf (Mbah Karinding) berada di Kecamatan Balaraja.

6.3.3.2. Kawasan Peruntukan Budi Daya

Kawasan peruntukan Budi Daya meliputi :

a. Kawasan Pertanian;
b. kawasan perikanan;
c. kawasan pertambangan dan energi;
d. Kawasan Peruntukan Industri;
e. Kawasan Pariwisata;
f. Kawasan Permukiman;
g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
h. kawasan transportasi.

Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan masing – masing Kawasan:

a. Kawasan pertanian

Kawasan Pertanian sebagaimana meliputi kawasan tanaman pangan dan kawasan peternakan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Tangerang memiliki luas 14.049 Ha (empat belas ribu sembilan puluh empat hektar) meliputi: Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekarbaru; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Mauk; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Kemiri; Kecamatan Sukadiri; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Sindang Jaya; Kecamatan Legok; Kecamatan Jambe; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; dan Kecamatan Pakuhaji.

Sedangkan Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan memiliki luas kurang lebih 13.931 Ha (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu hektar), yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 12.628 Ha (dua belas ribu enam ratus

dua puluh delapan hektar) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.303 Ha (seribu tiga ratus tiga hektar) meliputi: Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekarbaru; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Mauk; Kecamatan ajeg; Kecamatan Kemiri; Kecamatan Sukadiri;Kecamatan Balaraja; Kecamatan Sindang Jaya; Kecamatan Legok; Kecamatan Jambe; Kecamatan Sepatan; dan Kecamatan Pakuhaji.

2. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 49 Ha (empat puluh sembilan hektar) berada di Kecamatan Kronjo.

b. Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budi daya yang dijelaskan sebagai berikut:

1 Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan tangkap terdiri dari pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan meliputi: pangkalan pendaratan ikan yang terdapat di Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Paku Haji; tempat pelelangan ikan dan tempat pasar ikan yang berada di Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Mauk; dan Kecamatan Kronjo.

2 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 151 Ha (seratus lima puluh satu hektar) berada di Kecamatan Kronjo. Sedangkan perikanan budi daya air tawar berupa kolam tersebar berada di seluruh Daerah; dan untuk balai benih ikan air tawar berada di Kecamatan Sukamulya.

c. Kawasan pertambangan dan energi

Kawasan pertambangan dan energi merupakan kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 95 Ha (sembilan puluh lima hektar) berada di Kecamatan Kemiri. Kawasan pertambangan dan energi yang merupakan bagian dari kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan pertambangan dan energi ditetapkan sebagai kawasan *outline* berada

di Kecamatan Kemiri dengan luas kurang lebih 25 Ha (dua puluh lima hektar).

d. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tangerang memiliki luas kurang lebih 14.878 Ha (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan hektar) yang meliputi Kawasan Peruntukan Industri dan sentra Industri kecil dan menengah. Kawasan Peruntukan Industri meliputi: Kecamatan Balaraja; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Curug; Kecamatan Jambe; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Legok; Kecamatan Mekarbaru; Kecamatan Pagedangan; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Panongan; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Sindang Jaya; Kecamatan Sukadiri; Kecamatan Teluknaga; dan Kecamatan Tigaraksa. Sedangkan Kawasan Sentra Industri kecil dan menengah tersebar di seluruh Daerah.

e. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata di Kabupaten Tangerang meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kawasan Pariwisata Alam, terdiri dari:
    a) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga;
    b) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Muara berada di Kecamatan Teluknaga;
    c) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Tanjung Kait berada di Kecamatan Mauk;
    d) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Dadap berada di Kecamatan Kosambi;
    e) Kawasan Pariwisata Bahari Pulau Cangkir berada di Kecamatan Kronjo;
    f) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Karang Serang berada di Kecamatan Sukadiri;
    g) Kawasan Pariwisata Alam Solear berada di Kecamatan Solear;

h) Kawasan Pariwisata Situ Kelapa Dua berada di Kecamatan Kelapa Dua; Kawasan Pariwisata Situ Cihuni berada di Kecamatan Pagedangan;
i) Kawasan Pariwisata Situ Pondok berada di Kecamatan Pasar Kemis;
j) Kawasan Pariwisata Situ Garukgak berada di Kecamatan Kresek;
k) Kawasan Pariwisata Situ Patrasana berada di Kecamatan Kresek;
l) Kawasan Pariwisata Situ Cilongok berada di Kecamatan Pasar Kemis;
m) Kawasan Pariwisata Tangerang *Mangrove Center* berada di seluruh wilayah pantai utara; dan
n) Kawasan Pariwisata bahari lainnya di sepanjang pantai utara.

2. Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi:
a) Rumah Asli Peninggalan Raden Aria Wangsakara, situs Makam Raden Aria Wangsakara, situs Makam Buyut Onang, situs Makam Ki Muttaqin, situs Makam Ki Yunus, dan situs Makam Ki Musa berada di Kecamatan Pagedangan;
b) Rumah Kebaya Tempo Dulu, situs Makam Nyi Mas Melati, dan situs Makam Pangeran Jayakarta berada di Kecamatan Sukamulya;
c) situs Makam Gajah Barong, situs Makam Nyi Mas Gamparan, situs Makam Buyut Siyam, situs Makam Syech Mubarak, situs Makam Buyut Sandi, situs Makam Buyut Mali, situs Makam Nyi Saritinem, situs Makam Ki Mas Laeng, Situs Makam Raden Mas Kuncung, dan situs Makam Wali Ahmad berada di Kecamatan Tigaraksa;
d) sisa fosil-fosil Elephant Maximus, situs Bangunan Pekong Soekong, dan situs Makam Dewi Neng berada di Kecamatan Mauk;
e) situs Sumur Tujuh dan situs Makam Nyi Mas Aulia berada di Kecamatan Cikupa;
f) situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang berada di Kecamatan Sukadiri;

g) situs Makam Panjang Syech Daud dan situs Makam Wali Riman berada di Kecamatan Pakuhaji;
h) situs Penggilingan Tebu berada di Kecamatan Teluknaga;
i) situs Makam Jaga Laut berada di Kecamatan Kronjo;
j) situs Makam Solear berada di Kecamatan Solear;
k) situs Makam Panjang dadap berada di Kecamatan Kosambi;
l) situs Makam Buyut Mijah, situs Makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), situs Makam Kepuh, dan Situs Makam Buyut Resem berada di Kecamatan Sepatan;
m) situs Makam Mede, situs Makam Tubagus Taram, situs Makam Ki Buyut Golokgog, dan situs Makam Ki Buyut Demang berada berada di Kecamatan Cisauk;
n) Vihara Tjoe Soe Kong Bio berada di Kecamatan Mauk; dan
o) situs Makam Kepuh Keramat Buyut Jago berada di Kecamatan Sepatan.

3. Kawasan Pariwisata Buatan yang meliputi:
a) wisata edukasi terletak berada di Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Cisoka;
b) wisata Penangkaran Buaya berada di Kecamatan Teluknaga;
c) wisata Bumi Perkemahan Kitri Bhakti berada di Kecamatan Curug;
d) wisata olahraga berada berada di seluruh Daerah;
e) wisata Telaga Biru Cigaru berada di Kecamatan Cisoka;
f) wisata Rekreasi *World Of Wonders* berada di citra raya Kecamatan Cikupa;
g) wisata Teluknaga Mas berada di Kecamatan Teluknaga;
h) wisata Mancing Muara Ujung berada di Kecamatan Teluknaga;
i) wisata religi berada di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jayanti;
j) wisata belanja dan kuliner berada di Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja;

k) wisata akomodasi berada di Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Mauk;
l) wisata danau Pusat Pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa;
m) wisata Telaga Tebing Koja berada di Kecamatan Cisoka;
n) wisata Taman Edukasi Lalu Lintas Sentiong berada di Kecamatan Balaraja;
o) pusat kaligrafi berada di Kecamatan Pagedangan;
p) desa wisata yang tersebar di seluruh Daerah; dan
q) kampung kreatif yang tersebar di seluruh Daerah.

f. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang terdiri dari Kawasan permukiman perkotaan dan Kawasan permukiman pedesaan. Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas kurang lebih 66.543 Ha (enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga hektar) meliputi: Kecamatan Pagedangan; Kecamatan Cisauk; Kecamatan Legok; Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Curug; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Panongan; Kecamatan Jambe; Kecamatan Cisoka; Kecamatan Solear; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sindang Jaya; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekarbaru; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Mauk; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Sukadiri.

Sedangkan Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas kurang lebih 2.900 Ha (dua ribu sembilan ratus hektar) meliputi: Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mauk; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Sukadiri.

g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Tangerang meliputi:

1 Makorem-052/Wijayakrama berada di Kecamatan Kelapa Dua;
2 Makodim-0510/Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa;

3 Komplek Datasemen Arhanud Rudal 003 (Denrudal-003/Akosa Dakca Ksatria) Cikupa Tangerang Banten Falatehan berada di Kecamatan Cikupa;
4 Pos Angkatan Laut Tipe C berada di Kecamatan Kronjo;
5 Radar TNI AU berada di Kecamatan Mauk;
6 Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, Garnisun 0506 Tangerang berada di Kecamatan Panongan;
7 Polres Metropolitan Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa;
8 Polsek tersebar di seluruh Daerah; dan
9 Koramil tersebar di seluruh Daerah.

h. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi di Kabupaten Tangerang meliputi kawasan bandar udara Soekarno-Hatta dan kawasan bandar udara Budiarto. Kawasan bandar udara Soekarno-memiliki luas kurang lebih 482 Ha (empat ratus delapan puluh dua hektar) yang berada di wilayah Kecamatan Kosambi; dan Kecamatan Teluknaga. Sedangkan Kawasan bandar udara Budiarto dengan luas kurang lebih 465 Ha (empat ratus enam puluh lima hektar) berada di Kecamatan Legok.

Tabel 6.6

Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang dan Pola Ruang Kabupaten Tangerang

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	Pola Ruang							
a	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap kawasan Bawasannya							
	1. Revitalisasi hutan bakau	Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, , dan Kecamatan Kronjo.						
	2. Peghijauan kawasan resapan air	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
b	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Perlindungan Setempat							
	1. Peghijauan kawasan sempadan pantai	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	2. Penghijauan kawasan sempadan sungai	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	3. Penghijauan kawasan sekitar danau atau waduk	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
c	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Cagar Budaya							
	1. Revitalisasi dan pengembangan kawasan cagar budaya	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
d	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Pertanian							
	1. Program	a. Kecamatan	Beberapa					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pengembangan tanaman pangan	Kronjo;	Paket					
		b. Kecamatan Mekar Baru;						
		c. Kecamatan Sukamulya;						
		d. Kecamatan Gunung Kaler;						
		e. Kecamatan Kresek;						
		f. Kecamatan Mauk;						
		g. Kecamatan Rajeg;						
		h. Kecamatan Kemiri;						
		i. Kecamatan Sukadiri;						
		j. Kecamatan Balaraja;						
		k. Kecamatan Sindang Jaya;						
		l. Kecamatan Pakuhaji;						
		m. Kecamatan Legok;						
		n. Kecamatan Jambe;						
		o.						

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kecamatan Sepatan;						
		p. Kecamatan Sepatan Timur; dan						
		q. Kecamatan Pakuhaji.						
	2. Pengembangan KP2B	a. Kecamatan Kronjo;	Beberapa Paket					
		b. Kecamatan Mekar Baru;						
		c. Kecamatan Sukamulya;						
		d. Kecamatan Gunung Kaler;						
		e. Kecamatan Kresek;						
		f. Kecamatan Mauk;						
		g. Kecamatan Rajeg;						
		h. Kecamatan Kemiri;						
		i. Kecamatan Sukadiri;						
		j. Kecamatan Balaraja;						
		k. Kecamatan Sindang Jaya;						
		l.						

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kecamatan Pakuhaji;						
		m. Kecamatan Legok;						
		n. Kecamatan Jambe; dan						
		o. Kecamatan Pakuhaji.						
	3. Pengembangan kawasan peternakan	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	4. pengembangan kawasan agropolitan	a. Kecamatan Sepatan;	Beberapa Paket					
		b. Kecamatan Sepatan Timur; dan						
		c. Kecamatan Pakuhaji.						
e	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Perikanan		Beberapa Paket					
	1. Pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap yang terdiri atas lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	PPI Kronjo di Desa Kronjo Kecamatan Kronjo; dan	Beberapa Paket					
		PPI Cituis di Desa Suryabahari Kecamatan Pakuhaji.						
	2. PengembaganPemasaran berupa Tempat	Kecamatan Teluknaga,	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat pasar ikan							
		Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, dan Kecamatan Kronjo.						
	3. Pengembangan perikanan budi daya air payau berupa tambak	Kecamatan Mekar Baru terletak di Desa Jenggot;	Beberapa Paket					
		Kecamatan Kronjo terletak di Desa Kronjo dan Desa Muncung;						
		Kecamatan Kemiri terletak di Desa Lontar dan Desa Karanganyar;						
		Kecamatan Mauk terletak di Desa Mauk Barat dan Desa Ketapang;						
		Kecamatan Teluknaga terletak di Desa Tanjung Pasir.						
	4. Pengembangan perikanan budi daya air tawar berupa kolam	tersebar di seluruh wilayah	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kabupaten						
	5. Pembangunan balai benih ikan Air Tawar	Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya	Beberapa Paket					
	6. Pengembangan pengolahan komoditas ikan asin	Desa Suryabahari, Kecamatan Pakuhaji	Beberapa Paket					
	7. Pengembangan kawasan minapolitan	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
f	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasn Peruntukan Industri							
	1. Pengembangan kawasan peruntukan industri	a. Kecamatan Balaraja;	Beberapa Paket					
		b. Kecamatan Cikupa;						
		c. Kecamatan Curug;						
		d. Kecamatan Jambe;						
		e. Kecamatan Jayanti;						
		f. Kecamatan Kelapa Dua;						
		g. Kecamatan Kosambi;						

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		h. Kecamatan Kronjo;						
		i. Kecamatan Legok;						
		j. Kecamatan Mekarbaru;						
		k. Kecamatan Pagedangan;						
		l. Kecamatan Pakuhaji;						
		m. Kecamatan Panongan;						
		n. Kecamatan Pasar Kemis;						
		o. Kecamatan Sepatan;						
		p. Kecamatan Sepatan Timur;						
		q. Kecamatan Sindang Jaya;						
		r. Kecamatan Sukadiri;						
		s. Kecamatan Teluknaga;						
		b. t. Kecamatan Tigaraksa						

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
g	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Pariwisata							
	1. Pengembangan wisata kuliner	Kabupaten Tangerang	Beberapa Paket					
	2. Pengembangan wisata alam	kawasan pariwisata Bahari Pantai Tanjung Pasir di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga; kawasan pariwisata Bahari Pantai Mutiara di Kecamatan Teluknaga; kawasan pariwisata Bahari Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk; kawasan pariwisata Bahari Pantai Dadap di Kecamatan Kosambi; kawasan pariwisata Bahari Pulau	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cangkir di Kecamatan Kronjo; kawasan pariwisata Bahari Pantai Karang Serang di Kecamatan Sukadiri; kawasan pariwisata alam Solear di Kecamatan Solear. kawasan pariwisata Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua; kawasan pariwisata Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan; kawasan pariwisata Situ Pondok di Kecamatan Pasar Kemis; kawasan pariwisata Situ Garukgak di Kecamatan Kresek; kawasan pariwisata Situ Patrasana di						

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kecamatan Kresek; kawasan pariwisata situ cilongok di Kecamatan Pasar Kemis, dan Kawasan pariwisata tangerang mangrove center di seluruh wilayah pantai utara.						
	3. Pengembangan wisata budaya	Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Mauk, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Solear, Kecamatan Kosambi,	Beberapa Paket					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kecamatan Sepatan; dan Kecamatan Cisauk.						
	4. Pengembangan wisata buatan	Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Legok, Kecamatan Pasar Kemis	Beberapa Paket					
h	Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Permukiman							
	1. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Legok, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Panongan, Kecamatan	1 Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jambe, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Solear, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Kresek, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Sukadiri						
	2. Pengembangan kawasan permukiman	Kecamatan Mauk	Wilayah dengan					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pedesaan	Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Sukadiri.	Orientasi Pertanian					
	3. Pengembangan Perumahan Skala Besar Wilayah Selatan dan Wilayah Utara	Kecamatan Tigaraksa	2 Wilayah (Utara dan Selatan)					
		Kecamatan Solear						
		Kecamatan Cisoka						
		Kecamatan Jambe						
		Kecamatan Kosambi						
		Kecamatan Teluknaga						
		Kecamatan Pakuhaji						
		Kecamatan Mauk						
		Kecamatan Kronjo						

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kecamatan Kresek						
		Kecamatan Sukadiri						

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

6.4. Program Pembangunan Daerah

6.4.1 Program Unggulan Daerah

Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan "Program Unggulan" sebagai program pembangunan daerah yang merupakan program monumental berbasis isu strategis untuk mendongkrak langsung pencapaian Visi Misi yang diusung Kepala Daerah. Program ini menjadi program prioritas bersifat strategik yang berorientasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten telah dan akan mengawal serta melaksanakan program unggulan yang awalnya 15 (lima belas) menjadi 10 (sepuluh) program unggulan sebagai program yang bersifat lintas sektor dan lintas OPD, dengan disederhanakannya menjadi 10 (sepuluh) program unggulan, program tersebut dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis dan terintegrasi. Program ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan yang penting, mendesak dan berpengaruh besar terhadap tatanan masyarakat dan penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

1. TANGERANG RELIGI

Program unggulan Tangerang Religi merupakan gabungan (2) dua program unggulan yaitu Program Unggulan Tangerang Religi dan Program Unggulan Sanitren (Sanitasi Berbasis Pesantren). Dalam rangka meningkatkan nilai religius sebagai nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, ibadah dan akhlak yang ,menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan Illahi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama merupakan hal yang penting yang dilakukan dengan

memberikan insentif kepada Guru Ngaji, peserta didik dapat lebih maksimal dalam mendapatkan pengetahuan dibidang keagamaan. Selama 5 (lima) tahun diberikan insentif kepada Guru Ngaji. Selain itu untuk mengembangkan karakter siswa yang tingkah lakunya berdasarkan standar-standar moral dan etika, dalam pendidikan formal telah dikembangkan ekstrakurikuler keagamaan yang targetnya sampai dengan tahun 2023 seluruh sekolah dapat menerapkan pendidikan karakter. Sasaran pada Pondok Pesantren diarahkan untuk pembangunan sarana sanitasi pada Pondok Pesantren Salafi, dan peningkatan pembangunan sektor ekonomi di Pondok Pesantren. Pengembangan Pondok Pesantren Salafi yang fasilitas infrastruktur sanitasinya kurang layak. Berdasarkan hasil pendataan Kemenag dari keseluruhan pondok pesantren salafi dan pengembangan salafi yang terdaftar di Kabupaten Tangerang sepertiganya memiliki kondisi santasi sangat memprihatinkan. Guna mengatasi persoalan sanitasi tersebut Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menuntaskan persoalan tersebut yang akan direalisasikan secara bertahap. Prosedur yang dilakukan untuk mendistribusikan dana hibah melalui rekening pihak Ponpes, yang digunakan untuk pembangunan sanitasi dengan ukuran 5x9 meter yang terdiri dari lima ruang yaitu tiga pintu untuk MCK dan dua pintu untuk wudhu. Adapun konsep bangunan menggunakan dak atau cor pada bagian atap dengan keseragaman dalam pemilihan bahan-bahan material dan desain bangunan. Program ini ditangani oleh Sekretariat Derah, Dinas Pendidikan, dan Bappeda bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.

2. GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN (GSM)

Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) merupakan gerakan sosial bersama guru untuk menciptakan budaya belajar yang kritis, kreatif, mandiri dan menyenangkan di sekolah. Gerakan ini mempromosikan dan membangun kesadaran guru-guru, kepala sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan untuk membangun Sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar ilmu pengetahuan dan bekal ketrampilan hidup agar anak-anak menjadi pembelajar yang sukses. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menuju Gerakan Sekolah Menyenangkan adalah mengembangkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan, mewujudkan ekosistem sekolah yang ramah, aman dan

nyaman, meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik peserta disik, menjaga dan merawat sanitasi sekolah (Sanisek) dan mensuksekan Kurangi Sampah Sekolah Kita (Kurasaki). Selama 5 (tahun) ditargetkan seluruh sekolah di Kabupaten Tangerang telah mengembangkan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Program pendukung antara lain pembangunan Tambah Ruang Kelas, pembangunan Unit Sekolah Baru khususnya untuk jenjang SMP yang dalam penerimaan siswa baru mengggunakan system zonasi dan sarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, kantin dan mushola. Selain itu dialokasikan beasiswa anak sekolah dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berprestasi dari jenjang SD dan SMP. Program ini ditangani oleh Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

3. GERAKAN TANGERANG SEHAT

Program unggulan Gerakan Tangerang Sehat merupakan gabungan 3 (tiga) program unggulan antara Gerakan Tangerang Sehat, Sayang Barudak, dan Masyarakat Bugar. Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan menjadi target pembangunan yang diprioritaskan oleh Kepala daerah dan segenap jajarannya. Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas serta peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap menjadi salah satu upaya dalam peningakatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 22 Puskesmas di Kabupaten Tangerang menjadi Puskesmas Rawat Inap.

Selain itu untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menargetkan peningkatan pelayanan kesehatan RSUD milik Kabupaten Tangerang, dan pembangunan RSUD Tigaraksa untuk melayani kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan promotif dan preventif kesehatan untuk ibu hamil, usia produktif dan usia lanjut serta meningkatkan kesehatan melalui pendekatan keluarga unttuk pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Selain itu juga menyiapkan sarana dan parasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan meningkatkan kepesertaan JKN –KIS.

Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan serta diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial. Olahraga tak hanya sebatas untuk mengejar prestasi atau pembinaan atlet, olahraga juga harus dipraktikan dalam keseharian masyarakat, namun bisa menjadi gaya hidup sehari-hari, salah satu langkah untuk itu pembudayaan olah raga non prestasi adalah melakukan kegiatan senam kebugaran secara rutin di setiap kecamatan dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Sedangkan untuk olah raga prestasi didorong dengan melakukan kejuaraan olah raga tingkat pelajar dan kejuaraan tingkat daerah sehingga menghasilkan atlet yang berprestasi baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Kehadiran Stadion Mini disetiap Kecamatan diharapkan mampu memenuhi ketersediaan sarana publik yang mampu mewadahi segala aktifitas keolahragaan.

Pemerintah Daerah harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pemerintah Daerah berkewajiban dan pertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan anak di daerah dengan diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten layak anak. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak dan Peran Masyarakat dalam penyelenggaran perlindungan Anak dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; menyediakan sarana dan

prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Langkah nyata Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak adalah mengembangkan Kecamatan Layak Anak, Desa/kelurahan layak anak, membentuk Forum Anak ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Puskesmas Ramah Anak serta perlindungan anak terhadap kekerasan.

Program ini ditangani oleh Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja, RSUD Pakuhaji, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata, Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

4. TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN (TANGERANG MANTAP)

Program Tangerang Mandiri Tahan Pangan dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan subsistem ketersediaan distribusi dan konsumsi, dengan memanfaatkan sumber daya yang di wujudkan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, pemberdayaan sumber daya manusia pertanian dan pengembangan kawasan agropolitan dengan fokus pembangunan sentra holtikultura. Selain itu untuk mendukung program ini dilakukan revitalisasi pasar untuk mengembangkan pasar higienis, optimalisasi kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pembangunan Pusat kawasan agropolitan (Puskagro), dan pengembangan budidaya perikanan. OPD yang menangani program ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan BUMD

5. GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI (GERBANG MAPAN)

Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) dicanangkan untuk meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan. Kondisi wilayah pantai utara yang didominasi prasarana, sarana dan utilitas yang belum memadai serta dihuni oleh masyarakat

berpenghasilan rendah juga menjadi alasan peluncuran program ini. Selain pengembangan ekonomi juga turut didukung dengan pengembangan infrastruktur masyarakat secara merata. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mendukung program ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan para nelayan dan peningkatan sarana prasarana perikanan serta penyediaan infrastruktur pendukung pada desa-desa fokus Program Gerbang Mapan desa Kronjo Kecamatan Kronjo, Desa Patrasana Kecamatan Kemiri, Desa Ketapang Kecamatan Mauk. Desa Suryabahari Kecamatan Sukadiri, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga. Pengembangan obyek wisata mangrove dan sentra budidaya ikan juga akan ikut menggerakkan perekonomian dikawasan pesisir.

OPD yang menangani program ini adalah Dinas Perikanan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup.

6. OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMENT ASSET (OPTIMA)

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance)* melalui reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan, maka dikembangkan *E-Government.* Pengembangan sistem informasi ini dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga tahap monitoring dan evaluasi. Selain pengembangan untuk siklus perencanaan pembangunan, kInerja pelayanan perijinan yang efektif dan efisien dapat menciptakan iklim investasi di Kabupaten Tangerang. Optimalisasi Pendapatan Daerah diupayakan melalui system pendapatan yang terintegrasi dan pengelolaan asset daerah. Kinerja pengawasan yang saat ini telah mencapai level 3 untuk SPIP harus terus ditingkatkan. Program ini juga menggarap pengembangan sistem informasi pada tiap pelayanan publik yang ada termasuk Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Berbagai aplikasi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tangerang harus terintegrasi sehingga perlu dibangun *smart building* dan Pengembangan sistem satu data yang didukung oleh kuatnya sistem database dari masing-maing OPD. Berbagai upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi anggaran yang tentunya akan berdampak pada tranparansi dan akuntabilitas sehingga

terselenggara tatakelola pemerintahan yang baik. Seluruh OPD terlibat dalam program ini, dengan leading sektornya Dinas Komunikasi dan Informatika.

7. GERAKAN BERANTAS KAWASAN PADAT, KUMUH DAN MISKIN (GEBRAK PAKUMIS) PLUS

Program Gebrak Pakumis Plus ini diselenggarakan untuk menangani permasalahan yang terdapat di kawasan permukiman kumuh Kabupaten Tangerang seperti rumah tidak layak huni, prasarana sarana dan utilitas yang buruk dan kurang memadai yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan lingkungan. Melalui program ini direncanakan setiap tahun dapat dituntaskan 20 kawasan permukiman penduduk.

Pada kawasan yang diberikan program ini selain kegiatan fisik juga dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pelatihan wirausaha. Selain itu masyarakat juga diberikan akses untuk mendapatkan bantuan pemodalan dan untuk meningkatkan ketahanan pangan dikembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan memanfaatkan pekarangan rumah. OPD yang menangani program ini adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, DInas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kecamatan

8. KITA PEDULI PERMASALAHAN SAMPAH (KIPRAH)

Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah masalah persampahan. Upaya yang dilakukan mengatasi permasalahan ini adalah mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara pengembangan TPST 3R dan pembentukan Bank Sampah. Revitalisasi TPA dilakukan untuk meningkatkan kinerja persampahan selain itu dilakukan optimalisasi system managemen pengelolaan persampahan.

Upaya untuk mengurangi volume sampah juga dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk peduli pada permasalahan sampah melalui Program Kurasaki (Kurangi Sampah Sekolah Kita) untuk mengurangi produksi sampah khususnya sampah plastik dan sterofoam. Sedangkan dikantor Pemerintahan dilakukan

dengan mencanangkan program Kurasakan (Kurangi Sampah Kantor). OPD yang menangani program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kecamatan.

9. PENGENDALIAN KEMACETAN LALU LINTAS (PEKAT LANTAS)

Pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Tangerang yang dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas yang layak, memadai, terjangkau dan adil, serta pelayanan kepada publik yang semakin baik dan handal. Salah satu prasarana yang sangat perlu dalam rangka menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dan pertumbuhan kota adalah transportasi, karena sektor transportasi merupakan urat nadi distribusi barang dan mobilitas manusia.

Pada kenyatannya Kabupaten Tangerang masih banyak memiliki banyak titik kemacetan antara lain pada koridor Jalan Raya Serang, Jalan Raya Curug-Legok, Jalan Raya Teluknaga - Dadap – Kamal, Jalan Raya Karawaci – Legok, Jalan Raya Cadas – Sepatan dan Jalan Raya Pasar Kemis. Maka perlu penanganan untuk memelihara kondisi jalan atau pembukaan akses terutama pada simpang-simpang geometri dan rekayasa lalu lintas. Selain itu juga untuk mengatasi kemacetan akan dibangun fly over. OPD yang menangani program ini diantaranya yaitu Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan, dan Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan.

10. PRODUK INOVATIF DAN KREATIF (PROAKTIF)

Program unggulan Produk Inovatif dan Kreatif merupakan gabungan dari dua (2) program unggulan antara Produk Inovatif dan Kreatif dan PENGEMBANGAN BANTUAN PERMODALAN BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO (KEMBANGKU).

Kabupaten Tangerang yang berada dalam posisi strategis diwilayah Jabotabekjur harus memiliki keunggulan dan daya saing dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan usaha, yang dimaksud kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan inovatif adalah memperkenalkan atau mengembangkan hal-hal baru. Peran pemerintah dalam menggali dan mengembangkan inovasi dan kreatifitas dikalangan masyarakat sangat penting. Setiap kecamatan dan desa didorong untuk memilik produk unggulan yang

merupakan ciri dan potensi lokal. Upaya untuk mendukung hal tersebut antara lain dengan menyelenggarakan berbagai event promosi, optimalisasi gerai IKM serta fasilitasi permodalan untuk IKM dan UKM. Pengembangan inovasi juga dilakukan dikalangan pemerintahan dengan meningkatkan inovasi OPD sehingga meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dengan pengembangan laboratorium inovasi dan festival inovasi dan kreasi.

Pengembangan ekonomi mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi focus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Pengembangan Bantuan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Kembang KUKM). Bantuan permodalan diberikan kepada Koperasi yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan untuk usahanya, selain itu juga melayani secara langsung permodalan bagi usaha mikro berbasis kelompok dan memberikan kemudahan masyarakat untuk para pelaku usaha dalam sertifikasi PIRT dan sertifikasi halal.

Upaya untuk meningkatkan koperasi aktif dan berkualitas dilakukan dengan cara antara lain peningkatan akses pembiayaan koperasi, pengembangan koperasi pola syariah dan revitalisasi koperasi. OPD yang menangani program ini adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro

Tabel 6.7 Program Unggulan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 (sebelum perubahan)

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TANGERANG RELIGI	Insentif Guru Ngaji	Tersedianya Penerima Insentif Guru Ngaji	Orang/Tahun	3.014	3.288	3.562	3.836	4.110	17.810	Setda
		Insentif Petugas Pemulasaran Jenazah	Tersedianya Penerima Insentif Petugas Pemulasaraan Jenajah	Orang/Tahun	548	822	1.096	1.370	1.644	5.480	Setda
		Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Qur`an SD	Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Qur`an SD	Orang	0	5.000	-	-	-	5.000	Disdik
		Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Qur`an	Jumlah peserta didik SD dan SMP yang dapat Baca Tulis Al Qur`an	Sekolah	0	-	10.000	10.000	10.000	30.000	Disdik
2	SANITASI PONDOK PESANTREN (SANITREN)	Pembangunan sarana Sanitasi Pada Pondok Pesantren	Jumlah Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan	pondok pesantren	150	0	150	150	150	600	Bappeda
3	GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN (GSM)	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun	USB	5	0	2	4	4	15	Disdik
		Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Ruang	293	47	17	110	100	500	Disdik

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Ruang	286	28	49	66	73	600	Disdik
		Beasiswa Pendidikan Berprestasi dan MBR	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa	orang	-	1154	2590	4590	6590	6.590	Disdik
4	GERAKAN TANGERANG SEHAT	Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (Jamkesda)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui Jamkesda	orang	15186	6.549	2.350	2.400	2.600	32000	DINKES
		Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (BPJS PBI)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui BPJS PBI	orang	89289	83.403	100000	100000	100000	550000	DINKES
		Pendidikan Gizi	Jumlah SMA sederajat melaksanakan pemberian TTD	Sekolah	278	276	300	320	347	347	DINKES
		Perbaikan Gizi	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	Balita Gizi Buruk < 5	1,4	<5	<5	<5	<5	DINKES
		Menurunkan angka stunting	Menurunnya angka stunting	persen	12,0	8,5	18	16	14	14	DINKES
		Desa *ODF (open defecation free)*	Jumlah desa ODF	Desa	-	21	31	41	51	51	DINKES
		Pembangunan RSUD Tigaraksa :									DINKES

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a.Feasibility study	Jumlah dokumen FS	Dokumen	1	0	1	1	1	1	DINKES
		b. Master plan dan Detail engineering design	Jumlah dokumen *Master plan*	Dokumen	1	0	1	1	1	1	DINKES
		c. penyediaan lahan	Luas Lahan	M^2	-	5.844	36.784	42.628	42.628	42.628	DINKES
		d. pembangunan	Jumlah Bangunan yang dibangun	Unit	-	0	1	1	1	1	DINKES
		Alat Kesehatan & Sarpras	Jumlah Paket Alat Kesehatan & Sarpras	Paket	-	0	2	2	2	2	DINKES
		Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan	Jenis	-	0	6	6	6	6	DINKES
		Obat dan BMHP	Jumlah Paket Obat & BMHP	Paket	-	0	2	2	2	2	DINKES
		e.operasional	Jumlah Operasional	Paket	-	0	1	1	1	1	DINKES
5	MASYARAKAT BUGAR	Peningkatan Sarana dan prasarana Olah raga	Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana Sport Center	Sport center	1	1	1,00			1,00	DTRB
			Persentase Kelengkapan Pembangunan Sport Center	persentase							
			Optimalisasi Stadion Mini Kecamatan	Stadion	1	0	1	-	-	1,00	DTRB

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Olahraga Bersama Masyarakat	Jumlah kelompok yang berolahraga	Kelompok	643	1093	350	400	427	2.913	DISPORA
		Fungsionalisasi Stadion Mini	Jumlah pemanfaatan stadion mini	Event	2	2	2	2	2	10	DISPORA
6	SAYANG BARUDAK	Fasilitasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah yang ramah anak	sekolah	77	152	200	250	250	929	DP3A
		Fasilitasi Pusat Kreatifitas Anak	Jumlah anak yang ikut pusat kreativitas anak	orang	200	0	100	100	125	525	DP3A
		Fasilitasi Kecamatan Layak Anak	Jumlah kecamatan yang ramah anak	kecamatan	6	20	25	29	29	29	DP3A
		Fasilitasi Puskesmas Ramah Anak	Jumlah puskesmas yang ramah anak	puskesmas	7	11	22	33	44	44	DINKES
7	TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN (Tangerang mantap)	Pengembangan Kawasan Agropolitan		kawasan	1	1	1	1	1	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian	Jumlah luasan pertanian yang diberikan bantuan	Ha	100	100	100	100	100	100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pembangunan Pusat Hortikultura :									DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Desain Pusat Hortikultura	Jumlah dokumen DED	*DED*	0	1	0	0	0	1	DTRB
		2. Pembangunan Pusat Hortikultura	Jumlah pusat hortikultura	*Unit*	0	0	1	0	0	1	DTRB
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana pusat Hortikultura	Paket	0	0	0	0	1	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Optimalisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan		kawasan	1	1	0	0	0	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pemberian Insentif pada Lahan LP2B	Luas lahan LP2B yang diberikan bantuan	Ha	1500	1500	4.500	3.000	2.800	13.300	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pembangunan Daerah Irigasi LP2B	Presentase Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Terlayani Irigasi	persen	0	1,45					DBMSDA

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok KRPL	Kelompok	13	45	10	10	10	70	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
8	GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI (GERBANG MAPAN)	Penanaman Mangrove	Jumlah lokasi penanaman	Lokasi	4	7	0	0	0	6	DINAS PERIKANAN
		Pembangunan WANA WISATA TMC	Jumlah wanawisata yang dibangun	Paket	1	0	0	0	0	1	DTRB
		Pembangunan Sentra Budidaya Perikanan (*Urban Aqua Cultur*)									
		1. Desain Urban Aqua Cultur	Jumlah dokumen	DED/FS	1	0	0	0	0	1,00	DINAS PERIKANAN
		2. Pembangunan Urban Aqua Cultur	Jumlah Urban Aqua Cultur yang dibangun	Unit	1	1	1	1	1	5	DINAS PERIKANAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Penataan Lahan Urban Aqua Cultur	Jumlah lahan Urban Aqua Cultur yang ditata	kawasan	1	1	1	1	1	4	DINAS PERIKANAN
		4. Pemeliharaan dan Operasionalisasi	Jumlah yang dipelihara	Paket	0	0	1	1	1	1	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Budidaya Ikan	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	170	220	150	150	150	750	DINAS PERIKANAN
			Jumlah unit kolam	unit kolam bulat	50	170	0	40	40	300	DISKAN
		Pemberdayaan Nelayan	Jumlah nelayan yang diberdayakan	Nelayan	110	24	150	150	150	584	DISKAN
			Jumlah alat penangkap ikan(API)	unit api	3500	3905	3500	3500	3500	17905	DISKAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO (KEMBANGKU)	Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembiayaan	koperasi	17	12					DINAS KOPERASI
		Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UMKM	Jumlah umkm yang mendapatkan pembiayaan	UMKM	4989	5000					DINAS KOPERASI
		Penilaian Koperasi yang Sehat	Jumlah koperasi yang sehat	koperasi	90	90					DINAS KOPERASI
		Penyebaran Pola Pengembangan Gebrak Sipintar	Jumlah UMK yang dikembangkan	UMK	300	300					DINAS KOPERASI
10	OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMENT ASSET (OPTIMA)	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	persentase realisasi penyelenggaraan perijinan secara online dan terintegrasi	Persen	37	40	60	80	100	100	DPMPTSP

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
		Peningkatan Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset	Jumlah sistem aset yang dikembangkan	sistem	1	1	1,00	1,00	1,00	5,00	BPKAD
		Pembangunan Sistem Informasi pengelolaan PAD Terintegrasi	Jumlah sistem pengelolaan PAD yang terintegrasi	sistem	1	1	1	1	1	5	BAPENDA
		Pembangunan BLK Kosambi :									DISNAKER
		1. Desain BLK	Jumlah dokumen	DED	0	0	-	1	-	1	DTRB
		2. Pengadaan lahan	Jumlah lahan yang tersedia	Paket	2.000	1.894	8.196	-	-	12.090	DINAS PERKIM

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Pembangunan BLK	Jumlah BLK yang dibangun	Unit	0	0	-	-	1	1	DTRB
		4. Optimalisasi BLK	Jumlah sarana dan prasarana BLK	Paket	0	0					DISNAKER
11	GEBRAG PAKUMIS PLUS (GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN)	Bedah rumah berbasis Kawasan	Jumlah rumah yang direhab	rumah	1000	1000	1.222	1.222	1.300	5.744	DINAS PERKIM
		Pengadaan Air Minum berbasis Kawasan	Jumlah Rumah tangga penerima air bersih	titik	7	0	9	7	7	30	DINAS PERKIM
		Sanitasi Masyarakat Berbasis Kawasan	Jumlah SR yang dibangun	SR	132	0	100	100	100	432	DINAS PERKIM
		Penataan	Jumlah kawasan	kawasan	8	0	-	-	-	8	DINAS

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Lingkungan Berbasis Komunitas	kumuh yang terlayani								PERKIM
		Serasi (Seribu Sanitasi)	Jumlah sanitasi yang dibangun	Unit	150	136	350	150	150	936	DINAS PERKIM
12	KITA PEDILI PERMASALAHAN SAMPAH (KIPRAH)	Optimalisasi TPS 3 R persampahan	Jumlah TPS 3 R yang dikelola	TPS3R	5	5	5	3	2	20	DLHK
		Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang dikelola	Bank Sampah	31	19	10	10	10	70	DLHK
			Jumlah penanganan sampah	kali	115	50	150	150	150	615	DLHK
		Penanganan sampah di Daerah Rawan Sampah					-	-	-	1	
		Revitalisasi TPA Jatiwaringin									
		a. Pembuatan Masterplan TPA	Jumlah dokumen	Dokumen	1	0	-	-	-	1	DLHK
		b. Pemagaran	Jumlah volume	Meter	0	-	-	-	-	-	DLHK

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TPA	pemagaran								
		c. Pembuatan Kantor	Jumlah bangunan yang dibangun	Unit	0	-	-	-	-	-	DLHK
		d. Perbaikan Kolam *Leacet*	Jumlah bangunan yang direhab	Paket	0	-	-	-	-	-	DLHK
		e. Penataan Jalan TPA	Jumlah volume jalan yang ditata	Meter	0	-	-	-	-	-	DLHK
		f. Pembangunan IPAL	Jumlah IPAL yang dibangun	Unit	0	-	-	-	-	-	DLHK
13	PENGELOLAAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA AIR (LESTARI)	Infrastruktur Sungai dan Saluran Pembuang Dalam Kondisi Baik	Presentase sungaidan saluran kabupaten dalam kondisi baik	persen	58,59	59,62	60,57	61,74	62,91	revisi	DBMSDA
		Pembangunan/ Peningkatan Embung/Situ/Danau	Pembangunan/Peningkatan Embung/Situ/Danau	buah	-	0	1	0	0	revisi	DBMSDA
		Pembangunan Daerah Irigasi	Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Terlayani Irigasi	Daerah Irigasi (DI)	1,00	0	5	8	0	revisi	DBMSDA
14	Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas (Pekatlantas)	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System)	Terbangunnya ATCS	titik	0	0	0	0	3	3	DISHUB
		FS ATCS	Tersedianya FS ATCS	dokumen	1	0	0	0	0	1	DISHUB
		DED ATCS	Tersedianya DED ATCS	dokumen	1	0	0	0	0	1	DISHUB

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir RPJMD	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan Terminal FS dan DED Tipe C	Tersedianya Terminal FS dan DED Tipe C	dokumen	1	0	0	0	0	1	DISHUB
		Pembangunan terminal Tipe C	Tersedianya Terminal Tipe C	Unit	0	0	0	9	1	1	DISHUB
		Pembangunan/ Peningkatan Jalan Kabupaten	Prosentase Infrastruktur jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	persen	88,55	87,55	89,06	90,57	92,08	revisi	DBMSDA
		Penanganan kemacetan lalu lintas	Jumlah titik kemacetan yang tertangani	titik	2	1	4	4	5	16	DISHUB
15	PROAKTIF (PRODUK INOVATIF DAN KREATIF)	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pelaksanaan kesenian dan kebudayaan	Event..	22	0	8	10	10	50	DISPORA
		Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata Unggulan dan Strategis	Jumlah kelompok yang dibina	Kelompok	0	0	2	2	3	7	DISPORA
		Bantuan Promosi Usaha Mikro	Jumlah Bantuan Promosi Usaha Mikro	event	3	3					DINAS KOPERASI

Tabel 6.8 Program Unggulan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 (setelah perubahan)

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD Penanggung jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD	
1	TANGERANG RELIGI	Insentif Guru Ngaji	Tersedianya Penerima Insentif Guru Ngaji	Orang/ Tahun	3,014	3,288	3,562	3,836	4,110	17,810	Kesra Setda
		Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Qur`an	Jumlah peserta didik SD dan SMP yang dapat Baca Tulis Al Qur`an	Siswa	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000	Disdik
		Pembangunan sarana Sanitasi Pada Pondok Pesantren	Jumlah Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan	pondok pesantren	196	0	150	150	150	646	Kesra Setda
			Jumlah Pontren dibina PHBS	pondok pesantren	40	46	100	125	125	436	Dinkes
2	GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN (GSM)	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun	USB	5	0	0	8	2	15	Disdik
		Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Ruang	293	47	6	50	50	456	Disdik
		Rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Ruang	286	28	72	66	50	691	Disdik
		Beasiswa Pendidikan Berprestasi dan MBR	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa	orang	0	1,154	2,583	4,590	4,000	15,673	Disdik
		Fasilitasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah dibina menjadi ramah anak	sekolah	77	152	152	250	250	979	DP3A

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD Penanggung jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD	
		Sekolah SEHATI	jumlah sekolah SD/SMP yang menerapkan program Sehati	sekolah	0	13	30	20	20	83	DLHK
3	GERAKAN TANGERANG SEHAT	Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (Jamkesda)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui Jamkesda	orang	15,186	6,549	5,202	2,400	2,600	31,937	DINKES
		Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (BPJS PBI)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui BPJS PBI	orang	89,289	83,403	90,088	90,000	100,000	452,780	DINKES
		Aksi Konvergensi Stunting	Persentase Balita Stunting Di intervensi	persen	12	8.5	18	16	14	14	DINKES, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, DPPKB Dan Disdik, DPPPA, DPPP
		Desa bebas *ODF (open defecation free)*	Jumlah desa ODF	Desa	0	21	10	69	100	100	Pemdes,Perkim dan Dinkes
		Pembangunan RSUD Tigaraksa :								-	
		a.Feasibility study	Jumlah dokumen FS	Dokumen	1	0	0	0	0	1	DINKES
		b. Master plan dan Detail engineering design	Jumlah dokumen *Master plan*	Dokumen	0	1 (masterplan)	1 (DED)	0	0	2	DINKES
		c. penyediaan lahan	Luas Lahan	M^2	-	5,844	43,264	5,844	522	49,630	PERKIM

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD Penanggung jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD	
		d. pembangunan	Persentase Bangunan yang dibangun	Persen	-	0	0	25	100	100	DINKES
		Alat Kesehatan & Sarpras	Jumlah Paket Alat Kesehatan & Sarpras	Jenis	-	0	0	0	250	250	DINKES
		Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan	Orang	-	0	0	0	150	150	DINKES
		Obat dan BMHP	Jumlah Paket Obat & BMHP	Paket	-	0	0	0	2	2	DINKES
		Puskesmas Ramah Anak	Jumlah puskesmas yang dibina menjadi ramah anak	puskesmas	7	11	22	33	44	44	DINKES dan DPPPA
		Olahraga bersama Masyarakat dan Pelajar	Jumlah kelompok masyarakat dan pelajar yang berolahraga bersama	Kelompok	643	1,093	35	35	35	1,841	Kecamatan, Disporabudpar
4	TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN (TANGERANG MANTAP)	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Jumlah produksi Holtikultura di kawasan Agropolitan	Ton	775	780	878.7	870	870	4,174	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian	Jumlah sarana dan prasarana Produksi Pertanian di Kawasan Agropolitan	Jenis		12	14	14	14	54	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Jumlah luasan pertanian yang diberikan bantuan	Ha	100	100	163	163	163	689	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD Penanggung jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD	
		Pelaksanaan Pembangunan Pusat kawasan agropolitan (Puskagro) :	Persentase pembangunan Bangunan Utama pusat kawasan agropolitan (Puskagro)	Persen	0	0	50	100	0	100	DTRB
		1. Desain Puskagro	Jumlah dokumen DED	DED		1				1	DTRB
		2. Pembangunan Puskagro	Jumlah Puskagro	Unit			1			1	DTRB
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskagro	Jumlah sarana dan prasarana Puskagro	Paket				1		1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pemberian Insentif pada Lahan LP2B	Luas lahan LP2B yang diberikan bantuan	Ha		3,228.49	4,890.56	4,466.45	1,345	13,930.70	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pembangunan Daerah Irigasi	Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Terlayani Irigasi	Daerah Irigasi (DI)	0	1	5	8	0	14	DBMSDA
5	GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI (GERBANG MAPAN)	Konservasi Penanaman Mangrove	Jumlah Ha lokasi penanaman (Persentase Luasan Penanaman Mangrove)	Luasan Ha	5	5	5	5	5	25	DLHK
		Pembangunan WANA WISATA TMC	Persentase Kawasan Wana wisata TMC terbangun	persen	1		70	100	100	100	DTRB
		Pembangunan Sentra Budidaya Perikanan (Ketapang *Urban Aqua Cultur*)									DINAS PERIKANAN
		1. Desain Ketapang Urban	Jumlah dokumen	DED/FS	1					1	DINAS PERIKANAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD Penanggung jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD	
		Aqua Cultur									
		2. Pembangunan Ketapang Urban Aqua Cultur	Jumlah Unit Ketapang Urban Aqua Cultur yang dibangun	Unit	0	1	-	10		11	DINAS PERIKANAN
		3. Penataan Lahan Ketapang Urban Aqua Cultur	Presentase Luasan Ketapang Urban Aqua Cultur yang ditata	Persen	34	48	55	85	100	100	DINAS PERIKANAN
		4. Pemeliharaan dan Operasionalisasi KUA	Porsentase yang dipelihara	Persen	-	-	20	20	100	100	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Budidaya Ikan	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	170	220	150	150	150	840	DINAS PERIKANAN
			Jumlah unit kolam	unit kolam bulat	50	170	0	40	40	300	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Budidaya Ikan Hias	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	10	10	10	10	10	50	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Nelayan	Jumlah nelayan yang diberdayakan	Nelayan	110	24	150	150	150	584	DINAS PERIKANAN
			Jumlah alat penangkap ikan(API)	unit api	3500	3905	3500	3500	3,500	17,905	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Pengolah Ikan	Jumlah Pengolah Yang dilatih	Kelompok	10	10	10	10	10	50	DINAS PERIKANAN
			Jumlah Bantuan Sarana Pengolahan ikan	Unit	10	10	10	10	10	50	DINAS PERIKANAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD Penanggung jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD	
6	OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMENT ASSET (OPTIMA)	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	persentase realisasi penyelenggaraan perijinan secara online dan terintegrasi	Persen	37	40	71.43	80	100	100	DPMPTSP
		Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Persentase Sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi	Persen			21	40	60	60	DISKOMINFO
		pengelolaan manajemen SDM terintegrasi	Persentase pengelolaan manajemen SDM terintegrasi	Persen				80	100	100	BKPSDM
		pengelolaan perencanaan dan monev terintegrasi	Persentase pengelolaan perencanaan dan monev terintegrasi	Persen				80	100	100	BAPPEDA
		operasionalisasi e-office	Persentase OPD penggguna e-office	Persen			84	90	100	100	DISKOMINFO
		Peningkatan Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset	Persentase sistem aset yang dikembangkan	Persen	50	60	70	80	100	100	BPKAD
		Pembangunan Sistem Informasi pengelolaan PAD Terintegrasi	Persentase sistem pengelolaan PAD yang terintegrasi	Persen	50	60	80	80	100	100	BAPENDA
		Pembangunan BLK Kosambi	Pengadaaan lahan	M^2	2,000	1,894	8,196	0	0	12,090	DINAS PERKIM

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD Penanggung jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD	
			Prosentase pembangunan BLK Kosambi	persen	-	-	-	17	83	100	DTRB
7	GEBRAK PAKUMIS PLUS (GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN)	Bedah rumah berbasis Kawasan	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	rumah	1,000	1,000	1,222	1,222	1,300	5,744	DINAS PERKIM
			Penanganan Kawasan Kumuh	Kawasan	20	20	22	20	20	102	DINAS PERKIM
		Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di kawasan kumuh	Jumlah kelompok P2L	Kelompok	13	45	10	10	10	86	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan
		Pengadaan Air Minum berbasis Kawasan	Jumlah Rumah tangga penerima air bersih	SR	131	57	455	200	250	1,093	DINAS PERKIM
		Sanitasi Masyarakat Berbasis Kawasan	Jumlah SR yang dibangun	SR	132	134	521	100	100	987	DINAS PERKIM
8	KITA PEDULI PERMASALAHAN SAMPAH (KIPRAH)	Optimalisasi TPS 3 R persampahan	Jumlah TPS 3 R yang dibina	TPS3R	5	5	5	5	5	25	DLHK
		Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang dibina	Bank Sampah	31	19	10	10	10	80	DLHK
		Koordinasi dan Fasilitasi pengelolaan sampah berbasis bio conversi maggot	jumlah kelompok pengelola	Kelompok			19	20	20	59	Bappeda dan DLHK

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD Penanggung jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD	
		Revitalisasi TPA Jatiwaringin	persentase pengelolaan sampah berbasis waste to energy (Refuse derived fuel)	Persen				20	30	30	DLHK
9	PENGENDALIAN KEMACETAN LALU LINTAS (PEKATLANTAS)	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System)	Terbangunnya ATCS	titik				1	1	2	DISHUB
		FS ATCS	Tersedianya FS ATCS	dokumen	1					1	DISHUB
		DED ATCS	Tersedianya DED ATCS	dokumen	1					1	DISHUB
		Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten	Prosentase Infrastruktur jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	persen	88.55	87.55	90.74	90.57	92.08	92.08	DBMSDA
		Penanganan kemacetan lalu lintas	Titik kemacetan yang tertangani	Titik	2	1	2	2	5	9	DISHUB
		Pembangunan Fly Over Cisauk	Pengadaan lahan	M^2	3,043	6,067	1,787	1,003		11,900	DINAS PERKIM
			Persentase Pembangunan Fly Over	Persen	-	-	-	38	62	100	DBMSDA
10	PRODUK INOVATIF DAN KREATIF (PROAKTIF)	Bantuan Promosi Usaha Mikro	Usaha Mikro yang dipromosikan	Usaha Mikro	270	270	270	300	300	1410	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Optimalisasi GTG	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan	IKM	0	0	50	70	70	190	INDAG

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						OPD Penanggung jawab
					2019	2020	2021	2022	2023	Target akhir RPJMD	
			Pengembangan produksi UM	UM	0	0	0	300	300	600	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		pengembangan kluster Usaha Mikro	Terbentuknya kluster Usaha Mikro	kluster	0	0	0	1	1 (klaster Makan Minum)	2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembiayaan	koperasi	17	12	12	12	12	65	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UMKM	Jumlah umkm yang mendapatkan pembiayaan	UMKM	4989	5000	1500	1500	1,500	14489	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Penilaian Koperasi yang Sehat	Jumlah koperasi yang sehat	koperasi	90	90	30	30	30	270	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Yang Implementasikan	Inovasi	10	36	36	40	45	121	Bappeda
		Digitalisasi Pelayanan UTTP	Presentase Pelaku Usaha yang di layani Secara Digital (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya)	Persen	0	0	30.29	11.68	11.68	11.68	INDAG

6.4.2. Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 - 2023

Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.9 Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 – 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional	Perangkat Daerah
	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN							
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	66,52	70	75	80	100	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam	69,90	70	75	80	100	Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional	Perangkat Daerah
		pendidikan kesetaraan						
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	68,09	70	75	80	100	Dinas Pendidikan
	BIDANG URUSAN KESEHATAN							
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	93,57	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	89,32	90	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan	53,24	60	65	70	100	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional	Perangkat Daerah
		kesehatan						
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	84,45	85	90	95	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	85,62	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	80,65	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	76,66	90	95	100	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	53,42	70	80	90	100	Dinas Kesehatan
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan	76,43	80	85	90	100	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional	Perangkat Daerah
		kesehatan						
	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM							
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	36,46	50	55	60	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limba Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,52	10	15	20	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh yang layak huni bagi korban bencana di rumah layak huni	15,00	20	30	35	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	30	40	50	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional	Perangkat Daerah
	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100	100	Satuan Pol PP
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	59,56	70	80	100	100	BPBD
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	BPBD
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	78,11	80	90	100	100	BPBD
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	78,36	90	100	100	100	BPBD
	BIDANG URUSAN SOSIAL							

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Nasional	Perangkat Daerah
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20,29	40	60	70	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	17,28	40	60	70	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	17,47	40	60	70	100	Dinas Sosial
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	65,55	70	75	80	100	Dinas Sosial
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupatan	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	40	60	70	80	100	Dinas Sosial

Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal dalam bidang Pekerjaan Umum terutama dalam pemenuhan air minum, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan target layanan air minum tahun 2023 sebesar 60,03%. Untuk mencapai target capaian 60,03% tersebut, disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun

2020-2031 sebagai acuan bagi stakeholder/operator yang berkaitan langsung dalam hal pelaksanaan program penyediaan Air Minum.

6.4.3 Program Pembangunan Daerah

Target kinerja dan kerangka pendanaan dari program pembangunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 Kabupaten Tangerang menyajikan program-program yang mendukung dan memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran secara langsung, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6.10 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tangerang (Sebelum Perubahan)

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius																
1.1	Meningkatka n perilaku spritualitas masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	1.03	Indeks	1.04		1.05		1.06		1.07		1.08		1.08		
1.1.1	Meningkatny a ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	70	Persen	72		74		76		78		80		80		
1101.21	Program Pendidikan Karakter Sekolah Dasar	Prosentase peningkatan pendidikan karakter tingkat sekolah dasar	0	Persent ase	0.00	-	3,500.00	589,350,000	3,500.00	2,500,000,000	3,500.00	3,750,000,000	3,500.00	5,000,000,000	14,000.00	5,000,000,000	Dinas Pendidikan
1101.22	Program Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama	prosentase peningkatan pendidikan karakter tingkat menengah pertama	0	Persent ase	0.00	-	1,500.00	392,650,000	1,500.00	1,000,000,000	1,500.00	1,250,000,000	1,500.00	1,500,000,000	6,000.00	1,500,000,000	Dinas Pendidikan
1105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Pelanggaran K yang Terselesaikan	100	Persent ase	100	3,750,000,000	100	3,890,000,000	100.00	5,340,000,000	100	3,845,000,000	100	3,560,000,000	100.00	3,560,000,000	Satua n Polisi Pamon g Praja

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1105.16	Program Pengawasan Dan Penegakan Peraturan Daerah/Peratu ran Kepala Daerah	Prosentase Penegakan Perda yang ditindaklanjut i	100	Persent ase	100	1,100,000,00 0	100	1,250,000,0 00	100.00	1,250,000,0 00	100	1,300,000,0 00	100	1,300,000,000	100.00	1,300,000,0 00	Satua n Polisi Pamon g Praja
1105.17	Program pengembanga n wawasan kebangsaan	Persentase Capaian Wawasan Kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik	75	Persent ase	75	972,250,000	77	1,500,000,0 00	80.00	1,800,000,0 00	80	1,800,000,0 00	80	1,800,000,000	80.00	1,800,000,0 00	Kantor Kesatua n Bangsa dan Politik
1105.18	Program kemitraan pengembanga n wawasan kebangsaan	Jumlah Kemitraan pengembanga n wawasan kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik	1	Mitra	1	1,015,000,000	1	1,250,000,000	1.00	1,450,000,000	1	1,450,000,000	1	1,450,000,000	5.00	1,450,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam penanganan trantibum dan linmas	100	Persenta se	100	1,307,385,000	100	700,000,000	100.00	950,000,000	100	950,000,000	100	850,000,000	100.00	850,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1105.20	Program Pembinaan Dan Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum	Prosentase SDM Anggota Satpol PP yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100	Persenta se	100	750,000,000	100	1,050,000,000	100.00	1,100,000,000	100	1,100,000,000	100	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1105.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Fasilitasi Lembaga dalam bidang politik	78	Persenta se	78	2,344,925,000	78	1,560,000,000	78.00	1,710,000,000	78	1,710,000,000	79	3,010,000,000	79.00	3,010,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3001.19	Program Peningkatan Kesadaran Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Inventarisasi Sarana Prasarana Sosial	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesra	10	Jumlah	10	8,484,445,500	10	8,617,640,850	10.00	9,588,198,721	10	10,380,811,168	10	11,265,557,921	50.00	11,265,557,921	Sekretariat Daerah
		Persentase Pembina Keagamaan yang Aktif	100	Persenta se	100		100		100.00		100		100		100.00		Sekretariat Daerah
2	Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat																
2.1	Meningkatka n Kualitas Sumber Daya Manusia	Angka IPM	71.59	Angka	71.6		71.7		71.8		71.9		72		72		
2.1.1	Meningkatny a Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	69.61	Angka	70.27		70.8 7		71.17		71.47		71.77		71.77		
1102.15	Program UKP Rujukan	Prosentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV	100	Persent ase	100.00	3,352,1 74,999	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	100.00	3,352,174,99 9	Dinas Kesehat an

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate)	85	Persentase	85.00		0.00		0.00		0.00		0.00		89.00		Dinas Kesehatan
		Prosentase pelayanan penderita hipertensi	0				0		0		0		0				Dinas Kesehatan
		Prosentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	Persentase	70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		80.00		Dinas Kesehatan
		Prosentase pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ berat	100	Persentase	80.00		0.00		0.00		0.00		0.00		95.00		Dinas Kesehatan
		Bed Occupancy Ratio (BOR)	75	Persentase	75.00		0.00		0.00		0.00		0.00		80.00		Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya operasional pelayanan rumah sakit	100	Persentase	100.00	130,511,077,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	130,511,077,810	RSUD Kab Tangerang

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		BOR (Bed Of Rate) Rumah Sakit	75	Persentase	75.00	12,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	12,000,000,000	Rumah Sakit Umum Balaraja
1102.17	Program UKM Rujukan	Cakupan Ibu Hamil mendapat pelayanan K sesuai standar	96	Persentase	100.00	9,206,773,000		-		-		-		-	100.00	9,206,773,000	Dinas Kesehatan
		Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	92	Persentase	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap	99	Persentase	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan anak balita	98	Persentase	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan penjaringan murid kelas sampai kelas 9 SD sederajat dan usia - tahun untuk luar sekolah	0	Persentase	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan Warga Negara Usia 0 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88	Persentase	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		Dinas Kesehatan
		Prevalensi anemia ibu hamil	0	Persentase	48.00		0.00		0.00		0.00		0.00		40.00		Dinas Kesehatan
1102.19	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tercapainya pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSU Kabupaten Tangerang Tahun 2019	100	Persentase	100	52,042,015,556.00		-		-		-		-			RSUD Kab Tangerang
1102.20	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSU Kabupaten Tangerang Tahun 2019	100	Persentase	100	11,082,229,854.00		-		-		-		-			RSUD Kab Tangerang
1102.21	Program Pengendalian Pengembanga n Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Persentase	100	30,769,590,056		0	0	0	0						Dinas Kesehatan, RSUD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kesehatan (ASPAK) Rumah Sakit	30	Persentase	60.00	32,776,989,000	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	-	60.00		Dinas Kesehatan
		Tercapainya pengembanga n rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	100	Persentase	100.00	3,000,000,000											RSUD Kab Tangerang
		Terpenuhinya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	100	Persentase	100.00	5,363,354,000											Rumah Sakit Umum Balaraja
1102.22	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat rumah tangga	60	Persentase	62.00	5,256,650,000	64.00	-	66.00	-	68.00	-	70.00	-	70.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	60	Persentase	62.00		64.00		66.00		68.00		70.00		70.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat- Tempat Umum	75	Persentase	75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat- Tempat Umum	75	Persentase	75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	75	Persentase	75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	75	Persentase	75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		Dinas Kesehatan
1102.23	Program Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	2	Persentase	0.00	76,476,512,000	2.00	-	1.00	-	8.00	-	11.00	-	11.00		Dinas Kesehatan
		Jumlah Rumah SakitTerakred itasi Paripurna	2	Rumah sakit	0.00		2.00		2.00		2.00		3.00		3.00		Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya sumber daya kesehatan obat-obatan rumah sakit	100	Persentase	100.00	4,726,297,450	0.00		-		0.00		0.00		-		Rumah Sakit Umum Balaraja

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rumah sakit terakreditasi	100	Persentase	100.00	42,100,000,000	0.00		-		0.00		0.00		-		RSUD Kab Tangerang
1102.24	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Prosentase sarana dan prasarana yang tersedia di Puskesmas sesuai standar	65	Persentase	68.00	5,096,096,000	70.00	-	73.00	-	75.00	-	78.00	-	80.00		Dinas Kesehatan
1102.25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan				0.00	-		83,910,683,769		88,106,217,957		92,511,528,855		97,137,105,298	22.00	97,137,105,298	Dinas Kesehatan
		Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	0	Rumah sakit	0.00		8		16		4		2		3.00	3	Dinas Kesehatan
		Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	0	Klinilk	0.00		2		2		2		3		40.00	40	Dinas Kesehatan
		Cakupan Rawat Jalan Puskesmas	17	Persentase	0.00		100		100		100		100		15.00	15	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit Pemerintah	0	Rumah sakit	0.00		100		100		100		100		3.00	3	Dinas Kesehatan
		Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) Puskesmas					100		100		100		100			-	Dinas Kesehatan
1102.26	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga		0	Persentase	0.00	-		3,041,652,000		3,193,734,600		3,353,421,330		3,521,092,397	100.00	3,521,092,397	Dinas Kesehatan
		Cakupan K4	91.8	Persentase	100.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	98.9	Persentase	100.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap	0	Persentase	0.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan Pelayanan kesehatan balita	0	Persentase	0.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan penjaringan murid kelas 1 sampai kelas 9 SD sederajat dan usia 7 sampai 15 tahun untuk luar sekolah	0	Persentase	0.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	40	Persentase	0.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Presentase anemia ibu hamil	28	Persentase	0.00		38		36		34		32		32.00		Dinas Kesehatan
		Presentase balita malnutrisi	73	Persentase	0.00		<5%		<5%		<5%		<5%		<5%		Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan olah raga		Persentase			43		66		84		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase keluarga dengan akses jamban sehat	23	Persentase	0.00		`75		76		78		80		80.00		Dinas Kesehatan
1102.27	Program Peningkatan Penangulanga n Penyakit		0	Persentase	100.00	-		5,776,769,000		6,065,607,450		6,368,887,823		6,687,332,214	100.00	6,687,332,214	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan pada penderita Hipertensi	0	Persentase	100.00		100	-	100	-	100	-	100	-	100.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV	0	Persentase	100.00		100	-	100	-	100	-	100	-	100.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan pada penderita ODGJ Berat	0	Persentase	100.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Respon time KLB < 24 jam	0	Persentase	100.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan usia produktif	0	Persentase	100.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Persentase desa UCI	269	Desa	269.00		`98.2		`98.5		`98.9		`99.3		274.00		Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	0	Persentase	0.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Penemuan kasus baru TB (CDR)					65		70		73		76				Dinas Kesehatan
		Persentase Pengendalian Penyakit Menular					100		100		100		100				Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1102.28	Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		0	Sarana	0.00	-		11,112,272,000		11,667,885,600		12,251,279,880		12,863,843,874	118.00	12,863,843,874	Dinas Kesehatan
		Persentase sistem informasi di Fasilitas Kesehatan Terintegrasi dengan sistem informasi Dinas Kesehatan	0	Orang	0.00		20		25		26		27	-	299.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Tenaga Kesehatan di Lingkup Dinas Kesehatan yang telah mendapat peningkatan dan pengembangan kemampuan teknis	0	Persentase	0.00		23		24		25		26		70.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	0	Persentase	0.00		61		65		67		70,00		75.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	0	Persentase	0.00		60,00		65,00		70,00		75,00		80.00		Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang tersedia di puskesmas sesuai standar					73,00		75,00		78,00		80,00				Dinas Kesehatan
1202.15	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif	0	Persentase	79	1,300,000,000	80	1,097,000,000	80.00	1,300,000,000	90	1,350,000,000	90	1,500,000,000	90.00	1,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan	16.66	Persentase	16.66	1,750,000,000	16.67	1,425,000,000	16.67	1,800,000,000	16.67	2,350,000,000	16.67	2,450,000,000	16.67	2,450,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.19	Program Advokasi Dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Presentase Desa yang telah Membentuk PATBM dan PTPA	24	Persentase	39	437,500,000	39	500,000,000	39.00	550,000,000	39	550,000,000	38	550,000,000	39.00	550,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah kecamatan yang telah memenuhi standar Kecamatan Layak Anak / jumlah 9 kecamatan	31	Persentase	52	639,100,000	66	800,000,000	80.00	1,200,000,000	90	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1202.21	Program Peningkatan Kelembagaan Dan Partisipasi Anak	Jumlah forum anak kecamatan Aktif /Jumlah Forum anak yang terbentuk	0	Persenta se	100	550,000,000	100	700,000,000	100.00	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak
1208.15	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Persentase KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	24.83	Persenta se	25.95	1,553,762,000	26.1	2,204,138,000	26.30	1,819,552,000	26.41	2,001,506,000	26.65	2,201,656,500	26.65	2,201,656,500	Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Persentase KB Baru	43.22	Persenta se	44.1		44.5		44.80		45.1		45.5		45.50		Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana
		Menurunnya angka Putus Pakai Alat Kontrasepsi	5.89	Persenta se	5.5		5.2		4.80		4.5		4.1		4.10		Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.17	Program Pengendalian Penduduk	Tersedianya pengembanga n model solusi strategis pengendalian dampak kependuduka n	1	Rekomen da si	1	577,000,000	1	592,100,000	1.00	679,200,000	1	767,120,000	1	861,332,000	5.00	861,332,000	Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	Berencana
		Persentase desa/kelurah an yang memiliki data dan informasi	100	Persenta se	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.19	Program Penyediaan Informasi Dan Data Keluarga	Persentase penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurah an	100	Persenta se	100	340,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.16	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Dan Remaja	Meningkatnya Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	82.3	Persenta se	82.5	1,829,400,000	82.75	2,237,020,000	83.00	2,463,574,000	83.25	2,709,931,000	83.5	2,978,422,000	83.50	2,978,422,000	Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri	Meningkatnya Persentase PPKBD Mandiri	1.1	Persenta se	2	6,869,800,000	3	7,556,780,000	4.00	8,312,458,000	5	9,143,703,000	6	10,058,073,000	6.00	10,058,073,000	Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Kelompok Masyarakat yang berperan dalam Program KKBPK	10.58	Persentase	21.17		31.75		42.34		52.92		63.5		63.50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1213.17	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Prosentase kelompok masyarakat berperan aktif dalam berolahraga	86	Persentase	90	1,771,000,000	90	4,800,000,000	95.00	4,500,000,000	95	4,000,000,000	100	4,750,000,000	100.00	4,750,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah atlet yang dikirim (POPNAS)	63	Atlet	30		0		50.00		0		60		60.00		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah atlet yang dikirim (POPWIL dan POPDA)	323	Atlet	0		345		-		370		0		370.00		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2.1.2	Meningkatny a Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8.27	Angka	8.3		8.4		8.5		8.6		8.7		8.7		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD	25.14	Angka	28.00	5,443,146,900	31.00	6,107,916,000	34.00	8,816,850,000	37.00	9,631,850,000	40.00	10,396,850,000	40.00	10,396,850,000	Dinas Pendidikan
		ANGKA PARTISIASI MURNI (APM) Kesetaraan	0.16	Angka	0.15		0.14		0.13		0.12		0.11		0.11		Dinas Pendidikan
		Prosentase Lembaga Pendidikan Masyarakat yang Terakreditasi	32.96	Persentase	38.00		43.00		48.00		53.00		58.00		58.00		Dinas Pendidikan
1101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					81,108,459,010.00		0		0		0		0		81,108,459,010	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84.03	Persentase	84.50		0		0		0				84.50		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64.84	Persentase	65.15		0		0		0				65.15		Dinas Pendidikan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1101.17	Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Kompetensi	16.48	Persentase	24.57	132,033,200,000	32.66	144,807,765,000	40.75	285,440,118,000	48.84	285,495,118,000	56.93	285,555,118,000	56.93	285,555,118,000	Dinas Pendidikan
1101.18	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase pencapaian SPM sesuai standar	80	Persentase	60.00	493,415,000	65.00	719,700,031	70.00	891,950,000	75.00	841,950,000	80.00	841,950,000	80.00	841,950,000	Dinas Pendidikan
1101.19	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Porsentase satuan pendidikan negeri yang mendapatkan program BOS	100	Persentase	100.00	272,601,530,000	100.00	272,601,530,000	100.00	272,601,530,000	100.00	272,601,530,000	100.00	272,601,530,000	100.00	272,601,530,000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan BOP	8441	Orang	8,673.00		8,673.00		8,673.00		8,673.00		8,673.00		8,673.00		Dinas Pendidikan
1101.23	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64.84	Persentase	65.15	57,697,895,600	65.80	71,936,009,900	66.10	87,711,500,000	66.70	97,450,900,000	67.05	93,191,990,000	65.05	93,191,990,000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang melaksanaka n GSM	0	Satuan Pendidikan	20.00		5.00		5.00		5.00		5.00		40.00		Dinas Pendidikan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Meningkatnya Nilai Rata-rata Ujian Akhir Nasional	0	Nilai	45.01		45.25		45.50		45.75		46.00		46.00		Dinas Pendidikan
1101.24	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84.03	Persentase	84.50	92,208,266,000	85.00	100,556,783,750	85.50	161,625,000,000	86.00	161,922,500,000	86.50	162,250,000,000	86.50	162,250,000,000	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Nilai Rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berbasis Nasional (UASBN)	0	Nilai	77.29		77.50		77.75		78.00		78.25		77.50		Dinas Pendidikan
		Jumlah satuan pendidikan yang melaksanaka n GSM	0	Satuan Pendidikan	70.00		85.00		100.00		115.00		130.00		130.00		Dinas Pendidikan
1216.15	Program pelestarian kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	27	Event	27	1,041,000,000	31	1,300,000,000	35.00	1,830,000,000	39	1,760,000,000	43	2,550,000,000	43.00	2,550,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Program pengembanga n koleksi bahan pustaka , sarana prasarana dan kerja sama perpustakaan	Persentase Koleksi bahan bacaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bacaan untuk masyarakat															Dinas Perpustaka

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1217.15			12.87	Persentase	17.87	1,330,000,000	22.87	2,000,000,000	27.87	2,400,000,000	32.87	2,550,000,000	37.87	2,700,000,000	46.00	2,700,000,000	an dan Arsip
		Persentase revitalisasi perpustakaan umum	0	Persentase	2		2		2.00		2		2		10.00		Dinas Perpustakaan dan Arsip
1217.16	Program pengembangan layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan	40	Persentase	47	1,600,000,000	67	2,150,000,000	77.00	2,400,000,000	87	2,450,000,000	100	2,500,000,000	100.00	2,500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan																
3.1	Menurunnya Kemiskinan	Prosentase Penduduk Miskin	5.18	Persen	5.1		5.05		5		4.95		4.9		4.9		
3.1.1	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengganggur an Terbuka (TPT)	9.7	Prosentase	9.65		9.61		9.32		9.05		8.8		8.8		
1106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya Jumlah Fakir Miskin	100220	Orang	99,804.00	2,670,000,000	98,924.00	4,630,000,000	97,739.00	5,765,000,000	96,343.00	6,326,000,000	94,873.00	6,500,000,000	94,873.00	6,500,000,000	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial dan PMKS Lainnya yang ditangani	2.95	Persentase	6.14	1,575,000,000	12.78	2,975,000,000	20.56	3,965,000,000	29.16	4,760,000,000	38.17	5,125,000,000	38.17	5,125,000,000	Dinas Sosial
		Prosentase Gelandangan Pengemis yang ditangani	0	Persentase	9.00		23.00		41.00		64.00		92.00		92.00		Dinas Sosial
		Prosentase Lansia terlantar yang ditangani	1.18	Persentase	2.29		4.30		6.88		10.04		14.05		14.05		Dinas Sosial
		Prosentase Anak Terlantar yang ditangani	0	Persentase	0.41		0.95		1.56		2.33		3.18		3.18		Dinas Sosial
		Prosentase penyandang disabilitas yang ditangani	2.67	Orang	4.69		10.54		19.71		30.66		42.12		42.12		Dinas Sosial
1106.17	Program Pembinaan Panti Dan Rumah Singgah	Prosentase (PMKS) yang mendapat pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi dengan cepat	100	Persentase	15.94	1,020,000,000	33.04	1,295,000,000	61.59	1,195,000,000	73.33	1,295,000,000	100.00	1,295,000,000	100.00	1,295,000,000	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1106.18	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Pendamping PKH yang aktif	233	Orang	233.00	2,218,025,500	247.00	2,557,700,000	300.00	2,668,094,000	350.00	2,661,195,880	375.00	2,763,019,798	375.00	2,763,019,798	Dinas Sosial
		Prosentase Orang Terlantar yang ditangani	100	Persentase	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
		Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota	100	Persentase	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
1106.19	Program Pengelolaan Data, Bina Sosial Dan Peningkatan Nilai - Nilai Keperintisan Dan Kepahlawanan	Prosentase data dan Informasi tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terverifikasi dan valid dan Jumlah pemanfaat data PMKS dan PSKS	100	Persentase	100.00	1,475,000,000	100.00	1,450,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,550,000,000	100.00	1,550,000,000	100.00	1,550,000,000	Dinas Sosial
		Jumlah PSP dan Penyuluh Sosial yang Aktif	303	Orang	303.00		303.00		303.00		303.00		303.00		303.00		Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah Penyakit Sosial yang mendapatkan pembinaan dan konseling	0	Orang	50.00		280.00		280.00		280.00		280.00		1,250.00		Dinas Sosial
		Prosentase PSKS yang dibina	50.21	Persentase	66.25		69.30		70.42		72.50		72.50		72.50		Dinas Sosial
1201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang dilatih	0	Persentase	5	3,184,980,000	5	3,582,300,000	5.00	3,880,000,000	5	3,825,000,000	5	4,960,000,000	5.00	4,960,000,000	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	34.8	Persentase	35		37		39.00		42		45		45.00		Dinas Tenaga Kerja
1201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari kerja yang di tempatkan	4387	Orang	5	1,324,000,000	6.5	2,170,000,000	7.80	2,525,000,000	9	2,680,000,000	10	2,735,000,000	38.30	2,735,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1201.17	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Besaran kasus yang di selesaikan melalui perjanjian bersama (PB)	23.68	Persentase	24	2,246,735,000	24.5	2,450,000,000	25.00	2,620,000,000	25.5	2,830,000,000	26	3,062,000,000	26.00	3,062,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2007.15	Program Pengembangan Industri	Prosentase Pelaku Industri Kecil dan Menengah yang wajib standardisasi	12.34	Persentase	0	596,535,500	12.34	950,000,000	24.68	800,000,000	37.02	800,000,000	49.36	800,000,000	49.36	800,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2008.15	Program Transmigrasi Regional	Jumlah calon trasnmigran yang terseleksi	5	KK	10	150,000,000	10	200,000,000	10.00	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	50.00	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja
3.1.2	Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.32	Prosentase	5.5		5.6		5.7		5.8		5.9		5.9		
1203.15	Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Cadangan Pangan	87.3	Persen	87.50	2,925,000,000	88.00	2,350,000,000	89.00	2,550,000,000	90.00	3,100,000,000	91.00	3,150,000,000	91.00	3,150,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1211.15	Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Prosentase pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas usaha (HKI + PIRT dan Halal)	14.78	Persentase	25.28	2,026,627,000	25.8	1,215,060,000	38.70	1,428,735,000	51.6	1,638,735,000	64.5	1,848,735,000	64.50	1,848,735,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Prosentase Pelaku Usaha Mikro Yang mengikuti Pelatihan (Kewirausahaan dan Pemasaran On Line)	10.5	Persentase	19.3		38.6		57.90		77.2		96.5		96.50		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Persentase Produk Lolos Kurasi (Pemilihan Produk)	4.56	Persentase	12.5		25		37.50		50		62.5		62.50		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.16	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro yang Menjalin Kemitraan	12.89	Persentase	10	1,132,047,500	20	1,478,900,000	30.00	1,334,400,000	40	1,584,400,000	50	1,834,400,000	50.00	1,834,400,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Usaha Mikro yang Memilki Pangsa Pasar Keluar Daerah	5.85	Persenta se	5.25		10.5		15.75		21		26		26.00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	22.23	Persenta se	13.3	1,370,473,000	26.6	1,406,834,000	39.90	1,706,834,000	53.2	2,006,834,000	66.5	2,306,834,000	66.50	2,306,834,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Prosentase Koperasi Berkualitas	22.23	Persenta se	20		40		60.00		80		100		100.00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Persentase Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	18	Persenta se	20		40		60.00		80		100		100.00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.18	Program Fasilitasi Pembiayaan Koperasi Dan UMK	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	62.8	Persenta se	16.75	5,597,799,259	16.75	5,684,073,472	16.75	5,784,300,396	16.75	6,031,995,415	16.75	6,293,275,186	83.75	6,293,275,186	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1212.15	Program Perencanaan, Pengembanga n Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor (PMDN dan PMA) baru	1159	Investor	1.275	620,000,000	1.402	900,000,000	1.54	700,000,000	1.697	650,000,000	1.867	850,000,000	1.87	850,000,000	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1212.16	Program pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	Skor kepatuhan investor yang melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM)	95	Nilai	95	348,000,000	96	460,000,000	96.00	460,000,000	97	460,000,000	98	510,000,000	98.00	510,000,000	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2001.15	Program Peningkatan Sumberdaya Lingkungan Perikanan	Persentase Peningkatan Sumberdaya Lingkungan Perikanan	0	Persenta se	100	774,770,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Perikanan
2001.16	Program Pengembanga n Kawasan Budidaya	Persentase Pengembanga n Kawasan Budidaya	0	Persenta se	20	396,000,000	25	-	50.00	-	75	-	100	-	100.00		Dinas Perikanan
2001.17	Program Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau	Laju Produksi Benih Ikan di BBI	4.5	Persenta se	5	800,000,000	10	800,000,000	10.00	800,000,000	10	800,000,000	10	800,000,000	10.00	800,000,000	Dinas Perikanan
2001.18	Program Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan	PENINGKATA N HARGA IKAN DI TPI	8.6	Persenta se	1.4	600,000,000	1.5	600,000,000	1.70	600,000,000	1.8	600,000,000	2	650,000,000	2.00	650,000,000	Dinas Perikanan
2001.19	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	33.27	Kg/Kapit a/ Th	34.6	1,100,000,000	35.99	1,510,000,000	37.41	1,460,000,000	38.4	3,310,000,000	40.45	1,310,000,000	40.45	1,310,000,000	Dinas Perikanan
2001.20	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Persentase Pembudidaya yang lulus CPIB/CBIB (cara pembenihan/ budidaya ikan yang baik)	60	Persenta se	80	1,209,230,000	0	-	-	-	0	-	0	-	-		Dinas Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2001.21	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan	Laju Produksi Perikanan Tangkap	0.5	Persentase	0.5	1,600,000,000	0.5	1,800,000,000	0.50	1,850,000,000	0.5	1,900,000,000	0.5	1,950,000,000	0.50	1,950,000,000	Dinas Perikanan
2001.22	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya	Produktivitas Perikanan Budidaya	4.2	Ton/HA	0	-	4.6	4,300,000,000	4.90	5,300,000,000	5.1	5,300,000,000	5.4	4,350,000,000	5.40	4,350,000,000	Dinas Perikanan
2002.15	Program pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata	Presentase Jumlah kunjungan wisatawan	78	Persentase	82	1,112,300,000	84	2,250,000,000	86.00	2,350,000,000	88	1,800,000,000	88	2,400,000,000	88.00	2,400,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2003.15	Program pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase Peningkatan Jumlah Petani Mandiri	0.97	Persentase	1.00	2,700,000,000	1.00	2,822,200,000	1.00	2,600,000,000	1.00	2,900,000,000	1.00	2,700,000,000	5.00	2,700,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Tenaga Penyuluh yang mengikuti pelatihan	0	Persentase	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.16	Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase Kenaikan Produksi Hasil Pertanian	2	Persentase	1.00	8,771,000,000	1.00	9,950,000,000	1.00	8,950,000,000	1.00	10,950,000,000	1.00	8,950,000,000	1.00	8,950,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.17	Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi peternakan	Persentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan	1.5	Persenta	1.50	1,060,000,000	1.50	1,850,000,000	1.50	1,850,000,000	1.50	2,050,000,000	1.50	2,050,000,000	1.50	2,050,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				se													
2003.18	Program peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Prosentase Jumlah Sampel yang memenuhi SNI	25	Persentase	5.00	940,000,000	5.00	2,900,000,000	5.00	2,900,000,000	5.00	2,900,000,000	5.00	2,900,000,000	50.00	2,900,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase jumlah hewan sakit yang recovery	30	Persentase	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		55.00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2005.15	Program Pengendalian dan Pengawasan Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi	Prosentase pelaku industri yang diawasi	20	Persentase	20	772,185,500	20	-	20.00	-	20	-	20	-	20.00		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program perlindungan konsumen dan tertib niaga	Prosentase UTTP yang sudah ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji	20	Persentase	20	1,792,841,316	20	-	20.00	-	20	-	20	-	20.00		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2006.16	Program Perdagangan Dalam Negeri, Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor	Prosentase Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor, serta Perdagangan Dalam Negeri	5.65	Persentase	5.65	1,961,935,000	0	-	-	-	0	-	0	-	5.65		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Prosentase Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor, serta															Dinas Perindustri

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Perdagangan Dalam Negeri	12.5	Persentase	12.5		0		-		0		0		12.50		an dan Perdagang a n
2006.17	Program Perlindungan Konsumen	Prosentase UTTP yang sudah ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji	100	Persentase	20	-	40	701,500,000	60.00	701,500,000	80	701,500,000	100	701,500,000	100.00	701,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagang a n
2006.18	Program Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Prosentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memenuhi standar Tertib Niaga	33.81	Persentase	0	-	33.81	2,329,810,000	50.71	1,897,810,000	67.62	1,897,810,000	85.02	1,897,810,000	85.02	1,897,810,000	Dinas Perindustrian dan Perdagang a n
		Prosentase Pelaku IKM yang berpeluang ekspor	45.54	Persentase	0		45.54		58.69		71.83		84.98		84.98		Dinas Perindustrian dan Perdagang a n
2006.19	Program Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan	Prosentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi	20	Persentase	20	-	40	475,137,500	60.00	475,137,500	80	475,137,500	100	475,137,500	100.00	475,137,500	Dinas Perindustrian dan Perdagang a n
2007.16	Program Pengendalian dan Pengawasan Perindustrian	Prosentase pelaku industri yang diawasi	20	Persentase	20	-	40	149,808,000	60.00	149,808,000	80	149,808,000	100	149,808,000	100.00	149,808,000	Dinas Perindustrian dan Perdagang a n
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional,transparan dan akuntabel																
4.1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	53	Indeks	63		70		75		80		85		85		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1.1	Meningkatny a Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Hasil Reviu Kemenpan RB	61.87	Nilai	65		71		73		77		81		81		
1101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persent ase	100.00	3,145,000,000	100. 00	2,368,974,00 0	100.00	3,308,000,00 0	100.00	3,388,000,00 0	100.00	3,468,000,000	100.00	3,468,000,00 0	Dinas Pendidik an
1101.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persent ase	100.00	1,968,000,000	100. 00	2,030,976,80 0	100.00	3,162,000,00 0	100.00	3,182,000,00 0	100.00	3,202,000,000	100.00	3,202,000,00 0	Dinas Pendidik an
1101.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persent ase	100.00	167,000,000	100. 00	97,500,000	100.00	175,000,000	100.00	175,000,000	100.00	175,000,000	100.00	175,000,000	Dinas Pendidik an
1101.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persent ase	100.00	135,100,000	100. 00	96,050,000	100.00	138,000,000	100.00	140,000,000	100.00	141,000,000	100.00	141,000,000	Dinas Pendidik an
1101.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persent ase	100.00	672,708,000	100. 00	429,817,800	100.00	749,726,888	100.00	771,800,000	100.00	794,695,000	100.00	794,695,000	Dinas Pendidik an
1102.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS I PERKANTORA N	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	100	Persent ase	100	62,373,612	100	19,724,843,8 86	100	21,297,850,5 53	100	83,683,004,1 41	100	6,526,322,488, 664	100.00	6,526,322,48 8,664	Dinas Kesehat an

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		perkantoran															
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	7,157,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	7,157,440,000	RSUD Kab Tangerang
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	7,920,486,550	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	7,920,486,550	Rumah Sakit Umum Balaraja
1102.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	40,774,108	100	4,099,168,523	100	4,361,319,977	100	11,114,702,406	100	698,004,409,311	100.00	698,004,409,311	Dinas Kesehatan
		Prosentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor Prosentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100	Persentase	100	2,323,323,125	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	2,323,323,125	RSUD Kab Tangerang
1102.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase implementasi SOP	100	Persentase	100	30,763,123	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	30,763,123	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1102.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	139,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	139,500	Dinas Kesehatan
1102.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	3,309,515	100	142,702,750	100	149,837,888	100	157,329,782	100	165,196,271	100.00	165,196,271	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	8,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	8,250,000	RSUD Kab Tangerang
1102.07	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	1,190,430	100	184,053,797	100	193,256,487	100	202,919,311	100	213,065,277	100.00	213,065,277	Dinas Kesehatan
1102.07	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	58,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	58,100,000	RSUD Kab Tangerang
1102.07	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	154,287,500	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	154,287,500	Rumah Sakit Umum Balaraja

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1102.09	Program peningkatan pelayanan Umum	Terpenuhinya kegiatan peningkatan pelayanan di RSU Kabupaten Tangerang Tahun 2019	100	Persentase	100.00	252,803,450,754	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	252,803,450,754	RSUD Kab Tangerang
1103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	3,033,828,180	100	2,563,000,000	100.00	2,681,075,000	100	2,813,131,250	100	2,955,096,812	100.00	2,955,096,812	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100	1,634,232,500	100	2,045,394,000	100.00	2,125,778,000	100	2,149,149,000	100	2,222,794,000	100.00	2,222,794,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0	Persentase	60	2,386,414,110	70	2,633,500,000	80.00	2,634,000,000	90	2,767,000,000	95	2,903,000,000	95.00	2,903,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Tata Ruang dan Bangunan	100	Persentase	100	1,133,760,000	100	1,492,948,000	100.00	1,572,595,000	100	1,655,727,000	100	1,742,512,000	100.00	1,742,512,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100	125,500,000	100	50,000,000	100.00	70,000,000	100	75,000,000	100	80,000,000	100.00	80,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur	100	Persenta se	100	99,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	Persenta se	25	359,000,000	35	402,000,000	45.00	422,000,000	65	443,000,000	80	465,000,000	80.00	465,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	0	Persenta se	100	60,100,000	100	62,000,000	100.00	65,000,000	100	68,000,000	100	71,000,000	100.00	71,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan	100	Persenta se	100	136,450,000	100	97,425,000	100.00	107,167,500	100	117,885,000	100	129,673,000	100.00	129,673,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD	100	Persenta se	100	217,530,000	100	231,000,000	100.00	242,000,000	100	256,000,000	100	268,000,000	100.00	268,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100	Persenta se	100	253,625,000	100	340,828,000	100.00	416,294,000	100	394,244,000	100	474,924,000	100.00	474,924,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1104.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	4,905,878,000	100		100.00		100		100		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	1,404,318,200	100	1,490,914,110	100.00	1,565,939,816	100	1,605,249,294	100	1,645,616,307	100.00	1,645,616,307	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	2,919,974,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	892,410,000	100	914,720,250	100.00	937,588,257	100	961,027,963	100	985,053,662	100.00	985,053,662	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur	100	Persentase		150,000,000		-	-	-	-	-	-	-			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur	0	Persentase	100	270,000,000	0	-	-	1,700,000,000	0	-	0	-	100.00		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1104.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	Persentase	0	-	100	250,000,000	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	26,090,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
		Prosentase Pemenuhan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	168,885,000	100	149,582,125	100.00	151,321,679	100	153,104,720	100	154,932,338	100.00	154,932,338	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	89,122,500	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100	Persentase	100	223,237,500	100	173,991,188	100.00	238,340,968	100	180,922,015	100	184,834,628	100.00	184,834,628	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persenta	100	-	100	7,413,600,000	100.00	7,944,700,000	100	7,949,700,000	100	8,009,700,000	100.00	8,009,700,000	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				se													
			100	Persentase	100	8,318,100,000	100	8,481,000,000	100.00	8,580,000,000	100	8,595,000,000	100	8,675,000,000	100.00	8,675,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
			100	Persentase	100	546,600,000	100	600,000,000	100.00	771,360,000	100	741,360,000	100	773,360,000	100.00	773,360,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	-	100	3,225,250,000	100.00	3,330,250,000	100	3,430,250,000	100	3,530,250,000	100.00	3,530,250,000	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
			100	Persentase	100	1,980,000,000	100	2,245,000,000	100.00	2,295,000,000	100	2,170,000,000	100	2,395,000,000	100.00	2,395,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
			100	Persentase	100	408,000,000	100	361,000,000	100.00	797,000,000	100	617,000,000	1	807,000,000	100.00	807,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100	Persentase	100	600,000,000	100	850,000,000	-	-	-	-	-	-	100.00		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			100	Persentase	100	56,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	-	100	-	100.00	200,000,000	100	-	100	-	100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			100	Persentase	100	50,000,000	100	250,000,000	100.00	50,000,000	100	250,000,000	100	50,000,000	100.00	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
			0	Persentase	0	-	100	100,000,000	100.00	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100.00	100,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	-	100	26,970,000	100.00	35,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100.00	45,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			100	Persentase	100	45,000,000	100	45,000,000	100.00	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100.00	45,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			100	Persentase	100	56,000,000	100	60,000,000	100.00	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100.00	60,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD	100	Persentase	100	-	100	88,750,000	100.00	95,000,000	100	95,000,000	100	95,000,000	100.00	95,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			100	Persentase	100	87,000,000	100	112,000,000	100.00	95,000,000	100	95,000,000	100	120,000,000	100.00	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
			100	Persentase	100	211,000,000	100	189,000,000	100.00	254,800,000	100	263,800,000	100	298,800,000	100.00	298,800,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	19.70	1,098,922,000	19.90	1,151,700,000	20.00	1,206,645,000	20.40	1,265,060,000	20.00	1,318,240,000	100.00	1,318,240,000	Dinas Sosial
1106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	18.40	181,000,000	18.40	252,250,000	20.70	265,590,000	20.70	278,652,000	21.80	289,100,000	100.00	289,100,000	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1106.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	Persentase	100.00	160,000,000	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	-	100.00		Dinas Sosial
1106.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	20.00	-	20.00	105,000,000	20.00	110,250,000	20.00	115,000,000	20.00	120,000,000	100.00	120,000,000	Dinas Sosial
1106.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100	Persentase	20.00	27,060,000	20.00	28,413,000	20.00	29,850,000	20.00	31,200,000	20.00	32,750,000	100.00	32,750,000	Dinas Sosial
1106.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase Pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	19.60	236,190,000	19.60	195,402,000	19.60	205,095,000	19.60	215,445,000	21.60	256,145,000	100.00	256,145,000	Dinas Sosial
1201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	2,015,601,000	100	2,176,000,000	100.00	2,390,000,000	100	2,585,000,000	100	2,785,000,000	100.00	2,785,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan sarana aparatur	100	Persentase	100	1,104,314,000	100	1,330,000,000	100.00	1,410,000,000	100	1,630,000,000	100	1,605,000,000	100.00	1,605,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1201.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase implementasi SOP	100	Persentase	100	51,750,000	100	-	100.00	80,000,000	100	-	100	110,000,000	100.00	110,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1201.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	Persenta se	0	-	100	104,000,000	100.00	104,000,000	100	124,000,000	100	104,000,000	100.00	104,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1201.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persenta se	100	42,836,000	100	45,000,000	100.00	48,400,000	100	51,500,000	100	55,000,000	100.00	55,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1201.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD	100	Persenta se	100	61,440,000	100	68,040,000	100.00	74,040,000	100	82,000,000	100	169,040,000	100.00	169,040,000	Dinas Tenaga Kerja
1202.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persenta se	100	809,584,302	100	1,120,740,000	100.00	1,107,000,000	100	1,115,000,000	100	1,123,000,000	100.00	1,123,000,000	Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak
1202.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persenta se	100	470,015,698	100	442,000,000	100.00	483,000,000	100	484,000,000	100	484,000,000	100.00	484,000,000	Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak
1202.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementas i SOP	100	Persenta se	100	50,000,000	100	50,000,000	-	-	-	-	-	-	100.00		Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1202.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persenta se	100	40,000,000	100	45,000,000	100.00	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak
1202.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD	100	Persenta se	100	154,400,000	100	145,000,000	100.00	165,000,000	100	170,000,000	100	170,000,000	100.00	170,000,000	Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak
1205.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persenta se	80	1,406,623,500	82	1,580,000,000	85.00	1,580,000,000	87	1,580,000,000	89	1,580,000,000	89.00	1,580,000,000	Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan
1205.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor Prosentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor	100	Persenta se	100	5,994,745,500	100	6,555,000,000	100.00	6,555,000,000	100	6,555,000,000	100	6,555,000,000	100.00	6,555,000,000	Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan
1205.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persenta se	101	250,000,000	0	-	-	-							Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1205.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	100	Persenta se	100	32,200,000	100	43,000,000	100.00	43,000,000	100	43,000,000	100	43,000,000	100.00	43,000,000	Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan
1205.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persenta se	100	532,455,000	100	488,000,000	100.00	488,000,000	100	488,000,000	100	488,000,000	100.00	488,000,000	Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan
1206.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persenta se	20	1,236,800,000	40	1,337,000,000	60.00	1,414,800,000	80	1,456,500,000	100	1,475,500,000	100.00	1,475,500,000	Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil
1206.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persenta se	20	803,300,000	40	779,000,000	60.00	945,000,000	80	1,005,000,000	100	1,045,000,000	100.00	1,045,000,000	Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil
1206.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementas i SOP	100	Persenta se	20	181,850,000	0	-	-	-	0	-	0	-	20.00		Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil
1206.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persenta se	100	50,000,000	100	30,000,000	100.00	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100.00	50,000,000	Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1206.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persenta se	100	35,450,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100.00	50,000,000	Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil
1206.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD	100	Persenta se	100	92,070,000	100	97,000,000	100.00	105,000,000	100	115,000,000	100	165,000,000	100.00	165,000,000	Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil
1207.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persenta se	100	1,127,343,000	100	1,132,000,000	100.00	1,132,000,000	100	1,132,000,000	100	1,132,000,000	100.00	1,132,000,000	Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta h an Desa
1207.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persenta se	100	767,157,000	100	836,700,000	100.00	836,000,000	100	836,700,000	100	836,700,000	100.00	836,700,000	Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta h an Desa
1207.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementas i SOP	100	Persenta se	100	22,000,000	100	-	100.00	-	100	-	100	-	100.00		Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta h an Desa
1207.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persenta se	100	67,000,000	100	100,000,000	100.00	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100.00	100,000,000	Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	h an Desa
1207.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya Peningkatan Kompentensi Aparatur	100	Persenta se	100	22,350,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0			Kecamatan Sindang Jaya
1207.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persenta se	100	31,000,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta h an Desa
1207.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD	100	Persenta se	100	105,500,000	100	200,000,000	100.00	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100.00	200,000,000	Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta h an Desa
1208.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80	Persenta se	80	2,091,331,000	80	1,407,509,400	80.00	1,548,258,400	80	1,703,082,000	80	1,873,390,000	80.00	1,873,390,000	Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1208.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80	Persentase	80	391,650,000	80	1,445,132,700	80.00	1,589,644,300	80	1,748,609,400	80	1,923,469,000	80.00	1,923,469,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase implementasi SOP	80	Persentase	80	190,330,000	80	88,000,000	80.00	132,000,000	80	198,000,000	80	217,800,000	80.00	217,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	80	Persentase	80	88,000,000	80	96,800,000	80.00	106,480,000	80	117,128,000	80	128,840,800	80.00	128,840,800	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	80	Persentase	80	82,525,000	80	90,777,500	80.00	99,854,500	80	109,840,000	80	120,824,000	80.00	120,824,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	80	Persentase	80	209,175,000	80	230,092,500	80.00	253,100,400	80	278,411,000	80	350,250,000	80.00	350,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	Berencana
1209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	12,501,080,000	100	12,687,600,000	100.00	12,737,600,000	100	12,787,600,000	100	12,837,600,000	100.00	12,837,600,000	Dinas Perhubungan
1209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	4,100,960,000	100	4,711,920,000	100.00	4,926,920,000	100	5,146,920,000	100	5,456,920,000	100.00	5,456,920,000	Dinas Perhubungan
1209.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase pemenuhan aparatur yang terfasilitasi dalam penerapan disiplin	100	Persentase	100	518,000,000	100	760,000,000	100.00	765,000,000	100	780,000,000	100	790,000,000	100.00	790,000,000	Dinas Perhubungan
1209.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase Pemenuhaan kapasitas sumber daya aparatur	20	Persentase	20	700,000,000	20	750,000,000	20.00	775,000,000	20	800,000,000	20	825,000,000	100.00	825,000,000	Dinas Perhubungan
1209.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase ketersedian dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	54,000,000	100	54,000,000	100.00	54,000,000	100	54,000,000	100	54,000,000	100.00	54,000,000	Dinas Perhubungan
1209.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	395,000,000	100	395,000,000	100.00	395,000,000	100	395,000,000	100	445,000,000	100.00	445,000,000	Dinas Perhubungan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	1,387,650,000	100	1,562,000,000	100.00	1,630,000,000	100	1,769,000,000	100	1,957,000,000	100.00	1,957,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	1,021,050,000	100	1,239,000,000	100.00	1,254,000,000	100	1,270,000,000	100	1,385,000,000	100.00	1,385,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan disiplin aparatur	100	Persentase	100	61,930,000	100	175,000,000	100.00	175,000,000	100	175,000,000	100	175,000,000	100.00	175,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	Persentase	0	-	100	60,000,000	100.00	80,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100.00	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	36,000,000	100	38,000,000	100.00	38,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1210.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase kesesuaian sasaran/program dalam RENJA OPD terhadap RKPD dan RENSTRA OPD terhadap RPJMD	100	Persentase	100	104,150,000	100	115,000,000	100.00	122,500,000	100	125,000,000	100	132,000,000	100.00	132,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1211.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	75	1,455,947,720	80	1,467,500,000	85.00	1,520,200,000	90	1,534,900,000	99	1,557,500,000	100.00	1,557,500,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	75	954,222,900	80	1,069,600,000	85.00	1,130,200,000	90	1,194,800,000	99	1,275,400,000	100.00	1,275,400,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Implementasi SOP	100	Persentase	75	51,750,000	80	-	85.00	-	90	-	99	-	100.00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0			91,695,000		108,000,000		117,000,000		127,000,000		139,000,000		139,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1211.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persen tase	75	23,427,000	80	26,000,000	85.00	28,500,000	90	32,000,000	99	35,500,000	100.00	35,500,000	Dinas Koperas i dan Usaha Mikro
1211.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD	100	Persenta se	75	364,647,500	80	373,500,000	85.00	382,000,000	90	404,000,000	99	435,000,000	100.00	435,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1213.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persenta se	100	798,866,480	100	805,250,000	100.00	805,250,000	100	805,250,000	100	805,250,000	100.00	805,250,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata
1213.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persenta se	100	495,400,000	100	575,000,000	100.00	580,000,000	100	605,000,000	100	640,000,000	100.00	640,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1213.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persenta se	100	58,989,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata
1213.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100	Persenta se	100	150,875,000	100	89,000,000	100.00	89,000,000	100	139,000,000	100	109,000,000	100.00	109,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata
1217.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persenta se	100	1,208,570,000	100	2,474,000,000	100.00	2,549,000,000	100	2,599,000,000	100	2,584,000,000	100.00	2,584,000,000	Dinas Perpustaka an dan Arsip
1217.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persenta se	100	1,029,820,000	100	1,905,000,000	100.00	2,055,000,000	100	2,205,000,000	100	2,305,000,000	100.00	2,305,000,000	Dinas Perpustaka an dan Arsip
1217.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementas i SOP	100	Persenta se	100	26,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Perpustaka an dan Arsip

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1217.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	-	100	800,000,000	100.00	700,000,000	100	700,000,000	100	700,000,000	100.00	700,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1217.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	33,300,000	100	35,000,000	100.00	40,000,000	100	50,000,000	100	55,000,000	100.00	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1217.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD	100	Persentase	100	73,660,000	100	100,000,000	100.00	110,000,000	100	125,000,000	100	140,000,000	100.00	140,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2001.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	993,168,000	100	1,140,960,000	100.00	1,195,950,000	100	1,255,925,000	100	1,316,775,000	100.00	1,316,775,000	Dinas Perikanan
2001.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	619,482,000	100	898,037,100	100.00	833,000,000	100	810,850,000	100	794,750,000	100.00	794,750,000	Dinas Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2001.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan kedisplinan aparatur	100	Persentase	100	24,000,000	100	110,000,000	-	-	-	-	-	-	100.00		Dinas Perikanan
2001.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	59,310,000	100	65,000,000	100.00	71,500,000	100	75,075,000	100	79,100,000	100.00	79,100,000	Dinas Perikanan
2001.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	166,240,000	100	183,350,000	100.00	187,350,000	100	194,050,000	100	199,625,000	100.00	199,625,000	Dinas Perikanan
2003.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	1,961,900,000	100.00	1,933,500,000	100.00	2,054,500,000	100.00	2,054,500,000	100.00	2,129,500,000	100.00	2,129,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	1,281,000,000	100.00	1,336,500,000	100.00	2,290,000,000	100.00	2,315,000,000	100.00	2,315,000,000	100.00	2,315,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100.00	360,000,000	100.00	150,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2003.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Koordinasi dan Kompetensi Aparatur	100	Persentase	100.00	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	20,000,000	100.00	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	15,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	177,350,000	100.00	168,000,000	100.00	175,000,000	100.00	175,000,000	100.00	180,000,000	100.00	180,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2007.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	0	1,946,587,894	0	2,059,383,894	-	2,046,587,894	0	2,009,383,894	0	2,096,587,894	100.00	2,096,587,894	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2007.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	0	359,705,000	0	638,895,000	-	573,895,000	0	374,295,000	0	573,895,000	100.00	573,895,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2007.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	0	64,190,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2007.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	prosentase pembinaan pegawai	100	Persenta se	0	-	0	150,000,000	-	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	100.00	150,000,000	Dinas Perindustri an dan Perdagang a n
2007.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persenta se	0	44,585,000	0	44,585,000	-	44,585,000	0	44,585,000	0	44,585,000	100.00	44,585,000	Dinas Perindustri an dan Perdagang a n
2007.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persenta se	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Perindustri an dan Perdagang a n
3001.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Permasalahan Bidang Perekonomian Pembanguna n yang diselesaikan	100	Persenta se	100	48,602,571,100	100	52,637,000,000	100.00	57,809,500,000	100	63,360,450,000	100	69,246,495,000	100.00	69,246,495,000	Sekretariat Daerah
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	91	Persenta se	91	10,832,570,000	92	11,253,843,500	93.00	11,316,366,900	94	11,489,943,250	94	11,778,233,615	94.00	11,778,233,615	Sekretariat DPRD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	2,280,000,000	100	2,600,000,000	100.00	2,675,000,000	100	2,675,000,000	100	2,675,000,000	100.00	2,675,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	60.11	Persentase	70	1,153,993,954	73	1,168,493,954	75.00	1,168,493,954	77	1,168,493,954	80	1,168,493,954	80.00	1,168,493,954	Kecamatan Tigaraksa
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	1,194,746,449	100	922,855,000	100.00	1,196,200,000	100	1,203,120,000	100	1,193,120,000	100.00	1,193,120,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	Persentase	60.00	896,507,739	70.00	927,287,739	80.00	938,987,739	90.00	938,987,739	100.00	938,987,739	100.00	938,987,739	Kecamatan Panongan
		Prosentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	Persentase	60	852,309,000	70	1,169,980,000	80.00	1,169,980,000	90	1,169,980,000	100	1,169,980,000	100.00	1,169,980,000	Kecamatan Curug

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	0	Persentase	22.70	874,740,000	25.27	974,000,000	26.02	1,003,000,000	26.02	1,003,000,000	26.02	1,003,000,000	26.02	1,003,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	857,526,000	100.00	942,136,000	100.00	943,304,970	100.00	981,770,219	100.00	1,022,158,820	100.00	1,022,158,820	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	Persentase	100.00	661,867,071	100.00	786,386,000	100.00	786,386,000	100.00	786,386,000	100.00	786,386,000	100.00	786,386,000	Kecamatan Balaraja
		presentase pemenuhan pelayanaan administrasi perkantoran	90	Persentase	100.00	879,943,400	100.00	756,863,992	100.00	797,863,992	100.00	839,863,992	100.00	878,863,992	100.00	878,863,992	Kecamatan Kresek
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	551,262,200	100.00	494,261,200	100.00	550,462,200	100.00	550,462,200	100.00	550,462,200	100.00	550,462,200	Kecamatan Kronjo
		Prosentase peningkatan sumber daya penunjang pelayanan administrasi kantor	94.52	Persentase	100.00	308,743,428	100.00	10,830,650,000	100.00	893,250,000	100.00	991,150,000	100.00	1,067,450,000	100.00	1,067,450,000	Kecamatan Mauk

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	766,565,000	100.00	685,000,000	100.00	849,000,000	100.00	959,000,000	100.00	992,000,000	100.00	992,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	701,499,000	100.00	654,701,250	100.00	737,050,000	100.00	814,300,000	100.00	814,000,000	100.00	814,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	937,735,105	100.00	870,000,000	100.00	877,000,000	100.00	879,000,000	100.00	881,000,000	100.00	881,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	484,200,000	100.00	666,800,000	100.00	791,000,000	100.00	822,000,000	100.00	827,000,000	100.00	827,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	Persentase	70.00	1,120,041,000	75.00	1,268,255,000	80.00	1,395,500,000	85.00	1,442,500,000	90.00	1,521,500,000	90.00	1,521,500,000	Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	Persentase	100.00	680,080,000	100.00	822,800,000	100.00	889,600,000	100.00	906,200,000	100.00	913,100,000	100.00	913,100,000	Kecamatan Kosambi

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	831,299,476	100.00	897,100,000	100.00	1,031,665,000	100.00	1,186,414,750	100.00	1,364,376,963	100.00	1,364,376,963	Kecamatan Pagedangan
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	539,960,000	100.00	542,800,000	100.00	605,800,000	100.00	615,800,000	100.00	625,800,000	100.00	625,800,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	600,958,211	100.00	1,344,791,000	100.00	1,351,591,000	100.00	1,351,591,000	100.00	1,351,591,000	100.00	1,351,591,000	Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	Persentase	70.00	741,776,622	71.00	664,900,000	72.00	1,031,020,875	73.00	1,136,443,967	74.00	1,247,095,593	74.00	1,247,095,593	Kecamatan Kemiri
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	Persentase	100.00	803,539,538	100.00	924,980,000	100.00	1,018,980,000	100.00	1,018,980,000	100.00	1,028,980,000	100.00	1,028,980,000	Kecamatan Sukadiri
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	Persentase	90.00	576,160,000	92.50	625,400,000	92.50	625,400,000	95.00	625,400,000	95.00	647,000,000	95.00	647,000,000	Kecamatan Cisauk

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	Persentase	100.00	672,156,000	100.00	767,550,600	100.00	837,000,000	100.00	922,000,000	100.00	1,047,000,000	100.00	1,047,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	695,015,080	100.00	874,817,000	100.00	1,096,839,350	100.00	1,134,516,318	100.00	1,174,102,133	100.00	1,174,102,133	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	1,164,070,000	100.00	1,081,438,000	100.00	1,099,166,000	100.00	1,056,354,100	100.00	944,542,401	100.00	944,542,401	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	Persentase	100.00	770,455,000	100.00	1,207,745,800	100.00	1,071,513,294	100.00	1,174,949,605	0.00	1,271,269,309	100.00	1,271,269,309	Kecamatan Solear
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	512,397,000	100.00	666,326,000	100.00	876,000,000	100.00	954,000,000	100.00	947,000,000	100.00	947,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	20	Persentase	20.00	757,853,581	20.00	765,853,581	20.00	765,853,581	20.00	765,853,581	20.00	765,853,581	100.00	765,853,581	Kecamatan Sukamulya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95	Persentase	100.00	583,703,000	100.00	577,500,000	100.00	577,500,000	100.00	577,500,000	100.00	577,500,000	100.00	577,500,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100	Persentase	100	16,775,000,000	100	13,086,500,000	100.00	20,297,750,000	100	22,327,525,000	100	24,560,277,500	100.00	24,560,277,500	Sekretariat Daerah
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	91	Persentase	91	2,965,328,000	92	2,938,010,000	93.00	2,958,650,000	93	3,088,400,000	94	3,166,370,500	94.00	3,166,370,500	Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	1,365,000,000	100	1,835,000,000	100.00	1,535,000,000	100	1,585,000,000	100	1,535,000,000	100.00	1,535,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65	Persentase	70	644,720,000	72	644,720,000	74.00	644,720,000	76	644,720,000	78	644,720,000	80.00	644,720,000	Kecamatan Tigaraksa

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	650,632,000	100	1,010,800,000	100.00	700,000,000	100	755,000,000	100	755,000,000	100.00	755,000,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	80	Persentase	80.00	259,553,000	85.00	394,313,000	85.00	319,313,000	90.00	394,313,000	90.00	319,313,000	90.00	319,313,000	Kecamatan Panongan
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	80	Persentase	80	458,270,000	85	908,270,000	85.00	833,270,000	90	908,270,000	90	833,270,000	90.00	833,270,000	Kecamatan Curug
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	Persentase	80	522,754,000	80	663,368,000	80	725,000,000	80	775,000,000	80	775,000,000	80	775,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80	Persentase	80.00	1,068,365,000	85.00	1,387,445,000	90.00	1,342,268,163	95.00	1,351,881,571	100.00	1,474,475,649	100.00	1,474,475,649	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	81.25	Persentase	87.50	354,800,000	94.00	729,300,000	94.00	729,300,000	94.00	729,300,000	94.00	729,300,000	94.00	729,300,000	Kecamatan Balaraja

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		presentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	81.25	Persentase	87.50	362,150,000	94.00	560,000,000	94.00	580,000,000	94.00	600,000,000	94.00	620,000,000	94.00	620,000,000	Kecamatan Kresek
		Prosentase Pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	100.00	616,522,568	100.00	591,312,568	100.00	616,522,568	100.00	616,522,568	100.00	616,522,568	100.00	616,522,568	Kecamatan Kronjo
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja	73	Persentase	100.00	115,000,000	100.00	668,000,000	100.00	735,400,000	100.00	737,000,000	100.00	791,000,000	100.00	791,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	440,334,944	100.00	539,000,000	100.00	865,000,000	100.00	667,500,000	100.00	920,000,000	100.00	920,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	352,905,000	100.00	1,148,260,000	100.00	805,000,000	100.00	821,000,000	100.00	682,000,000	100.00	682,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran	75	Persentase	80.00	550,187,900	85.00	930,000,000	90.00	1,090,000,000	95.00	770,000,000	100.00	810,000,000	100.00	810,000,000	Kecamatan Teluknaga

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	687,421,959	100.00	345,000,000	100.00	1,010,000,000	100.00	1,045,000,000	100.00	1,080,000,000	100.00	1,080,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0	Persentase	70.00	315,642,000	75.00	498,000,000	80.00	530,000,000	85.00	555,000,000	90.00	583,000,000	90.00	583,000,000	Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.25	Persentase	87.50	584,818,098	94.00	488,550,000	94.00	597,669,700	94.00	614,436,670	94.00	631,203,640	94.00	631,203,640	Kecamatan Kosambi
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	100.00	117,850,000	100.00	182,210,000	100.00	209,541,500	100.00	240,972,725	100.00	327,122,634	100.00	327,122,634	Kecamatan Pagedangan
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	80	Persentase	80.00	615,953,694	85.00	794,700,000	90.00	718,380,000	95.00	733,330,000	100.00	748,280,000	100.00	748,280,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	495,228,210	100.00	1,162,580,000	100.00	1,692,900,000	100.00	1,681,900,000	100.00	1,458,900,000	100.00	1,458,900,000	Kecamatan Jayanti

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	65	Persentase	70.00	384,155,000	71.00	456,350,000	80.00	705,000,000	85.00	895,000,000	90.00	1,585,000,000	90.00	1,585,000,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	81.25	Persentase	87.50	238,020,000	94.00	317,900,000	94.00	455,000,000	94.00	455,000,000	94.00	465,000,000	94.00	465,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85	Persentase	85.00	929,600,000	87.50	968,600,000	87.50	968,600,000	90.00	968,600,000	90.00	968,600,000	90.00	968,600,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	1,610,000,000	100.00	1,910,000,000	100.00	1,745,000,000	100.00	1,910,000,000	100.00	1,930,000,000	100.00	1,930,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0	Persentase	80.00	496,907,413	85.00	519,850,000	90.00	552,000,000	95.00	569,600,000	100.00	588,079,950	100.00	588,079,950	Kecamatan Sindang Jaya
		Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80	Persentase	80.00	1,720,056,000	85.00	1,415,371,160	90.00	1,425,549,416	95.00	1,435,751,199	100.00	1,445,676,949	100.00	1,445,676,949	Kecamatan Kelapa Dua

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	81	Persentase	87.50	684,920,000	94.00	2,313,644,000	94.00	1,854,178,000	94.00	1,906,554,700	0.00	1,962,287,905	94.00	1,962,287,905	Kecamatan Solear
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80	Persentase	85.00	422,776,000	100.00	476,328,910	100.00	573,300,000	100.00	739,800,000	100.00	638,800,000	100.00	638,800,000	Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0			463,560,000		463,560,000		463,560,000		463,560,000		463,560,000		463,560,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85	Persentase	90.00	751,560,000	95.00	834,560,000	95.00	809,560,000	100.00	811,960,000	100.00	811,960,000	100.00	811,960,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	89.88	Persentase	95	1,613,558,000	96	1,726,000,000	-	-	-	-	-	-	98.00		Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan aparatur yang difasilitasi dalam penerapan disiplin	100	Persentase	100	120,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	Satu Pintu
		Jumlah aparatur yang terfasilitasi	38	Orang	39	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.00		Kecamatan Tigaraksa
		Meningkatnya disiplin aparatur	100	Persentase	100	118,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Cikupa
		Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100.00	23,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Panongan
		Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100	67,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Curug
		Prosentase Pemenuhan Peningkatan Disiplin Aparatur	40	Orang	40.00	51,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.00		Kecamatan Legok

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100.00	32,000,000	100.00	35,500,000	100.00	35,500,000	100.00	35,500,000	100.00	35,500,000	100.00	35,500,000	Kecamatan Balaraja
		Prosentase Peningkatan aparatur	100	Persentase	100.00	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Kresek
		Prosentase Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	Persentase	100.00	15,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Kronjo
		Prosentase Implementasi standar kerja/SOP yang dipedomani	100	Persentase	100.00	-	100.00	40,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100.00	63,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Rajeg
		Aparatur/Pegawai yang difasilitasi	40	Pegawai	40.00	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.00		Kecamatan Sepatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	75	Persentase	80.00	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Teluknaga
		Persentase implementasi SOP	0	Persentase	100.00	-	100.00	-	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	56,000,000	100.00	56,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan program peningkatan disiplin aparatur	100	Persentase	100.00	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya	100	Persentase	100.00	25,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Kosambi
		Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100.00	50,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Pagedangan
		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	75	Persentase	80.00	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00		Kecamatan Jambe

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	23,360,000	100.00	200,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur	70	Persentase	70.00	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.00		Kecamatan Kemiri
		prosentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur	0	Persentase	100.00	15,120,000											Kecamatan Sukadiri
		Program peningkatan disiplin aparatur	82.5	Persentase	82.50	97,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	87.50		Kecamatan Cisauk
		Program peningkatan disiplin aparatur	0	Persentase	100.00	105,000,000											Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara	0	Persentase	50.00	30,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00		Kecamatan Sindang Jaya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Implementasi SOP	55	Persentase	55.00	162,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-		Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase Implementasi SOP	0	Persentase	90.00	130,000,000									-	130,000,000	Kecamatan Solear
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100.00	26,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100.00	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Sukamulya
		Prosentase impelementasi SOP	80	Persentase	85.00	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.00		Kecamatan Gunung Kaler
3001.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Persentase	100	1,380,000,000	100	1,483,000,000	100.00	1,669,800,000	100	1,836,780,000	100	2,020,458,000	100.00	2,020,458,000	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	90	Persentase	90	597,810,000	91	609,766,200	92.00	609,766,200	93	621,961,600	93	621,961,600	93.00	621,961,600	Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur	3	Persentase	5	50,000,000	5	50,000,000	5.00	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	25.00	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100	Persentase	100	123,100,000	100	100,000,000	100.00	165,000,000	100	210,000,000	100	150,000,000	100.00	150,000,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN	100	Persentase	100	98,010,000	100	98,500,000	100.00	98,500,000	100	98,500,000	100	98,500,000	100.00	98,500,000	Kecamatan Curug
		Prosentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	0	Orang	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00		Kecamatan Legok

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	75	Persentase	80.00	20,265,000	85.00	7,978,000	90.00	100,000,000	95.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase Peningkatan aparatur	100	Persentase	75.00	152,023,000	80.00	24,498,000	80.00	30,000,000	75.00	35,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	Kecamatan Kresek
		Prosentase peningkatan kapasitas pegawai (ASN)	0	Persentase	0.00	-	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase Peningkatan aparatur	100	Persentase	100.00	2,164,179,000	100.00	2,790,709,000	100.00	2,716,909,000	100.00	2,840,000,000	100.00	2,830,000,000	100.00	2,830,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	0	Orang	0.00	-	30.00	40,000,000	40.00	40,000,000	40.00	50,000,000	40.00	50,000,000	40.00	50,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara	75	Persentase	80.00	-	85.00	75,000,000	90.00	75,000,000	95.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	Kecamatan Teluknaga

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	Persentase	0.00	-	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	Kecamatan Pakuhaji
		peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	35	Orang	38.00	-	38.00	100,000,000	38.00	100,000,000	38.00	100,000,000	38.00	100,000,000	38.00	100,000,000	Kecamatan Pagedangan
		Persentase Pemenuhan Peningatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	Persentase	0.00	-	80.00	15,000,000	85.00	20,000,000	90.00	25,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase Peningkatan aparatur	0	Persentase	0.00	-	0.00	-	80.00	20,000,000	80.00	20,000,000	80.00	20,000,000	100.00	20,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70	Persentase	0.00	-	75.00	75,000,000	80.00	75,000,000	85.00	75,000,000	90.00	75,000,000	90.00	75,000,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	Persentase	0.00	-	85.00	-	90.00	100,000,000	95.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Sindang Jaya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	65	Persentase	70.00	75,900,000	75.00	156,659,000	80.00	167,418,000	85.00	173,177,000	90.00	178,936,000	90.00	178,936,000	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase Peningkatan aparatur	100	Persentase	75.00	100,000,000	80.00	15,990,000	80.00	170,000,000	80.00	180,000,000	100.00	180,000,000	100.00	180,000,000	Kecamatan Solear
		Prosentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya	20	Persentase	0.00	-	0.00	75,000,000	20.00	75,000,000	35.00	75,000,000	45.00	75,000,000	100.00	75,000,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	Persentase	0.00	-	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	Persentase	100	152,110,000	100	134,500,000	100.00	145,500,000	100	154,000,000	100	162,500,000	100.00	162,500,000	Sekretariat Daerah
		Persentase SPJ Tepat Waktu	70	Persentase	70		80		85.00		90		95		95.00		Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	91	Persentase	91	23,750,000	92	26,125,000	92.00	26,125,000	92	28,737,500	93	28,737,500	93.00	28,737,500	Sekretariat DPRD
		Persentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	35,200,000	100	35,200,000	100.00	35,200,000	100	35,200,000	100	35,200,000	100.00	35,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terpenuhinya Data Realisasi Anggaran SKPD	1	Dokumen	1	56,503,750	1	56,503,750	1.00	56,503,750	1	56,503,750	1	56,503,750	1.00	56,503,750	Kecamatan Tigaraksa
		Meningkatnya laporan capaian kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	39,600,000	100	50,500,000	100.00	52,000,000	100	52,000,000	100	52,000,000	100.00	52,000,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	80	Persentase	80.00	36,000,000	85.00	36,000,000	85.00	36,000,000	90.00	36,000,000	90.00	36,000,000	90.00	36,000,000	Kecamatan Panongan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	80	Persenta se	80	60,650,000	85	75,650,000	85.00	75,650,000	90	75,650,000	90	75,650,000	90.00	75,650,000	Kecamatan Curug
		Capaian Peningkatan Kinerja dan Keuangan	100	Persenta se	0.00	30,000,000	0.00	40,000,000	-	50,000,000	0.00	55,000,000	0.00	55,000,000	100.00	55,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persenta se	100.00	44,750,000	100.00	57,870,000	100.00	72,336,875	100.00	74,803,719	100.00	77,393,905	100.00	77,393,905	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	66.67	Persenta se	100.00	57,500,000	100.00	45,300,000	100.00	45,300,000	100.00	45,300,000	100.00	216,300,000	100.00	216,300,000	Kecamatan Balaraja
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	66.67	Persenta se	100.00	66,858,500	100.00	32,205,500	100.00	32,205,500	100.00	32,205,500	100.00	32,205,500	100.00	32,205,500	Kecamatan Kresek
		Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan	100	Persenta se	100.00	54,000,000	100.00	80,850,000	100.00	56,900,000	100.00	95,550,000	100.00	102,900,000	100.00	102,900,000	Kecamatan Kronjo

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan	94.84	Persenta se	100.00	40,000,000	100.00	48,000,000	100.00	57,000,000	100.00	60,000,000	100.00	63,000,000	100.00	63,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persenta se	100.00	2,130,679,000	100.00	2,702,209,000	100.00	2,676,909,000	100.00	2,720,000,000	100.00	2,770,000,000	100.00	2,770,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase pemenuhan dokumen pelaporan capaian kinerja	100	Persenta se	100.00	47,560,000	100.00	47,585,000	100.00	56,300,000	100.00	62,000,000	100.00	79,000,000	100.00	79,000,000	Kecamatan Sepatan
		Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga	62	Nilai	65.00	60,600,000	67.00	160,000,000	71.00	85,000,000	75.00	85,000,000	77.00	85,000,000	77.00	85,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Capaian peningkatan kinerja dan keuangan	26	Persenta se	100.00	20,000,000	100.00	28,000,000	100.00	35,000,000	100.00	37,000,000	100.00	44,000,000	100.00	44,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	Persenta	100.00	44,126,000	100.00	45,700,000	100.00	49,000,000	100.00	54,000,000	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	Kecamatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				se													Pakuhaji
		Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan	66.67	Persenta se	100.00	58,450,000	100.00	55,000,000	100.00	90,000,000	100.00	90,000,000	100.00	90,000,000	100.00	90,000,000	Kecamatan Kosambi
		Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan	100	Persenta se	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	46,000,000	100.00	52,900,000	100.00	60,835,000	100.00	60,835,000	Kecamatan Pagedanga n
		Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	100	Persenta se	100.00	51,350,000	100.00	43,500,000	100.00	44,500,000	100.00	49,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persenta se	100.00	37,700,000	100.00	42,316,789	100.00	78,616,789	100.00	78,616,789	100.00	78,616,789	100.00	78,616,789	Kecamatan Jayanti
		preosentase pemenuhan peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65	Persenta se	70.00	45,000,000	71.00	33,900,000	72.00	77,000,000	73.00	84,000,000	74.00	92,000,000	74.00	92,000,000	Kecamatan Kemiri

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	66.67	Persentase	100.00	42,000,000	100.00	42,000,000	100.00	67,000,000	100.00	67,000,000	100.00	70,000,000	100.00	70,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90	Persentase	90.00	32,250,000	90.00	32,250,000	90.00	32,500,000	90.00	32,500,000	90.00	32,500,000	90.00	32,500,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	50,000,000	100.00	60,000,000	100.00	65,000,000	100.00	85,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	51,525,000	100.00	44,400,000	100.00	46,620,000	100.00	48,951,000	100.00	51,498,550	100.00	51,498,550	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	34,500,000	100.00	40,400,000	100.00	40,804,000	100.00	41,212,000	100.00	35,900,759	100.00	35,900,759	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	66.67	Persentase	100.00	56,695,000	100.00	126,150,000	100.00	140,000,000	100.00	140,000,000	100.00	140,000,000	100.00	140,000,000	Kecamatan Solear

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	80	Persentase	85.00	50,000,000	90.00	50,000,000	95.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Meningkatnya kinerja perencanaan dan keuangan di kecamatan Sukamulya	80	Persentase	80.00	40,500,000	80.00	40,500,000	80.00	40,500,000	80.00	40,500,000	80.00	40,500,000	80.00	40,500,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	39,250,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase Dokumen Perencana Tepat Waktu	100	Persentase	100	369,865,000	100	400,000,000	100.00	558,115,000	100	550,000,000	100	708,115,000	100.00	708,115,000	Sekretariat Daerah
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	92	Persentase	92	465,832,500	92	469,000,750	93.00	490,708,250	93	494,193,325	93	494,193,325	93.00	494,193,325	Sekretariat DPRD
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	92,300,000	100	93,800,000	100.00	113,800,000	100	93,800,000	100	113,800,000	100.00	113,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	Satu Pintu
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan SKPD	1	Dokume n	1	109,788,580	1	89,788,580	1.00	89,788,580	1	89,788,580	1	89,788,580	1.00	89,788,580	Kecamatan Tigaraksa
		Meningkatnya perencanaan SKPD	100	Persenta se	100	122,500,000	100	119,500,000	100.00	133,000,000	100	133,000,000	100	168,000,000	100.00	168,000,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	80	Persenta se	80.00	61,490,000	85.00	73,070,000	85.00	73,070,000	90.00	73,070,000	90.00	108,070,000	90.00	108,070,000	Kecamatan Panongan
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	80	Persenta se	80	82,250,000	85	82,250,000	85.00	82,250,000	90	82,250,000	90	117,250,000	90.00	117,250,000	Kecamatan Curug
		Capaian Peningkatan Perencanaan SKPD	100	Persenta se	0.00	83,625,000	0.00	103,225,000	-	125,000,000	0.00	140,000,000	0.00	175,000,000	100.00	175,000,000	Kecamatan Legok

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	78,290,000	100.00	159,767,500	100.00	111,314,625	100.00	116,880,462	100.00	122,724,484	100.00	122,724,484	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	66.67	Dokumen	100.00	125,400,000	100.00	113,250,000	100.00	113,250,000	100.00	113,250,000	100.00	148,250,000	100.00	148,250,000	Kecamatan Balaraja
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	66.67	Persentase	83.33	140,648,000	100.00	95,948,000	100.00	95,948,000	100.00	95,948,000	83.33	130,948,000	83.33	130,948,000	Kecamatan Kresek
		Prosentase Capaian Program Peningkatan Perencanaan SKPD	100	Persentase	100.00	93,500,000	100.00	109,500,000	100.00	74,600,000	100.00	109,500,000	100.00	109,500,000	100.00	109,500,000	Kecamatan Kronjo
		Prosentase kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran	92.72	Persentase	100.00	174,650,000	100.00	197,000,000	100.00	205,000,000	100.00	263,000,000	100.00	375,000,000	100.00	375,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	74,400,000	100.00	120,000,000	100.00	50,000,000	100.00	135,000,000	100.00	115,000,000	100.00	115,000,000	Kecamatan Rajeg

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	53,055,000	100.00	91,275,000	100.00	99,275,000	100.00	127,000,000	100.00	120,000,000	100.00	120,000,000	Kecamatan Sepatan
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan Teluknaga	6	Dokumen	6.00	60,000,000	6.00	235,000,000	6.00	210,000,000	6.00	235,000,000	6.00	185,000,000	6.00	185,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Capaian peningkatan perencanaan SKPD	74	Persentase	100.00	60,750,000	100.00	48,000,000	100.00	54,000,000	100.00	60,000,000	100.00	66,000,000	100.00	66,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan program peningkatan perencanaan SKPD	0	Persentase	100.00	82,575,000	100.00	68,900,000	100.00	72,000,000	100.00	75,500,000	100.00	77,700,000	100.00	77,700,000	Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	66.67	Persentase	100.00	84,000,000	100.00	84,000,000	100.00	134,000,000	100.00	134,000,000	100.00	169,000,000	100.00	169,000,000	Kecamatan Kosambi
		Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD															Kecamatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			100	Persentase	100.00	83,000,000	100.00	110,000,000	100.00	122,750,000	100.00	137,412,500	100.00	184,274,375	100.00	184,274,375	Pagedangan
		Persentase Peningkatan Perencanaan SKPD	100	Persentase	100.00	65,750,000	100.00	91,000,000	100.00	95,000,000	100.00	99,000,000	100.00	105,000,000	100.00	105,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	58,265,000	100.00	59,000,000	100.00	70,000,000	100.00	75,000,000	100.00	80,000,000	100.00	80,000,000	Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan Peningkatan Perencanaan SKPD	65	Persentase	71.00	61,780,000	71.00	66,250,000	72.00	160,330,000	73.00	192,330,000	74.00	201,330,000	74.00	201,330,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	66.67	Persentase	100.00	67,000,000	100.00	70,000,000	100.00	95,000,000	100.00	95,000,000	100.00	95,000,000	100.00	95,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program Peningkatan Perencanaan SKPD	90	Persentase	90.00	64,750,000	90.00	107,250,000	90.00	107,250,000	90.00	107,250,000	90.00	119,750,000	90.00	119,750,000	Kecamatan Cisauk

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	137,000,000	100.00	108,000,000	100.00	150,000,000	100.00	160,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase kesesuaian sasaran/program dalam renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD	100	Persentase	100.00	91,362,000	100.00	104,650,000	100.00	109,882,500	100.00	115,376,625	100.00	121,145,457	100.00	121,145,457	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100	Persentase	100.00	82,825,000	100.00	143,375,650	100.00	143,931,807	100.00	144,489,693	100.00	145,057,989	100.00	145,057,989	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	66.67	Persentase	83.33	98,565,800	100.00	125,590,000	100.00	135,000,000	100.00	135,000,000	100.00	160,000,000	100.00	160,000,000	Kecamatan Solear
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	75	Persentase	80.00	120,574,000	85.00	133,000,000	90.00	108,000,000	95.00	143,000,000	100.00	143,000,000	100.00	143,000,000	Kecamatan Mekar Baru

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	0			82,000,000		82,000,000		82,000,000		82,000,000		82,000,000		82,000,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persenta se	100.00	70,580,000	100.00	61,000,000	100.00	111,000,000	100.00	61,000,000	100.00	61,000,000	100.00	61,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.08	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah	130	Kali	130	2,235,000,000	130	2,458,500,000	130.00	2,704,350,000	130	2,974,785,000	130	3,272,203,500	130.00	3,272,203,500	Sekretariat Daerah
3001.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu	87	Persenta se	88	47,310,407,350	88.25	46,487,472,900	88.35	47,510,356,850	88.55	49,697,423,800	88.8	49,753,038,425	88.80	49,753,038,425	Sekretariat DPRD
3001.16	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk hukum yang ditetapkan	16	Persenta se	16	945,190,000	18	1,081,000,000	18.00	1,159,810,000	21	1,212,654,300	26	1,276,257,929	100.00	1,276,257,929	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3001.17	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kewilayahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah LPPD Tepat Waktu	1	Dolumen	1	672,800,000	0	-	-	-	0	-	0	-	1.00		Sekretariat Daerah
		Jumlah OPD yang melaporkan LPPD Tepat Waktu	64	OPD	64		0		-		0		0		64.00		Sekretariat Daerah
		Jumlah Kewenangan yang dilaksanakan di Kecamatan	29	Kecamatan	29		0		-		0		0		29.00		Sekretariat Daerah
		Jumlah Kelurahan kategori Maju	28	Kelurahan	28		0		-		0		0		28.00		Sekretariat Daerah
		Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Pilar Batas dan Koordinat wilayah	2	Kecamatan	2		0		-		0		0		2.00		Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah Kelurahan yang memiliki data Monografi	28	Kelurahan	28		0		-		0		0		28.00		Sekretariat Daerah
3001.18	Program Fasilitasi Tatalaksana, Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rekomendasi hasil fasilitasi yang di tindaklanjuti	100	Persentase	100	564,400,000	100	-	100.00	-	100	-	100	-	100.00		Sekretariat Daerah
3001.20	Program Peningkatan dan Pengembanga n Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Prosentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa	80	Persentase	80	3,344,680,000	80	4,355,080,000	85.00	4,355,080,000	85	4,355,080,000	90	4,355,080,000	90.00	4,355,080,000	Sekretariat Daerah
		Tingkat kemandirian/ kematangan UKPBJ	2	Level	2		3		3.00		4		5		5.00		Sekretariat Daerah
3001.21	Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Dan Antar Pemerintah Daerah	Prosentase Kerjasama yang di tindaklanjuti	75	Persentase	75	123,500,000	0	-	-	-	0	-	0	-	75.00		Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3001.22	Program Peningkatan Administrasi Perekonomian Dan Pambangunan	Prosentase Permasalahan Bidang Perekonomian Pembanguna n yang diselesaikan	100	Persenta se	100	1,050,000,000	100	2,350,000,000	100.00	2,400,000,000	100	2,650,000,000	100	2,650,000,000	100.00	2,650,000,000	Sekretariat Daerah
		Prosentase BUMD dan BLUD yang mencapai target kinerja	100	Persenta se	100		100		100.00		100		100		100.00		Sekretariat Daerah
3001.31	Program Penanganan Kasus Pengaduan Dan Pengendalian Kebijakan KDH	Prosentase Penanganan Kasus/Perkar a yang diselesaikan	100	Persenta se	100	1,974,500,000	100	2,274,330,000	100.00	2,444,589,000	100	2,514,926,670	100	2,587,374,469	100.00	2,587,374,469	Sekretariat Daerah
		Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	Persenta se	100		100		100.00		100		100		100.00		Sekretariat Daerah
3001.34	Program Fasilitasi Perundang-Undangan	Persentase produk hukum yang difasilitasi pembahasann ya	68.75	Persenta se	88	18,524,985,800	88.2	19,113,955,550	88.30	20,627,364,375	88.47	20,678,118,375	88.6	21,005,004,935	88.60	21,005,004,935	Sekretariat DPRD

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3001.36	Program Fasilitasi Tatalaksana dan Pelayanan Publik	Persentase OPD yang memiliki SOP Lengkap	100	Persenta se	100	1,050,000,000	100	585,000,000	100.00	625,000,000	100	585,000,000	100	625,000,000	100.00	625,000,000	Sekretariat Daerah
		Jumlah OPD yang Melaksanaka n SOP dengan baik	63	OPD	63		0		63.00		0		63		63.00		Sekretariat Daerah
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Pelayanan	20	Persenta se	20		40		60.00		80		100		100.00		Sekretariat Daerah
3001.37	Program Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Rekomendasi hasil fasilitasi yang di tindaklanjuti	0	Persenta se	0	-	100	200,000,000	100.00	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100.00	350,000,000	Sekretariat Daerah
3001.38	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Prosentase Kerjasama yang di tindaklanjuti	0	Persenta se	0	-	80	1,184,900,000	85.00	1,196,900,000	90	1,208,900,000	100	1,220,900,000	100.00	1,220,900,000	Sekretariat Daerah
3001.41	Program Fasilitasi dan Koordinasi Dalam	Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang ditindaklanjut i	0	Persenta se		-	100	4,727,521,500		3,757,765,000		3,673,506,400		3,766,915,762		3,766,915,762	Sekretariat Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyelenggaraan Pemerintahan																
3001.42	Program Fasilitasi Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rekomendasi Kelembagaan yang di tindaklanjuti	0	Persentase	0	-	100	450,000,000	100.00	500,000,000	100	550,000,000	100	600,000,000	100.00	600,000,000	Sekretariat Daerah
		Persentase Rencana Kerja Reformasi Birokrasi yang terlaksana	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Sekretariat Daerah
3001.43	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Anggaran DPRD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Setwan dan DPRD	3	Dokumen	3	562,589,500	3	581,204,500	3.00	581,204,500	3	618,848,150	3	639,325,280	3.00	639,325,280	Sekretariat DPRD
3002.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	3,327,182,100	100	3,149,300,600	100.00	3,290,300,600	100	3,229,300,600	100	3,570,300,600	100.00	3,570,300,600	Inspektorat Kabupaten

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3002.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	724,881,000	100	835,000,000	100.00	877,000,000	100	919,000,000	100	961,000,000	100.00	961,000,000	Inspektorat Kabupaten
3002.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan aparatur yang di fasilitasi dalam penerapan disiplin	100	Persentase	100	64,000,000	100	130,000,000	100.00	150,000,000	100	170,000,000	100	190,000,000	100.00	190,000,000	Inspektorat Kabupaten
3002.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur	100	Persentase	100	100,000,000	100	150,000,000	100.00	150,000,000	100	175,000,000	100	175,000,000	100.00	175,000,000	Inspektorat Kabupaten
3002.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	12,585,500	100	35,000,000	100.00	36,000,000	100	42,000,000	100	43,000,000	100.00	43,000,000	Inspektorat Kabupaten
3002.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	64,887,400	100	75,000,000	100.00	87,000,000	100	91,000,000	100	136,000,000	100.00	136,000,000	Inspektorat Kabupaten

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3003.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	2,539,936,500	100.00	2,662,777,825	100.00	2,799,049,992	100.00	3,848,208,921	100.00	3,084,722,615	100.00	3,084,722,615	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	965,470,000	100.00	1,013,743,500	100.00	1,064,430,675	100.00	1,117,652,210	100.00	973,534,821	100.00	973,534,821	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0		100	128,000,000		134,400,000		141,120,000		148,176,000		155,584,800		155,584,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100.00	320,000,000	100.00	336,000,000	100.00	352,800,000	100.00	370,440,000	100.00	388,962,000	100.00	388,962,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	51,800,000	100.00	54,390,000	100.00	57,109,500	100.00	59,964,975	100.00	62,963,224	100.00	62,963,224	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD															Badan Perencana

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3003.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD		100	Persenta se	100.00	93,660,000	100.00	147,193,000	100.00	154,552,650	100.00	162,280,283	100.00	142,437,653	100.00	142,437,653	a n Pembangu n an Daerah
3003.15	Program Perencanaan Sarana Prasarana Dan Pengembanga n Wilayah	Capaian Program Perangkat Daerah bidang sarana prasarana dan pengembanga n wilayah	0	Dokume n	100.00	4,701,940,700	100.00	5,424,430,000	100.00	3,728,151,500	100.00	4,061,309,075	100.00	4,247,114,529	100.00	4,247,114,529	Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah
		Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang sarana prasarana dan pengembanga n wilayah yang diimplementa sikan	0	Rekomen da si	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah
3003.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	0	Persenta se	70.00	3,734,387,500	80.00	1,594,925,000	90.00	2,162,171,250	100.00	1,680,279,812	100.00	1,699,293,803	100.00	1,699,293,803	Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Dokumen Pengendalian Hasil Perencanaan	0	Persentase	70.00		80.00		90.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	0	Persentase	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Capaian Program Perangkat Daerah bidang ekonomi	0	Dokumen	100.00	2,434,912,500	100.00	2,250,000,000	100.00	2,350,000,000	100.00	2,250,000,000	100.00	2,250,000,000	100.00	2,250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang ekonomi yang diimplementasikan	0	Rekomendasi	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3003.19	Program Perencanaan Sosial Budaya	Capaian Program Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya	0	Dokumen	70.00	1,176,250,000	75.00	2,600,000,000	80.00	2,600,000,000	85.00	2,600,000,000	90.00	2,600,000,000	90.00	2,600,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang Sosial Budaya yang diimplementasikan	0	Rekomendasi	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.21	Program Pengembangan Data Dan Informasi	Prosentase Ketersedian Data Pembangunan	12	Persentase	16.00	500,000,000	20.00	825,000,000	24.00	750,000,000	28.00	750,000,000	32.00	750,000,000	32.00	750,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Prosentase Implementasi Pusat Data Perencanaan	0	Persentase	10.00		25.00		40.00		60.00		80.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3004.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	4,168,343,600	100	4,590,177,960	100.00	5,048,695,756	100	5,553,065,331	100	6,107,871,864	100.00	6,107,871,864	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	2,582,867,000	100	2,992,012,000	100.00	3,139,110,000	100	3,293,502,500	100	3,455,555,062	100.00	3,455,555,062	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	2,133,000,000	100	2,396,300,000	100.00	2,630,930,000	100	2,889,023,000	100	3,172,925,300	100.00	3,172,925,300	Badan Pendapatan Daerah
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	3,445,640,000	100	3,774,111,000	100.00	3,989,275,000	100	4,160,957,000	100	4,398,175,000	100.00	4,398,175,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan Aparatur yang difasilitasi dalam Penerapan Disiplin	100	Persentase	100	80,000,000	100	-	100.00	-	100	-	100	-	100.00		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	Persentase	100	172,750,000	100	-	100.00	-	100	-	100	-	100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3004.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	100,000,000	100	200,000,000	100.00	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100.00	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	40,000,000	100	42,000,000	100.00	44,100,000	100	46,305,000	100	48,620,000	100.00	48,620,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	36,750,000	100	40,425,000	100.00	44,467,500	100	48,914,250	100	53,805,675	100.00	53,805,675	Badan Pendapatan Daerah
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	108,723,000	100	95,661,400	100.00	119,866,000	100	125,861,000	100	132,154,000	100.00	132,154,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	186,200,000	100	204,820,000	100.00	225,302,000	100	233,995,900	100	287,615,420	100.00	287,615,420	Badan Pendapatan Daerah
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	112,750,000	100	118,389,000	100.00	124,307,000	100	130,523,000	100	137,048,000	100.00	137,048,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3004.08	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Prosentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rapat TAPD	100	Persentase	100	188,770,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.15	Program Perencanaan Anggaran	Persentase Tingkat kepatuhan Rasio Penganggaran	0	Persentase	100	1,897,100,000	100	2,253,822,000	100.00	2,499,673,000	100	2,695,864,000	100	2,735,387,000	100.00	2,735,387,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase OPD yang menyusun APBD yang sesuai waktu	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.16	Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah	Persentase Pencairan OPD yang Tepat Waktu	0	Persentase	70	2,122,125,000	75	1,918,827,500	80.00	2,164,209,687	85	2,061,300,478	90	2,487,119,115	90.00	2,487,119,115	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	1	Dokumen	1		1		1.00		1		1		1.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3004.17	Program Perbendahara an Keuangan Daerah	Persentase Kecepatan dan Ketetapan konsistensi jadwal pencairan	80	Persenta se	80	387,410,000	85	470,293,000	90.00	494,373,100	93	518,834,552	95	543,693,191	95.00	543,693,191	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.18	Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pajak WP Self Assesment yang diperiksa	0	Wajib Pajak	50	2,380,480,000	50	2,011,400,000	50.00	2,011,400,000	50	2,011,400,000	50	2,011,400,000	250.00	2,011,400,000	Badan Pendapatan Daerah
		Jumlah Wajib Pajak baru	0	Wajib Pajak	120		120		120.00		120		120		600.00		Badan Pendapatan Daerah
		Jumlah Objek Pajak yang terpasang sistem/instru men pengawasan pajak daerah	0	Wajib Pajak	300		250		250.00		250		250		1.30		Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Realisasi Dana Perimbangan	90	Persenta se	90	258,275,000	90	435,414,000	92.00	450,310,000	93	465,777,875	95	481,843,921	95.00	481,843,921	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.19	Program Peningkatan dan Pengembanga n Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase Kesesuaian Pencatatan Data Aset	70	Persenta se	70	4,449,557,011	80	5,535,923,375	85.00	5,151,950,609	90	5,325,675,642	95	5,517,151,651	95.00	5,517,151,651	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase aset yang dapat dimanfaatkan secara non komersil	60	Persentase	60		65		70.00		75		80		80.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.20	Program Penggunausah aan dan Penyimpanan Aset/Barang Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikomersilkan	45	Persentase	45	1,050,000,000	50	1,008,400,000	55.00	1,227,625,000	60	1,116,862,000	65	1,356,282,000	65.00	1,356,282,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.21	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Non PBB dan BPHTB	0	Persentase	10.01	914,650,000	10.39	881,412,500	10.76	684,107,625	11.11	769,718,732	11.44	814,440,679	11.44	814,440,679	Badan Pendapatan Daerah
3004.22	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah PBB- P2 dan BPHTB	Persentase Peningkatan Pealisasi PBB- P	0	Persentase	6	4,140,098,000	6	5,556,945,400	6.00	2,788,292,670	6	2,884,207,305	6	2,984,899,667	6.00	2,984,899,667	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Peningkatan Realisasi BPHTB	0	Persentase	6		6		6.00		6		6		6.00		Badan Pendapatan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3004.23	Program Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Capaian Target Pendapatan secara Tepat Waktu	0	Persentase	100	1,174,832,400	100	1,468,515,640	100.00	1,492,367,204	100	1,518,603,924	100	1,547,464,316	100.00	1,547,464,316	Badan Pendapatan Daerah
3005.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	99	Persentase	100	1,713,545,000	100	1,673,250,000	100.00	1,756,912,500	100	1,844,758,125	100	1,936,996,032	100.00	1,936,996,032	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	93	Persentase	95	501,080,000	96	572,900,000	97.00	533,295,000	98	628,209,750	100	587,957,738	100.00	587,957,738	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan untuk peningkatan disiplin aparatur	0	Persentase	100	225,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.05	Program peningkatan kapasitas sumber	Prosentase pemenuhan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	Persentase	0	-	100	150,000,000	100.00	157,500,000	100	165,375,000	100	173,643,750	100.00	173,643,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	daya aparatur																Manusia
3005.06	Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Persenta se	100	-	100	27,000,000	100.00	28,350,000	100	29,767,500	100	31,255,875	100.00	31,255,875	Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia
3005.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase peningkatan perencanaan perangkat daerah	100	Persenta se	100	22,375,000	100	21,850,000	100.00	22,942,500	100	24,089,625	100	25,294,106	100.00	25,294,106	Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia
4.1.2	Meningkatny a Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75.05	Indeks	77		79		81		83		89		89		
1104.19	Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	Meningkatnya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan/Pe rkotaan	0	Persenta se	100	16,445,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		16,445,000,000	Kecamatan Tigaraksa

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Meningkatnya penataan lingkungan Perumahan dan permukiman perdesaaan/ Perkotaan	0	Persentase	100	13,290,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		13,290,000,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase Pemenuhan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	100	10,994,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		10,994,500,000	Kecamatan Panongan
		Tercapainya Peningkatan Fasilitas Umum Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	Persentase	100	16,305,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		16,305,000,000	Kecamatan Curug
		Prosentase perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	0	Persentase	100	11,645,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		11,645,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	0	Persentase	75	23,222,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0		23,222,600,000	Kecamatan Pasar Kemis
		prosentase Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p erkotaan	0	Persentase		15,349,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		15,349,000,000	Kecamatan Balaraja

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		prosentase Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p erkotaan	0	Persentase	100	6,925,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		6,925,000,000	Kecamatan Kresek
		Tercapainya penataan lingkungan permukiman perdesaab dan perkotaan	0	Persentase	100	7,815,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		7,815,000,000	Kecamatan Kronjo
		Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	100	5,560,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		5,560,000,000	Kecamatan Mauk
		Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	100	19,645,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		19,645,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	0	Persentase	100	7,405,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		7,405,000,000	Kecamatan Sepatan
		Terlaksanany a Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan	0	Jenis	3	13,205,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		13,205,000,000	Kecamatan Teluknaga

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	100	11,436,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		11,436,000,000	Kecamatan Cisoka
		Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	100	6,215,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		6,215,000,000	Kecamatan Pakuhaji
		Tercapainya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	95	4,010,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		4,010,000,000	Kecamatan Kosambi
		Tercapainya perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	0	Persentase	100	5,110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		5,110,000,000	Kecamatan Pagedangan
		Meningkatnya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan	0	Persentase	80	5,510,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		5,510,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik	0	Persentase	20	5,520,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		5,520,000,000	Kecamatan Jayanti

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik	0	Persentase		2,270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		2,270,000,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik	0	Persentase		2,340,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		2,340,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	80	12,340,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		12,340,800,000	Kecamatan Cisauk
		Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	100	10,350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		10,350,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Tersedianya Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan	0	Persentase	100	18,045,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		18,045,000,000	Kecamatan Sindang Jaya
		Peningkatan Penataan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Perdesaaan/Perkotaa	0	Persentase	100	3,384,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		3,384,000,000	Kecamatan Kelapa Dua

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p erkotaan	0	Paket	99	13,320,643,500	0	0	0	0	0	0	0	0		13,320,643,500	Kecamatan Solear
		Prosentase Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persenta se	75	5,360,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		5,360,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perdesaan/Pe rkotaan	0	Persenta se	25	11,661,646,000	0	0	0	0	0	0	0	0		11,661,646,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase Pemenuhan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persenta se	100	7,730,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		7,730,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
1104.24	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65	Persenta se	70	6,339,967,500	72	6,289,967,500	74.00	6,289,967,500	76	6,289,967,500	78	6,289,967,500	80.00	6,289,967,500	Kecamatan Tigaraksa
		Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik dan penurunan timbulan sampah	85	Persenta	90	5,430,782,000	92	17,414,950,000	95.00	12,638,500,000	97	9,868,500,000	98	10,408,500,000	98.00	10,408,500,000	Kecamatan Cikupa

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				se													
		Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik	63.8	Persentase	65.00	3,580,000,000	66.60	5,862,639,261	66.66	5,912,639,261	78.00	5,912,639,261	70.00	5,912,639,261	70.00	5,912,639,261	Kecamatan Panongan
		Penurunan Timbulan sampah	35	Persentase	30.00		25.00		20.00		15.00		10.00		10.00		Kecamatan Panongan
		Prosentase Infrastruktur dasar dalam Kondisi baik	75	Persentase	78	21,628,332,061	80	10,201,683,293	82.00	10,072,065,093	85	10,072,065,093	90	10,072,065,093	90.00	10,072,065,093	Kecamatan Curug
		Penurunan Timbulan sampah	35	Persentase	30		25		20.00		15		10		10.00		Kecamatan Curug
		Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	13.12	Persentase	14.24	12,465,748,100	23.32	13,793,083,060	53.87	14,880,000,000	62.09	15,785,000,000	71.43	16,510,000,000	71.43	16,510,000,000	Kecamatan Legok

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penurunan Timbulan sampah	20	Persentase	18.00		16.00		13.00		10.00		7.00		7.00		Kecamatan Legok
		Prosentase penurunan timbulan sampah	10	Persentase	10.00	9,033,575,418	10.00	26,335,774,118	10.00	31,912,042,362	10.00	240,031,397,231	10.00	34,709,102,093	50.00	34,709,102,093	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	70	Persentase	74.00		78.00		82.00		86.00		90.00		90.00		Kecamatan Pasar Kemis
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	60	Persentase	71.18	16,519,516,500	8,118.00	12,628,439,000	91.18	13,930,639,000	95.00	14,180,639,000	100.00	14,680,439,000	100.00	14,680,439,000	Kecamatan Balaraja
		Penurunan Timbulan Sampah	288	Ton	290.00		320.00		350.00		400.00		450.00		450.00		Kecamatan Balaraja
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	61.18	Persentase	71.18	14,763,045,100	81.18	13,805,000,000	91.18	12,960,000,000	95.00	10,835,000,000	100.00	9,569,000,000	100.00	9,569,000,000	Kecamatan Kresek

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penurunan Timbulan Sampah	0	Ton	288.00		290.00		320.00		350.00		400.00		400.00		Kecamatan Kresek
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	15,300,450,000	100.00	13,398,000,000	100.00	15,950,450,000	100.00	15,560,450,000	100.00	15,950,450,000	100.00	15,950,450,000	Kecamatan Kronjo
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja	96	Persentase	100.00	14,322,613,921	100.00	11,806,526,628	100.00	11,343,426,628	100.00	11,407,526,628	100.00	10,786,326,628	100.00	10,786,326,628	Kecamatan Mauk
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	76	Persentase	80.00	29,326,490,000	84.00	20,846,415,000	88.00	22,440,000,000	92.00	23,490,000,000	96.00	16,490,000,000	96.00	16,490,000,000	Kecamatan Rajeg
		Penurunan Timbulan Sampah	300	Ton	220.00		175.00		140.00		115.00		90.00		90.00		Kecamatan Rajeg
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	60	Persentase	65.00	13,908,055,000	78.00	8,954,160,000	82.00	19,067,000,000	87.00	18,568,000,000	90.00	11,040,000,000	95.00	11,040,000,000	Kecamatan Sepatan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik	93	Persentase	94.00	20,325,255,959	95.00	22,950,000,000	96.00	23,300,000,000	97.00	23,300,000,000	98.00	23,300,000,000	98.00	23,300,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Prosentase Penurunan Timbulan Sampah	45	Persentase	40.00		35.00		30.00		25.00		20.00		20.00		Kecamatan Teluknaga
		Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65	Persentase	70.00	11,931,072,227	75.00	11,210,000,000	80.00	11,553,400,000	85.00	11,753,400,000	90.00	11,953,400,000	90.00	11,953,400,000	Kecamatan Pakuhaji
		Penurunan Timbulan Sampah	0	Persentase	0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		40.00		Kecamatan Pakuhaji
		Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik	69	Persentase	71.00	8,168,720,798	76.00	8,802,309,500	81.00	7,218,343,000	86.00	7,218,343,000	91.00	7,218,343,000	91.00	7,218,343,000	Kecamatan Kosambi
		Penurunan Timbulan Sampah	0	Ton	360.00		290.00		210.00		140.00		70.00		70.00		Kecamatan Kosambi

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	60	Persentase	65.00	6,368,209,383	70.00	11,389,625,000	75.00	12,769,963,750	80.00	14,343,618,813	85.00	16,139,501,884	85.00	16,139,501,884	Kecamatan Pagedangan
		penurunan timbulan sampah	28	Ton	26.00		24.00		22.00		20.00		18.00		18.00		Kecamatan Pagedangan
		Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan dalam Kondisi Baik	70	Persentase	75.00	6,217,019,500	80.00	7,207,675,000	85.00	9,836,000,000	90.00	9,917,000,000	95.00	10,048,000,000	95.00	10,048,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	54.06	Persentase	70.00	8,676,973,029	75.00	12,963,615,338	78.00	13,180,390,000	80.00	11,789,104,750	85.00	10,798,926,275	90.00	10,798,926,275	Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan	70	Persentase	70.00	7,960,000,000	75.00	7,048,800,000	85.00	14,379,000,000	87.00	17,079,000,000	88.00	19,809,000,000	88.00	19,809,000,000	Kecamatan Kemiri
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	61.18	Persentase	71.18	7,487,987,140	81.18	8,350,000,000	81.18	9,540,000,000	81.18	9,590,000,000	91.18	17,690,000,000	100.00	17,690,000,000	Kecamatan Sukadiri

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan	75	Persentase	77.50	5,283,218,800	80.00	6,941,000,000	82.50	6,556,250,000	85.00	6,624,750,000	87.50	7,220,250,000	87.50	7,220,250,000	Kecamatan Cisauk
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	61.18	Persentase	71.18	10,659,328,572	91.18	6,709,600,000	95.00	12,825,000,000	100.00	12,765,000,000	100.00	12,937,000,000	100.00	12,937,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Penurunan timbunan sampah	300	Ton	300.00		250.00		250.00		200.00		200.00		200.00		Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase Penurunan Timbulan Sampah	10	Persentase	10.00	4,654,750,000	10.00	13,644,200,000	10.00	13,442,110,000	10.00	13,719,465,500	10.00	14,010,688,775	50.00	14,010,688,775	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Baik	74	Persentase	74.00		78.00		82.00		86.00		90.00		90.00		Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Penurunan Timbulan Sampah	300	Ton	300.00	11,383,073,271	305.00	9,422,491,010	310.00	9,648,649,812	320.00	9,774,941,015	335.00	9,902,714,422	335.00	9,902,714,422	Kecamatan Kelapa Dua

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik	75	Persentase	80.00		85.00		90.00		95.00		95.00		95.00		Kecamatan Kelapa Dua
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	61.8	Persentase	71.18	15,238,498,800	81.18	10,966,192,600	91.18	16,624,536,632	95.00	19,583,781,958	100.00	21,851,554,350	100.00	21,851,554,350	Kecamatan Solear
		Penurunan Timbulan Sampah	0	Ton	288.00		290.00		320.00		350.00		400.00		400.00		Kecamatan Solear
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	61.18	Persentase	71.18	3,418,892,000	81.18	4,523,274,000	91.18	4,580,262,500	95.00	4,555,124,375	100.00	6,109,368,156	100.00	6,109,368,156	Kecamatan Mekar Baru
		Penurunan Timbulan Sampah	187	Ton	198.00		288.00		290.00		320.00		350.00		400.00		Kecamatan Mekar Baru
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik dan turunnya timbulan sampah	20	Persentase	25.00	5,076,700,000	30.00	5,711,700,000	35.00	5,711,700,000	40.00	5,711,700,000	45.00	5,711,700,000	45.00	5,711,700,000	Kecamatan Sukamulya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kondisi baik	65	Persentase	70.00	4,760,000,000	75.00	6,360,000,000	80.00	5,310,000,000	85.00	5,310,000,000	90.00	5,310,000,000	90.00	5,310,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
		Capaian Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Cisoka	50	Persentase	60.00	16,438,400,000	70.00	11,124,635,000	75.00	12,760,000,000	80.00	12,020,000,000	85.00	12,090,000,000	85.00	12,090,000,000	Kecamatan Cisoka
1105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunga	1	Kegiatan	1	153,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0		153,175,000	Kecamatan Pakuhaji
		Penanganan penertiban bahu jalan strategis	1	Kegiatan	1	95,841,000	0	0	0	0	0	0	0	0		95,841,000	Kecamatan Solear
1105.17	Program pengembanga n wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan	75	Persentase	75	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		50,000,000	Kecamatan Mekar Baru

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100	Persentase	100	56,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0		56,100,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam penanganan trantibum dan linmas	0			120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		120,000,000	Kecamatan Kemiri
1105.20	Program Pembinaan Dan Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum	Tercapainya Peningkatan Kapasitas pada Kelembagaan Ketertiban dan Ketentraman Umum	100	Persentase	100	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		50,000,000	Kecamatan Curug
		Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	100	Persentase	100	29,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0		29,375,000	Kecamatan Teluknaga
		Program Pembinaan Dan Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum	1	Kegiatan	1	324,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		324,500,000	Kecamatan Pakuhaji

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	0			45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		45,000,000	Kecamatan Kemiri
		Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum	100	Persentase	100	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		30,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
1105.22	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan	Prosentse Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban	14	Persentase	15	593,000,000	16	593,000,000	17.00	593,000,000	18	593,000,000	19	593,000,000	20.00	593,000,000	Kecamatan Tigaraksa
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	13.1	Persentase	14.29	412,724,000	28.57	460,620,000	42.86	442,500,000	57.14	445,500,000	71.43	422,500,000	71.43	422,500,000	Kecamatan Cikupa
		Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban	80	Persentase	80.00	166,400,000	85.00	535,000,000	85.00	535,000,000	90.00	535,000,000	90.00	805,000,000	90.00	805,000,000	Kecamatan Panongan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban	80	Persentase	80	464,870,000	85	688,700,000	85.00	688,700,000	90	688,700,000	90	688,700,000	90.00	688,700,000	Kecamatan Curug
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0	Persentase		121,360,000									-	-	Kecamatan Legok
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	10	Persentase	10.00	405,304,500	10.00	168,695,448,800	10.00	468,676,532	10.00	492,989,107	10.00	513,438,564	50.00	513,438,564	Kecamatan Pasar Kemis
		Jumlah konflik ekonomi sosial dan politik	1	Kasus	1.00		1.00		-		0.00		0.00		2.00		Kecamatan Pasar Kemis
		Jumlah konflik SARA	0	Kasus	2.00		1.00		1.00		1.00		0.00		5.00		Kecamatan Pasar Kemis
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	14.29	Persentase	28.57	286,132,500	42.86	247,100,000	57.14	250,550,000	71.43	252,550,000	71.43	252,550,000	71.43	252,550,000	Kecamatan Balaraja

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	5	Konflik	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		Kecamatan Balaraja
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0	Persentase	14.29	104,870,000	28.57	131,110,000	42.86	142,000,000	57.14	149,000,000	71.43	157,000,000	71.43	157,000,000	Kecamatan Kresek
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	0	Konflik	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		Kecamatan Kresek
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0	Persentase		200,000,000									-	-	Kecamatan Kronjo
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	15	Persentase	20.00	110,300,000	25.00	142,000,000	30.00	142,000,000	35.00	142,000,000	50.00	145,000,000	50.00	145,000,000	Kecamatan Rajeg
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	10	Persentase	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		50.00		Kecamatan Rajeg

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Menekannya Terjadinya Potensi Konflik	25	Persentase	23.00	236,875,000	21.00	385,000,000	18.00	390,000,000	17.00	395,000,000	15.00	400,000,000	15.00	400,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	Persentase		130,000,000											Kecamatan Cisoka
		Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	Persentase	17.00	599,000,000	28.00	911,500,000	35.00	876,500,000	42.00	876,500,000	59.00	876,500,000	59.00	876,500,000	Kecamatan Kosambi
		Menekan Terjadinya Potensi Konflik	0	Konflik	8.00		7.00		7.00		6.00		5.00		5.00		Kecamatan Kosambi
		Cakupan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban	70	Persentase	75.00	212,500,000	80.00	101,850,000	85.00	110,000,000	90.00	110,000,000	95.00	110,000,000	95.00	110,000,000	Kecamatan Jambe

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban	65	Persentase	70.00	198,600,000	75.00	140,000,000	75.50	165,000,000	80.00	165,000,000	85.00	165,000,000	85.00	165,000,000	Kecamatan Jayanti
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	4	Kasus	5.00	45,000,000	4.00	49,700,000	4.00	71,000,000	3.00	71,000,000	2.00	71,000,000	2.00	71,000,000	Kecamatan Kemiri
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0	Persentase	14.29	100,000,000	25.57	385,000,000	42.86	395,000,000	57.14	400,000,000	71.43	400,000,000	71.43	400,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan	65.5	Persentase	68.75	168,500,000	75.00	189,000,000	81.25	189,000,000	87.50	189,000,000	93.25	189,000,000	93.25	189,000,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	70	Persentase	70.00	30,000,000	65.35	66,300,000	65.20	230,000,000	50.85	260,000,000	25.15	285,000,000	25.15	285,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	3	Konflik	3.00		2.00		2.00		2.00		1.00		1.00		Kecamatan Sepatan Timur

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0	Persentase	10.00	179,550,000	10.00	187,040,000	10.00	198,000,000	10.00	207,900,000	10.00	218,295,000	50.00	218,295,000	Kecamatan Sindang Jaya
		Jumlah konflik ekonomi sosial dan politik	0	Kasus	1.00		1.00		-		0.00		0.00		-		Kecamatan Sindang Jaya
		Jumlah konflik SARA	0	Kasus	2.00		1.00		1.00		1.00		0.00		-		Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15	Persentase	15.00	449,545,000	20.00	608,840,000	30.00	613,738,400	40.00	618,695,984	50.00	623,713,549	50.00	623,713,549	Kecamatan Kelapa Dua
		Jumlah Konflik Ekonomi Sosial dan Politik	4	Kasus	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		16.00		Kecamatan Kelapa Dua
		Jumlah Konflik Sara	2	Kasus	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		10.00		Kecamatan Kelapa Dua

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0	Persentase	14.29	157,044,000	28.57	144,200,000	42.86	240,300,000	57.14	262,830,000	71.43	275,613,000	71.43	275,613,000	Kecamatan Solear
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	0	Angka	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00		Kecamatan Solear
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	65	Persentase	70.00	50,000,000	75.00	280,000,000	80.00	155,000,000	85.00	170,000,000	90.00	145,000,000	95.00	145,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	10	Konflik	8.00		6.00		5.00		5.00		5.00		3.00		Kecamatan Mekar Baru
		penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20	Persentase	20.00	100,000,000	20.00	185,000,000	20.00	160,000,000	20.00	185,000,000	20.00	185,000,000	20.00	185,000,000	Kecamatan Sukamulya
		Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban	0	Persentase	14.29	103,015,000	28.57	195,000,000	42.86	195,000,000	57.14	195,000,000	71.43	195,000,000	71.43	195,000,000	Kecamatan Gunung Kaler

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1206.15	Program Pelayanan Administrasi Kependuduka n	Persentase Penerbitan KTP -El Valid	96	Persentase	100	5,415,565,500	100	13,441,431,000	100.00	5,667,703,000	100	6,352,703,000	100	6,357,703,000	100.00	6,357,703,000	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penerbitan KK Valid	96	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penerbitan KIA Valid	0	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
1206.16	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan Valid	100	Persentase	100	1,215,105,500	100	1,417,500,000	100.00	2,555,000,000	100	2,580,000,000	100	2,635,000,000	100.00	2,635,000,000	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Valid	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Kematian yang diterbitkan Valid	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1206.17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100	Persentase	100	1,549,150,000	100	1,488,850,000	100.00	1,475,000,000	100	1,525,000,000	100	1,550,000,000	100.00	1,550,000,000	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
1206.18	Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan	Persentase jumlah OPD yang bekerjasama dalam Pemanfaatan Data Kependuduka n	0	Persentase	20	1,425,612,000	40	1,545,650,000	60.00	1,615,000,000	80	1,685,000,000	100	1,645,000,000	100.00	1,645,000,000	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil
1207.16	Program Pengembanga n Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pengembanga n Lembaga Ekonomi Pedesaan	100	Persentase	100	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		20,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
1207.18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase pemenuhan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	100	Persentase	100	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		125,000,000	Kecamatan Panongan
1207.19	Program Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa	Prosentase Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa	100	Persentase	100	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		120,000,000	Kecamatan Panongan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	100	Persentase	100	20,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0		20,400,000	Kecamatan Mauk
		Program Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	Kegiatan	1	149,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0		149,750,000	Kecamatan Pakuhaji
		Program Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	0			50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		50,000,000	Kecamatan Kemiri
1207.20	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan	Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	50	Persentase	55	1,074,893,400	57	1,074,893,400	60.00	1,074,893,400	65	1,074,893,400	67	1,074,893,400	70.00	1,074,893,400	Kecamatan Tigaraksa
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	100	Persentase	100	1,402,940,000	100	2,104,050,000	100.00	2,155,300,000	100	2,185,300,000	100	2,185,300,000	100.00	2,185,300,000	Kecamatan Cikupa

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	80	Persentase	80.00	1,261,700,000	85.00	820,740,000	85.00	820,740,000	90.00	820,740,000	90.00	820,740,000	90.00	820,740,000	Kecamatan Panongan
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	80	Persentase	80	1,170,775,000	85	939,775,000	85.00	939,775,000	90	939,775,000	90	939,775,000	90.00	939,775,000	Kecamatan Curug
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	0	Persentase	20.00	1,647,355,000	40.00	1,610,665,000	60.00	1,766,750,000	80.00	1,900,000,000	90.00	1,980,000,000	90.00	1,980,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	10	Persentase	10.00	1,539,166,500	20.00	1,438,049,500	30.00	1,780,620,476	40.00	1,888,267,658	50.00	1,993,283,818	50.00	1,993,283,818	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	25	Persentase	50.00	783,000,300	65.00	880,325,000	70.00	907,000,000	75.00	907,000,000	80.00	907,000,000	80.00	907,000,000	Kecamatan Balaraja
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	0	Persenta	25.00	776,656,500	50.00	745,353,000	62.50	800,000,000	75.00	844,000,000	88.00	884,000,000	88.00	884,000,000	Kecamatan Kresek

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				se													
		Prosentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	100	Persentase	100.00	1,065,000,000	100.00	1,025,000,000	100.00	1,065,000,000	100.00	1,065,000,000	100.00	1,515,000,000	100.00	1,515,000,000	Kecamatan Kronjo
		Prosentase kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	97	Persentase	100.00	1,390,545,000	100.00	2,308,600,000	100.00	2,387,500,000	100.00	2,571,000,009	100.00	2,831,000,000	100.00	2,831,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	10	Persentase	25.00	709,600,000	45.00	949,275,000	65.00	975,000,000	85.00	865,000,000	100.00	995,000,000	100.00	995,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	25	Persentase	30.00	1,021,430,000	40.00	710,380,000	50.00	910,200,000	60.00	937,000,000	70.00	1,047,000,000	75.00	1,047,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Kelompok Masyarakat yang Difasiltasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	45	Persentase	50.00	762,921,000	55.00	1,125,000,000	60.00	1,125,000,000	65.00	1,125,000,000	70.00	1,125,000,000	70.00	1,125,000,000	Kecamatan Teluknaga

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi di Kecamatan	0	Persentase	100.00	911,500,000											Kecamatan Cisoka
		Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	0	Persentase	10.00	1,052,858,000	15.00	1,020,800,000	20.00	1,090,185,000	25.00	1,041,600,000	30.00	1,063,600,000	30.00	1,063,600,000	Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Masyarakat Yang di Fasilitasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	0	Persentase	25.00	1,739,850,360	58.00	1,327,768,000	62.50	2,167,768,000	75.00	2,167,768,000	88.00	2,167,768,000	88.00	2,167,768,000	Kecamatan Kosambi
		prosentase masyarakat yang di fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	50	Persentase	55.00	704,672,808	60.00	779,250,000	65.00	860,175,000	70.00	949,642,500	75.00	1,048,572,250	75.00	1,048,572,250	Kecamatan Pagedangan
		Persentase Masyarakat Yang Difasilitasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	70	Persentase	75.00	636,840,000	80.00	765,219,500	85.00	735,000,000	90.00	745,000,000	95.00	755,000,000	95.00	755,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	40	Persenta	80.00	635,400,000	90.00	1,714,970,000	90.00	1,745,000,000	90.00	1,745,000,000	90.00	1,745,000,000	90.00	1,745,000,000	Kecamatan Jayanti

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				se													
		Prosentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa n masyarakat	85	Persenta se	75.00	310,000,000	80.00	580,200,000	85.00	995,000,000	86.00	1,140,000,000	87.00	1,275,000,000	88.00	1,275,000,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat	0	Persenta se	25.00	840,000,000	50.00	840,000,000	62.50	840,000,000	75.00	1,200,000,000	75.00	840,000,000	88.00	840,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program Pemberdayaa n Masyarakat dan Pengembanga n Ekonomi Di Kecamatan	75	Persenta se	75.00	835,265,000	78.75	740,400,000	82.50	720,400,000	86.25	720,400,000	90.00	740,400,000	90.00	740,400,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat	25	Persenta se	50.00	525,000,000	62.50	1,045,000,000	75.00	705,000,000	88.00	790,000,000	88.00	820,000,000	88.00	820,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa n masyarakat	0	Persenta se	10.00	1,037,150,000	20.00	1,013,750,000	30.00	1,155,212,500	40.00	1,205,973,125	50.00	1,263,371,781	50.00	1,263,371,781	Kecamatan Sindang Jaya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Kelompok Masyarakat yang di Fasilitasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	25	Persentase	25.00	2,343,961,500	50.00	3,049,328,150	62.50	2,701,586,900	75.00	2,724,506,670	88.00	2,767,475,700	88.00	2,767,475,700	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	0	Persentase	25.00	868,538,000	50.00	1,248,080,000	62.50	1,379,802,500	75.00	1,389,522,875	88.00	1,396,975,000	88.00	1,396,975,000	Kecamatan Solear
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	60	Persentase	65.00	276,600,000	70.00	2,235,000,000	75.00	1,066,000,000	80.00	1,256,000,000	85.00	1,256,000,000	90.00	1,256,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat/ Kelompok masyarakat yang ada	20	Persentase	20.00	575,000,000	20.00	910,000,000	20.00	935,000,000	20.00	935,000,000	20.00	835,000,000	100.00	835,000,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	40	Persentase	50.00	649,880,000	60.00	585,000,000	70.00	610,000,000	75.00	610,000,000	80.00	685,000,000	80.00	685,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
1207.21	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Baik	0			40,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0			Kecamatan Gunung Kaler

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1207.22	Program Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Desa yang Pengelolaan keuangan sesuai SAP dan Tertib Asset	0			25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		25,000,000	Kecamatan Kemiri
		Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	100	Persenta se	100	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		45,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase Pemenuhan Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	100	Persenta se	100	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		30,000,000	Kecamatan Panongan
1210.15	Program Pengembanga n Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase pengembanga n komunikasi, informasi dan media massa	100	Persenta se	100	2,297,550,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Komunikas i dan Informatik a
1210.16	Program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi	Prosentase SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi dan informasi	100	Persenta se	100	1,025,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Komunikas i dan Informatik a

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1210.17	Program kerjasama informasi dan media massa	Prosentase kerjasama informasi dengan insan media	100	Persentase	100	2,800,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.18	Program implementasi dan pengembangan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Prosentase implementasi dan pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	100	Persentase	100	1,200,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika (program baru)	Prosentasi pemanfaatan teknologi informatika	41	Persentase	50	5,447,950,000	0	-	-	-	0	-	0	-	50.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.20	Program pengembangan aplikasi/sistem informasi manajemen (program baru)	Prosentasse aplikasi yang terintegrasi	2	Persentase	3	825,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	3.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.21	Program fasilitasi peningkatan sdm bidang teknologi informatika	Prosentase SDM yang kompeten di Bidang IT	100	Persentase	100	313,100,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1210.22	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase pengelolaan sistem yang terintegrasi	0	Persentase	0	-	3.5	9,300,000,000	3.55	10,850,000,000	3.7	11,850,000,000	4	12,750,000,000	4.00	12,750,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.23	Program Pengelolaan Informasi Publik	Angka Indeks persepsi keterbukaan informasi publik	0	Indeks	0	-	75	2,275,000,000	85.00	2,560,000,000	90	3,102,000,000	95	3,432,000,000	95.00	3,432,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.24	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	Prosentase pengelolaan komunikasi publik	0	Persentase	0	-	25	3,630,000,000	50.00	3,675,000,000	75	5,470,000,000	100	6,125,000,000	100.00	6,125,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.25	Program Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Prosentase Penyelesaian Sengketa Informasi	0	Persentase	0	-	62.5	125,000,000	75.00	125,000,000	87.5	125,000,000	100	125,000,000	100.00	125,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.26	Program Pengembangan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi	0	Persentase	0	-	40	19,400,000,000	60.00	19,950,000,000	80	20,150,000,000	100	15,150,000,000	100.00	15,150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1213.15	Program penyadaran, pemberdayaan , dan pengembanga n potensi kepemimpinan , kewirausahaa n serta kepeloporan pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	0			64,500,000										64,500,000	Kecamatan Teluknaga
1214.15	Program Statistik Sektoral	Prosentase data statistik sektoral	0	Persenta se	0	-	25	1,325,000,000	50.00	1,400,000,000	75	1,520,000,000	100	1,650,000,000	100.00	1,650,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1215.15	Program Pengamanan Informasi	Angka Indeks keamanan informasi (KAMI)	0	Indeks	0	-	275	1,300,000,000	350.00	1,500,000,000	456	1,450,000,000	550	1,550,000,000	550.00	1,550,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1215.16	Program Pola Hubungan Jaringan Persandian	Prosentase pola hubungan jaringan persandian yang terkoordinasi	0	Persenta se	0	-	175	75,000,000	280.00	75,000,000	325	75,000,000	450	100,000,000	450.00	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1218.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku, pemilahan arsip inaktif dan penyerahan arsip dari SKPD/BUMD /Lembaga ke DISPERPUSIP	6.6	Persentase	26	1,017,500,000	46	1,354,000,000	66.00	1,260,000,000	86	1,210,000,000	100	1,210,000,000	100.00	1,210,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1218.16	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	Persentase Informasi tentang arsip yang diolah secara elektronik dan informasi tentang arsip yang disimpan dalam media lain	60	Persentase	60	1,713,000,000	70	2,145,000,000	80.00	2,302,000,000	90	2,292,250,000	100	2,517,250,000	100.00	2,517,250,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3001.14	Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	Meningkatnya inovasi perangkat daerah	0			-		-		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Kecamatan Tigaraksa
		Meningkatnya inovasi perangkat daerah	0	Persentase	100	-	100	150,000,000	100.00	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100.00	150,000,000	Kecamatan Cikupa

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Meningkatnya inovasi perangkat daerah	0			-		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Kecamatan Panongan
		Jumlah Pengembanga n Inovasi di Kecamatan	0	Angka	0	-	1	100,000,000	1.00	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1.00	100,000,000	Kecamatan Curug
		meningkatnya inovasi kecamatan	0	Angka	1.00	-	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	Kecamatan Legok
		Inovasi yang diimplementa sikan	0	Jumlah	0.00	-	1.00	129,362,500	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	4.00	200,000,000	Kecamatan Pasar Kemis
		Inovasi dikecamatan Balaraja	2	Jumlah	2.00	-	2.00	145,000,000	2.00	200,000,000	2.00	200,000,000	2.00	200,000,000	4.00	200,000,000	Kecamatan Balaraja
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	0	Inovasi	1.00	-	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	Kecamatan Kresek

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	0	Persentase	0.00	-	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Mauk
		Jumlah Implementasi Inovasi	0			-		50,000,000		75,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Kecamatan Rajeg
		Inovasi Kecamatan	0	Jenis	0.00	-	1.00	42,000,000	1.00	45,000,000	1.00	35,000,000	1.00	35,000,000	4.00	35,000,000	Kecamatan Sepatan
		Jumlah Implementasi Inovasi	1	Inovasi	1.00	-	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000	10.00	500,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Tersedianya inovasi SKPD untuk diimplementasikan	0			-		78,500,000		80,000,000		85,000,000		90,000,000		90,000,000	Kecamatan Cisoka
		Tersedianya inovasi SKPD untuk diimplementasikan	0	Kegiatan	0.00	-	1.00	91,250,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	4.00	200,000,000	Kecamatan Pakuhaji

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		jumlah pengembangan inovasi di kecamatan	0	Angka	0.00	-	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	Kecamatan Pagedangan
		Persentase pemenuhan pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	0	Persentase	0.00	-	70.00	100,000,000	75.00	100,000,000	80.00	100,000,000	85.00	100,000,000	85.00	100,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	1	Jumlah	1.00	-	3.00	150,000,000	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000	1.00	200,000,000	8.00	200,000,000	Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	1	Desa	0.00	-	1.00	80,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	0	Persentase	0.00	-	0.00	-	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	75	Persentase	75.00	-	75.00	60,000,000	80.00	60,000,000	85.00	60,000,000	90.00	60,000,000	90.00	60,000,000	Kecamatan Cisauk

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	0	Persentase	0.00	-	1.00	175,000,000	-	170,000,000	0.00	150,000,000	0.00	150,000,000	1.00	150,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Jumlah Inovasi yang Diimplementasikan di Kecamatan	0	Jumlah	0.00	-	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	4.00	200,000,000	Kecamatan Sindang Jaya
		Inovasi yang di implementasikan	0	Inovasi	0.00	-	2.00	200,000,000	-	300,000,000	1.00	400,000,000	0.00	400,000,000	3.00	400,000,000	Kecamatan Kelapa Dua
		Jumlah Inovasi Daerah	0	Nilai	1.00	-	1.00	40,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	0.00	100,000,000	5.00	100,000,000	Kecamatan Solear
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	0	Persentase	0.00	-	0.00	-	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	0			-		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Kecamatan Sukamulya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Capaian Inovasi yang di implementasi kan	0	Inovasi	0.00	-	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000	4.00	150,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.23	Program Penyelengaraa n Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan A yang sesuai dengan SOP	30	Persenta se	40	165,000,000	50	300,000,000	60.00	300,000,000	70	300,000,000	80	300,000,000	80.00	300,000,000	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3001.25	Program Penyelengaraa n Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan B yang sesuai dengan SOP	60	Persenta se	65	165,000,000	70	300,000,000	75.00	300,000,000	80	300,000,000	90	300,000,000	90.00	300,000,000	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3001.26	Program Peningkatan Pengelaolaan Asset dan Standarisasi Barang Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Yang Akuntable	100	Persenta se	100	565,000,000	100	621,500,000	100.00	683,650,000	100	752,015,000	100	827,216,500	100.00	827,216,500	Sekretariat Daerah
3001.30	Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Di kecamatan	75	Persenta se	80	2,433,399,100	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00	2,433,399,100	Kecamatan Tigaraksa

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan	100	Persentase	100	2,079,186,548	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	2,079,186,548	Kecamatan Cikupa
		Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan	75	Persentase	75.00	1,607,310,077	0	0	0	0	0	0	0	0	90.00	1,607,310,077	Kecamatan Panongan
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	75	Persentase	75	3,212,721,127	0	0	0	0	0	0	0	0	90.00	3,212,721,127	Kecamatan Curug
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	100	Persentase	100.00	1,181,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	1,181,482,000	Kecamatan Legok
		Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan	75	Persentase	80.00	3,816,221,202	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00	3,816,221,202	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	0	Persentase	0.00	198,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.44	198,790,000	Kecamatan Kresek

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pelayanan Umum di Kecamatan	0	Persenta se	0.00	918,429,286	0	0	0	0	0	0	0	0	-	918,429,286	Kecamatan Mauk
		Prosentase Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan umum	1	Persenta se	2.00	675,678,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	675,678,500	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungj awaban Baik	75	Persenta se	80.00	585,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	585,830,000	Kecamatan Teluknaga
		Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	75	Persenta se	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		Kecamatan Teluknaga
		Capaian Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Cisoka	50	Persenta se	60.00	16,438,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.00	16,438,400,000	Kecamatan Cisoka
		prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan	0			934,374,916	0	0	0	0	0	0	0	0		934,374,916	Kecamatan Pakuhaji

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan	60	Persentase	65.00	1,240,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.00	1,240,615,000	Kecamatan Pagedangan
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	12.5	Persentase	12.50	508,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	508,704,000	Kecamatan Jayanti
		Capaian Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kecamatan	11.11	Persentase	15.41	370,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.41	370,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Di kecamatan Cisauk	100	Persentase	100.00	1,736,616,200	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	1,736,616,200	Kecamatan Cisauk
		Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungjawaban Baik	75	Persentase	75.00	306,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	306,700,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan	0	Persentase	80.00	698,864,900	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00	698,864,900	Kecamatan Sindang Jaya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan Pelayanan di Kecamatan	60	Persentase	70.00	5,704,304,496	0	0	0	0	0	0	0	0	90.00	5,704,304,496	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase pemenuhan Pelayanan di Kecamatan Kelapa Dua	60	Persentase	70.00		0.00		-		0.00		0.00		70.00		Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	32.42	Persentase	55.68	665,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	665,848,000	Kecamatan Solear
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	32.42	Persentase	55.68		74.07		88.62		100.00		100.00		100.00		Kecamatan Solear
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	60	Persentase	0.00	411,226,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.00	411,226,000	Kecamatan Mekar Baru
		prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan	0			35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		35,000,000	Kecamatan Sukamulya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	75	Persentase	80.00	292,515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	292,515,000	Kecamatan Gunung Kaler
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	0			959,650,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,650,700	Kecamatan B
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	47.43	Persentase	55		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	47.75	Persentase	55		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	0			539,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0		539,600,000	Kecamatan K
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	0			1,037,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0		1,037,644,000	Kecamatan R

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	0			3,220,928,842	0	0	0	0	0	0	0	0		3,220,928,842	Kecamatan K
		Persentase Pemenuhan Pelayanan di Kecamatan	75	Persenta se	80.00	504,580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00	504,580,500	Kecamatan Jambe
		prosentase pemenuhan Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan	70	Persenta se	75	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		210,000,000	Kecamatan K
3001.32	Program Penyelengaraa n Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan C yang sesuai dengan SOP	65	Persenta se	70	165,000,000	75	300,000,000	80.00	300,000,000	85	300,000,000	90	300,000,000	90.00	300,000,000	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3001.33	Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjut i dan diselesaikan	55	Persenta se	70	1,883,300,000	75	940,000,000	80.00	1,040,000,000	85	1,040,000,000	90	940,000,000	90.00	940,000,000	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3001.39	Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan	prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80	Persenta se	0	-	85	1,404,653,500	90.00	1,464,653,500	92	1,404,653,500	95	1,404,653,500	100.00	1,404,653,500	Kecamatan Tigaraksa
		Persentase Desa/Kelurah an dengan laporan pertanggungj awaban baik	100	Persenta se	0	-	100	618,696,000	100.00	982,000,000	100	952,550,000	100	999,437,500	100.00	999,437,500	Kecamatan Cikupa
		Prosentase Administrasi Pemerintahan	75	Persenta se	0	-	80.00	748,628,000	85.00	748,628,000	85.00	748,628,000	90.00	748,628,000	90.00	748,628,000	Kecamatan Panongan
		Prosentase Administrasi Pemerintahan	75	Persenta se	0	-	80	1,531,916,000	85.00	1,531,916,000	85	1,531,916,000	90	1,531,916,000	90.00	1,531,916,000	Kecamatan Curug
		Prosentase Administrasi Pemerintahan	0		0	-		769,297,000		890,000,000		935,000,000		995,000,000		995,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal maju	11.11	Persenta se	0	-	33.33	1,937,781,790	55.56	1,879,618,144	77.78	1,966,915,050	100.00	2,054,729,004	100.00	2,054,729,004	Kecamatan Pasar Kemis

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase desa/kelurahan dengan laporan pertanggungjawaban baik	11.11	Persentase	0.00	-	33.33		55.56		77.78		100.00		100.00		Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	10.1	Persentase	0	-	22.22	664,790,000	33.33	671,290,000	44.44	673,290,000	55.55	678,290,000	60.78	678,290,000	Kecamatan Balaraja
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	33.33	Persentase	44.44	-	55.55		66.67		77.77		88.88		88.88		Kecamatan Balaraja
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	0	Persentase	0	-	11.11	148,320,000	22.22	157,000,000	33.33	165,000,000	44.44	180,000,000	44.44	180,000,000	Kecamatan Kresek
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	33.33	Persentase	44.44	-	55.55		66.67		77.77		88.88		88.88		Kecamatan Kresek
		Prosentase Desa/Kelurahan Dengan kategori Minimal Maju	100	Persentase	0	-	100.00	169,600,000	100.00	264,600,000	100.00	314,600,000	100.00	264,600,000	100.00	264,600,000	Kecamatan Kronjo

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Desa/Kelurahan Dengan LPJ Baik	100	Persentase	25.00	-	25.00		25.00		25.00		25.00		100.00		Kecamatan Kronjo
		Prosentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang tertib	100	Persentase	0	-	9.00	458,000,000	18.00	478,000,000	27.00	570,000,000	45.00	715,000,000	100.00	715,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang	71	Persentase	0	-	77.00	473,400,000	80.00	555,000,000	81.00	460,000,000	83.00	525,000,000	83.00	525,000,000	Kecamatan Rajeg
		Persentase desa dengan laporan pertanggung jawaban baik	42	Persentase	44.44	-	55.55		66.67		77.77		88.88		88.88		Kecamatan Rajeg
		Jumlah desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	0	Jumlah	0	-	1.00	570,995,000	1.00	605,000,000	1.00	652,500,000	1.00	722,000,000	6.00	722,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungjawaban Baik	75	Persentase	0	-	85.00	180,000,000	90.00	205,000,000	95.00	180,000,000	100.00	205,000,000	100.00	205,000,000	Kecamatan Teluknaga

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Capaian administrasi pemerintahan	0	Persenta se	0	-	100.00	100,500,000	100.00	110,000,000	100.00	120,000,000	100.00	129,500,000	100.00	129,500,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal maju	0	Persenta se	0	-	14.29	341,015,000	28.57	348,000,000	42.86	319,900,000	64.29	362,000,000	64.29	362,000,000	Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase desa dengan laporan pertanggungj awaban baik	0	Persenta se	38.46	-	53.85		69.23		84.62		100.00		100.00		Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Desa/Kelurah an Dengan Kategori Minimal Berkembang	85	Persenta se	0	-	95.00	1,970,489,000	100.00	1,950,489,000	100.00	1,950,489,000	100.00	1,950,489,000	100.00	1,950,489,000	Kecamatan Kosambi
		Persentase Desa Dengan Laporan Peratnggungj awaban Baik	0	Persenta se	32.42	-	55.68		74.07		88.62		100.00		100.00		Kecamatan Kosambi
		prosentase desa/ kelurahan dengan kategori minimal maju	11	Persenta se	0	-	11.00	985,000,000	22.00	1,139,750,000	33.00	1,276,212,500	44.00	1,467,644,375	44.00	1,467,644,375	Kecamatan Pagedanga n

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		prosentase desa deangan laporan pertanggungjawaban baik	33	Persentase	44.00	-	55.00		66.00		77.00		88.00		88.00		Kecamatan Pagedangan
		Persentase pemenuhan administrasi pemerintahan kecamatan	0	Persentase	0	-	70.00	106,000,000	75.00	112,000,000	80.00	112,000,000	85.00	112,000,000	85.00	112,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	12.5	Persentase	0	-	25.00	208,000,000	37.50	213,000,000	62.50	213,000,000	100.00	213,000,000	100.00	213,000,000	Kecamatan Jayanti
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77	Persentase	78.50	-	80.00		82.50		84.00		85.00		85.00		Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	70	Persentase	0	-	85.00	125,000,000	85.00	125,000,000	85.00	125,000,000	85.00	125,000,000	85.00	125,000,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase desa dengan kategori minimal Maju	11.5	Persentase	0	-	33.50	250,000,000	44.50	345,000,000	44.50	345,000,000	44.50	300,000,000	44.50	300,000,000	Kecamatan Sukadiri

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	33	Persentase	44.00	-	55.00		66.00		77.00		88.00		88.00		Kecamatan Sukadiri
		Program Administrasi Pemerintahan	80	Persentase	0	-	82.50	708,800,000	85.00	733,800,000	87.50	708,800,000	90.00	733,800,000	90.00	733,800,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	10.1	Persentase	0	-	11.11	93,955,400	22.22	130,000,000	33.33	155,000,000	44.44	155,000,000	55.50	155,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	33.33	Persentase	44.44	-	55.55		66.67		77.77		88.88		88.88		Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase Desa/Kelurahan dengan Kategori Minimal Maju	0	Persentase	0	-	42.86	165,000,000	71.43	169,800,000	85.71	173,790,000	100.00	177,979,500	100.00	177,979,500	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Desa dengan Laporan Pertanggungjawaban Baik	0	Persentase	14.29	-	42.86		57.14		85.71		100.00		100.00		Kecamatan Sindang Jaya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Desa/Kelurahan dengan kategori Maju	60	Persentase	0	-	70.00	2,242,793,334	75.00	2,314,901,566	80.00	2,287,230,880	85.00	2,309,783,485	85.00	2,309,783,485	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase Desa/Kelurahan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik	60	Persentase	60.00	-	70.00		75.00		80.00		85.00		85.00		Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan	0		0	-		188,615,000		408,000,000		432,000,000		435,000,000		435,000,000	Kecamatan Solear
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	0	Persentase	0	-	0.00	192,000,000	11.11	315,000,000	22.22	340,000,000	33.33	350,000,000	44.44	350,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	40.03	Persentase	42.00	-	44.44		55.55		66.67		77.77		88.88		Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan	75	Persentase	0	-	80.00	172,000,000	85.00	200,000,000	85.00	177,000,000	90.00	180,000,000	90.00	180,000,000	Kecamatan Sukamulya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan	75	Persentase	0	-	85.00	145,500,000	90.00	145,500,000	95.00	155,500,000	100.00	155,500,000	100.00	155,500,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.40	Program Pelayanan Umum Kecamatan	prosentase administrasi pemerintahan pelayanan umum di kecamatan	70	Persentase	0	-	85	603,933,000	90.00	603,933,000	93	603,933,000	95	603,933,000	100.00	603,933,000	Kecamatan Tigaraksa
		Persentase pemenuhan pelayanan sesuai standar	100	Persentase	0	-	100	949,400,000	100.00	976,120,000	100	987,376,000	100	999,195,000	100.00	999,195,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	75	Persentase	0	-	80.00	850,750,000	85.00	850,750,000	85.00	850,750,000	90.00	850,750,000	90.00	850,750,000	Kecamatan Panongan
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	75	Persentase	0	-	80	1,682,400,000	85.00	1,682,400,000	85	1,682,400,000	90	1,682,400,000	90.00	1,682,400,000	Kecamatan Curug
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	0		0	-		-		-		-		-			Kecamatan Legok

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	80	Persentase	0	-	85.00	2,538,174,000	90.00	2,994,188,783	95.00	3,106,648,905	100.00	3,224,728,632	100.00	3,224,728,632	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	20.76	Persentase	0	-	40.00	602,400,000	45.00	604,900,000	50.00	609,900,000	65.00	614,900,000	70.00	614,900,000	Kecamatan Balaraja
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	40	Persentase	45.00		50.00		65.00		75.00		80.00		80.00		Kecamatan Balaraja
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	0	Persentase	0	-	14.29	174,600,000	57.14	176,000,000	85.71	178,000,000	100.00	181,000,000	100.00	181,000,000	Kecamatan Kresek
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	0	Persentase	32.42		55.68		74.07		88.62		100.00		100.00		Kecamatan Kresek
		Prosentaase Pemenuhan ProgramPelayanan Umum Kecamatan	100	Persentase	0	-	100.00	100,000,000	100.00	200,000,000	100.00	210,000,000	100.00	225,000,000	100.00	225,000,000	Kecamatan Kronjo

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Kelurahan	0	Persentase	0	-	71.43	505,800,000	74.73	455,600,000	87.27	477,000,000	90.00	478,400,000	90.00	478,400,000	Kecamatan Mauk
		Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	81.08	Nilai	0	-	85.08	831,909,000	87.08	776,909,000	89.08	835,000,000	91.08	780,000,000	91.08	780,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	82	Persentase	0	-	87.00	488,000,000	89.00	444,000,000	90.00	467,000,000	92.00	562,000,000	92.00	562,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	75	Persentase	0	-	85.00	525,000,000	90.00	575,000,000	95.00	575,000,000	100.00	575,000,000	100.00	575,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Persentase pemenuhan pelayanan umum kecamatan	100	Persentase	0	-	100.00	289,200,000	100.00	300,000,000	100.00	315,000,000	100.00	330,000,000	100.00	330,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	0	Persentase	0	-	75.00	425,350,000	80.00	438,000,000	85.00	454,000,000	90.00	472,000,000	90.00	472,000,000	Kecamatan Pakuhaji

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	0	Persentase	70.00		75.00		80.00		85.00		90.00		90.00		Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	85	Persentase	0	-	95.00	866,133,500	100.00	941,133,500	100.00	941,133,500	100.00	941,133,500	100.00	941,133,500	Kecamatan Kosambi
		Prosentase Masyarakat Yang Melakukan Perekaman e- KTP	0	Persentase	32.42		55.68		74.07		88.62		100.00		100.00		Kecamatan Kosambi
		prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan	60	Persentase	0	-	70.00	305,950,000	75.00	351,842,500	80.00	404,618,876	85.00	465,311,706	85.00	465,311,706	Kecamatan Pagedangan
		Persentase pemenuhan pelayanan umum kecamatan	0	Persentase	0	-	70.00	336,780,500	75.00	340,880,000	80.00	340,880,000	85.00	340,880,000	85.00	340,880,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	12.5	Persentase	0	-	50.00	430,704,000	62.50	467,400,000	87.50	441,100,000	100.00	450,800,000	100.00	450,800,000	Kecamatan Jayanti

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		prosentase pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan	70	Persentase	0	-	85.00	270,000,000	85.00	300,000,000	85.00	320,000,000	85.00	350,000,000	85.00	350,000,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	0	Persentase	0	-	15.30	225,000,000	57.14	225,000,000	58.50	225,000,000	75.25	225,000,000	100.00	225,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Prosentase masyarakat yang melakukan Perekaman KTP	0	Persentase	32.42		55.68		65.12		70.85		86.46		100.00		Kecamatan Sukadiri
		Program Pelayanan Umum Di Kecamatan	80	Persentase	0	-	82.50	461,892,100	85.00	461,892,100	87.50	461,892,100	90.00	461,892,100	90.00	461,892,100	Kecamatan Cisauk
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	0	Persentase	0	-	74.07	188,600,000	88.62	255,000,000	100.00	270,000,000	100.00	275,000,000	100.00	275,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase Masyarakat yang Melakukan Perekaman KTP	0	Persentase	0	-	92.00	356,640,000	93.00	399,750,000	94.00	404,737,500	95.00	409,973,875	95.00	409,973,875	Kecamatan Sindang Jaya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Masyarakat yang melakukan perekaman KTP	80	Persentase	0	-	81.00	3,784,817,944	82.00	3,849,006,180	83.00	3,886,231,200	84.00	3,925,601,008	84.00	3,925,601,008	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	32.42	Persentase	0	-	74.07	343,285,000	88.62	537,000,000	100.00	565,000,000	100.00	589,920,500	100.00	589,920,500	Kecamatan Solear
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	32.42	Persentase	55.68		74.07		88.62		100.00		100.00		100.00		Kecamatan Solear
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	55	Persentase	0	-	0.00	189,226,000	-	189,226,000	100.00	349,226,000	0.00	189,226,000	100.00	189,226,000	Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	70	Persentase	75.00		80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan	75	Persentase	0	-	80.00	379,575,000	85.00	379,575,000	85.00	379,575,000	90.00	379,575,000	90.00	379,575,000	Kecamatan Sukamulya

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	75	Persentase	0	-	85.00	275,000,000	90.00	275,000,000	95.00	305,000,000	100.00	305,000,000	100.00	305,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
4.1.3	Meningkatny a Integritas Aparatur	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	0	Indeks	57		60		64		67		70		70		
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembanga n Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya laporan stock opname dan cash opname	1	Dokumen	1	36,850,000	1	-	1.00	-	1	-	1	-	5.00		Inspektorat Kabupaten
3002.16	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan	84	Persentase	84	4,486,255,000	82	1,791,200,000	80.00	1,832,000,000	78	1,995,000,000	76	2,042,500,000	76.00	2,042,500,000	Inspektorat Kabupaten
3002.18	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Prosentase capaian nilai maturitas OPD Minimal	3.0602	Persentase	3.08	460,710,000	3.1	2,050,000,000	3.15	2,335,000,000	3.18	3,322,500,000	3.2	2,645,000,000	3.20	2,645,000,000	Inspektorat Kabupaten

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3002.17	Program Peningkatan Profesionalism e tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase Aparatur Pengawasan Profesional	48	Persentase	58	788,512,750	68	820,000,000	80.00	830,000,000	90	840,000,000	100	875,000,000	100.00	875,000,000	Inspektorat Kabupaten
3005.15	Program Perencanaan, penataan dan pengembanga n aparatur	Prosentase aparatur yang mendapatkan pengembanga n karier	85	Persentase	100	2,357,042,250	0	2,394,726,250	-	2,566,945,763	0	2,695,293,051	0	2,830,057,703	100.00	2,830,057,703	Badan Kepegawaia n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia
		Prosentase ASN yang mendapatkan ujian kompetensi, ujian dinas, penyesuaian ijazah, tugas belajar sesuai syarat kompetensi jabatan	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaia n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia
		Prosentase CPNS yang diterima sesuai formasi	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaia n dan Pengemban gan Sumber Daya Manusia

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3005.18	Program Peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja pegawai	Prosentase penanganan disiplin aparatur	100	Persentase	100	538,398,500	0	853,398,500	-	895,318,425	0	938,584,346	0	983,263,564	100.00	983,263,564	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan sesuai SOP	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Prosentase rata-rata kehadiran ASN	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.19	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Prosentase aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi aparatur	99	Persentase	100	4,759,678,000	0	4,678,770,250	-	4,912,708,763	0	5,158,344,201	0	5,416,261,411	100.00	5,416,261,411	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Prosentase peningkatan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis ASN sesuai SKJ AKD	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	Sumber Daya Manusia
3005.16	Program Pelayanan dan penempatan aparatur	Prosentase aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	Persentase	100	436,815,000	0	436,815,000	-	458,655,750	0	481,588,538	0	505,667,965	100.00	505,667,965	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Prosentase jabatan struktural dan fungsional yang terisi sesuai syarat jabatan	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Prosentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.17	Program Peningkatan kualitas data dan	Prosentase akurasi data dan informasi kepegawaian yang akurat	100	Persentase	100	422,290,000	0	399,290,000	-	725,217,188	0	771,478,047	0	818,801,949	100.00	818,801,949	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	informasi kepegawaian																Daya Manusia
		Prosentase data kepegawaian yang mutakhir dan terkini	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks Profesionalitas ASN	0	Nilai	0		0		75.00		80		85		85.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah																
5.1	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	85	Persentase	87		89		91		93		95	95	95		
5.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	85	Persentase	87		89		91		93		95	95	95		
1103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	0	Persentase	29.6	173,414,583,260	0	-	-	-	0	-	0	-	29.60		Dinas Bina Marga dan Sumber

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	Daya Air
		Ketersediaan Data Perencanaan Pembanguna n Jalan Jembatan	0	Persent ase	100		0		-		0		0		100.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.16	Program Pembangunan saluran drainase/goro ng-gorong	tersedianya Perbup tentang sistem Drainase Kabupaten Tangerang	0	Persent ase	100	150,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.18	Program rehabilitasi/pe meliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Terpelihara	0	Ruas	114	22,849,000,0 00	0	-	-	-	0	-	0	-	114.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1103.20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase Ketersediaan Data Pengendalian dan pengawasan Jalan dan Jembatan	0	Persentase	50	2,124,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	50.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Bangunan Sumber Daya Air yang Terintegrasi	0	Persentase	60	1,833,250,000	0	-	-	-	0	-	0	-	60.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaa n	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Kondisi Baik	0	Persentase	80	3,115,300,000	0	-	-	-	0	-	0	-	80.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.24	Program pengembanga n dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang terbangun	0	Persentase	4.2	19,089,889,300	0	-	-	-	0	-	0	-	4.20		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ketersediaan Data Perencanaan Sumber Daya Air	0	Persentase	100		0		-		0		0		100.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Partisipasi Kelompok Masyarakat Mandiri Pengelolaan Air	0	Persentase	7.7	282,400,000	0	-	-	-	0	-	0	-	7.70		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Panjang Saluran yang terpelihara	0	Persentase	35.62	23,276,269,900	0	-	-	-	0	-	0	-	35.62		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Persentase pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	0	Persentase	20		0		-		0		0		20.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.28	Program pengendalian banjir	hasil Koordinasi Pengendalian Banjir dengan instansi terkait	0	Dokumen	1	139,500,000	0	-	-	-	0	-	0	-	1.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1103.35	Program Pengolahan Data Penyusunan Perencanaan Jalan Dan Sumber Daya Air	Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Bangunan Sumber Daya Air yang Terintegrasi	0	Persentase	0	-	70	14,286,000,000	80.00	15,585,000,000	90	13,487,000,000	100	8,331,000,000	100.00	8,331,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.37	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	0	Persentase	0	-	50	154,285,000,000	70.00	287,977,000,000	89	138,540,000,000	100	112,127,000,000	100.00	112,127,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Prosentase Penanganan Simpang Jalan	0	Persentase	0		15.4		61.50		84.6		100		100.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.36	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang terbangun	0	Persentase	0	-	14.15	126,013,000,000	20.00	140,880,000,000	29	153,841,000,000	37	63,961,000,000	37.00	63,961,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Jumlah Daerah Irigasi pada Lahan Pertanian berkelanjutan dalam kondisi baik	0	Lokasi	0		6		8.00		8		0		22.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1103.31	Program Penataan Ruang	Persentase pemenuhan RDTR	0	Persentase	25	2,780,000,000	50	2,767,500,000	66.60	3,030,000,000	83.3	3,543,000,000	100	3,460,000,000	100.00	3,460,000,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.32	Program Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Dan Tata Ruang	Prosentase kesesuaian Rencana Tapak terhadap pembangunan	100	Persentase	100	2,150,000,000	100	2,320,000,000	100.00	2,320,000,000	100	2,320,000,000	100	2,320,000,000	100.00	2,320,000,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.33	Program Pembangunan Gedung Pemerintahan	Pemenuhan pembangunan gedung pemerintahan	10	Persentase	28	175,505,760,000	54	260,910,000,000	75.00	257,690,000,000	90	135,030,000,000	100	97,050,000,000	100.00	97,050,000,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.34	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar	Terlaksanany a Program Pembanguna n Sarana Dan Prasarana Dasar	207	RKB	324	181,000,000,000	272	349,000,000,000	272.00	302,000,000,000	266	345,500,000,000	266	341,500,000,000	1.60	341,500,000,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
		Terlaksanany a Program Pembanguna n Sarana Dan Prasarana Dasar	8	Puskesmas	4		3		3.00		3		1		14.00		Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Terlaksanany a Program Pembanguna n Sarana Dan Prasarana Dasar	0	Rumah sakit	0		5		35.00		40		10		100.00		Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1104.17	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Desa dan Kelurahan yang tanggap bencana	17	Angka	53	559,975,000	54	-	55.00	-	56	-	56	-	56.00		Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1104.20	Program Kedaruratan Dan Sarana Prasarana	Rata-Rata Respontime	20	Menit	20	14,956,020,000	20	-	15.00	-	15	-	15	-	15.00		Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1104.21	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulang an Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana yang tertangani	20	Persentase	100	479,580,000	100	-	100.00	-	100	-	100	-	100.00		Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
1104.15	program pengembanga n perumahan	Prosentase PSU dalam Aset	13.4	Persentase	18.35	3,109,370,000	21.22	4,466,800,000	24.10	9,296,268,750	26.98	9,326,474,220	29.86	9,357,434,824	29.86	9,357,434,824	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Pembinaan Penyelenggaraan Rumah susun dan Apartemen	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.16	program lingkungan sehat Perumahan dan Permukiman	Cakupan Sarana Air bersih	77.33	Persentase	77.83	22,924,400,000	78.33	21,722,312,500	78.83	22,265,370,315	79.33	22,822,004,572	80	23,392,554,684	80.00	23,392,554,684	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.18	Program pengelolaan areal pemakaman	Cakupan TPU yang memenuhi Standar	85	Persentase	60	5,927,110,000	65	7,006,876,000	70.00	7,637,047,901	75	7,667,974,098	80	8,199,673,450	80.00	8,199,673,450	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.19	Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	Cakupan layanan kawasan permukiman	6.02	Persentase	6.16	38,067,500,000	6.16	39,970,875,000	6.16	41,969,418,750	6.16	44,067,889,690	6.16	46,271,283,893	30.81	46,271,283,893	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.22	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Cakupan Pemenuhan Perencanaan pengembangan kawasan Permukiman	100	Persentase	100	5,866,942,250	100	4,310,000,000	100.00	4,360,000,000	100	4,380,000,000	0	4,410,000,000	100.00	4,410,000,000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1104.23	Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Prosentase kapasitas lumpur tinja	0	Persenta se	20.45	3,027,934,000	30	3,448,632,350	35.00	15,441,098,159	40	5,245,375,613	45	5,321,510,004	45.00	5,321,510,004	Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n
		Jumlah Penerima Masyarakat yang rawan air	24	Lokasi	24		24		24.00		24		24		120.00		Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n
1104.25	Program Gebrak Pakumis	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	7.94	Persenta se	15.87	27,714,700,000	23.81	34,665,000,000	31.75	34,735,000,000	39.68	34,775,000,000	47.62	34,815,000,000	47.62	34,815,000,000	Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n
1105.23	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatka n pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulang an kebakaran dan bencana lainnya	0	Kali	3	-		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000	Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah
	Program Kedaruratan	Meningkatka n kesiagaan pencegahan dan penanggulang an bahaya kebakaran untuk Petugas Pemadam Kebakaran (piket 1 x 24 Jam)															Badan Penanggul

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1105.24	Dan Sarana Prasarana		0	Bulan	12	-		36,550,000,000		66,300,000,000		9,450,000,000		17,800,000,000		17,800,000,000	a ngan Bencana Daerah
1105.25	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulang an Korban Bencana Alam	Terlaksanany a penyediaan Buffer Stock Bencana untuk Korban Bencana	0	Paket	1	-		900,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000	Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah
1204.15	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun	98	Persenta se	100	216,380,018,998	100	497,265,000,00 0	100.00	108,230,000,00 0	100	36,630,000,000	100	22,510,000,000	100.00	22,510,000,000	Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n
1209.15	Program Manajemen Lalu Lintas	Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	18	Titik	2	15,896,000,000	3	11,614,000,000	4.00	24,886,000,000	4	22,004,000,000	5	25,456,000,000	18.00	25,456,000,000	Dinas Perhubung a n
1209.16	Program Keselamatan Lalu Lintas	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	435	Angka	413	8,285,000,000	392	16,780,000,000	372.00	37,065,000,000	353	26,165,000,000	335	38,175,000,000	335.00	38,175,000,000	Dinas Perhubung a n

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1209.17	Program Pelayanan Angkutan Umum (SITRAM)	Pengembanga n Jaringan dalam Trayek dan tidak dalam Trayek	19	Jaringan	1	1,550,000,000	1	1,950,000,000	1.00	2,450,000,000	2	3,250,000,000	2	3,700,000,000	7.00	3,700,000,000	Dinas Perhubung a n
1209.18	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	Prosentase Ketersediaan PJU	10	Persenta se	10	37,450,000,000	10	31,150,000,000	10.00	29,800,000,000	10	31,120,000,000	10	37,100,000,000	10.00	37,100,000,000	Dinas Perhubung a n
5.2	Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup	IKLH	48.9	Indeks	50		52		54		56		58		58		
5.2.1	Meningkatny a Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	48.9	Indeks	50		52		54		56		58		58		
1205.15	Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan sampah di bank sampah	2500	Ton/Hari	1.05	2,972,408,132,0 00	2.1	53,967,964,000	3.15	54,017,964,000	4.2	54,067,964,000	5.25	54,092,964,000	5.25	54,092,964,000	Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		meningkatnya pengelolaan sampah di TPSR	2500	Ton/Hari	11.2		22.4		33.60		44.8		56		56.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	meningkatnya kualitas udara yang cukup	66.5	Nilai	67	5,399,971,000	67.5	6,340,000,000	68.00	6,390,000,000	68.5	6,390,000,000	69	6,390,000,000	69.00	6,390,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		meningkatnya kualitas air	55	Nilai	55.5		56		56.50		57		57.5		57.50		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.17	Program Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam	0	Persentase	10	250,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	10.00	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1205.18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas akses informasi sumber daya alam	0	Persent ase	10	141,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	10.00	141,000,000	Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an
1205.19	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Meningkatnya jumlah rth yang dikelola	0	Kecam atan	5	5,500,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	5.00	5,500,000,00 0	Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an
1205.20	Program Penunjang Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	0	Persent ase	10	1,480,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	10.00	1,480,000,00 0	Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an
1205.21	Program Pengelolaan RTH DAN Konservasi Sumber Daya Alam	meningkatnya kualitas SDA dalam pengelolaan dan perlidungan konservasi SDA	0 ha	HA	0	-	5	11,650,000,0 00	5.00	11,650,000,0 00	5	11,650,000,0 00	5	11,650,000,00 0	25.00	11,650,000,0 00	Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1205.22	Program Informasi Dan Tata Lingkungan Hidup	meningkatnya Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	61.76	Persent ase	65.71	-	70.0 7	2,550,000,00 0	75.35	2,550,000,00 0	80.23	2,550,000,00 0	85.02	2,550,000,000	85.02	2,550,000,00 0	Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an
1205.23	Program penunjang kebersihan dan lingkungan hidup	meningkatnya kualitas kendaraan yang layak operasional	196	Kendar aan	196	10,500,000,0 00	223	9,023,000,00 0	223.00	8,850,000,00 0	223	8,850,000,00 0	223	8,850,000,000	223.00	8,850,000,00 0	Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an
6	Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.																
6.1	Meningkatka n Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah	Indeks Inovasi Daerah	-	Indeks	20		25		30		35		40		40		
6.1.1	Meningkatny a Kinerja Inovasi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilka n inovasi daerah	11	Jumla h	25		35		45		55		62		62		
1207.15	Program Penataan dan Pembinaan Desa	Prosentase Pemerintah Desa Berkinerja Baik	9.75	Persent ase	16.26	-	28.4 6	650,000,000	32.52	1,220,000,00 0	36.59	650,000,000	40.65	1,100,000,000	40.65	1,100,000,00 0	Dinas Pemberd aya an Masyara kat dan Pemerint ah an

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	Desa
1207.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase BUMDes yang Berkembang	14.22	Persentase	24.39	777,000,000	28.46	1,100,000,000	32.52	1,100,000,000	36.59	1,100,000,000	40.65	1,100,000,000	40.65	1,100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah an Desa
1207.18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa	14.22	Persentase	24.39	455,000,000	28.46	450,000,000	32.52	450,000,000	36.59	450,000,000	40.65	450,000,000	40.65	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah an Desa
1207.19	Program Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di fasilitasi	15	Desa	29	1,806,000,000	54	2,750,000,000	79.00	2,250,000,000	104	2,750,000,000	129	2,250,000,000	129.00	2,250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah an Desa
1207.21	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Baik	8.1	Persentase	16.26	682,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	16.26		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerint

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	ah an Desa
1207.22	Program Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Desa yang Pengelolaan keuangan sesuai SAP dan Tertib Asset	6.1	Persentase	11.79	1,110,000,000	21.95	800,000,000	32.11	800,000,000	42.28	800,000,000	52.44	800,000,000	52.44	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah an Desa
1213.15	Program penyadaran, pemberdayaan , dan pengembanga n potensi kepemimpinan , kewirausahaa n serta kepeloporan pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	90	Persentase	98	3,619,340,000	98	5,385,000,000	98.00	5,750,000,000	98	6,200,000,000	100	6,800,000,000	100.00	6,800,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata
3003.20	Program Penelitian dan Pengembanga n Pembangunan Daerah	Prosentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang	0	Persentase	100.00	1,014,500,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00		Badan Perencanaa n Pembangun an Daerah

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram	Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun	Satua n	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangg ung jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)		
					Target	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah inovasi yang didampingi	0	Dokume n	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencan aa n Pembang un an Daerah

Tabel 6.11 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 (sesudah perubahan)

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Misi 1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.																
Tujuan 1.1. Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	1.03	1.04		1.05		1.06		1.07		1.08		1.08		
Sasaran 1.1. 1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	Persen	70%	101.86%		148.40%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Quran Jenjang SD DAN SMP		0	0	-	0	-	10,000	1,465,734,000	10,000	1,516,390,000	10,000	1,516,390,000	30,000	4,498,514,000	Dinas Pendidika n

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum		100%	100%	4,320,000,000	100%	4,510,000,000	100%	9,401,680,000	100%	7,050,000,000	100%	6,240,000,000	100%	31,521,680,000	Satpol PP
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Penyelesaian Permasalahan dibidang Kesra	Persen	100%	0%	-	0%	-	100%	4,213,835,000	100%	4,701,646,500	100%	5,046,811,150	100%	13,962,292,650	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Capaian Efektifitas Penguatan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa		80%	80%	789,050,000	80%	471,665,000	80%	405,452,400	80%	3,922,650,000	80%	8,583,750,000	80%	14,172,567,400	Kesbangpol
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Tigaraksa		14.29	71.43	220,000,000	71.43	220,000,000	42.86	415,000,000	57.14	630,000,000	71.43	630,000,000	57.14	1,485,000,014	Kec. Tigaraksa
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cikupa		55	58	412,724,000	60	126,290,000	63	378,967,000	67	270,336,900	70	360,000,000	70	1,513,543,400	Kec. Cikupa
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Panongan		71.43%	71.43%	130,374,000	71.43%	828,000,000	42.86%	116,641,000	57.10%	116,641,000	71.40%	116,641,000	71.43%	116,641,000	Kec. Panongan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Curug		42,86	42,86	464,870,000	50	561,819,000	55	453,233,690	57.14	586,431,500	65	586,431,500	65	586,431,500	Kec. CURUG
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Legok		14%	14%	221,360,000	25%	152,725,000	40%	168,691,700	60%	300,000,000	75%	300,000,000	71.43%	300,000,000	Kec. Legok
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pasar Kemis		75%	75%	405,304,500	80	436,198,125	85	314,802,000	90	354,098,300	100	379,508,130	100%	379,508,130	Kec. Pasar Kemis
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Balaraja		71.43%	71.43%	286,132,500	71.43%	178,050,000	42.86%	197,193,900	57.10%	185,896,500	71.40%	185,896,500	71.43%	165,000,000	Kec. Balaraja
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kresek		71.43%	71.43%	40,390,000	71.43%	46,330,000	42.86%	45,000,000	57.10%	45,000,000	71.40%	45,000,000	71.43%	45,000,000	Kec. Kresek

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kronjo		71.43%	71.43%	195,000,000	71.43%	145,000,000	42.86%	84,299,710	57.10%	150,000,000	71.40%	165,000,000	71.43%	165,000,000	Kec. Kronjo
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Mauk		71.43%	71.43%	286,132,500	71.43%	178,050,000	42.86%	97,194,000	57.10%	159,900,000	71.40%	165,000,000	71.43%	165,000,000	Kec. Mauk
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Rajeg		71.43%	70.00%	60,300,000	55.00%	24,900,000	45.00%	86,136,100	30.00%	110,000,000	20.00%	125,000,000	20.00%	125,000,000	Kec. Rajeg
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sepatan		14%	20%	133,632,000	25%	81,980,000	40%	104,040,000	60%	166,400,000	75%	207,500,000	75.00%	207,500,000	Kec. SEPATAN
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Teluknaga		100%	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	Kec. Teluknaga

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pakuhaji		71.43%	71.43%	153,175,000	71.43%	425,867,500	42.86%	271,805,150	57.10%	313,500,000	71.40%	327,150,000	71.43%	327,150,000	Kec. Pakuhaji
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kosambi		71.43%	71.43%	599,000,000	71.43%	160,900,000	42.86%	442,786,000	57.10%	446,000,000	71.40%	446,000,000	71.43%	446,000,000	Kec. Kosambi
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cisauk		62.50%	68.75%	168,500,000	75.00%	46,746,000	81.25%	110,925,800	87.50%	110,890,000	93%	110,890,000	93%	110,890,000	Kec. Cisauk
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Gunung Kaler		71%	71%	168,500,000	75.00%	46,746,000	100%	70,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	385,246,000	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Jambe		71%	71%	143,000,000	71%	73,850,000	43%	115,784,900	57%	115,784,900	71%	127,363,390	71%	127,363,390	Kec. Jambe

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Jayanti		14.00%	20.00%	198,600,000	25.00%	71,100,000	35.00%	71,100,000	55.00%	90,955,000	75.00%	90,000,000	75.00%	90,000,000	Kec. Jayanti
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kemiri		71.43%	71.43%	286,132,500	71.43%	178,050,000	42.86%	97,194,000	57.10%	159,900,000	71.40%	165,000,000	71.43%	165,000,000	Kec. Kemiri
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Mekar Baru		71.43%	71.43%	330,000,000	71.43%	76,122,200	42.86%	132,987,700	57.10%	145,466,900	71.40%	145,466,900	71.43%	830,043,700	Kec. Mekar Baru
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pagedangan		14%	14%	75,000,000	25%	100,000,000	40%	150,000,000	60%	225,000,000	75%	247,500,000	71.43%	247,500,000	Kec. PAGEDANGAN
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sepatan Timur		100%	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	191,927,960	100%	134,000,000	100%	201,000,000	100%	231,150,000	Kec. Sepatan Timur

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sindang Jaya		100%	100%	179,550,000	100%	121,042,500	100%	204,867,700	100%	153,879,000	100%	196,349,000	100%	196,349,000	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Solear		71,43%	71,43%	195,000,000	71,43%	145,000,000	42,86%	84,299,710	57,1%	150,000,000	71,4%	165,000,000	71,43%	165,000,000	Kec. Solear
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sukamulya		71.43%	71.43%	50,000,000	71.43%	110,000,000	42.86%	110,000,000	57.10%	110,000,000	71.40%	110,000,000	71.43%	110,000,000	Kec. Sukamulya
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sukadiri		14%	14%	133.632.000	25%	81.980.000	40%	104.040.000	60%	166.400.000	75%	207.500.000	75%	207.500.000	Kec. Sukadiri
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kelapa Dua		71,43%	71,43%	737,265,000	71,43%	31,810,007,800	42,86%	150,514,769	57,1%	381,028,300	71,4%	408,000,000	71,43%	408,000,000	Kec. Kelapa Dua

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cisoka			0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	71,4%	408,000,000	71,43%	408,000,000	Kec. Cisoka
Misi 2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.																
Tujuan 2.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Angka IPM	Angka	71.59	71.93		71.92		72.43		72.82		73.26		73.26		
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	69.61	69.79		69.89		69.96		70.08		70.21		70.21		
	Prevalensi stunting	Persen	19%	12%		9%		18%		16%		14%		14%		
	Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	Persen	80%	80%		81%		86%		87%		88%		88%		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					947,338,465,520		539,694,724,008		167,524,671,684		210,802,658,104		287,354,409,527		287,354,409,527	Dinas Kesehatan
	Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100	657,316,000	100	259,770,625	100	3,102,919,730	100	4,514,799,700	100	495,029,840	100	9,029,835,895	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Cakupan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100	45,841,875	100	45,841,875	100	6,310,782,000	100	2,812,034,500	100	329,320,000	100	9,543,820,250	Dinas Kesehatan
	Cakupan Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100%	100	174,850,000	100	21,676,350	100	175,103,800	100	214,780,000	100	175,745,000	100	762,155,150	Dinas Kesehatan
	Cakupan Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100%	100	329,650,000	100	43,352,700	100	2,350,989,200	100	3,147,558,200	100	128,035,000	100	5,999,585,100	Dinas Kesehatan
	Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100%	100	175,500,000	100	74,654,000	100	350,750,700	100	1,508,719,600	100	127,525,000	100	2,237,149,300	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Cakupan Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100%	100	430,896,000	100	85,080,000	100	598,535,900	100	739,727,500	100	196,595,000	100	2,050,834,400	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100%	100	559,350,000	100	228,500,000	100	88,750,000	100	149,520,100	100	166,780,000	100	1,192,900,100	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100%	100	150,000,000	100	-	100	53,820,000	100	70,005,000	100	80,690,000	100	354,515,000	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100%	100	200,000,000	100	-	100	52,300,000	100	1,496,801,800	100	97,780,000	100	1,846,881,800	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Cakupan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persen	100%	100	837,300,000	100	-	100	223,960,600	100	558,016,000	100	340,860,000	100	1,960,136,600	Dinas Kesehatan
	Cakupan orang terduga TB mendapatkan pelayananan TB sesuai standar	Persen	100%	100	2,375,800,000	100	5,195,273,534	100	4,745,869,650	100	7,431,533,750	100	1,222,114,550	100	20,970,591,484	Dinas Kesehatan
	Cakupan Orang Beresiko terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persen	100%	100	820,650,000	100	94,000,000	100	709,403,000	100	880,238,000	100	1,047,611,000	100	3,551,902,000	Dinas Kesehatan
	Persentase Balita Stunting	Persen	23,20%	23	2,478,420,000	20	1,238,870,000	20	3,625,827,300	20	8,755,189,500	20	1,058,610,000	20	17,156,916,800	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Respon Time Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	Persen	100%	100	363,500,000	100	34,613,714,712	100	60,337,144,865	100	11,276,159,240	100	7,050,950,000	100	113,641,468,817	Dinas Kesehatan
	Persentase Akses Sanitasi yang Layak	Persen	73%	74	3,205,500,000	78	3,001,759,000	80	1,788,192,725	83	4,262,296,100	84	2,919,293,900	84	15,177,041,725	Dinas Kesehatan
	Persentase Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	80%	80	71,000,000,000	81	83,105,777,500	82	74,573,717,052	83	91,143,048,096	84	91,143,048,096	84	410,965,590,744	Dinas Kesehatan
	Persentase penerapan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan FKTP dan FKTL	Persen	100%	100	377,159,780	100	596,174,800	100	737,961,950	100	859,160,000	100	1,259,091,500	100	3,829,548,030	Dinas Kesehatan
	Persentase Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas	Persen	100%	100	-	100	-	100	2,717,587,200	100	2,610,080,000	100	3,610,080,000	100	8,937,747,200	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Fasilitas Kesehatan pemerintah yang Terakreditasi minimal utama di Kabupaten/Kota	Persen	34%	-	1,240,700,000	18	2,312,055,000	36	2,985,041,200	48	1,156,619,880	70	1,577,580,000	70	9,271,996,080	Dinas Kesehatan
	Capaian Bed Occupacy Ratio (BOR) Rumah Sakit Pemerintah	Persen	80%	75	5,600,000,000	75	15,196,353,000	80	400,472,005,019	80	126,364,143,700	80	11,780,725,000	80	559,413,226,719	Dinas Kesehatan
	Persentase RS Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai izin operasional dalam kurun waktu satu tahun	Persen	100%	100	95,975,000	100	13,275,000	100	15,070,000	100	20,795,000	100	67,125,000	100	212,240,000	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persen	100%	70	796,466,114,200	72	51,365,540,438	75	200,651,660,266	78	184,256,490,835	80	398,602,716,401	80	1,631,342,522,140	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase pelayanan rujukan melalui Call Center PSC 119	Persen	100%	60	1,086,875,000	70	1,185,806,000	75	1,185,000,000	80	1,303,500,000	85	1,459,920,000	85	6,221,101,000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persen	65%	100	76,490,000	100	66,179,000	100	33,342,167,200	100	1,926,515,200	100	2,034,715,700	100	37,446,067,100	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persen	75%	100	105,500,000	100	29,875,000	100	32,179,900	100	40,214,900	100	68,256,900	100	276,026,700	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase P-IRT yang sesuai standar	Persen	76%	76	109,350,000	78	403,761,000	80	535,283,000	82	495,687,300	84	50,800,000	84	1,594,881,300	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	Persen	76%	76	36,675,000	78	76,082,750	80	71,439,280	82	80,412,020	84	66,814,000	84	331,423,050	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	Persen	76%	76	109,350,000	78	403,761,000	80	69,437,300	82	63,707,000	84	176,465,500	84	822,720,800	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Organisasi Kemitraan Bidang Kesehatan	Persen	60%	40	3,242,400,000	45	2,302,285,000	48	3,473,510,000	56	1,957,000,000	65	2,489,240,000	65	13,464,435,000	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	Persen	60%	60	-	61	-	65	-	67	-	70	350,000,000	70	350,000,000	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	Persen	75%	75	550,000,000	77	388,400,000	80	701,029,100	83	685,904,800	85	822,810,000	85	3,148,143,900	Dinas Kesehatan
	Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	Persen	79%	78	-	91	-	94	290,741,100	97	299,254,200	100	402,430,000	100	992,425,300	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA																DPPKB
	Presentase PPKBD mandiri		4%	4%	2,809,707,527	4%	3,501,456,660	4%	2,855,200,700	4%	3,244,925,000	4%	3,338,420,000	4%	15,749,709,887	DPPKB
	Persentase KB Baru		5.5%	5%	1,349,071,341	5.3%	1,466,156,165	4.8%	3,626,883,000	4.4%	4,439,178,100	4%	2,863,170,560	4%	13,744,459,166	DPPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Presentase Kelompok ketahanan yang aktif		75%	83,5%	245,000,000.00	83,5%	269,500,000	83,5%	296,450,000	83,5%	282,650,000	83,5%	311,775,000	83,5%	1,405,375,000	DPPKB
Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62.25	61.54		61.53		61.88		62.05		62.11		62.11		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender		100%	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	740,454,600	100%	472,546,800	100%	1,050,000,000	100%	2,638,001,400	DPPPA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif		16.67%	16.67%	400,000,000	16.67%	372,000,000	16.67%	359,999,900	18.48%	308,277,800	18.48%	500,000,000	18.48%	1,940,277,700	DPPPA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 2.1.3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)	Angka	8.27	8.28		8.39		8.41		8.45		8.49		8.49		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI			84.5	401,754,207,113	85	405,571,041,055	92.50	409,064,116,220	93.50	421,792,840,000	94.50	417,285,519,760	95	2,055,467,724,148	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs			65.15	172,180,374,477	65.8	151,496,750,810	75.30	72,575,625,700	77.30	253,364,000,000	79.30	250,964,000,000	79,3	900,580,750,987	Dinas Pendidikan
	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD			28	2,811,709,560	31	270,180,000	42.60	10,318,842,000	45,6	23,783,752,012	48.60	27,545,346,000	48,6	64,729,829,572	Dinas Pendidikan
	ANGKA PARTISIASI MURNI (APM) Kesetaraan			0.16	4,217,564,340	0.15	1,579,264,900	0.13	2,418,022,000	0.12	3,893,752,000	0,11	4,915,346,000	0,11	17,023,949,240	Dinas Pendidikan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan		250,000	37%	2,137,075,000	67%	1,045,005,000	77%	1,191,965,000	87%	1,220,172,000	100%	1,760,000,000	100%	10,824,045,000	DISPERPUSIP
Misi 3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan																
Tujuan 3.1. Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat kemiskinan	Persen	5.18%	5.14%		6.23%		7,12%		7%		6,5%		6,5%		
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5.93%	5.45%		-3.70%		3.07%		5.21%		5.47%		5.47%		
	Tingkat Pengangguran (TPT)	Persen	9.70%	8.91%		13.06%		12.14%		10.99%		9.98%		9.98%		
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pariwisata	Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	Persen	2.98%	2.25%		3.69%		4.32%		5.27%		5.56%		5.56%		
	Penambahan Kunjungan wisatawan	Persen	-	11.00%		-75.00%		2.00%		4.00%		6.00%		6.00%		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian		2%	1%	2,467,050,000	1%	3,145,169,500	1%	1,432,842,191	1%	1,550,000,000	1%	2,000,000,000	1%	10,595,061,691	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian		2%	1%	1,585,000,000	1%	1,117,750,000	1%	928,760,200	1%	830,000,000	1%	800,000,000	1%	5,261,510,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan		1.5%	1.5%	-	1.5%	-	1.5%	-	1.5%	100,000,000	1.5%	200,000,000	1.5%	300,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap		0.51%	0.50%	1,550,000,000	0.50%	1,400,000,000	0.50%	1,450,000,000	0.50%	1,750,000,000	0.50%	1,750,000,000	0.50%	7,900,000,000	DISKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina		0	0	-	0	-	2	240,000,000	0	-	0	-	2	240,000,000	Disporabudpar
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persen	77.3	-27.8		20.1		5.12		5.12		5.12		5.12		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan berusaha	Persen	-	-	-	5	450,000,000	10	200,000,000	15	400,000,000	20	650,000,000	50	1,700,000,000	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investor	Persen	-	20	370,000,000	20	450,000,000	20	275,000,000	20	500,000,000	20	550,000,000	100	2,145,000,000	DPMPTSP
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/skill	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	Persen	63.01%	66.07		65.43		66%		68%		70%		70%		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih		0%	5%	251,030,000	5%	109,450,000	5%	382,189,000	5%	380,000,000	5%	950,000,000	25%	28,210,030,000	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase Lulusan Pelatihan BLK Yang Di Tempatkan		34.80%	35%	2,716,700,000	0%	1,390,777,000	39%	2,134,625,200	42%	4,210,000,000	45%	10,920,000,000	45%	21,372,102,200	Dinas Tenaga Kerja

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja berdasarkan lowongan kerja terdaftar		33.08	93.44	1,286,000,000	94.48	643,895,000	93.24	1,485,123,500	93.30	1,855,000,000	93.50	2,515,000,000	94	9,326,000,000	Dinas Tenaga Kerja
Sasaran 3.1.4. Meningkatnya produk hasil UMKM dan IKM																
	Persentase koperasi aktif	Persen	78,83	49,92		56,80		50,00		55,00		60,00		60,00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang	Jumlah	25.103	16.866		15.866		16.366		16.866		17.366		17.366		Disperindag
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha yang terfasilitasi legalitas usaha	persen	-	-	-	-	-	7,96	1,282,871,300	7,41	1,189,459,300	7,41	1,330,000,000	7.41	3,802,330,600	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	Usaha Mikro	5000	5000	8,095,914,188	5000	5,239,988,472	1512	5,247,758,472	1512	5,289,484,471	1512	5,350,000,000	14536	29,223,145,603	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan /Pembinaan dan Pelatihan		14.01%	14.01	346,730,000	17.34	368,000,000	8.76	368,000,000	19.08	454,310,000	16.03	454,310,000	75.22	1,991,350,000	Disperindag
Misi 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel																
Tujuan 4.1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53	50.37		58.39		60		63		70		70		
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	Nilai	61,87	70,13		70,75		71,37		71,99		72,61		72,61		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan		100%	100%	1,070,213,200	100%	188,230,000	100%	360,306,000	100%	310,265,000	100%	500,000,000	100%	2,429,014,200	Bappeda
	Persentase Dokumen Pelaporan Tepat Waktu		100%	100%	2,053,074,300	100%	746,580,000	100%	1,516,033,645	100%	1,079,804,900	100%	2,000,000,000	100%	7,395,492,845	Bappeda
	Persentase Ketersedian Data Pembangunan		50%	60%	633,560,000	65%	694,370,000	70%	372,545,700	75%	341,228,600	80%	300,000,000	80%	2,341,704,300	Bappeda

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tingkat kepatuhan Penganggaran		100%	100%	1,675,970,000	100%	2,019,812,750	100%	1,445,861,050	100%	1,369,230,410	100%	1,506,153,451	100%	8,017,027,661	BPKAD
	Persentase kinerja penyelenggaraan Akuntansi		92%	92%	2,001,900,000	93%	2,135,727,500	94%	606,424,550	96%	574,284,048	97%	1,213,872,453	97%	6,532,208,551	BPKAD
	Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara OPD		80%	80%	645,685,000	85%	788,343,000	90%	697,678,900	95%	660,701,917	97%	726,772,109	97%	3,519,180,926	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kinerja Pengelolaan Aset Daerah		80%	80%	4,149,513,000	85%	3,871,443,375	90%	6,754,886,800	96%	9,310,127,811	97%	10,216,140,592	97%	34,302,111,578	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang digunausahakan		45%	45%	522,850,000	50%	1,070,050,000	55%	307,008,046	76%	790,736,620	78%	869,810,282	78%	3,560,454,948	BPKAD
	Persentase Kepatuhan wajib pajak		57%	62%	620,912,500	65%	628,000,000	71%	655,650,000	75%	502,060,000	77%	525,000,000	77%	2,931,622,500	BAPENDA
	Persentase Pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah		100%	100%	1,348,564,500	100%	454,495,000	100%	838,336,000	100%	763,625,000	100%	711,490,000	100%	4,116,510,500	BAPENDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Capaian Target Pajak Daerah		123%	100%	4,098,578,000	100%	1,574,705,000	100%	4,166,960,000	100%	3,920,201,102	100%	5,956,750,000	100%	19,717,194,102	BAPENDA
	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah		100%	100%	1,605,000,000	100%	1,475,550,000	100%	833,241,000	100%	497,880,000	100%	1,010,000,000	100%	5,421,671,000	BAPENDA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan keterbukaan Daftar informasi publik		80.55%	80	3,957,050,000	80.55%	2,744,020,000	82%	2,525,000,000	92%	7,700,000,000	100%	8,150,000,000	100%	8,150,000,000	Diskominfo
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase layanan ketersediaan data statistik sektoral		0	0	-	25%	150,000,000	40%	264,000,000	50%	800,000,000	70%	950,000,000	70%	950,000,000	Diskominfo
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Rumusan Kebijakan ekonomi yang di implementasikan		100%	0%	-	0%	-	100%	932,777,000	100%	1,050,000,000	100%	1,200,000,000	100%	3,182,777,000	SEKRETARIAT DAERAH

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang di implementasikan		100%	0%	-	0%	-	100%	505,959,000	100%	900,000,000	100%	1,050,000,000	100%	2,455,959,000	
	Tercapainya Tingkat Kematangan UKPBJ		4					4	1,300,837,100	4	1,430,470,810	4	1,574,012,891	4	4,305,320,801	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Tatakelola Pemerintaha Desa yang Baik		16.67	16,67%	2,207,000,000	22,35%	2,207,000,000	18,29%	5,102,258,740	22,36%	6,546,320,576	20,33%	7,250,000,000	100%	7,250,000,000	DPMPD
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	75,05	83,66		86,36		81		83		89		89		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Perekaman KTP-el		96%	100%	6,136,977,500	95,44%	6,372,703,000	96.99%	2,138,074,000	100%	2,361,456,000	100%	3,002,888,200	100%	20,012,098,700	Disdukcapil
	Cakupan kepemilikan KIA			9%		16%		31,18%		60%		90%		90%		Disdukcapil
	Persentase penduduk yang memiliki NIK			100%		100%	-	95.76%	-	97%	-	99%		100%		Disdukcapil

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun		85%	100%	1,459,305,500	73,26%	1,667,500,000	84.82%	1,093,028,000	97%	1,099,999,800	98%	1,379,760,000	98%	6,699,593,300	Disdukcapil
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Angka	81.31	85	285,000,000	86	1,160,000,000	87	650,000,000	88	700,000,000	90	780,000,000	90	3,575,000,000	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	Persen	-	5	325,000,000	10	780,000,000	20	230,000,000	50	300,000,000	70	300,000,000	70	1,935,000,000	DPMPTSP
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa		32	32.42	1,685,000,000	55.68	1,785,000,000	74.07	2,005,800,000	88.62	2,300,000,000	100	2,300,000,000	88.62	7,775,800,032	Kec. Tigaraksa

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa		88	88.6	3,500,000,000	88.8	3,700,000,000	92.2	3,847,700,000	93.6	4,100,000,000	96.2	4,100,000,000	93.6	15,147,700,088	Kec. Tigaraksa
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa		86.4	87.02	523,370,000	88.64	671,872,500	90.26	913,829,550	92.88	997,071,780	95.52	1,250,000,000	95.52	4,489,472,400	Kec. Cikupa
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa		85	90	17,400,020,000	92	10,570,050,000	95	5,341,537,026	97	6,604,447,600	98	1,300,000,000	98	35,654,252,264	Kec. Cikupa
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Panongan		32.42%	32.42%	545,742,500	55.68%	808,700,000	74.07%	371,000,000	88.86%	350,000,000	100%	355,000,000	100%	355,000,000	Kec. Panongan
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Panongan		32.42%	32.42%	3,166,941,500	55.68%	4,716,263,000	74.07%	5,391,987,792	88.86%	5,467,666,792	100%	5,492,466,792	100%	5,492,466,792	Kec. Panongan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug		70	70	1,431,400,000	73	318,650,000	76	1,482,052,600	78	1,553,400,000	80	1,553,400,000	80.00	1,553,400,000	Kec. CURUG
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug		71,18	71.18	20,154,288,095	75	12,112,988,800	80	7,087,923,169	85.00	2,563,412,180	88.00	2,563,412,180	88.00	2,563,412,180	Kec. CURUG
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	148,837,000	55.68%	97,380,000	74.07%	413,450,000	88.86%	285,000,000	100%	508,000,000	100%	508,000,000	Kec. Legok
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		60%	65%	1,111,576,100	74%	4,195,615,000	80%	3,155,784,034	85%	3,155,784,034	90%	3,985,000,000	90%	3,985,000,000	Kec. Legok
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		80%	80%	2,076,952,750	85%	2,848,152,638	90%	245,502,800	95%	490,000,000	100%	515,000,000	100%	515,000,000	Kec. Pasar Kemis

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		74*%	74*%	2,649,462,000	78%	2,871,868,875	82%	6,733,409,169	86%	6,733,409,169	90%	7,370,550,086	90%	7,370,550,086	Kec. Pasar Kemis
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	545,742,500	55.68%	808,700,000	74.07%	192,000,000	88.86%	172,801,400	100%	355,000,000	100%	355,000,000	Kec. Balaraja
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		32.42%	32.42%	3,551,842,800	55.68%	4,861,424,000	74.07%	4,245,216,594	88.86%	3,258,861,290	100%	3,682,000,000	100%	3,682,000,000	Kec. Balaraja
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	156,000,000	55.68%	156,000,000	74.07%	375,000,000	88.86%	425,000,000	100	275,000,000	100	275,000,000	Kec. Kresek
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		32.42%	32.42%	865,565,100	55.68%	3,028,730,000	74.07%	3,110,000,000	88.86%	3,110,000,000	100	3,320,000,000	100	3,320,000,000	Kec. Kresek

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		67%	67%	120,000,000	70%	182,500,000	75%	200,000,000	80%	235,000,000	95%	245,000,000	95%	245,000,000	Kec. Kronjo
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		67%	67%	16,986,373,800	70%	9,606,400,000	75%	3,603,813,746	80%	5,500,000,000	95%	7,500,000,000	95%	7,500,000,000	Kec. Kronjo
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	545,742,500	55.68%	808,700,000	74.07%	349,024,500	88.86%	350,000,000	100%	355,000,000	100%	355,000,000	Kec. Mauk
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		32.42%	32.42%	3,551,842,800	55.68%	4,861,424,000	74.07%	5,538,562,750	88.86%	3,021,929,964	100%	3,682,000,000	100%	3,682,000,000	Kec. Mauk
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	100,000,000	55.68%	125,000,000	74.07%	152,100,000	88.86%	352,100,000	100%	352,100,000	100%	352,100,000	Kec. Rajeg

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		32.42%	32.42%	4,156,567,500	55.68%	4,186,389,000	74.07%	4,382,482,963	88.86%	2,646,429,964	100%	3,714,600,000	100%	3,714,600,000	Kec. Rajeg
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	184,300,000	55.68%	146,825,000	74.07%	171,752,000	88.86%	475,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Kec. SEPATAN
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		60%	65%	17,353,532,000	74%	8,659,765,000	80%	7,402,228,250	85%	8,657,625,000	90%	10,231,100,000	90%	10,231,100,000	Kec. SEPATAN
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		100%	100%	325,000,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	Kec. Teluknaga
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		100%	100%	325,000,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	Kec. Teluknaga

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisoka		32.42%	32.42%	250,000,000	55.68%	199,200,000	74.07%	278,865,400	88.86%	306,751,940	100%	337,427,134	100%	337,427,134	Kec. Cisoka
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cisoka		32.42%	32.42%	17,188,400,000	55.68%	10,090,290,000	74.07%	4,041,175,828	88.86%	4,445,293,411	100%	4,889,822,752	100%	4,889,822,752	Kec. Cisoka
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	149,850,000	55.68%	157,500,000	74.07%	172,805,000	88.86%	182,000,000	100%	191,100,000	100%	191,100,000	Kec. Pakuhaji
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		32.42%	32.42%	11,708,491,227	55.68%	10,078,378,500	74.07%	2,976,393,768	88.86%	3,266,934,250	100%	3,464,715,500	100%	3,464,715,500	Kec. Pakuhaji
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	130,000,000	55.68%	153,100,000	74.07%	433,344,400	88.86%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	Kec. Kosambi

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		32.42%	32.42%	11,640,504,158	55.68%	8,153,363,625	74.07%	7,939,252,365	88.86%	5,770,300,000	100%	5,770,300,000	100%	5,770,300,000	Kec. Kosambi
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		75.00%	77.50%	206,400,000	80.00%	158,935,000	82.50%	170,840,000	85.00%	160,340,000	87.50%	160,340,000	87.50%	160,340,000	Kec. Cisauk
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		75.00%	75.00%	15,047,218,800	77.50%	10,593,400,000	80.00%	4,000,417,622	82.50%	3,735,273,096	85%	3,735,273,096	85%	3,735,273,096	Kec. Cisauk
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32%	32%	206,400,000	80.00%	158,935,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	890,335,000	Kec. Gunung Kaler
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		32%	32%	15,047,218,800	77.50%	10,593,400,000	90%	3,000,000,000	95%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	34,640,618,800	Kec. Gunung Kaler

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jambe		32%	32%	250,000,000	55.68%	202,100,000	74.07%	282,685,000	88.86%	370,100,000	100%	370,100,000	100%	370,100,000	Kec. Jambe
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Jambe		32%	32%	6,202,019,500	55.68%	4,250,275,000	74.07%	2,115,324,000	88.86%	2,720,578,200	100%	3,303,131,840	100%	3,303,131,840	Kec. Jambe
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.20%	32.20%	190,000,000	40.52%	235,750,000	52.60%	203,294,600	67.89%	186,131,200	73%	256,131,200	73%	256,131,200	Kec. Jayanti
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		60.00%	63.00%	9,257,173,029	65.00%	8,979,425,338	70.00%	2,187,437,495	75.00%	3,477,183,134	85%	4,765,983,000	85%	4,765,983,000	Kec. Jayanti
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	545,742,500	55.68%	808,700,000	74.07%	349,024,500	88.86%	350,000,000	100%	355,000,000	100%	355,000,000	Kec. Kemiri

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		32.42%	32.42%	3,551,842,800	55.68%	4,861,424,000	74.07%	5,538,562,750	88.86%	3,021,929,964	100%	3,682,000,000	100%	3,682,000,000	Kec. Kemiri
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	219,226,000	55.68%	808,700,000	74.07%	364,164,500	88.86%	396,140,000	100%	376,140,000	100%	2,164,370,500	Kec. Mekar Baru
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		32.42%	32.42%	4,638,074,000	55.68%	8,161,000,000	74.07%	3,199,159,691	88.86%	1,758,563,780	100%	1,600,000,000	100%	19,356,797,471	Kec. Mekar Baru
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		25%	32.42%	5,919,530,000	55.68%	6,819,610,000	74.07%	3,123,735,974	88.86%	1,121,679,800	100%	1,841,656,580	100%	1,841,656,580	Kec. PAGEDANGAN
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		60%	65%	5,919,530,000	74%	6,819,610,000	80%	3,123,735,974	85%	1,121,679,800	90%	1,841,656,580	90%	1,841,656,580	Kec. PAGEDANGAN

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		100%	100%	116,700,000	100%	138,600,000	100%	238,305,100	100%	386,051,300	100%	321,711,885	100%	337,797,479	Kec. Sepatan Timur
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		100%	100%	3,450,118,980	100%	4,045,400,232	100%	4,797,589,112	100%	4,638,773,290	100%	2,134,978,205	100%	2,177,677,769	Kec. Sepatan Timur
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	482,114,900	55.68%	220,257,500	74.07%	184,733,400	88.86%	187,111,400	100%	187,111,400	100%	187,111,400	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		60%	74%	19,924,750,000	78%	13,278,000,000	82%	4,870,997,050	86%	3,348,416,158	90%	1,764,916,158	90%	1,764,916,158	Kec. Sindang Jaya
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Solear		67%	67%	120,000,000	70%	182,500,000	75%	200,000,000	80%	235,000,000	95%	245,000,000	95%	245,000,000	Kec. Solear

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Solear		67%	67%	16,986,373,800	70%	9,606,400,000	75%	3,603,813,746	80%	5,500,000,000	95%	7,500,000,000	95%	7,500,000,000	Kec. Solear
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		32.42%	32.42%	150,000,000	55.68%	350,000,000	74.07%	350,000,000	88.86%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Kec. Sukamulya
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		32.42%	32.42%	1,787,000,000	55.68%	2,197,000,000	74.07%	2,747,000,000	88.86%	2,747,000,000	100%	2,982,000,000	100%	2,982,000,000	Kec. Sukamulya
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar		100%	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	520.000.000	100%	495.000.000	100%	720.000.000	100%	150.000.000	Kec. Sukadiri
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik		60%	70%	7.147.987.140	80%	11.760.000.000	82%	4.098.725.454	85%	800.000.000	90%	800.000.000	90%	800.000.000	Kec. Sukadiri

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kelapa Dua	Persen	32,42%	32,42%	545,742,500	55,68%	808,700,000	74,07%	3,305,720,900	88,86%	3,529,253,400	100.00	3,750,000,000	100.00	3,750,000,000	
	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kelapa Dua	Persen	32,42%	32,42%	3,184,782,500	55,68%	4,068,739,078	74,07%	6,897,632,999	88,86%	1,347,498,000	100.00	2,805,000,000	100.00	2,805,000,000	
Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Integritas Aparatur	Survey Eksternal Persepsi Korupsi/ Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Skala	-	3,39		3,59		70,11		70,56		71,01		71,01		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pengadaan ASN, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN		100 %	100 %	822,478,752	100 %	1,105,640,800	100 %	1,220,053,020	100 %	753,264,900	100 %	3,384,000,000	100 %	7,285,437,472	BKPSDM
	Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN		100 %	100 %	283,305,000	100 %	298,030,000	100 %	254,753,800	100 %	340,015,600	100 %	785,000,000	100 %	1,961,104,400	BKPSDM

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin		99,15 %	99,2 %	438,703,500	99,3 %	142,892,500	99,4 %	451,235,600	99,5 %	500,718,000	99,6 %	750,000,000	99,6 %	2,283,549,600	BKPSDM
	Persentase capaian pengembangan karir sesuai kompetensi ASN		15%	20%	912,614,250	40%	1,140,325,000	85%	919,381,600	90%	1,790,908,100	100 %	610,000,000	100 %	5,373,228,950	BKPSDM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan		20%	25%	2,076,443,500	30%	2,299,470,000	35%	3,578,235,000	85%	4,697,330,000	95%	4,859,830,000	95%	17,511,308,500	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3.0602	3.0602	699,690,000	3.0602	497,960,000	3.105	972,480,000	3.1522	315,000,000	3.1808	2,208,211,000	3.1808	4,693,341,000	Inspektorat

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 4.1.4. Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	-	2,98		3		3,08		3,15		3,25		3,25		Diskominfo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan kemanan informasi		0	0	-	0	-	25%	1,740,000,000	35%	3,970,000,000	45%	1,220,000,000	45%	1,220,000,000	Diskominfo
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase penyediaan layanan internet		49,30 %	20,00%	10,000,000,000	20,00%	16,000,000,000	49,3%	27,485,505,500	80,28%	36,350,000,000	100.00	54,750,000,000	100.00	54,750,000,000	Diskominfo
	Prosentase penyediaan layanan aplikasi		51,52%	51,52%	5,000,000,000	60,00%	8,000,000,000	64,95%	13,742,752,750	82,47%	18,175,000,000	100.00	27,375,000,000	100.00	27,375,000,000	Diskominfo
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik		100%	100%	2,009,150,000	100%	2,054,500,000	100%	1,893,593,900	100%	1,540,000,000	100%	2,450,000,000	100%	9,947,243,900	Disdukcapil
Misi 5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah																
Tujuan 5.1. Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks	107,61	103,78		101,41		100,57		99,74		99,11		99,11		
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	Persen	85	87		89		91		93		95		95		
	Presentase Sumber Air Minum Rumah Tangga	Persen	39,53	42,35		41,59		45,00		50,00		60		60		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	81.21	72.89		82.23		85.89		88.89		91.89		91.89		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang Terbangun		0	16.65%	42,005,659,200	35.27%	37,568,130,228	56.84%	81,508,068,812	78.42%	93,734,279,133	100.00%	107,794,421,003	100%	362,610,558,376	DBMSDA
	Presentase Daerah Irigasi LP2B terbangun		0%	0.00	-	7.14	2,288,207,074	42.85%	10,346,220,625	100%	16,000,000,000	100%	-	100%	28,634,427,699	
	Peningkatan fitur sistem aplikasi sumberdaya air yang terintegrasi		50%	60.00	500,000,000	70.00	677,395,750	80%	5,847,533,490	90%	6,724,663,513	100%	7,733,363,040	100%	21,482,955,793	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani		0	35.43%	202,089,788,995	43.50%	115,340,829,600	62.34%	174,173,651,138	81.17%	200,299,698,808	100.00%	230,344,653,630	100%	230,344,653,630	DBMSDA
	Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan dan Jembatan yang terintegrasi		50%	60%	1,833,250,000	70%	677,395,750	80%	5,836,099,332	90%	6,711,514,231	100%	7,718,241,366	100%	7,718,241,366	DBMSDA

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemenuhan RDTR		0%	25 %	2,980,000,000	50%	4,330,000,000	67%	1,750,000,000	83%	4,045,000,000	100%	4,247,250,000	100%	4,247,250,000	DTRB
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Penanganan Kawasan Kumuh		8.56	14.72	21,186,178,000	20.88	20,889,471,700	27.66	35,749,208,000	34.44	40,000,000,000	41.22	40,000,000,000	41.22	157,824,857,700	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas			50%	2,964,470,000	50%	2,413,150,000	60%	3,150,000,000	70%	5,930,000,000	80%	26,900,000,000	80%	41,357,620,000	Dinas Perhubungan
	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten			92%	27,192,775,000	100%	26,136,561,000	100%	36,190,000,000	75%	46,440,000,000	81%	57,140,000,000	81%	193,099,336,000	Dinas Perhubungan
	Pesentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi		33	96.55%	1,736,000,000	0	-	96.55%	800,000,000	96.55%	2,850,000,000	96.55%	1,230,000,000	96.55%	6,616,000,000	Dinas Perhubungan
	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas		18	22.22%	7,515,622,800	33.33%	3,909,060,000	55.56%	6,849,000,000	77.78%	13,293,100,000	100%	17,727,500,000	100%	49,294,282,800	Dinas Perhubungan

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Sarana Air bersih		34.46%	37.00%	22,641,983,950	41.72%	9,203,575,800	36.52%	46,625,683,500	41%	27,150,000,000	46%	30,560,000,000	46%	136,181,243,250	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat			100%	762,257,000	100%	721,438,198	100%	950,141,304	100%	1,200,000,000	100%	1,500,000,000	100%	5,133,836,502	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pemenuhan Perencanaan pengembangan kawasan Permukiman		100%	100%	1,599,782,500	100%	1,808,684,750	100%	2,202,694,538	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	10,611,161,788	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarakat miskin	Persen	81.27	81.28	3,746,882,500	81.30	1,213,999,988	81.36	4,320,587,200	81.37	5,000,000,000	81.38	5,500,000,000	81.38	19,781,469,688	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Prosentase kapasitas lumpur tinja	Persen	20.45	25.45	2,096,111,277	30.45	447,067,852	34.97	2,500,204,547	39.45	14,000,000,000	44.45	4,000,000,000	44.45	23,043,383,676	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
Tujuan 5.2. Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	48,9	47,57		58,68		54,7		55,2		55,7		55,7		

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 5.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	-	67,29		63,49		56,5		57		57,5		57,5		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup		0.75	0.78	1,050,000,000	0,80	1,100,000,000	0.82	1,250,000,000	0.84	1,350,000,000	0.85	1,900,000,000	0.85	6,650,000,000	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH		0,20	0.22	11,500,000,000	0.24	12,000,000,000	0.26	12,500,000,000	0.28	11,500,000,000	0,30	14,000,000,000	0,30	61,500,000,000	DLHK
Sasaran 5.2.2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang ditangani	Persen	23,63	24,13		24,63		25,13		25,63		26,13		26,13		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah terkelola	Persen	35	38	50,250,000,000	41	50,300,000,000	44	55,550,000,000	47	53,850,000,000	50	58,400,000,000	50	268,350,000,000	DLHK
Sasaran 5.2.3. Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang	Indeks Risiko Bencana	Indeks	175,01	163,32		146,93		135		130		125		125		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		50	65	1,600,000,000	75	2,050,000,000	80	2,150,000,000	95	2,400,000,000	100	2,400,000,000	100	10,600,000,000	BPBD

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana		17	53	1,850,000,000	54	2,100,000,000	55	2,225,000,000	56	2,750,000,000	56	2,500,000,000	274	11,425,000,000	BPBD
	Persentase korban bencana yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi		0	100	600,000,000	100	650,000,000	100	650,000,000	100	550,000,000	100	500,000,000	100	2,950,000,000	BPBD
Misi 6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.																
Tujuan 6.1. Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	-	Kurang Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Terinovatif		Terinovatif		
Sasaran 6.1.1. Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah	Persentase inovasi yang diimplementasikan	Persentase	-	25	45	45		56		68		81		81		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang		100%	100%	2,158,000,000	100%	390,060,000	100%	599,923,800	100%	536,354,000	100%	600,000,000	100%	4,284,337,800	Bappeda
	Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan		100%	100%	109,989,700	100%	240,055,000	100%	602,480,000	100%	763,042,800	100%	1,100,000,000	100%	2,815,567,500	Bappeda

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif		10	10%	2,496,000,000	20%	2,496,000,000	20%	15,970,694,685	22,36%	16,302,210,000	25%	17,250,000,000	97,35%	54,514,904,685	DPMPD
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda binaan		90%	14	3,719,340,000	31	1,598,625,000	50	2,153,870,800	73	1,500,000,000	100	5,150,000,000	100	14,121,835,800	Disporabudpar

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan berbagai program, indikator kinerja dan target kinerja *outcome* seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Program-program tersebut tersaji dalam tabel di bawah ini.

TABEL 7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAHTAHUN 2019-2023

Kapasitas Riil / Belanja	Target					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KAPASITAS RIIL KEUANGAN						
Belanja Operasi	3.556.745.486.293	3.943.488.092.710	3.499.389.280.347	3.672.214.208.201	3.783.009.083.572	3.933.832.976.382
Belanja Pegawai	1.379.279.128.155	1.870.732.534.034	1.669.545.457.895	1.753.022.730.790	1.805.613.412.713	1.859.781.815.095
Belanja Barang dan Jasa	1.916.601.637.944	1.922.458.206.350	1.694.051.144.953	1.778.753.702.201	1.832.116.313.267	1.923.722.128.930
Belanja Hibah	234.202.152.594	143.208.266.826	127.631.000.549	131.459.930.565	135.403.728.482	139.465.840.337
Belanja Bantuan Sosial	26.662.567.600	7.089.085.500	8.161.676.950	8.977.844.645	9.875.629.110	10.863.192.020
Belanja Modal	1.763.560.497.024	1.392.365.179.428	976.512.264.804	1.106.139.976.180	1.184.503.391.769	1.262.453.952.263
Belanja Tanah	422.438.669.296	190.663.045.773	174.879.250.388	201.111.137.946	221.222.251.741	236.707.809.363
Belanja Peralatan dan Mesin	264.414.214.369	254.524.178.235	226.101.911.006	260.017.197.657	286.018.917.423	314.620.809.165
Belanja Gedung dan Bangunan	506.810.131.538	374.198.318.620	238.548.536.514	274.330.816.991	288.047.357.841	302.449.725.733
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	534.350.783.768	542.446.989.238	302.538.105.154	332.791.915.669	349.431.511.453	366.903.087.026
Belanja Aset Tetap Lainnya	35.546.698.053	30.532.647.562	34.444.461.742	37.888.907.916	39.783.353.312	41.772.520.978

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tangerang (Sebelum Perubahan)

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																
1101	PENDIDIKAN																
1101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	3,145,000,000	100.00	2,368,974,000	100.00	3,308,000,000	100.00	3,388,000,000	100.00	3,468,000,000	100.00	3,468,000,000	Dinas Pendidikan
1101.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	1,968,000,000	100.00	2,030,976,800	100.00	3,162,000,000	100.00	3,182,000,000	100.00	3,202,000,000	100.00	3,202,000,000	Dinas Pendidikan
1101.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100.00	167,000,000	100.00	97,500,000	100.00	175,000,000	100.00	175,000,000	100.00	175,000,000	100.00	175,000,000	Dinas Pendidikan
1101.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	135,100,000	100.00	96,050,000	100.00	138,000,000	100.00	140,000,000	100.00	141,000,000	100.00	141,000,000	Dinas Pendidikan
1101.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	672,708,000	100.00	429,817,800	100.00	749,726,888	100.00	771,800,000	100.00	794,695,000	100.00	794,695,000	Dinas Pendidikan
1101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD	25.14	Angka	28.00	5,443,146,900	31.00	6,107,916,000	34.00	8,816,850,000	37.00	9,631,850,000	40.00	10,396,850,000	40.00	10,396,850,000	Dinas Pendidikan
		ANGKA PARTISIASI MURNI (APM) Kesetaraan	0.16	Angka	0.15		0.14		0.13		0.12		0.11		0.11		Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Lembaga Pendidikan Masyarakat yang Terakreditasi	32.96	Persentase	38.00		43.00		48.00		53.00		58.00		58.00		Dinas Pendidikan
1101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					81,108,459,010.00		0		0		0		0		81,108,459,010	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84.03	Persentase	84.50		0		0		0				84.50		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64.84	Persentase	65.15		0		0		0				65.15		Dinas Pendidikan
1101.17	Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Kompetensi	16.48	Persentase	24.57	132,033,200,000	32.66	144,807,765,000	40.75	285,440,118,000	48.84	285,495,118,000	56.93	285,555,118,000	56.93	285,555,118,000	Dinas Pendidikan
1101.18	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase pencapaian SPM sesuai standar	80	Persentase	60.00	493,415,000	65.00	719,700,031	70.00	891,950,000	75.00	841,950,000	80.00	841,950,000	80.00	841,950,000	Dinas Pendidikan
1101.19	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Porsentase satuan pendidikan negeri yang mendapatkan program BOS	100	Persentase	100.00	272,601,530,000	100.00	272,601,530,000	100.00	272,601,530,000	100.00	272,601,530,000	100.00	272,601,530,000	100.00	272,601,530,000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan BOP	8441	Orang	8,673.00		8,673.00		8,673.00		8,673.00		8,673.00		8,673.00		Dinas Pendidikan
1101.21	Program Pendidikan Karakter Sekolah Dasar	Prosentase peningkatan pendidikan karakter tingkat sekolah dasar	0	Persentase	0.00	-	3,500.00	589,350,000	3,500.00	2,500,000,000	3,500.00	3,750,000,000	3,500.00	5,000,000,000	14,000.00	5,000,000,000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1101.22	Program Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama	prosentase peningkatan pendidikan karakter tingkat menengah pertama	0	Persentase	0.00	-	1,500.00	392,650,000	1,500.00	1,000,000,000	1,500.00	1,250,000,000	1,500.00	1,500,000,000	6,000.00	1,500,000,000	Dinas Pendidikan
1101.23	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64.84	Persentase	65.15	57,697,895,600	65.80	71,936,009,900	66.10	87,711,500,000	66.70	97,450,900,000	67.05	93,191,990,000	65.05	93,191,990,000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan GSM	0	Satuan Pendidikan	20.00		5.00		5.00		5.00		5.00		40.00		Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Nilai Rata-rata Ujian Akhir Nasional	0	Nilai	45.01		45.25		45.50		45.75		46.00		46.00		Dinas Pendidikan
1101.24	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84.03	Persentase	84.50	92,208,266,000	85.00	100,556,783,750	85.50	161,625,000,000	86.00	161,922,500,000	86.50	162,250,000,000	86.50	162,250,000,000	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Nilai Rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berbasis Nasional (UASBN)	0	Nilai	77.29		77.50		77.75		78.00		78.25		77.50		Dinas Pendidikan
		Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan GSM	0	Satuan Pendidikan	70.00		85.00		100.00		115.00		130.00		130.00		Dinas Pendidikan
1102.00	KESEHATAN																
1102.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	62,373,612	100	19,724,843,886	100	21,297,850,553	100	83,683,004,141	100	6,526,322,488,664	100.00	6,526,322,488,664	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	7,157,440,000	-	-							100.00	7,157,440,000	RSUD Kab Tangerang
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	7,920,486,550	-	-							100.00	7,920,486,550	Rumah Sakit Umum Balaraja
1102.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	40,774,108	100	4,099,168,523	100	4,361,319,977	100	11,114,702,406	100	698,004,409,311	100.00	698,004,409,311	Dinas Kesehatan
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	2,323,323,125	-	-	-	-					100.00	2,323,323,125	RSUD Kab Tangerang
1102.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase implementasi SOP	100	Persentase	100	30,763,123	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	30,763,123	Dinas Kesehatan
1102.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	139,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	139,250,000	Dinas Kesehatan
1102.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	3,309,515	100	142,702,750	100	149,837,888	100	157,329,782	100	165,196,271	100.00	165,196,271	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	8,250,000	-	-	-	-					100.00	8,250,000	RSUD Kab Tangerang
1102.07	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	1,190,430	100	184,053,797	100	193,256,487	100	202,919,311	100	213,065,277	100.00	213,065,277	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	58,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	58,100,000	RSUD Kab Tangerang
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	154,287,500	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	154,287,500	Rumah Sakit Umum Balaraja
1102.09	Program peningkatan pelayanan Umum	Terpenuhinya kegiatan peningkatan pelayanan di RSU Kabupaten Tangerang	100	Persentase	100.00										100.00	-	RSUD Kab Tangerang
1102.15	Program UKP Rujukan	Prosentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV	100	Persentase	100.00	3,352,174,999									100.00	3,352,174,999	Dinas Kesehatan
		Prosentase keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate)	85	Persentase	85.00										89.00		Dinas Kesehatan
		Prosentase pelayanan penderita hipertensi	0														Dinas Kesehatan
		Prosentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	Persentase	70.00										80.00		Dinas Kesehatan
		Prosentase pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ berat	100	Persentase	80.00										95.00		Dinas Kesehatan
		Bed Occupancy Ratio (BOR)	75	Persentase	75.00										80.00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Terpenuhinya operasional pelayanan rumah sakit	100	Persentase	100.00	130,511,077,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	130,511,077,810	RSUD Kab Tangerang
		BOR (Bed Of Rate) Rumah Sakit	75	Persentase	75.00	12,000,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	12,000,000,000	Rumah Sakit Umum Balaraja
1102.17	Program UKM Rujukan	Cakupan Ibu Hamil mendapat pelayanan K sesuai standar	96	Persentase	100.00	9,206,773,000		-		-		-		-	100.00	9,206,773,000	Dinas Kesehatan
		Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	92	Persentase	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap	99	Persentase	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan anak balita	98	Persentase	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan penjaringan murid kelas sampai kelas 9 SD sederajat dan usia - tahun	0	Persentase	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Warga Negara Usia 0 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan	88	Persentase	100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		100.00		Dinas Kesehatan
		Prevalensi anemia ibu hamil	0	Persentase	48.00		0.00		0.00		0.00		0.00		40.00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1102.19	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit	Tercapainya pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSU Kabupaten	100	Persentase	100	52,042,015,556.00		-		-		-		-			RSUD Kab Tangerang
1102.20	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit	Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSU Kabupaten	100	Persentase	100	11,082,229,854.00		-		-		-		-			RSUD Kab Tangerang
1102.21	Program Pengendalian Pengembangan Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																Dinas Kesehatan, RSUD
		Persentase Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kesehatan (ASPAK)	30	Persentase	60.00	32,776,989,000	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	-	60.00		Dinas Kesehatan
		Tercapainya pengembanga n rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	100	Persentase	100.00	3,000,000,000											RSUD Kab Tangerang
		Terpenuhinya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	100	Persentase	100.00	5,363,354,000											Rumah Sakit Umum Balaraja
1102.22	Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat rumah tangga	60	Persentase	62.00	5,256,650,000	64.00	-	66.00	-	68.00	-	70.00	-	70.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	60	Persentase	62.00		64.00		66.00		68.00		70.00		70.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat-Tempat	75	Persentase	75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat-Tempat	75	Persentase	75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	75	Persentase	75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	75	Persentase	75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		75.00		Dinas Kesehatan
1102.23	Program Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	2	Persentase	0.00	76,476,512,000	2.00	-	1.00	-	8.00	-	11.00	-	11.00		Dinas Kesehatan
		Jumlah Rumah SakitTerakredi tasi Paripurna	2	Rumah sakit	0.00		2.00		2.00		2.00		3.00		3.00		Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya sumber daya kesehatan obat-obatan rumah sakit	100	Persentase	100.00	4,726,297,450	0.00		-		0.00		0.00		-		Rumah Sakit Umum Balaraja
		Rumah sakit terakreditasi	100	Persentase	100.00	42,100,000,000	0.00		-		0.00		0.00		-		RSUD Kab Tangerang
1102.24	Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Prosentase sarana dan prasarana yang tersedia di Puskesmas sesuai standar	65	Persentase	68.00	5,096,096,000	70.00	-	73.00	-	75.00	-	78.00	-	80.00		Dinas Kesehatan
1102.25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan				0.00	-		83,910,683,769		88,106,217,957		92,511,528,855		97,137,105,298	22.00	97,137,105,298	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama	0	Rumah sakit	0.00		8		16		4		2		3.00	3	Dinas Kesehatan
		Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	0	Klinilk	0.00		2		2		2		3		40.00	40	Dinas Kesehatan
		Cakupan Rawat Jalan Puskesmas	17	Persentase	0.00		100		100		100		100		15.00	15	Dinas Kesehatan
		Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit Pemerintah	0	Rumah sakit	0.00		100		100		100		100		3.00	3	Dinas Kesehatan
		Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) Puskesmas					100		100		100		100			-	Dinas Kesehatan
1102.26	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga		0	Persentase	0.00	-		3,041,652,000		3,193,734,600		3,353,421,330		3,521,092,397	100.00	3,521,092,397	Dinas Kesehatan
		Cakupan K4	91.8	Persentase	100.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	98.9	Persentase	100.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap	0	Persentase	0.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cakupan Pelayanan kesehatan balita	0	Persentase	0.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan penjaringan murid kelas 1 sampai kelas 9 SD sederajat dan usia 7 sampai	0	Persentase	0.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Cakupan Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan	40	Persentase	0.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Presentase anemia ibu hamil	28	Persentase	0.00		38		36		34		32		32.00		Dinas Kesehatan
		Presentase balita malnutrisi	73	Persentase	0.00		<5%		<5%		<5%		<5%		<5%		Dinas Kesehatan
		Prosentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan kerja dan		Persentase			43		66		84		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
		Persentase keluarga dengan akses jamban sehat	23	Persentase	0.00		75		76		78		80		80.00		Dinas Kesehatan
1102.27	Program Peningkatan Penangulangan Penyakit		0	Persentase	100.00	-		5,776,769,000		6,065,607,450		6,368,887,823		6,687,332,214	100.00	6,687,332,214	Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan pada penderita Hipertensi	0	Persentase	100.00		100	-	100	-	100	-	100	-	100.00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV	0	Persentase	100.00		100	-	100	-	100	-	100	-	100.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan pada penderita ODGJ Berat	0	Persentase	100.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Respon time KLB < 24 jam	0	Persentase	100.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan usia produktif	0	Persentase	100.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Persentase desa UCI	269	Desa	269.00		`98.2		`98.5		`98.9		`99.3		274.00		Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	0	Persentase	0.00		100		100		100		100		100.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Penemuan kasus baru TB (CDR)					65		70		73		76				Dinas Kesehatan
		Persentase Pengendalian Penyakit Menular					100		100		100		100				Dinas Kesehatan
1102.28	Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		0	Saran a	0.00	-		11,112,272,000		11,667,885,600		12,251,279,880		12,863,843,874	118.00	12,863,843,874	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase sistem informasi di Fasilitas Kesehatan Terintegrasi dengan	0	Orang	0.00		20		25		26		27	-	299.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Tenaga Kesehatan di Lingkup Dinas Kesehatan yang telah	0	Persentase	0.00		23		24		25		26		70.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	0	Persentase	0.00		61		65		67		70,00		75.00		Dinas Kesehatan
		Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan	0	Persentase	0.00		60,00		65,00		70,00		75,00		80.00		Dinas Kesehatan
		Persentase sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang tersedia di puskesmas					73,00		75,00		78,00		80,00				Dinas Kesehatan
1103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1103.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	3,033,828,180	100	2,563,000,000	100.00	2,681,075,000	100	2,813,131,250	100	2,955,096,812	100.00	2,955,096,812	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100	1,634,232,500	100	2,045,394,000	100.00	2,125,778,000	100	2,149,149,000	100	2,222,794,000	100.00	2,222,794,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0	Persentase	60	2,386,414,110	70	2,633,500,000	80.00	2,634,000,000	90	2,767,000,000	95	2,903,000,000	95.00	2,903,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Tata Ruang dan	100	Persentase	100	1,133,760,000	100	1,492,948,000	100.00	1,572,595,000	100	1,655,727,000	100	1,742,512,000	100.00	1,742,512,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100	125,500,000	100	50,000,000	100.00	70,000,000	100	75,000,000	100	80,000,000	100.00	80,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur	100	Persentase	100	99,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	Persentase	25	359,000,000	35	402,000,000	45.00	422,000,000	65	443,000,000	80	465,000,000	80.00	465,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	0	Persentase	100	60,100,000	100	62,000,000	100.00	65,000,000	100	68,000,000	100	71,000,000	100.00	71,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan	100	Persentase	100	136,450,000	100	97,425,000	100.00	107,167,500	100	117,885,000	100	129,673,000	100.00	129,673,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan	100	Persentase	100	217,530,000	100	231,000,000	100.00	242,000,000	100	256,000,000	100	268,000,000	100.00	268,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100	Persentase	100	253,625,000	100	340,828,000	100.00	416,294,000	100	394,244,000	100	474,924,000	100.00	474,924,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	0	Persentase	29.6	173,414,583,260	0	-	-	-	0	-	0	-	29.60		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ketersediaan Data Perencanaan Pembanguna n Jalan Jembatan	0	Persentase	100		0		-		0		0		100.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	tersedianya Perbup tentang sistem Drainase Kabupaten Tangerang	0	Persentase	100	150,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Terpelihara	0	Ruas	114	22,849,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	114.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.20	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Persentase Ketersediaan Data Pengendalian dan pengawasan Jalan dan	0	Persentase	50	2,124,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	50.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Bangunan	0	Persentase	60	1,833,250,000	0	-	-	-	0	-	0	-	60.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Kondisi Baik	0	Persentase	80	3,115,300,000	0	-	-	-	0	-	0	-	80.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang terbangun	0	Persentase	4.2	19,089,889,300	0	-	-	-	0	-	0	-	4.20		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Ketersediaan Data Perencanaan Sumber Daya Air	0	Persentase	100		0		-		0		0		100.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase Partisipasi Kelompok Masyarakat Mandiri Pengelolaan Air	0	Persentase	7.7	282,400,000	0	-	-	-	0	-	0	-	7.70		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1103.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Panjang Saluran yang terpelihara	0	Persentase	35.62	23,276,269,900	0	-	-	-	0	-	0	-	35.62		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Persentase pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	0	Persentase	20		0		-		0		0		20.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.28	Program pengendalian banjir	hasil Koordinasi Pengendalian Banjir dengan instansi terkait	0	Dokumen	1	139,500,000	0	-	-	-	0	-	0	-	1.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.35	Program Pengolahan Data Penyusunan Perencanaan Jalan Dan Sumber Daya Air	Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Bangunan	0	Persentase	0	-	70	14,286,000,000	80.00	15,585,000,000	90	13,487,000,000	100	8,331,000,000	100.00	8,331,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.37	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	0	Persentase	0	-	50	154,285,000,000	70.00	287,977,000,000	89	138,540,000,000	100	112,127,000,000	100.00	112,127,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Prosentase Penanganan Simpang Jalan	0	Persentase	0		15.4		61.50		84.6		100		100.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.36	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang terbangun	0	Persentase	0	-	14.15	126,013,000,000	20.00	140,880,000,000	29	153,841,000,000	37	63,961,000,000	37.00	63,961,000,000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Jumlah Daerah Irigasi pada Lahan Pertanian berkelanjutan dalam kondisi baik	0	Lokasi	0		6		8.00		8		0		22.00		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1103.31	Program Penataan Ruang	Persentase pemenuhan RDTR	0	Persentase	25	2,780,000,000	50	2,767,500,000	66.60	3,030,000,000	83.3	3,543,000,000	100	3,460,000,000	100.00	3,460,000,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1103.32	Program Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Dan Tata Ruang	Prosentase kesesuaian Rencana Tapak terhadap pembangunan	100	Persentase	100	2,150,000,000	100	2,320,000,000	100.00	2,320,000,000	100	2,320,000,000	100	2,320,000,000	100.00	2,320,000,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.33	Program Pembangunan Gedung Pemerintahan	Pemenuhan pembangunan gedung pemerintahan	10	Persentase	28	175,505,760,000	54	260,910,000,000	75.00	257,690,000,000	90	135,030,000,000	100	97,050,000,000	100.00	97,050,000,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1103.34	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar	Terlaksanaanya Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar	207	RKB	324	181,000,000,000	272	349,000,000,000	272.00	302,000,000,000	266	345,500,000,000	266	341,500,000,000	1.60	341,500,000,000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
		Terlaksanaanya Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar	8	Puskesmas	4		3		3.00		3		1		14.00		Dinas Tata Ruang dan Bangunan
		Terlaksanaanya Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar	0	Rumah sakit	0		5		35.00		40		10		100.00		Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																
1104.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	1,404,318,200	100	1,490,914,110	100.00	1,565,939,816	100	1,605,249,294	100	1,645,616,307	100.00	1,645,616,307	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	2,919,974,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	892,410,000	100	914,720,250	100.00	937,588,257	100	961,027,963	100	985,053,662	100.00	985,053,662	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur	100	Persentase		150,000,000		-	-	-	-	-	-	-			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur	0	Persentase	100	270,000,000	0	-	-	1,700,000,000	0	-	0	-	100.00		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	Persentase	0	-	100	250,000,000	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	26,090,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase Pemenuhan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	168,885,000	100	149,582,125	100.00	151,321,679	100	153,104,720	100	154,932,338	100.00	154,932,338	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	89,122,500	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100	Persentase	100	223,237,500	100	173,991,188	100.00	238,340,968	100	180,922,015	100	184,834,628	100.00	184,834,628	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.17	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Desa dan Kelurahan yang tanggap bencana	17	Angka	53	559,975,000	54	-	55.00	-	56	-	56	-	56.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1104.20	Program Kedaruratan Dan Sarana Prasarana	Rata-Rata Respontime	20	Menit	20	14,956,020,000	20	-	15.00	-	15	-	15	-	15.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1104.21	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana yang tertangani	20	Persentase	100	479,580,000	100	-	100.00	-	100	-	100	-	100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1104.15	program pengembangan perumahan	Prosentase PSU dalam Aset	13.4	Persentase	18.35	3,109,370,000	21.22	4,466,800,000	24.10	9,296,268,750	26.98	9,326,474,220	29.86	9,357,434,824	29.86	9,357,434,824	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
		Prosentase Pemenuhan Pembinaan Penyelenggaraan Rumah susun dan Apartemen	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.16	program lingkungan sehat Perumahan dan Permukiman	Cakupan Sarana Air bersih	77.33	Persentase	77.83	22,924,400,000	78.33	21,722,312,500	78.83	22,265,370,315	79.33	22,822,004,572	80	23,392,554,684	80.00	23,392,554,684	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.18	Program pengelolaan areal pemakaman	Cakupan TPU yang memenuhi Standar	85	Persentase	60	5,927,110,000	65	7,006,876,000	70.00	7,637,047,901	75	7,667,974,098	80	8,199,673,450	80.00	8,199,673,450	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.19	Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	Cakupan layanan kawasan permukiman	6.02	Persentase	6.16	38,067,500,000	6.16	39,970,875,000	6.16	41,969,418,750	6.16	44,067,889,690	6.16	46,271,283,893	30.81	46,271,283,893	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
		Meningkatnya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan/Perkotaan	0	Persentase	100	16,445,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		16,445,000,000	Kecamatan Tigaraksa
		Meningkatnya penataan lingkungan Perumahan dan permukiman perdesaaan/	0	Persentase	100	13,290,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		13,290,000,000	Kecamatan Cikupa

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan	0	Persentase	100	10,994,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		10,994,500,000	Kecamatan Panongan
		Tercapainya Peningkatan Fasilitas Umum Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	Persentase	100	16,305,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		16,305,000,000	Kecamatan Curug
		Prosentase perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	0	Persentase	100	11,645,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		11,645,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	0	Persentase	75	23,222,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0		23,222,600,000	Kecamatan Pasar Kemis
		prosentase Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p	0	Persentase		15,349,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		15,349,000,000	Kecamatan Balaraja
		prosentase Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p	0	Persentase	100	6,925,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		6,925,000,000	Kecamatan Kresek
		Tercapainya penataan lingkungan permukiman perdesaab dan perkotaan	0	Persentase	100	7,815,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		7,815,000,000	Kecamatan Kronjo
		Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	100	5,560,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		5,560,000,000	Kecamatan Mauk
		Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	100	19,645,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		19,645,000,000	Kecamatan Rajeg

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	0	Persentase	100	7,405,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		7,405,000,000	Kecamatan Sepatan
		Terlaksanany a Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan	0	Jenis	3	13,205,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		13,205,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	100	11,436,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		11,436,000,000	Kecamatan Cisoka
		Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	100	6,215,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		6,215,000,000	Kecamatan Pakuhaji
		Tercapainya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	95	4,010,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		4,010,000,000	Kecamatan Kosambi
		Tercapainya perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	0	Persentase	100	5,110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		5,110,000,000	Kecamatan Pagedangan
		Meningkatnya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan	0	Persentase	80	5,510,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		5,510,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik	0	Persentase	20	5,520,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		5,520,000,000	Kecamatan Jayanti
		Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik	0	Persentase		2,270,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		2,270,000,000	Kecamatan Kemiri

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik	0	Persentase		2,340,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		2,340,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	80	12,340,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		12,340,800,000	Kecamatan Cisauk
		Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	100	10,350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		10,350,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Tersedianya Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p	0	Persentase	100	18,045,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		18,045,000,000	Kecamatan Sindang Jaya
		Peningkatan Penataan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Perdesaaan/P	0	Persentase	100	3,384,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		3,384,000,000	Kecamatan Kelapa Dua
		Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p erkotaan	0	Paket	99	13,320,643,500	0	0	0	0	0	0	0	0		13,320,643,500	Kecamatan Solear
		Prosentase Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan	0	Persentase	75	5,360,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		5,360,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perdesaan/Pe rkotaan	0	Persentase	25	11,661,646,000	0	0	0	0	0	0	0	0		11,661,646,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase Pemenuhan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan	0	Persentase	100	7,730,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		7,730,000,000	Kecamatan Gunung Kaler

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1104.22	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Cakupan Pemenuhan Perencanaan pengembanga n kawasan Permukiman	100	Persentase	100	5,866,942,250	100	4,310,000,000	100.00	4,360,000,000	100	4,380,000,000	0	4,410,000,000	100.00	4,410,000,000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.23	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Prosentase kapasitas lumpur tinja	0	Persentase	20.45	3,027,934,000	30	3,448,632,350	35.00	15,441,098,159	40	5,245,375,613	45	5,321,510,004	45.00	5,321,510,004	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
		Jumlah Penerima Masyarakat yang rawan air	24	Lokasi	24		24		24.00		24		24		120.00		Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1104.24	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65	Persentase	70	6,339,967,500	72	6,289,967,500	74.00	6,289,967,500	76	6,289,967,500	78	6,289,967,500	80.00	6,289,967,500	Kecamatan Tigaraksa
		Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik dan penurunan timbulan	85	Persentase	90	5,430,782,000	92	17,414,950,000	95.00	12,638,500,000	97	9,868,500,000	98	10,408,500,000	98.00	10,408,500,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik	63.8	Persentase	65.00	3,580,000,000	66.60	5,862,639,261	66.66	5,912,639,261	78.00	5,912,639,261	70.00	5,912,639,261	70.00	5,912,639,261	Kecamatan Panongan
		Penurunan Timbulan sampah	35	Persentase	30.00		25.00		20.00		15.00		10.00		10.00		Kecamatan Panongan
		Prosentase Infrastruktur dasar dalam Kondisi baik	75	Persentase	78	21,628,332,061	80	10,201,683,293	82.00	10,072,065,093	85	10,072,065,093	90	10,072,065,093	90.00	10,072,065,093	Kecamatan Curug
		Penurunan Timbulan sampah	35	Persentase	30		25		20.00		15		10		10.00		Kecamatan Curug

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	13.12	Persentase	14.24	12,465,748,100	23.32	13,793,083,060	53.87	14,880,000,000	62.09	15,785,000,000	71.43	16,510,000,000	71.43	16,510,000,000	Kecamatan Legok
		Penurunan Timbulan sampah	20	Persentase	18.00		16.00		13.00		10.00		7.00		7.00		Kecamatan Legok
		Prosentase penurunan timbulan sampah	10	Persentase	10.00	9,033,575,418	10.00	26,335,774,118	10.00	31,912,042,362	10.00	240,031,397,231	10.00	34,709,102,093	50.00	34,709,102,093	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	70	Persentase	74.00		78.00		82.00		86.00		90.00		90.00		Kecamatan Pasar Kemis
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	60	Persentase	71.18	16,519,516,500	8,118.00	12,628,439,000	91.18	13,930,639,000	95.00	14,180,639,000	100.00	14,680,439,000	100.00	14,680,439,000	Kecamatan Balaraja
		Penurunan Timbulan Sampah	288	Ton	290.00		320.00		350.00		400.00		450.00		450.00		Kecamatan Balaraja
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	61.18	Persentase	71.18	14,763,045,100	81.18	13,805,000,000	91.18	12,960,000,000	95.00	10,835,000,000	100.00	9,569,000,000	100.00	9,569,000,000	Kecamatan Kresek
		Penurunan Timbulan Sampah	0	Ton	288.00		290.00		320.00		350.00		400.00		400.00		Kecamatan Kresek
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	15,300,450,000	100.00	13,398,000,000	100.00	15,950,450,000	100.00	15,560,450,000	100.00	15,950,450,000	100.00	15,950,450,000	Kecamatan Kronjo

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja	96	Persentase	100.00	14,322,613,921	100.00	11,806,526,628	100.00	11,343,426,628	100.00	11,407,526,628	100.00	10,786,326,628	100.00	10,786,326,628	Kecamatan Mauk
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	76	Persentase	80.00	29,326,490,000	84.00	20,846,415,000	88.00	22,440,000,000	92.00	23,490,000,000	96.00	16,490,000,000	96.00	16,490,000,000	Kecamatan Rajeg
		Penurunan Timbulan Sampah	300	Ton	220.00		175.00		140.00		115.00		90.00		90.00		Kecamatan Rajeg
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	60	Persentase	65.00	13,908,055,000	78.00	8,954,160,000	82.00	19,067,000,000	87.00	18,568,000,000	90.00	11,040,000,000	95.00	11,040,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik	93	Persentase	94.00	20,325,255,959	95.00	22,950,000,000	96.00	23,300,000,000	97.00	23,300,000,000	98.00	23,300,000,000	98.00	23,300,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Prosentase Penurunan Timbulan Sampah	45	Persentase	40.00		35.00		30.00		25.00		20.00		20.00		Kecamatan Teluknaga
		Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65	Persentase	70.00	11,931,072,227	75.00	11,210,000,000	80.00	11,553,400,000	85.00	11,753,400,000	90.00	11,953,400,000	90.00	11,953,400,000	Kecamatan Pakuhaji
		Penurunan Timbulan Sampah	0	Persentase	0.00		10.00		10.00		10.00		10.00		40.00		Kecamatan Pakuhaji
		Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik	69	Persentase	71.00	8,168,720,798	76.00	8,802,309,500	81.00	7,218,343,000	86.00	7,218,343,000	91.00	7,218,343,000	91.00	7,218,343,000	Kecamatan Kosambi

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penurunan Timbulan Sampah	0	Ton	360.00		290.00		210.00		140.00		70.00		70.00		Kecamatan Kosambi
		jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	60	Persentase	65.00	6,368,209,383	70.00	11,389,625,000	75.00	12,769,963,750	80.00	14,343,618,813	85.00	16,139,501,884	85.00	16,139,501,884	Kecamatan Pagedangan
		penurunan timbulan sampah	28	Ton	26.00		24.00		22.00		20.00		18.00		18.00		Kecamatan Pagedangan
		Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan dalam Kondisi Baik	70	Persentase	75.00	6,217,019,500	80.00	7,207,675,000	85.00	9,836,000,000	90.00	9,917,000,000	95.00	10,048,000,000	95.00	10,048,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	54.06	Persentase	70.00	8,676,973,029	75.00	12,963,615,338	78.00	13,180,390,000	80.00	11,789,104,750	85.00	10,798,926,275	90.00	10,798,926,275	Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di	70	Persentase	70.00	7,960,000,000	75.00	7,048,800,000	85.00	14,379,000,000	87.00	17,079,000,000	88.00	19,809,000,000	88.00	19,809,000,000	Kecamatan Kemiri
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	61.18	Persentase	71.18	7,487,987,140	81.18	8,350,000,000	81.18	9,540,000,000	81.18	9,590,000,000	91.18	17,690,000,000	100.00	17,690,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan	75	Persentase	77.50	5,283,218,800	80.00	6,941,000,000	82.50	6,556,250,000	85.00	6,624,750,000	87.50	7,220,250,000	87.50	7,220,250,000	Kecamatan Cisauk
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	61.18	Persentase	71.18	10,659,328,572	91.18	6,709,600,000	95.00	12,825,000,000	100.00	12,765,000,000	100.00	12,937,000,000	100.00	12,937,000,000	Kecamatan Sepatan Timur

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penurunan timbunan sampah	300	Ton	300.00		250.00		250.00		200.00		200.00		200.00		Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase Penurunan Timbulan Sampah	10	Persentase	10.00	4,654,750,000	10.00	13,644,200,000	10.00	13,442,110,000	10.00	13,719,465,500	10.00	14,010,688,775	50.00	14,010,688,775	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Baik	74	Persentase	74.00		78.00		82.00		86.00		90.00		90.00		Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Penurunan Timbulan Sampah	300	Ton	300.00	11,383,073,271	305.00	9,422,491,010	310.00	9,648,649,812	320.00	9,774,941,015	335.00	9,902,714,422	335.00	9,902,714,422	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik	75	Persentase	80.00		85.00		90.00		95.00		95.00		95.00		Kecamatan Kelapa Dua
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	61.8	Persentase	71.18	15,238,498,800	81.18	10,966,192,600	91.18	16,624,536,632	95.00	19,583,781,958	100.00	21,851,554,350	100.00	21,851,554,350	Kecamatan Solear
		Penurunan Timbulan Sampah	0	Ton	288.00		290.00		320.00		350.00		400.00		400.00		Kecamatan Solear
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik	61.18	Persentase	71.18	3,418,892,000	81.18	4,523,274,000	91.18	4,580,262,500	95.00	4,555,124,375	100.00	6,109,368,156	100.00	6,109,368,156	Kecamatan Mekar Baru
		Penurunan Timbulan Sampah	187	Ton	198.00		288.00		290.00		320.00		350.00		400.00		Kecamatan Mekar Baru

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik dan turunnya timbulan sampah	20	Persentase	25.00	5,076,700,000	30.00	5,711,700,000	35.00	5,711,700,000	40.00	5,711,700,000	45.00	5,711,700,000	45.00	5,711,700,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kondisi baik	65	Persentase	70.00	4,760,000,000	75.00	6,360,000,000	80.00	5,310,000,000	85.00	5,310,000,000	90.00	5,310,000,000	90.00	5,310,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
		Capaian Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan	50	Persentase	60.00	16,438,400,000	70.00	11,124,635,000	75.00	12,760,000,000	80.00	12,020,000,000	85.00	12,090,000,000	85.00	12,090,000,000	Kecamatan Cisoka
1104.25	Program Gebrak Pakumis	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	7.94	Persentase	15.87	27,714,700,000	23.81	34,665,000,000	31.75	34,735,000,000	39.68	34,775,000,000	47.62	34,815,000,000	47.62	34,815,000,000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1105	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1105.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	-	100	7,413,600,000	100.00	7,944,700,000	100	7,949,700,000	100	8,009,700,000	100.00	8,009,700,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase pemehuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	8,318,100,000	100	8,481,000,000	100.00	8,580,000,000	100	8,595,000,000	100	8,675,000,000	100.00	8,675,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	546,600,000	100	600,000,000	100.00	771,360,000	100	741,360,000	100	773,360,000	100.00	773,360,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	-	100	3,225,250,000	100.00	3,330,250,000	100	3,430,250,000	100	3,530,250,000	100.00	3,530,250,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	100	1,980,000,000	100	2,245,000,000	100.00	2,295,000,000	100	2,170,000,000	100	2,395,000,000	100.00	2,395,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	408,000,000	100	361,000,000	100.00	797,000,000	100	617,000,000	1	807,000,000	100.00	807,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100	Persentase	100	600,000,000	100	850,000,000	-	-	-	-	-	-	100.00		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase impelementasi SOP	100	Persentase	100	56,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	-	100	-	100.00	200,000,000	100	-	100	-	100.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100	Persentase	100	50,000,000	100	250,000,000	100.00	50,000,000	100	250,000,000	100	50,000,000	100.00	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	Persentase	0	-	100	100,000,000	100.00	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100.00	100,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	-	100	26,970,000	100.00	35,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100.00	45,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan OPD	100	Persentase	100	45,000,000	100	45,000,000	100.00	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100.00	45,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	56,000,000	100	60,000,000	100.00	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100.00	60,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan	100	Persentase	100	-	100	88,750,000	100.00	95,000,000	100	95,000,000	100	95,000,000	100.00	95,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terpenuhinya dokumen perencanaan OPD	100	Persentase	100	87,000,000	100	112,000,000	100.00	95,000,000	100	95,000,000	100	120,000,000	100.00	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	211,000,000	100	189,000,000	100.00	254,800,000	100	263,800,000	100	298,800,000	100.00	298,800,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Pelanggaran K yang Terselesaikan	100	Persentase	100	3,750,000,000	100	3,890,000,000	100.00	5,340,000,000	100	3,845,000,000	100	3,560,000,000	100.00	3,560,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	Kegiatan	1	153,175,000	0	0	0	0	0	0	0	0		153,175,000	Kecamatan Pakuhaji
		Penanganan penertiban bahu jalan strategis	1	Kegiatan	1	95,841,000	0	0	0	0	0	0	0	0		95,841,000	Kecamatan Solear
1105.16	Program Pengawasan Dan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Penegakan Perda yang ditindaklanjuti	100	Persentase	100	1,100,000,000	100	1,250,000,000	100.00	1,250,000,000	100	1,300,000,000	100	1,300,000,000	100.00	1,300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Capaian Wawasan Kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik	75	Persentase	75	972,250,000	77	1,500,000,000	80.00	1,800,000,000	80	1,800,000,000	80	1,800,000,000	80.00	1,800,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan	75	Persentase	75	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		50,000,000	Kecamatan Mekar Baru
1105.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka pencegahan	1	Mitra	1	1,015,000,000	1	1,250,000,000	1.00	1,450,000,000	1	1,450,000,000	1	1,450,000,000	5.00	1,450,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Prosentase partisipasi masyarakat dalam penanganan trantibum dan linmas	100	Persentase	100	1,307,385,000	100	700,000,000	100.00	950,000,000	100	950,000,000	100	850,000,000	100.00	850,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100	Persentase	100	56,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0		56,100,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase partisipasi masyarakat dalam penanganan trantibum dan linmas	0			120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		120,000,000	Kecamatan Kemiri
1105.20	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum	Prosentase SDM Anggota Satpol PP yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100	Persentase	100	750,000,000	100	1,050,000,000	100.00	1,100,000,000	100	1,100,000,000	100	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tercapainya Peningkatan Kapasitas pada Kelembagaan Ketertiban dan	100	Persentase	100	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		50,000,000	Kecamatan Curug
		Terlaksananya Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	100	Persentase	100	29,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0		29,375,000	Kecamatan Teluknaga
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban	1	Kegiatan	1	324,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0		324,500,000	Kecamatan Pakuhaji

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Terlaksanany a Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	0			45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		45,000,000	Kecamatan Kemiri
		Pembinaan Dan Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan	100	Perse ntase	100	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		30,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
1105.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Fasilitasi Lembaga dalam bidang politik	78	Perse ntase	78	2,344,925,000	78	1,560,000,000	78.00	1,710,000,000	78	1,710,000,000	79	3,010,000,000	79.00	3,010,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1105.22	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan	Prosentse Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban	14	Perse ntase	15	593,000,000	16	593,000,000	17.00	593,000,000	18	593,000,000	19	593,000,000	20.00	593,000,000	Kecamatan Tigaraksa
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	13.1	Perse ntase	14.29	412,724,000	28.57	460,620,000	42.86	442,500,000	57.14	445,500,000	71.43	422,500,000	71.43	422,500,000	Kecamatan Cikupa
		Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban	80	Perse ntase	80.00	166,400,000	85.00	535,000,000	85.00	535,000,000	90.00	535,000,000	90.00	805,000,000	90.00	805,000,000	Kecamatan Panongan
		Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban	80	Perse ntase	80	464,870,000	85	688,700,000	85.00	688,700,000	90	688,700,000	90	688,700,000	90.00	688,700,000	Kecamatan Curug
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0												-	-	Kecamatan Legok
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	10	Perse ntase	10.00	405,304,500	10.00	168,695,448,800	10.00	468,676,532	10.00	492,989,107	10.00	513,438,564	50.00	513,438,564	Kecamatan Pasar Kemis

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah konflik ekonomi sosial dan politik	1	Kasus	1.00		1.00		-		0.00		0.00		2.00		Kecamatan Pasar Kemis
		Jumlah konflik SARA	0	Kasus	2.00		1.00		1.00		1.00		0.00		5.00		Kecamatan Pasar Kemis
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	14.29	Persentase	28.57	286,132,500	42.86	247,100,000	57.14	250,550,000	71.43	252,550,000	71.43	252,550,000	71.43	252,550,000	Kecamatan Balaraja
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	5	Konflik	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		Kecamatan Balaraja
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0	Persentase	14.29	104,870,000	28.57	131,110,000	42.86	142,000,000	57.14	149,000,000	71.43	157,000,000	71.43	157,000,000	Kecamatan Kresek
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	0	Konflik	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		25.00		Kecamatan Kresek
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0												-	-	Kecamatan Kronjo
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	15	Persentase	20.00	110,300,000	25.00	142,000,000	30.00	142,000,000	35.00	142,000,000	50.00	145,000,000	50.00	145,000,000	Kecamatan Rajeg
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	10	Persentase	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		50.00		Kecamatan Rajeg

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan	25	Persentase	23.00	236,875,000	21.00	385,000,000	18.00	390,000,000	17.00	395,000,000	15.00	400,000,000	15.00	400,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	0														Kecamatan Cisoka
		Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	Persentase	17.00	599,000,000	28.00	911,500,000	35.00	876,500,000	42.00	876,500,000	59.00	876,500,000	59.00	876,500,000	Kecamatan Kosambi
		Menekan Terjadinya Potensi Konflik	0	Konflik	8.00		7.00		7.00		6.00		5.00		5.00		Kecamatan Kosambi
		Cakupan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban	70	Persentase	75.00	212,500,000	80.00	101,850,000	85.00	110,000,000	90.00	110,000,000	95.00	110,000,000	95.00	110,000,000	Kecamatan Jambe
		Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban	65	Persentase	70.00	198,600,000	75.00	140,000,000	75.50	165,000,000	80.00	165,000,000	85.00	165,000,000	85.00	165,000,000	Kecamatan Jayanti
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	4	Kasus	5.00	45,000,000	4.00	49,700,000	4.00	71,000,000	3.00	71,000,000	2.00	71,000,000	2.00	71,000,000	Kecamatan Kemiri
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0	Persentase	14.29	100,000,000	25.57	385,000,000	42.86	395,000,000	57.14	400,000,000	71.43	400,000,000	71.43	400,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan	65.5	Persentase	68.75	168,500,000	75.00	189,000,000	81.25	189,000,000	87.50	189,000,000	93.25	189,000,000	93.25	189,000,000	Kecamatan Cisauk

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	70	Persentase	70.00	30,000,000	65.35	66,300,000	65.20	230,000,000	50.85	260,000,000	25.15	285,000,000	25.15	285,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	3	Konflik	3.00		2.00		2.00		2.00		1.00		1.00		Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0	Persentase	10.00	179,550,000	10.00	187,040,000	10.00	198,000,000	10.00	207,900,000	10.00	218,295,000	50.00	218,295,000	Kecamatan Sindang Jaya
		Jumlah konflik ekonomi sosial dan politik	0	Kasus	1.00		1.00		-		0.00		0.00		-		Kecamatan Sindang Jaya
		Jumlah konflik SARA	0	Kasus	2.00		1.00		1.00		1.00		0.00		-		Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15	Persentase	15.00	449,545,000	20.00	608,840,000	30.00	613,738,400	40.00	618,695,984	50.00	623,713,549	50.00	623,713,549	Kecamatan Kelapa Dua
		Jumlah Konflik Ekonomi Sosial dan Politik	4	Kasus	4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		16.00		Kecamatan Kelapa Dua
		Jumlah Konflik Sara	2	Kasus	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		10.00		Kecamatan Kelapa Dua
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0	Persentase	14.29	157,044,000	28.57	144,200,000	42.86	240,300,000	57.14	262,830,000	71.43	275,613,000	71.43	275,613,000	Kecamatan Solear

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Satua n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	0	Angka	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		5.00		Kecamatan Solear
		prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	65	Perse ntase	70.00	50,000,000	75.00	280,000,000	80.00	155,000,000	85.00	170,000,000	90.00	145,000,000	95.00	145,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Menekannya terjadinya Potensi Konflik	10	Konfli k	8.00		6.00		5.00		5.00		5.00		3.00		Kecamatan Mekar Baru
		penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	20	Perse ntase	20.00	100,000,000	20.00	185,000,000	20.00	160,000,000	20.00	185,000,000	20.00	185,000,000	20.00	185,000,000	Kecamatan Sukamulya
		Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban	0	Perse ntase	14.29	103,015,000	28.57	195,000,000	42.86	195,000,000	57.14	195,000,000	71.43	195,000,000	71.43	195,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
1105.23	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulang	0	Kali	3	-		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1105.24	Program Kedaruratan Dan Sarana Prasarana	Meningkatkan kesiagaan pencegahan dan penanggulang an bahaya kebakaran	0	Bulan	12	-		36,550,000,000		66,300,000,000		9,450,000,000		17,800,000,000		17,800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1105.25	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlaksanany a penyediaan Buffer Stock Bencana untuk Korban Bencana	0	Paket	1	-		900,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1106	SOSIAL																

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1106.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	19.70	1,098,922,000	19.90	1,151,700,000	20.00	1,206,645,000	20.40	1,265,060,000	20.00	1,318,240,000	100.00	1,318,240,000	Dinas Sosial
1106.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	18.40	181,000,000	18.40	252,250,000	20.70	265,590,000	20.70	278,652,000	21.80	289,100,000	100.00	289,100,000	Dinas Sosial
1106.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	Persentase	100.00	160,000,000	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	-	100.00		Dinas Sosial
1106.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	20.00	-	20.00	105,000,000	20.00	110,250,000	20.00	115,000,000	20.00	120,000,000	100.00	120,000,000	Dinas Sosial
1106.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	100	Persentase	20.00	27,060,000	20.00	28,413,000	20.00	29,850,000	20.00	31,200,000	20.00	32,750,000	100.00	32,750,000	Dinas Sosial
1106.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase Pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	19.60	236,190,000	19.60	195,402,000	19.60	205,095,000	19.60	215,445,000	21.60	256,145,000	100.00	256,145,000	Dinas Sosial
1106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Menurunnya Jumlah Fakir Miskin	100220	Orang	99,804.00	2,670,000,000	98,924.00	4,630,000,000	97,739.00	5,765,000,000	96,343.00	6,326,000,000	94,873.00	6,500,000,000	94,873.00	6,500,000,000	Dinas Sosial
1106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial dan PMKS Lainnya yang	2.95	Persentase	6.14	1,575,000,000	12.78	2,975,000,000	20.56	3,965,000,000	29.16	4,760,000,000	38.17	5,125,000,000	38.17	5,125,000,000	Dinas Sosial
		Prosentase Gelandangan Pengemis yang ditangani	0	Persentase	9.00		23.00		41.00		64.00		92.00		92.00		Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Lansia terlantar yang ditangani	1.18	Persentase	2.29		4.30		6.88		10.04		14.05		14.05		Dinas Sosial
		Prosentase Anak Terlantar yang ditangani	0	Persentase	0.41		0.95		1.56		2.33		3.18		3.18		Dinas Sosial
		Prosentase penyandang disabilitas yang ditangani	2.67	Orang	4.69		10.54		19.71		30.66		42.12		42.12		Dinas Sosial
1106.17	Program Pembinaan Panti Dan Rumah Singgah	Prosentase (PMKS) yang mendapat pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi	100	Persentase	15.94	1,020,000,000	33.04	1,295,000,000	61.59	1,195,000,000	73.33	1,295,000,000	100.00	1,295,000,000	100.00	1,295,000,000	Dinas Sosial
1106.18	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Pendamping PKH yang aktif	233	Orang	233.00	2,218,025,500	247.00	2,557,700,000	300.00	2,668,094,000	350.00	2,661,195,880	375.00	2,763,019,798	375.00	2,763,019,798	Dinas Sosial
		Prosentase Orang Terlantar yang ditangani	100	Persentase	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
		Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat	100	Persentase	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Sosial
1106.19	Program Pengelolaan Data, Bina Sosial Dan Peningkatan Nilai - Nilai Keperintisan Dan Kepahlawanan	Prosentase data dan Informasi tentang penyandang masalah kesejahteraan	100	Persentase	100.00	1,475,000,000	100.00	1,450,000,000	100.00	1,500,000,000	100.00	1,550,000,000	100.00	1,550,000,000	100.00	1,550,000,000	Dinas Sosial
		Jumlah PSP dan Penyuluh Sosial yang Aktif	303	Orang	303.00		303.00		303.00		303.00		303.00		303.00		Dinas Sosial

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah Penyakit Sosial yang mendapatkan pembinaan dan konseling	0	Orang	50.00		280.00		280.00		280.00		280.00		1,250.00		Dinas Sosial
		Prosentase PSKS yang dibina	50.21	Persentase	66.25		69.30		70.42		72.50		72.50		72.50		Dinas Sosial
12	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																
1201	TENAGA KERJA																
1201.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	2,015,601,000	100	2,176,000,000	100.00	2,390,000,000	100	2,585,000,000	100	2,785,000,000	100.00	2,785,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1201.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan sarana aparatur	100	Persentase	100	1,104,314,000	100	1,330,000,000	100.00	1,410,000,000	100	1,630,000,000	100	1,605,000,000	100.00	1,605,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1201.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase implementasi SOP	100	Persentase	100	51,750,000	100	-	100.00	80,000,000	100	-	100	110,000,000	100.00	110,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1201.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	Persentase	0	-	100	104,000,000	100.00	104,000,000	100	124,000,000	100	104,000,000	100.00	104,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1201.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	42,836,000	100	45,000,000	100.00	48,400,000	100	51,500,000	100	55,000,000	100.00	55,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1201.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan	100	Persentase	100	61,440,000	100	68,040,000	100.00	74,040,000	100	82,000,000	100	169,040,000	100.00	169,040,000	Dinas Tenaga Kerja
1201.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang dilatih	0	Persentase	5	3,184,980,000	5	3,582,300,000	5.00	3,880,000,000	5	3,825,000,000	5	4,960,000,000	5.00	4,960,000,000	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	34.8	Persentase	35		37		39.00		42		45		45.00		Dinas Tenaga Kerja
1201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari kerja yang di tempatkan	4387	Orang	5	1,324,000,000	6.5	2,170,000,000	7.80	2,525,000,000	9	2,680,000,000	10	2,735,000,000	38.30	2,735,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1201.17	Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Besaran kasus yang di selesaikan melalui perjanjian bersama (PB)	23.68	Persentase	24	2,246,735,000	24.5	2,450,000,000	25.00	2,620,000,000	25.5	2,830,000,000	26	3,062,000,000	26.00	3,062,000,000	Dinas Tenaga Kerja
1202	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
1202.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	809,584,302	100	1,120,740,000	100.00	1,107,000,000	100	1,115,000,000	100	1,123,000,000	100.00	1,123,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	470,015,698	100	442,000,000	100.00	483,000,000	100	484,000,000	100	484,000,000	100.00	484,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100	50,000,000	100	50,000,000	-	-	-	-	-	-	100.00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1202.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	40,000,000	100	45,000,000	100.00	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan	100	Persentase	100	154,400,000	100	145,000,000	100.00	165,000,000	100	170,000,000	100	170,000,000	100.00	170,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.15	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif	0	Persentase	79	1,300,000,000	80	1,097,000,000	80.00	1,300,000,000	90	1,350,000,000	90	1,500,000,000	90.00	1,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentase Pemberdayaan Kelompok Perempuan	16.66	Persentase	16.66	1,750,000,000	16.67	1,425,000,000	16.67	1,800,000,000	16.67	2,350,000,000	16.67	2,450,000,000	16.67	2,450,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.19	Program Advokasi Dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Presentase Desa yang telah Membentuk PATBM dan PTPA	24	Persentase	39	437,500,000	39	500,000,000	39.00	550,000,000	39	550,000,000	38	550,000,000	39.00	550,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.20	Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah kecamatan yang telah memenuhi standar Kecamatan Layak Anak /	31	Persentase	52	639,100,000	66	800,000,000	80.00	1,200,000,000	90	1,200,000,000	100	1,200,000,000	100.00	1,200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1202.21	Program Peningkatan Kelembagaan Dan Partisipasi Anak	Jumlah forum anak kecamatan Aktif /Jumlah Forum anak yang terbentuk	0	Persentase	100	550,000,000	100	700,000,000	100.00	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1203	PANGAN																
1203.15	Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Cadangan Pangan	87.3	Persen	87.50	2,925,000,000	88.00	2,350,000,000	89.00	2,550,000,000	90.00	3,100,000,000	91.00	3,150,000,000	91.00	3,150,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1204	PERTANAHAN																
1204.15	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun	98	Persentase	100	216,380,018,998	100	497,265,000,000	100.00	108,230,000,000	100	36,630,000,000	100	22,510,000,000	100.00	22,510,000,000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1205	LINGKUNGAN HIDUP																
1205.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	80	1,406,623,500	82	1,580,000,000	85.00	1,580,000,000	87	1,580,000,000	89	1,580,000,000	89.00	1,580,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor Prosentase pemenuhan	100	Persentase	100	5,994,745,500	100	6,555,000,000	100.00	6,555,000,000	100	6,555,000,000	100	6,555,000,000	100.00	6,555,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	101	250,000,000	0	-	-	-							Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	32,200,000	100	43,000,000	100.00	43,000,000	100	43,000,000	100	43,000,000	100.00	43,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	532,455,000	100	488,000,000	100.00	488,000,000	100	488,000,000	100	488,000,000	100.00	488,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan sampah di bank sampah	2500	Ton/Hari	1.05	2,972,408,132,000	2.1	53,967,964,000	3.15	54,017,964,000	4.2	54,067,964,000	5.25	54,092,964,000	5.25	54,092,964,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		meningkatnya pengelolaan sampah di TPSR	2500	Ton/Hari	11.2		22.4		33.60		44.8		56		56.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	meningkatnya kualitas udara yang cukup	66.5	Nilai	67	5,399,971,000	67.5	6,340,000,000	68.00	6,390,000,000	68.5	6,390,000,000	69	6,390,000,000	69.00	6,390,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		meningkatnya kualitas air	55	Nilai	55.5		56		56.50		57		57.5		57.50		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.17	Program Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam	0	Persentase	10	250,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	10.00	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.18	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas akses informasi sumber daya alam	0	Persentase	10	141,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	10.00	141,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.19	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Meningkatnya jumlah rth yang dikelola	0	Kecamatan	5	5,500,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	5.00	5,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.20	Program Penunjang Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	0	Persentase	10	1,480,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	10.00	1,480,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.21	Program Pengelolaan RTH DAN Konservasi Sumber Daya Alam	meningkatnya kualitas SDA dalam pengelolaan dan perlidungan konservasi	0 ha	HA	0	-	5	11,650,000,000	5.00	11,650,000,000	5	11,650,000,000	5	11,650,000,000	25.00	11,650,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1205.22	Program Informasi Dan Tata Lingkungan Hidup	meningkatnya Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	61.76	Persentase	65.71	-	70.07	2,550,000,000	75.35	2,550,000,000	80.23	2,550,000,000	85.02	2,550,000,000	85.02	2,550,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1205.23	Program penunjang kebersihan dan lingkungan hidup	meningkatnya kualitas kendaraan yang layak operasional	196	Kendaraan	196	10,500,000,000	223	9,023,000,000	223.00	8,850,000,000	223	8,850,000,000	223	8,850,000,000	223.00	8,850,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL																
1206.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	20	1,236,800,000	40	1,337,000,000	60.00	1,414,800,000	80	1,456,500,000	100	1,475,500,000	100.00	1,475,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1206.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	20	803,300,000	40	779,000,000	60.00	945,000,000	80	1,005,000,000	100	1,045,000,000	100.00	1,045,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1206.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	20	181,850,000	0	-	-	-	0	-	0	-	20.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1206.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	50,000,000	100	30,000,000	100.00	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100.00	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1206.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	35,450,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100.00	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1206.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan	100	Persentase	100	92,070,000	100	97,000,000	100.00	105,000,000	100	115,000,000	100	165,000,000	100.00	165,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1206.15	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan KTP -El Valid	96	Persentase	100	5,415,565,500	100	13,441,431,000	100.00	5,667,703,000	100	6,352,703,000	100	6,357,703,000	100.00	6,357,703,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Penerbitan KK Valid	96	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Penerbitan KIA Valid	0	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1206.16	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan Valid	100	Persentase	100	1,215,105,500	100	1,417,500,000	100.00	2,555,000,000	100	2,580,000,000	100	2,635,000,000	100.00	2,635,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Valid	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Kematian yang diterbitkan Valid	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1206.17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100	Persentase	100	1,549,150,000	100	1,488,850,000	100.00	1,475,000,000	100	1,525,000,000	100	1,550,000,000	100.00	1,550,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1206.18	Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan	Persentase jumlah OPD yang bekerjasama dalam Pemanfaatan Data	0	Persentase	20	1,425,612,000	40	1,545,650,000	60.00	1,615,000,000	80	1,685,000,000	100	1,645,000,000	100.00	1,645,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																
1207.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	1,127,343,000	100	1,132,000,000	100.00	1,132,000,000	100	1,132,000,000	100	1,132,000,000	100.00	1,132,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1207.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	767,157,000	100	836,700,000	100.00	836,000,000	100	836,700,000	100	836,700,000	100.00	836,700,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1207.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100	22,000,000	100	-	100.00	-	100	-	100	-	100.00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1207.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	67,000,000	100	100,000,000	100.00	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100.00	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1207.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya Peningkatan Kompentensi Aparatur	100	Persentase	100	22,350,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0			Kecamatan Sindang Jaya
1207.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	31,000,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1207.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan	100	Persentase	100	105,500,000	100	200,000,000	100.00	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100.00	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1207.15	Program Penataan dan Pembinaan Desa	Prosentase Pemerintah Desa Berkinerja Baik	9.75	Persentase	16.26	-	28.46	650,000,000	32.52	1,220,000,000	36.59	650,000,000	40.65	1,100,000,000	40.65	1,100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1207.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase BUMDes yang Berkembang	14.22	Persentase	24.39	777,000,000	28.46	1,100,000,000	32.52	1,100,000,000	36.59	1,100,000,000	40.65	1,100,000,000	40.65	1,100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Pengembanganan Lembaga Ekonomi Pedesaan	100	Persentase	100	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		20,000,000	Kecamatan Sepatan Timur

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1207.18	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa	14.22	Persentase	24.39	455,000,000	28.46	450,000,000	32.52	450,000,000	36.59	450,000,000	40.65	450,000,000	40.65	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Prosentase pemenuhan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun	100	Persentase	100	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		125,000,000	Kecamatan Panongan
1207.19	Program Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di fasilitasi	15	Desa	29	1,806,000,000	54	2,750,000,000	79.00	2,250,000,000	104	2,750,000,000	129	2,250,000,000	129.00	2,250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Prosentase Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	100	Persentase	100	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		120,000,000	Kecamatan Panongan
		Pengembanga n Lembaga Kemasyarakatan Desa	100	Persentase	100	20,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0		20,400,000	Kecamatan Mauk
		Program Pengembanga n Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	Kegiatan	1	149,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0		149,750,000	Kecamatan Pakuhaji
		Program Pengembanga n Lembaga Kemasyarakatan Desa	0			50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		50,000,000	Kecamatan Kemiri
1207.20	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan	Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	50	Persentase	55	1,074,893,400	57	1,074,893,400	60.00	1,074,893,400	65	1,074,893,400	67	1,074,893,400	70.00	1,074,893,400	Kecamatan Tigaraksa
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	100	Persentase	100	1,402,940,000	100	2,104,050,000	100.00	2,155,300,000	100	2,185,300,000	100	2,185,300,000	100.00	2,185,300,000	Kecamatan Cikupa

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	80	Persentase	80.00	1,261,700,000	85.00	820,740,000	85.00	820,740,000	90.00	820,740,000	90.00	820,740,000	90.00	820,740,000	Kecamatan Panongan
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	80	Persentase	80	1,170,775,000	85	939,775,000	85.00	939,775,000	90	939,775,000	90	939,775,000	90.00	939,775,000	Kecamatan Curug
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	0	Persentase	20.00	1,647,355,000	40.00	1,610,665,000	60.00	1,766,750,000	80.00	1,900,000,000	90.00	1,980,000,000	90.00	1,980,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa	10	Persentase	10.00	1,539,166,500	20.00	1,438,049,500	30.00	1,780,620,476	40.00	1,888,267,658	50.00	1,993,283,818	50.00	1,993,283,818	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	25	Persentase	50.00	783,000,300	65.00	880,325,000	70.00	907,000,000	75.00	907,000,000	80.00	907,000,000	80.00	907,000,000	Kecamatan Balaraja
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	0	Persentase	25.00	776,656,500	50.00	745,353,000	62.50	800,000,000	75.00	844,000,000	88.00	884,000,000	88.00	884,000,000	Kecamatan Kresek
		Prosentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	100	Persentase	100.00	1,065,000,000	100.00	1,025,000,000	100.00	1,065,000,000	100.00	1,065,000,000	100.00	1,515,000,000	100.00	1,515,000,000	Kecamatan Kronjo
		Prosentase kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa	97	Persentase	100.00	1,390,545,000	100.00	2,308,600,000	100.00	2,387,500,000	100.00	2,571,000,009	100.00	2,831,000,000	100.00	2,831,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	10	Persentase	25.00	709,600,000	45.00	949,275,000	65.00	975,000,000	85.00	865,000,000	100.00	995,000,000	100.00	995,000,000	Kecamatan Rajeg

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	25	Persentase	30.00	1,021,430,000	40.00	710,380,000	50.00	910,200,000	60.00	937,000,000	70.00	1,047,000,000	75.00	1,047,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Kelompok Masyarakat yang Difasiltasi Dalam Pemberdayaa	45	Persentase	50.00	762,921,000	55.00	1,125,000,000	60.00	1,125,000,000	65.00	1,125,000,000	70.00	1,125,000,000	70.00	1,125,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi di Kecamatan	0	Persentase	100.00	55,000,000	100.00	55,000,000	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	100.00	65,000,000	100.00	65,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa	0	Persentase	10.00	1,052,858,000	15.00	1,020,800,000	20.00	1,090,185,000	25.00	1,041,600,000	30.00	1,063,600,000	30.00	1,063,600,000	Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Masyarakat Yang di Fasilitasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	0	Persentase	25.00	1,739,850,360	58.00	1,327,768,000	62.50	2,167,768,000	75.00	2,167,768,000	88.00	2,167,768,000	88.00	2,167,768,000	Kecamatan Kosambi
		prosentase masyarakat yang di fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	50	Persentase	55.00	704,672,808	60.00	779,250,000	65.00	860,175,000	70.00	949,642,500	75.00	1,048,572,250	75.00	1,048,572,250	Kecamatan Pagedangan
		Persentase Masyarakat Yang Difasilitasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	70	Persentase	75.00	636,840,000	80.00	765,219,500	85.00	735,000,000	90.00	745,000,000	95.00	755,000,000	95.00	755,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	40	Persentase	80.00	635,400,000	90.00	1,714,970,000	90.00	1,745,000,000	90.00	1,745,000,000	90.00	1,745,000,000	90.00	1,745,000,000	Kecamatan Jayanti
		Prosentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	85	Persentase	75.00	310,000,000	80.00	580,200,000	85.00	995,000,000	86.00	1,140,000,000	87.00	1,275,000,000	88.00	1,275,000,000	Kecamatan Kemiri

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	0	Persentase	25.00	840,000,000	50.00	840,000,000	62.50	840,000,000	75.00	1,200,000,000	75.00	840,000,000	88.00	840,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan	75	Persentase	75.00	835,265,000	78.75	740,400,000	82.50	720,400,000	86.25	720,400,000	90.00	740,400,000	90.00	740,400,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	25	Persentase	50.00	525,000,000	62.50	1,045,000,000	75.00	705,000,000	88.00	790,000,000	88.00	820,000,000	88.00	820,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa	0	Persentase	10.00	1,037,150,000	20.00	1,013,750,000	30.00	1,155,212,500	40.00	1,205,973,125	50.00	1,263,371,781	50.00	1,263,371,781	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Kelompok Masyarakat yang di Fasilitasi dalam Pemberdayaa	25	Persentase	25.00	2,343,961,500	50.00	3,049,328,150	62.50	2,701,586,900	75.00	2,724,506,670	88.00	2,767,475,700	88.00	2,767,475,700	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	0	Persentase	25.00	868,538,000	50.00	1,248,080,000	62.50	1,379,802,500	75.00	1,389,522,875	88.00	1,396,975,000	88.00	1,396,975,000	Kecamatan Solear
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	60	Persentase	65.00	276,600,000	70.00	2,235,000,000	75.00	1,066,000,000	80.00	1,256,000,000	85.00	1,256,000,000	90.00	1,256,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat/	20	Persentase	20.00	575,000,000	20.00	910,000,000	20.00	935,000,000	20.00	935,000,000	20.00	835,000,000	100.00	835,000,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat	40	Persentase	50.00	649,880,000	60.00	585,000,000	70.00	610,000,000	75.00	610,000,000	80.00	685,000,000	80.00	685,000,000	Kecamatan Gunung Kaler

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1207.21	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Baik	8.1	Persentase	16.26	682,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	16.26		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Baik	0			40,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0			Kecamatan Gunung Kaler
1207.22	Program Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Desa yang Pengelolaan keuangan sesuai SAP dan Tertib Asset	6.1	Persentase	11.79	1,110,000,000	21.95	800,000,000	32.11	800,000,000	42.28	800,000,000	52.44	800,000,000	52.44	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
		Prosentase Desa yang Pengelolaan keuangan sesuai SAP dan Tertib Asset	0			25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		25,000,000	Kecamatan Kemiri
		Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	100	Persentase	100	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		45,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase Pemenuhan Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa	100	Persentase	100	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		30,000,000	Kecamatan Panongan
1208	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
1208.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80	Persentase	80	2,091,331,000	80	1,407,509,400	80.00	1,548,258,400	80	1,703,082,000	80	1,873,390,000	80.00	1,873,390,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80	Persentase	80	391,650,000	80	1,445,132,700	80.00	1,589,644,300	80	1,748,609,400	80	1,923,469,000	80.00	1,923,469,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1208.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase implementasi SOP	80	Persentase	80	190,330,000	80	88,000,000	80.00	132,000,000	80	198,000,000	80	217,800,000	80.00	217,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	80	Persentase	80	88,000,000	80	96,800,000	80.00	106,480,000	80	117,128,000	80	128,840,800	80.00	128,840,800	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	80	Persentase	80	82,525,000	80	90,777,500	80.00	99,854,500	80	109,840,000	80	120,824,000	80.00	120,824,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	80	Persentase	80	209,175,000	80	230,092,500	80.00	253,100,400	80	278,411,000	80	350,250,000	80.00	350,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.15	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Persentase KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	24.83	Persentase	25.95	1,553,762,000	26.1	2,204,138,000	26.30	1,819,552,000	26.41	2,001,506,000	26.65	2,201,656,500	26.65	2,201,656,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Persentase KB Baru	43.22	Persentase	44.1		44.5		44.80		45.1		45.5		45.50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Menurunnya angka Putus Pakai Alat Kontrasepsi	5.89	Persentase	5.5		5.2		4.80		4.5		4.1		4.10		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.17	Program Pengendalian Penduduk	Tersedianya pengembanga n model solusi strategis pengendalian dampak	1	Rekomendasi	1	577,000,000	1	592,100,000	1.00	679,200,000	1	767,120,000	1	861,332,000	5.00	861,332,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki data dan informasi	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1208.19	Program Penyediaan Informasi Dan Data Keluarga	Persentase penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurah	100	Persentase	100	340,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.16	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Dan Remaja	Meningkatnya Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif	82.3	Persentase	82.5	1,829,400,000	82.75	2,237,020,000	83.00	2,463,574,000	83.25	2,709,931,000	83.5	2,978,422,000	83.50	2,978,422,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1208.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri	Meningkatnya Persentase PPKBD Mandiri	1.1	Persentase	2	6,869,800,000	3	7,556,780,000	4.00	8,312,458,000	5	9,143,703,000	6	10,058,073,000	6.00	10,058,073,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kelompok Masyarakat yang berperan dalam Program	10.58	Persentase	21.17		31.75		42.34		52.92		63.5		63.50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1209	PERHUBUNGAN																
1209.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	12,501,080,000	100	12,687,600,000	100.00	12,737,600,000	100	12,787,600,000	100	12,837,600,000	100.00	12,837,600,000	Dinas Perhubungan
1209.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	4,100,960,000	100	4,711,920,000	100.00	4,926,920,000	100	5,146,920,000	100	5,456,920,000	100.00	5,456,920,000	Dinas Perhubungan
1209.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase pemenuhan aparatur yang terfasilitasi dalam penerapan disiplin	100	Persentase	100	518,000,000	100	760,000,000	100.00	765,000,000	100	780,000,000	100	790,000,000	100.00	790,000,000	Dinas Perhubungan
1209.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase Pemenuhaan kapasitas sumber daya aparatur	20	Persentase	20	700,000,000	20	750,000,000	20.00	775,000,000	20	800,000,000	20	825,000,000	100.00	825,000,000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1209.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase ketersedian dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	54,000,000	100	54,000,000	100.00	54,000,000	100	54,000,000	100	54,000,000	100.00	54,000,000	Dinas Perhubungan
1209.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	395,000,000	100	395,000,000	100.00	395,000,000	100	395,000,000	100	445,000,000	100.00	445,000,000	Dinas Perhubungan
1209.15	Program Manajemen Lalu Lintas	Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	18	Titik	2	15,896,000,000	3	11,614,000,000	4.00	24,886,000,000	4	22,004,000,000	5	25,456,000,000	18.00	25,456,000,000	Dinas Perhubungan
1209.16	Program Keselamatan Lalu Lintas	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	435	Angka	413	8,285,000,000	392	16,780,000,000	372.00	37,065,000,000	353	26,165,000,000	335	38,175,000,000	335.00	38,175,000,000	Dinas Perhubungan
1209.17	Program Pelayanan Angkutan Umum (SITRAM)	Pengembangan Jaringan dalam Trayek dan tidak dalam Trayek	19	Jaringan	1	1,550,000,000	1	1,950,000,000	1.00	2,450,000,000	2	3,250,000,000	2	3,700,000,000	7.00	3,700,000,000	Dinas Perhubungan
1209.18	Program Penerangan Jalan Umum (PJU)	Prosentase Ketersediaan PJU	10	Persentase	10	37,450,000,000	10	31,150,000,000	10.00	29,800,000,000	10	31,120,000,000	10	37,100,000,000	10.00	37,100,000,000	Dinas Perhubungan
1210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
1210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	1,387,650,000	100	1,562,000,000	100.00	1,630,000,000	100	1,769,000,000	100	1,957,000,000	100.00	1,957,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	1,021,050,000	100	1,239,000,000	100.00	1,254,000,000	100	1,270,000,000	100	1,385,000,000	100.00	1,385,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1210.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan disiplin aparatur	100	Persentase	100	61,930,000	100	175,000,000	100.00	175,000,000	100	175,000,000	100	175,000,000	100.00	175,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	Persentase	0	-	100	60,000,000	100.00	80,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100.00	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	36,000,000	100	38,000,000	100.00	38,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase kesesuaian sasaran/program dalam RENJA OPD terhadap RKPD dan	100	Persentase	100	104,150,000	100	115,000,000	100.00	122,500,000	100	125,000,000	100	132,000,000	100.00	132,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	100	Persentase	100	2,297,550,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.16	Program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi	Prosentase SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi dan informasi	100	Persentase	100	1,025,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.17	Program kerjasama informasi dan media massa	Prosentase kerjasama informasi dengan insan media	100	Persentase	100	2,800,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.18	Program implementasi dan pengembangan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Prosentase implementasi dan pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan	100	Persentase	100	1,200,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika (program baru)	Prosentasi pemanfaatan teknologi informatika	41	Persentase	50	5,447,950,000	0	-	-	-	0	-	0	-	50.00		Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1210.20	Program pengembangan aplikasi/sistem informasi manajemen (program baru)	Prosentasse aplikasi yang terintegrasi	2	Persentase	3	825,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	3.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.21	Program fasilitasi peningkatan sdm bidang teknologi informatika	Prosentase SDM yang kompeten di Bidang IT	100	Persentase	100	313,100,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.22	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase pengelolaan sistem yang terintegrasi	0	Persentase	0	-	3.5	9,300,000,000	3.55	10,850,000,000	3.7	11,850,000,000	4	12,750,000,000	4.00	12,750,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.23	Program Pengelolaan Informasi Publik	Angka Indeks persepsi keterbukaan informasi publik	0	Indeks	0	-	75	2,275,000,000	85.00	2,560,000,000	90	3,102,000,000	95	3,432,000,000	95.00	3,432,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.24	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	Prosentase pengelolaan komunikasi publik	0	Persentase	0	-	25	3,630,000,000	50.00	3,675,000,000	75	5,470,000,000	100	6,125,000,000	100.00	6,125,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.25	Program Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Prosentase Penyelesaian Sengketa Informasi	0	Persentase	0	-	62.5	125,000,000	75.00	125,000,000	87.5	125,000,000	100	125,000,000	100.00	125,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1210.26	Program Pengembangan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi	0	Persentase	0	-	40	19,400,000,000	60.00	19,950,000,000	80	20,150,000,000	100	15,150,000,000	100.00	15,150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1211	KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH																
1211.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	75	1,455,947,720	80	1,467,500,000	85.00	1,520,200,000	90	1,534,900,000	99	1,557,500,000	100.00	1,557,500,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1211.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	75	954,222,900	80	1,069,600,000	85.00	1,130,200,000	90	1,194,800,000	99	1,275,400,000	100.00	1,275,400,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Implementasi SOP	100	Persentase	75	51,750,000	80	-	85.00	-	90	-	99	-	100.00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0			91,695,000		108,000,000		117,000,000		127,000,000		139,000,000		139,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	75	23,427,000	80	26,000,000	85.00	28,500,000	90	32,000,000	99	35,500,000	100.00	35,500,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan	100	Persentase	75	364,647,500	80	373,500,000	85.00	382,000,000	90	404,000,000	99	435,000,000	100.00	435,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.15	Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Prosentase pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas usaha (HKI + PIRT dan	14.78	Persentase	25.28	2,026,627,000	25.8	1,215,060,000	38.70	1,428,735,000	51.6	1,638,735,000	64.5	1,848,735,000	64.50	1,848,735,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Prosentase Pelaku Usaha Mikro Yang mengikuti Pelatihan (Kewirausahaan dan	10.5	Persentase	19.3		38.6		57.90		77.2		96.5		96.50		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Persentase Produk Lolos Kurasi (Pemilihan Produk)	4.56	Persentase	12.5		25		37.50		50		62.5		62.50		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.16	Program Peningkatan Daya Saing Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro yang Menjalin Kemitraan	12.89	Persentase	10	1,132,047,500	20	1,478,900,000	30.00	1,334,400,000	40	1,584,400,000	50	1,834,400,000	50.00	1,834,400,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Usaha Mikro yang Memilki Pangsa Pasar Keluar Daerah	5.85	Persentase	5.25		10.5		15.75		21		26		26.00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	22.23	Persentase	13.3	1,370,473,000	26.6	1,406,834,000	39.90	1,706,834,000	53.2	2,006,834,000	66.5	2,306,834,000	66.50	2,306,834,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Prosentase Koperasi Berkualitas	22.23	Persentase	20		40		60.00		80		100		100.00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Persentase Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	18	Persentase	20		40		60.00		80		100		100.00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1211.18	Program Fasilitasi Pembiayaan Koperasi Dan UMK	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah	62.8	Persentase	16.75	5,597,799,259	16.75	5,684,073,472	16.75	5,784,300,396	16.75	6,031,995,415	16.75	6,293,275,186	83.75	6,293,275,186	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1212	PENANAMAN MODAL																
1212.15	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor (PMDN dan PMA) baru	1159	Investor	1.275	620,000,000	1.402	900,000,000	1.54	700,000,000	1.697	650,000,000	1.867	850,000,000	1.87	850,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1212.16	Program pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	Skor kepatuhan investor yang melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM)	95	Nilai	95	348,000,000	96	460,000,000	96.00	460,000,000	97	460,000,000	98	510,000,000	98.00	510,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1213	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1213.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	798,866,480	100	805,250,000	100.00	805,250,000	100	805,250,000	100	805,250,000	100.00	805,250,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1213.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	495,400,000	100	575,000,000	100.00	580,000,000	100	605,000,000	100	640,000,000	100.00	640,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1213.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	58,989,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100.00	40,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1213.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100	Persentase	100	150,875,000	100	89,000,000	100.00	89,000,000	100	139,000,000	100	109,000,000	100.00	109,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1213.15	Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	90	Persentase	98	3,619,340,000	98	5,385,000,000	98.00	5,750,000,000	98	6,200,000,000	100	6,800,000,000	100.00	6,800,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1213.17	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Prosentase kelompok masyarakat berperan aktif dalam berolahraga	86	Persentase	90	1,771,000,000	90	4,800,000,000	95.00	4,500,000,000	95	4,000,000,000	100	4,750,000,000	100.00	4,750,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah atlet yang dikirim (POPNAS)	63	Atlet	30		0		50.00		0		60		60.00		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah atlet yang dikirim (POPWIL dan POPDA)	323	Atlet	0		345		-		370		0		370.00		Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1214	STATISTIK																

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1214.15	Program Statistik Sektoral	Prosentase data statistik sektoral	0	Persentase	0	-	25	1,325,000,000	50.00	1,400,000,000	75	1,520,000,000	100	1,650,000,000	100.00	1,650,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1215	PERSANDIAN																
1215.15	Program Pengamanan Informasi	Angka Indeks keamanan informasi (KAMI)	0	Indeks	0	-	275	1,300,000,000	350.00	1,500,000,000	456	1,450,000,000	550	1,550,000,000	550.00	1,550,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1215.16	Program Pola Hubungan Jaringan Persandian	Prosentase pola hubungan jaringan persandian yang terkoordinasi	0	Persentase	0	-	175	75,000,000	280.00	75,000,000	325	75,000,000	450	100,000,000	450.00	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
1216	KEBUDAYAAN																
1216.15	Program pelestarian kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	27	Event	27	1,041,000,000	31	1,300,000,000	35.00	1,830,000,000	39	1,760,000,000	43	2,550,000,000	43.00	2,550,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1217	PERPUSTAKAAN																
1217.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	1,208,570,000	100	2,474,000,000	100.00	2,549,000,000	100	2,599,000,000	100	2,584,000,000	100.00	2,584,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1217.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	1,029,820,000	100	1,905,000,000	100.00	2,055,000,000	100	2,205,000,000	100	2,305,000,000	100.00	2,305,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1217.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100	26,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Perpustakaan dan Arsip
1217.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	-	100	800,000,000	100.00	700,000,000	100	700,000,000	100	700,000,000	100.00	700,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1217.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	33,300,000	100	35,000,000	100.00	40,000,000	100	50,000,000	100	55,000,000	100.00	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1217.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan	100	Persentase	100	73,660,000	100	100,000,000	100.00	110,000,000	100	125,000,000	100	140,000,000	100.00	140,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1217.15	Program pengembangan koleksi bahan pustaka , sarana prasarana dan kerja sama perpustakaan	Persentase Koleksi bahan bacaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bacaan	12.87	Persentase	17.87	1,330,000,000	22.87	2,000,000,000	27.87	2,400,000,000	32.87	2,550,000,000	37.87	2,700,000,000	46.00	2,700,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Persentase revitalisasi perpustakaan umum	0	Persentase	2		2		2.00		2		2		10.00		Dinas Perpustakaan dan Arsip
1217.16	Program pengembangan layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan	40	Persentase	47	1,600,000,000	67	2,150,000,000	77.00	2,400,000,000	87	2,450,000,000	100	2,500,000,000	100.00	2,500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
1218	KEARSIPAN																
1218.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku, pemilahan arsip inaktif	6.6	Persentase	26	1,017,500,000	46	1,354,000,000	66.00	1,260,000,000	86	1,210,000,000	100	1,210,000,000	100.00	1,210,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1218.16	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	Persentase Informasi tentang arsip yang diolah secara elektronik dan informasi	60	Persentase	60	1,713,000,000	70	2,145,000,000	80.00	2,302,000,000	90	2,292,250,000	100	2,517,250,000	100.00	2,517,250,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
20	URUSAN PILIHAN																
2001	PERIKANAN																
2001.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	993,168,000	100	1,140,960,000	100.00	1,195,950,000	100	1,255,925,000	100	1,316,775,000	100.00	1,316,775,000	Dinas Perikanan
2001.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	619,482,000	100	898,037,100	100.00	833,000,000	100	810,850,000	100	794,750,000	100.00	794,750,000	Dinas Perikanan
2001.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan kedisplinan aparatur	100	Persentase	100	24,000,000	100	110,000,000	-	-	-	-	-	-	100.00		Dinas Perikanan
2001.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	59,310,000	100	65,000,000	100.00	71,500,000	100	75,075,000	100	79,100,000	100.00	79,100,000	Dinas Perikanan
2001.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	166,240,000	100	183,350,000	100.00	187,350,000	100	194,050,000	100	199,625,000	100.00	199,625,000	Dinas Perikanan
2001.15	Program Peningkatan Sumberdaya Lingkungan Perikanan	Persentase Peningkatan Sumberdaya Lingkungan Perikanan	0	Persentase	100	774,770,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2001.16	Program Pengembangan Kawasan Budidaya	Persentase Pengembangan Kawasan Budidaya	0	Persentase	20	396,000,000	25	-	50.00	-	75	-	100	-	100.00		Dinas Perikanan
2001.17	Program Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau	Laju Produksi Benih Ikan di BBI	4.5	Persentase	5	800,000,000	10	800,000,000	10.00	800,000,000	10	800,000,000	10	800,000,000	10.00	800,000,000	Dinas Perikanan
2001.18	Program Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan	PENINGKATAN HARGA IKAN DI TPI	8.6	Persentase	1.4	600,000,000	1.5	600,000,000	1.70	600,000,000	1.8	600,000,000	2	650,000,000	2.00	650,000,000	Dinas Perikanan
2001.19	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	33.27	Kg/Kapita/Th	34.6	1,100,000,000	35.99	1,510,000,000	37.41	1,460,000,000	38.4	3,310,000,000	40.45	1,310,000,000	40.45	1,310,000,000	Dinas Perikanan
2001.20	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Persentase Pembudidaya yang lulus CPIB/CBIB (cara pembenihan/ budidaya ikan	60	Persentase	80	1,209,230,000	0	-	-	-	0	-	0	-	-		Dinas Perikanan
2001.21	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan	Laju Produksi Perikanan Tangkap	0.5	Persentase	0.5	1,600,000,000	0.5	1,800,000,000	0.50	1,850,000,000	0.5	1,900,000,000	0.5	1,950,000,000	0.50	1,950,000,000	Dinas Perikanan
2001.22	Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya	Produktivitas Perikanan Budidaya	4.2	Ton/HA	0	-	4.6	4,300,000,000	4.90	5,300,000,000	5.1	5,300,000,000	5.4	4,350,000,000	5.40	4,350,000,000	Dinas Perikanan
2002	PARIWISATA																
2002.15	Program pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata	Presentase Jumlah kunjungan wisatawan	78	Persentase	82	1,112,300,000	84	2,250,000,000	86.00	2,350,000,000	88	1,800,000,000	88	2,400,000,000	88.00	2,400,000,000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2003	PERTANIAN																
2003.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	1,961,900,000	100.00	1,933,500,000	100.00	2,054,500,000	100.00	2,054,500,000	100.00	2,129,500,000	100.00	2,129,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	1,281,000,000	100.00	1,336,500,000	100.00	2,290,000,000	100.00	2,315,000,000	100.00	2,315,000,000	100.00	2,315,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100.00	360,000,000	100.00	150,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	100.00	250,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Koordinasi dan Kompetensi Aparatur	100	Persentase	100.00	25,000,000	100.00	25,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	20,000,000	100.00	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	15,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	177,350,000	100.00	168,000,000	100.00	175,000,000	100.00	175,000,000	100.00	180,000,000	100.00	180,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.15	Program pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase Peningkatan Jumlah Petani Mandiri	0.97	Persentase	1.00	2,700,000,000	1.00	2,822,200,000	1.00	2,600,000,000	1.00	2,900,000,000	1.00	2,700,000,000	5.00	2,700,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Tenaga Penyuluh yang mengikuti pelatihan	0	Persentase	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2003.16	Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase Kenaikan Produksi Hasil Pertanian	2	Persentase	1.00	8,771,000,000	1.00	9,950,000,000	1.00	8,950,000,000	1.00	10,950,000,000	1.00	8,950,000,000	1.00	8,950,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.17	Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi peternakan	Persentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan	1.5	Persentase	1.50	1,060,000,000	1.50	1,850,000,000	1.50	1,850,000,000	1.50	2,050,000,000	1.50	2,050,000,000	1.50	2,050,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2003.18	Program peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Prosentase Jumlah Sampel yang memenuhi SNI	25	Persentase	5.00	940,000,000	5.00	2,900,000,000	5.00	2,900,000,000	5.00	2,900,000,000	5.00	2,900,000,000	50.00	2,900,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase jumlah hewan sakit yang recovery	30	Persentase	5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		55.00		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2005	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																
2005.15	Program Pengendalian dan Pengawasan Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi	Prosentase pelaku industri yang diawasi	20	Persentase	20	772,185,500	20	-	20.00	-	20	-	20	-	20.00		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2006	PERDAGANGAN																
2006.15	Program perlindungan konsumen dan tertib niaga	Prosentase UTTP yang sudah ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji	20	Persentase	20	1,792,841,316	20	-	20.00	-	20	-	20	-	20.00		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2006.16	Program Perdagangan Dalam Negeri, Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Prosentase Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor, serta Perdagangan	5.65	Persentase	5.65	1,961,935,000	0	-	-	-	0	-	0	-	5.65		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor, serta Perdagangan	12.5	Persentase	12.5		0		-		0		0		12.50		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2006.17	Program Perlindungan Konsumen	Prosentase UTTP yang sudah ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji	100	Persentase	20	-	40	701,500,000	60.00	701,500,000	80	701,500,000	100	701,500,000	100.00	701,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2006.18	Program Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Prosentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memenuhi standar Tertib Niaga	33.81	Persentase	0	-	33.81	2,329,810,000	50.71	1,897,810,000	67.62	1,897,810,000	85.02	1,897,810,000	85.02	1,897,810,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Prosentase Pelaku IKM yang berpeluang ekspor	45.54	Persentase	0		45.54		58.69		71.83		84.98		84.98		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2006.19	Program Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan	Prosentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi	20	Persentase	20	-	40	475,137,500	60.00	475,137,500	80	475,137,500	100	475,137,500	100.00	475,137,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2007	PERINDUSTRIAN																
2007.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	0	1,946,587,894	0	2,059,383,894	-	2,046,587,894	0	2,009,383,894	0	2,096,587,894	100.00	2,096,587,894	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2007.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	0	359,705,000	0	638,895,000	-	573,895,000	0	374,295,000	0	573,895,000	100.00	573,895,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2007.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	0	64,190,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2007.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	prosentase pembinaan pegawai	100	Persentase	0	-	0	150,000,000	-	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	100.00	150,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2007.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	0	44,585,000	0	44,585,000	-	44,585,000	0	44,585,000	0	44,585,000	100.00	44,585,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2007.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2007.15	Program Pengembangan Industri	Prosentase Pelaku Industri Kecil dan Menengah yang wajib standardisasi	12.34	Persentase	0	596,535,500	12.34	950,000,000	24.68	800,000,000	37.02	800,000,000	49.36	800,000,000	49.36	800,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2007.16	Program Pengendalian dan Pengawasan Perindustrian	Prosentase pelaku industri yang diawasi	20	Persentase	20	-	40	149,808,000	60.00	149,808,000	80	149,808,000	100	149,808,000	100.00	149,808,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2008	TRANSMIGRASI																
2008.15	Program Transmigrasi Regional	Jumlah calon trasnmigran yang terseleksi	5	KK	10	150,000,000	10	200,000,000	10.00	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	50.00	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja
30	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG																
3001	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3001.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Permasalahan Bidang Perekonomian Pembangunan yang diselesaikan	100	Persentase	100	48,602,571,100	100	52,637,000,000	100.00	57,809,500,000	100	63,360,450,000	100	69,246,495,000	100.00	69,246,495,000	Sekretariat Daerah
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	91	Persentase	91	10,832,570,000	92	11,253,843,500	93.00	11,316,366,900	94	11,489,943,250	94	11,778,233,615	94.00	11,778,233,615	Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	2,280,000,000	100	2,600,000,000	100.00	2,675,000,000	100	2,675,000,000	100	2,675,000,000	100.00	2,675,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	60.11	Persentase	70	1,153,993,954	73	1,168,493,954	75.00	1,168,493,954	77	1,168,493,954	80	1,168,493,954	80.00	1,168,493,954	Kecamatan Tigaraksa
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	1,194,746,449	100	922,855,000	100.00	1,196,200,000	100	1,203,120,000	100	1,193,120,000	100.00	1,193,120,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	Persentase	60.00	896,507,739	70.00	927,287,739	80.00	938,987,739	90.00	938,987,739	100.00	938,987,739	100.00	938,987,739	Kecamatan Panongan
		Prosentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50	Persentase	60	852,309,000	70	1,169,980,000	80.00	1,169,980,000	90	1,169,980,000	100	1,169,980,000	100.00	1,169,980,000	Kecamatan Curug
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	0	Persentase	22.70	874,740,000	25.27	974,000,000	26.02	1,003,000,000	26.02	1,003,000,000	26.02	1,003,000,000	26.02	1,003,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	857,526,000	100.00	942,136,000	100.00	943,304,970	100.00	981,770,219	100.00	1,022,158,820	100.00	1,022,158,820	Kecamatan Pasar Kemis

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	Persentase	100.00	661,867,071	100.00	786,386,000	100.00	786,386,000	100.00	786,386,000	100.00	786,386,000	100.00	786,386,000	Kecamatan Balaraja
		presentase pemenuhan pelayanaan administrasi perkantoran	90	Persentase	100.00	879,943,400	100.00	756,863,992	100.00	797,863,992	100.00	839,863,992	100.00	878,863,992	100.00	878,863,992	Kecamatan Kresek
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	551,262,200	100.00	494,261,200	100.00	550,462,200	100.00	550,462,200	100.00	550,462,200	100.00	550,462,200	Kecamatan Kronjo
		Prosentase peningkatan sumber daya penunjang pelayanan administrasi kantor	94.52	Persentase	100.00	308,743,428	100.00	10,830,650,000	100.00	893,250,000	100.00	991,150,000	100.00	1,067,450,000	100.00	1,067,450,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	766,565,000	100.00	685,000,000	100.00	849,000,000	100.00	959,000,000	100.00	992,000,000	100.00	992,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	701,499,000	100.00	654,701,250	100.00	737,050,000	100.00	814,300,000	100.00	814,000,000	100.00	814,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	937,735,105	100.00	870,000,000	100.00	877,000,000	100.00	879,000,000	100.00	881,000,000	100.00	881,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	484,200,000	100.00	666,800,000	100.00	791,000,000	100.00	822,000,000	100.00	827,000,000	100.00	827,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	Persentase	70.00	1,120,041,000	75.00	1,268,255,000	80.00	1,395,500,000	85.00	1,442,500,000	90.00	1,521,500,000	90.00	1,521,500,000	Kecamatan Pakuhaji

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	Persentase	100.00	680,080,000	100.00	822,800,000	100.00	889,600,000	100.00	906,200,000	100.00	913,100,000	100.00	913,100,000	Kecamatan Kosambi
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	831,299,476	100.00	897,100,000	100.00	1,031,665,000	100.00	1,186,414,750	100.00	1,364,376,963	100.00	1,364,376,963	Kecamatan Pagedangan
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	539,960,000	100.00	542,800,000	100.00	605,800,000	100.00	615,800,000	100.00	625,800,000	100.00	625,800,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	600,958,211	100.00	1,344,791,000	100.00	1,351,591,000	100.00	1,351,591,000	100.00	1,351,591,000	100.00	1,351,591,000	Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	Persentase	70.00	741,776,622	71.00	664,900,000	72.00	1,031,020,875	73.00	1,136,443,967	74.00	1,247,095,593	74.00	1,247,095,593	Kecamatan Kemiri
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	Persentase	100.00	803,539,538	100.00	924,980,000	100.00	1,018,980,000	100.00	1,018,980,000	100.00	1,028,980,000	100.00	1,028,980,000	Kecamatan Sukadiri
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90	Persentase	90.00	576,160,000	92.50	625,400,000	92.50	625,400,000	95.00	625,400,000	95.00	647,000,000	95.00	647,000,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	Persentase	100.00	672,156,000	100.00	767,550,600	100.00	837,000,000	100.00	922,000,000	100.00	1,047,000,000	100.00	1,047,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	695,015,080	100.00	874,817,000	100.00	1,096,839,350	100.00	1,134,516,318	100.00	1,174,102,133	100.00	1,174,102,133	Kecamatan Sindang Jaya

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Persentase	100.00	1,164,070,000	100.00	1,081,438,000	100.00	1,099,166,000	100.00	1,056,354,100	100.00	944,542,401	100.00	944,542,401	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90	Persentase	100.00	770,455,000	100.00	1,207,745,800	100.00	1,071,513,294	100.00	1,174,949,605	0.00	1,271,269,309	100.00	1,271,269,309	Kecamatan Solear
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	512,397,000	100.00	666,326,000	100.00	876,000,000	100.00	954,000,000	100.00	947,000,000	100.00	947,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	20	Persentase	20.00	757,853,581	20.00	765,853,581	20.00	765,853,581	20.00	765,853,581	20.00	765,853,581	100.00	765,853,581	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95	Persentase	100.00	583,703,000	100.00	577,500,000	100.00	577,500,000	100.00	577,500,000	100.00	577,500,000	100.00	577,500,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100	Persentase	100	16,775,000,000	100	13,086,500,000	100.00	20,297,750,000	100	22,327,525,000	100	24,560,277,500	100.00	24,560,277,500	Sekretariat Daerah
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	91	Persentase	91	2,965,328,000	92	2,938,010,000	93.00	2,958,650,000	93	3,088,400,000	94	3,166,370,500	94.00	3,166,370,500	Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	1,365,000,000	100	1,835,000,000	100.00	1,535,000,000	100	1,585,000,000	100	1,535,000,000	100.00	1,535,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	65	Persentase	70	644,720,000	72	644,720,000	74.00	644,720,000	76	644,720,000	78	644,720,000	80.00	644,720,000	Kecamatan Tigaraksa

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	650,632,000	100	1,010,800,000	100.00	700,000,000	100	755,000,000	100	755,000,000	100.00	755,000,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	80	Persentase	80.00	259,553,000	85.00	394,313,000	85.00	319,313,000	90.00	394,313,000	90.00	319,313,000	90.00	319,313,000	Kecamatan Panongan
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	80	Persentase	80	458,270,000	85	908,270,000	85.00	833,270,000	90	908,270,000	90	833,270,000	90.00	833,270,000	Kecamatan Curug
			0			522,754,000		663,368,000		725,000,000		775,000,000		775,000,000		775,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80	Persentase	80.00	1,068,365,000	85.00	1,387,445,000	90.00	1,342,268,163	95.00	1,351,881,571	100.00	1,474,475,649	100.00	1,474,475,649	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	81.25	Persentase	87.50	354,800,000	94.00	729,300,000	94.00	729,300,000	94.00	729,300,000	94.00	729,300,000	94.00	729,300,000	Kecamatan Balaraja
		presentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	81.25	Persentase	87.50	362,150,000	94.00	560,000,000	94.00	580,000,000	94.00	600,000,000	94.00	620,000,000	94.00	620,000,000	Kecamatan Kresek
		Prosentase Pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	100.00	616,522,568	100.00	591,312,568	100.00	616,522,568	100.00	616,522,568	100.00	616,522,568	100.00	616,522,568	Kecamatan Kronjo
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja	73	Persentase	100.00	115,000,000	100.00	668,000,000	100.00	735,400,000	100.00	737,000,000	100.00	791,000,000	100.00	791,000,000	Kecamatan Mauk

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	440,334,944	100.00	539,000,000	100.00	865,000,000	100.00	667,500,000	100.00	920,000,000	100.00	920,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	352,905,000	100.00	1,148,260,000	100.00	805,000,000	100.00	821,000,000	100.00	682,000,000	100.00	682,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran	75	Persentase	80.00	550,187,900	85.00	930,000,000	90.00	1,090,000,000	95.00	770,000,000	100.00	810,000,000	100.00	810,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	687,421,959	100.00	345,000,000	100.00	1,010,000,000	100.00	1,045,000,000	100.00	1,080,000,000	100.00	1,080,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0	Persentase	70.00	315,642,000	75.00	498,000,000	80.00	530,000,000	85.00	555,000,000	90.00	583,000,000	90.00	583,000,000	Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.25	Persentase	87.50	584,818,098	94.00	488,550,000	94.00	597,669,700	94.00	614,436,670	94.00	631,203,640	94.00	631,203,640	Kecamatan Kosambi
		Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	Persentase	100.00	117,850,000	100.00	182,210,000	100.00	209,541,500	100.00	240,972,725	100.00	327,122,634	100.00	327,122,634	Kecamatan Pagedangan
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	80	Persentase	80.00	615,953,694	85.00	794,700,000	90.00	718,380,000	95.00	733,330,000	100.00	748,280,000	100.00	748,280,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	495,228,210	100.00	1,162,580,000	100.00	1,692,900,000	100.00	1,681,900,000	100.00	1,458,900,000	100.00	1,458,900,000	Kecamatan Jayanti

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	65	Persentase	70.00	384,155,000	71.00	456,350,000	80.00	705,000,000	85.00	895,000,000	90.00	1,585,000,000	90.00	1,585,000,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	81.25	Persentase	87.50	238,020,000	94.00	317,900,000	94.00	455,000,000	94.00	455,000,000	94.00	465,000,000	94.00	465,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85	Persentase	85.00	929,600,000	87.50	968,600,000	87.50	968,600,000	90.00	968,600,000	90.00	968,600,000	90.00	968,600,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	1,610,000,000	100.00	1,910,000,000	100.00	1,745,000,000	100.00	1,910,000,000	100.00	1,930,000,000	100.00	1,930,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0	Persentase	80.00	496,907,413	85.00	519,850,000	90.00	552,000,000	95.00	569,600,000	100.00	588,079,950	100.00	588,079,950	Kecamatan Sindang Jaya
		Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80	Persentase	80.00	1,720,056,000	85.00	1,415,371,160	90.00	1,425,549,416	95.00	1,435,751,199	100.00	1,445,676,949	100.00	1,445,676,949	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	81	Persentase	87.50	684,920,000	94.00	2,313,644,000	94.00	1,854,178,000	94.00	1,906,554,700	0.00	1,962,287,905	94.00	1,962,287,905	Kecamatan Solear
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80	Persentase	85.00	422,776,000	100.00	476,328,910	100.00	573,300,000	100.00	739,800,000	100.00	638,800,000	100.00	638,800,000	Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0			463,560,000		463,560,000		463,560,000		463,560,000		463,560,000		463,560,000	Kecamatan Sukamulya

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85	Persentase	90.00	751,560,000	95.00	834,560,000	95.00	809,560,000	100.00	811,960,000	100.00	811,960,000	100.00	811,960,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase impelementasi SOP	89.88	Persentase	95	1,613,558,000	96	1,726,000,000	-	-	-	-	-	-	98.00		Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan aparatur yang difasilitasi dalam penerapan disiplin	100	Persentase	100	120,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah aparatur yang terfasilitasi	38	Orang	39	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.00		Kecamatan Tigaraksa
		Meningkatnya disiplin aparatur	100	Persentase	100	118,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Cikupa
		Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100.00	23,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Panongan
		Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100	67,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Curug
		Prosentase Pemenuhan Peningkatan Disiplin Aparatur	40	Orang	40.00	51,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.00		Kecamatan Legok
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100.00	32,000,000	100.00	35,500,000	100.00	35,500,000	100.00	35,500,000	100.00	35,500,000	100.00	35,500,000	Kecamatan Balaraja

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Peningkatan aparatur	100	Persentase	100.00	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Kresek
		Prosentase Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	Persentase	100.00	15,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Kronjo
		Prosentase Implementasi standar kerja/SOP yang dipedomani	100	Persentase	100.00	-	100.00	40,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100.00	63,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Rajeg
		Aparatur/Peg awai yang difasilitasi	40	Pegawai	40.00	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.00		Kecamatan Sepatan
		Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	75	Persentase	80.00	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Teluknaga
		Persentase implementasi SOP	0	Persentase	100.00	-	100.00	-	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	56,000,000	100.00	56,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan program peningkatan disiplin aparatur	100	Persentase	100.00	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya	100	Persentase	100.00	25,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Kosambi

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100.00	50,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Pagedangan
		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	75	Persentase	80.00	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00		Kecamatan Jambe
		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	23,360,000	100.00	200,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur	70	Persentase	70.00	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	79.00		Kecamatan Kemiri
		prosentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur	0														Kecamatan Sukadiri
		Program peningkatan disiplin aparatur	82.5	Persentase	82.50	97,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	87.50		Kecamatan Cisauk
		Program peningkatan disiplin aparatur	0														Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara	0	Persentase	50.00	30,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00		Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Implementasi SOP	55	Persentase	55.00	162,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-		Kecamatan Kelapa Dua

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Implementasi SOP	0	Persentase		130,000,000									-	130,000,000	Kecamatan Solear
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100.00	26,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase impelementasi SOP	100	Persentase	100.00	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00		Kecamatan Sukamulya
		Prosentase impelementasi SOP	80	Persentase	85.00	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.00		Kecamatan Gunung Kaler
3001.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Persentase	100	1,380,000,000	100	1,483,000,000	100.00	1,669,800,000	100	1,836,780,000	100	2,020,458,000	100.00	2,020,458,000	Sekretariat Daerah
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	90	Persentase	90	597,810,000	91	609,766,200	92.00	609,766,200	93	621,961,600	93	621,961,600	93.00	621,961,600	Sekretariat DPRD
		Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur	3	Persentase	5	50,000,000	5	50,000,000	5.00	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	25.00	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100	Persentase	100	123,100,000	100	100,000,000	100.00	165,000,000	100	210,000,000	100	150,000,000	100.00	150,000,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN	100	Persentase	100	98,010,000	100	98,500,000	100.00	98,500,000	100	98,500,000	100	98,500,000	100.00	98,500,000	Kecamatan Curug

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	0	Orang	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00		Kecamatan Legok
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	75	Persentase	80.00	20,265,000	85.00	7,978,000	90.00	100,000,000	95.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase Peningkatan aparatur	100	Persentase	75.00	152,023,000	80.00	24,498,000	80.00	30,000,000	75.00	35,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	Kecamatan Kresek
		Prosentase peningkatan kapasitas pegawai (ASN)	0	Persentase	0.00	-	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase Peningkatan aparatur	100	Persentase	100.00	2,164,179,000	100.00	2,790,709,000	100.00	2,716,909,000	100.00	2,840,000,000	100.00	2,830,000,000	100.00	2,830,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	0	Orang	0.00	-	30.00	40,000,000	40.00	40,000,000	40.00	50,000,000	40.00	50,000,000	40.00	50,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara	75	Persentase	80.00	-	85.00	75,000,000	90.00	75,000,000	95.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Prosentase pemenuhan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	Persentase	0.00	-	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	Kecamatan Pakuhaji
		peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	35	Orang	38.00	-	38.00	100,000,000	38.00	100,000,000	38.00	100,000,000	38.00	100,000,000	38.00	100,000,000	Kecamatan Pagedangan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Pemenuhan Peningatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	Persentase	0.00	-	80.00	15,000,000	85.00	20,000,000	90.00	25,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase Peningkatan aparatur	0	Persentase	0.00	-	0.00	-	80.00	20,000,000	80.00	20,000,000	80.00	20,000,000	100.00	20,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70	Persentase	0.00	-	75.00	75,000,000	80.00	75,000,000	85.00	75,000,000	90.00	75,000,000	90.00	75,000,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	Persentase	0.00	-	85.00	-	90.00	100,000,000	95.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	65	Persentase	70.00	75,900,000	75.00	156,659,000	80.00	167,418,000	85.00	173,177,000	90.00	178,936,000	90.00	178,936,000	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase Peningkatan aparatur	100	Persentase	75.00	100,000,000	80.00	15,990,000	80.00	170,000,000	80.00	180,000,000	100.00	180,000,000	100.00	180,000,000	Kecamatan Solear
		Prosentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya	20	Persentase	0.00	-	0.00	75,000,000	20.00	75,000,000	35.00	75,000,000	45.00	75,000,000	100.00	75,000,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	0	Persentase	0.00	-	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	Persentase	100	152,110,000	100	134,500,000	100.00	145,500,000	100	154,000,000	100	162,500,000	100.00	162,500,000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase SPJ Tepat Waktu	70	Persentase	70		80		85.00		90		95		95.00		Sekretariat Daerah
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	91	Persentase	91	23,750,000	92	26,125,000	92.00	26,125,000	92	28,737,500	93	28,737,500	93.00	28,737,500	Sekretariat DPRD
		Persentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	35,200,000	100	35,200,000	100.00	35,200,000	100	35,200,000	100	35,200,000	100.00	35,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terpenuhinya Data Realisasi Anggaran SKPD	1	Dokumen	1	56,503,750	1	56,503,750	1.00	56,503,750	1	56,503,750	1	56,503,750	1.00	56,503,750	Kecamatan Tigaraksa
		Meningkatnya laporan capaian kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	39,600,000	100	50,500,000	100.00	52,000,000	100	52,000,000	100	52,000,000	100.00	52,000,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	80	Persentase	80.00	36,000,000	85.00	36,000,000	85.00	36,000,000	90.00	36,000,000	90.00	36,000,000	90.00	36,000,000	Kecamatan Panongan
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	80	Persentase	80	60,650,000	85	75,650,000	85.00	75,650,000	90	75,650,000	90	75,650,000	90.00	75,650,000	Kecamatan Curug
		Capaian Peningkatan Kinerja dan Keuangan	100	Persentase	0.00	30,000,000	0.00	40,000,000	-	50,000,000	0.00	55,000,000	0.00	55,000,000	100.00	55,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	44,750,000	100.00	57,870,000	100.00	72,336,875	100.00	74,803,719	100.00	77,393,905	100.00	77,393,905	Kecamatan Pasar Kemis

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	66.67	Persentase	100.00	57,500,000	100.00	45,300,000	100.00	45,300,000	100.00	45,300,000	100.00	216,300,000	100.00	216,300,000	Kecamatan Balaraja
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	66.67	Persentase	100.00	66,858,500	100.00	32,205,500	100.00	32,205,500	100.00	32,205,500	100.00	32,205,500	100.00	32,205,500	Kecamatan Kresek
		Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan	100	Persentase	100.00	54,000,000	100.00	80,850,000	100.00	56,900,000	100.00	95,550,000	100.00	102,900,000	100.00	102,900,000	Kecamatan Kronjo
		Prosentase peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan	94.84	Persentase	100.00	40,000,000	100.00	48,000,000	100.00	57,000,000	100.00	60,000,000	100.00	63,000,000	100.00	63,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	2,130,679,000	100.00	2,702,209,000	100.00	2,676,909,000	100.00	2,720,000,000	100.00	2,770,000,000	100.00	2,770,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase pemenuhan dokumen pelaporan capaian kinerja	100	Persentase	100.00	47,560,000	100.00	47,585,000	100.00	56,300,000	100.00	62,000,000	100.00	79,000,000	100.00	79,000,000	Kecamatan Sepatan
		Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga	62	Nilai	65.00	60,600,000	67.00	160,000,000	71.00	85,000,000	75.00	85,000,000	77.00	85,000,000	77.00	85,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Capaian peningkatan kinerja dan keuangan	26	Persentase	100.00	20,000,000	100.00	28,000,000	100.00	35,000,000	100.00	37,000,000	100.00	44,000,000	100.00	44,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	0	Persentase	100.00	44,126,000	100.00	45,700,000	100.00	49,000,000	100.00	54,000,000	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	Kecamatan Pakuhaji

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan	66.67	Persentase	100.00	58,450,000	100.00	55,000,000	100.00	90,000,000	100.00	90,000,000	100.00	90,000,000	100.00	90,000,000	Kecamatan Kosambi
		Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan	100	Persentase	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	46,000,000	100.00	52,900,000	100.00	60,835,000	100.00	60,835,000	Kecamatan Pagedangan
		Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	100	Persentase	100.00	51,350,000	100.00	43,500,000	100.00	44,500,000	100.00	49,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	37,700,000	100.00	42,316,789	100.00	78,616,789	100.00	78,616,789	100.00	78,616,789	100.00	78,616,789	Kecamatan Jayanti
		preosentase pemenuhan peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian	65	Persentase	70.00	45,000,000	71.00	33,900,000	72.00	77,000,000	73.00	84,000,000	74.00	92,000,000	74.00	92,000,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	66.67	Persentase	100.00	42,000,000	100.00	42,000,000	100.00	67,000,000	100.00	67,000,000	100.00	70,000,000	100.00	70,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan	90	Persentase	90.00	32,250,000	90.00	32,250,000	90.00	32,500,000	90.00	32,500,000	90.00	32,500,000	90.00	32,500,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	50,000,000	100.00	60,000,000	100.00	65,000,000	100.00	85,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	51,525,000	100.00	44,400,000	100.00	46,620,000	100.00	48,951,000	100.00	51,498,550	100.00	51,498,550	Kecamatan Sindang Jaya

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	34,500,000	100.00	40,400,000	100.00	40,804,000	100.00	41,212,000	100.00	35,900,759	100.00	35,900,759	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	66.67	Persentase	100.00	56,695,000	100.00	126,150,000	100.00	140,000,000	100.00	140,000,000	100.00	140,000,000	100.00	140,000,000	Kecamatan Solear
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	80	Persentase	85.00	50,000,000	90.00	50,000,000	95.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Meningkatnya kinerja perencanaan dan keuangan di kecamatan Sukamulya	80	Persentase	80.00	40,500,000	80.00	40,500,000	80.00	40,500,000	80.00	40,500,000	80.00	40,500,000	80.00	40,500,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	39,250,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	40,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase Dokumen Perencana Tepat Waktu	100	Persentase	100	369,865,000	100	400,000,000	100.00	558,115,000	100	550,000,000	100	708,115,000	100.00	708,115,000	Sekretariat Daerah
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	92	Persentase	92	465,832,500	92	469,000,750	93.00	490,708,250	93	494,193,325	93	494,193,325	93.00	494,193,325	Sekretariat DPRD
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	92,300,000	100	93,800,000	100.00	113,800,000	100	93,800,000	100	113,800,000	100.00	113,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan SKPD	1	Dokumen	1	109,788,580	1	89,788,580	1.00	89,788,580	1	89,788,580	1	89,788,580	1.00	89,788,580	Kecamatan Tigaraksa

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Meningkatnya perencanaan SKPD	100	Persentase	100	122,500,000	100	119,500,000	100.00	133,000,000	100	133,000,000	100	168,000,000	100.00	168,000,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	80	Persentase	80.00	61,490,000	85.00	73,070,000	85.00	73,070,000	90.00	73,070,000	90.00	108,070,000	90.00	108,070,000	Kecamatan Panongan
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	80	Persentase	80	82,250,000	85	82,250,000	85.00	82,250,000	90	82,250,000	90	117,250,000	90.00	117,250,000	Kecamatan Curug
		Capaian Peningkatan Perencanaan SKPD	100	Persentase	0.00	83,625,000	0.00	103,225,000	-	125,000,000	0.00	140,000,000	0.00	175,000,000	100.00	175,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	78,290,000	100.00	159,767,500	100.00	111,314,625	100.00	116,880,462	100.00	122,724,484	100.00	122,724,484	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	66.67	Dokumen	100.00	125,400,000	100.00	113,250,000	100.00	113,250,000	100.00	113,250,000	100.00	148,250,000	100.00	148,250,000	Kecamatan Balaraja
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	66.67	Persentase	83.33	140,648,000	100.00	95,948,000	100.00	95,948,000	100.00	95,948,000	83.33	130,948,000	83.33	130,948,000	Kecamatan Kresek
		Prosentase Capaian Program Peningkatan Perencanaan SKPD	100	Persentase	100.00	93,500,000	100.00	109,500,000	100.00	74,600,000	100.00	109,500,000	100.00	109,500,000	100.00	109,500,000	Kecamatan Kronjo
		Prosentase kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran	92.72	Persentase	100.00	174,650,000	100.00	197,000,000	100.00	205,000,000	100.00	263,000,000	100.00	375,000,000	100.00	375,000,000	Kecamatan Mauk

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	74,400,000	100.00	120,000,000	100.00	50,000,000	100.00	135,000,000	100.00	115,000,000	100.00	115,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	53,055,000	100.00	91,275,000	100.00	99,275,000	100.00	127,000,000	100.00	120,000,000	100.00	120,000,000	Kecamatan Sepatan
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan Teluknaga	6	Dokumen	6.00	60,000,000	6.00	235,000,000	6.00	210,000,000	6.00	235,000,000	6.00	185,000,000	6.00	185,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Capaian peningkatan perencanaan SKPD	74	Persentase	100.00	60,750,000	100.00	48,000,000	100.00	54,000,000	100.00	60,000,000	100.00	66,000,000	100.00	66,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan program peningkatan perencanaan SKPD	0	Persentase	100.00	82,575,000	100.00	68,900,000	100.00	72,000,000	100.00	75,500,000	100.00	77,700,000	100.00	77,700,000	Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	66.67	Persentase	100.00	84,000,000	100.00	84,000,000	100.00	134,000,000	100.00	134,000,000	100.00	169,000,000	100.00	169,000,000	Kecamatan Kosambi
		Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan	100	Persentase	100.00	83,000,000	100.00	110,000,000	100.00	122,750,000	100.00	137,412,500	100.00	184,274,375	100.00	184,274,375	Kecamatan Pagedangan
		Persentase Peningkatan Perencanaan SKPD	100	Persentase	100.00	65,750,000	100.00	91,000,000	100.00	95,000,000	100.00	99,000,000	100.00	105,000,000	100.00	105,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	58,265,000	100.00	59,000,000	100.00	70,000,000	100.00	75,000,000	100.00	80,000,000	100.00	80,000,000	Kecamatan Jayanti

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		prosentase pemenuhan Peningkatan Perencanaan SKPD	65	Persentase	71.00	61,780,000	71.00	66,250,000	72.00	160,330,000	73.00	192,330,000	74.00	201,330,000	74.00	201,330,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	66.67	Persentase	100.00	67,000,000	100.00	70,000,000	100.00	95,000,000	100.00	95,000,000	100.00	95,000,000	100.00	95,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program Peningkatan Perencanaan SKPD	90	Persentase	90.00	64,750,000	90.00	107,250,000	90.00	107,250,000	90.00	107,250,000	90.00	119,750,000	90.00	119,750,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	137,000,000	100.00	108,000,000	100.00	150,000,000	100.00	160,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase kesesuaian sasaran/program dalam renja OPD terhadap RKPD dan	100	Persentase	100.00	91,362,000	100.00	104,650,000	100.00	109,882,500	100.00	115,376,625	100.00	121,145,457	100.00	121,145,457	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan	100	Persentase	100.00	82,825,000	100.00	143,375,650	100.00	143,931,807	100.00	144,489,693	100.00	145,057,989	100.00	145,057,989	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	66.67	Persentase	83.33	98,565,800	100.00	125,590,000	100.00	135,000,000	100.00	135,000,000	100.00	160,000,000	100.00	160,000,000	Kecamatan Solear
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	75	Persentase	80.00	120,574,000	85.00	133,000,000	90.00	108,000,000	95.00	143,000,000	100.00	143,000,000	100.00	143,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	0			82,000,000		82,000,000		82,000,000		82,000,000		82,000,000		82,000,000	Kecamatan Sukamulya

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100.00	70,580,000	100.00	61,000,000	100.00	111,000,000	100.00	61,000,000	100.00	61,000,000	100.00	61,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.08	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah	130	Kali	130	2,235,000,000	130	2,458,500,000	130.00	2,704,350,000	130	2,974,785,000	130	3,272,203,500	130.00	3,272,203,500	Sekretariat Daerah
3001.14	Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	Meningkatnya inovasi perangkat daerah	0			-		-	1.00	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	3.00	150,000,000	Kecamatan Tigaraksa
		Meningkatnya inovasi perangkat daerah	0	Persentase	100	-	100	150,000,000	100.00	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100.00	150,000,000	Kecamatan Cikupa
		Meningkatnya inovasi perangkat daerah	0			-		100,000,000	1.00	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	3.00	100,000,000	Kecamatan Panongan
		Jumlah Pengembangan Inovasi di Kecamatan	0	Angka	0	-	1	100,000,000	1.00	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4.00	100,000,000	Kecamatan Curug
		meningkatnya inovasi kecamatan	0	Angka	1.00	-	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	5.00	200,000,000	Kecamatan Legok
		Inovasi yang diimplementasikan	0	Jumlah	0.00	-	1.00	129,362,500	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	4.00	200,000,000	Kecamatan Pasar Kemis
		Inovasi dikecamatan Balaraja	2	Jumlah	2.00	-	2.00	145,000,000	2.00	200,000,000	2.00	200,000,000	2.00	200,000,000	10.00	200,000,000	Kecamatan Balaraja

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	0	Inovasi	1.00	-	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	5.00	200,000,000	Kecamatan Kresek
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	0	Persentase	0.00	-	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	0			-	1	50,000,000	1.00	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	4.00	100,000,000	Kecamatan Rajeg
		Inovasi Kecamatan	0	Jenis	0.00	-	1.00	42,000,000	1.00	45,000,000	1.00	35,000,000	1.00	35,000,000	4.00	35,000,000	Kecamatan Sepatan
		Jumlah Implementasi Inovasi	1	Inovasi	1.00	-	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000	2.00	500,000,000	10.00	500,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Tersedianya inovasi SKPD untuk diimplementasikan	0			-	1	78,500,000	1.00	80,000,000	1	85,000,000	1	90,000,000	4.00	90,000,000	Kecamatan Cisoka
		Tersedianya inovasi SKPD untuk diimplementasikan	0	Kegiatan	0.00	-	1.00	91,250,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	4.00	200,000,000	Kecamatan Pakuhaji
		jumlah pengembangan inovasi di kecamatan	0	Angka	0.00	-	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	4.00	100,000,000	Kecamatan Pagedangan
		Persentase pemenuhan pengembangan Inovasi Perangkat Daerah	0	Persentase	0.00	-	70.00	100,000,000	75.00	100,000,000	80.00	100,000,000	85.00	100,000,000	85.00	100,000,000	Kecamatan Jambe

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	1	Jumlah	1.00	-	3.00	150,000,000	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000	1.00	200,000,000	8.00	200,000,000	Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan Pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah	1	Desa	0.00	-	1.00	80,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	4.00	200,000,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase Pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah	0	Persentase	0.00	-	0.00	-	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Program pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah	75	Persentase	75.00	-	75.00	60,000,000	80.00	60,000,000	85.00	60,000,000	90.00	60,000,000	90.00	60,000,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	0	Persentase	0.00	-	1.00	175,000,000	-	170,000,000	0.00	150,000,000	0.00	150,000,000	1.00	150,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Jumlah Inovasi yang Diimplementa sikan di Kecamatan	0	Jumlah	0.00	-	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	1.00	200,000,000	4.00	200,000,000	Kecamatan Sindang Jaya
		Inovasi yang di implementasi kan	0	Inovasi	0.00	-	2.00	200,000,000	-	300,000,000	1.00	400,000,000	0.00	400,000,000	3.00	400,000,000	Kecamatan Kelapa Dua
		Jumlah Inovasi Daerah	0	Nilai	1.00	-	1.00	40,000,000	1.00	100,000,000	1.00	100,000,000	0.00	100,000,000	4.00	100,000,000	Kecamatan Solear
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	0	Persentase	0.00	-	0.00	-	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Mekar Baru

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentasi capaian implementasi inovasi	0	Persentase		-	100	100,000,000	100.00	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100.00	100,000,000	Kecamatan Sukamulya
		Capaian Inovasi yang di implementasi kan	0	Inovasi	0.00	-	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000	4.00	150,000,000	Kecamatan Gunung Kaler
3001.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu	87	Persentase	88	47,310,407,350	88.25	46,487,472,900	88.35	47,510,356,850	88.55	49,697,423,800	88.8	49,753,038,425	88.80	49,753,038,425	Sekretariat DPRD
3001.16	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk hukum yang ditetapkan	16	Persentase	16	945,190,000	18	1,081,000,000	18.00	1,159,810,000	21	1,212,654,300	26	1,276,257,929	100.00	1,276,257,929	Sekretariat Daerah
3001.17	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kewilayahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Jumlah LPPD Tepat Waktu	1	Dolumen	1	672,800,000	0	-	-	-	0	-	0	-	1.00		Sekretariat Daerah
		Jumlah OPD yang melaporkan LPPD Tepat Waktu	64	OPD	64		0		-		0		0		64.00		Sekretariat Daerah
		Jumlah Kewenangan yang dilaksanakan di Kecamatan	29	Kecamatan	29		0		-		0		0		29.00		Sekretariat Daerah
		Jumlah Kelurahan kategori Maju	28	Kelurahan	28		0		-		0		0		28.00		Sekretariat Daerah
		Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Pilar Batas dan Koordinat wilayah	2	Kecamatan	2		0		-		0		0		2.00		Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah Kelurahan yang memiliki data Monografi	28	Kelurahan	28		0		-		0		0		28.00		Sekretariat Daerah
3001.18	Program Fasilitasi Tatalaksana, Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rekomendasi hasil fasilitasi yang di tindaklanjuti	100	Persentase	100	564,400,000	100	-	100.00	-	100	-	100	-	100.00		Sekretariat Daerah
3001.19	Program Peningkatan Kesadaran Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Inventarisasi Sarana Prasarana Sosial	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesra	10	Jumlah	10	8,484,445,500	10	8,617,640,850	10.00	9,588,198,721	10	10,380,811,168	10	11,265,557,921	50.00	11,265,557,921	Sekretariat Daerah
		Persentase Pembina Keagamaan yang Aktif	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Sekretariat Daerah
3001.20	Program Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Prosentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa	80	Persentase	80	3,344,680,000	80	4,355,080,000	85.00	4,355,080,000	85	4,355,080,000	90	4,355,080,000	90.00	4,355,080,000	Sekretariat Daerah
		Tingkat kemandirian/ kematangan UKPBJ	2	Level	2		3		3.00		4		5		5.00		Sekretariat Daerah
3001.21	Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Dan Antar Pemerintah Daerah	Prosentase Kerjasama yang di tindaklanjuti	75	Persentase	75	123,500,000	0	-	-	-	0	-	0	-	75.00		Sekretariat Daerah
3001.22	Program Peningkatan Administrasi Perekonomian Dan Pambangunan	Prosentase Permasalahan Bidang Perekonomian Pembanguna n yang diselesaikan	100	Persentase	100	1,050,000,000	100	2,350,000,000	100.00	2,400,000,000	100	2,650,000,000	100	2,650,000,000	100.00	2,650,000,000	Sekretariat Daerah
		Prosentase BUMD dan BLUD yang mencapai target kinerja	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3001.23	Program Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan A yang sesuai dengan SOP	30	Persentase	40	165,000,000	50	300,000,000	60.00	300,000,000	70	300,000,000	80	300,000,000	80.00	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3001.25	Program Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan B yang sesuai dengan SOP	60	Persentase	65	165,000,000	70	300,000,000	75.00	300,000,000	80	300,000,000	90	300,000,000	90.00	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3001.26	Program Peningkatan Pengelaolaan Asset dan Standarisasi Barang Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Yang Akuntable	100	Persentase	100	565,000,000	100	621,500,000	100.00	683,650,000	100	752,015,000	100	827,216,500	100.00	827,216,500	Sekretariat Daerah
3001.30	Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Di kecamatan	75	Persentase	80	2,433,399,100	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00	2,433,399,100	Kecamatan Tigaraksa
		Persentase pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum di	100	Persentase	100	2,079,186,548	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	2,079,186,548	Kecamatan Cikupa
		Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan	75	Persentase	75.00	1,607,310,077	0	0	0	0	0	0	0	0	90.00	1,607,310,077	Kecamatan Panongan
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	75	Persentase	75	3,212,721,127	0	0	0	0	0	0	0	0	90.00	3,212,721,127	Kecamatan Curug
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	100	Persentase	100.00	1,181,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	1,181,482,000	Kecamatan Legok
		Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan	75	Persentase	80.00	3,816,221,202	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00	3,816,221,202	Kecamatan Pasar Kemis

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	0	Persentase	0.00	198,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44.44	198,790,000	Kecamatan Kresek
		Program Pelayanan Umum di Kecamatan	0	Persentase	0.00	918,429,286	0	0	0	0	0	0	0	0	-	918,429,286	Kecamatan Mauk
		Prosentase Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan umum	1	Persentase	2.00	675,678,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	675,678,500	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungjawaban Baik	75	Persentase	80.00	585,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	585,830,000	Kecamatan Teluknaga
		Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	75	Persentase	80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		100.00		Kecamatan Teluknaga
		Capaian Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan	50	Persentase	60.00	16,438,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.00	16,438,400,000	Kecamatan Cisoka
		prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan	0			934,374,916	0	0	0	0	0	0	0	0		934,374,916	Kecamatan Pakuhaji
		prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan	60	Persentase	65.00	1,240,615,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.00	1,240,615,000	Kecamatan Pagedangan
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	12.5	Persentase	12.50	508,704,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	508,704,000	Kecamatan Jayanti

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Capaian Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kecamatan	11.11	Persentase	15.41	370,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.41	370,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Di kecamatan Cisauk	100	Persentase	100.00	1,736,616,200	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	1,736,616,200	Kecamatan Cisauk
		Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungjawaban Baik	75	Persentase	75.00	306,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	306,700,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan	0	Persentase	80.00	698,864,900	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00	698,864,900	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase pemenuhan Pelayanan di Kecamatan	60	Persentase	70.00	5,704,304,496	0	0	0	0	0	0	0	0	90.00	5,704,304,496	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase pemenuhan Pelayanan di Kecamatan Kelapa Dua	60	Persentase	70.00		0.00		-		0.00		0.00		70.00		Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	32.42	Persentase	55.68	665,848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	665,848,000	Kecamatan Solear
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	32.42	Persentase	55.68		74.07		88.62		100.00		100.00		100.00		Kecamatan Solear
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	60	Persentase	0.00	411,226,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.00	411,226,000	Kecamatan Mekar Baru

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan	0			35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		35,000,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	75	Persentase	80.00	292,515,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	292,515,000	Kecamatan Gunung Kaler
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	0			959,650,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,650,700	Kecamatan Balaraja
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	47.43	Persentase	55		0	0	0	0	0	0	0	0	55		Kecamatan Balaraja
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	47.75	Persentase	55		0	0	0	0	0	0	0	0	55		Kecamatan Balaraja
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	0			539,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0		539,600,000	Kecamatan Kronjo
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	0			1,037,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0		1,037,644,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	0			3,220,928,842	0	0	0	0	0	0	0	0		3,220,928,842	Kecamatan Kosambi
		Persentase Pemenuhan Pelayanan di Kecamatan	75	Persentase	80.00	504,580,500	0	0	0	0	0	0	0	0	80.00	504,580,500	Kecamatan Jambe

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		prosentase pemenuhan Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan	70	Persentase	75	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		210,000,000	Kecamatan Kemeri
3001.31	Program Penanganan Kasus Pengaduan Dan Pengendalian Kebijakan KDH	Prosentase Penanganan Kasus/Perkara yang diselesaikan	100	Persentase	100	1,974,500,000	100	2,274,330,000	100.00	2,444,589,000	100	2,514,926,670	100	2,587,374,469	100.00	2,587,374,469	Sekretariat Daerah
		Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Sekretariat Daerah
3001.32	Program Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C	Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan C yang sesuai dengan SOP	65	Persentase	70	165,000,000	75	300,000,000	80.00	300,000,000	85	300,000,000	90	300,000,000	90.00	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3001.33	Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	55	Persentase	70	1,883,300,000	75	940,000,000	80.00	1,040,000,000	85	1,040,000,000	90	940,000,000	90.00	940,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3001.34	Program Fasilitasi Perundang- Undangan	Persentase produk hukum yang difasilitasi pembahasanny a	68.75	Persentase	88	18,524,985,800	88.2	19,113,955,550	88.30	20,627,364,375	88.47	20,678,118,375	88.6	21,005,004,935	88.60	21,005,004,935	Sekretariat DPRD
3001.36	Program Fasilitasi Tatalaksana dan Pelayanan Publik	Persentase OPD yang memiliki SOP Lengkap	100	Persentase	100	1,050,000,000	100	585,000,000	100.00	625,000,000	100	585,000,000	100	625,000,000	100.00	625,000,000	Sekretariat Daerah
		Jumlah OPD yang Melaksanaka n SOP dengan baik	63	OPD	63		0		63.00		0		63		63.00		Sekretariat Daerah
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar	20	Persentase	20		40		60.00		80		100		100.00		Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3001.37	Program Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Rekomendasi hasil fasilitasi yang di tindaklanjuti	0	Persentase	0	-	100	200,000,000	100.00	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100.00	350,000,000	Sekretariat Daerah
3001.38	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Prosentase Kerjasama yang di tindaklanjuti	0	Persentase	0	-	80	1,184,900,000	85.00	1,196,900,000	90	1,208,900,000	100	1,220,900,000	100.00	1,220,900,000	Sekretariat Daerah
3001.39	Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan	prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	80	Persentase	0	-	85	1,404,653,500	90.00	1,464,653,500	92	1,404,653,500	95	1,404,653,500	100.00	1,404,653,500	Kecamatan Tigaraksa
		Persentase Desa/Kelurahan dengan laporan pertanggungja waban baik	100	Persentase	0	-	100	618,696,000	100.00	982,000,000	100	952,550,000	100	999,437,500	100.00	999,437,500	Kecamatan Cikupa
		Prosentase Administrasi Pemerintahan	75	Persentase	0	-	80.00	748,628,000	85.00	748,628,000	85.00	748,628,000	90.00	748,628,000	90.00	748,628,000	Kecamatan Panongan
		Prosentase Administrasi Pemerintahan	75	Persentase	0	-	80	1,531,916,000	85.00	1,531,916,000	85	1,531,916,000	90	1,531,916,000	90.00	1,531,916,000	Kecamatan Curug
		Prosentase Administrasi Pemerintahan	0		0	-		769,297,000		890,000,000		935,000,000		995,000,000		995,000,000	Kecamatan Legok
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal maju	11.11	Persentase	0	-	33.33	1,937,781,790	55.56	1,879,618,144	77.78	1,966,915,050	100.00	2,054,729,004	100.00	2,054,729,004	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase desa/kelurahan dengan laporan pertanggungja waban baik	11.11	Persentase	0.00		33.33		55.56		77.78		100.00		100.00		Kecamatan Pasar Kemis

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	10.1	Persentase	0	-	22.22	664,790,000	33.33	671,290,000	44.44	673,290,000	55.55	678,290,000	60.78	678,290,000	Kecamatan Balaraja
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	33.33	Persentase	44.44		55.55		66.67		77.77		88.88		88.88		Kecamatan Balaraja
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	0	Persentase	0	-	11.11	148,320,000	22.22	157,000,000	33.33	165,000,000	44.44	180,000,000	44.44	180,000,000	Kecamatan Kresek
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	33.33	Persentase	44.44		55.55		66.67		77.77		88.88		88.88		Kecamatan Kresek
		Prosentase Desa/Kelurahan Dengan kategori Minimal Maju	100	Persentase	0	-	100.00	169,600,000	100.00	264,600,000	100.00	314,600,000	100.00	264,600,000	100.00	264,600,000	Kecamatan Kronjo
		Prosentase Desa/Kelurahan Dengan LPJ Baik	100	Persentase	25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		100.00		Kecamatan Kronjo
		Prosentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang tertib	100	Persentase	0	-	9.00	458,000,000	18.00	478,000,000	27.00	570,000,000	45.00	715,000,000	100.00	715,000,000	Kecamatan Mauk
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Berkembang	71	Persentase	0	-	77.00	473,400,000	80.00	555,000,000	81.00	460,000,000	83.00	525,000,000	83.00	525,000,000	Kecamatan Rajeg
		Persentase desa dengan laporan pertanggung jawaban baik	42	Persentase	44.44		55.55		66.67		77.77		88.88		88.88		Kecamatan Rajeg

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jumlah desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	0	Jumlah	0	-	1.00	570,995,000	1.00	605,000,000	1.00	652,500,000	1.00	722,000,000	6.00	722,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungjawaban Baik	75	Persentase	0	-	85.00	180,000,000	90.00	205,000,000	95.00	180,000,000	100.00	205,000,000	100.00	205,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Capaian administrasi pemerintahan	0	Persentase	0	-	100.00	100,500,000	100.00	110,000,000	100.00	120,000,000	100.00	129,500,000	100.00	129,500,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal maju	0	Persentase	0	-	14.29	341,015,000	28.57	348,000,000	42.86	319,900,000	64.29	362,000,000	64.29	362,000,000	Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	0	Persentase	38.46		53.85		69.23		84.62		100.00		100.00		Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase Desa/Kelurahan Dengan Kategori Minimal Berkembang	85	Persentase	0	-	95.00	1,970,489,000	100.00	1,950,489,000	100.00	1,950,489,000	100.00	1,950,489,000	100.00	1,950,489,000	Kecamatan Kosambi
		Persentase Desa Dengan Laporan Peratnggungjawaban Baik	0	Persentase	32.42		55.68		74.07		88.62		100.00		100.00		Kecamatan Kosambi
		prosentase desa/ kelurahan dengan kategori minimal maju	11	Persentase	0	-	11.00	985,000,000	22.00	1,139,750,000	33.00	1,276,212,500	44.00	1,467,644,375	44.00	1,467,644,375	Kecamatan Pagedangan
		prosentase desa deangan laporan pertanggungjawaban baik	33	Persentase	44.00		55.00		66.00		77.00		88.00		88.00		Kecamatan Pagedangan

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase pemenuhan administrasi pemerintahan kecamatan	0	Persentase	0	-	70.00	106,000,000	75.00	112,000,000	80.00	112,000,000	85.00	112,000,000	85.00	112,000,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	12.5	Persentase	0	-	25.00	208,000,000	37.50	213,000,000	62.50	213,000,000	100.00	213,000,000	100.00	213,000,000	Kecamatan Jayanti
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77	Persentase	78.50		80.00		82.50		84.00		85.00		85.00		Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	70	Persentase	0	-	85.00	125,000,000	85.00	125,000,000	85.00	125,000,000	85.00	125,000,000	85.00	125,000,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase desa dengan kategori minimal Maju	11.5	Persentase	0	-	33.50	250,000,000	44.50	345,000,000	44.50	345,000,000	44.50	300,000,000	44.50	300,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	33	Persentase	44.00		55.00		66.00		77.00		88.00		88.00		Kecamatan Sukadiri
		Program Administrasi Pemerintahan	80	Persentase	0	-	82.50	708,800,000	85.00	733,800,000	87.50	708,800,000	90.00	733,800,000	90.00	733,800,000	Kecamatan Cisauk
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	10.1	Persentase	0	-	11.11	93,955,400	22.22	130,000,000	33.33	155,000,000	44.44	155,000,000	55.50	155,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	33.33	Persentase	44.44		55.55		66.67		77.77		88.88		88.88		Kecamatan Sepatan Timur

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Desa/Kelurahan dengan Kategori Minimal Maju	0	Persentase	0	-	42.86	165,000,000	71.43	169,800,000	85.71	173,790,000	100.00	177,979,500	100.00	177,979,500	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Desa dengan Laporan Pertanggungjawaban Baik	0	Persentase	14.29		42.86		57.14		85.71		100.00		100.00		Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Desa/Kelurahan dengan kategori Maju	60	Persentase	0	-	70.00	2,242,793,334	75.00	2,314,901,566	80.00	2,287,230,880	85.00	2,309,783,485	85.00	2,309,783,485	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase Desa/Kelurahan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan	60	Persentase	60.00		70.00		75.00		80.00		85.00		85.00		Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan	0		0	-		188,615,000		408,000,000		432,000,000		435,000,000		435,000,000	Kecamatan Solear
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	0	Persentase	0	-	0.00	192,000,000	11.11	315,000,000	22.22	340,000,000	33.33	350,000,000	44.44	350,000,000	Kecamatan Mekar Baru
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	40.03	Persentase	42.00		44.44		55.55		66.67		77.77		88.88		Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan	75	Persentase	0	-	80.00	172,000,000	85.00	200,000,000	85.00	177,000,000	90.00	180,000,000	90.00	180,000,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan	75	Persentase	0	-	85.00	145,500,000	90.00	145,500,000	95.00	155,500,000	100.00	155,500,000	100.00	155,500,000	Kecamatan Gunung Kaler

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3001.40	Program Pelayanan Umum Kecamatan	prosentase administrasi pemerintahan pelayanan umum di kecamatan	70	Persentase	0	-	85	603,933,000	90.00	603,933,000	93	603,933,000	95	603,933,000	100.00	603,933,000	Kecamatan Tigaraksa
		Persentase pemenuhan pelayanan sesuai standar	100	Persentase	0	-	100	949,400,000	100.00	976,120,000	100	987,376,000	100	999,195,000	100.00	999,195,000	Kecamatan Cikupa
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	75	Persentase	0	-	80.00	850,750,000	85.00	850,750,000	85.00	850,750,000	90.00	850,750,000	90.00	850,750,000	Kecamatan Panongan
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	75	Persentase	0	-	80	1,682,400,000	85.00	1,682,400,000	85	1,682,400,000	90	1,682,400,000	90.00	1,682,400,000	Kecamatan Curug
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	0		0	-		-		-		-		-			Kecamatan Legok
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	80	Persentase	0	-	85.00	2,538,174,000	90.00	2,994,188,783	95.00	3,106,648,905	100.00	3,224,728,632	100.00	3,224,728,632	Kecamatan Pasar Kemis
		Prosentase desa/kelurahan dengan kategori minimal Maju	20.76	Persentase	0	-	40.00	602,400,000	45.00	604,900,000	50.00	609,900,000	65.00	614,900,000	70.00	614,900,000	Kecamatan Balaraja
		Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik	40	Persentase	45.00		50.00		65.00		75.00		80.00		80.00		Kecamatan Balaraja
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	0	Persentase	0	-	14.29	174,600,000	57.14	176,000,000	85.71	178,000,000	100.00	181,000,000	100.00	181,000,000	Kecamatan Kresek

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	0	Persentase	32.42		55.68		74.07		88.62		100.00		100.00		Kecamatan Kresek
		Prosentaase Pemenuhan ProgramPelayanan Umum Kecamatan	100	Persentase	0	-	100.00	100,000,000	100.00	200,000,000	100.00	210,000,000	100.00	225,000,000	100.00	225,000,000	Kecamatan Kronjo
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Kelurahan	0	Persentase	0	-	71.43	505,800,000	74.73	455,600,000	87.27	477,000,000	90.00	478,400,000	90.00	478,400,000	Kecamatan Mauk
		Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	81.08	Nilai	0	-	85.08	831,909,000	87.08	776,909,000	89.08	835,000,000	91.08	780,000,000	91.08	780,000,000	Kecamatan Rajeg
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	82	Persentase	0	-	87.00	488,000,000	89.00	444,000,000	90.00	467,000,000	92.00	562,000,000	92.00	562,000,000	Kecamatan Sepatan
		Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	75	Persentase	0	-	85.00	525,000,000	90.00	575,000,000	95.00	575,000,000	100.00	575,000,000	100.00	575,000,000	Kecamatan Teluknaga
		Persentase pemenuhan pelayanan umum kecamatan	100	Persentase	0	-	100.00	289,200,000	100.00	300,000,000	100.00	315,000,000	100.00	330,000,000	100.00	330,000,000	Kecamatan Cisoka
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	0	Persentase	0	-	75.00	425,350,000	80.00	438,000,000	85.00	454,000,000	90.00	472,000,000	90.00	472,000,000	Kecamatan Pakuhaji
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	0	Persentase	70.00		75.00		80.00		85.00		90.00		90.00		Kecamatan Pakuhaji

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar	85	Persentase	0	-	95.00	866,133,500	100.00	941,133,500	100.00	941,133,500	100.00	941,133,500	100.00	941,133,500	Kecamatan Kosambi
		Prosentase Masyarakat Yang Melakukan Perekaman e- KTP	0	Persentase	32.42		55.68		74.07		88.62		100.00		100.00		Kecamatan Kosambi
		prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan	60	Persentase	0	-	70.00	305,950,000	75.00	351,842,500	80.00	404,618,876	85.00	465,311,706	85.00	465,311,706	Kecamatan Pagedangan
		Persentase pemenuhan pelayanan umum kecamatan	0	Persentase	0	-	70.00	336,780,500	75.00	340,880,000	80.00	340,880,000	85.00	340,880,000	85.00	340,880,000	Kecamatan Jambe
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	12.5	Persentase	0	-	50.00	430,704,000	62.50	467,400,000	87.50	441,100,000	100.00	450,800,000	100.00	450,800,000	Kecamatan Jayanti
		prosentase pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan	70	Persentase	0	-	85.00	270,000,000	85.00	300,000,000	85.00	320,000,000	85.00	350,000,000	85.00	350,000,000	Kecamatan Kemiri
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	0	Persentase	0	-	15.30	225,000,000	57.14	225,000,000	58.50	225,000,000	75.25	225,000,000	100.00	225,000,000	Kecamatan Sukadiri
		Prosentase masyarakat yang melakukan Perekaman KTP	0	Persentase	32.42		55.68		65.12		70.85		86.46		100.00		Kecamatan Sukadiri
		Program Pelayanan Umum Di Kecamatan	80	Persentase	0	-	82.50	461,892,100	85.00	461,892,100	87.50	461,892,100	90.00	461,892,100	90.00	461,892,100	Kecamatan Cisauk

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	0	Persentase	0	-	74.07	188,600,000	88.62	255,000,000	100.00	270,000,000	100.00	275,000,000	100.00	275,000,000	Kecamatan Sepatan Timur
		Prosentase Masyarakat yang Melakukan Perekaman KTP	0	Persentase	0	-	92.00	356,640,000	93.00	399,750,000	94.00	404,737,500	95.00	409,973,875	95.00	409,973,875	Kecamatan Sindang Jaya
		Prosentase Masyarakat yang melakukan perekaman KTP	80	Persentase	0	-	81.00	3,784,817,944	82.00	3,849,006,180	83.00	3,886,231,200	84.00	3,925,601,008	84.00	3,925,601,008	Kecamatan Kelapa Dua
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	32.42	Persentase	0	-	74.07	343,285,000	88.62	537,000,000	100.00	565,000,000	100.00	589,920,500	100.00	589,920,500	Kecamatan Solear
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	32.42	Persentase	55.68		74.07		88.62		100.00		100.00		100.00		Kecamatan Solear
		Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar	55	Persentase	0	-	0.00	189,226,000	-	189,226,000	100.00	349,226,000	0.00	189,226,000	100.00	189,226,000	Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP	70	Persentase	75.00		80.00		85.00		90.00		95.00		100.00		Kecamatan Mekar Baru
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan	75	Persentase	0	-	80.00	379,575,000	85.00	379,575,000	85.00	379,575,000	90.00	379,575,000	90.00	379,575,000	Kecamatan Sukamulya
		Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan	75	Persentase	0	-	85.00	275,000,000	90.00	275,000,000	95.00	305,000,000	100.00	305,000,000	100.00	305,000,000	Kecamatan Gunung Kaler

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3001.41	Program Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang ditindaklanjut i	0	Persentase		-	100	4,727,521,500		3,757,765,000		3,673,506,400		3,766,915,762		3,766,915,762	Sekretariat Daerah
3001.42	Program Fasilitasi Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi	Persentase Rekomendasi Kelembagaan yang di tindaklanjuti	0	Persentase	0	-	100	450,000,000	100.00	500,000,000	100	550,000,000	100	600,000,000	100.00	600,000,000	Sekretariat Daerah
		Persentase Rencana Kerja Reformasi Birokrasi yang terlaksana	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Sekretariat Daerah
3001.43	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Anggaran DPRD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Setwan dan	3	Dokumen	3	562,589,500	3	581,204,500	3.00	581,204,500	3	618,848,150	3	639,325,280	3.00	639,325,280	Sekretariat DPRD
3002	PENGAWASAN																
3002.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	3,327,182,100	100	3,149,300,600	100.00	3,290,300,600	100	3,229,300,600	100	3,570,300,600	100.00	3,570,300,600	Inspektorat Kabupaten
3002.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	724,881,000	100	835,000,000	100.00	877,000,000	100	919,000,000	100	961,000,000	100.00	961,000,000	Inspektorat Kabupaten
3002.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan aparatur yang di fasilitasi dalam penerapan disiplin	100	Persentase	100	64,000,000	100	130,000,000	100.00	150,000,000	100	170,000,000	100	190,000,000	100.00	190,000,000	Inspektorat Kabupaten
3002.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur	100	Persentase	100	100,000,000	100	150,000,000	100.00	150,000,000	100	175,000,000	100	175,000,000	100.00	175,000,000	Inspektorat Kabupaten

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3002.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	12,585,500	100	35,000,000	100.00	36,000,000	100	42,000,000	100	43,000,000	100.00	43,000,000	Inspektorat Kabupaten
3002.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	64,887,400	100	75,000,000	100.00	87,000,000	100	91,000,000	100	136,000,000	100.00	136,000,000	Inspektorat Kabupaten
3002.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya laporan stock opname dan cash opname	1	Dokumen	1	36,850,000	1	-	1.00	-	1	-	1	-	5.00		Inspektorat Kabupaten
3002.16	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan	84	Persentase	84	4,486,255,000	82	1,791,200,000	80.00	1,832,000,000	78	1,995,000,000	76	2,042,500,000	76.00	2,042,500,000	Inspektorat Kabupaten
3002.18	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Prosentase capaian nilai maturitas OPD Minimal	3.0602	Persentase	3.08	460,710,000	3.1	2,050,000,000	3.15	2,335,000,000	3.18	3,322,500,000	3.2	2,645,000,000	3.20	2,645,000,000	Inspektorat Kabupaten
3002.17	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Prosentase Aparatur Pengawasan Profesional	48	Persentase	58	788,512,750	68	820,000,000	80.00	830,000,000	90	840,000,000	100	875,000,000	100.00	875,000,000	Inspektorat Kabupaten
3003	PERENCANAAN																
3003.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100.00	2,539,936,500	100.00	2,662,777,825	100.00	2,799,049,992	100.00	3,848,208,921	100.00	3,084,722,615	100.00	3,084,722,615	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100.00	965,470,000	100.00	1,013,743,500	100.00	1,064,430,675	100.00	1,117,652,210	100.00	973,534,821	100.00	973,534,821	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3003.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0		100	128,000,000		134,400,000		141,120,000		148,176,000		155,584,800		155,584,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100.00	320,000,000	100.00	336,000,000	100.00	352,800,000	100.00	370,440,000	100.00	388,962,000	100.00	388,962,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100.00	51,800,000	100.00	54,390,000	100.00	57,109,500	100.00	59,964,975	100.00	62,963,224	100.00	62,963,224	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan	100	Persentase	100.00	93,660,000	100.00	147,193,000	100.00	154,552,650	100.00	162,280,283	100.00	142,437,653	100.00	142,437,653	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.15	Program Perencanaan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah	Capaian Program Perangkat Daerah bidang sarana prasarana dan	0	Dokumen	100.00	4,701,940,700	100.00	5,424,430,000	100.00	3,728,151,500	100.00	4,061,309,075	100.00	4,247,114,529	100.00	4,247,114,529	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang sarana prasarana dan	0	Rekomendasi	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	0	Persentase	70.00	3,734,387,500	80.00	1,594,925,000	90.00	2,162,171,250	100.00	1,680,279,812	100.00	1,699,293,803	100.00	1,699,293,803	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Prosentase Dokumen Pengendalian Hasil Perencanaan	0	Persentase	70.00		80.00		90.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Rencana Kerja Pembanguna	0	Persentase	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3003.17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Capaian Program Perangkat Daerah bidang ekonomi	0	Dokumen	100.00	2,434,912,500	100.00	2,250,000,000	100.00	2,350,000,000	100.00	2,250,000,000	100.00	2,250,000,000	100.00	2,250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang ekonomi yang diimplementa	0	Rekomendasi	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.19	Program Perencanaan Sosial Budaya	Capaian Program Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya	0	Dokumen	70.00	1,176,250,000	75.00	2,600,000,000	80.00	2,600,000,000	85.00	2,600,000,000	90.00	2,600,000,000	90.00	2,600,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang Sosial Budaya yang diimplementa	0	Rekomendasi	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.21	Program Pengembangan Data Dan Informasi	Prosentase Ketersedian Data Pembangunan	12	Persentase	16.00	500,000,000	20.00	825,000,000	24.00	750,000,000	28.00	750,000,000	32.00	750,000,000	32.00	750,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Prosentase Implementasi Pusat Data Perencanaan	0	Persentase	10.00		25.00		40.00		60.00		80.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3003.20	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Prosentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang	0	Persentase	100.00	1,014,500,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Jumlah inovasi yang didampingi	0	Dokumen	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3004	KEUANGAN																

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3004.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	4,168,343,600	100	4,590,177,960	100.00	5,048,695,756	100	5,553,065,331	100	6,107,871,864	100.00	6,107,871,864	Badan Pendapatan Daerah
3004.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	2,133,000,000	100	2,396,300,000	100.00	2,630,930,000	100	2,889,023,000	100	3,172,925,300	100.00	3,172,925,300	Badan Pendapatan Daerah
3004.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pemenuhan Aparatur yang difasilitasi dalam Penerapan Disiplin	100	Persentase	100	80,000,000	100	-	100.00	-	100	-	100	-	100.00		Badan Pendapatan Daerah
3004.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	100,000,000	100	200,000,000	100.00	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100.00	200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
3004.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100	Persentase	100	36,750,000	100	40,425,000	100.00	44,467,500	100	48,914,250	100	53,805,675	100.00	53,805,675	Badan Pendapatan Daerah
3004.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	186,200,000	100	204,820,000	100.00	225,302,000	100	233,995,900	100	287,615,420	100.00	287,615,420	Badan Pendapatan Daerah
3004.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persentase	100	2,582,867,000	100	2,992,012,000	100.00	3,139,110,000	100	3,293,502,500	100	3,455,555,062	100.00	3,455,555,062	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	Persentase	100	3,445,640,000	100	3,774,111,000	100.00	3,989,275,000	100	4,160,957,000	100	4,398,175,000	100.00	4,398,175,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100	Persentase	100	172,750,000	100	-	100.00	-	100	-	100	-	100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3004.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100	Persentase	100	40,000,000	100	42,000,000	100.00	44,100,000	100	46,305,000	100	48,620,000	100.00	48,620,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	108,723,000	100	95,661,400	100.00	119,866,000	100	125,861,000	100	132,154,000	100.00	132,154,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	100	Persentase	100	112,750,000	100	118,389,000	100.00	124,307,000	100	130,523,000	100	137,048,000	100.00	137,048,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.08	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Prosentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rapat	100	Persentase	100	188,770,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.15	Program Perencanaan Anggaran	Persentase Tingkat kepatuhan Rasio Penganggaran	0	Persentase	100	1,897,100,000	100	2,253,822,000	100.00	2,499,673,000	100	2,695,864,000	100	2,735,387,000	100.00	2,735,387,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase OPD yang menyusun APBD yang sesuai waktu	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.16	Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah	Persentase Pencairan OPD yang Tepat Waktu	0	Persentase	70	2,122,125,000	75	1,918,827,500	80.00	2,164,209,687	85	2,061,300,478	90	2,487,119,115	90.00	2,487,119,115	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	1	Dokumen	1		1		1.00		1		1		1.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.17	Program Perbendaharaan Keuangan Daerah	Persentase Kecepatan dan Ketetapan konsistensi jadwal pencairan	80	Persentase	80	387,410,000	85	470,293,000	90.00	494,373,100	93	518,834,552	95	543,693,191	95.00	543,693,191	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3004.18	Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pajak WP Self Assesment yang diperiksa	0	Wajib Pajak	50	2,380,480,000	50	2,011,400,000	50.00	2,011,400,000	50	2,011,400,000	50	2,011,400,000	250.00	2,011,400,000	Badan Pendapatan Daerah
		Jumlah Wajib Pajak baru	0	Wajib Pajak	120		120		120.00		120		120		600.00		Badan Pendapatan Daerah
		Jumlah Objek Pajak yang terpasang sistem/instrumen pengawasan pajak daerah	0	Wajib Pajak	300		250		250.00		250		250		1.30		Badan Pendapatan Daerah
3004.18	Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Dana Perimbangan	90	Persentase	90	258,275,000	90	435,414,000	92.00	450,310,000	93	465,777,875	95	481,843,921	95.00	481,843,921	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase Kesesuaian Pencatatan Data Aset	70	Persentase	70	4,449,557,011	80	5,535,923,375	85.00	5,151,950,609	90	5,325,675,642	95	5,517,151,651	95.00	5,517,151,651	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase aset yang dapat dimanfaatkan secara non komersil	60	Persentase	60		65		70.00		75		80		80.00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.20	Program Penggunausahaan dan Penyimpanan Aset/Barang Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikomersilkan	45	Persentase	45	1,050,000,000	50	1,008,400,000	55.00	1,227,625,000	60	1,116,862,000	65	1,356,282,000	65.00	1,356,282,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3004.21	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Non PBB dan BPHTB	0	Persentase	10.01	914,650,000	10.39	881,412,500	10.76	684,107,625	11.11	769,718,732	11.44	814,440,679	11.44	814,440,679	Badan Pendapatan Daerah
3004.22	Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah PBB- P2 dan BPHTB	Persentase Peningkatan Pealisasi PBB- P	0	Persentase	6	4,140,098,000	6	5,556,945,400	6.00	2,788,292,670	6	2,884,207,305	6	2,984,899,667	6.00	2,984,899,667	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Persentase Peningkatan Realisasi BPHTB	0	Persentase	6		6		6.00		6		6		6.00		Badan Pendapatan Daerah
3004.23	Program Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Capaian Target Pendapatan secara Tepat Waktu	0	Persentase	100	1,174,832,400	100	1,468,515,640	100.00	1,492,367,204	100	1,518,603,924	100	1,547,464,316	100.00	1,547,464,316	Badan Pendapatan Daerah
3005	KEPEGAWAIAN																
3005.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	99	Persentase	100	1,713,545,000	100	1,673,250,000	100.00	1,756,912,500	100	1,844,758,125	100	1,936,996,032	100.00	1,936,996,032	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	93	Persentase	95	501,080,000	96	572,900,000	97.00	533,295,000	98	628,209,750	100	587,957,738	100.00	587,957,738	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan untuk peningkatan disiplin aparatur	0	Persentase	100	225,000,000	0	-	-	-	0	-	0	-	100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase pemenuhan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	Persentase	0	-	100	150,000,000	100.00	157,500,000	100	165,375,000	100	173,643,750	100.00	173,643,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	Persentase	100	-	100	27,000,000	100.00	28,350,000	100	29,767,500	100	31,255,875	100.00	31,255,875	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.07	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase peningkatan perencanaan perangkat daerah	100	Persentase	100	22,375,000	100	21,850,000	100.00	22,942,500	100	24,089,625	100	25,294,106	100.00	25,294,106	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3005.15	Program Perencanaan, penataan dan pengembangan aparatur	Prosentase aparatur yang mendapatkan pengembanga n karier	85	Persentase	100	2,357,042,250	0	2,394,726,250	-	2,566,945,763	0	2,695,293,051	0	2,830,057,703	100.00	2,830,057,703	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Prosentase ASN yang mendapatkan ujian kompetensi, ujian dinas, penyesuaian	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Prosentase CPNS yang diterima sesuai formasi	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.18	Program Peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja pegawai	Prosentase penanganan disiplin aparatur	100	Persentase	100	538,398,500	0	853,398,500	-	895,318,425	0	938,584,346	0	983,263,564	100.00	983,263,564	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan sesuai SOP	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Prosentase rata-rata kehadiran ASN	100	Persentase	100		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.19	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Prosentase aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi aparatur	99	Persentase	100	4,759,678,000	0	4,678,770,250	-	4,912,708,763	0	5,158,344,201	0	5,416,261,411	100.00	5,416,261,411	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Prosentase peningkatan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis ASN sesuai	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.16	Program Pelayanan dan penempatan aparatur	Prosentase aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100	Persentase	100	436,815,000	0	436,815,000	-	458,655,750	0	481,588,538	0	505,667,965	100.00	505,667,965	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggungjawab
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Prosentase jabatan struktural dan fungsional yang terisi sesuai syarat	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Prosentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3005.17	Program Peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian	Prosentase akurasi data dan informasi kepegawaian yang akurat	100	Persentase	100	422,290,000	0	399,290,000	-	725,217,188	0	771,478,047	0	818,801,949	100.00	818,801,949	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Prosentase data kepegawaian yang mutakhir dan terkini	0	Persentase	0		100		100.00		100		100		100.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Indeks Profesionalitas ASN	0	Nilai	0		0		75.00		80		85		85.00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tangerang (Sesudah Perubahan)

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023)		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Urusan
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84.5	401,754,207,113	85	405,571,041,055	92.50	409,064,116,220	93.50	421,792,840,000	94.50	417,285,519,760	95	2,055,467,724,148	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	65.15	172,180,374,477	65.8	151,496,750,810	75.30	72,575,625,700	77.30	253,364,000,000	79.30	250,964,000,000	79,3	900,580,750,987	Dinas Pendidikan
	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD	28	2,811,709,560	31	270,180,000	42.60	10,318,842,000	45,6	23,783,752,012	48.60	27,545,346,000	48,6	64,729,829,572	Dinas Pendidikan
	ANGKA PARTISIASI MURNI (APM) Kesetaraan	0.16	4,217,564,340	0.15	1,579,264,900	0.13	2,418,022,000	0.12	3,893,752,000	0,11	4,915,346,000	0,11	17,023,949,240	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Quran Jenjang SD DAN SMP	0	-	0	-	10,000	1,465,734,000	10,000	1,516,390,000	10,000	1,516,390,000	30,000	4,498,514,000	Dinas Pendidikan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														Urusan Bidang
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			947,338,465,520		539,694,724,008		767,852,392,157		767,852,392,657		767,852,393,157		767,852,393,157	Dinas Kesehatan
	Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	657,316,000	100	259,770,625	100	3,102,919,730	100	4,514,799,700	100	495,029,840	100	9,029,835,895	Dinas Kesehatan
	Cakupan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	45,841,875	100	45,841,875	100	6,310,782,000	100	2,812,034,500	100	329,320,000	100	9,543,820,250	Dinas Kesehatan

	Cakupan Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	174,850,000	100	21,676,350	100	175,103,800	100	214,780,000	100	175,745,000	100	762,155,150	Dinas Kesehatan
	Cakupan Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	329,650,000	100	43,352,700	100	2,350,989,200	100	3,147,558,200	100	128,035,000	100	5,999,585,100	Dinas Kesehatan
	Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	175,500,000	100	74,654,000	100	350,750,700	100	1,508,719,600	100	127,525,000	100	2,237,149,300	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	430,896,000	100	85,080,000	100	598,535,900	100	739,727,500	100	196,595,000	100	2,050,834,400	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	559,350,000	100	228,500,000	100	88,750,000	100	149,520,100	100	166,780,000	100	1,192,900,100	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	150,000,000	100	-	100	53,820,000	100	70,005,000	100	80,690,000	100	354,515,000	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	200,000,000	100	-	100	52,300,000	100	1,496,801,800	100	97,780,000	100	1,846,881,800	Dinas Kesehatan
	Cakupan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	837,300,000	100	-	100	223,960,600	100	558,016,000	100	340,860,000	100	1,960,136,600	Dinas Kesehatan
	Cakupan orang terduga TB mendapatkan pelayananan TB sesuai standar	100	2,375,800,000	100	5,195,273,534	100	4,745,869,650	100	7,431,533,750	100	1,222,114,550	100	20,970,591,484	Dinas Kesehatan
	Cakupan Orang Beresiko terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	820,650,000	100	94,000,000	100	709,403,000	100	880,238,000	100	1,047,611,000	100	3,551,902,000	Dinas Kesehatan

	Persentase Balita Stunting	23	2,478,420,000	20	1,238,870,000	20	3,625,827,300	20	8,755,189,500	20	1,058,610,000	20	17,156,916,800	Dinas Kesehatan
	Respon Time Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	100	363,500,000	100	34,613,714,712	100	60,337,144,865	100	11,276,159,240	100	7,050,950,000	100	113,641,468,817	Dinas Kesehatan
	Persentase Akses Sanitasi yang Layak	74	3,205,500,000	78	3,001,759,000	80	1,788,192,725	83	4,262,296,100	84	2,919,293,900	84	15,177,041,725	Dinas Kesehatan
	Persentase Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80	71,000,000,000	81	83,105,777,500	82	74,573,717,052	83	91,143,048,096	84	91,143,048,096	84	410,965,590,744	Dinas Kesehatan
	Persentase penerapan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan FKTP dan FKTL	100	377,159,780	100	596,174,800	100	737,961,950	100	859,160,000	100	1,259,091,500	100	3,829,548,030	Dinas Kesehatan
	Persentase Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas	100	-	100	-	100	2,717,587,200	100	2,610,080,000	100	3,610,080,000	100	8,937,747,200	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Kesehatan pemerintah yang Terakreditasi minimal utama di Kabupaten/Kota	-	1,240,700,000	18	2,312,055,000	36	2,985,041,200	48	1,156,619,880	70	1,577,580,000	70	9,271,996,080	Dinas Kesehatan
	Capaian Bed Occupacy Ratio (BOR) Rumah Sakit Pemerintah	75	5,600,000,000	75	15,196,353,000	80	400,472,005,019	80	126,364,143,700	80	11,780,725,000	80	559,413,226,719	Dinas Kesehatan
	Persentase RS Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai izin operasional dalam kurun waktu satu tahun	100	95,975,000	100	13,275,000	100	15,070,000	100	20,795,000	100	67,125,000	100	212,240,000	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	70	796,466,114,200	72	51,365,540,438	75	200,651,660,266	78	184,256,490,835	80	398,602,716,401	80	1,631,342,522,140	Dinas Kesehatan

	Persentase pelayanan rujukan melalui Call Center PSC 119	60	1,086,875,000	70	1,185,806,000	75	1,185,000,000	80	1,303,500,000	85	1,459,920,000	85	6,221,101,000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	76,490,000	100	66,179,000	100	33,342,167,200	100	1,926,515,200	100	2,034,715,700	100	37,446,067,100	Dinas Kesehatan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	105,500,000	100	29,875,000	100	32,179,900	100	40,214,900	100	68,256,900	100	276,026,700	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase P-IRT yang sesuai standar	76	109,350,000	78	403,761,000	80	535,283,000	82	495,687,300	84	50,800,000	84	1,594,881,300	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar	76	36,675,000	78	76,082,750	80	71,439,280	82	80,412,020	84	66,814,000	84	331,423,050	Dinas Kesehatan
	Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	76	109,350,000	78	403,761,000	80	69,437,300	82	63,707,000	84	176,465,500	84	822,720,800	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Organisasi Kemitraan Bidang Kesehatan	40	3,242,400,000	45	2,302,285,000	48	3,473,510,000	56	1,957,000,000	65	2,489,240,000	65	13,464,435,000	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	60	-	61	-	65	-	67	-	70	350,000,000	70	350,000,000	Dinas Kesehatan
	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan	75	550,000,000	77	388,400,000	80	701,029,100	83	685,904,800	85	822,810,000	85	3,148,143,900	Dinas Kesehatan

	Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri	78	-	91	-	94	290,741,100	97	299,254,200	100	402,430,000	100	992,425,300	Dinas Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														Urusan Bidang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang Terbangun	16.65%	42,005,659,200	35.27%	37,568,130,228	56.84%	81,508,068,812	78.42%	93,734,279,133	100.00%	107,794,421,003	100%	362,610,558,376	DBMSDA
	Presentase Daerah Irigasi LP2B terbangun	0.00	-	7.14	2,288,207,074	42.85%	10,346,220,625	100%	16,000,000,000	100%	-	100%	28,634,427,699	DBMSDA
	Peningkatan fitur sistem aplikasi sumberdaya air yang terintegrasi	60.00	500,000,000	70.00	677,395,750	80%	5,847,533,490	90%	6,724,663,513	100%	7,733,363,040	100%	21,482,955,793	DBMSDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Sarana Air bersih	37.00%	22,641,983,950	41.72%	9,203,575,800	36.52%	46,625,683,500	41%	27,150,000,000	46%	30,560,000,000	46%	136,181,243,250	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat	100%	762,257,000	100%	721,438,198	100%	950,141,304	100%	1,200,000,000	100%	1,500,000,000	100%	5,133,836,502	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase Pengelolaan Persampahan di TPA	100	7,500,000,000	100	8,000,000,000	100	8,500,000,000	0	-	0	-	100	24,000,000,000	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarakat miskin	81.28	3,746,882,500	81.30	1,213,999,988	81.36	4,320,587,200	81.37	5,000,000,000	81.38	5,500,000,000	81.38	19,781,469,688	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman

	Prosentase kapasitas lumpur tinja	25.45	2,096,111,277	30.45	447,067,852	34.97	2,500,204,547	39.45	14,000,000,000	44.45	4,000,000,000	44.45	23,043,383,676	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan Layanan Kawasan Permukiman	6.16	39,765,767,900	6.16	11,846,710,000	6.78	69,895,207,076	6.78	35,000,000,000	6.78	36,000,000,000	41.22	192,507,684,976	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Cakupan TPU yang memenuhi Standar	59.34	2,372,110,000	61.54	2,054,189,000	68.13	9,505,526,000	89.01	6,000,000,000	91.21	6,500,000,000	91.21	26,431,825,000	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Persentase sarana dan prasarana tpu yang terpelihara	100%	360,428,000	100%	155,041,000	100%	1,657,930,464	100%	1,600,000,000	100%	1,800,000,000	100%	5,573,399,464	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang dipelihara dan dibangun	28%	176,505,760,000	54 %	211,305,760,000	75%	177,500,000,000	90 %	383,800,000,000	100%	245,390,000,000	100%	1,194,501,520,000	DTRB
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang disusun	0.00	-	0.00	-	25%	1,920,000,000	30%	6,550,000,000	35%	7,376,750,000	35%	15,846,750,000	DTRB
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani	35.43%	202,089,788,995	43.50%	115,340,829,600	62.34%	174,173,651,138	81.17%	200,299,698,808	100.00%	230,344,653,630	100%	922,248,622,171	DBMSDA
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan dan Jembatan yang terintegrasi	60%	1,833,250,000	70%	677,395,750	80%	5,836,099,332	90%	6,711,514,231	100%	7,718,241,366	100%	22,776,500,679	DBMSDA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemenuhan RDTR	25 %	2,980,000,000	50%	4,330,000,000	67%	1,750,000,000	83%	4,045,000,000	100%	4,247,250,000	100%	17,352,250,000	DTRB

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen	100%	598,172,000	100%	814,567,900	100%	686,027,600	100%	1,460,000,000	100%	1,560,000,000	100%	5,118,767,500	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100%	171,200,000	100%	147,791,900	100%	250,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	1,668,991,900	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pemenuhan Perencanaan pengembangan kawasan Permukiman	100%	1,599,782,500	100%	1,808,684,750	100%	2,202,694,538	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	10,611,161,788	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Penanganan Kawasan Kumuh	14.72	21,186,178,000	20.88	20,889,471,700	27.66	35,749,208,000	34.44	40,000,000,000	41.22	40,000,000,000	41.22	157,824,857,700	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase PSU dalam Asset	24.92	1,917,031,050	45.79	1,401,671,000	60.44	11,678,891,381	72.90	15,250,000,000	82.24	15,300,000,000	82.24	45,547,593,431	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														Urusan Bidang
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	4,320,000,000	100%	4,510,000,000	100%	9,401,680,000	100%	7,050,000,000	100%	6,240,000,000	100%	31,521,680,000	Satpol PP

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65	1,600,000,000	75	2,050,000,000	80	2,150,000,000	95	2,400,000,000	100	2,400,000,000	100	10,600,000,000	BPBD
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana	53	1,850,000,000	54	2,100,000,000	55	2,225,000,000	56	2,750,000,000	56	2,500,000,000	274	11,425,000,000	BPBD
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi	100	600,000,000	100	650,000,000	100	650,000,000	100	550,000,000	100	500,000,000	100	2,950,000,000	BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu respon time 15 menit	50	22,500,000,000	50	35,580,000,000	55	65,085,175,000	80	13,849,500	90	22,195,000,000	90%	145,374,024,500	BPBD
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														Urusan Bidang
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang dibina	66.25%	1,136,787,500	54.10%	337,624,000	66.60%	426,735,700	67.99%	605,000,000	67.99%	605,000,000	67.99%	3,111,147,200	Dinsos
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan	0	-	0	-	0	-	50%	25,000,000	50%	25,000,000	100%	50,000,000	Dinsos

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	22.20%	2,946,900,000	13.73%	1,536,682,500	14.67%	1,533,288,583	24.37%	4,207,000,000	25.03	4,407,000,000	100.00%	14,630,871,083	Dinsos
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase terpenuhinya pelayanan jaminan sosial bagi PMKS Yang valid	100%	4,449,900,000	100%	1,808,765,000	100%	1,963,333,000	100%	4,947,000,000	100%	5,474,700,000	100%	18,643,698,000	Dinsos
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota	100%	193,222,500	85%	120,000,000	85%	801,364,800	85%	1,725,000,000	85%	1,725,000,000	85%	4,564,587,300	Dinsos
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase pengelolaan TMP Raden Aria Wangsakara	65%	925,700,000	70%	494,305,000	75%	623,508,448	78%	650,000,000	80%	700,000,000	80%	3,393,513,448	Dinsos
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														Urusan
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														Urusan Bidang

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih	5%	251,030,000	5%	109,450,000	5%	382,189,000	5%	380,000,000	5%	950,000,000	25%	2,072,669,000	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan BLK Yang Di Tempatkan	35%	2,716,700,000	0%	1,390,777,000	39%	2,134,625,200	42%	4,210,000,000	45%	10,920,000,000	45%	21,372,102,200	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja berdasarkan lowongan kerja terdaftar	93.44	1,286,000,000	94.48	643,895,000	93.24	1,485,123,500	93.30	1,855,000,000	93.50	2,515,000,000	94	7,785,018,500	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	24%	1,675,880,000	24.50%	812,349,000	25%	1,184,289,000	25.50%	1,727,000,000	26%	3,400,000,000	26%	8,799,518,000	Dinas Tenaga Kerja
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														Urusan Bidang
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	100%	2,197,500,000	100%	1,547,375,000	100%	1,607,979,900	100	1,114,446,700	100%	2,700,000,000	100%	9,167,301,600	DPPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prosentase Perlindungan Terhadap Perempuan	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	740,454,600	100%	472,546,800	100%	1,050,000,000	100%	2,638,001,400	DPPPA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif	16.67%	400,000,000	16.67%	372,000,000	16.67%	359,999,900	18.48%	308,277,800	18.48%	500,000,000	18.48%	1,940,277,700	DPPPA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	40,000,000	100%	31,899,800	100%	100,000,000	100%	471,899,800	DPPPA

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase klaster hak anak	100%	639,100,000	100%	285,880,000	100%	1,069,818,000	100%	727,469,500	100%	1,675,000,000	100%	4,397,267,500	DPPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase Perlindungan Terhadap Anak	100%	375,000,000	100%	400,000,000	100%	590,089,800	100%	419,028,300	100%	770,000,000	100%	2,554,118,100	DPPPA
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87.50%	1,023,700,000	88%	710,670,000	86%	763,627,500	87%	600,000,000	88%	750,000,000	88%	3,847,997,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan	10%	338,083,650	10%	317,870,000	10%	217,585,000	10%	300,000,000	10%	300,000,000	100%	1,473,538,650	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Yang Tertangani	9.09	497,200,000	12.73	132,720,000	12.73	184,199,000	12.73	335,000,000	12.73	485,000,000	60	1,634,119,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87.50%	100,000,000	88%	69,105,000	86%	50,000,000	87%	100,000,000	88%	150,000,000	88%	469,105,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun	100	197,953,650,869	100	178,481,305,388	100	575,160,449,259	100	701,009,709,741	100	214,518,850,000	100%	1,867,123,965,257	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														Urusan Bidang

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan	50	3,500,000,000	47.57	4,000,000,000	54.57	4,000,000,000	62.75	3,500,000,000	63.25	4,250,000,000	63.25	19,250,000,000	DLHK
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	0.78	1,050,000,000	0,80	1,100,000,000	0.82	1,250,000,000	0.84	1,350,000,000	0.85	1,900,000,000	0.85	6,650,000,000	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	0.22	11,500,000,000	0.24	12,000,000,000	0.26	12,500,000,000	0.28	11,500,000,000	0,30	14,000,000,000	0,30	61,500,000,000	DLHK
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase tindaklanjut pengaduan pengelolaan LB3	100	200,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	0	-	100	400,000,000	100	1,150,000,000	DLHK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	440	350,000,000	340	400,000,000	350	450,000,000	0	-	350	550,000,000	350	1,750,000,000	DLHK
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasinya pembinaan dan pengelolaan lingkungan di Sekolah	25	100,000,000	30	150,000,000	35	200,000,000	0	-	0	-	90	450,000,000	DLHK
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasinya pembinaan kampung iklim	2	100,000,000	3	150,000,000	4	200,000,000	5	250,000,000	6	300,000,000	20	1,000,000,000	DLHK

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	250,000,000	100	250,000,000	100	250,000,000	0	-	100	250,000,000	100	1,000,000,000	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase timbulan sampah terkelola	38	50,250,000,000	41	50,300,000,000	44	55,550,000,000	47	53,850,000,000	50	58,400,000,000	50	268,350,000,000	DLHK
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														Urusan Bidang
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			6,136,977,500		6,372,703,000		2,138,074,000		2,361,456,000					Disdukcapil
	Cakupan Perekaman KTP-el	100%		95,44%		96.99%		100%		100%	3,002,888,200	100%	3,002,888,200	Disdukcapil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KIA	9%		16%		31,18%		60%		90%		90%		Disdukcapil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki NIK	100%		100%	-	95.76%	-	97%	-	99%		100%		Disdukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun	100%	1,459,305,500	73,26%	1,667,500,000	84.82%	1,093,028,000	97%	1,099,999,800	98%	1,379,760,000	98%	6,699,593,300	Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik	100%	2,009,150,000	100%	2,054,500,000	100%	1,893,593,900	100%	1,540,000,000	100%	2,450,000,000	100%	9,947,243,900	Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%		100%		100%		100%		100%	30,000,000	100%	30,000,000	Disdukcapil

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														Urusan Bidang
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Tatakelola Pemerintaha Desa yang Baik	16.67%	2,207,000,000	22,35%	2,207,000,000	18,29%	5,102,258,740	22,36%	6,546,320,576	20,33%	7,250,000,000	100%	23,312,579,316	DPMPD
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	10%	2,496,000,000	20%	2,496,000,000	20%	15,970,694,685	22,36%	16,302,210,000	25%	17,250,000,000	97,35%	54,514,904,685	DPMPD
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														Urusan Bidang
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														DPPKB
	Persentase model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan	100%	280970752700%	100%	350145666000%	100%	285520070000%	100%	324492500000%	100%	333842000000%	100%	15,749,709,887	DPPKB
	Presentase desa/kelurahan yang memiliki data dan informasi	100.00%	1,349,071,341	100	1,466,156,165	100	3,626,883,000	100	4,439,178,100	100	2,863,170,560	100	13,744,459,166	DPPKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														DPPKB
	Presentase PPKBD mandiri	4%	2,809,707,527	4%	3,501,456,660	4%	2,855,200,700	4%	3,244,925,000	4%	3,338,420,000	4%	15,749,709,887	DPPKB
	Persentase KB Baru	5%	1,349,071,341	5.3%	1,466,156,165	4.8%	3,626,883,000	4.4%	4,439,178,100	4%	2,863,170,560	4%	13,744,459,166	DPPKB

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Kelompok ketahanan yang aktif	83,5%	245,000,000.00	83,5%	269,500,000	83,5%	296,450,000	83,5%	282,650,000	83,5%	311,775,000	83,5%	1,405,375,000	DPPKB
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	50%	2,964,470,000	50%	2,413,150,000	60%	3,150,000,000	70%	5,930,000,000	80%	26,900,000,000	80%	41,357,620,000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	92%	27,192,775,000	100%	26,136,561,000	100%	36,190,000,000	75%	46,440,000,000	81%	57,140,000,000	81%	193,099,336,000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pesentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	96.55%	1,736,000,000	0	-	96.55%	800,000,000	96.55%	2,850,000,000	96.55%	1,230,000,000	96.55%	6,616,000,000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas	22.22%	7,515,622,800	33.33%	3,909,060,000	55.56%	6,849,000,000	77.78%	13,293,100,000	100%	17,727,500,000	100%	49,294,282,800	Dinas Perhubungan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														Urusan Bidang
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase layanan keterbukaan Daftar informasi publik	80	3,957,050,000	80.55%	2,744,020,000	82%	2,525,000,000	92%	7,700,000,000	100%	8,150,000,000	100%	25,076,070,000	Diskominfo
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase penyediaan layanan internet	20,00%	10,000,000,000	20,00%	16,000,000,000	49,3%	27,485,505,500	80,28%	36,350,000,000	100.00	54,750,000,000	100.00	144,585,505,500	Diskominfo
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase penyediaan layanan aplikasi	51,52%	5,000,000,000	60,00%	8,000,000,000	64,95%	13,742,752,750	82,47%	18,175,000,000	100.00	27,375,000,000	100.00	72,292,752,750	Diskominfo

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														Urusan Bidang
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	0	-	0	-	60	1,022,302,100	0	-	60	400,000,000	60	1,422,302,100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan.	-	-			0%	-	15,96	550,000,000	29,25	680,000,000	29,25	1,230,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.	-	-	-	-	0%	-	13,29	915,249,701	13,29	1,000,000,000	13,29	1,915,249,701	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha yang terfasilitasi legalitas usaha	-	-	-	-	7,96	1,282,871,300	7,41	1,189,459,300	7,41	1,330,000,000	7.41	3,802,330,600	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	5000	8,095,914,188	5000	5,239,988,472	1512	5,247,758,472	1512	5,289,484,471	1512	5,350,000,000	14536	29,223,145,603	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														Urusan Bidang
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan berusaha	-	-	5	450,000,000	10	200,000,000	15	400,000,000	20	650,000,000	50	1,700,000,000	DPMPTSP

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan minat investor	20	370,000,000	20	450,000,000	20	275,000,000	20	500,000,000	20	550,000,000	100	2,145,000,000	DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	85	285,000,000	86	1,160,000,000	87	650,000,000	88	700,000,000	90	780,000,000	90	3,575,000,000	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Skor kepatuhan investor yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	50	60,000,000	55	260,000,000	60	490,000,000	65	550,000,000	70	800,000,000	70	2,160,000,000	DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	5	325,000,000	10	780,000,000	20	230,000,000	50	300,000,000	70	300,000,000	70	1,935,000,000	DPMPTSP
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														Urusan Bidang
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda binaan	14	3,719,340,000	31	1,598,625,000	50	2,153,870,800	73	1,500,000,000	100	5,150,000,000	100	14,121,835,800	Disporabudpar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlit cabang olahraga binaan	35	1,771,000,000	35	2,094,650,000	35	13,312,235,200	37	1,500,000,000	37	3,800,000,000	37	22,477,885,200	Disporabudpar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase anggota pramuka yang dikembangkan	-	-	-	-	45	900,000,000	-	-	-	-	45	900,000,000	Disporabudpar

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														Urusan Bidang
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Prosentase layanan ketersediaan data statistik sektoral	0	-	25%	150,000,000	40%	264,000,000	50%	800,000,000	70%	950,000,000	70%	2,164,000,000	Diskominfo
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan kemanan informasi	0	-	0	-	25%	1,740,000,000	35%	3,970,000,000	45%	1,220,000,000	45%	6,930,000,000	Diskominfo
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Event kebudayaan yang dilaksanakan	22	1,041,000,000	0	1,258,900,000	8	520,000,000	10	750,000,000	10	850,000,000	50	4,419,900,000	Disporabudpar
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														Urusan Bidang
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan	37%	2,137,075,000	67%	1,045,005,000	77%	1,191,965,000	87%	1,220,172,000	100%	1,760,000,000	100%	7,354,217,000	DISPERPUSIP
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														Urusan Bidang

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku, pemilahan arsip inaktif dan penyerahan arsip dari SKPD/BUMD/Lembaga ke Disperpusip	35%	1,258,000,000	54%	732,497,000	66%	1,059,956,000	86%	1,097,011,000	100%	1,930,000,000	100%	6,077,464,000	DISPERPUSIP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														Urusan
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Laju Produksi Perikanan Tangkap	0.50%	1,550,000,000	0.50%	1,400,000,000	0.50%	1,450,000,000	0.50%	1,750,000,000	0.50%	1,750,000,000	0.50%	7,900,000,000	DISKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktivitas Perikanan Budidaya	4.4	2,605,230,000	4.6	4,800,000,000	4.9	5,800,000,000	5.1	3,850,000,000	5.4	3,850,000,000	5.4	20,905,230,000	DISKAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	34.60 kg/kapita	640,000,000	35.99 kg/kapita	860,000,000	37.41 kg/kapita	860,000,000	38.40 kg/kapita	800,000,000	40.45 kg/kapita	800,000,000	40.45 kg/kapita	3,960,000,000	DISKAN
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														Urusan Bidang
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase peningkatan daya tarik pariwisata	0		0		0		13	7,000,000,000	23	7,000,000,000	33	14,000,000,000	Disporabudpar

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina	0	-	0	-	2	240,000,000	0	-	0	-	2	240,000,000	Disporabudpar
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1%	2,467,050,000	1%	3,145,169,500	1%	1,432,842,191	1%	1,550,000,000	1%	2,000,000,000	1%	10,595,061,691	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1%	1,585,000,000	1%	1,117,750,000	1%	928,760,200	1%	830,000,000	1%	800,000,000	1%	5,261,510,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan	5%	749,850,000	5%	403,500,000	5%	572,933,800	5%	620,000,000	5%	770,000,000	55%	3,116,283,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI	5%	100,000,000	5%	42,575,000	5%	39,980,000	5%	60,000,000	5%	100,000,000	50%	342,555,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1.5%	-	1.5%	-	1.5%	-	1.5%	100,000,000	1.5%	200,000,000	1.5%	300,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	1%	1,107,588,000	1%	1,161,250,000	1%	585,344,400	1%	1,150,000,000	1%	750,000,000	1%	4,754,182,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														Urusan Bidang

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Pelaku Usaha Perdagangan dan IKM yang diawasi dalam memenuhi mekanisme dan prosedur ekspor	21.37%	101,065,000	42.10%	94,845,000	42.10%	94,845,000	42.10%	94,845,000	42.10%	94,845,000	42.10%	480,445,000	Disperindag
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan	21.37	287,325,000	13.73	645,050,000	10	645,050,000	24	645,050,000	24	645,050,000	93.10	2,867,525,000	Disperindag
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Bersubsidi yang di Monitor/ di Pantau	21.37	391,530,000	13.73	283,725,000	50	283,725,000	35.71	283,725,000	35.71	283,725,000	156.53	1,526,430,000	Disperindag
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Pelaku Usaha yang memenuhi mekanisme dan prosedur ekspor	21.37%	1,663,660,000	13.73%	1,054,510,000	16.97%	1,054,510,000	16.97%	1,054,510,000	16.97%	1,054,510,000	86.01%	5,881,700,000	Disperindag
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	20.02%	1,984,011,316	11.68%	1,024,362,332	11.68%	1,024,362,332	11.68%	991,229,500	11.68%	991,229,500	66.76%	6,015,194,980	Disperindag
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														Urusan Bidang
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Presentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Pembinaan dan Pelatihan	14.01	346,730,000	17.34	368,000,000	8.76	368,000,000	19.08	454,310,000	16.03	454,310,000	75.22	1,991,350,000	Disperindag

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi	14.01%	305,850,500	17.34%	105,208,000	15.41%	105,208,000	33.59%	150,653,000	33.59%	150,653,000	113.94%	817,572,500	Disperindag
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	0	-	0	-	0	-	19.24	136,335,000	19.24	136,335,000	38.48	272,670,000	Disperindag
	Prosentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan/ Pembinaan dan Pelatihan	14.01	216,480,000	17.34	268,090,000	5.78	268,090,000	0	-	0	-	37.13	752,660,000	Disperindag
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														Urusan Bidang
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang terseleksi	0	150,000,000	0 KK	-	0	-	0	-	0	-	5	150,000,000	Dinas Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														Urusan
4.01 SEKRETARIAT DAERAH														Urusan Bidang
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Penyelesaian Permasalahan dibidang Kesra	0%	-	0%	-	100%	4,213,835,000	100%	4,701,646,500	100%	5,046,811,150	100%	13,962,292,650	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan	0%	-	0%	-	100%	2,106,917,500	100%	2,350,823,250	100%	2,523,405,575	100%	6,981,146,325	SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Produk Hukum dan Penanganan Kasus/Perkara yang diselesaikan	0%	-	0%	-	100%	2,106,917,500	100%	2,350,823,250	100%	2,523,405,575	100%	6,981,146,325	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Rumusan Kebijakan ekonomi yang di implementasikan	0%	-	0%	-	100%	932,777,000	100%	1,050,000,000	100%	1,200,000,000	100%	3,182,777,000	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang di implementasikan	0%	-	0%	-	100%	505,959,000	100%	900,000,000	100%	1,050,000,000	100%	2,455,959,000	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tercapainya Tingkat Kematangan UKPBJ			4		4	1,300,837,100	4	1,430,470,810	4	1,574,012,891	4	4,305,320,801	SEKRETARIAT DAERAH
4.02 SEKRETARIAT DPRD														Urusan Bidang
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		78.63	58,975,684,158	79.03%	57,062,760,812	80.50%	58,123,569,500	81.10%	87,058,957,220	82.37%	87,980,078,449	82.37%	349,201,050,139	Sekretariat DPRD
	Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu	82.43	53,057,775,158	83.02	56,382,101,212	85.08%	53,829,569,500	85.76%	82,764,957,220	86.89%	83,601,527,720	86.89%	329,635,930,810	Sekretariat DPRD
	Jumlah produk hukum yang difasilitasi pembahasannya	74.83	5,917,909,000	75.04	680,659,600	75.93%	4,294,000,000	76.45%	4,294,000,000	77.85%	4,378,550,729	77.85%	19,565,119,329	Sekretariat DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														Urusan
PERENCANAAN														Urusan Bidang

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan	100%	1,070,213,200	100%	188,230,000	100%	360,306,000	100%	310,265,000	100%	500,000,000	100%	2,429,014,200	Bappeda
	Persentase Dokumen Pelaporan Tepat Waktu	100%	2,053,074,300	100%	746,580,000	100%	1,516,033,645	100%	1,079,804,900	100%	2,000,000,000	100%	7,395,492,845	Bappeda
	Persentase Ketersedian Data Pembangunan	60%	633,560,000	65%	694,370,000	70%	372,545,700	75%	341,228,600	80%	300,000,000	80%	2,341,704,300	Bappeda
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														Bappeda
	Persentase Capaian OPD dengan kinerja sesuai target lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85	2,364,622,000	85	567,893,000	85	1,836,142,700	85	1,698,789,500	85	1,700,000,000	85	8,167,447,200	Bappeda
	Persentase Capaian OPD dengan kinerja sesuai target lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	95	2,648,620,000	95	678,045,000	95	1,530,474,900	95	3,298,583,500	95	1,700,000,000	95	9,855,723,400	Bappeda
	Persentase Capaian OPD dengan kinerja sesuai target lingkup Bidang PPM	90	6,841,014,700	90	3,162,774,600	90	4,740,639,900	90	5,813,436,518	90	2,500,000,000	90	23,057,865,718	Bappeda
	Persentase hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	50	2,364,622,000	60	567,893,000	70	1,859,533,900	75	1,500,000,000	80	1,950,000,000	80	8,242,048,900	Bappeda
	Persentase hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Prasarana Wilayah	60		65		70		70		75		75		Bappeda

	Persentase hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	80	1,497,620,000	80	678,045,000	80	1,762,165,900	80	1,500,000,000	80	2,000,000,000	80	7,437,830,900	Bappeda
	Tingkat Kesesuaian dan Keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100		100		100		100		100		100		Bappeda
	Tingkat Kesesuaian dan Keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100		100		100		100		100		100		Bappeda
	Tingkat Kesesuaian dan Keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang PPM	100		100		100		100		100		100		Bappeda
KEUANGAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tingkat kepatuhan Penganggaran	100%	1,675,970,000	100%	2,019,812,750	100%	1,445,861,050	100%	1,369,230,410	100%	1,506,153,451	100%	8,017,027,661	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kinerja penyelenggaraan Akuntansi	92%	2,001,900,000	93%	2,135,727,500	94%	606,424,550	96%	574,284,048	97%	1,213,872,453	97%	6,532,208,551	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara OPD	80%	645,685,000	85%	788,343,000	90%	697,678,900	95%	660,701,917	97%	726,772,109	97%	3,519,180,926	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	80%	4,149,513,000	85%	3,871,443,375	90%	6,754,886,800	96%	9,310,127,811	97%	10,216,140,592	97%	34,302,111,578	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang digunausahakan	45%	522,850,000	50%	1,070,050,000	55%	307,008,046	76%	790,736,620	78%	869,810,282	78%	3,560,454,948	BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kepatuhan wajib pajak	62%	620,912,500	65%	628,000,000	71%	655,650,000	75%	502,060,000	77%	525,000,000	77%	2,931,622,500	BAPENDA

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah	100%	1,348,564,500	100%	454,495,000	100%	838,336,000	100%	763,625,000	100%	711,490,000	100%	4,116,510,500	BAPENDA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Target Pajak Daerah	100%	4,098,578,000	100%	1,574,705,000	100%	4,166,960,000	100%	3,920,201,102	100%	5,956,750,000	100%	19,717,194,102	BAPENDA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah	100%	1,605,000,000	100%	1,475,550,000	100%	833,241,000	100%	497,880,000	100%	1,010,000,000	100%	5,421,671,000	BAPENDA
KEPEGAWAIAN														Urusan Bidang
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pengadaan ASN, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	822,478,752	100 %	1,105,640,800	100 %	1,220,053,020	100 %	753,264,900	100 %	3,384,000,000	100 %	7,285,437,472	BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN	100 %	283,305,000	100 %	298,030,000	100 %	254,753,800	100 %	340,015,600	100 %	785,000,000	100 %	1,961,104,400	BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99,2 %	438,703,500	99,3 %	142,892,500	99,4 %	451,235,600	99,5 %	500,718,000	99,6 %	750,000,000	99,6 %	2,283,549,600	BKPSDM
	Persentase capaian pengembangan karir sesuai kompetensi ASN	20%	912,614,250	40%	1,140,325,000	85%	919,381,600	90%	1,790,908,100	100 %	610,000,000	100 %	5,373,228,950	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis, manajerial, fungsional dan latsar/ prajabatan	100%	2,907,695,171	100%	738,879,000	100%	10,487,158,000	100%	5,019,285,400	100 %	8,592,765,000	100 %	27,745,782,571	BKPSDM

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang	100%	2,158,000,000	100%	390,060,000	100%	599,923,800	100%	536,354,000	100%	600,000,000	100%	4,284,337,800	Bappeda
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan	100%	109,989,700	100%	240,055,000	100%	602,480,000	100%	763,042,800	100%	1,100,000,000	100%	2,815,567,500	Bappeda
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														Urusan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan	25%	2,076,443,500	30%	2,299,470,000	35%	3,578,235,000	85%	4,697,330,000	95%	4,859,830,000	95%	17,511,308,500	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3.0602	699,690,000	3.0602	497,960,000	3.105	972,480,000	3.1522	315,000,000	3.1808	2,208,211,000	3.1808	4,693,341,000	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN														Urusan
7.01 KECAMATAN														Urusan Bidang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa	32.42	1,685,000,000	55.68	1,785,000,000	74.07	2,005,800,000	88.62	2,300,000,000	100	2,300,000,000	100	10,075,800,000	Kec. Tigaraksa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa	88.6	3,500,000,000	88.8	3,700,000,000	92.2	3,847,700,000	93.6	4,100,000,000	96.2	4,100,000,000	96.2	19,247,700,000	Kec. Tigaraksa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa	87.02	523,370,000	88.64	671,872,500	90.26	913,829,550	92.88	997,071,780	95.52	1,250,000,000	95.52	4,356,143,830	Kec. Cikupa

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa	90	17,400,020,000	92	10,570,050,000	95	5,341,537,026	97	6,604,447,600	98	1,300,000,000	98	41,216,054,626	Kec. Cikupa
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Panongan	32.42%	545,742,500	55.68%	808,700,000	74.07%	371,000,000	88.86%	350,000,000	100%	355,000,000	100%	2,430,442,500	Kec. Panongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Panongan	32.42%	3,166,941,500	55.68%	4,716,263,000	74.07%	5,391,987,792	88.86%	5,467,666,792	100%	5,492,466,792	100%	24,235,325,876	Kec. Panongan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug	70	1,431,400,000	73	318,650,000	76	1,482,052,600	78	1,553,400,000	80	1,553,400,000	80.00	6,338,902,600	Kec. CURUG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug	71.18	20,154,288,095	75	12,112,988,800	80	7,087,923,169	85.00	2,563,412,180	88.00	2,563,412,180	88.00	44,482,024,424	Kec. CURUG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	148,837,000	55.68%	97,380,000	74.07%	413,450,000	88.86%	285,000,000	100%	508,000,000	100%	1,452,667,000	Kec. Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65%	1,111,576,100	74%	4,195,615,000	80%	3,155,784,034	85%	3,155,784,034	90%	3,985,000,000	90%	15,603,759,168	Kec. Legok
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	80%	2,076,952,750	85%	2,848,152,638	90%	245,502,800	95%	490,000,000	100%	515,000,000	100%	6,175,608,188	Kec. Pasar Kemis
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	74*%	2,649,462,000	78%	2,871,868,875	82%	6,733,409,169	86%	6,733,409,169	90%	7,370,550,086	90%	26,358,699,299	Kec. Pasar Kemis
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	545,742,500	55.68%	808,700,000	74.07%	192,000,000	88.86%	172,801,400	100%	355,000,000	100%	2,074,243,900	Kec. Balaraja

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32.42%	3,551,842,800	55.68%	4,861,424,000	74.07%	4,245,216,594	88.86%	3,258,861,290	100%	3,682,000,000	100%	19,599,344,684	Kec. Balaraja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	156,000,000	55.68%	156,000,000	74.07%	375,000,000	88.86%	425,000,000	100	275,000,000	100	1,387,000,000	Kec. Kresek
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32.42%	865,565,100	55.68%	3,028,730,000	74.07%	3,110,000,000	88.86%	3,110,000,000	100	3,320,000,000	100	13,434,295,100	Kec. Kresek
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	67%	120,000,000	70%	182,500,000	75%	200,000,000	80%	235,000,000	95%	245,000,000	95%	982,500,000	Kec. Kronjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	67%	16,986,373,800	70%	9,606,400,000	75%	3,603,813,746	80%	5,500,000,000	95%	7,500,000,000	95%	43,196,587,546	Kec. Kronjo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	545,742,500	55.68%	808,700,000	74.07%	349,024,500	88.86%	350,000,000	100%	355,000,000	100%	2,408,467,000	Kec. Mauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32.42%	3,551,842,800	55.68%	4,861,424,000	74.07%	5,538,562,750	88.86%	3,021,929,964	100%	3,682,000,000	100%	20,655,759,514	Kec. Mauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	100,000,000	55.68%	125,000,000	74.07%	152,100,000	88.86%	352,100,000	100%	352,100,000	100%	1,081,300,000	Kec. Rajeg

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32.42%	4,156,567,500	55.68%	4,186,389,000	74.07%	4,382,482,963	88.86%	2,646,429,964	100%	3,714,600,000	100%	19,086,469,427	Kec. Rajeg
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	184,300,000	55.68%	146,825,000	74.07%	171,752,000	88.86%	475,000,000	100%	350,000,000	100%	1,327,877,000	Kec. SEPATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65%	17,353,532,000	74%	8,659,765,000	80%	7,402,228,250	85%	8,657,625,000	90%	10,231,100,000	90%	52,304,250,250	Kec. SEPATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	325,000,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	2,025,000,000	Kec. Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	325,000,000	100%	350,000,000	100%	400,000,000	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	2,025,000,000	Kec. Teluknaga
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisoka	32.42%	250,000,000	55.68%	199,200,000	74.07%	278,865,400	88.86%	306,751,940	100%	337,427,134	100%	1,372,244,474	Kec. Cisoka
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cisoka	32.42%	17,188,400,000	55.68%	10,090,290,000	74.07%	4,041,175,828	88.86%	4,445,293,411	100%	4,889,822,752	100%	40,654,981,991	Kec. Cisoka

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	149,850,000	55.68%	157,500,000	74.07%	172,805,000	88.86%	182,000,000	100%	191,100,000	100%	853,255,000	Kec. Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32.42%	11,708,491,227	55.68%	10,078,378,500	74.07%	2,976,393,768	88.86%	3,266,934,250	100%	3,464,715,500	100%	31,494,913,245	Kec. Pakuhaji
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	130,000,000	55.68%	153,100,000	74.07%	433,344,400	88.86%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	1,216,444,400	Kec. Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32.42%	11,640,504,158	55.68%	8,153,363,625	74.07%	7,939,252,365	88.86%	5,770,300,000	100%	5,770,300,000	100%	39,273,720,148	Kec. Kosambi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	77.50%	206,400,000	80.00%	158,935,000	82.50%	170,840,000	85.00%	160,340,000	87.50%	160,340,000	87.50%	856,855,000	Kec. Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	75.00%	15,047,218,800	77.50%	10,593,400,000	80.00%	4,000,417,622	82.50%	3,735,273,096	85%	3,735,273,096	85%	37,111,582,614	Kec. Cisauk
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32%	206,400,000	80.00%	158,935,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	890,335,000	Kec. Gunung Kaler

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32%	15,047,218,800	77.50%	10,593,400,000	90%	3,000,000,000	95%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	34,640,618,800	Kec. Gunung Kaler
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jambe	32%	250,000,000	55.68%	202,100,000	74.07%	282,685,000	88.86%	370,100,000	100%	370,100,000	100%	1,474,985,000	Kec. Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Jambe	32%	6,202,019,500	55.68%	4,250,275,000	74.07%	2,115,324,000	88.86%	2,720,578,200	100%	3,303,131,840	100%	18,591,328,540	Kec. Jambe
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.20%	190,000,000	40.52%	235,750,000	52.60%	203,294,600	67.89%	186,131,200	73%	256,131,200	73%	1,071,307,000	Kec. Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	63.00%	9,257,173,029	65.00%	8,979,425,338	70.00%	2,187,437,495	75.00%	3,477,183,134	85%	4,765,983,000	85%	28,667,201,996	Kec. Jayanti
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	545,742,500	55.68%	808,700,000	74.07%	349,024,500	88.86%	350,000,000	100%	355,000,000	100%	2,408,467,000	Kec. Kemiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32.42%	3,551,842,800	55.68%	4,861,424,000	74.07%	5,538,562,750	88.86%	3,021,929,964	100%	3,682,000,000	100%	20,655,759,514	Kec. Kemiri

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	219,226,000	55.68%	808,700,000	74.07%	364,164,500	88.86%	396,140,000	100%	376,140,000	100%	2,164,370,500	Kec. Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32.42%	4,638,074,000	55.68%	8,161,000,000	74.07%	3,199,159,691	88.86%	1,758,563,780	100%	1,600,000,000	100%	19,356,797,471	Kec. Mekar Baru
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	5,919,530,000	55.68%	6,819,610,000	74.07%	3,123,735,974	88.86%	1,121,679,800	100%	1,841,656,580	100%	18,826,212,354	Kec. PAGEDANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65%	5,919,530,000	74%	6,819,610,000	80%	3,123,735,974	85%	1,121,679,800	90%	1,841,656,580	90%	18,826,212,354	Kec. PAGEDANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	116,700,000	100%	138,600,000	100%	238,305,100	100%	386,051,300	100%	321,711,885	100%	1,201,368,285	Kec. Sepatan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	100%	3,450,118,980	100%	4,045,400,232	100%	4,797,589,112	100%	4,638,773,290	100%	2,134,978,205	100%	19,066,859,819	Kec. Sepatan Timur
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	482,114,900	55.68%	220,257,500	74.07%	184,733,400	88.86%	187,111,400	100%	187,111,400	100%	1,261,328,600	Kec. Sindang Jaya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	74%	19,924,750,000	78%	13,278,000,000	82%	4,870,997,050	86%	3,348,416,158	90%	1,764,916,158	90%	43,187,079,366	Kec. Sindang Jaya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Solear	67%	120,000,000	70%	182,500,000	75%	200,000,000	80%	235,000,000	95%	245,000,000	95%	982,500,000	Kec. Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Solear	67%	16,986,373,800	70%	9,606,400,000	75%	3,603,813,746	80%	5,500,000,000	95%	7,500,000,000	95%	43,196,587,546	Kec. Solear
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	32.42%	150,000,000	55.68%	350,000,000	74.07%	350,000,000	88.86%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	1,550,000,000	Kec. Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	32.42%	1,787,000,000	55.68%	2,197,000,000	74.07%	2,747,000,000	88.86%	2,747,000,000	100%	2,982,000,000	100%	12,460,000,000	Kec. Sukamulya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	520,000,000	100%	495,000,000	100%	720,000,000	100%	2,085,000,000	Kec. Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	70%	7,147,987,140	80%	11,760,000,000	82%	4,098,725,454	85%	800,000,000	90%	800,000,000	90%	24,606,712,594	Kec. Sukadiri
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kelapa Dua	32,42%	545,742,500	55,68%	808,700,000	74,07%	3,305,720,900	88,86%	3,529,253,400	100.00	3,750,000,000	100.00	11,939,416,800	Kec. Kelapa Dua

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kelapa Dua	32,42%	3,184,782,500	55,68%	4,068,739,078	74,07%	6,897,632,999	88,86%	1,347,498,000	100.00	2,805,000,000	100.00	18,303,652,577	Kec. Kelapa Dua
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	50%	2,137,000,000	60%	1,507,000,000	65	1,767,000,000	70%	2,270,000,000	75%	2,070,000,000	75%	9,751,000,000	Kec. Tigaraksa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	43%	2,727,772,000	52%	1,610,890,000	58	2,394,859,433	66%	2,941,089,759	75%	3,205,000,000	75%	12,879,611,192	Kec. Cikupa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	10	575,750,000	15	2,003,151,200	20	1,252,782,400	25	1,079,161,400	30	1,103,961,400	30	6,014,806,400	Kec. Panongan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	2,601,158,966	50%	1,703,891,483	62.50%	2,825,392,408	75%	3,114,014,300	78%	3,114,014,300	78.00%	13,358,471,457	Kec. CURUG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	1,702,315,000	50%	202,050,000	60%	1,145,025,268	75%	1,230,300,000	85%	635,000,000	85%	4,914,690,268	Kec. Legok
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan	60%	1,539,166,500	70%	1,739,866,250	75%	4,582,546,444	80%	6,542,238,690	85%	5,395,173,776	85%	19,798,991,660	Kec. Pasar Kemis
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	804,892,800	50	932,735,000	62.5	1,578,027,100	75	1,792,000,000	88	1,737,739,221	88	6,845,394,121	Kec. Balaraja

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	269,900,000	50	555,400,000	62.50%	540,000,000	75%	540,000,000	88	750,000,000	88	2,655,300,000	Kec. Kresek
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	50,000,000	50	50,000,000	62.5	50,000,000	75	50,000,000	88	50,000,000	88	250,000,000	Kec. Kronjo
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	804,892,800	30	932,735,000	62.5	2,064,916,500	75	1,715,200,000	88	1,792,000,000	88	7,309,744,300	Kec. Mauk
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	1,568,750,000	50%	410,850,000	62.50%	990,852,113	75%	1,444,600,000	88.86%	1,864,600,000	100%	6,279,652,113	Kec. Rajeg
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	2,599,528,300	50%	992,122,500	60%	1,498,988,250	75%	2,166,225,000	85%	2,423,600,000	85%	9,680,464,050	Kec. SEPATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	810,000,000	100%	995,000,000	100%	3,355,000,000	Kec. Teluknaga
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	961,500,000	30	338,650,000	62.5	1,163,627,570	75	1,279,990,327	88	1,407,989,360	88	5,151,757,257	Kec. Cisoka
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	951,368,000	30	1,735,361,000	62.5	1,265,066,618	75	1,440,000,000	88	1,532,000,000	88	6,923,795,618	Kec. Pakuhaji

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25	3,633,461,360	30	2,116,573,000	62.5	4,732,895,096	75	3,664,300,000	88	3,664,300,000	88	17,811,529,456	Kec. Kosambi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	75.00%	1,609,265,000	78.75%	475,161,000	82.50%	1,223,455,130	86.25%	1,658,260,000	90%	1,512,542,000	90%	6,478,683,130	Kec. Cisauk
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	1,609,265,000	78.75%	475,161,000	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%	800,000,000	100%	4,384,426,000	Kec. Gunung Kaler
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	636,840,000	50%	657,619,500	62.50%	755,798,300	75%	725,046,000	88%	782,550,600	88%	3,557,854,400	Kec. Jambe
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	681,800,000	35%	759,900,000	45.00%	1,103,238,007	60%	1,020,637,010	65%	1,020,637,010	65%	4,586,212,027	Kec. Jayanti
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	887,960,700	50%	2,430,712,000	62.50%	3,461,601,719	75%	2,266,447,473	88%	3,240,160,000	88%	12,286,881,892	Kec. Kemiri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	1,932,000,000	50%	873,396,900	62.50%	1,145,006,800	75%	1,255,000,000	88%	1,347,500,000	88%	6,552,903,700	Kec. Mekar Baru
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	1,479,882,500	50%	3,409,805,000	60%	1,874,241,584	75%	841,259,850	85%	1,565,408,093	85%	9,170,597,027	Kec. PAGEDANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	100%	697,083,121	100%	727,311,538	100%	806,624,800	100%	538,797,900	100%	1,055,443,800	100%	3,825,261,159	Kec. Sepatan Timur

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	1,059,500,000	50%	435,958,750	60%	658,661,400	75%	982,592,920	85%	997,389,782	85%	4,134,102,852	Kec. Sindang Jaya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	50,000,000	50%	-	62,5%	-	75%	50,000,000	88%	50,000,000	88%	150,000,000	Kec. Solear
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	347,000,000	50%	497,000,000	62.50%	497,000,000	75%	497,000,000	88%	732,000,000	88%	2,570,000,000	Kec. Sukamulya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25%	500,000,000	25%	477,500,000	62%	901,140,000	75%	895,000,000	88%	1,200,000,000	88%	3,973,640,000	Kec. Sukadiri
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberdayaan	25		50		62,5%	4,258,233,649	75%	5,044,321,600	88%	5,355,000,000	88%	14,657,555,249	Kec. Kelapa Dua
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Tigaraksa	71.43	220,000,000	71.43	220,000,000	42.86	415,000,000	57.14	630,000,000	71.43	630,000,000	71.43	2,115,000,000	Kec. Tigaraksa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cikupa	58	412,724,000	60	126,290,000	63	378,967,000	67	270,336,900	70	360,000,000	70	1,548,317,900	Kec. Cikupa
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Panongan	71.43%	130,374,000	71.43%	828,000,000	42.86%	116,641,000	57.10%	116,641,000	71.40%	116,641,000	71.43%	1,308,297,000	Kec. Panongan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Curug	42,86	464,870,000	50	561,819,000	55	453,233,690	57.14	586,431,500	65	586,431,500	65	2,652,785,690	Kec. CURUG

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Legok	14%	221,360,000	25%	152,725,000	40%	168,691,700	60%	300,000,000	75%	300,000,000	75%	1,142,776,700	Kec. Legok
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pasar Kemis	75%	405,304,500	80	436,198,125	85	314,802,000	90	354,098,300	100	379,508,130	100%	1,889,911,055	Kec. Pasar Kemis
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Balaraja	71.43%	286,132,500	71.43%	178,050,000	42.86%	197,193,900	57.10%	185,896,500	71.40%	185,896,500	71.40%	1,033,169,400	Kec. Balaraja
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kresek	71.43%	40,390,000	71.43%	46,330,000	42.86%	45,000,000	57.10%	45,000,000	71.40%	45,000,000	71.40%	221,720,000	Kec. Kresek
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kronjo	71.43%	195,000,000	71.43%	145,000,000	42.86%	84,299,710	57.10%	150,000,000	71.40%	165,000,000	71.40%	739,299,710	Kec. Kronjo
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Mauk	71.43%	286,132,500	71.43%	178,050,000	42.86%	97,194,000	57.10%	159,900,000	71.40%	165,000,000	71.40%	886,276,500	Kec. Mauk
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Rajeg	70.00%	60,300,000	55.00%	24,900,000	45.00%	86,136,100	30.00%	110,000,000	20.00%	125,000,000	20.00%	406,336,100	Kec. Rajeg
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sepatan	20%	133,632,000	25%	81,980,000	40%	104,040,000	60%	166,400,000	75%	207,500,000	75.00%	693,552,000	Kec. SEPATAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Teluknaga	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	1,350,000,000	Kec. Teluknaga
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pakuhaji	71.43%	153,175,000	71.43%	425,867,500	42.86%	271,805,150	57.10%	313,500,000	71.40%	327,150,000	71.40%	1,491,497,650	Kec. Pakuhaji
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kosambi	71.43%	599,000,000	71.43%	160,900,000	42.86%	442,786,000	57.10%	446,000,000	71.40%	446,000,000	71.40%	2,094,686,000	Kec. Kosambi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cisauk	68.75%	168,500,000	75.00%	46,746,000	81.25%	110,925,800	87.50%	110,890,000	93%	110,890,000	93%	547,951,800	Kec. Cisauk

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Gunung Kaler	71%	168,500,000	75.00%	46,746,000	100%	70,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	385,246,000	Kec. Gunung Kaler
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Jambe	71%	143,000,000	71%	73,850,000	43%	115,784,900	57%	115,784,900	71%	127,363,390	71%	575,783,190	Kec. Jambe
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Jayanti	20.00%	198,600,000	25.00%	71,100,000	35.00%	71,100,000	55.00%	90,955,000	75.00%	90,000,000	75.00%	521,755,000	Kec. Jayanti
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kemiri	71.43%	286,132,500	71.43%	178,050,000	42.86%	97,194,000	57.10%	159,900,000	71.40%	165,000,000	71.40%	886,276,500	Kec. Kemiri
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Mekar Baru	71.43%	330,000,000	71.43%	76,122,200	42.86%	132,987,700	57.10%	145,466,900	71.40%	145,466,900	71.43%	830,043,700	Kec. Mekar Baru
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pagedangan	14%	75,000,000	25%	100,000,000	40%	150,000,000	60%	225,000,000	75%	247,500,000	75%	797,500,000	Kec. PAGEDANGAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sepatan Timur	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	191,927,960	100%	134,000,000	100%	201,000,000	100%	706,927,960	Kec. Sepatan Timur
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sindang Jaya	100%	179,550,000	100%	121,042,500	100%	204,867,700	100%	153,879,000	100%	196,349,000	100%	855,688,200	Kec. Sindang Jaya

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Solear	71,43%	195,000,000	71,43%	145,000,000	42,86%	84,299,710	57,1%	150,000,000	71,4%	165,000,000	71,4%	739,299,710	Kec. Solear
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sukamulya	71.43%	50,000,000	71.43%	110,000,000	42.86%	110,000,000	57.10%	110,000,000	71.40%	110,000,000	71.40%	490,000,000	Kec. Sukamulya
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sukadiri	14%	133,632,000	25%	81,980,000	40%	104,040,000	60%	166,400,000	75%	207,500,000	75%	693,552,000	Kec. Sukadiri
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kelapa Dua	71,43%	737,265,000	71,43%	31,810,007,800	42,86%	150,514,769	57,1%	381,028,300	71,4%	408,000,000	71,43%	33,486,815,869	Kec. Kelapa Dua
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cisoka	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	71,4%	408,000,000	71,43%	408,000,000	Kec. Cisoka
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	50	80,000,000	58.33	200,000,000	75	200,000,000	83.33	200,000,000	91.67	200,000,000	91.67	880,000,000	Kec. Tigaraksa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	50	29,120,000	67	17,615,000	75	79,460,000	83	74,239,200	92	135,000,000	92	335,434,200	Kec. Cikupa
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	73,300,000	55.55%	110,000,000	66.67%	87,335,600	77.77%	87,335,600	88.88%	87,335,600	88.88%	445,306,800	Kec. Panongan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik di kecamatan Curug	44.44%	67,170,000	55.55%	117,500,000	66.67	63,480,000	77.77	120,000,000	80	60,000,000	80	428,150,000	Kec. CURUG
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	247,655,000	55.55%	421,890,000	66.67%	47,275,000	77.77%	90,000,000	88.88%	150,000,000	88.88%	956,820,000	Kec. Legok

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	60	50,000,000	70	50,000,000	80	50,000,000	90	70,000,000	100	70,000,000	100%	290,000,000	Kec. Pasar Kemis
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	73,300,000	55.55%	123,300,000	66.67%	139,847,500	77.77%	155,860,000	88.88%	155,860,000	88.88%	648,167,500	Kec. Balaraja
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	31,000,000	55.55%	47,000,000	66.67%	75,000,000	77.77%	75,000,000	88.88%	75,000,000	88.88%	303,000,000	Kec. Kresek
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	195,000,000	0%	-	88%	84,299,710	78%	75,000,000	88.88%	45,000,000	89%	399,299,710	Kec. Kronjo
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44,44%	73,300,000	55,55%	-	66,67%	139,847,500	77,77%	120,000,000	88,88%	125,000,000	88,88%	458,147,500	Kec. Mauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	140,000,000	55.55%	-	66.67%	68,890,000	77.77%	65,000,000	88.88%	125,000,000	88.88%	398,890,000	Kec. Rajeg
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	42.86%	62,313,700	57.14%	17,575,000	71.43%	49,200,000	85.71%	90,000,000	100%	100,000,000	100.00%	319,088,700	Kec. SEPATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	100,000,000	100%	300,000,000	100%	535,000,000	Kec. Teluknaga
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	180,000,000	55.55%	45,350,000	66.67%	260,670,200	77.77%	236,775,220	88.88%	260,452,742	88.88%	983,248,162	Kec. Cisoka

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44,44%	110,460,000	55,55%	40,340,000	66,67%	154,522,000	77,77%	164,184,250	88,88%	188,853,000	88,88%	658,359,250	Kec. Pakuhaji
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	502,933,000	55.55%	96,005,625	66.67%	34,630,000	77.77%	170,000,000	88.88%	170,000,000	88.88%	973,568,625	Kec. Kosambi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	80.00%	202,831,200	82.50%	138,707,500	85.00%	159,659,500	87.50%	135,906,000	90%	159,659,500	90%	796,763,700	Kec. Cisauk
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44%	202,831,200	82.50%	138,707,500	90%	70,000,000	95%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	481,538,700	Kec. Gunung Kaler
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	80,500,000	56%	92,000,000	67%	113,301,000	78%	80,440,300	89%	178,484,330	89%	544,725,630	Kec. Jambe
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	12.50%	84,600,000	25.00%	18,105,000	37.50%	154,125,000	50.00%	90,123,000	62.00%	122,332,000	62.00%	469,285,000	Kec. Jayanti
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	73,300,000	55.55%	50,000,000	66.67%	139,847,500	77.77%	120,000,000	88.88%	125,000,000	88.88%	508,147,500	Kec. Kemiri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	40,000,000	55.55%	26,646,100	66.67%	120,000,000	77.77%	100,000,000	88.88%	70,000,000	88.88%	356,646,100	Kec. Mekar Baru
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	315,000,000	55.55%	39,360,000	66.67%	148,411,038	77.77%	200,000,000	88.88%	220,000,000	88.88%	922,771,038	Kec. PAGEDANGAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	100%	85,000,000	100%	98,000,000	100%	109,072,000	100%	141,807,200	100%	205,620,440	100%	639,499,640	Kec. Sepatan Timur

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	216,750,000	55.55%	83,225,000	66.67%	82,260,000	77.77%	138,590,000	88.88%	186,629,000	88.88%	707,454,000	Kec. Sindang Jaya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44,44%	-	0%	-	88%	-	78%	75,000,000	88,88%	45,000,000	88,88%	120,000,000	Kec. Solear
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44.44%	40,000,000	55.55%	40,000,000	66.67%	40,000,000	77.77%	40,000,000	88.88%	40,000,000	88.88%	200,000,000	Kec. Sukamulya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44,44%	62,313,700	55,55%	17,575,000	66,67%	149,200,000	77,77%	90,000,000	88,88%	100,000,000	88,88%	419,088,700	Kec. Sukadiri
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik	44,44%	60,000,000	55,55%	-	66,67%	354,373,000	77,77%	100,000,000	88,88%	115,000,000	88,88%	629,373,000	Kec. Kelapa Dua
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														Urusan
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														Urusan Bidang
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Capaian Efektifitas Penguatan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa	80%	789,050,000	80%	471,665,000	80%	405,452,400	80%	3,922,650,000	80%	8,583,750,000	80%	14,172,567,400	Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Capaian Efektifitas Penguatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	78%	2,197,825,000	78%	324,620,000	78%	2,492,624,500	79%	2,925,464,500	80%	5,167,624,500	80%	13,108,158,500	Kesbangpol

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Capaian Efetifitas Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	60%	234,200,000	65%	46,810,000	65%	82,376,000	70%	150,000,000	70%	300,000,000	70%	813,386,000	Kesbangpol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	60%	172,100,000	65%	143,175,000	65%	275,600,000	70%	150,000,000	70%	600,000,000	70%	1,340,875,000	Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Capaian Efektifitas Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional di Daerah	80%	930,000,000	80%	675,415,000	80%	700,000,000	80%	800,000,000	80%	1,450,000,000	80%	4,555,415,000	Kesbangpol
X														Urusan NON
X.XX														Urusan Bidang NON
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														1. SEMUA OPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	796,529,905,760	100	761,921,477,639	100	777,322,952,000	100	777,322,952,000	100	777,322,952,000	100	3,890,420,239,399	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	5,279,142,000	100	2,373,834,000	100	4,556,213,000	100	6,195,884,000	100	6,195,884,000	100	24,600,957,000	Dinas Pendidikan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian, Umum, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan	100	41,155,344,245	100	19,927,045,984	100	346,110,287,673	100	332,071,705,023	100	445,905,167,199	100	1,185,169,550,124	Dinas Kesehatan
	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	43,974,815,615	100	19,751,505,757	100	62,083,643,857	100	79,431,031,585	100	99,461,541,991	100	304,702,538,805	Dinas Kesehatan
	Persentase Laporan Kinerja BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit	100	343,803,350,754	100	335,169,472,611	100	334,146,769,049	100	345,000,000,000	100	436,652,044,425	100	1,794,771,636,839	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	277,630,000	100%	261,080,000	100%	27,425,958,120	100%	31,539,851,838	100%	36,270,829,613	100%	95,775,349,571	DBMSDA
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	5,568,852,290	100%	2,415,676,500	100%	3,467,687,700	100%	3,987,840,855	100%	4,586,016,983	100%	20,026,074,328	DBMSDA
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	-	100%	-	100%	2,002,000,000	100%	2,872,000,000	100%	3,457,000,000	100%	8,331,000,000	DTRB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	-	100%	-	100%	17,932,000,000	100%	20,502,250,000	100%	23,619,250,000	100%	62,053,500,000	DTRB

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	16,012,995,711	100%	15,767,641,742	100%	16,121,157,531	100%	16,213,509,231	100%	16,290,000,000	100%	80,405,304,215	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	2,495,515,950	100%	1,391,571,801	100%	4,427,018,000	100%	3,388,847,900	100%	3,807,400,000	100%	15,510,353,651	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	10,445,500,000	100	10,601,000,000	100	10,674,840,000	100	12,342,648,000	100	12,453,000,000	100	56,516,988,000	Satpol PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	10,859,431,000	100	13,216,405,000	100	13,290,000,000	100	13,505,000,000	100	16,191,000,000	100	67,061,836,000	Satpol PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	12,333,000,000	100	11,583,000,000	100	13,428,000,000	100	15,658,000,000	100	16,823,000,000	100	69,825,000,000	BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	14,621,729,351	100	14,621,729,351	100	14,621,729,351	100	14,621,729,351	100	14,621,729,351	100	73,108,646,755	BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	1,804,922,000	100	990,201,500	100	1,044,357,352	100	7,085,810,000	100	5,651,177,500	100	16,576,468,352	Dinsos

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	10,485,720,683	100	7,993,048,056	100	8,375,395,286	100	8,527,965,000	100	8,570,220,000	100	43,952,349,025	Dinsos
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	3,244,835,000	100%	2,280,400,000	100%	2,275,633,820	100%	2,590,300,000	100%	3,482,300,000	100%	13,873,468,820	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	10,220,776,000	100%	8,151,040,111	100%	8,710,346,216	100%	9,246,650,000	100%	9,378,000,000	100%	45,706,812,327	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	190,400,000	100%	153,085,000	100%	6,647,539,541	100%	7,111,992,000	100%	7,004,427,615	100%	21,107,444,156	DPPPA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,289,705,658	100%	645,735,000	100%	797,009,400	100%	1,376,635,615	100%	1,089,200,000	100%	5,198,285,673	DPPPA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	18,430,000,000	100	18,430,000,000	100	18,430,000,000	100	17,175,137,000	100	17,780,000,000	100	90,245,137,000	DLHK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	3,170,000,000	100	3,170,000,000	100	3,170,000,000	100	3,170,000,000	100	3,170,000,000	100	15,850,000,000	DLHK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	2,019,470,000	100%	2,112,053,000	100%	1,982,763,800	100%	2,888,095,100	100%	2,848,000,000	100%	11,850,381,900	DPMPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	8,048,140,942	100%	8,048,140,942	100%	8,123,175,574	100%	7,399,207,474	100%	7,635,000,000	100%	39,253,664,932	DPMPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	20%	2,019,470,000	40%	2,112,053,000	60%	15,760,035,741	80%	17,737,978,814	100%	18,206,070,714	100%	55,835,608,269	Disdukcapil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20%	2,019,470,000	40%	2,112,053,000	60%	15,760,035,741	80%	17,737,978,814	100%	18,206,070,714	100%	55,835,608,269	Disdukcapil

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	2,618,749,472	100%	2,866,143,500	100%	3,138,023,810	100%	2,208,931,000	100%	2,016,675,410	100%	12,848,523,192	DPPKB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	343,731,139	100%	11,547,568,094	100%	11,790,459,690	100%	11,983,136,608	100%	12,224,304,932	100%	47,889,200,463	DPPKB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100 Persen	13,870,444,800	100 Persen	13,717,053,300	100 Persen	14,796,757,597	100 Persen	16,058,328,580	100 Persen	17,880,805,438	100 Persen	76,323,389,715	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	15,140,606,822	100 Persen	11,600,314,090	100 Persen	12,432,879,381	100 Persen	13,606,267,319	100 Persen	14,946,994,051	100 Persen	67,727,061,663	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	93,815,747,517	100	105,267,115,492	100	158,053,324,497	100	88,595,417,421	100	92,264,384,591	100	537,995,989,518	Diskominfo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	4,400,836,500	100	3,752,665,000	0	2,893,386,200	100	3,241,827,900	100	3,359,714,300	100	17,648,429,900	Diskominfo

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	4,400,836,500	100	3,752,665,000	100	2,893,386,200	100	3,241,827,900	100	3,359,714,300	100	17,648,429,900	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100		100		100		100		100		100		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	127,500,000	100	129,000,000	100	25,095,000,000	100	25,130,000,000	100	25,130,000,000	100	75,611,500,000	DPMPTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	3,545,000,000	100	4,235,000,000	100	1,750,080,000	100	2,610,000,000	100	3,560,000,000	100	15,700,080,000	DPMPTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	1,504,130,500	100%	1,575,566,000	100%	7,318,547,675	100%	7,665,929,000	100%	8,444,465,335	100%	26,508,638,510	Disporabudpar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	3,715,000,000	100%	4,285,000,000	100%	1,750,080,000	100%	2,610,000,000	100%	2,660,000,000	100%	15,020,080,000	Disporabudpar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100	13,711,916,229	100	13,855,351,434	100	11,635,037,033	100	2,036,167,440	100	2,040,000,000	100	43,278,472,136	DISPERPUSIP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	11,810,623,629	100	9,889,179,434	100	10,419,693,188	100	10,827,817,311	100	14,374,568,578	100	57,321,882,140	DISPERPUSIP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,472,265,000	100%	1,860,397,100	100%	1,777,250,000	100%	1,442,705,400	100%	1,463,537,400	100%	8,016,154,900	DISKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	8,048,140,942	100%	8,904,810,168	100%	7,686,084,336	100%	7,915,086,000	100%	7,915,086,000	100%	40,469,207,446	DISKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	29,424,526,362	99%	21,796,723,944	99%	23,888,672,863	99%	24,115,940,000	99%	25,000,000,000	99%	124,225,863,169	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	3,705,250,000	100%	2,652,510,100	100%	2,713,588,500	100%	1,855,000,000	100%	4,424,000,000	100%	15,350,348,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	2,977,454,094	100%	2,157,931,295	100%	2,697,219,425	100%	2,900,841,867	100%	2,834,326,554	100%	13,567,773,235	Disperindag

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	118,621,500	100%	122,800,000	100%	10,148,402,209	100%	11,095,259,000	100%	11,107,213,800	100%	32,592,296,509	Disperindag
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	61,037,571,100	100%	66,588,500,000	100%	60,835,350,000	100%	66,668,885,000	100%	71,855,773,500	100%	326,986,079,600	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	95,000,000	100%	100,000,000	100%	32,737,691,371	100%	4,100,850,500	100%	4,550,850,500	100%	41,584,392,371	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah	100%	2,235,000,000	100%	2,458,500,000	100%	2,100,000,000	100%	2,882,487,000	100%	3,270,735,700	100%	12,946,722,700	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	50.37	70,000,000	52	100,000,000	55	250,000,000	60	600,000,000	65	700,000,000	65	1,720,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	81.23	19,069,907,000	81.76	10,752,188,312	82.29%	15,125,028,400	83.51%	24,691,488,400	86.01%	27,538,296,083	86.01%	97,176,908,195	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	82.67	46,085,267,988	82.78	43,260,814,601	82.90%	50,531,526,108	83.68%	50,819,526,108	85.90%	51,115,846,489	85.90%	241,812,981,294	SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	5,084,021,500	100%	2,008,685,000	100%	2,992,762,600	100%	2,312,760,000	100%	2,661,959,903	100%	15,060,189,003	Bappeda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	16,809,371,562	100%	11,918,470,910	100%	13,822,285,043	100%	11,932,156,953	100%	12,935,857,486	100%	67,418,141,954	Bappeda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	6,007,157,000	100%	6,643,705,000	100%	3,913,825,978	100%	4,259,223,346	100%	4,456,158,201	100%	25,280,069,525	BPKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	221,473,000	100%	220,673,000	100%	72,347,635,318	100%	106,760,292,834	100%	117,428,738,045	100%	296,978,812,197	BPKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	7,606,803,600	100%	6,249,518,000	100%	7,662,797,600	100%	6,388,343,866	100%	9,798,717,500	100%	37,706,180,566	BAPENDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	82,254,641,575	100%	93,184,640,324	100%	81,162,087,357	100%	76,089,635,849	100%	85,567,596,308	100%	418,258,601,413	BAPENDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	2,383,718,103	100%	2,090,087,970	100%	2,528,235,750	100%	4,258,387,200	100%	4,432,200,000	100%	15,692,629,023	BKPSDM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	20,025,000	100%	45,035,000	100%	13,102,051,534	100%	12,834,133,460	100%	16,061,000,000	100%	42,062,244,994	BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	4,949,208,450	100%	4,081,414,400	100%	14,773,350,457	100%	6,160,384,000	100%	5,797,075,000	100%	35,761,432,307	Inspektorat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	21,073,871,793	100%	24,561,869,314	100%	19,450,144,200	100%	22,285,208,274	100%	26,284,818,729	100%	113,655,912,310	Inspektorat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	2,165,000,000	100%	2,358,500,000	100%	1,850,000,000	100%	2,282,487,000	100%	2,570,735,700	100%	11,226,722,700	Kec. Tigaraksa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	6,000,000,000	100%	6,500,000,000	100%	7,100,000,000	100%	7,474,435,000	100%	7,500,000,000	100%	34,574,435,000	Kec. Tigaraksa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	3,434,394,097	100%	3,240,396,300	100%	3,424,780,763	100%	3,252,152,336	100%	10,368,135,000	100%	23,719,858,496	Kec. Cikupa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	9,143,799,047	100%	6,561,793,347	100%	6,827,682,647	100%	6,737,192,961	100%	6,640,000,000	100%	35,910,468,002	Kec. Cikupa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Panongan	100%	917,747,000	100%	1,285,585,000	100%	2,146,666,400	100%	3,412,360,000	100%	3,486,000,000	100%	11,248,358,400	Kec. Panongan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100%	6,429,722,792	100%	7,511,300,000	100%	5,249,804,245	100%	5,462,611,036	100%	5,779,611,036	100%	30,433,049,109	Kec. Panongan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Curug	100%	2,364,583,127	100%	1,707,183,000	100%	2,605,972,176	100%	3,953,542,020	100%	3,953,542,020	100%	14,584,822,343	Kec. CURUG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100%	7,992,550,647	100%	9,328,488,045	100%	8,178,661,000	100%	8,178,661,000	100%	8,178,661,000	100%	41,857,021,692	Kec. CURUG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,178,261,000	100%	1,257,175,000	100%	3,098,242,628	100%	3,244,600,000	100%	3,699,600,000	100%	12,477,878,628	Kec. Legok
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	7,696,069,443	100%	6,173,024,728	100%	6,129,107,018	100%	6,363,976,000	100%	6,363,976,000	100%	32,726,153,189	Kec. Legok
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,436,747,956	100%	2,323,800,340	100%	2,666,666,914	100%	4,567,908,270	100%	3,379,072,083	100%	14,374,195,563	Kec. Pasar Kemis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	8,631,509,875	100%	8,332,902,025	100%	9,153,777,771	100%	9,338,224,500	100%	10,069,155,548	100%	45,525,569,719	Kec. Pasar Kemis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	949,667,071	100%	1,322,361,268	100%	2,784,094,170	100%	3,497,010,120	100%	3,486,000,000	100%	12,039,132,629	Kec. Balaraja

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	5,280,199,700	100%	6,009,322,956	100%	4,912,600,468	100%	4,743,808,793	100%	5,779,611,036	100%	26,725,542,953	Kec. Balaraja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,066,093,400	100%	1,021,663,992	100%	1,397,500,000	100%	1,397,500,000	100%	1,472,500,000	100%	6,355,257,392	Kec. Kresek
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	3,764,889,825	100%	3,750,736,825	100%	3,888,141,325	100%	3,888,141,325	100%	3,923,141,325	100%	19,215,050,625	Kec. Kresek
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,134,575,000	100%	1,208,500,000	100%	1,311,728,903	100%	2,048,000,000	100%	2,192,000,000	100%	7,894,803,903	Kec. Kronjo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	4,110,613,673	100%	4,576,483,519	100%	4,116,579,147	100%	4,816,197,877	100%	5,185,000,000	100%	22,804,874,216	Kec. Kronjo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	949,667,071	100%	1,322,361,268	100%	2,433,521,650	100%	3,412,360,000	100%	3,486,000,000	100%	11,603,909,989	Kec. Mauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	5,280,199,700	100%	6,009,322,956	100%	5,148,451,036	100%	5,462,611,036	100%	5,779,611,036	100%	27,680,195,764	Kec. Mauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,007,594,944	100%	1,260,676,000	100%	1,896,114,067	100%	2,712,060,000	100%	2,639,560,000	100%	9,516,005,011	Kec. Rajeg

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	6,785,192,900	100%	5,079,735,649	100%	5,265,163,614	100%	5,302,603,000	100%	5,320,603,000	100%	27,753,298,163	Kec. Rajeg
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,187,584,000	100%	1,284,217,500	100%	2,143,440,396	100%	2,528,300,000	100%	2,845,000,000	100%	9,988,541,896	Kec. SEPATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	6,914,538,250	100%	5,722,054,422	100%	6,102,631,505	100%	6,544,498,500	100%	6,977,897,500	100%	32,261,620,177	Kec. SEPATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,267,000,000	100%	1,387,000,000	100%	1,732,000,000	100%	2,234,000,000	100%	2,559,000,000	100%	9,179,000,000	Kec. Teluknaga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	6,095,000,000	100%	6,135,000,000	100%	6,150,000,000	100%	6,180,000,000	100%	6,210,000,000	100%	30,770,000,000	Kec. Teluknaga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Cisoka	100%	1,171,621,959	100%	900,580,000	100%	1,512,624,390	100%	1,641,541,029	100%	1,805,695,132	100%	7,032,062,510	Kec. Cisoka
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Cisoka	100%	5,243,410,634	100%	4,002,778,484	100%	4,156,765,623	100%	4,572,442,185	100%	5,029,686,404	100%	23,005,083,330	Kec. Cisoka
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,325,647,000	100%	1,119,590,000	100%	1,954,965,490	100%	2,479,037,980	100%	2,728,367,500	100%	9,607,607,970	Kec. Pakuhaji
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	5,672,212,413	100%	5,641,823,840	100%	5,701,586,213	100%	6,139,583,696	100%	6,627,362,880	100%	29,782,569,042	Kec. Pakuhaji

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	3,818,543,940	100%	2,666,598,000	100%	1,587,912,516	100%	4,804,700,000	100%	4,829,700,000	100%	17,707,454,456	Kec. Kosambi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	10,379,957,522	100%	8,204,213,574	100%	8,191,670,849	100%	8,595,714,000	100%	8,740,714,000	100%	44,112,269,945	Kec. Kosambi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	90%	3,173,085,000	90%	2,499,316,400	90%	3,345,964,546	90%	3,638,092,000	90%	3,678,092,000	90%	16,334,549,946	Kec. Cisauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	90%	6,569,337,349	90%	5,097,507,881	90%	5,708,012,176	90%	6,030,760,000	90%	6,030,760,000	90%	29,436,377,406	Kec. Cisauk
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	3,173,085,000	100%	2,499,316,400	100%	1,652,000,000	100%	1,702,000,000	100%	1,702,000,000	100%	10,728,401,400	Kec. Gunung Kaler
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	6,569,337,349	100%	5,097,507,881	100%	6,080,000,000	100%	6,080,000,000	100%	6,080,000,000	100%	29,906,845,230	Kec. Gunung Kaler
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Jambe	100%	1,084,063,694	100%	1,244,000,000	100%	1,478,745,392	100%	1,481,472,902	100%	1,729,115,512	100%	7,017,397,500	Kec. Jambe
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Jambe	100%	4,829,641,858	100%	4,269,947,626	100%	4,489,566,029	100%	4,943,111,808	100%	5,437,422,989	100%	23,969,690,310	Kec. Jambe
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	956,346,421	100%	1,301,357,940	100%	1,484,633,602	100%	1,424,430,898	100%	1,597,014,012	100%	6,763,782,873	Kec. Jayanti

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	4,046,534,991	100%	4,620,658,957	100%	3,933,157,700	100%	4,072,773,600	100%	4,853,242,368	100%	21,526,367,616	Kec. Jayanti
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	949,667,071	100%	1,322,361,268	100%	2,433,521,650	100%	3,412,360,000	100%	3,486,000,000	100%	11,603,909,989	Kec. Kemiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	5,280,199,700	100%	6,009,322,956	100%	5,148,451,036	100%	5,462,611,036	100%	5,779,611,036	100%	27,680,195,764	Kec. Kemiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	5,883,745,245	100%	4,831,457,939	100%	4,881,694,907	100%	5,137,241,520	100%	4,748,200,359	100%	25,482,339,970	Kec. Mekar Baru
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	5,056,216,335	100%	4,104,032,439	100%	3,904,322,887	100%	3,946,987,500	100%	4,188,769,339	100%	21,200,328,500	Kec. Mekar Baru
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,948,191,500	100%	2,252,692,500	100%	3,601,737,324	100%	4,974,512,200	100%	5,471,963,420	100%	18,249,096,944	Kec. PAGEDANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	2,422,583,756	100%	2,429,265,256	100%	6,577,793,284	100%	6,770,623,000	100%	7,447,685,300	100%	25,647,950,596	Kec. PAGEDANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,247,680,000	100%	1,375,660,601	100%	1,346,545,810	100%	1,285,100,000	100%	1,346,855,000	100%	6,601,841,411	Kec. Sepatan Timur

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	3,975,597,500	100%	4,446,825,214	100%	4,871,217,514	100%	4,859,605,000	100%	4,921,500,000	100%	23,074,745,228	Kec. Sepatan Timur
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,222,372,493	100%	1,058,126,800	100%	1,617,685,149	100%	1,919,227,438	100%	1,951,824,660	100%	7,769,236,540	Kec. Sindang Jaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	4,502,157,916	100%	3,860,037,168	100%	3,880,967,605	100%	3,675,985,765	100%	4,440,568,794	100%	20,359,717,248	Kec. Sindang Jaya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Solear	100%	1,134,575,000	100%	1,208,500,000	100%	1,311,728,903	100%	2,048,000,000	100%	2,192,000,000	100%	7,894,803,903	Kec. Solear
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100%	4,110,613,673	100%	4,576,483,519	100%	4,116,579,147	100%	4,816,197,877	100%	5,185,000,000	100%	22,804,874,216	Kec. Solear
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	1,023,073,581	100%	1,100,773,581	100%	1,052,369,181	100%	1,053,273,581	100%	1,276,473,581	100%	5,505,963,505	Kec. Sukamulya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	4,419,299,118	100%	4,419,299,118	100%	4,419,299,118	100%	4,419,299,118	100%	4,419,299,118	100%	22,096,495,590	Kec. Sukamulya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	5,607,791,431	100%	5,183,008,200	100%	4,513,728,426	100%	4,722,415,000	100%	4,944,271,570	100%	24,971,214,627	Kec. Sukadiri

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100%	833,629,538	100%	946,000,000	100%	1,782,691,580	100%	1,733,100,000	100%	2,083,100,000	100%	7,378,521,118	Kec. Sukadiri
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan	100	2,698,982,426	100	4,603,061,268	100	5,916,107,998	100	6,374,496,700	100	7,163,700,000	100	26,756,348,392	Kec. Kelapa Dua
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kelapa Dua	100	5,280,199,700	100	6,009,322,956	100	10,763,950,039	100	10,923,880,000	100	11,010,000,000	100	43,987,352,695	Kec. Kelapa Dua
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	4,554,887,333	100 Persen	3,294,728,127	100 Persen	2,832,166,717	100 Persen	3,217,439,000	100 Persen	5,733,979,300	100 Persen	19,633,200,477	Kesbangpol
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		Kesbangpol

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Keberhasilan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diukur dalam berbagai indikator yang diistilahkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dengan pengukuran akumulasi pencapaian indikator program (*outcomes*) pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target pemerintah daerah yang harus dicapai yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019–2023. Target tersebut ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro yang berperan sebagai indikator utama untuk mengukur pencapaian visi dan misi kepala daerah ditunjukkan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sebelum Perubahan)

No.	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian	Transisi	Target RPJMD				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	LPE	Persen	5,84	5,84*	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3
2	Inflasi	Persen	3,5	3,5*	3,45	3,40	3,35	3,30	3,25
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,57	9,70	9,65	9,61	9,32	9,05	8,80
4	Kemiskinan	Persen	5,39	5,18	5,10	5,05	5,00	4,95	4,90
5	IPM	Nilai	70,97	71,59	71,6	71,7	71,8	71,9	72

Sumber: Hasil Perhitungan Bappeda 2018

Tabel 8.2. Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sesudah Perubahan)

No.	Uraian	Satuan	Data Awal	Target RPJMD				
	Indikator Makro		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	LPE	Persen	5,93	5,45	-3,7	3,07	5,21	5,47
2	Inflasi	Persen	3,46	3,31	1,45	3,44	2,93	2,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,7	8,91	13,06	12,14	10,99	9,98
4	Kemiskinan	Persen	5,18	5,14	6,23	7,12	7	6,5
5	IPM	Nilai	71,59	71,93	71,92	72,43	72,82	73,26

Sumber: Proyeksi tim Penyusun Perubahan RPJMD berdasarkan data dari Dokumen RPJMD 2019-2023

Tabel 8.3 Keselarasan Target Indikator Makro Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional

No.	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022						Indikator Pembangunan	RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023				
		Target						Target							Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2017	2018	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.60	5.8	5.9	6.1	6.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.70	6.00	6.20	5.80	5.95	6.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.9	-3,7	3,07	5,21	5,47
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9.81	9.43	9	8.55	8.15	Tingkat Kemiskinan (%)	5.25	5.13	5.00	5.12	5.06	5.00	Tingkat Kemiskinan (%)	5,14	6,23	7,12	7	6,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.20	4.00	3.80	3.40	3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8.69	8.45	8.20	8.19	8.03	7.84	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,91	13,06	12,14	10,99	9,98
4	Indeks Pembangunan Manusia					75.54	Indeks Pembangunan Manusia	71.35	71.77	72.2	72.75	73.21	73.68	Indeks Pembangunan Manusia	71,93	71,92	72,43	72,82	73,26
5	Rasio Gini					0.360 - 0.374	Rasio Gini	0.40	0.390	0.390	0.370	0.365	0.360	Rasio Gini	0.325	0.285	0.26	0.24	0.22
6	Penurunan Emisi GRK (%)					27.3													
7							Inflasi	4	3.7	4.20	3.70	3.70	3.70	Inflasi	3,31	1,45	3,44	2,93	2,5

Indikator utama tersebut merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang dilaksanakan OPD. Lebih lanjut, indikator kinerja program yang terukur merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya. Indikator tersebut diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019-2023 yang telah direncanakan. Dokumen ini sendiri merupakan revisi atas RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023, sehingga tahun 2018 merupakan tahun dasar, tahun 2019 dan 2020 merupakan tahun pertama dan kedua RPJMD dan tahun 2023 merupakan tahun ke lima RPJMD. Indikator-indikator kinerja daerah tersebut dituangkan dalam tabel 8.5 dan 8.7 berikut :

Tabel 8.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sebelum perubahan)

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja		Target Kinerja				
		Awal	Transisi	I	II	III	IV	V
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target
Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	Persen	70	70	72	74	76	78	80
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	69,47	69,61	70,27	70,87	71,17	71,47	71,77
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,24	8,27	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,32	5,32*	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Persen	10,57	9,70	9,65	9,61	9,32	9,05	8,80
Nilai AKIP	Nilai	61,97	61,87	65	71	73	77	81
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74,22	75,05	77	79	81	83	89
Indeks Integritas	Indeks	-	-	60	65	70	75	80
Prosentase Infrastruktur Wilayah dalam kondisi baik	Persen	84	85	87	89	91	93	95
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	-	48,90	50	52	54	56	58
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	-	20	25	30	35	40

Tabel 8.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sesudah perubahan)

No.	Indikator Saasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	70%	101,86%	148,4%	100%	100%	100%	100%
2	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,61	69,79	69,89	69,96	70,08	70,21	70,21

No.	Indikator Saasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
3	Prevalensi stunting	19%	12%	8,5%	18%	16%	14%	14%
4	Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	80%	80%	81%	86,3%	87%	88%	88%
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,25	61,54	61,53	61,88	62,05	62,11	62,11
6	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)	8,27	8,28	8,39	8.41	8.45	8.49	8,7
7	Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	2,98%	2,25%	3,69%	4,32%	5,27%	5,56%	5,56%
8	Penambahan Kunjungan wisatawan	-	11%	-75%	2%	4%	6%	6%
9	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	77,3	-27,8	20,1	5,12	5,12	5,12	5,12
10	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	63,01%	66,07	65,43	66%	68%	70%	70%
11	Persentase koperasi aktif	78,83	49,92	56,80	50,00	55,00	60,00	60,00
12	Jmlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten	25.103	16.866	15.866	16.366	16.866	17.366	17.366
13	Nilai AKIP	61,87	70,13	70,75	71,37	71,99	72,61	72,61
14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,05	83,66	86,36	81	83	89	89
15	Survey Eksternal Persepsi Korupsi /Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	-	3,39	3,59	70,11	70,56	71,01	71,01
16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	2,98	3	3,08	3,15	3,25	3,25
17	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	85	87	89	91	93	95	95
18	Presentase Sumber Air Minum Rumah Tangga	39,53	42,35	41,59	45,00	50,00	60	60

No.	Indikator Saasaran	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	*6*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
19	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak	81,21	72,89	82,23	85,89	88,89	91,89	91,89
20	IKA (Indeks Kualitas Air)	-	67,29	63,49	56,5	57	57,5	57,5
21	Persentase timbulan sampah yang ditangani	23,63	24,13	24,63	25,13	25,63	26,13	26,13
22	Indeks Risiko Bencana	175,01	163,32	146,93	135	130	125	125
23	Jumlah inovasi yang diimplementasikan	-	5	10	35	40	45	45

Sumber: Proyeksi Tim Penyusun Perubahan RPJMD berdasarkan data dari Dokumen RPJMD 2019-2023

Tabel 8.6 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5.84	5.86	5.88	5.90	5.92	5.94	5.96	Bappeda
2	Laju inflasi	Persen	3.5	3.50	3.45	3.40	3.35	3.30	3.25	Bappeda
3	PDRB per kapita	Juta Rp	33.28	34.78	36.28	37.78	39.28	40.78	42.28	Bappeda
4	Indeks Gini	Persen	0.31	0.31	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	Bappeda
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Persen	1.13	1.10	1.08	1.05	1.03	1.00	0.98	Bappeda
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	94.61	94.82	94.86	94.90	94.94	94.98	95.02	Bappeda
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,97	71,59	71,6	71,7	71,8	71,9	72	Bappeda
8	Angka melek huruf	Persen	95.92	96.76	96.78	96.80	96.82	96.84	96.84	Bappeda
9	Angka rata-rata lama sekolah	Persen	8.24	8.25	8.26	8.27	8.28	8.29	8.90	Disdik

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Angka usia harapan hidup	Persen	69.47	69.57	69.67	69.77	69.87	69.97	70.07	Bappeda
11	Persentase balita gizi buruk	Persen	0.38	0.35	0.33	0.30	0.27	0.24	0.21	Dinkes
12	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	3.14	3.12	3.1	3.08	3.06	3.04	3.02	Dinkes
13	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	84.92	85.22	85.52	85.82	86.12	86.42	86.72	Dinkes
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	65.12	66.45	63.86	63.90	63.94	63.99	64.03	Disnaker
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10.57	9.7	9.65	9.61	9.32	9.05	8.80	Disnaker
16	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	31.70	30.70	29.70	28.70	27.70	26.70	25.70	Dinsos
17	Indeks Kepuasan Masyarakat		74,22	75,05	77	79	81	83	89	Setda
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	53.05	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	61.00	Bappenda
19	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Penguatan cadangan pangan	Ton	476,047.00	526,047.00	576,047.00	626,047.00	676,047.00	726,047.00	776,047.00	DPKP
21	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	6.81	6.82	6.83	6.84	6.85	6.86	6.87	DPKP
22	Produksi sektor pertanian	Ton Gkp	477,768.00	567,768.00	657,768.00	747,768.00	837,768.00	927,768.00	1,017,768.00	DPKP
23	Pertumbuhan Industri	Persen	3.63	3.83	4.03	4.23	4.43	4.63	4.83	Disperindag
II.	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (Indikator keterbukaan ekonomi)	Persen	71.52	73.52	75.52	77.52	79.52	81.52	83.52	Bappeda
2	Rasio ketergantungan	Persen	45.06	44.86	44.66	44.46	44.26	44.06	43.86	Bappeda
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM									
3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar									
A	Pendidikan									Disdik

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	41	43.00	45.00	47.00	49.00	51.00	53.00	Disdik
	Angka partisipasi kasar :									Disdik
2	APK SD./MI	Persen	102.57	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Disdik
3	APK SMP/MTs	Persen	94.32	106.25	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Disdik
	Angka pendidikan yang ditamatkan :									Disdik
4	APT SD/MI	Persen	13.57	16.57	19.57	22.57	25.57	28.57	31.57	Disdik
5	APT SMP/MTs	Persen	6.64	7.64	8.64	9.64	10.64	11.64	12.64	Disdik
	Angka Partisipasi Murni :									Disdik
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	88.18	88.68	89.18	89.68	90.18	90.68	91.18	Disdik
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	67.09	69.09	71.09	73.09	75.09	77.09	79.09	Disdik
8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99.66	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Disdik
9	Angka partisipasi sekolah (APS)	Persen	95.69	96.19	96.69	97.19	97.69	98.19	98.69	Disdik

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SMP/MTs/Paket B									
	Angka Putus Sekolah:									Disdik
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	Disdik
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	Disdik
	Angka Kelulusan:									Disdik
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Disdik
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Disdik
	Angka Melanjutkan (AM):									Disdik
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98.05	98.06	98.06	98.07	98.07	98.08	98.08	Disdik
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	83.93	83.98	84.03	84.08	84.13	84.18	84.23	Disdik

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Nilai	0.029	0.029	0.030	0.030	0.031	0.031	0.032	Disdik
17	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Nilai	0.030	0.032	0.034	0.036	0.038	0.040	0.042	Disdik
18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Nilai	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	Disdik
19	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Nilai	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	Disdik
20	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	15.36	16.36	17.36	18.36	19.36	20.36	21.36	Disdik
21	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan	Persen	95.92	96.76	96.78	96.80	96.82	96.84	96.84	Disdik

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	laki-laki									
22	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	95.92	96.76	96.78	96.80	96.82	96.84	96.84	Disdik
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	90	97.13	97.63	98.13	98.63	99.13	99.63	Disdik
B	Kesehatan									
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Bayi	244	199	189	179	169	159	149	Dinkes
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	62	67	65	63	61	59	57	Dinkes
3	Rasio posyandu per satuan balita	Nilai	0.615	0.62	0.625	0.63	0.635	0.64	0.645	Dinkes
4	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Nilai	0.0043	0.0048	0.0053	0.0058	0.0063	0.0068	0.0073	Dinkes
5	Rasio Rumah Sakit per satuan	Nilai	0.00077	0.00082	0.00087	0.00092	0.00097	0.00102	0.00107	Dinkes

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	penduduk									
6	Rasio dokter per satuan penduduk	Persen	0.0297	0.0347	0.0397	0.0447	0.0497	0.0547	0.0597	Dinkes
7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	89.09	89.29	89.49	89.69	89.89	90.09	90.29	Dinkes
8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	94.3	94.35	94.40	94.45	94.50	94.55	94.60	Dinkes
9	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	Persen	97.4	97.45	97.50	97.55	97.60	97.65	97.70	Dinkes
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Anak	92.06	92.11	92.16	92.21	92.26	92.31	92.36	Dinkes
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	Persen	92.06	93.06	94.06	95.06	96.06	97.06	98.06	Dinkes

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TBC BTA									
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinkes
13	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	89.58	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinkes
14	Angka kejadian Malaria	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	Dinkes
15	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99.1	99.20	99.30	99.40	99.50	99.60	99.70	Dinkes
16	Cakupan puskesmas	Persen	15.72	20.72	25.72	30.72	35.72	40.72	45.72	Dinkes
17	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	16.78	18.78	20.78	22.78	24.78	26.78	28.78	Dinkes
18	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	95.3	96.8	97.3	97.8	98.3	98.8	99.3	Dinkes
19	Cakupan pelayanan nifas	Persen	92.7	93.7	94.7	95.7	96.7	97.7	98.7	Dinkes
20	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	88.2	96.8	97.8	98.8	99.8	100	100	Dinkes
21	Cakupan pelayanan	Persen	91	92	93	94	95	96	97	Dinkes

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	anak balita									
22	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	83.99	85.99	87.99	89.99	91.99	93.99	95.99	Dinkes
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
C1	Pekerjaan Umum:									
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	91.66	92.66	93.66	94.66	95.66	96.66	97.66	BMSDA
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	80	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	92.00	BMSDA
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	49.52	54.52	59.52	64.52	69.52	74.52	79.52	BMSDA
4	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	13.8	13.30	12.80	12.30	11.80	11.30	10.80	Perkim
C2	Penataan Ruang:									
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	13.33	15.33	17.33	19.33	21.33	23.33	25.33	DTRB

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	12	13	14	15	16	17	18	DLHK
3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Persen	99.06	99.11	99.16	99.21	99.26	99.31	99.36	DTRB
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
1	Rasio rumah layak huni	Persen	86.2	86.7	87.2	87.7	88.2	88.7	89.2	Perkim
F	Sosial									
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	99.92	99.93	99.94	99.95	99.96	99.97	99.98	Dinsos
3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
G	Tenaga Kerja									
1	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	12	8.94	10.00	13.00	16.00	18.00	20.00	Disnaker

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Disnaker
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2.88	2.88	2.88	3.08	3.28	3.48	3.68	DPPA
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	14	14	14	20.00	20.00	20.00	20.00	DPPA
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	21.97	22.47	22.97	23.47	23.97	24.47	24.97	DPPA
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	21.97	22.47	22.97	23.47	23.97	24.47	24.97	DPPA
5	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	1.01	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	DPPA

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	DPPA
7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	DPPA
8	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	0.98	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	DPPA
I	Pangan									
1	Ketersediaan pangan utama	Ton	476,047	596,351	716,655	766,655	816,655	866,655	916,655	DPKP
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kalori	121318	126233	131148	136,148	141,148	146,148	151,148	DPKP
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DPKP
J	Pertanahan									
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	75.4	75.40	76.40	77.40	78.40	79.40	80.40	Perkim

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	DTRB
K	Lingkungan Hidup									
1	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	23.63	23.63	24.13	24.63	25.13	25.63	26.13	DLHK
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	90.48	107.63	96.00	97	98	99.00	100.00	DKPS
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPMPD
2	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DPMPD
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	3.1	3.03	3.08	3.06	3.05	3.04	3.03	DPPKB
2	Total Fertility Rate	Persen	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.30	2.30	DPPKB

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(TFR)									
3	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Persen	39.39	48.48	57.57	62.90	68.24	73.57	78.90	DPPKB
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	45	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	DPPKB
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1.53	1.53	1.53	1.52	1.52	1.51	1.50	DPPKB

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	69.21	69.63	70.05	70.10	70.15	70.20	70.25	DPPKB
7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Tahun	39.6	39.60	39.60	40.32	41.04	41.77	42.49	DPPKB
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	6.92	6.71	6.50	6.36	6.22	6.08	5.93	DPPKB
9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmet need)*	Persen	15.44	15.44	15.44	15.41	15.38	15.35	15.32	DPPKB
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	24.84	24.75	24.66	24.61	24.56	24.51	24.46	DPPKB

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	4.85	9.70	14.55	15.22	15.88	16.55	17.22	DPPKB
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	84.69	86.17	87.35	87.38	87.40	87.43	87.46	DPPKB
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	90.05	84.50	97.96	97.98	98.01	98.03	98.05	DPPKB
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	834.83	91.05	96.07	96.17	96.28	96.38	96.49	DPPKB
15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	6.9	13.80	20.70	21.37	22.03	22.70	23.37	DPPKB
16	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	27.59	55.18	82.77	83.44	84.10	84.77	85.44	DPPKB

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	0.15	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DPPKB
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	92.6	95.44	98.28	98.34	98.40	98.45	98.51	DPPKB
19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	DPPKB

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota	Persen	216.24	432.48	648.72	649.39	650.05	650.72	651.39	DPPKB
21	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	Persen	150.32	300.64	450.96	451.63	452.29	452.96	453.63	DPPKB
22	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	73.12	146.24	219.36	220.03	220.69	221.36	222.03	DPPKB

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	DPPKB
24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	93.62	93.70	93.80	93.90	93.90	93.90	93.91	DPPKB
25	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	32.35	64.70	97.05	97.72	98.38	99.05	99.72	DPPKB
26	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Usia Rata-Rata	18	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	DPPKB
27	Persentase	Persen	0.28	0.56	0.84	2.84	4.84	6.84	8.84	DPPKB

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes									
O	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									
1	Persentase koperasi aktif	Persen	81.13	81.63	82.13	82.63	83.13	83.63	84.13	Dinkop
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	93.85	93.88	93.91	93.94	93.97	94.00	94.03	Dinkop
P	Penanaman Modal									
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	313	1,159	1,182	1,206	1,230	1,255	1,280	DPMPTSP
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	12,032	17,743	18,311	18,933	19,615	20,360	21,175	DPMPTSP
3	Kenaikan / penurunan Nilai	Persen	61.0	9.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	DPMPTSP

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Realisasi PMDN (milyar rupiah)									
Q	Kebudayaan									
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	40	40	45	50	55	60	65.00	Disporabudpar
2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	42	57	62	67	72	77	82.00	Disporabudpar
	Cakupan Pembinaan Olahraga	persen	38	38	38	38	38	38	38.00	Disporabudpar
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	persen	0	20	20	30	40	50	60.00	Disporabudpar
	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	16	41	18	43	20	45	22.00	Disporabudpar
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	15	15	151	15	15	15	15.00	Disporabudpar
	Kunjungan wisata	Persen	30	40	50	60	70	80	90.00	Disporabudpar
R	Perpustakaan									
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per	Persen	5.77	10.77	15.77	20.77	25.77	30.77	35.77	DPA

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	tahun									
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	55	60	65	70	75	80	85	DPA
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buah	58,120	60,120	62,120	64,120	66,120	68,120	70,120	DPA
S	Kearsipan									
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	49.2	59.20	69.20	79.20	89.20	99.20	109.20	DPA
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	DPA
T	Pariwisata									
1	Kunjungan wisata	Persen	45,122	50,122	55,122	60,122	65,122	70,122	75,122	Disporabudpar
U	Pertanian									
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	6.81	6.82	6.83	6.84	6.85	6.86	6.87	DPKP

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	Perdagangan									
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar	14,492,070	15,250,730	16,009,391	17,009,391	18,009,391	19,009,391	20,009,391	Disperindag
W	Perindustrian									
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	13.33	18.33	23.33	28.33	33.33	38.33	43.33	Disperindag
X	Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi perikanan	Ton	94.03	99.03	104.03	109.03	114.03	119.03	124.03	Diskan
2	Konsumsi ikan	Persen	100.8	101.80	102.80	103.80	104.80	105.80	106.80	Diskan
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	34.47	38.47	42.47	46.47	50.47	54.47	58.47	Diskan
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	21.47	23.47	25.47	27.47	29.47	31.47	33.47	Diskan
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	99.75	99.78	99.81	99.84	99.87	99.90	99.93	Diskan
6	Nilai tukar nelayan	Persen	119.68	121.68	123.68	125.68	127.68	129.68	131.68	Diskan
Y	Perencanaan Pembangunan									

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	96.46	99.07	100	100	100	100	100	Bappeda
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda
Z	Keuangan									
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2	Persentase SILPA	Persen	18.9	18.85	18.80	18.75	18.70	18.65	18.60	BPKAD
3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	18.9	18.85	18.80	18.75	18.70	18.65	18.60	BPKAD
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0.63	0.58	0.53	0.48	0.43	0.38	0.33	BPKAD
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	27.02	27.07	27.12	27.17	27.22	27.27	27.32	BPKAD
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	19.45	19.55	19.65	19.75	19.85	19.95	20.05	BPKAD

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	1.94	2.04	2.16	2.16	2.17	2.17	2.18	BPKAD
8	Belanja Langsung	Persen	65.99	67.15	68.31	68.36	68.41	68.46	68.51	BPKAD
9	Belanja Tidak Langsung	Persen	34.01	32.85	31.69	31.64	31.59	31.54	31.49	BPKAD
10	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	9.45	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	BPKAD
11	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
AA	Pengawasan									
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	75.54	77.54	79.54	81.54	83.54	85.54	87.54	Inspektorat
AB	Sekretariat Dewan									
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ya/tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Setwan

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ya/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen	ya/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Setwan

NO	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi		Target					OPD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD									

Tabel 8.7 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sesudah Perubahan)

Uraian	Satuan	Data Awal	Target					OPD
Indikator Kinerja		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Pertumbuhan PDRB	Persen	5,8	5,58	-3,7	3,07	5,21	5,47	Bappeda
laju Inflasi	Persen	3,46	3,31	1,45	3,44	2,93	2,5	Bappeda
PDRB per kapita	Rupiah	35,16	36,93	34,79	35,85	37,09	38,24	Bappeda
Indeks Gini	Indeks	0,342	0,325	0,285	0,26	0,24	0,22	Bappeda
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	1,08	1,05	1,43*	1,21	1,25	1,3	Bappeda
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	94,82	94,86	93,77	94,36	94,85	95,22	Bappeda
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,59	71,93	71,92	72,43	72,82	72,82	Bappeda
Angka melek huruf	Persen	98,9	99,24	97,62	97,24	98,68	99,11	Dinas Pendidikan
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,27	8,28	8.39	8.61	8,45	8,49	Dinas Pendidikan
Angka usia harapan hidup	Tahun	69,64	69,79	69,89	69,93	70,08	70,21	Dinas Kesehatan
Persentase balita gizi buruk	Persen	0,33	0,29	1,1	0,83	0,56	0,37	Dinas Kesehatan

Uraian	Satuan	Data Awal	Target					OPD
Indikator Kinerja		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prevalensi balita gizi kurang	Persen	2,51	2,28	3,9	3,41	2,89	2,53	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	85,22	85,45	85,82	86,12	86,42	86,72	Dinas Kesehatan
Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	63,5	66,69	66,64	66,64	66,93	67,67	Dinas Tenaga Kerja
Tingkat pengangguran terbuka	Persen	9,7	8,91	13,06	12,14	10,99	9,98	Dinas Tenaga Kerja
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	30,7	30,7	41,19	35,95	32,8	29,65	Dinas Sosial
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,45	83,66	86,36	88,82	91,39	93,91	Bagian Otala
Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	52,58	48,07	46,66	48,07	49,85	51,44	Bapenda
Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
Penguatan cadangan pangan	Ton	25.700	12.800	25.000	25.501,61	26.635,23	27.452,85	Dinas Pertanian dan KP
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	5,98	5,79	6,23	6,36	6,64	6,84	Dinas Pertanian dan KP
Produksi sektor pertanian	Ton	526.047,00	419.941,00	438.060,00	438.607,58	439.846,64	440.742,83	Dinas Pertanian dan KP
Pertumbuhan Industri	Persen	2,66	3,24	-8,17	2,95	2,95	3,05	Dinas Perindustriandan Perdagangan
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	Persen	73,53	73,52	34,23*	53,88	68,62	77,21	Dinas Perindustriandan Perdagangan
Rasio ketergantungan (Dependency Ratio)	Persen	44,86	44,86	44,46*	44,26	44,06	43,86	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2018	Target 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	OPD
								Sipil
ASPEK PELAYANAN UMUM								
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
PENDIDIKAN								
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	43	40,3	47*	38,97	51	53	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	Persen	86,81	110,56	109,49	100	100	100	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi kasar SMP/MTS/Paket B	Persen	96,27	92,57	90,64	92,57	93,56	95,02	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SD/MI	Persen	19,57	22,57	25,57	28,57	31,57	34,57	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SMP/MTs	Persen	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64	13,64	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	95,84	98,98	98,87	99,89	100	100	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	79,06	81,62	81,56	82,81	83,41	84,33	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,76	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	96,69	97,19	97,69	98,19	98,69	99,19	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,07	0,06	0,04	0,03	0,03	0,02	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	98,06	96,69	97,19	97,63	98,09	98,54	Dinas Pendidikan

Uraian	Satuan	Data Awal	Target					OPD
Indikator Kinerja		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	83,98	84,03	84,08	84,13	84,18	84,23	Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Nilai	0,034	0,036	0,038	0,04	0,04	0,05	Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Nilai	0,034	0,036	0,038	0,04	0,04	0,05	Dinas Pendidikan
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Nilai	0,003	0,004	0,004	0	0	0,01	Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Nilai	0,003	0,004	0,004	0	0	0,01	Dinas Pendidikan
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Nilai	17,36	18,36	19,36	19,36	20,36	21,36	Dinas Pendidikan
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	96,76	96,8	96,82	96,85	96,88	96,9	Dinas Pendidikan
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	96,76	96,8	96,82	96,85	96,88	96,9	Dinas Pendidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	90	92,5	92,7	93,65	94,22	94,98	Dinas Pendidikan
KESEHATAN								
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Bayi	247	227	203	181	158	135,5	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	44	29	38	35	38	38	Dinas Kesehatan
Rasio posyandu per satuan balita	Nilai	0,63	0,6	0,6	0,59	0,58	0,57	Dinas Kesehatan
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk	Nilai	0.0048	0,138	0,157	0,16	0,164	0,168	Dinas Kesehatan

Uraian	Satuan	Data Awal	Target					OPD
Indikator Kinerja		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Nilai	0,0066	0,0067	0,0062	0,0063	0,0064	0,0066	Dinas Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk	Nilai	0,035	0,022	0,026	0,031	0,036	0,043	Dinas Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	93,2	91,4	90,7	100	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	95,7	99,6	100,25	100	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	98,2	98,2	90,9	93,46	96,9	99,91	Dinas Kesehatan
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	92,11	98,8*	94,32	95,08	96,07	98,01	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100*	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Penderita diare yang ditangani	Persen	86,32	96,61	70,35	100	100	100	Dinas Kesehatan
Angka kejadian Malaria	Kasus	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi	Persen	93,1	93,6	99,9	100	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan puskesmas	Persen	20,72	20,72	24,86	28,59	32,88	37,82	Dinas Kesehatan
Cakupan pembantu puskesmas	Persen	18,78	18,78	19,72	20,7	21,74	22,83	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	96,1	98,2	97,7	100	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan nifas	Persen	93,4	97,5	99,4	100	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	76,9	80,5	80,5	100	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan anak balita	Persen	98,2	100	94,3	100	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	85,99	100,69	87,99	89,99	91,99	93,99	Dinas Kesehatan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN								

Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2018	Target 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	OPD
RUANG								
PEKERJAAN UMUM								
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	75,21	88,54	87,55	88,78	89,41	90,33	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	92,6	91,75	93,93	94,6	95,73	96,63	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	54,52	59,52	64,52	69,52	74,52	79,52	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase areal kawasan kumuh	Persen	13,3	13,3	33,82	31,11	29,56	28,97	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
PENATAAN RUANG								
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	15,33	15,33	96,91	97,61	98,17	98,59	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	13	16,61	16,61*	17,05	17,06	17,06	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	99,11	99,11	99,11*	99,11	99,11	99,11	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
Rasio rumah layak huni	Persen	92,6	98,17	94,45*	94,01	93,33	94,99	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
SOSIAL								
Persentase PMKS yang memperoleh	Persen	99,93	99,93	99,99*	99,95	99,96	99,97	Dinas Sosial

Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2018	Target 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	OPD
bantuan sosial								
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR								
TENAGA KERJA								
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	8,94	36,1	14,64*	16,97	17,73	18,88	Dinas Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	100	100	100*	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,88	2,97	54,7	55,2	55,6	55,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	14	16	14	14,4	14,56	14,68	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	22,47	23,18	22,72*	22,83	24,01	24,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	22,47	23,15	7,64*	16,7	21,07	21,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2018	Target 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	OPD
								Perindungan Anak
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	101	108	100*	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	100	101	100*	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	100	100	99*	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	99	100	100*	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
PANGAN								
Ketersediaan pangan utama	Ton	596.351	429.941	448.491*	467.855,00	488.048,00	5091.16	Dinas Pertanian dan KP
Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kalori	126.233	131.148	136.148	141.106	146.084	151.052	Dinas Pertanian dan KP

Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2018	Target 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	OPD
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian dan KP
PERTANAHAN								
Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	75,4	76,4	11,35	16,35	21,35	26,35	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100	100*	100	100	100	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman
LINGKUNGAN HIDUP								
Timbulan sampah yang ditangani	Persen	23,63	24,13	24,63	25,13	25,63	26,13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	96,89	96,23	85,52	91,21	93,72	96,76	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2018	Target 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	OPD
								Desa
Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	91,86*	93,11	93,83	93,86	Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	3,01	2,93	1,26	2,97	2,83	2,4	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,32	2,32	2,552*	2,4	2,42	2,46	
Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Persen	48.48	57.57	62.90*	68.24	73.57	78.90	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	45	45	45	45	45	45	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1,53	1,53	1,52	1,52	1,51	1,5	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	69,63	70,05	57,79*	68,36	68,74	69,13	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Uraian	Satuan	Data Awal	Target					OPD
Indikator Kinerja		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Tahun	39,6	39,6	46,53*	41,91	40,18	40,32	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	6,71	6,5	6,36	6,19	6,03	5,86	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	15,44	15,44	26,44*	21,47	18,72	18,57	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	24,75	24,66	24,61	24,54	24,48	24,42	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	9,7	14,55	15,22	16,05	16,8	17,59	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	86,17	87,35	87,38	87,99	88,3	88,76	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	84,5	97,96	97,98	98,65	99	99,51	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	91,05	96,07	96,17	96,94	97,37	97,97	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	13,8	20,7	21,37	24,02	25,68	27,83	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Target					OPD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	55,18	82,77	83,44	86,27	88,01	90,3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	95,44	98,28	98,34	98,46	98,64	98,88	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	42	42	42	42	42	42	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	432,48	648,72	649,39	650,06	650,73	651,4	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	Persen	300,64	450,96	451,63	452,3	452,97	453,64	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	146,24	219,36	220,03	220,7	221,37	222,04	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan penyediaan Informasi Data	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas

Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2018	Target 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	OPD
Mikro Keluarga di setiap desa								Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	93,7	93,8	93,9	94	94,1	94,2	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	64,7	97,05	97,72	98,39	99,06	99,73	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Rata-rata usia kawin pertama wanita	Usia Rata-Rata	20,12	19,6	18	16,94	15,61	14,42	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0,56	0,84	2,84	3,64	4,62	5,24	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
Persentase koperasi aktif	Persen	86,63	68,32	58,8	60,77	64,63	69,25	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	93,88	93,91	93,94	93,97	94	94,03	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
PENANAMAN MODAL								
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	1716	2776	3951	5.069	6.215	7.347	DPMPTSP
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	21.333,90	15.403,42	18.500,13	19.917	21.271	22.657	DPMPTSP

Uraian	Satuan	Data Awal	Target					OPD
Indikator Kinerja		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	26,85	-5,89	58,05	7,66	6,8	6,51	DPMPTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	40	45	50	55	60	65	Disporabudpar
Persentase wirausaha muda	Persen	57	62	5	29	63	69	Disporabudpar
Cakupan pembinaan olahraga	Persen	38	38	0	38	38	38	Disporabudpar
Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	20	20	0	20	22	31	Disporabudpar
Jumlah atlet berprestasi	Orang	41	18	0	20	22	24	Disporabudpar
KEBUDAYAAN								
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	15	15	2*	11	13	15	Disporbudpar
PERPUSTAKAAN								
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	304.358	335.707	72.256	101.158,40	132.507,40	145.758,14	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	60.000	68.000	111.363	131.908,20	157.471,48	175.914,87	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buah	60.120	68.000	111.363	131.860,20	157.404,28	175.820,79	Dinas Perpustakaan dan Arsip
KEARSIPAN								
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	66	63	64,5*	65,25	66	66,75	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1	1*	1	1	2	Dinas

Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2018	Target 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	OPD
								Perpustakaan dan Arsip
LAYANAN URUSAN PILIHAN								
PARIWISATA								
Kunjungan wisata	Kunjungan	50.122	55.122	11.024*	27.129	31.092	48.472	Disporbudpar
PERTANIAN								
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	5,98	5,79	6,23	6,36	6,64	6,84	Dinas Pertanian dan KP
PERDAGANGAN								
Ekspor Bersih Perdagangan	Miliar Rupiah	14,492,070	80.430.762.971	78.410.616.950	83.881.186.956	85.606.398.949	89.204.289.949	Dinas Perindustriandan Perdagangan
PERINDUSTRIAN								
Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	18,33	20	4,94*	12,92	13,9	14,02	Dinas Perindustriandan Perdagangan
KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Produksi perikanan	Ton	90,03	98,7	100,14	21.005,96	21.109,69	21.213,43	Dinas Perikanan
Konsumsi ikan	Persen	101,8	100,06	100,25	1.089,42	1.132,06	1.174,88	Dinas Perikanan
Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	38,47	24,14	28,8	33,64	38,38	43,17	Dinas Perikanan
Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan	Persen	23,47	5,56	7,18	15,33	20,21	26,72	Dinas Perikanan
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	99,78	95,29	96,73	97,73	98,23	98,63	Dinas Perikanan
Nilai tukar nelayan	Persen	121,68	109,65	98,73	110,21	110,48	116,36	Dinas Perikanan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN								

Uraian	Satuan	Data Awal	Target					OPD
Indikator Kinerja		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	99.07	100	100	100	100	100	Bappeda
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	Bappeda
KEUANGAN								
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	10,73%	13,23%	11,51%	8,48%	4,66%	0,00%	BPKAD
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0,58	0,58	0,48	0,43	0,38	0,33	BPKAD
Belanja pendidikan (20%)	Juta Rupiah	872.472,58	744.540,23	653.110,62	614.192,02	606.290,11	593.954,87	BPKAD
Belanja kesehatan (10%)	Juta Rupiah	436.236,29	372.270,12	326.555,31	307.096,01	303.145,06	296.977,43	BPKAD
Perbandingan antara belanja operasi dengan belanja modal	Rasio	2,02	2,83	3,58	3,32	3,19	3,12	BPKAD
Belanja Operasi	Persen	66,76%	73,88%	73,25%	76,53%	75,85%	75,41%	BPKAD
Belanja Modal	Persen	33,10%	26,08%	20,44%	23,05%	23,75%	24,20%	BPKAD
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	9,83%	11,36%	14,24%	14,01%	13,90%	13,77%	BPKAD

Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2018	Target 2019	 2020	 2021	 2022	 2023	OPD
Penetapan APBD	n.a	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
PENGAWASAN								
Persentase tindak lanjut temuan	Persen	77,54	90	81,54	83,54	85,54	87,54	Inspektorat
SEKRETARIAT DEWAN								
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD

*Merupakan angka proyeksi

BAB IX
PENUTUP

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2022 dan tahun 2023, di bawah kepemimpinan Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang Periode Tahun 2019-2023.

Selanjutnya ditetapkan Pedoman Transisi pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Masa berlaku Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah terhitung mulai setelah di sahkannya menjadi Perda.
2. Pada Tahun ke lima (ke-5) setelah periode Bupati masa bakti 2019-2023 berakhir, ditetapkan satu tahun transisi, yaitu Tahun 2024 yang memuat penetapan indikasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang lima tahun selanjutnya.
3. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2019-2023, maka dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Tangerang, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 dengan sebaik-baiknya serta masa transisi tahun 2024;
b. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,serta program pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
c. Pemerintah Kabupaten Tangerang wajib menjamin konsistensi antara Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
d. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang wajib menjamin konsistensi antara dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023, dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang.
e. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 ke dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

A. ZAKI ISKANDAR